

**ANALISIS DURASI MENGGANGGUR TENAGA KERJA
TERDIDIK DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF
PENAWARAN TENAGA KERJA**

DISERTASI



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Disertasi : ANALISIS DURASI MENGGANGGUR TENAGA KERJA
TERDIDIK DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF
PENAWARAN TENAGA KERJA
Nama Mahasiswa : JOLIANIS
Nomor Pokok : 1630512001
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Disertasi telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia ujian akhir
Doktor Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Andalas dan
dinyatakan lulus pada tanggal 15 Desember 2020.

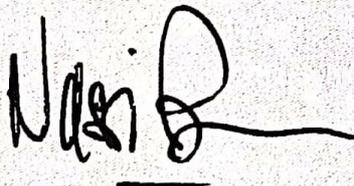
Menyetujui

1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Adrimas, SE., MS

Ketua



Prof. Dr. Nasri Bachtiar, SE., MS

Anggota



Dr. Fajri Muharja, SE., M.Si

Anggota

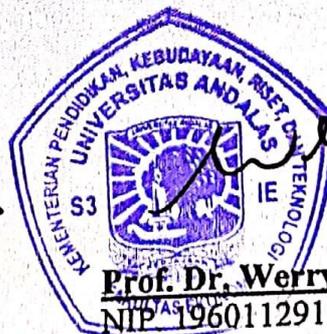
2. a.n. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi/
Sekretaris

3. Ketua Program Studi S3 Ekonomi



Dr. Fajri Muharja, SE., M.Si

NIP. 197601042002121001



Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE., MA

NIP. 196011291986031003

HALAMAN PENGHARGAAN



*Kupersembahkan untuk
Istriku tersayang Nani Sulastri
Anaku Fathan Maulana, Daffa Shadiq Althaf, Muhammad Alqeano*

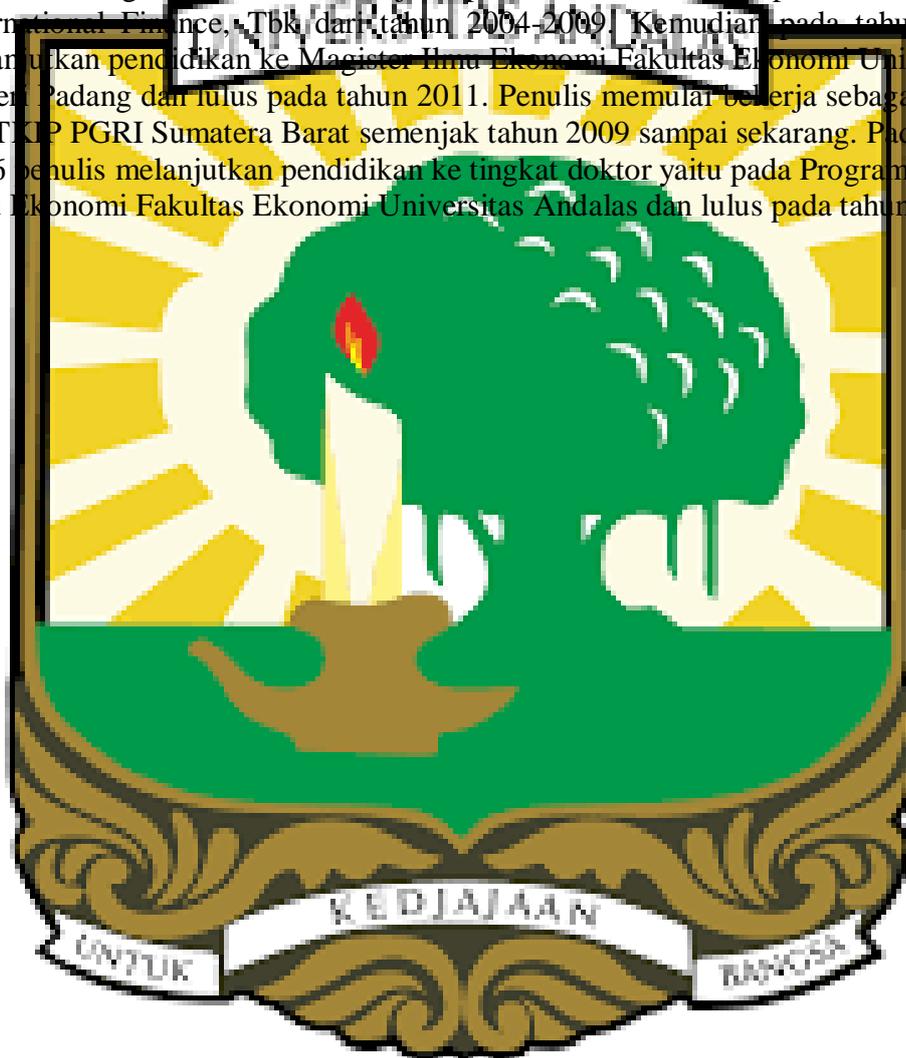
PERNYATAAN

Dengan ini saya, nama Jolianis yang beralamat di Perumahan Citra Bungo Pasang Blok G Nomor 6 Sungai Taruang Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat, menyatakan bahwa dalam disertasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.



RIWAYAT HIDUP

Jolianis lahir di Lambah Dareh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 12 September 1980. Orang tua adalah Sidi Arlinis dan Yusnidar. Penulis memulai pendidikan dasar di SD Negeri 41 Malabur Kabupaten Agam dan melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kabupaten Agam dan seterusnya melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 2 Lubuk Basung. Penulis menempuh pendidikan sarjana di jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Setelah tamat sarjana penulis mulai bekerja pada PT. Federal International Finance, Tbk, dari tahun 2004-2009. Kemudian pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan ke Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan lulus pada tahun 2011. Penulis memulai bekerja sebagai dosen di STKIP PGRI Sumatera Barat semenjak tahun 2009 sampai sekarang. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat doktor yaitu pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2020.



ANALISIS DURASI MENGGANGGUR TENAGA KERJA TERDIDIK DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF PENAWARAN TENAGA KERJA

Oleh : Jolianis (1630512001)

(Dibawah bimbingan : Prof. Dr. Adrimas, SE., MS,
Prof. Dr. Nasri Bachtiar, SE., MS, Dr. Fajri Muharja, SE., M.Si)

Abstrak

Salah satu karakteristik pengangguran di Indonesia adalah tingginya jumlah pengangguran terdidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis durasi pengangguran tenaga kerja di Indonesia dari perspektif penawaran tenaga kerja pada tingkat nasional, tingkat pulau dan tingkat provinsi. Variabel terikat adalah pengangguran terdidik dan durasi menganggur, sedangkan variabel bebas adalah tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga, dan wilayah tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakeernas). Model penelitian dikembangkan dari *job search theory* yang diuji dengan analisis regresi logistik. Temuan penelitian ini adalah: 1) Pada tingkat nasional, pengangguran terdidik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, dan status perkawinan, sedangkan kedudukan dalam rumah tangga dan wilayah tempat tinggal tidak mempengaruhi pengangguran terdidik. Tenaga kerja terdidik berpeluang besar menganggur apabila berada di wilayah pulau Jawa dan berpeluang besar dapat bekerja apabila berada di pulau Maluku. Durasi menganggur dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, status perkawinan dan wilayah tempat tinggal, sedangkan jenis kelamin dan kedudukan dalam rumah tangga tidak mempengaruhi durasi menganggur. Pengangguran terdidik akan menganggur lebih lama apabila berada di wilayah pulau Jawa dan akan menganggur lebih singkat apabila berada di pulau Maluku. 2) Pada tingkat pulau, secara umum pengangguran terdidik dipengaruhi tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan status perkawinan, namun pada wilayah Papua terjadi pengaruh negative tingkat pendidikan terhadap pengangguran terdidik, dimana tamatan perguruan tinggi memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan SMA/ sederajat. Durasi menganggur pada masing-masing pulau di Indonesia pada umumnya dipengaruhi tingkat pendidikan dan pelatihan kerja, namun pada wilayah Papua terjadi pengaruh yang negative tingkat pendidikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang tamat perguruan tinggi memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan SMA/ sederajat. 3) Pada tingkat provinsi diketahui bahwa secara umum pengangguran terdidik dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur dan status perkawinan. Pada provinsi Papua Barat terjadi pengaruh negative tingkat pendidikan terhadap pengangguran terdidik, dimana tamatan perguruan tinggi memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan SMA/ sederajat.

Kata Kunci : *Pengangguran Terdidik, Durasi Menganggur, Job Search Theory*

UNEMPLOYMENT DURATION ANALYSIS OF LABOR EDUCATED IN INDONESIA FROM THE LABOR SUPPLY PERSPECTIVE

By: Jolianis (1630512001)

(Under the Supervision of: Prof. Dr. Adrimas, SE., MS,
Prof. DR. Nasri Bachtiar, SE., MS, Dr. Fajri Muharja, SE., M.Si)

Abstract

One of the characteristics of unemployment in Indonesia is the high number of educated unemployed. This study aims to analyze the duration of unemployed labor in Indonesia from the perspective of the supply of labor at the national, island and provincial levels. The dependent variable is educated unemployment and duration of unemployment, while the independent variables are level of education, job training, work experience, age, gender, marital status, household position, and area of residence. This study uses secondary data, namely the National Labor Force Survey. The research model was developed from job search theory which was tested by logistic regression analysis. The findings of this study are: 1) At the national level, educated unemployment is influenced by the level of education, job training, work experience, age, gender and marital status, while the position in the household and the area of residence does not affect educated unemployment. Educated workers have a great opportunity to be unemployed if they are in the Java island region and have a great opportunity to work if they are on the island of Maluku. The duration of unemployment is influenced by the level of education, job training, work experience, age, marital status and area of residence, while gender and household position do not affect the duration of unemployment. Uneducated unemployed will be unemployed longer if they are in the island of Java and will be unemployed shorter if they are on the island of Maluku. 2) At the island level, educated unemployment is generally influenced by the level of education, job training, work experience and marital status, but in the Papua region there is a negative influence on the level of education on educated unemployment, where college graduates have a greater chance of being unemployed compared to high school graduates/equal. The duration of unemployment in each island in Indonesia is generally influenced by the level of education and job training, however in the Papua region there is a negative effect on the level of education on the duration of unemployment, the educated unemployed who have graduated from college have a longer chance of being unemployed compared to high school graduates/equivalent. 3) At the provincial level, it is known that in general educated unemployment is influenced by variables of education level, job training, work experience, age and marital status. In the province of West Papua, there is a negative effect on the level of education on educated unemployment, where college graduates have a greater chance of being unemployed compared to high school graduates/equivalent.

Keywords: Educated Unemployment, Duration of Unemployment, Job Search Theory

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia serta hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan pada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulisan disertasi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Doktor Ekonomi (S3) Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan baik materil maupun moril dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Prof. Dr. H. Adrimas, SE., MS sebagai promotor yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam penulisan disertasi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis tujukan kepada bapak Prof. Dr. H. Nasri Bachtiar, MS dan bapak Dr. Fajri Muhajir, MS sebagai ko-promotor yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam penulisan disertasi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

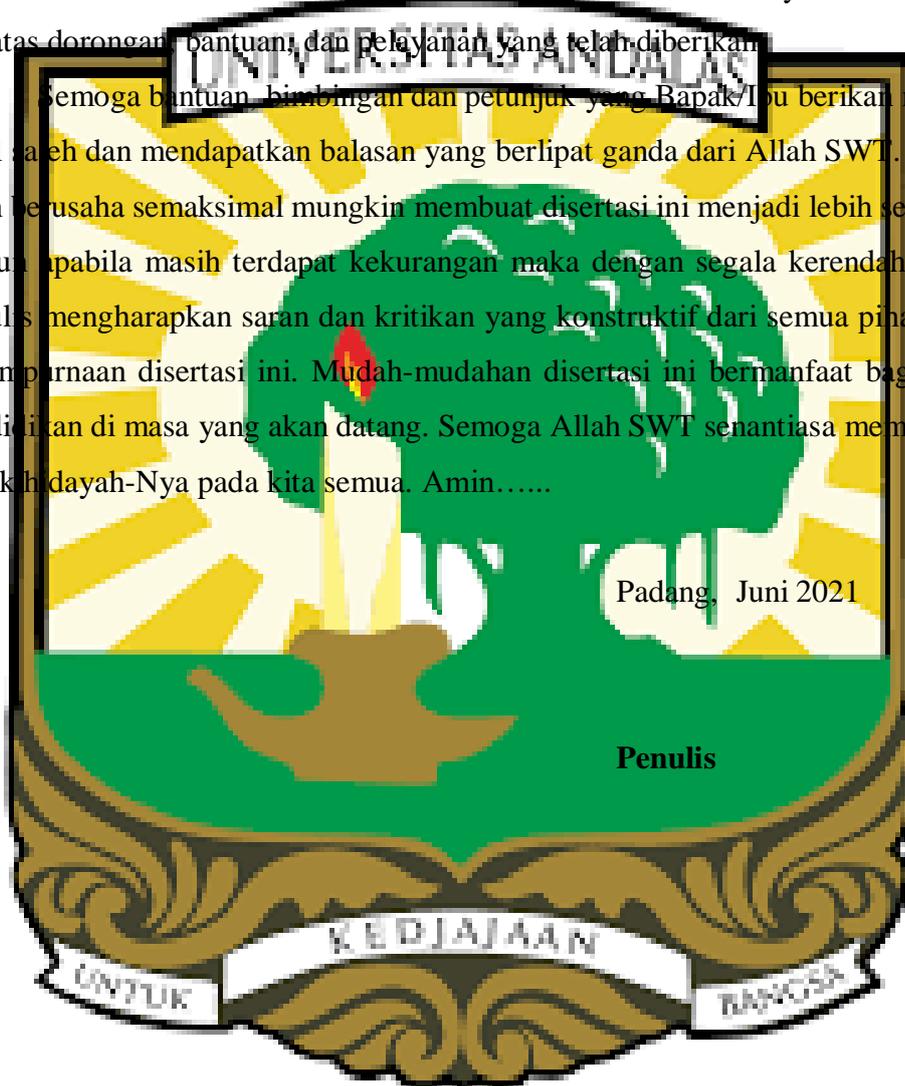
1. Bapak Dr. Efa Yonedi, SE, MPPM, Ak. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan disertasi ini
2. Ibu Indrawari, SE., MA., Ph.D sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan disertasi ini
3. Bapak Prof. Dr. H. Werry Darta Fatur, SE, MA sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan disertasi ini
4. Bapak Dr. Watekhi, S.Si., MSE sebagai penguji eksternal telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan disertasi ini

5. Bapak Prof. Dr. Elfindri, SE., MA. , Bapak Dr. Fery Andrianus, SE., M.Si, Ibu Delfia Tanjung Sari, SE, M.Si, Ph. D sebagai dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan disertasi ini
6. Staf, karyawan, dan dosen pada Program Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas penulis aturkan banyak terima kasih atas dorongan, bantuan, dan pelayanan yang telah diberikan

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin membuat disertasi ini menjadi lebih sempurna namun apabila masih terdapat kekurangan maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan disertasi ini. Mudah-mudahan disertasi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik hidayah-Nya pada kita semua. Amin.....

Padang, Juni 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGHARGAAN	ii
PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kebaharuan Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PENDEKATAN TEORI DAN STUDI LITERATUR	
A. Pendekatan Teori.....	13
1. Teori Modal Manusia.....	13
2. Teori Ketenagakerjaan	21
a. Permintaan Tenaga Kerja	24
b. Penawaran Tenaga Kerja	28
3. Potensi Kemampuan Tenaga Kerja.....	32
4. Teori Pengangguran	37
5. Pengangguran Terdidik	45
a. Pengertian Pengangguran Terdidik	45
b. Faktor Penentu Pengangguran Terdidik	49
6. Durasi Menganggur (<i>Duration of Unemployment</i>).....	61
a. Pengertian Durasi Menganggur	61
b. Faktor Penentu Durasi Menganggur.....	64
7. Tingkat Pengangguran Regional.....	69
8. Pembangunan Ekonomi Wilayah	72
9. Model <i>Job Search Theory</i>	75
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	79
C. Kerangka Konseptual	89
D. Hipotesis Penelitian	90
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pembentukan Model.....	92
B. Jenis Penelitian.....	96

C.	Populasi dan Sampel.....	97
1.	Populasi	97
2.	Sampel.....	97
D.	Jenis dan Sumber Data	99
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	99
F.	Gambaran Umum Sakernas	99
G.	Teknik Analisis Data	100
1.	Analisis Deskriptif	100
2.	Analisis Regresi Logistik	101
H.	Defenisi Operasional Variabel Penelitian	104

BAB IV KONDISI PEREKONOMIAN DAN KETENAGAKERJAAN

A.	Kondisi Perekonomian Indonesia	107
1.	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan	107
2.	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	112
3.	PDB Perkapita Indonesia	114
4.	Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Provinsi di Indonesia	115
5.	Investasi di Indonesia.....	121
B.	Kondisi Kependudukan Indonesia	124
1.	Jumlah Penduduk Indonesia	124
2.	Distribusi Persentase dan Kepadatan Penduduk.....	126
3.	Proyeksi Penduduk Indonesia.....	128
C.	Kondisi Pendidikan di Indonesia	129
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	129
2.	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	131
D.	Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia.....	133
1.	Pasar Tenaga Kerja Indonesia	133
2.	Indikator Ketenagakerjaan Indonesia	135
3.	Variasi Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia.....	140
4.	Karakteristik Penduduk Bekerja di Indonesia	143
E.	Kondisi Pengangguran di Indonesia	147
1.	Kondisi Pengangguran Terbuka di Indonesia	147
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur	149
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal	150
4.	Keterkaitan Struktur Perekonomian dengan Pengangguran... ..	150
5.	Kondisi Pengangguran Terdidik di Indonesia	159

F. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Pengangguran.....	163
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) (2009-2014)	163
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) (2007-sekarang).....	170
3. Balai Latihan Kerja.....	176

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Pengangguran Terdidik di Indonesia.....	179
B. Faktor Penentu Pengangguran Terdidik.....	184
1. Tingkat Nasional.....	184
2. Tingkat Pulau.....	193
3. Tingkat Provinsi	218
C. Faktor Penentu Durasi Menganggur.....	220
1. Tingkat Nasional.....	220
2. Tingkat Pulau.....	227
D. Pengujian Hipotesis Penelitian.....	248
E. Pembahasan Hasil Penelitian	254
1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terdidik.....	254
2. Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik.....	256
3. Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik.....	257
4. Pengaruh Umur Terhadap Pengangguran Terdidik	258
5. Pengaruh Gender Terhadap Pengangguran Terdidik.....	259
6. Pengaruh Satus Perkawinan Terhadap Pengangguran Terdidik.....	261
7. Pengaruh Kedudukan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pengangguran Terdidik	262
8. Pengaruh Wilayah Tempat Tinggal Terhadap Pengangguran Terdidik	263
9. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Durasi Menganggur	263
10. Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Durasi Menganggur ...	265
11. Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Durasi Menganggur	266
12. Pengaruh Umur Terhadap Durasi Menganggur	267
13. Pengaruh Gender Terhadap Durasi Menganggur	268
14. Pengaruh Satus Perkawinan Terhadap Durasi Menganggur	269
15. Pengaruh Kedudukan Dalam Rumah Tangga Terhadap Durasi Menganggur	270
16. Pengaruh Wilayah Tempat Tinggal Terhadap Durasi Menganggur	271

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan274
B. Implikasi Penelitian275
C. Keterbatasan Penelitian281

DAFTAR PUSTAKA.....282



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Angkatan Kerja Pada Sakernas Agustus 2017 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	97
Tabel 2.	Data Sampel Penelitian Berdasarkan Provinsi.....	98
Tabel 3.	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	105
Tabel 4.	PDB ADHK Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017	107
Tabel 5.	PDB ADHB Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017	112
Tabel 6.	Produk Domestik Bruto per Kapita Tahun 2013-2017.....	114
Tabel 7.	PDRB ADHK Provinsi Se Indonesia Periode 2010-2018.....	116
Tabel 8.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se Indonesia Periode 2010-2018	119
Tabel 9.	Data Investasi PMDN Menurut Provinsi di Indonesia 2016-2018	121
Tabel 10.	Data Realisasi PMA Menurut Provinsi Periode 2016-2018.....	123
Tabel 11.	Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 1971-2017.....	125
Tabel 12.	Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk.....	127
Tabel 13.	Proyeksi Penduduk Menurut Provinsi, 2020-2035.....	128
Tabel 14.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi 2014-2017.....	130
Tabel 15.	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Berdasarkan Provinsi Tahun 2015-2018.....	132
Tabel 16.	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2017	133
Tabel 17.	Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2016-2017	135

Tabel 18.	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2018	136
Tabel 19	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2014–2018.....	139
Tabel 20.	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi Tahun 2014-2018..	141
Tabel 21.	Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama Periode Februari dan Agustus 2016 dan 2017	145
Tabel 22.	Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2016-2017.....	146
Tabel 23.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 2013-2018	148
Tabel 24.	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur Periode 2015-2018.....	149
Tabel 25.	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2015 – 2018.....	150
Tabel 26.	Struktur Perekonomian dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2017	151
Tabel 27.	Data Pengangguran Terdidik Pada Provinsi Se Indonesia 2013-2017	160
Tabel 28.	Karakteristik Pengangguran Terdidik di Indonesia	179
Tabel 29.	Karakteristik Durasi Menganggur dari Pengangguran Terdidik...	182
Tabel 30.	Uji Kelayakan Model.....	184
Tabel 31.	Estimasi Model Pengangguran Terdidik di Indonesia.....	185
Tabel 32.	Rekapitulasi Faktor Penentu Pengangguran Terdidik Pada Masing-Masing Pulau.....	193
Tabel 33.	Faktor Penentu Pengangguran Terdidik di Pulau Sumatera	197
Tabel 34.	Faktor Penentu Pengangguran Terdidik di Pulau Jawa	200
Tabel 35.	Faktor Penentu Pengangguran Terdidik di Pulau Nali dan NT	203

Tabel 36.	Faktor Penentu Pengangguran Terdidik di Pulau Kalimantan.....	206
Tabel 37	Faktor Penentu Pengangguran Terdidik di Pulau Sulawesi.....	210
Tabel 38.	Faktor Penentu Pengangguran Terdidik di Pulau Maluku.....	213
Tabel 39.	Faktor Penentu Pengangguran Terdidik di Pulau Papua	216
Tabel 40.	Faktor Penentu Pengangguran Terdidik Masing-Masing Provinsi	219
Tabel 41.	Estimasi Model Durasi Menganggur di Indonesia.....	220
Tabel 42.	Rekapitulasi Faktor Penentu Durasi Menganggur Pada Masing-Masing Pulau.....	227
Tabel 43.	Faktor Penentu Durasi Menganggur di Pulau Sumatera	230
Tabel 44.	Faktor Penentu Durasi Menganggur di Pulau Jawa	232
Tabel 45.	Faktor Penentu Durasi Menganggur di Pulau Nali dan NT.....	235
Tabel 46.	Faktor Penentu Durasi Menganggur di Pulau Kalimantan	238
Tabel 47.	Faktor Penentu Durasi Menganggur di Pulau Sulawesi	241
Tabel 48.	Faktor Penentu Durasi Menganggur di Pulau Maluku.....	243
Tabel 49.	Faktor Penentu Durasi Menganggur di Pulau Papua.....	245
Tabel 50.	Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis.....	253



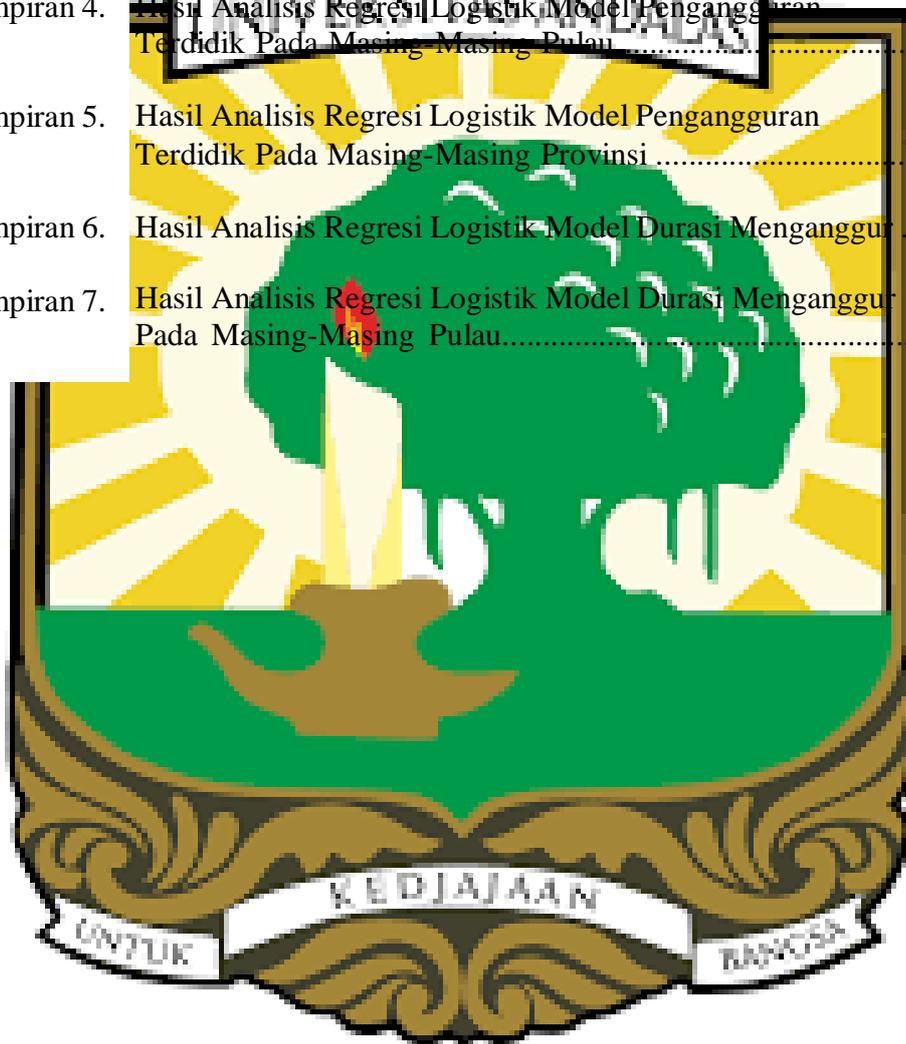
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja.....	19
Gambar 2.	Penyimpangan dari Posisi “ <i>Full Employment</i> ”	22
Gambar 3.	Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja	23
Gambar 4.	Kurva Fungsi Permintaan Terhadap Tenaga Kerja.....	25
Gambar 5.	<i>Excess Demand of Labor</i>	27
Gambar 6.	Penawaran Tenaga Kerja	30
Gambar 7.	<i>Excess Supply of Labor</i>	31
Gambar 8.	Kerangka Konseptual Penelitian	89
Gambar 9.	Grafik Persentase Kontribusi Sektor Perekonomian Indonesia Berdasarkan Harga Konstan.....	108
Gambar 10.	Grafik Persentase Kontribusi Sektor Perekonomian Indonesia Berdasarkan Harga Berlaku	113
Gambar 11.	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Masing-Masing Pulau di Indonesia	120
Gambar 12.	Perkembangan Balai Latihan Kerja di Indonesia	179



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Karateristik Pengangguran Terdidik	294
Lampiran 2.	Karateristik Durasi Menganggur Pengangguran Terdidik	295
Lampiran 3.	Hasil Analisis Regresi Logistik Model Pengangguran Terdidik	296
Lampiran 4.	Hasil Analisis Regresi Logistik Model Pengangguran Terdidik Pada Masing-Masing Pulau	300
Lampiran 5.	Hasil Analisis Regresi Logistik Model Pengangguran Terdidik Pada Masing-Masing Provinsi	314
Lampiran 6.	Hasil Analisis Regresi Logistik Model Durasi Menganggur	381
Lampiran 7.	Hasil Analisis Regresi Logistik Model Durasi Menganggur Pada Masing-Masing Pulau.....	385



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangguran merupakan suatu kenyataan yang dihadapi semua negara, baik negara sedang berkembang maupun negara-negara yang sudah maju. Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan salah satu masalah besar karena akan menyebabkan penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis bagi angkatan kerja (Mankiw, 2010). Adanya pengangguran akan menurunkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah-masalah sosial dalam masyarakat.

Salah satu karakteristik dari pengangguran di Indonesia adalah tingginya jumlah pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja sedang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan dengan tingkat pendidikan minimal SMA/ sederajat dan keatasnya (Lipsey, 1997; Tambunan, 2001; Tobing, 2005; Elfindri dan Bachtiar, 2004; Mankiw, 2010; Adrimas, 2012; Pasay dan Indrayanti, 2012; BPS, 2018). Di negara berkembang, pengangguran terdidik adalah sebagai konsekuensi dari berpeertannya faktor penawaran “*supply factors*” (Bloom dan Sevilla 2003).

Berdasarkan data pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan diketahui bahwa jumlah pengangguran pada tahun 2015 adalah 7,56 juta orang mengalami penurunan 2016 menjadi 7,03 juta orang namun pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 7,04 juta orang. Berdasarkan jumlah pengangguran tersebut ternyata didominasi oleh pengangguran terdidik yaitu 62,89 persen pada tahun 2015 dan mengalami penurunan menjadi 60,56 persen pada tahun 2016 namun pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 62,41 persen. Selanjutnya berdasarkan tingkat pengangguran terdidik pada masing- masing tingkat pendidikan diketahui bahwa pada tahun 2015 tingkat pengangguran terdidik tamat SMK adalah 11,65%, 10,32% tamat SMA, 7,54% tamat Akademi/Diploma dan 6,40% tamat Universitas. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran terdidik tamat SMK adalah 11,11%, 8,72% tamat SMA, 6,04% tamat

Akademi/Diploma dan 4.87% tamat Universitas. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terdidik tamat SMK adalah 11.41%, 8.29% tamat SMA, 6.88% tamat Akademi/Diploma dan 5.18% tamat Universitas (BPS, 2019).

Berdasarkan data terlihat bahwa ada sebuah fenomena, dimana angkatan kerja tamatan SMK yang sudah dipersiapkan untuk memasuki pasar tenaga kerja tetapi persentase tingkat penganggurnya mengalami peningkatan dibandingkan tamatan SMA yang tidak dipersiapkan untuk memasuki pasar tenaga kerja. Fenomena berikutnya adalah masih banyak tamatan perguruan tinggi (Akademi maupun Universitas) yang menganggur. Hal ini tentunya akan menjadi masalah yang serius bagi dunia pendidikan di Indonesia karena tingginya pendidikan seseorang tidak ada jaminan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

Tingginya jumlah pengangguran terdidik di Indonesia merupakan masalah yang serius bagi Indonesia dan diperlukan upaya-upaya nyata agar dapat keluar dari permasalahan ini dan tentunya dibutuhkan suatu kajian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik di Indonesia serta apa saja solusi dalam menekan tingkat pengangguran terdidik tersebut. Pengangguran terdidik merupakan kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja. Hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya jenis pengangguran ini. Faktanya lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja, bukan pencipta kerja. Padahal, untuk menjadi seorang lulusan yang siap kerja, mereka perlu tambahan keterampilan di luar bidang akademik yang mereka kuasai. Disisi lain para pengangguran terdidik ini lebih memilih pekerjaan yang formal dan mereka mempunyai kemauan bekerja di tempat yang langsung menempatkan mereka di posisi yang baik, dapat banyak fasilitas, dan langsung mendapat gaji besar.

Salah satu faktor yang dapat menjadi pembenaran kondisi demikian adalah friksi pencarian yang terjadi di pasar kerja. Eksistensi *search friction* pada pasar kerja akan menghasilkan durasi menganggur bagi pencari kerja, yaitu pencari kerja akan selalu membutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan. Friksi dalam pencarian dapat mengganggu proses *matching* pada pasar kerja. Dalam kondisi

ekonomi yang berjalan dengan baik friksi masih tetap ada, terlebih ketika kondisi ekonomi memburuk dan pasar kerja berjalan tidak normal.

Dalam analisis mikro, pengangguran dihubungkan dengan lama mencari kerja (*duration of job search*) yang tergantung pada tingkat upah yang ditawarkan (*wage offer*), tingkat upah minimum yang diinginkan (*reservation wage*), dan *opportunity cost* dari mencari pekerjaan (McCall, 1970). Durasi menganggur merupakan deskripsi masalah baru atas fenomena pengangguran terdidik yang tidak pernah terselesaikan. Durasi menganggur adalah masa tunggu seseorang mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan terakhir (Khan dan Yousef, 2013). Analisis friksi pasar kerja yang menyebabkan adanya durasi menganggur secara teoritis dijelaskan dalam disiplin *labor economics* dalam konteks penawaran tenaga kerja secara individual. Analisis tersebut penerapannya pada pasar tenaga kerja dipelopori oleh Stigler (1961; 1962) dan dikembangkan lebih lanjut oleh trio ekonom pemenang nobel ekonomi 2010 yakni Diamond (1982), Mortensen (1977; 1984; 1985; 1986), dan Pissarides (1982; 2010). Model analisis ini lebih dikenal sebagai *job search theory*. Teori ini telah mengalami banyak perkembangan dan menjadi salah satu teori yang mapan dalam disiplin *labor economics* namun masih sangat jarang digunakan dalam menganalisis masalah pengangguran terutama di Indonesia.

Beberapa studi empiris dilakukan dengan mengadaptasi pendekatan *search theory* dengan menghubungkan benefit yang diterima selama menganggur, karakteristik individu pencari kerja, karakteristik rumah tangga pencari kerja, dan besaran tingkat upah reservasi yang ditentukan oleh pencari kerja dengan durasi menganggur. Studi tersebut dilakukan oleh Foley (1997); Heath (1999); Lalive (2002); Hinnaar (2004); Kupets (2007); Carolina, et al (2008); Brown (2010). Studi empiris seperti yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa keputusan apakah menerima pekerjaan dan mengorbankan kemungkinan untuk menemukan pekerjaan yang lebih baik, atau menolak suatu tawaran pekerjaan untuk melanjutkan pencarian agar mendapatkan tawaran yang lebih baik, tergantung pada karakteristik individu pencari kerja yang merupakan penawaran dari tenaga kerja.

Penelitian ini mengkaji pengangguran terdidik dan durasi menganggur di Indonesia dari sisi *supply* mengembangkan model *job search theory*. Pada sisi penawaran, pengangguran terdidik diduga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pendidikan formal sangat instrumental dan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu sehingga pendidikan dianggap sebagai investasi modal manusia dalam industri (Woodhall dan Psacharopoulos, 1997).

Banyak riset yang menemukan bahwa tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kecenderungannya menjadi pengangguran akan semakin kecil (Ashenfelter dan Ham, 1979; Foley, 1997; Kettunen, 1997; Takii, 1997; Moen, 1999; Grogan, *et.al*, 2001; Tansel dan Tasci, 2004; Stark dan Fan, 2011; Riddel dan Song, 2011; Khan dan Yousef, 2013; Baah-Boateng, 2013; 2015; Ordine dan Rose, 2015; Skenderi dan Uka, 2015). Selanjutnya riset yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin pendek durasi menganggurnya (Moeis, 1992; Foley, 1997; Kettunen, 1997; Takii, 1997; Grogan, *et.al*, 2001; Tansel dan Tasci, 2004; Khan dan Yousef, 2013; Ordine dan Rose, 2015; Skenderi dan Uka, 2015). Namun ada penelitian yang menemukan bahwa pendidikan berhubungan searah dengan durasi menganggur yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin panjang durasi menganggurnya (Pasay dan Indrayanti, 2012).

Rata-rata lama sekolah penduduk umur > 15 tahun diketahui meningkat dari tahun 2016 dan 2017 yaitu 8,33 dan 8,53 tahun. Berdasarkan data ini dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan, namun ironisnya tingkat pengangguran terdidik juga mengalami peningkatan. Hal ini tentunya suatu masalah yang cukup memprihatinkan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk namun jumlah pengangguran terdidik juga mengalami peningkatan.

Pengangguran terdidik juga diduga disebabkan oleh pelatihan kerja. Angkatan kerja yang belum sudah pernah mengikuti pelatihan kerja tentunya akan memperkecil peluangnya menjadi pengangguran. Pelatihan kerja ini akan dapat membantu orang mendapatkan pekerjaan. Sansale, dkk (2019) menyatakan perlunya program pelatihan kerja bagi angkatan kerja muda agar memiliki

keterampilan memasuki dunia kerja. beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pelatihan kerja yang diikuti oleh angkatan kerja akan memperkecil peluangnya menjadi pengangguran (Powell, 1983; Baah-Boateng, 2013; 2015). Selanjutnya beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pelatihan kerja akan mengurangi durasi menganggur seseorang (Khan dan Yousef, 2013; Cheron dan Terriau, 2018).

Pengalaman kerja juga merupakan sebuah faktor yang diidentifikasi menjadi penyebab seseorang menjadi pengangguran. George (2004) menyatakan bahwa pengembangan mutu modal manusia dapat melalui pengalaman kerja. Dengan pengalaman kerja, seseorang dapat meningkatkan keterampilannya sehingga dapat bekerja lebih efisien dan efektif, yang tentunya tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja akan memiliki peluang lebih besar untuk dapat diterima bekerja. Menurut McConnel (1999) menjelaskan tenaga kerja yang berpengalaman lebih terampil dalam menyelesaikan pekerjaannya. Angkatan kerja yang memiliki pengalaman kerja akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan (Sutomo, dkk, 1999). Adanya pengalaman kerja akan mempermudah seseorang untuk mendapatkan pekerjaan sehingga durasi durasi menganggurnya lebih pendek dibandingkan dengan yang tidak memiliki pengalaman kerja (Ashenfelter dan Ham, 1979; McConnel, 1999; George, 2004). Namun ada penelitian yang menemukan berbeda yaitu penelitian Blanco dan Preugscha (2018) menemukan bahwa pada umumnya perusahaan lebih suka menerima pelamar yang belum pernah bekerja sehingga yang memiliki pengalaman kerja berpeluang menganggur dibandingkan dengan yang tidak memiliki pengalaman kerja.

Pengangguran terdidik diduga juga dipengaruhi oleh faktor umur. Fenomena yang menjadi salah satu pusat perhatian di Indonesia adalah masalah durasi menganggur dari pencari kerja usia muda yang semakin panjang durasinya, sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran usia muda (*youth unemployment*) berada pada tingkatan yang cukup tinggi (ILO, 2012). Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi umur seseorang maka peluang dia menjadi pengangguran akan semakin rendah atau orang muda berpeluang menganggur dibandingkan dengan angkatan kerja yang tidak muda lagi (Johnson and Layard, 1993; Foley, 1997; Aryeetey, et al., 2014; Baah-Boateng, 2013; 2015; Albanesi dan

Sahin, 2018; Sansale, dkk, 2019). Selanjutnya beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa durasi menganggur angkatan kerja usia muda lebih panjang dari yang tua (Foley, 1997; Tansel dan Tasci, 2004; Khan dan Yousef, 2013). Namun ada penelitian lain yang menemukan bahwa semakin tua umur seseorang maka durasi menganggurnya semakin panjang (Hernaes, 1999; Zarotiadis dan Theodossiou, 2010; Mukoyama, 2004; Sansale, dkk, 2019).

Jenis kelamin atau gender juga merupakan salah satu variabel penyebab pengangguran dan durasi menganggur. Penelitian terdahulu yang mengaskan bahwa jenis kelamin atau gender adalah penyebab pengangguran (Foley, 1997; Theodossiou dan Zangelidis, 2009; Baah-Boateng, 2013; 2015; Albanesi dan Sahin, 2018). Durasi menganggur juga diduga dipengaruhi oleh jenis kelamin atau gender. Foley (1997) menyatakan wanita cenderung lebih lama menganggur dibandingkan dengan laki-laki dan wanita yang sudah menikah ditemukan mengalami masa pengangguran yang jauh lebih lama dibandingkan dengan pria yang sudah menikah. Tansel dan Tasci (2004) menyatakan wanita mengalami durasi pengangguran yang lebih tinggi dari pada pria. Zarotiadis dan Theodossiou (2010) menemukan bahwa pekerja wanita menghadapi masa kerja yang jauh lebih singkat sehingga memiliki durasi pengangguran yang lebih lama.

Variabel berikutnya yang diidentifikasi dapat menyebabkan seseorang menjadi pengangguran adalah status perkawinan. Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa status perkawinan merupakan variabel yang menentukan seseorang menganggur atau tidak, angkatan kerja yang sudah menikah memiliki kecenderungan tidak menganggur dibandingkan dengan yang belum menikah (Foley, 1997; Kaufman dan Hotchkiss, 2006; Theodossiou dan Zangelidis, 2009; Baah-Boateng, 2013; 2015; Albanesi dan Sahin, 2018).

Foley (1997) menemukan bahwa wanita yang sudah menikah ditemukan mengalami masa pengangguran yang jauh lebih lama dibandingkan dengan pria yang sudah menikah. Grogan, *et.al* (2001) menemukan bahwa durasi menganggur yang panjang terjadi pada pria yang belum menikah. Khan dan Yousef (2013) menyatakan bahwa status perkawinan menentukan durasi menganggur, mereka yang belum menikah cenderung menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang

sudah menikah. Selanjutnya Kaufman dan Hotchkiss (2006) menyatakan bahwa status perkawinan menyebabkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi angkatan kerja, perempuan yang telah menikah dituntut untuk melakukan aktivitas rumah, dan pasar kerja yang tersedia kebanyakan menerima perempuan yang berstatus tunggal atau single. Berbeda dengan pria yang sudah menikah biasanya tidak memiliki hambatan yang berarti untuk memasuki pasar kerja sehingga akan memiliki durasi menganggur lebih pendek.

Kedudukan dalam rumah tangga juga diduga sebagai variabel yang mempengaruhi durasi menganggur. Seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab akan rela bekerja apa saja demi memenuhi nafkah keluarganya. Lain halnya pada saat belum menikah karena masih ditopang keluarga. Khan dan Yousef (2013) menyatakan bahwa angkatan kerja yang berstatus kepala keluarga cenderung tidak menganggur dibandingkan dengan yang bukan kepala keluarga.

Wilayah tempat tinggal adalah suatu faktor yang penulis identifikasi dapat menjadikan seseorang menjadi pengangguran. Baah-Boateng (2015) menemukan lokasi tempat tinggal akan menentukan seseorang menjadi pengangguran atau tidak, dimana angkatan kerja yang tinggal di kota lebih rentan menganggur dari pada yang tinggal di desa. Foley (1997) menyatakan bahwa individu yang tinggal di daerah akan mengalami durasi menganggur yang lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di kota. Grogan, *et.al* (2001) menemukan bahwa durasi menganggur yang panjang terjadi pada individu yang tinggal di luar dari kota besar (perdesasan).

Tingkat pengangguran merupakan sebuah indikator yang banyak digunakan dan sering didiskusikan untuk kesejahteraan suatu negara, namun diskusi tersebut sebagian besar berkonsentrasi kepada tingkat pengangguran nasional yang tidak memberikan informasi mengenai struktur pengangguran regional. Padahal data mengenai tingkat pengangguran regional menunjukkan adanya perbedaan antar daerah. Pengangguran memang masih menjadi masalah serius di Indonesia karena hampir diseluruh wilayah di Indonesia mengalami permasalahan yang sama dibidang ketenagakerjaan seperti pengangguran khususnya pengangguran terdidik. Namun karakteristik dari pengangguran itu sendiri pada masing-masing wilayah mengalami perbedaan sehingga diperlukan kajian secara spasial dalam mengatasi

pengangguran pada masing-masing wilayah. Penelitian ini akan mengkaji pengangguran terdidik dan durasi menganggur dari perspektif penawaran tenaga kerja pada tingkat nasional, wilayah kepulauan dan tingkat provinsi.

Menurut Taylor dan Bradley (1997) perbedaan regional dalam suatu negara lebih kuat dari pada perbedaan antar negara. Elhorst (2003) menyebutkan setidaknya tiga alasan utama mengapa perlu menganalisis tentang pengangguran di level regional. Pertama adalah bahwa adanya kesenjangan tingkat pengangguran regional menunjukkan kinerja pasar tenaga kerja di level regional dan mengacu kepada masalah-masalah yang ada pada level regional. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi pemerintah yang ingin menghapus ketidaksetaraan di level regional harus menangani pasar tenaga kerja regional secara lebih serius. Kedua, sebagian besar studi ekonomi makro mencoba untuk menjelaskan kesenjangan pengangguran antar negara, dan menyimpulkan bahwa perbedaan dalam institusi pasar tenaga kerja adalah sumber utama dari adanya distribusi yang tidak merata. Namun di suatu negara, institusi semacam itu biasanya bersifat umum dan tidak dapat digunakan sebagai penjelasan. Teori-teori yang ada tentang pengangguran spasial menunjukkan bahwa pengangguran yang tinggi di beberapa wilayah harus dikompensasi oleh faktor-faktor lain, oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi variabel yang dapat menjelaskan perbedaan regional yang ada dalam keseimbangan jangka panjang. Alasan ketiga adalah bahwa kesenjangan pengangguran regional berpotensi menyebabkan inefisiensi. Jika berhasil diangani, maka hal ini kemungkinan akan memberikan manfaat yang besar seperti peningkatan output nasional dan penurunan tekanan inflasi berkat penurunan kesenjangan tingkat pengangguran di level regional (Taylor dan Bradley, 1997).

Penelitian ini akan melakukan kajian tentang peluang tenaga kerja terdidik menjadi pengangguran terdidik serta durasi menganggurnya di Indonesia beserta faktor penentu yang mempengaruhinya mulai pada tingkat nasional, tingkat wilayah kepulauan dan tingkat provinsi. Penelitian nantinya akan merekomendasikan beberapa kebijakan dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terdidik di Indonesia baik dari sisi durasinya maupun dari sisi kuantitasnya.

B. Rumusan Masalah

Tingkat pengangguran terdidik di Indonesia pada tahun 2016 sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 36,91% menjadi 30,74% namun pada tahun 2017 jumlah pengangguran terdidik kembali meningkat menjadi 31,76% yang terdiri dari 11,41% tamat SMK, 8,29% tamat SMA, 6,88% tamat Akademi/Diploma dan 5,18% tamat Universitas. Pada tahun 2018 total pengangguran terdidik adalah 31,10% yang terdiri dari 11,24% tamat SMK, 7,95% tamat SMA, 6,02% tamat Akademi/Diploma dan 5,89% tamat Universitas. (BPS, 2019)

Pengangguran terdidik pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan dan didominasi oleh tamatan SMK (BPS, 2018). Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Penyebab pengangguran terdidik dilihat dari sisi penawaran diantaranya adalah tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, gender, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga dan wilayah tempat tinggal.

Pada sisi penawaran diketahui bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja periode 2016 dan 2017 mengalami peningkatan dari 8,42 tahun menjadi 8,53 tahun (BPS, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja mengalami peningkatan. Namun jika dikaitkan dengan pengangguran maka diketahui dengan meningkatnya tingkat pendidikan ternyata tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran dan justru malah angka pengangguran semakin meningkat.

Berdasarkan permasalahan penelitian ini maka masalah utama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh potensi kemampuan tenaga kerja terdidik terhadap probabilitas menganggur di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh potensi kemampuan tenaga kerja terdidik terhadap probabilitas durasi menganggur di Indonesia?
3. Bagaimana karakteristik sosio demografi pengangguran terdidik di Indonesia?

4. Apa implikasi kebijakan untuk menurunkan pengangguran terdidik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengaruh potensi kemampuan tenaga kerja terdidik terhadap probabilitas menganggur di Indonesia
2. Bagaimana pengaruh potensi kemampuan tenaga kerja terdidik terhadap probabilitas durasi menganggur di Indonesia
3. Bagaimana karakteristik sosio demografi pengangguran terdidik di Indonesia?
4. Merumuskan kebijakan dalam menurunkan pengangguran terdidik di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan teori, pengembangan metodologi dan rekomendasi kebijakan. Berikut ini dijelaskan manfaatnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Teori
 - a. Memperkaya teori-teori tentang pengangguran tenaga kerja terdidik di Indonesia yang dilihat dari penawaran tenaga kerja
 - b. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam kesesuaian materi yang diterima di perkuliahan dengan kenyataan di lapangan.
2. Pengembangan Metodologi

Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam melakukan penelitian tentang pengangguran terdidik dan durasi menganggur tenaga kerja terdidik di Indonesia pada tingkat nasional, wilayah kepulauan dan tingkat provinsi.
3. Rekomendasi Kebijakan
 - a. Tersedianya data dan informasi tentang karakteristik pengangguran terdidik di Indonesia pada tingkat nasional, wilayah kepulauan dan tingkat provinsi.

- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di Indonesia untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam rangka penurunan jumlah pengangguran terdidik.
- c. Sebagai acuan bagi dunia pendidikan khususnya SMA/ sederajat dan perguruan tinggi dalam merumuskan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengkaji pengangguran terdidik dan durasi pengangguran tenaga kerja terdidik di Indonesia dari sisi penawaran tenaga kerja. Objek penelitian ini adalah seluruh wilayah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi. Data dikumpulkan dari raw data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus 2017. Data pendukung adalah data publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dan BPS Provinsi Sumatera Barat.

F. Kebaruan Penelitian

Adapun kebaruan penelitian ini yaitu: 1) memproksi kemampuan tenaga kerja terdidik dari tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan umur; 2) menganalisis dua isu secara bersamaan yaitu pengangguran terdidik dan durasi menganggur pada tingkat nasional, tingkat kepulauan dan tingkat provinsi; 3) membagi durasi menganggur menjadi dua kelompok yaitu durasi menganggur pendek dan durasi menganggur lama, dimana kebanyakan peneliti sebelumnya meneliti tentang durasi menganggur yang diukur dengan satuan waktu (bulan atau tahun).

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan disertasi ini lebih terarah dan mudah dipahami, maka penulis mengemukakan pokok-pokok uraian dari tiap-tiap bagian pada disertasi sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, akan membicarakan beberapa pokok pikiran yang melandasi perwujudan penelitian secara keseluruhan yang meliputi, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kebaruan penelitian dan sistematika penulisan.

- Bab 2 Tinjauan Pustaka, akan membahas pendekatan teori-teori pendukung yang berkaitan dengan variabel penelitian, tinjauan literatur, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.
- Bab 3 Metodologi Penelitian, berisikan pembentukan model penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, gambaran umum Sakernas, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi operasional variabel penelitian.
- Bab 4 Kondisi perekonomian, Investasi, IPM, Kependudukan dan Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kebijakan Pemerintah Mengurangi Pengangguran, yang berisikan tentang gambaran kondisi perekonomian, keadaan investasi dan IPM, keadaan kependudukan dan pendidikan serta ketenagakerjaan serta bentuk-bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi pengangguran di Indonesia.
- Bab 5 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan tentang karakteristik pengangguran terdidik di Indonesia, hasil analisis data untuk pengujian factor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik dan durasi menganggur serta pembahasan hasil penelitian
- Bab 6 Penutup, merupakan bab penutup dari penelitian yang dilakukan yang berisikan kesimpulan, saran, implikasi kebijakan dan keterbatasan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Modal Manusia

Secara teoritis pembangunan mensyaratkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia ini dapat berperan sebagai faktor produksi tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan pembentukan modal manusia (*human capital*). Pembentukan modal manusia ini merupakan suatu untuk memperoleh sejumlah manusia yang memiliki karakter kuat yang dapat digunakan sebagai modal penting dalam pembangunan. Karakter ini dapat berupa tingkat keahlian dan tingkat pendidikan masyarakat.

Pentingnya modal manusia dalam pembangunan telah dimulai pada tahun 1960-an oleh pemikirannya Theodore Schultz tentang *investment in human capital*. Menurutinya pendidikan merupakan suatu bentuk investasi dalam pembangunan dan bukan merupakan suatu bentuk investasi. Dalam perkembangannya, Schultz memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan memposisikan manusia sebagai fokus dalam pembangunan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai melalui terjadinya peningkatan keahlian/keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.

Human capital secara bahasa tersusun atas dua kata dasar yaitu manusia dan kapital (modal). Kapital diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang atau jasa tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Manusia dalam human capital merupakan suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Manusia juga memiliki peran atau tanggung jawab dalam segala aktifitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan transaksi (Schultz, 1961).

Teori ini mendominasi literatur pembangunan ekonomi dan pendidikan pada pasca perang dunia kedua sampai pada tahun 70-an. Termasuk para pelopornya

adalah pemenang hadiah Nobel ilmu ekonomi Gary Becker dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, Edward Denison dan Theodore Schultz, juga pemenang hadiah nobel ekonomi atas penelitiannya tentang *human capital*. Argumen yang disampaikan pendukung teori *human capital* adalah manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih rendah.

Pembentukan *human capital* diartikan sebagai suatu proses peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan seluruh rakyat suatu negara (Harbison dan Myers, 1964). Menurut Becker (1964) *human capital* adalah bahwa manusia bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal yang menghasilkan pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi.

Seiring berkembangnya teori ini, konsep *human capital* dapat didefinisikan menjadi tiga. Konsep pertama adalah *human capital* sebagai aspek individual. Konsep ini menyatakan bahwa modal manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Hal ini diperjelas oleh Rastogi (2002) yang menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia.

Konsep kedua menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktifitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Konsep utama model ini adalah bahwa *human capital* merupakan sesuatu yang didapatkan melalui akumulasi suatu proses tertentu (Alan, dkk, 2008). Konsep ini menganggap *human capital* tidak berasal dari pengalaman manusia.

Konsep ketiga memandang *human capital* melalui perspektif orientasi produksi. Romer (1999) menyatakan bahwa *human capital* merupakan sumber mendasar dari produktifitas ekonomi. *Human capital* juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktifitasnya (Rosen, 1999). Frank & Bemanke (2007) berpendapat bahwa *human capital* adalah

perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energy dan inisiatif yang memengaruhi produktifitas manusia.

Schultz (1961) menyatakan bahwa *human capital* merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi di suatu negara. Human capital merupakan suatu konsep yang muncul pertama kali pada tahun 1776 di bidang ekonomi klasik (Fitzsimons, 1999). Human capital dapat dicapai atau diperoleh melalui dua cara. Pertama, manusia digunakan sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Hal ini menyatakan bahwa semakin banyak jumlah manusia atau tenaga kerja maka produktifitas semakin tinggi. Kedua, investasi merupakan cara utama dalam meningkatkan atau mendapatkan human capital. Pendidikan dan pelatihan yang didapat manusia akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga produktifitas juga akan meningkat. Cara kedua ini tidak lagi mementingkan kuantitas jumlah tenaga kerja.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori *human capital* dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari pengetahuan, skill, dan kecerdasan rakyat dari suatu negara. Menurut Simanjuntak (2001) asumsi dasar teori *human capital* adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti di satu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, akan tetapi di pihak lain menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun untuk mengikuti sekolah tersebut dan berharap untuk meningkatkan penghasilan dengan peningkatan pendidikan.

Todaro (2000) mengungkapkan bahwa *human capital* dapat diukur melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi nilai tambah seorang manusia. Hal ini dapat dijelaskan apabila semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan maka kemampuan dan keterampilan yang dimiliki semakin tinggi. Sementara itu, kesehatan merupakan bidang yang saling terkait dengan pendidikan. Pendidikan tinggi yang dimiliki tanpa adanya tubuh yang sehat tidak akan menaikkan produktifitas. Sementara itu, pendidikan yang tinggi juga dapat memengaruhi tingkat kesadaran kesehatan seseorang.

Drucker (1993) mengungkapkan bahwa dunia akan mengalami transformasi yang dramatis pada berbagai aspek kehidupan, ekonomi, politik, sosial, organisasi, dan *moral landscape*. Pada bidang ekonomi, terjadi pergeseran yang signifikan atas faktor produksi. Semula, faktor produksi yang memegang peranan penting adalah modal, tenaga kerja dan tanah, kini tenaga kerja saja tidak cukup. Tenaga kerja dengan *knowledge* (ilmu pengetahuan) atau lazim disebut *human capital* menjadi faktor produksi yang mempunyai peranan vital. Pertumbuhan ekonomi kini tidak bisa lagi bertumpu pada faktor produksi berupa modal uang dan tanah, akan tetapi telah terjadi pergeseran dimana *human capital* menjadi faktor produksi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan senjata bagi sebuah negara untuk memenangkan kompetisi global (*competitive advantage of nation*).

Menurut Ehrenberg dan Smith (2003) pekerja dalam hal ini melakukan 3 jenis investasi, antara lain: 1) pendidikan dan pelatihan; 2) migrasi dan pencarian kerja baru; 3) perbaikan gizi dan kesehatan. Ketiga jenis investasi ini memerlukan biaya dan dilakukan dengan harapan bahwa investasi yang telah ditanamkan dapat menghasilkan lebih banyak di masa yang akan datang. Pendidikan dan pelatihan akan menghasilkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas kerja. Akan tetapi produktivitas yang dihasilkan tentu tergantung dari seberapa jauh pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas seorang karyawan. Migrasi dan pencarian pekerjaan merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai mutu modal manusia melalui peningkatan harga, dalam hal ini upah/gaji, yang diterima pada tingkat investasi tertentu. Terakhir, gizi dan kesehatan merupakan modal dasar bagi pekerja agar dapat bekerja dengan baik, sehingga peningkatan kualitas kedua unsur tersebut dapat menyebabkan pekerja semakin produktif. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *human capital theory* menggunakan konsep bahwa modal utama manusia adalah pendidikan, keterampilan, dan kesehatan.

Lewis (1956), mendefinisikan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah tenaga kerja dikaitkan dengan pemanfaatan capital. Dengan *stock of capital* tertentu, maka *marginal product* dari tenaga kerja (MPL) mulai dari titik tertentu menurun. Senada dengan Lewis, menjelaskan pertumbuhan ekonomi

adalah suatu formula kausalitas antara investasi, tabungan, modal, dan penduduk untuk mempengaruhi hasil/output (Ray, 1998).

Solow (1956), menyatakan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah modal dan tenaga kerja. Persamaan modelnya adalah,

$$Q = f(K, L)$$

dimana: Q = output,

K = kapital, dan

L = tenaga kerja

Pendekatan ini menggunakan model fungsi produksi yang mula-mula diperkenalkan oleh Cobb dan Douglas selama 1927-1947, yang fokus pada pentingnya peranan modal manusia (*human capital*) dalam fungsi produksi itu mula-mula dikembangkan oleh Solow (1956) dan argumennya dikembangkan oleh Becker (1993), dan terakhir model itu dikembangkan oleh Lucas, yang diterapkan dan dikembangkan lagi salah satunya oleh McMahan (2002).

McMahan (2002), menunjukkan bagaimana peranan pendidikan secara umum terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan endogenous growth model yang diformulasikan sebagai berikut.

$$Y = A [\mu_1 h N]^{1-\alpha} K^\alpha \varepsilon$$

di mana:

Y = output atau produk domestik bruto (PDB)

A = tingkat teknologi yang dianggap konstan

μ_1 = alokasi waktu pekerja yang digunakan untuk produksi

h = kualitas tenaga kerja yang dapat diwakili oleh tingkat pendidikannya,

N = jumlah tenaga kerja

h α = pendidikan masyarakat

$\mu_1 h N$ = modal tenaga kerja

K = modal fisik digunakan proksi nilai pembentukan modal tetap domestik brutto (PMTDB)

α = koefisien modal fisik yang menunjukkan peranan atau pengaruh modal fisik terhadap PDB

$1-\alpha$ = koefisien modal tenaga kerja yang menunjukkan peranan atau pengaruh modal tenaga kerja terhadap PDB,

ε = error term

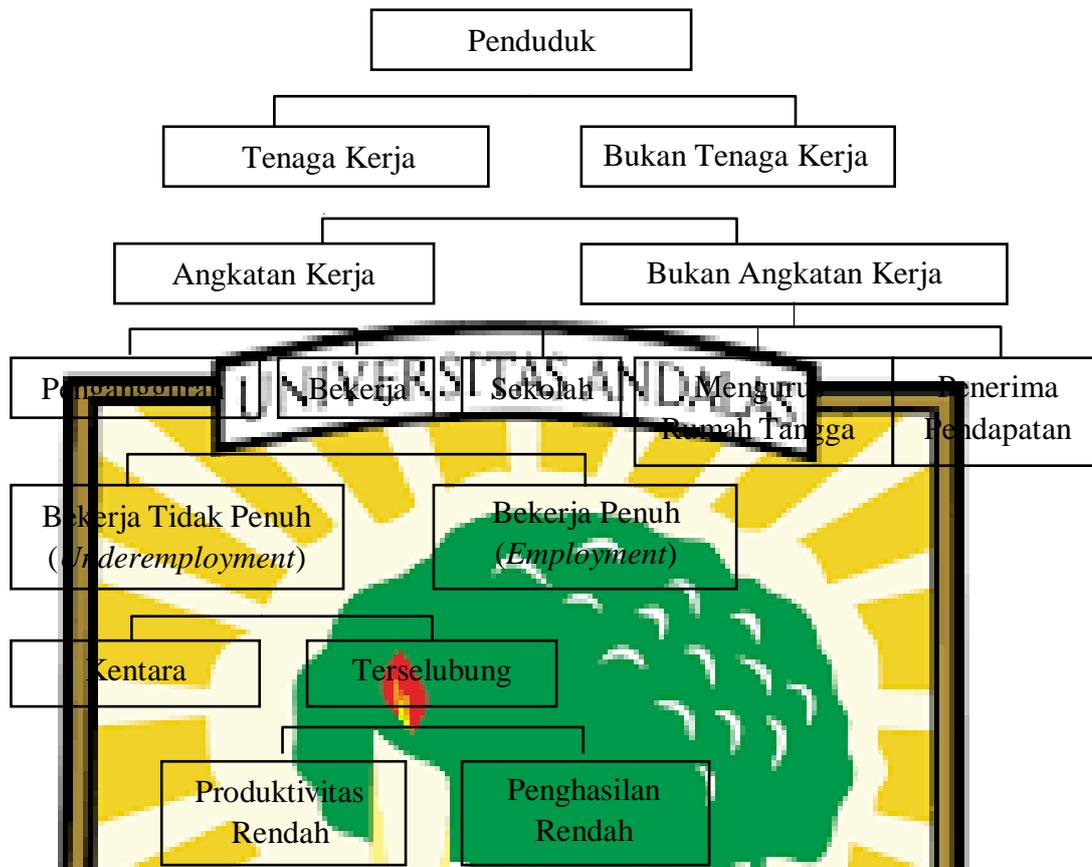
2. Teori Ketenagakerjaan

Di Indonesia yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Tenaga kerja ini terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibedakan menjadi dua golongan yaitu: 1) golongan bekerja dan, 2) golongan yang tidak bekerja (menganggur). Sementara itu yang bukan angkatan kerja dibedakan menjadi 3 golongan yaitu: 1) golongan berskolah, 2) golongan pengurus rumah tangga, 3) golongan penerima pendapatan lainnya (Adriana, 2012). Sedangkan Barthos (1993) menjelaskan bahwa angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Djojohadikusumo (1999) menyatakan secara umum golongan tenaga kerja menyangkut bagian penduduk yang termasuk tingkat usia 15-64 tahun.

Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan ikut berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Sedangkan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam suatu kegiatan produksi barang dan jasa (Subri, 2003).

Skema hubungan tenaga kerja dan bukan tenaga kerja disajikan pada gambar berikut ini:





Gambar 1 : Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja
(Sumber : Simanjuntak, 2001)

Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja. Artinya bahwa semua orang yang melakukan kegiatan pekerjaan untuk diri sendiri atau orang lain tanpa menerima upah atau mereka yang sanggup bekerja (Sumalsono, 2009). Menurut Simanjuntak (2001) yang termasuk tenaga kerja adalah seseorang yang mengurus rumah tangga, sekolah, yang mencari kerja, atau sedang bekerja dengan usia 14-60 tahun. Sedangkan tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan menengah tinggi dan ahli dalam bidang tertentu (Sukirno, 2006).

Menurut BPS (2018) penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah

penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Menurut Subri (2003) tenaga kerja adalah permintaan partisipasi tenaga dalam memproduksi barang atau jasa atau penduduk yang berusia 15-64 tahun. Tenaga kerja termasuk dalam angkatan kerja (orang yang mencari pekerjaan/menganggur ditambah dengan orang yang bekerja) dan bukan angkatan kerja (orang yang mengurus rumah tangga, bersekolah, dan penerima pendapatan).

Pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, yaitu tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja: 1) Angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. 2) Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Menurut Simanjuntak (2001) tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja atau *labor force* dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force* terdiri dari: 1) Golongan yang bekerja; 2) Golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja dibedakan menjadi 3 golongan, yakni : 1) Golongan yang bersekolah; 2) Golongan yang mengurus rumah tangga, dan; 3) Golongan lain-lain atau penerima pendapatan lainnya.

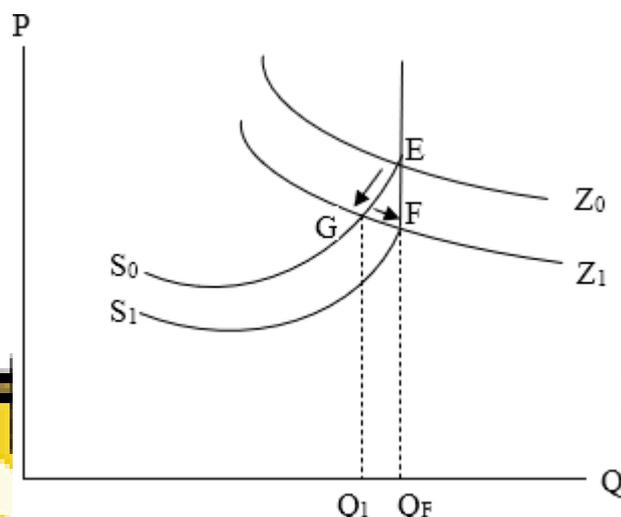
Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan tenaga kerja (bukan termasuk angkatan kerja) ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga, (yang dimaksud adalah ibu-ibu rumah tangga yang bukan wanita karir), serta penerima pendapatan tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya seperti pensiunan dan penderita cacat yang dependen (Dumairy, 2001).

Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang mampu terlibat dalam proses produksi. Yang digolongkan bekerja yaitu mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa atau mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Sedangkan pencari kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan (Subri, 2003).

Bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja atau penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan yang kegiatan utamanya adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain. Yang tergolong dalam lain-lain yaitu penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi, tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan atau sewa atas pemilik, dan mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, misalnya karena usia, cacat, dalam penjara atau sedang sakit kronis (Simanjuntak, 2001).

Konsep Keynes mengenai bekerjanya pasar tenaga kerja berbeda dengan konsepsi kaum Klasik, khususnya dalam hal kemungkinan bahwa pengangguran bisa perlarut-larut. Kaum Klasik mengenal tiga macam pengangguran : a) Pengangguran yang timbul karena pergeseran tingkat output dari berbagai sektor dan bersifat sementara (*frictional unemployment*); b) pengangguran musiman, yang datang dan hilang menurut musim (*seasonal unemployment*); c) pengangguran yang “dibuat” orang, misalnya dengan adanya peraturan upah minimum atau tindakan dari serikat buruh yang berusaha mempertahankan tingkat upah diatas tingkat yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja (pengangguran semacam ini disebut *institutional unemployment*) (Boediono, 1999).

Dalam “dunia Klasik”, semua harga-harga (termasuk harga tenaga kerja yaitu upah) fleksibel ke atas maupun ke bawah dan semua pelaku ekonomi bereaksi secara cepat dan rasional terhadap perubahan harga tersebut. Dalam keadaan seperti ini semua penyimpangan dari posisi “*full employment*” hanya bersifat sementara. Sebagai contoh kita lihat gambar berikut ini.



Gambar 2 : Penyimpangan Dari Posisi “Full Employment”
(Sumber : Boediono, 1999)

Seandainya, pada mulanya kita berada pada posisi E dengan tingkat output Q_F yang menyerap seluruh angkatan kerja (yang bersedia bekerja) atau tingkat output “full employment”. kemudian karena sesuatu hal, permintaan agregat tiba-tiba turun dari Z_0 ke Z_1 . Reaksi pertama dari perekonomian kita adalah menurunnya tingkat output ke Q_1 (atau gerakan dari E ke G) yang diikuti dengan adanya pengangguran tenaga kerja. Tetapi pengangguran ini harus bersifat sementara, karena (dengan harga-harga dan upah yang fleksibel dan reaksi spontan dari pelaku ekonomi) adanya pengangguran atau kelebihan jumlah tenaga kerja yang menawarkan diri untuk bekerja akan mendorong tingkat upah turun. Menurunnya tingkat upah berarti menurunnya biaya marginal (*Marginal Cost*) untuk menghasilkan output. Dengan kata lain, karena harga salah satu input variabelnya menjadi lebih murah, maka biaya totalnya (juga biaya marginalnya) turun. Akibatnya kurva penawaran agregat juga bergeser ke bawah. Tingkat upah akan turun terus selama masih ada yang menganggur. Proses ini akan berhenti bila semua orang telah bekerja atau dengan kata lain tingkat output “full employment” tercapai kembali. Ini ditunjukkan oleh gerakan dari G ke F. Posisi keseimbangan baru ini ditandai oleh : a) tercapainya “full employment”, b) tingkat harga-harga dan tingkat upah yang lebih rendah (Boediono, 1999).

Menurut Sumarsono (2009) bahwa pasar tenaga kerja merupakan sebuah mekanisme atau aktivitas yang bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pasar tenaga kerja dibentuk oleh dua kekuatan utama yaitu permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Santoso (2012) menjelaskan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama di dalam proses produksi barang dan jasa. Permintaan tenaga kerja terjadi pada pasar input, dimana struktur pasar input ini memiliki pasar persaingan sempurna atau tidak sempurna, hal ini akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja dan tingkat upah pasar.



Gambar 3 memperlihatkan pasar tenaga kerja dalam kondisi seimbang (*equilibrium*). Dimana jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masing

sebesar L_e pada tingkat upah keseimbangan W_e . Titik-titik keseimbangan adalah titik E. Disini tidak ada *excess supply of labor* maupun *excess demand of labor*. Pada tingkat upah keseimbangan sebesar W_e maka semua orang yang ingin bekerja telah mendapat pekerjaan, berarti tidak ada orang yang menganggur (Mankiw, 2003).

Bellante (1990) menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja pasar dan penawaran tenaga kerja pasar secara bersama menentukan suatu tingkat upah keseimbangan dan suatu penggunaan tenaga kerja keseimbangan. Dalam keseimbangan semua pelaku ekonomi harus melakukan penyesuaian terhadap keadaan ekonomi sebagaimana adanya.

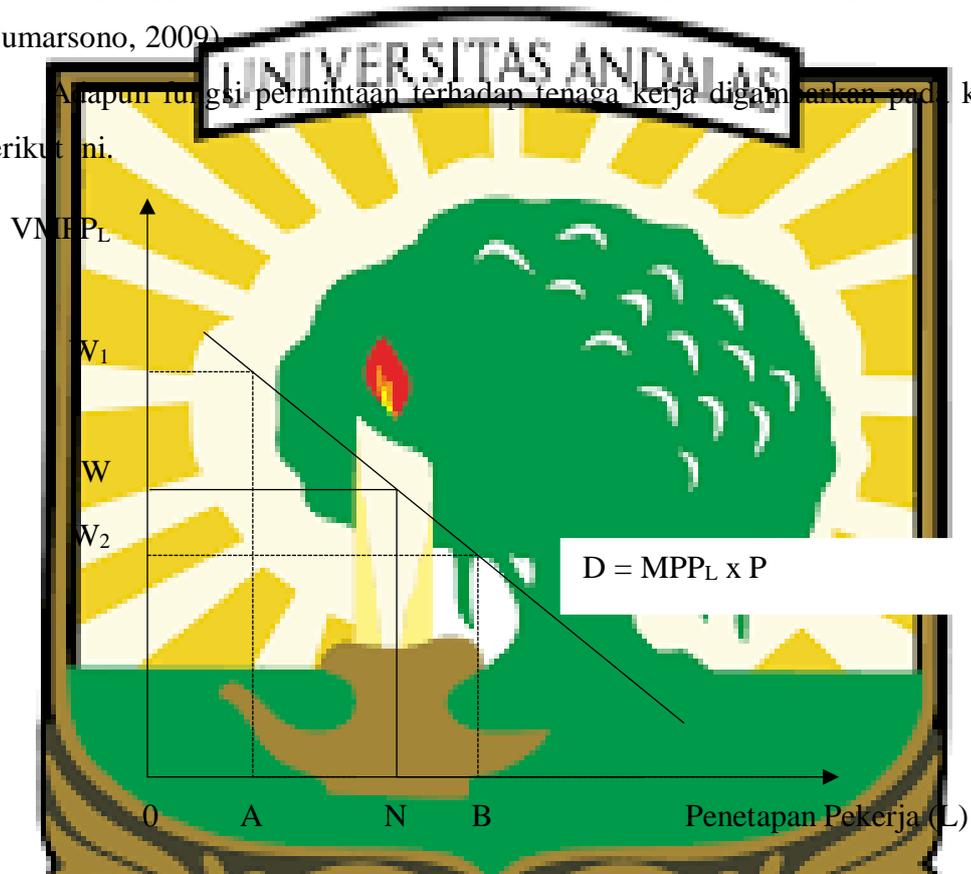
a. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja atau kebutuhan tenaga kerja dalam suatu perkembangan ekonomi dapat dilihat dari kesempatan kerja (orang yang telah bekerja) dari setiap sektor atau kebutuhan tenaga kerja merupakan jumlah kesempatan kerja yang bersedia di dalam sistem ekonomi yang dinyatakan dalam jumlah satuan orang yang bekerja pada masing-masing sektor untuk melakukan kegiatan produksi. Dalam arti yang lebih luas, kebutuhan ini tidak saja menyangkut jumlahnya, tetapi juga kualitasnya (pendidikan dan keahlian). Karena mereka yang bekerja tidak seluruhnya memiliki jam kerja normal (*full employment*), maka kebutuhan tenaga kerja dalam analisa-analisa tertentu juga dinyatakan dalam satuan ekuivalen pekerja penuh (*full-time worker equipment*). Normatif yang digunakan untuk satu ekuivalen pekerja penuh adalah 35 jam kerja per minggu, ada yang menggunakan 40 jam kerja per minggu, karena tiap-tiap sektor biasanya memiliki jumlah jam kerja yang berbeda, dan akan lebih baik lagi bila digunakan normatif yang juga berbeda antar sektor (Simanjuntak, 1998).

Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*) artinya jika permintaan terhadap suatu barang meningkat maka pengusaha akan menambah tenaga kerja untuk produksinya. Tenaga kerja yang diminta karena adanya perubahan ekonomi sehingga permintaan pun terus berubah. Pemakaian tenaga kerja juga tergantung pada perusahaan atau industri yang bersangkutan, jika

perusahaan cenderung padat karya maka pemakaian atau penggunaan tenaga kerja meningkat namun jika perusahaan cenderung padat modal penggunaan tenaga kerja relatif kecil karena adanya pemakaian mesin sebagai salah satu faktor produksi. Biasanya perusahaan atau industri yang menghendaki keuntungan yang maksimal dapat memilih jumlah terbaik untuk tenaga kerja akan memunculkan kesempatan kerja yang tinggi dan ini berarti tidak akan lagi terjadi penduduk yang tidak bekerja (Sumarsono, 2009)

Apapun fungsi permintaan terhadap tenaga kerja digambarkan pada kurva berikut ini.



Gambar 4. Kurva Fungsi Permintaan Terhadap Tenaga Kerja

Sumber : Bellante (1990)

Gambar 4 menjelaskan mengenai kurva permintaan tenaga kerja yang memiliki kemiringan (Slope) yang negatif. Kurva permintaan tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara besarnya tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Kurva tersebut memiliki hubungan negatif, artinya semakin tinggi tingkat upah yang diminta maka akan mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta. Sebaliknya apabila tingkat upah yang diminta semakin rendah maka jumlah permintaan akan tenaga kerja akan meningkat.

Garis D menggambarkan besarnya nilai hasil marginal tenaga kerja (*value marginal physical product of labor*, VMPPL) untuk setiap tingkat penempatan pekerja. Bila jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak $OA=100$ orang, maka nilai hasil kerja yang ke-100 dinamakan VMPPL dan besarnya sama dengan $MPPL \times P = W_1$. Nilai ini lebih besar daripada tingkat upah yang sedang berlaku (W). Oleh sebab itu, laba pengusaha akan bertambah dengan menambah tenaga kerja baru. Pengusaha dapat terus menambah laba perusahaan dengan mempekerjakan orang hingga ON . Di titik N pengusaha mencapai laba maksimum dan nilai $MPPL \times P$ sama dengan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja (Simanjuntak, 1998).

Permintaan tenaga kerja dapat diturunkan dari fungsi produksi dalam suatu aktivitas ekonomi. Produksi merupakan suatu transformasi dari input (faktor produksi) menjadi output atau keluaran. Jika diasumsikan bahwa suatu proses produksi hanya menggunakan dua jenis faktor produksi yaitu tenaga kerja (L) dan modal (K) maka fungsi produksinya adalah:

$$Q = f(K, L)$$

Dalam menganalisis penentuan penyerapan tenaga kerja, diasumsikan bahwa hanya ada dua input yang digunakan, yaitu modal (K) dan tenaga kerja (L). Tenaga kerja (L) dalam hal ini diukur dengan tingkat upah yang diberikan kepada para pekerja (W), sedangkan untuk modal (K) diukur dengan tingkat suku bunga (r).

$$WL = [P \cdot f(K, L) - rK - \pi]$$

$$Ld = \frac{[P \cdot Q] - rK - \pi}{W}$$

Keterangan:

Ld = Permintaan / penyerapan tenaga kerja

W = Upah tenaga kerja

P = Harga jual barang per unit

K = Modal (investasi)

r = Tingkat suku bunga

Q = Output

Berdasarkan persamaan diatas, dapat diketahui bahwa permintaan tenaga kerja (L) merupakan fungsi dari output (produktivitas tenaga kerja), tingkat suku bunga (r), kapital (investasi), dan tingkat upah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja (Nicholson, 2002).

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, dimana hubungan keduanya biasanya bersifat negatif. Permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan dari permintaan barang atau jasa (Santoso, 2012). Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi (Sumarsono, 2009). Kurva permintaan tenaga kerja sebagai berikut :



Gambar 5: *Excess Demand of Labor*

Sumber : Subri (2003)

Gambar 5 diketahui bahwa ketika tingkat upah turun, dari W_1 ke W_e akan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang diminta adalah sebesar L_2 . Namun pada tingkat upah yang rendah, jumlah tenaga kerja yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebesar L_1 , sehingga pada L_1 dan L_2 terdapat kelebihan permintaan tenaga kerja (Subri, 2003)

Menurut Mankiw (2007) beberapa hal yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan tenaga kerja adalah: a. Harga output nilai produk marjinal adalah

produk marjinal dikali harga output perusahaan. Jadi ketika harga outputnya berubah, nilai produk marjinalnya pun berubah dan kurva permintaan tenaga kerjanya bergeser. b. Perubahan teknologi Kemajuan teknologi akan meningkatkan produk marjinal tenaga kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. c. Penawaran faktor-faktor produksi lainnya Kuantitas yang tersedia dari suatu faktor produksi dapat berpengaruh terhadap produk marjinal faktor-faktor produksi lainnya.

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja itu dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil. Hal ini berkaitan dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan, semakin tinggi upah atau gaji yang diberikan maka akan mengakibatkan semakin sedikit permintaan akan tenaga kerja begitu juga sebaliknya, hal ini sesuai dengan hukum permintaan (Sumarsono, 2009).

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan dalam masyarakat. Besarnya penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat *employment*) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut. Selanjutnya, besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah (Simanjuntak, 2001).

b. Penawaran Tenaga Kerja

Menurut teori ekonomi Neo Klasik berpendapat bahwa penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan bertambah bila tingkat upah bertambah. Penawaran tenaga kerja dapat menimbulkan kendala berupa pendapatan yang akan diperoleh pada saat waktu luang (*leisure time*). Tenaga kerja diasumsikan berusaha untuk memaksimalkan kepuasan yang diperoleh, yang berhubungan dengan pendapatan yang sudah diperoleh. Pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa, termasuk juga memanfaatkan waktu yang dimiliki untuk bersenang-senang. Argumentasi ini merupakan dasar dari kelompok Klasik untuk

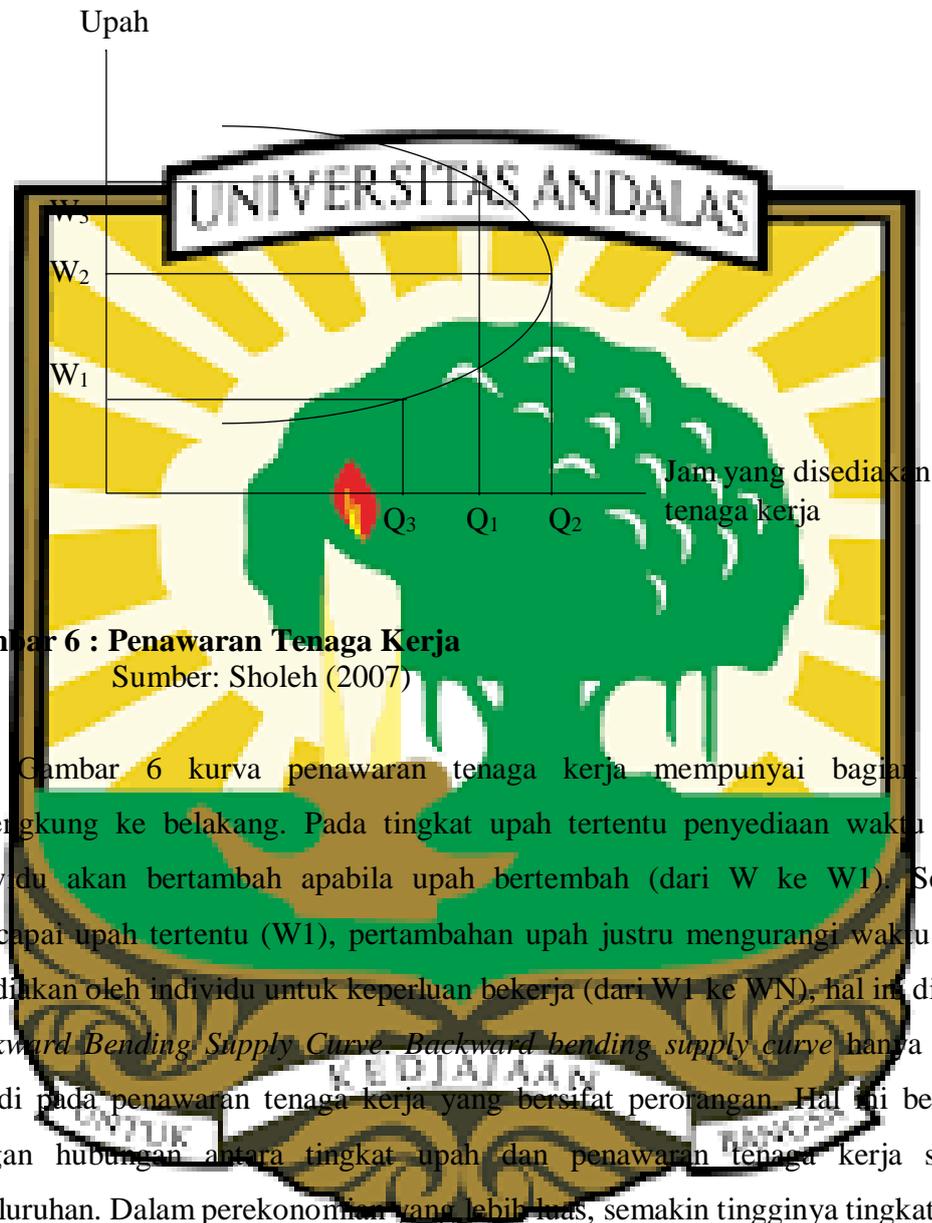
menjelaskan penawaran tenaga kerja yang lebih dikenal dengan *Labour Supply Curve* (Kusumosuwidho, 1981).

Dalam kasus tenaga kerja, kurva penawaran melukiskan jumlah tenaga kerja maksimum yang dapat disediakan oleh para pemilik tenaga kerja pada berbagai kemungkinan tingkat upah untuk tiap periode waktu. Sebagai alternatif, kurva penawaran tenaga kerja dapat dipandang sebagai setiap kemungkinan jumlah tenaga kerja yang siap untuk menyediakan tenaganya pada tingkat upah minimum tertentu. Dengan salah satu dari kedua pandangan itu, penawaran tenaga kerja haruslah ditinjau sebagai suatu skedul alternative yang diperoleh pada suatu titik waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Secara agregat bahwa tingkat upah mempunyai peranan langsung terhadap tenaga kerja yang ditawarkan. Pada kebanyakan orang, upah yang tinggi menjadi rangsangan atau motivasi untuk bekerja. Analisis terhadap penawaran tenaga kerja sering didasarkan atas mengalokasikan waktunya, yaitu antara waktu kerja dan waktu non kerja (*leisure*). *Leisure* dalam hal ini meliputi segala kegiatan yang tidak mendatangkan pendapatan secara langsung, seperti istirahat, merawat anak-anak, bersekolah, dan sebagainya. Pilihan tenaga kerja dalam mengalokasikan waktu dari dua jenis kegiatan ini yang akan menempatkan berapa tingkat imbalan (upah) yang diharapkan oleh tenaga kerja. Preferensi subyektif seseorang yang akan menentukan berapa besar jam kerja optimal yang ditawarkan dan tingkat upah yang diharapkan.

Menurut Bellante (1990) jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Lebih lanjut masing-masing dari ketiga komponen ini dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan tergantung pada upah pasar. Kenaikan tingkat upah berarti menambah pendapatan. Pertambahan pendapatan menyebabkan seseorang cenderung meningkatkan konsumsi dan menikmati waktu senggang lebih banyak yang berarti mengurangi jam kerja disebut efek pendapatan (*income effect*). Di sisi lain, kenaikan tingkat upah dapat diartikan semakin mahalnya harga dari waktu. Nilai waktu yang lebih tinggi mendorong seseorang

untuk menyubstitusikan waktu senggangnya untuk lebih banyak bekerja. Penambahan waktu kerja tersebut dinamakan efek substitusi (*substitution effect*).



Gambar 6 : Penawaran Tenaga Kerja

Sumber: Sholeh (2007)

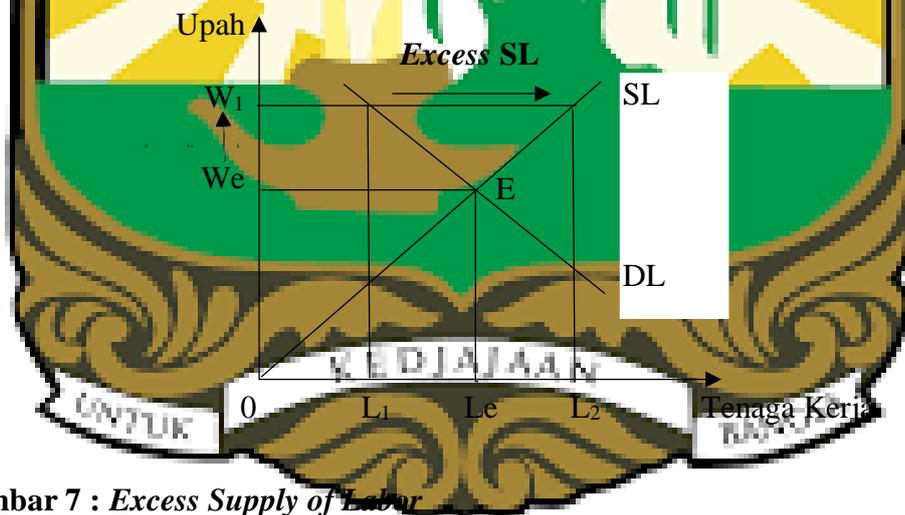
Gambar 6 kurva penawaran tenaga kerja mempunyai bagian yang melengkung ke belakang. Pada tingkat upah tertentu penyediaan waktu kerja individu akan bertambah apabila upah bertambah (dari W ke W_1). Setelah mencapai upah tertentu (W_1), pertambahan upah justru mengurangi waktu yang disediakan oleh individu untuk keperluan bekerja (dari W_1 ke W_N), hal ini disebut *Backward Bending Supply Curve*. *Backward bending supply curve* hanya dapat terjadi pada penawaran tenaga kerja yang bersifat perorangan. Hal ini berbeda dengan hubungan antara tingkat upah dan penawaran tenaga kerja secara keseluruhan. Dalam perekonomian yang lebih luas, semakin tingginya tingkat upah akan mendorong semakin banyak orang untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Orang-orang yang tadinya tidak mau bekerja pada tingkat upah yang rendah akan bersedia untuk bekerja dan ikut mencari pekerjaan pada tingkat upah yang lebih tinggi (Suparmoko dan Irawan, 2003).

Penawaran tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dan jumlah satuan pekerja yang disetujui oleh pensupplay untuk ditawarkan. Jumlah satuan

pekerja yang ditawarkan tergantung pada (1) besarnya penduduk, (2) presentase penduduk yang memilih berada dalam angkatan kerja, (3) jam kerja yang ditawarkan oleh peserta angkatan kerja, di mana ketiga komponen tersebut tergantung pada tingkat upah (Simanjuntak, 2001).

Supply tenaga kerja tergantung pada jumlah penduduk usia kerja dan tingkat partisipasi kerja. Perkiraan *supply* tersebut dapat dirinci menurut daerah, jenis kelamin, jenis dan tingkat pendidikan, keahlian serta keterampilan khusus. Perkiraan tersebut dapat didasarkan pada: 1) keadaan tenaga kerja di masa lampau; 2) kapasitas dan lulusan setiap tahun dari lembaga pendidikan; 3) kapasitas dan lulusan setiap tahun lembaga pelatihan; 4) tingkat partisipasi kerja penduduk dalam setiap golongan dan kelompok umur (Adriana, 2012).

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus, akibatnya kenaikan dari upah akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan (Sumarsono, 2009). Kurva penawaran tenaga kerja sebagai berikut :



Gambar 7 : Excess Supply of Labor
Sumber : Subri (2003)

Gambar 7 diketahui bahwa ketika tingkat upah naik, dari W_e ke W_1 akan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang diminta adalah sebesar L_1 . Namun dengan tingkat upah yang tinggi, jumlah tenaga kerja yang menawarkan dirinya untuk

bekerja adalah sebesar L_2 , sehingga pada L_1 dan L_2 terdapat kelebihan penawaran tenaga kerja (Subri, 2003)

Bellante (1983) menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja pasar dan penawaran tenaga kerja pasar secara bersama menentukan suatu tingkat upah keseimbangan dan suatu penggunaan tenaga kerja keseimbangan. Dalam keseimbangan semua pelaku ekonomi harus melakukan penyesuaian terhadap keadaan ekonomi sebagaimana adanya.

Pengangguran terdidik di negara-negara berkembang adalah sebagai konsekuensi dari berperannya faktor penawaran "*supply factors*". Selain itu proses pendidikan di negara-negara sedang berkembang telah menghasilkan berbagai dilema, upaya yang dilakukan untuk memperluas fasilitas pendidikan guna pencapaian pemerataan hasil-hasil pendidikan ternyata tidak diiringi dengan peningkatan kualitas tamatannya. Efek ganda dari dilema tersebut adalah semakin banyaknya pencari kerja berusia muda dan berpendidikan (Elfindri dan Bachtiar, 2004)

Pasar tenaga kerja terdidik adalah pasar tenaga kerja yang membutuhkan persyaratan dengan kualifikasi khusus yang biasanya diperoleh melalui jenjang pendidikan formal dan membutuhkan waktu yang lama serta biaya pendidikan yang cukup besar. Sedangkan pasar tenaga kerja tidak terdidik merupakan pasar tenaga kerja yang tidak membutuhkan kualifikasi khusus, seperti pendidikan dan keterampilan (Sumarsono, 2009).

3. Potensi Kemampuan Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, karena tenaga kerja merupakan subyek dan obyek pembangunan. Dengan demikian, tenaga kerja sangat menentukan atas keberhasilan pembangunan, dan pembangunan dianggap berhasil jika masyarakat (tenaga kerja) dapat hidup dengan sejahtera. Program pembangunan ekonomi di masa lalu terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan dengan mengabaikan pembangunan ketenagakerjaan, sehingga kesejahteraan tenaga kerja tidak tercapai. Hal ini merupakan pengalaman berharga

dengan timbulnya masalah ketenagakerjaan yang besar yaitu tingkat pengangguran yang tinggi dan rendahnya kualitas tenaga kerja

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan meningkat apabila terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam dan kapasitas produksi. Selain perkembangan itu, indikator penggerak perekonomian dalam upaya peningkatan pembangunan adalah kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan perekonomian, sebaliknya, kualitas sumber daya manusia yang buruk akan menghambat pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan jumlah pengangguran.

Menurut Tarigan (2005) kualitas sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek moral/mental dan aspek keahlian/keterampilan. Aspek moral/mental sangat terkait dengan lingkungan, sedangkan aspek keahlian/keterampilan dapat ditingkatkan melalui pendidikan/latihan. Pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang modern. Sumber daya manusia seperti inilah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya akan menekan jumlah pengangguran pada suatu negara.

Sumber Daya Manusia (SDM) atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau *man power* (Simanjuntak, 2001). Kualitas sumber daya manusia berpengaruh akan menentukan durasi menganggur, dimana semakin tinggi kualitas sdm maka semakin diuntungkan dalam proses *signaling* dan *screening*. Karena kualitas sdm merupakan *informational value*, dan berfungsi sebagai *signal*, dengan demikian akan lebih cepat memperoleh pekerjaan (Spence, 1974).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan dan daya. Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, sumber daya fisik secara lokal (daerah) (Subandi, 2011). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Potensi tenaga kerja akan berkembang dengan baik apabila ditunjang dengan lingkungan industri yang cukup meyakinkan bagi masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan potensi tenaga kerja adalah sesuatu yang dimiliki dan yang mungkin dapat dikembangkan, dalam hal ini yang dimaksud potensi tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja. Penduduk usia produktif merupakan salah satu sumber utama dalam pembangunan ekonomi. Karena penduduk usia produktif dapat ikut berperan dalam menghasilkan barang dan jasa. Dalam proses produksi sebagai suatu struktur dasar aktivitas perekonomian, tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting, karena tenaga kerja tersebut bertindak sebagai pelaku ekonomi, berbeda dengan faktor produksi lainnya yang bersifat pasif (seperti: modal, bahan baku, mesin, dan tanah). Tenaga kerja berkemampuan bertindak aktif, mampu mempengaruhi dan melakukan manajemen terhadap faktor produksi lainnya yang terlibat dalam proses produksi (Suharsono, 2009).

Menurut As'ad (2013) kemampuan (*ability*) sebagai karakteristik individual seperti *inteligensi, manual skill, traits* yang merupakan kekuatan potensial seseorang untuk berbuat dan sifatnya stabil. Thoha (2005) menjelaskan kemampuan adalah suatu kondisi yang menunjukkan unsur kematangan yang berkaitan pula dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diperoleh melalui pendidikan, latihan dan pengetahuan.

Menurut Robbins (2008) kemampuan (*ability*) merujuk kepada suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.

Kemampuan seorang individu pada dasarnya terdiri atas dua kelompok yaitu: 1). kemampuan Intelektual (*intellectual ability*), merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental (berfikir, menalar dan memecahkan masalah). 2). kemampuan fisik (*physical ability*), merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, ketrampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Menurut Sinungan (2003) kemampuan didefinisikan sebagai pengetahuan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Boateng (2015) menyatakan bahwa tingkat kemampuan tenaga kerja dapat diukur dari tingkat pendidikan dan umur, dimana semakin tinggi pendidikan dan umur tenaga kerja tentunya memiliki kemampuan yang tinggi dalam bekerja.

Dalam konteks teori *human capital*, investasi pengembangan kualitas sumber daya manusia tidak dipandang hanya dalam bentuk pendidikan formal saja, tetapi dapat ditempuh melalui pelatihan, pengalaman kerja, dan pendidikan non-formal. Investasi tersebut dapat meningkatkan kemampuan individu dalam membuat suatu keputusan yang optimal terutama dalam pencarian kerja dan dalam merespon setiap perubahan yang terjadi pada pasar kerja, maka dengan demikian pendidikan formal saja tidak cukup untuk menjadi tumpuan tunggal kualitas sdm dalam pencarian kerja (Fiddel dkk., 2011).

Faktor kualitas sumber daya manusia dengan bertumpu pada *signal* pendidikan formal dirasa belum cukup untuk dapat menjamin *matching* process akan berlangsung singkat dalam pencarian kerja. Hal ini dikarenakan karena faktor kualitas pendidikan formal belum cukup memadai untuk pengembangan kualitas sdm terutama di negara-negara berkembang. Masalah utamanya adalah pendekatan terhadap pendidikan formal masih dalam konteks *input based*, bukan pada *outcomes based*. *Input based* menekankan pada konteks jumlah masukan atau partisipasi terhadap pendidikan formal. Sementara itu, *outcomes based* menekankan pada konteks kualitas. Pendekatan *outcomes based* menganggap pendidikan formal tidak hanya menjadi wadah ‘formalitas’ untuk memperoleh gelar, melainkan dianggap sebagai suatu proses untuk ‘menjadi terdidik’ melalui tiga aspek yakni general skill, specific skill, dan technical-scientific knowledge (Killen, 2000; Okwakol, 2009; Fuente, 2002).

Definisi peningkatan sumber daya manusia adalah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menyangkut pengembangan aktifitas dalam bidang pendidikan dan latihan, peningkatan kemampuan penelitian pengembangan teknologi. Diantara unsur-unsur pengembangan sumber daya manusia di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan dan latihan merupakan unsur terpenting dalam peningkatan kualitas. Pengembangan sumber daya manusia, dalam jangka pendek dapat diartikan sebagai pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan segera tenaga-tenaga terampil yang bertujuan untuk mempermudah mereka terlibat dalam sistim sosial ekonomi di negara yang bersangkutan. Pengertian ini meletakkan manusia sebagai pelaku dan penerima pembangunan (Subri, 2003).

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya menambah cara-cara melaksanakan kerja yang baik dan juga dapat mengambil keputusan dalam pekerjaan atau dengan kata lain pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas akan tetapi juga merupakan landasan untuk pengembangan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana dan prasarana yang ada di sekitar kita untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Semakin tinggi tamatan pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan dan kesempatan untuk bekerja (Deliarnov, 2003).

Berdasarkan pendapat ahli dapat dikatakan bahwa kemampuan tenaga kerja dapat diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan umur. pada penelitian ini penulis mengukur kemampuan tenaga kerja yang diproksi dari tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan umur. Asumsinya apabila seorang tenaga kerja memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, pernah ikut pelatihan kerja, memiliki pengalaman kerja dan tidak berada pada usia muda tentunya memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bekerja sehingga akan mudah mendapatkan maupun menciptakan perkerjaan yang tentunya sangat jauh dari kata menganggur.

4. Teori Pengangguran

Dalam pengertian makro ekonomis pengangguran adalah sebagian dari angkatan kerja yang sedang tidak mempunyai pekerjaan. Dalam pengertian mikro penganggur adalah seorang yang mampu dan mau melakukan pekerjaan akan tetapi sedang tidak mempunyai pekerjaan (Soeroto, 1986). Pengangguran merupakan salah satu subjek utama dalam pembahasan ilmu makroekonomi selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungannya dengan pengangguran, terdapat dua isu utama. Pertama adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengangguran yang dihubungkan dengan kegagalan pasar, proses matching antara angkatan kerja dan pekerjaan yang tersedia, dan tidak berlakunya hukum Walras dalam pasar kerja yang menunjukkan adanya sumber daya manusia yang terbuang (Romer, 2001). Isu mengenai pengangguran yang kedua adalah terkait dengan siklus pasar tenaga kerja yang dihubungkan dengan perekonomian suatu negara.

Defenisi pengangguran terbuka (*open unemployment*) di Indonesia adalah didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya (Kundoro, 2006). Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2005). Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta (Mankiw, 2013).

Seseorang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2006). Menurut Dharmakusuma (1998) orang yang menganggur dapat didefinisikan sebagai orang yang tidak bekerja dan yang secara aktif mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya,

sedang menunggu panggilan kembali untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan atau sedang menunggu untuk melapor atas pekerjaan yang baru dalam waktu 4 minggu.

Pengangguran adalah belum diperolehnya pekerjaan oleh seorang angkatan kerja, padahal ia ingin bekerja dan termasuk angkatan kerja. Dalam empat minggu terakhir mereka aktif dalam mencari pekerjaan, namun hingga saat ini mereka belum mendapatkan pekerjaan hal ini dapat disebut pengangguran (Todaro, 2000). Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. (Kaufman dan Hotchkiss, 2006). Sedangkan pengangguran menurut Samuelson dan Nordhaus (2004) adalah orang-orang tanpa pekerjaan yang sedang mencari pekerjaan.

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Pencarian pekerjaan yang cocok dengan keahlian mereka adalah menggembirakan jika pencarian itu berakhir, dan orang-orang yang menunggu pekerjaan di perusahaan yang membayar upah di atas keseimbangan merasa senang ketika lowongan terbuka (Sukirno, 2013).

Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan orang yang menganggur dapat didefinisikan sebagai orang yang tidak bekerja dan yang secara aktif mencari pekerjaan selama empat minggu sebelumnya, sedang menunggu panggilan kembali untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan atau sedang menunggu untuk melapor atas pekerjaan yang baru dalam waktu empat minggu (Subri, 2003).

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang pengangguran diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Teori Klasik

Teori klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2004).

Dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil.

Menurut teori klasik permintaan tenaga kerja adalah merupakan fungsi dari upah riil. Menurut hukum semakin berkurangnya hasil (*the law minishing return*), produk marginal dari tenaga kerja akan berkurang dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Berdasarkan hukum ini, maka *employment* (tenaga kerja) hanya dapat bertambah apabila upah riil turun. Pada penawaran tenaga kerja juga bergantung pada upah riil. Tenaga kerja tidak akan bertambah makmur, bilamana upah dan harga naik 2 kali lipat.

Keseimbangan di pasar barang ditentukan upah riil, dimana penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Pengangguran terpaksa (*involuntary unempoyment*), yaitu suatu kondisi dimana jumlah orang yang bersedia bekerja pada suatu tingkat upah riil yang sudah berlaku lebih besar dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sektor industri (pengusaha). Pengangguran terpaksa ini dapat dihilangkan dengan menurunkan upah riil melalui penurunan upah uang, sama halnya dengan kelebihan penawaran pada setiap pasar dapat dihilangkan dengan menurunkan tingkat harga

2) Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik. Menurut teori Keynes sesungguhnya

masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi (Soesastro, 2005).

Dalam hal ini pemahaman Keynes memiliki pandangan yang berbeda dari aliran klasik yang tertuang dalam kesimpulan bahwa : 1) Keseimbangan *employment* dan tingkat pendapatan riil tidak hanya satu, tetapi bisa berbentuk beberapa keseimbangan; 2) Penentu tingkat keseimbangan *employment* bukanlah persaingan dalam pasar perburuhan, tetapi tingkat pendapatan, dan tingkat pendapatan ini sendiri ditentukan oleh permintaan total barang dan jasa.

3) Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Malthus menyuguhkan idenya dalam bentuk yang cukup kaku. Dia mengatakan penduduk cenderung tumbuh secara "deret ukur" (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderung tumbuh secara "deret hitung" (misalnya, dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya). Dalam karyanya yang terbit belakangan, Malthus menekankan lagi tesisnya, namun tidak sekaku semula, hanya saja dia berkata bahwa penduduk cenderung tumbuh secara tidak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan.

Dari kedua uraian tersebut Malthus menyimpulkan bahwa kuantitas manusia akan terjerumus ke dalam kemiskinan kelaparan. Dalam jangka panjang tidak ada

kemajuann teknologi yang mampu mengalihkan keadaan karena kenaikan *supply* makanan terbatas sedangkan “pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memproduksi makanan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia”.

Apabila ditelaah lebih dalam toeri Malthus ini yang menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan, dalam hal ini menimbulkan manusia saling bersaing dalam menjamin kelangsungan hidupnya dengan cara mencari sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi memperoleh bahan makanan.

Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manussia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.

4) Teori Sosiologi Ekonomi No-Marxian

Berawal dari analisis Marx pada awal abad 20 tentang struktur dan proses ekonomi yang dapat dibayangkan sebagai sistem kapitalisme kompetitif, industri kapitalis yang ada pada zaman itu tergolong masih kecil dan belum ada satupun yang memegang perekonomian dan mengendalikan pasar. Namun Marx yakin pada suatu saat apabila kapitalisme sudah muncul dengan demikian pesatnya maka akan memunculkan kompetisi antar industri yang menjadi semakin pesat dan kemudian menghasilkan sistem monopoli dari industri yang paling kuat dalam persaingan tersebut. Dengan munculnya monopoli modal ini maka akan ada satu perusahaan besar yang akan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dalam perekonomian kapitalis.

Dalam pengembangan analisis Marx yang dianut oleh para penganut Marxian yang baru konsep “kelas buruh” tidak mendeskripsikan sekelompok orang atau sekelompok pekerjaan tertentu, tetapi lebih merupakan pembelian dan penjualan tenaga kerja. Para tenaga kerja tidak mempunyai alat produksi sama sekali sehingga segolongan orang terpaksa menjual tenaga mereka kepada sebagian kecil orang yang mempunyai alat produksi.

Dari uraian diatas maka dapat kita telaah lagi bahwa dengan adanya pergantian antara sistem kapitalis kompetitif menjadi kearah sistem kapitalis monopoli, maka akan terdapat sebagian perusahaan yang masih tidak mampu bersaing dan menjadi terpuruk. Apabila semua proses produksi dan pemasaran semua terpengaruh oleh sebuah perusahaan raksasa saja, maka akan mengakibatkan perusahaan kecil menjadi sangat sulit dan hal pemasaran, bisa saja perusahaan kecil tersebut mengalami kebangkrutan dan tidak lagi mampu menggaji pekerjanya. Setelah perusahaan tersebut tidak mampu beroperasi lagi, maka para pekerja yang semula bekerja dalam perusahaan tersebut menjadi tidak mempunyai pekerjaan lagi yang pada akhirnya pekerja tersebut menjadi pengangguran.

Pengangguran terbuka (*Open Unemployment*) adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Setengah menganggur dibagi dalam dua kelompok yaitu : (1) Setengah menganggur kentara (*Visible Underemployed*) yakni seseorang yang bekerja tidak tetap (*part time*) di luar keinginannya sendiri atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek, dan (2) setengah menganggur tidak kentara (*invisible underemployed*) yaitu seseorang yang bekerja secara penuh (*full time*) tetapi pekerjaannya dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya (Subri, 2003).

Pengangguran itu terdiri dari tiga tingkatan. Pertama, apabila pengangguran itu atas dasar suka rela, efeknya akan jauh lebih kecil dibandingkan orang yang menganggur karena terpaksa. Kedua, lamanya waktu menganggur menentukan tinggi rendahnya tingkat efek psikologisnya. Apabila pengangguran terjadi dalam jangka waktu yang relatif pendek maka dampak psikologisnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang menganggur lama, khususnya apabila standar hidup telah berubah secara cepat, sehingga harus segera mendapatkan pekerjaan. Ketiga, beberapa orang mengembangkan perilaku defensive dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri bahwa keadaan menganggur berasal dari kegagalannya (Hurlock, 2002).

Sukirno (2011) menjelaskan bahwa pengangguran dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pengangguran berdasarkan penyebabnya dan pengangguran berdasarkan cirinya.

1) Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok yaitu:

a) Pengangguran Normal atau Friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai pengangguran normal.

b) Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal merupakan pengangguran yang disebabkan oleh penurunan permintaan agregat. Dimana, kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah.

c) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Dimana, tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara

lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural.

d) Pengangguran Teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

2) Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Berdasarkan cirinya, pengangguran dibagi menjadi empat kelompok yaitu terdiri dari:

a) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang terjadi karena permintaan lebih rendah dibandingkan dengan penawaran tenaga kerja.

b) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

c) Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan musim. Misalnya, sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.

d) Setengah Menganggur

Setengah menganggur (*underemployment*) merupakan kondisi dimana jam kerja pekerja jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Kuncoro (2006) menjelaskan bahwa pekerja yang digolongkan setengah pengangguran (*underemployment*) adalah pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan mereka yang bekerja dengan jam kerja rendah (dibawah sepertiga jam kerja normal, atau berarti bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu). Setengah pengangguran sukarela adalah setengah pengangguran tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (pekerja paruh waktu). Setengah pengangguran terpaksa adalah setengah pengangguran atau bersedia menerima pekerjaan. Pekerja digolongkan setengah pengangguran parah (*severe underemployment*) bila ia termasuk setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 25 jam seminggu.

Fenomena pengangguran telah dijelaskan dari perspektif yang berbeda dalam literatur ekonomi. Dari pandangan tradisional Keynesian, pengangguran umumnya disebabkan oleh defisiensi dalam agregat permintaan pada periode tertentu dalam siklus bisnis seperti pekerjaan yang tercipta tidak cukup bagi setiap orang yang ingin bekerja. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta (Kaufman dan Hotchkiss, 2006).

5. Pengangguran Terdidik

a. Pengertian Pengangguran Terdidik

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan. Pada dasarnya pengangguran merupakan penduduk usia produktif yang tidak mendapatkan kesempatan kerja dengan berbagai sebab. Ironisnya pengangguran banyak didominasi oleh kalangan

berpendidikan. Pengangguran dari kalangan berpendidikan disebut dengan pengangguran terdidik. (Tambunan, 2001).

Pengangguran tenaga kerja terdidik di negara sedang berkembang umumnya mengelompokkan pada golongan usia muda dan yang berpendidikan. Ada kecenderungan pengangguran lebih terpusat di kota daripada di desa. Kelompok pengangguran ini kebanyakan adalah tenaga kerja yang baru menyelesaikan pendidikan dan sedang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi mereka. Selama menunggu pekerjaan yang diinginkan biaya mereka ditanggung oleh keluarga yang relatif mampu. Ini mengisyaratkan bahwa masalah pengangguran di negara sedang berkembang kurang berkaitan dengan kemiskinan (Efendi, 1995)

Secara makro pengangguran tenaga kerja terdidik merupakan suatu pemborosan. Apabila dikaitkan dengan *opportunity cost* yang dikorbankan oleh negara akibat dari menganggurnya angkatan kerja terdidik terutama pendidikan tinggi. Namun dalam pandangan mikro, menganggur mempunyai tingkat utilitas yang lebih tinggi daripada menerima tawaran kerja yang tidak sesuai dengan aspirasinya. Sedangkan jika dilihat dari segi ekonomis, pengangguran tenaga kerja terdidik mempunyai dampak ekonomis yang lebih besar daripada pengangguran tenaga kerja kurang terdidik. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi yang gagal diterima perekonomian pada kelompok penganggur kurang terdidik (Sutomo, dkk, 1999)

Pengangguran terdidik digolongkan dalam pengangguran struktural, hal ini disebabkan akibat ketidaksesuaian antar struktur angkatan kerja berdasarkan jenis keterampilan, pekerjaan, industri atau lokasi geografis dan struktur permintaan akan tenaga kerja (Lipsey, 1997). Pengangguran sendiri tidak hanya dialami oleh angkatan kerja yang memiliki pendidikan rendah, namun pengangguran saat ini juga dialami oleh angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas yaitu lulusan SLTA/Kejuruan dan Perguruan Tinggi. Hal tersebut mencerminkan kemerosotan produktifitas sumber daya manusia dan kegagalan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya manusia.

Menurut Mankiw (2010) pengangguran terdidik adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau belum bekerja namun memiliki pendidikan SMA/ sederajat dan keatasnya. Menurut Adrimas (2012) pengangguran terdidik adalah pencari kerja yang tamat SLTA dan keatas, tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Menurut BPS (2018) pengangguran terdidik adalah berapa banyak jumlah pencari kerja yang memiliki pendidikan jenjang SMA ke atas dibagi dengan angkatan kerja yang memiliki pendidikan jenjang SMA ke atas atau seseorang yang memiliki tingkat pendidikan SMA keatas yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Menurut Tobing (2005) pengangguran tenaga terdidik yaitu angkatan kerja yang berpendidikan menengah ke atas (SMTA, Akademi dan Sarjana) dan tidak bekerja.

Menurut Pasay dan Indrayanti (2012) pengangguran terdidik adalah mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang cukup, namun masih belum memiliki pekerjaan. Kategori lulusan pendidikan yang cukup adalah mereka yang berpendidikan setingkat SMA, program diploma, dan universitas. Faktor-faktor penyebab banyaknya pengangguran tenaga kerja terdidik antara lain: krisis ekonomi, struktur lapangan kerja tidak seimbang, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang, dan jumlah angkatan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan kesempatan kerja. Suryadi (1994) menyatakan bahwa pengangguran tenaga kerja terdidik hanya terjadi selama lulusan mengalami masa tunggu (*job search periode*) yang dikenal sebagai pengangguran friksional. Lama masa tunggu dapat bervariasi menurut tingkat pendidikan. Terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh angkatan kerja semakin lama masa tenggunya.

Pengangguran terdidik merupakan kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja, hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya pengangguran terdidik. Padahal, untuk menjadi seorang lulusan yang siap kerja, perlu tambahan keterampilan di luar bidang akademik. Disisi lain, para pengangguran terdidik mempunyai tingkat aspirasi yang tinggi seperti lebih memilih pekerjaan yang mendapatkan banyak fasilitas, mendapatkan kedudukan, dan langsung mendapatkan gaji besar.

Individu yang menganggur adalah individu yang dipandang mampu bekerja, memiliki keinginan untuk bekerja dan membutuhkan pekerjaan namun tidak atau

belum mempunyai pekerjaan (Baharuddin, 1980). Seseorang disebut menganggur jika tidak bekerja dan (a) telah melakukan upaya-upaya tertentu untuk mendapatkan pekerjaan selama 4 minggu terakhir, (b) diberhentikan untuk sementara dan sedang menunggu untuk dipanggil kembali bekerja, atau (c) sedang menunggu untuk melaporkan diri siap bekerja bulan depan.

Menurut Khan dan Yousaf (2013) pengangguran berpendidikan mungkin dikarenakan kurangnya pendidikan, kurangnya sistem pelatihan, preferensi untuk pekerjaan sektor publik dan tidak adanya sistem informasi pasar tenaga kerja yang efektif. Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik disebabkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin tinggi pula aspirasi untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai.

Secara makro, pengangguran tenaga kerja terdidik merupakan suatu pemborosan. Apabila dikaitkan dengan *opportunity cost* yang dikorbankan oleh negara akibat dari menganggurnya angkatan kerja terdidik terutama pendidikan tinggi. Namun dalam pandangan mikro, menganggur mempunyai tingkat utilitas yang lebih tinggi daripada menerima tawaran kerja yang tidak sesuai dengan aspirasinya. Sedangkan jika dilihat dari segi ekonomis, pengangguran tenaga kerja terdidik mempunyai dampak ekonomis yang lebih besar daripada pengangguran tenaga kerja kurang terdidik. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi yang gagal diterima perekonomian pada kelompok penganggur kurang terdidik (Sutomo, dkk, 1999).

Lapangan pekerjaan merupakan indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas karena pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang baik. Sumber daya manusia seperti inilah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan ke depan. Salah satu upaya dalam mewujudkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan ini dikenal dengan kebijakan *link and match* (Suryadi, 1995).

Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik telah menjadikan masalah yang makin serius. Kemungkinan ini disebabkan bahwa

semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka makin tinggi pula aspirasi untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai. Proses untuk mencari kerja yang lebih lama pada kelompok pencari kerja terdidik disebabkan mereka lebih banyak mengetahui perkembangan informasi di pasar kerja, dan mereka lebih berkemampuan untuk memilih pekerjaan yang diminati dan menolak pekerjaan yang tidak sesuai (Mulyono, 1997).

Dilihat dari dampak ekonomis yang ditimbulkan, pengangguran tenaga kerja terdidik mempunyai dampak ekonomis yang lebih besar dari pada pengangguran tenaga kerja kurang terdidik. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi yang gagal diterima oleh perekonomian dari tenaga kerja terdidik yang menganggur lebih besar daripada kontribusi yang gagal diterima perekonomian pada kelompok pengangguran kurang terdidik (Mulyono, 1997).

b. Faktor Penentu Pengangguran Terdidik

Decreuse (2001) telah melakukan studi yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa pola tingkat pengangguran berbeda di setiap kelompok pendidikan yang menghubungkan adanya perbedaan produktivitas dan keahlian (*skill*) dari masing-masing individu. Hasil studi menunjukkan bahwa pentingnya menanamkan keahlian (*skill*) pada pendidikan. DePrince dan Morris (2008) menyatakan bahwa adanya pengangguran terdidik karena adanya ketidaksesuaian sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Manacorda dan Petrongolo (1999) menambahkan pengangguran terdidik disebabkan kurang sesuainya kualifikasi angkatan kerja terdidik dan kebutuhan pasar kerja. Lebih lanjut, Dhanani (2004) memaparkan bahwa pengangguran di Indonesia didominasi oleh pengangguran yang berusia muda.

Mathew (1995) memberikan penjelasan bahwa masalah pengangguran terdidik tidak hanya bisa diselesaikan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi, namun harus ada implementasi kebijakan di bidang pendidikan. Salah satu penyebab adanya pengangguran terdidik karena banyaknya lulusan jurusan kesenian dan ilmu pengetahuan alam. Leonor (1985) menyatakan bahwa

pentingnya memberikan pelatihan mengingat industri modern lebih menyukai tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan.

Dari sisi penawaran, kecenderungan makin meningkatnya tingkat pendidikan akan berakibat pada makin tinggi harapan untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran terdidik (Sutomo, dkk, 1999), yaitu sebagai berikut : 1) Ketimpangan struktural dan ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja (*labor supply*) dan kesempatan kerja yang tersedia. Ketidakcocokan ini mungkin bersifat geografis, jenis pekerjaan, orientasi, status, atau masalah keahlian khusus; 2.) Pengaruh teori human capital (Woodhall dan Psacharopoulos, 1997) yang menyebabkan timbulnya asumsi pendidikan sekolah sebagai lembaga yang secara langsung mempersiapkan tenaga kerja yang mampu dan terampil bekerja; 3.) Terbatasnya daya serap tenaga kerja di sektor formal (tenaga kerja terdidik yang jumlahnya cukup besar memberi tekanan yang kuat terhadap kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya relatif kecil); 4.) Belum efisiennya fungsi pasar kerja. Di samping faktor kesulitan memperoleh lapangan kerja, arus informasi tenaga kerja yang tidak sempurna menyebabkan banyak angkatan kerja bekerja di luar bidangnya. Kemudian faktor optimisasi utilitas juga menyebabkan lulusan akademi atau universitas memilih menganggur jika tidak sesuai dengan bidangnya.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab pengangguran menurut Mankiw (2010) ialah sebagai berikut:

1. Kekakuan Upah

Kekakuan upah berarti gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Dalam model keseimbangan pasar tenaga kerja, upah riil berubah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Tetapi upah tidak selalu fleksibel, sehingga upah riil tertahan di atas tingkat kliring pasar atau tingkat ekuilibrium sehingga terjadi pengangguran.

Saat upah riil melebihi tingkat ekuilibrium dan penawaran pekerja melebihi permintaannya, maka para perusahaan diharapkan akan menurunkan

upah yang akan dibayar kepada para pekerja. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Pengangguran struktural kemudian muncul sebagai implikasi karena perusahaan gagal menurunkan upah akibat kelebihan penawaran tenaga kerja (Mankiw, 2000).

2. Pencarian Kerja

Salah satu alasan mengapa pengangguran selalu ada dalam perekonomian adalah pencarian kerja. Pencarian kerja (*job search*) adalah proses mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai. Salah satu program pemerintah yang meningkatkan jumlah pengangguran friksional, meskipun tidak disengaja, adalah tunjangan pengangguran. Atau tunjangan pengangguran adalah program pemerintah yang secara parsial menjamin pendapatan pekerja pada saat mereka menganggur. Program ini bertujuan untuk memberikan kompensasi parsial bagi pekerja akibat kehilangan pekerjaan.

3. Peraturan Upah Minimum

Jika upah di pertahankan di atas titik keseimbangan karena segala alasan maka hasilnya adalah pengangguran. Peraturan upah minimum adalah salah satu alasan mengapa upah menjadi terlalu tinggi. Apabila pencari kerja menjadi alasan terjadinya pengangguran, para pekerja mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Sebaliknya, apabila upah berada diatas titik keseimbangan, jumlah penawaran tenaga kerja melebihi jumlah permintaan, dan para pekerja menjadi pengangguran karena mereka menunggu adanya lowongan pekerjaan.

4. Serikat Pekerja dan Tawar-menawar Kolektif

Serikat kerja (*Union*) adalah asosiasi pekerja yang melakukan tawar-menawar dengan pemberi kerja mengenai upah dan kondisi kerja. Serikat kerja merupakan sejenis kartel. Serikat kerja merupakan sekelompok penjual yang bekerja sama dengan harapan menggunakan daya pasar bersama mereka. Tawar-menawar kolektif adalah proses di sepakatinnya syarat-syarat kerja antara serikat kerja dan perusahaan. Pemogokan adalah penarikan pekerja dari perusahaan yang diadakan oleh serikat pekerja.

5. Teori Upah Efisiensi

Alasan lain mengapa pengangguran selalu terjadi dalam perekonomian selain pencarian kerja, peraturan upah minimum, dan serikat pekerja, dijelaskan oleh teori upah efisiensi. Menurut teori ini, perusahaan-perusahaan beroperasi secara lebih efisien jika upah berada di atas titik keseimbangan. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan lebih diuntungkan jika mempertahankan upah tinggi meskipun terdapat surplus tenaga kerja.

Pengangguran tenaga kerja terdidik akan lebih terlihat terutama dari kelompok usia muda yang baru lulus dari tingkat pendidikannya serta mencari kerja untuk pertama kalinya. Menurut Sutomo, dkk (1999) bahwa tingkat pengangguran terdidik kelompok muda yang relatif tinggi disebabkan oleh faktor:

- 1) Faktor struktural
 - a) Kurangnya ketrampilan kelompok muda di banding kelompok yang lebih matang.
 - b) Ketimpangan atau kendala geografis dan kelangkaan informasi yang menghambat pasar tenaga kerja.
 - c) Faktor usia ketika meninggalkan sekolah, biasanya meninggalkan sekolah pada usia lebih awal mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi.
- 2) Faktor non struktural
 - a) Kenaikan tingkat upah buruh yang mendorong majikan untuk memutuskan hubungan kerja atau tidak menerima pegawai baru.
 - b) Meningkatnya partisipasi perempuan termasuk mereka yang berstatus kawin ke dalam angkatan kerja.
 - c) Persepsi pemuda terhadap pekerjaan yang tersedia antara lain tentang tingkat upah yang rendah, persepsi karir maupun lingkungan kerjanya.
 - d) Latar belakang keluarga termasuk dukungan mereka terhadap pemuda untuk menganggur sebelum memutuskan untuk menerima suatu pekerjaan.

Suroto (1992) berpendapat bahwa pengangguran terdidik disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Adanya penawaran tenaga kerja yang melebihi dari permintaan tenaga kerja (*supply > demand*), yaitu pada saat tingkat kemakmuran masyarakat tinggi,

menurunnya permintaan terhadap tenaga kerja dapat menurunkan partisipasi masyarakat untuk masuk dalam dunia kerja.

- b. Kebijakan rekrutmen tenaga kerja sering bersifat tertutup. Hasil penelitian menunjukkan tenaga kerja lebih memilih media lain yaitu teman atau famili yang sudah bekerja lebih dahulu bekerja pada perusahaan yang dilamar, hal ini membuktikan bahwa penerimaan tenaga kerja banyak yang dilakukan secara tertutup.

- c. Perguruan tinggi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengembangkan tiga aspek kompetensi yaitu, kepribadian, profesional, dan kemasyarakatan. Sehingga hal tersebut semakin menuntut mahasiswa untuk mandiri, kritis, kreatif serta ekspresif. Keempat sifat tersebut dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pencarian kerja, karena suatu perusahaan akan memerlukan sumber daya manusia dengan kualitas yang tinggi.

- d. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin besar harapannya pada jenis pekerjaan yang aman.

Suryadi (1994) mengatakan bahwa pengangguran tenaga kerja terdidik disebabkan tiga alasan penting, yaitu sebagai berikut :

1. Ketimpangan struktural antara persediaan dan kesempatan kerja.
2. Terlalu kuatnya pengaruh teori *human capital* terhadap cara berpikirmasyarakat yang menyebabkan timbulnya sikap yang seolah-olah mengkuaitaskan pendidikan sekolah sebagai lembaga yang secara langsung mempersiapkan tenaga kerja yang mampu dan terampil bekerja.
3. Program pendidikan kejuruan yang terlalu diatur dengan besarnya peranan menengah dan pendidikan profesional jenjang pendidikan tinggi. Sementara peran lembaga pendidikan swasta dan dunia usaha masih terlalu kecil.

Menurut Tobing (2005) jika ditelusuri lebih lanjut, meningkatnya pengangguran tenaga terdidik merupakan gabungan beberapa penyebab:

1. Ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja (sisi penawaran tenaga kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia (sisi

permintaan tenaga kerja). Ketidakcocokan ini mungkin bersifat geografis, jenis pekerjaan, orientasi status atau masalah keahlian khusus.

2. Semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja, seorang angkatan kerja yang berpendidikan tinggi maka semakin besar harapannya pada jenis pekerjaan yang aman. Golongan ini memilih pekerjaan yang stabil daripada pekerjaan yang berisiko tinggi sehingga lebih suka bekerja pada perusahaan besar daripada membuka usaha sendiri.
3. Terbatasnya daya serap tenaga kerja sektor formal sementara angkatan kerja terdidik cenderung memasuki sector formal yang kurang berisiko. Hal ini menimbulkan tekanan penawaran dimana dimana tenaga kerja terdidik yang jumlahnya cukup besar memberi tekanan kuat terhadap kesempatan kerja di sector formal yang jumlahnya relative kecil, sehingga terjadi pendayagunaan tenaga kerja terdidik yang tidak optimal.
4. Belum efisiensinya fungsi pasar tenaga kerja. Disamping faktor kesulitan memperoleh lapangan pekerjaan, arus informasi tenaga kerja yang tidak sempurna dan tidak lancar menyebabkan banyak angkatan kerja yang bekerja diluar bidangnya. Hal ini tentu saja berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi penggunaan tenaga kerja.

Menurut Moeis (1992) tingkat pendidikan akan mengurangi biaya mencari kerja karena tenaga kerja terdidik semakin efisien dalam mencari pekerjaan sebab pengetahuannya tentang pasar kerja beserta kelembagaannya, serta lingkungan pekerjaan semakin baik. Seiring dengan menurunnya biaya mencari kerja, *reservation wage* akan meningkat, sehingga semakin lama ia menganggur.

Pendidikan formal sangat instrumental dan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu sehingga pendidikan dianggap sebagai investasi modal manusia dalam industri (Woodhall dan Paacharopoulos, 1997). Pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro dan Smith, 2004).

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada dan mencerminkan tingkat kepandaian atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja yang tentunya akan memperkecil peluangnya menjadi pengangguran.

Tujuan dasar pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan upaya pemenuhan manusia siap pakai. Kecenderungan makin meningkatnya tingkat pendidikan akan berakibat meningkatnya pula angka pengangguran tenaga kerja terdidik daripada bertambahnya tenaga kerja yang mempunyai produktivitas sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja (Djojohadikusumo, 1999).

Menurut Elfindri dan Bachtiar (2004) salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pendidikan dimana lapangan pekerjaan merupakan indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam hubungannya dengan kualitas SDM, pendidikan dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas SDM itu sendiri dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang modern.

Tingkat pendidikan seseorang berkaitan erat dengan kesempatan kerja. Takii (1997) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan angkatan menentukan besar kecilnya untuk diterima bekerja oleh perusahaan, dimana angkatan kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi akan memiliki peluang yang tinggi untuk diterima bekerja dan sebaliknya. Foley (1997) menyatakan pekerja dengan pendidikan tinggi tidak akan menganggur daripada mereka yang memiliki pendidikan menengah atau bahkan sekolah dasar. Kettunen (1997) menyatakan bahwa orang-orang yang menganggur dan memiliki tingkat pendidikan sekitar 13-14 tahun memiliki kemungkinan yang besar untuk dapat kembali bekerja. Grogan, *et.al* (2001) menemukan bahwa angkatan kerja yang berpendidikan rendah cenderung menganggur dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Tansel dan Tasci

(2004) menyatakan angkatan kerja yang memiliki pendidikan tinggi cenderung tidak menganggur dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. Khan dan Yousef (2013) menemukan bahwa pemegang gelar pendidikan yang lebih tinggi berpeluang tidak menganggur daripada mereka pemegang gelar rendah.

Pengangguran terdidik merupakan kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja. Hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya jenis pengangguran ini. Faktanya lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja, bukan pencipta kerja. Padahal untuk menjadi seorang lulusan yang siap kerja, mereka perlu tambahan keterampilan di luar bidang akademik yang mereka kuasai (Mulyono, 1997).

Becker (1964) mengembangkan teori tentang *on the job training*, mengemukakan dua jenis pelatihan/*training*: (1) pelatihan khusus (*specific training*), yang meningkatkan produktivitas marginal pekerja lebih besar, (2) pelatihan umum (*general training*), yang meningkatkan produktivitas pekerja secara umum. Menurut Widodo (2015) pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Fathoni (2006) menjelaskan bahwa pelatihan merupakan upaya untuk mentransfer keterampilan dan pengetahuan kepada para peserta pelatihan sedemikian rupa sehingga para peserta memiliki keterampilan yang dapat diterapkan pada dunia kerja.

Definisi pelatihan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 pasal 1 ayat 21 adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Hasil penelitian Baah-Baaheng (2014) menemukan bahwa penyebab pengangguran disebabkan karena ketidaksesuaian keahlian yang dibentuk oleh institusi pendidikan dan pelatihan dan keahlian yang diminta oleh tuntutan pasar tenaga kerja. Menurut Powell (1983) individu yang menganggur tidak dapat memenuhi: pertama *self preservation* yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kedua *social bonding* yang berkaitan dengan hubungan individu

dengan lingkungan dan masyarakat, ketiga *appreciation* yaitu kebutuhan akan adanya penghargaan dan terakhir *competence* yaitu kemampuan individu untuk mewujudkan sesuatu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) pengalaman dapat diartikan sebagai yang pernah dialami (dijalani, dirasa, ditanggung, dan sebagainya). Manulang (1984) menjelaskan bahwa pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.

Menurut Dewey (2002) pengalaman kerja didefinisikan sebagai sesuatu atau kemampuan yang dimiliki oleh para karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan pengalaman yang cukup panjang dan cukup banyak maka diharapkan mereka akan mempunyai kemampuan yang lebih besar daripada yang tanpa pengalaman.

Orang yang berpengalaman dalam bekerja memiliki kemampuan kerja yang lebih baik dari orang yang baru saja memasuki dunia kerja, karena orang tersebut telah belajar dari kegiatan-kegiatan dan permasalahan yang timbul dalam kerjanya. Dengan adanya pengalaman kerja maka telah terjadi proses penambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta sikap pada diri seseorang, sehingga dapat menunjang dalam mengembangkan diri dengan perubahan yang ada.

Diperkirakan bahwa dengan pengalaman kerja pencari kerja lebih sanggup untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai, selain itu pengalaman kerja menggambarkan pengetahuan pasar kerja. Dengan memiliki pengalaman kerja didukung tingkat pendidikan yang tinggi, maka tenaga kerja akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan (Sutomo, dkk, 1999).

Penyedia lapangan pekerjaan lebih mengutamakan tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja. Tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja akan lebih siap dan mampu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang baru bila dibandingkan dengan tenaga kerja yang belum memiliki pengalaman kerja. Dengan memiliki pengalaman kerja akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan (Setiawan, 2010).

Umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun. Djojohadikusumo (1999) menjelaskan penduduk yang tergolong kedalam tingkat usia muda adalah yang berumur 15-24 tahun. Barthos (1993) menjelaskan bahwa golongan umur yang tergolong usia muda dalam pasar tenaga kerja adalah angkatan kerja yang berumur antara 15-24 tahun.

Menurut Mulyono (1997) pengangguran terdidik akan lebih terlihat terutama dari kelompok usia muda (15-24 tahun) lebih tinggi daripada kelompok usia di atas 24 tahun. Penemuan Allen (2016) menemukan bahwa sepertiga dari penganggur terutama pada usia muda harus menunggu selama satu tahun untuk masuk ke pasar kerja, terutama untuk masuk pasar kerja sektor formal, mereka inilah yang kemudian disebut sebagai *choosy educated job seekers*.

Menurut Bellante (1990), tingkat pengangguran dikalangan remaja adalah sangat tinggi, selanjutnya mereka memang semakin tinggi jumlahnya dalam perjalanan waktu. Hampir di Negara-negara sedang berkembang tingkat pengangguran untuk golongan 15-24 tahun dua kali lipat atau lebih dari tingkat pengangguran untuk semua golongan umur baik laki-laki maupun perempuan.

Golongan umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun sangat menonjol tingkat penganggurannya, namun tingkat golongan umur 24 tahun ke atas proporsinya terus menurun dan relatif rendah. Gejala penurunan ini diduga erat berkaitan dengan pola perkawinan. Apabila dihubungkan dengan menonjolnya pola pengangguran pada golongan umur muda, ternyata itu berhubungan dengan tingkat pendidikan (Sutomo, 1999).

Persoalan mengenai gender bukanlah merupakan suatu kajian yang baru dalam hidup bermasyarakat, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya mengenai gender khususnya di negara Indonesia yang menimbulkan ketimpangan dalam penerapan gender di masyarakat. Sehingga membahas masalah gender selalu menarik untuk dikaji. Menurut Mulyono (1997) menyatakan bahwa pencari kerja laki-laki mempunyai tingkat probabilitas untuk mencari kerja lebih tinggi daripada pencari kerja perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya probabilitas mencari kerja lebih besar pada pencari kerja laki-laki daripada pencari kerja perempuan.

Peningkatan status dan peran perempuan dalam pembangunan merupakan hal yang terus-menerus diperjuangkan. Peningkatan partisipasi perempuan di bidang pendidikan dan pekerjaan sering kali dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, upaya peningkatan pendidikan perempuan dan upaya mendorong perempuan untuk terjun ke dunia kerja juga terus-menerus diupayakan oleh berbagai pihak (Tukiran dan Darwin, 2001).

Menurut ILO (2015) di Indonesia tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih tergolong sangat rendah yaitu berkisar antara 50% sampai 55% selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak perempuan yang berada diluar dunia kerja. Banyaknya perempuan yang tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja diakibatkan tanggung jawab keluarga, dimana ada banyak perempuan yang menyatakan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Situasi ini menegaskan adanya perbedaan gender dalam hal pembagian tanggung jawab keluarga dan peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja kemungkinan besar dapat merubah sifat ketidaksetaraan gender di Indonesia.

Jadi, jenis kelamin merupakan perbedaan yang tampak antara wanita dan pria dalam hal nilai dan perilaku. Wanita dianggap makhluk yang lemah untuk jenis pekerjaan tertentu, sehingga posisi wanita dalam dunia kerja masih dirugikan. Bagi masyarakat tertentu yang masih mendiskriminasikan wanita sebagai makhluk yang lemah akan membuat hambatan tersendiri bagi wanita, seperti posisi kerja yang tidak terlalu baik dan dengan upah yang rendah. Kesetaraan gender pada era modern ini yaitu sikap dan perilaku yang sama diberikan kepada wanita ataupun pria khususnya akses untuk bekerja, namun tidak sepenuhnya kesetaraan itu sesuai pada kondisi sebenarnya.

Tingkat partisipasi kerja laki-laki selalu lebih tinggi dari tingkat partisipasi kerja perempuan karena laki-laki dianggap pencari nafkah yang utama bagi keluarga, sehingga pekerja laki-laki biasanya lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan aspirasinya baik dari segi pendapatan maupun kedudukan dibanding pekerja perempuan Hampir semua laki-laki yang telah

mencapai usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi karena laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga (Simanjuntak, 2001).

Menurut BPS (2018) status perkawinan terdiri dari empat kategori yaitu:

1. Belum kawin, yaitu status dari mereka yang pada saat pencacahan belum terikat dalam perkawinan
2. Kawin, status dari mereka yang pada saat pencacahan terikat dalam perkawinan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Termasuk didalamnya mereka yang kawin sah secara hukum (hukum adat, agama, negara, ds) maupun mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri
3. Cerai hidup, status dari mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya karena bercerai dan belum kawin lagi
4. Cerai mati, status untuk mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya karena meninggal dunia dan belum kawin lagi

Menurut BPS (2015) kepala rumah tangga (KRT) adalah seseorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dianggap /ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan anggota rumah tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (kepala rumah tangga, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, family lain, pembantu rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya), baik yang berada di rumah tangga responden maupun sementara tidak ada pada waktu pencacahan. Seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab akan rela bekerja apa saja demi memenuhi nafkahkeluarganya. Lain halnya pada saat belum menikah karena masih ditopang keluarga.

Wilayah tempat tinggal merupakan wilayah dimana suatu rumah tangga tinggal menetap. Pada penelitian ini wilayah tempat tinggal dibagi menjadi dua bagian yaitu wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pedesaan adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu.

Sedangkan perkotaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2008 adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Hal ini menyebabkan penduduk perdesaan bermigrasi ke perkotaan untuk mencari kerja, karena mereka menilai peluang mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan di kota lebih tinggi, dari pada di perdesaan.

Alanya pembangunan ekonomi di wilayah perkotaan sering dikelompokkan sebagai transfer manusia dan aktivitas ekonomi secara terus menerus dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan. Ini dimungkinkan karena kombinasi dua faktor yaitu (1) ekspansi industri perkotaan yang menimbulkan penciptaan kesempatan kerja baru; (2) kemajuan teknologi yang bersifat menghemat tenaga kerja (*labor saving*) di sektor pertanian sehingga menurunkan kebutuhan angkatan kerja di daerah perdesaan (Todaro dan Smith, 2004)

Pengangguran terdidik di negara sedang berkembang umumnya dikelompokkan pada golongan usia muda dan yang berpendidikan. Ada kecenderungan pengangguran lebih terpusat di kota dari pada di desa. Kelompok pengangguran ini kebanyakan adalah tenaga kerja yang baru menyelesaikan pendidikan dan sedang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi mereka. Selama menunggu pekerjaan yang diinginkan, biaya mereka ditanggung oleh keluarga yang relatif mampu (Effendi, 1995).

6. Durasi Menganggur (*Duration of Unemployment*)

a. Pengertian Durasi Menganggur

Menurut Mankiw (2010) durasi menganggur merupakan waktu yang dibutuhkan oleh angkatan kerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang paling cocok dengan keahlian dan selera angkatan kerja. Selanjutnya Khan dan Yousef, (2013) menjelaskan bahwa durasi menganggur adalah masa tunggu seseorang mendapatkan pekerjaan setelah memperoleh pendidikan terakhir.

Istilah lain dari durasi menganggur adalah lama menganggur. Lama menganggur berarti menunggu seseorang angkatan kerja untuk memperoleh

pekerjaan (Tjiptoherijanto, 1989). Lamanya masa pengangguran merupakan sejumlah waktu dimana seseorang belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur yang diukur dalam minggu atau bulan (Valetta, 2002). Lama menganggur adalah lama proses pencarian kerja tanpa mengikuti urutan tertentu (McConnel, 1999).

Secara umum penyebab lamanya seseorang menganggur menurut Hernaes (1999) bahwa pengaruh pendidikan sangatlah besar: umumnya, makin tinggi seseorang mengenyam pendidikan makin pendek masa penganggurannya. Makin tinggi umur seseorang akan memperpanjang durasi menganggur seseorang, khususnya bagi pria. Bagi wanita variasi umur tidak begitu berpengaruh, namun durasi menganggur untuk wanita lebih panjang dibandingkan pria. Status menikah mempendek durasi menganggur bagi pria, namun memperpanjang durasi menganggur bagi wanita karena memiliki anak. Pengalaman kerja berpengaruh pada lamanya menganggur seseorang. Makin lama pengalaman kerja seseorang, maka makin pendek periode menganggur seseorang tersebut.

Secara teoritis masa pengangguran yang lebih lama itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Masa pengangguran yang lama karena pencari kerja tidak memiliki keterampilan; pengusaha yang tidak menambah pekerja baru; atau pekerja yang menganggur tidak mengetahui bagaimana caranya bekerja dengan produktif. Atau pencari kerja tidak begitu membutuhkan pekerjaan secepatnya, karena telah mendapatkan beberapa sumber penghasilan lain, seperti tunjangan pengangguran atau didapat dari pasangannya yang bekerja (CUSCBO, 2007).

Lama menganggur merupakan faktor penentu dalam masa resesi, bila masa pengangguran singkat, pekerja dapat menggunakan simpanan uang/harta yang dimiliki dan jika masa pengangguran belum berakhir, simpanan uang/harta yang dimiliki harus lebih banyak agar bisa mencukupi aktivitas individu selama menganggur (Abraham & Shimer, 2001). Mengubah perilaku penganggur menjadi putus asa sehingga akan lebih menyulitkan dalam mencari kerja dan angkatan kerja yang kurang berkualitas akan diasingkan masyarakat (Foley, 1997).

Menurut Tjiptoherijanto (1989) faktor yang berpengaruh terhadap lama menganggur seseorang pencari kerja yaitu pengalaman kerja, umur, wilayah tempat tinggal, status perkawinan, pendidikan, keterampilan, tanggungan rumah tangga,

status migran, pendapatan rumah tangga dan jenis pekerjaan. Khan dan Yousaf (2013) menyatakan lama menganggur kemungkinan tergantung pada karakteristik seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, upah yang diinginkan, upah yang ditawarkan, intensitas pencarian serta kondisi pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran lokal.

Masa menganggur adalah periode dimana seseorang terus menerus menganggur atau lamanya menganggur rata-rata seorang pekerja. Lama menganggur tersebut tergantung pada : a) Organisasi pasar tenaga kerja, berkenaan dengan ada atau tidak adanya lembaga atau penyalur tenaga kerja dan sebagainya. b) Keadaan geografis dari angkatan kerja. c) Kemampuan dari keinginan para penganggur untuk tetap mencari pekerjaan yang lebih baik. d) Tersedianya dan bentuk perusahaan (Dharmakususma, 1998).

Lamanya mencari kerja bagi tenaga kerja terdidik bukanlah hal yang sulit ditemukan dalam kehidupan era sekarang ini, dimana tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi. Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh tenaga kerja diharapkan menjadi modal utama untuk mendapatkan pekerjaan, akan tetapi yang terjadi adalah pengangguran sukarela yang dapat diartikan bahwa tenaga kerja tidak bersedia menerima pekerjaan tersebut, hal ini berkaitan dengan upah yang akan mereka terima.

Masalah ketenagakerjaan terutama lama mencari kerja bagi tenaga kerja terdidik sebagaimana diuraikan di atas merupakan fenomena yang acapkali membuat terperanga, tenaga kerja dengan pendidikan yang tinggi mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Alasannya bukan karena tidak ada perusahaan yang menerima mereka bekerja, tetapi sebagian besar justru karena tenaga kerja yang lebih selektif untuk menerima pekerjaan, hal ini berkaitan dengan gaji atau upah yang diberikan perusahaan pada mereka

Masa mencari kerja berhubungan dengan masa transisi. Menurut Sziraczki dan Reerink (2004) transisi dari sekolah menuju dunia kerja tidak sekadar menyelesaikan sekolah dan mencari pekerjaan saja. Ia lebih luas dari itu: dimulai ketika pendidikan dan berakhir kemudian di saat kaum muda telah bekerja, suatu proses yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Masa mencari kerja juga bisa

diartikan sebagai masa menganggur. Lama masa pengangguran merupakan sejumlah waktu di mana seseorang belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur. Menurut Deluna dan Berdos (2015), lama menganggur merupakan masalah di kalangan terdidik serta pencari kerja pertama kali. Penciptaan lapangan kerja tidak cukup untuk menyerap meningkatnya tenaga kerja, khususnya individu yang terdidik. Sementara menurut Khan dan Yousaf (2013) kemungkinan mendapatkan pekerjaan tergantung pada karakteristik seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, upah yang diinginkan, upah yang ditawarkan, intensitas pencarian, lama menganggur serta kondisi pasar tenaga kerja, seperti tingkat pengangguran lokal.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa masa mencari kerja adalah periode di mana seseorang mencari pekerjaan pertama kali, mencari pekerjaan karena berhenti dari pekerjaan sebelumnya, maupun mencari pekerjaan lagi walaupun sudah punya pekerjaan. Bagi pencari kerja pertama kali masa ini merupakan masa belajar memahami pasar kerja dan memilih pekerjaan yang diinginkan. Lamanya masa mencari kerja tergantung pada kemampuan dan karakteristik individu serta informasi dan bantuan yang dibutuhkan pencari kerja.

b. Faktor Penentu Durasi Menganggur

Lama mencari kerja terkait dengan *job search theory*, Stigler (1962) menjelaskan bahwa *job search* model pada awalnya dikembangkan dalam bentuk *non sequential job search model*. Model ini adalah suatu model untuk proses pencarian kerja oleh pencari kerja yang tidak mengikuti suatu urutan tertentu. McCall (1965), mengembangkan *sequential job search model* di mana pencari kerja terlebih dahulu akan menentukan patokan bagi berakhirnya proses mencari kerja atau *stopping rule*. Secara teratur pencari kerja mengevaluasi satu per satu tawaran pekerjaan yang datang. Selain itu, Grogan, dkk (2001) mengestimasi lama waktu mencari kerja di Rusia berdasarkan strategi mencari kerja yang berbeda. Hasil studi diantaranya: pertama, perempuan memiliki durasi lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Kedua, individu yang berpendidikan rendah memiliki durasi menganggur

lebih lama dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Ketiga, tingkat pengangguran didominasi oleh yang memiliki kelompok umur di bawah 29 tahun.

Ioannides dan Loury (2004) memaparkan bahwa *sosial networking* memainkan peranan dalam mencari pekerjaan. Beberapa hasil analisis adalah: pertama, strategi mencari kerja dengan menghubungi teman/relasi sepanjang waktu mengalami peningkatan. Kedua, *job information networks* dengan menghubungi teman/relasi beragam berdasarkan wilayah dan berdasarkan karakteristik demografi. Ketiga, bahwa strategi mencari pekerjaan dengan menghubungi teman sangat produktif.

Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik telah menjadi suatu masalah yang serius. Kemungkinan ini disesuaikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan makin tinggi pula aspirasi untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai. Proses untuk mencari kerja yang lebih lama pada kelompok pencari kerja terdidik disebabkan mereka lebih mengetahui perkembangan informasi di pasar kerja dan mereka lebih berkeinginan untuk memilih pekerjaan yang diminati dan menolak pekerjaan yang tidak disukai (Sotomo, dkk, 1999). Masa menganggur yang lama lebih banyak terdapat pada mereka yang berpendidikan tinggi daripada yang berpendidikan rendah, tetapi perbedaannya tidak begitu besar. tingkat pengangguran jauh lebih tinggi bagi mereka yang berpendidikan menengah, yang lebih banyak berasal dari keluarga berpenghasilan sedang dan tinggi. oleh karenanya lebih selektif dalam mencari pekerjaan yang cocok selama mereka menganggur.

Terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh angkatan kerja semakin lama masa tunggunya. (Suryadi, 1994). Pengangguran terdidik juga dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara perencanaan pengembangan pendidikan dengan tuntutan pasar tenaga kerja (Iannelli, 2002).

Moeis (1992) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan akan mengurangi biaya mencari kerja karena tenaga kerja terdidik semakin efisien dalam mencari pekerjaan sebab mereka memiliki pengetahuan tentang pasar kerja beserta kelembagaannya, serta lingkungan pekerjaan. Foley (1997) menyatakan pekerja

dengan pendidikan tinggi tidak akan menganggur lebih lama daripada mereka yang memiliki pendidikan menengah atau bahkan sekolah dasar. Kettunen (1997) menyatakan bahwa orang-orang yang menganggur dan memiliki tingkat pendidikan sekitar 13-14 tahun memiliki kemungkinan yang besar untuk dapat kembali bekerja dan durasi menganggurnya pendek. Takii (1997) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan angkatan menentukan besar kecilnya untuk diterima bekerja oleh perusahaan, dimana angkatan kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi akan memiliki peluang yang tinggi untuk diterima bekerja dan sebaliknya. Grogan, *et.al* (2001) menemukan bahwa durasi menganggur yang panjang terjadi individu dengan pendidikan rendah. Tansel dan Tasci (2004) menyatakan angkatan kerja yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memiliki durasi menganggur lebih pendek dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. Khan dan Yousef (2013) menemukan bahwa pemegang gelar pendidikan yang lebih tinggi mengalami lebih pendek durasi pengangguran daripada rekan mereka pemegang gelar rendah.

Namun ada penelitian yang menemukan bahwa pendidikan berhubungan searah dengan durasi menganggur yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin panjang durasi menganggurnya. Penelitian Pasay dan Indrawanti (2012) menemukan bahwa lama mencari kerja bagi yang berpendidikan tinggi lebih lama daripada yang berpendidikan rendah.

Khan dan Yousef (2013) menemukan bahwa dengan adanya pelatihan kerja akan mengurangi durasi menganggur seseorang. Cheron dan Terriau (2018) menyatakan dampak eksternalitas pelatihan bagi angkatan kerja adalah: 1) meningkatkan keterampilan kerja, 2) mempermudah mendapatkan pekerjaan, 3) menciptakan lapangan pekerjaan.

Diperkirakan bahwa dengan pengalaman kerja pencari kerja lebih sanggup untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai, selain itu pengalaman kerja menggambarkan pengetahuan pasar kerja. Dengan memiliki pengalaman kerja didukung tingkat pendidikan yang tinggi, maka tenaga kerja akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan (Sutomo, dkk, 1999).

George (2004) menyatakan bahwa pengembangan mutu modal manusia dapat melalui pengalaman kerja. Dengan pengalaman kerja, seseorang dapat

meningkatkan keterampilannya sehingga dapat berkerja lebih efisien dan efektif, yang tentunya tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja akan memiliki peluang lebih besar untuk dapat diterima bekerja. McConnel (1999) menjelaskan tenaga kerja yang berpengalaman lebih trampil dalam menyelesaikan pekerjaannya. Angkatan kerja yang memiliki pengalaman kerja akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan (Sutomo, dkk, 1999). Adanya pengalaman kerja akan mempermudah seseorang untuk mendapatkan pekerjaan sehingga durasi (Ashenfelter dan Ham, 1979). Namun yang memiliki temuan yang berbeda yaitu penelitian Blanco dan Preugschat (2018) menemukan bahwa pada umumnya perusahaan lebih suka menerima pelamar yang belum pernah bekerja.

Lama pengangguran akan berbeda antar kelompok dalam angkatan kerja, dan semakin panjang dengan meningkatnya usia. Pengangguran antar pekerja jauh lebih tinggi daripada antar pekerja yang lebih tua, tetapi sifat penganggurannya berbeda. Para pekerja muda cenderung lebih sering menganggur dan dengan masa yang singkat, sedangkan pekerja yang lebih tua jarang menganggur tetapi untuk periode yang lebih panjang (Dharmakusuma, 1998).

Doley (1997) menyatakan angkatan kerja yang muda akan menganggur lebih lama dari yang tua. Wanita cenderung lebih lama menganggur dibandingkan dengan laki-laki dan individu yang tinggal di daerah akan mengalami durasi menganggur yang lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di kota. Tansel dan Tasci (2004) menyatakan umur yang muda cenderung lebih lama menganggur dibandingkan yang tidak muda. Khan dan Yousef (2013) menyatakan bahwa mereka yang berumur muda cenderung menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah tua. Penelitian Hernaes (1999) bahwa makin tinggi umur seseorang maka akan memperpanjang masa menganggur orang tersebut. Demikian pula pekerja umur muda akan mengalami masa menganggur lebih singkat dibandingkan dengan pekerja umur tua. Zarotiadis dan Theodossiou (2010) menemukan bahwa bekerja berusia di atas 45 tahun menghadapi masa kerja yang jauh lebih singkat sehingga memiliki durasi pengangguran yang lebih lama. Mukoyama (2004) menyatakan pekerja tua mengalami masa menganggur lebih lama dari pekerja muda. Sansale, dkk (2019) menemukan bahwa ketika individu

dihadapkan pada pengangguran maka yang berusia muda secara signifikan lebih mungkin untuk mencari pekerjaan daripada melanjutkan pendidikan.

Kesempatan kerja pada industri-industri atau pekerjaan lainnya akan lebih terbatas bagi individu yang lebih tua dengan masa pengangguran yang panjang lebih dari satu tahun dibandingkan individu yang lebih muda. Hal ini dapat disebabkan oleh; 1) menurunnya kesempatan kerja bersamaan dengan bertambahnya umur; 2) terbatasnya kesempatan kerja yang menambah panjang masa menganggur di usia muda (Dygalos, 2007).

Menurut Kaufman dan Hotchkiss (2006) status perkawinan menyebabkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi angkatan kerja, perempuan yang telah menikah dituntut untuk melakukan aktivitas rumah, dan pasar kerja yang tersedia kebanyakan menerima perempuan yang berstatus tunggal atau single. Berbeda dengan pria yang sudah menikah biasanya tidak memiliki hambatan yang berarti untuk memasuki pasar kerja sehingga akan memiliki durasi menganggur lebih pendek.

Tingkat partisipasi kerja laki-laki selalu lebih tinggi dari tingkat partisipasi kerja perempuan karena laki-laki dianggap pencari nafkah yang utama bagi keluarga, sehingga pekerja laki-laki biasanya lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan aspirasinya baik dari segi pendapatan maupun kedudukan dibanding pekerja perempuan. Hampir semua laki-laki yang telah mencapai usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi karena laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga (Simanjuntak, 2001). Tansel dan Tasti (2004) menyatakan wanita mengalami durasi pengangguran yang lebih tinggi dari pada pria. Zarotiadis dan Theodossiou (2010) menemukan bahwa pekerja wanita menghadapi masa kerja yang jauh lebih singkat sehingga memiliki durasi pengangguran yang lebih lama.

Kaufman dan Hotchkiss (2006) menyatakan bahwa status perkawinan menyebabkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi angkatan kerja, perempuan yang telah menikah dituntut untuk melakukan aktivitas rumah, dan pasar kerja yang tersedia kebanyakan menerima perempuan yang berstatus tunggal atau single. Berbeda dengan pria yang sudah menikah biasanya tidak

memiliki hambatan yang berarti untuk memasuki pasar kerja sehingga akan memiliki durasi menganggur lebih pendek.

Grogan, *et.al* (2001) menemukan bahwa durasi menganggur yang panjang terjadi pada pria yang belum menikah. Khan dan Yousef (2013) menyatakan bahwa status perkawinan menentukan durasi menganggur, mereka yang belum menikah cenderung menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah menikah. Angkatan kerja yang berstatus kepala keluarga cenderung tidak menganggur dibandingkan dengan yang bukan kepala keluarga. Grogan, *et.al* (2001) menemukan bahwa durasi menganggur yang panjang terjadi pada individu yang tinggal di luar dari kota besar (perdesasan).

7. Tingkat Pengangguran Regional

Teori ekonomi klasik menunjukkan bahwa perbedaan dalam pengangguran regional seharusnya tidak boleh terjadi karena para penganggur yang tinggal di suatu daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi diharapkan akan pindah ke daerah dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah. Alasan yang sama berlaku untuk perusahaan yang diasumsikan akan pindah dari wilayah dengan pengangguran rendah ke wilayah dengan pengangguran tinggi karena mereka akan dapat memperoleh manfaat dari adanya kumpulan pekerja (penganggur) yang lebih besar.

Literatur memberikan penjelasan yang berbeda mengenai adanya perbedaan pengangguran regional yang secara umum dapat diringkas menjadi dua pandangan yang berbeda. Pandangan keseimbangan (*equilibrium*) mengasumsikan adanya keseimbangan stabil (*stable equilibrium*) di daerah dimana memiliki tingkat pengangguran yang berbeda. Aragon, *et.al* (2003) menulis pendapatnya terkait dengan pandangan equilibrium, ia menuliskan bahwa yang tersisa dari tingkat keseimbangan pengangguran ialah hanya tingkat pengangguran naturalnya. Filitzekin (2008) menuliskan dalam makalahnya bahwa tingkat pengangguran natural ini lebih mencerminkan preferensi pekerja, dimana individu yang menganggur tidak akan setuju untuk bekerja dengan upah yang lebih rendah dari

yang diharapkan sehingga tingkat pengaturan upah (*wage setting*) gagal membuat pasar berada dalam kondisi *full employment*.

Masih dalam tulisan Filiztekin (2008), sejauh tingkat pengangguran masih berada dalam kondisi equilibrium, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pengangguran regional menjadi tidak berguna, karena pemerintah tidak dapat mengurangi pengangguran di berbagai wilayah dalam waktu yang lama. Menurut Molho (1995), kesenjangan ini dicirikan oleh "utilitas seragam di seluruh wilayah untuk kelompok buruh yang bersifat homogen" serta tidak ada insentif dan upaya yang dilakukan untuk bermigrasi. Adanya kondisi equilibrium ini dalam rumah tangga dan perusahaan perlu diberi kompensasi atas pengangguran yang masih tinggi atau rendah tersebut dengan berbagai fasilitas lain yang disebut amenitis. Fasilitas seperti itu semisal iklim yang lebih baik, harga perumahan yang wajar atau kualitas hidup yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tingkat equilibrium pengangguran di wilayah *i* adalah fungsi dari endowment kemurahan di wilayah tersebut. Dengan kata lain, pengangguran di suatu daerah adalah fungsi dari amenitis nya.

Berlawanan dengan pandangan equilibrium, pandangan disequilibrium mengasumsikan bahwa pengangguran regional akan sama dalam jangka panjang, namun proses penyesuaiannya mungkin akan lambat. Kecepatan penyesuaian tergantung pada faktor-faktor berbeda yang terhubung ke permintaan tenaga kerja (*labor demand*) dan penawaran tenaga kerja (*labor supply*), selain itu juga apakah terdapat shock yang bisa meningkatkan pengangguran. Faktor-faktor tersebut misalnya, struktur usia muda dan tingkat pendidikan penduduk (*human capital*). Orang-orang muda lebih cenderung bermigrasi karena mereka memiliki *opportunity cost* yang lebih rendah dan resiko yang lebih rendah pula (Aragon, et al. 2003). Orang yang memegang gelar pendidikan tinggi juga lebih cenderung untuk pindah karena pasar tenaga kerja untuk pekerja berketerampilan tinggi lebih besar dan orang-orang ini diharapkan mendapatkan informasi yang lebih baik (Aragon, et al. 2003). Struktur angkatan kerja juga memengaruhi perilaku relokasi perusahaan. Demikian juga dengan struktur lapangan kerja (*industrial mix*) dimana para pekerja akan mencari lapangan kerja di sektor-sektor potensial yang sesuai

tersebut. Pengangguran diperkirakan akan lebih rendah di daerah perkotaan karena proses penyesuaian antara pengangguran dan pekerjaan yang masih kosong menjadi lebih efisien. Lebih jauh, perilaku migrasi orang jelas dipengaruhi oleh biaya migrasi. Misalnya, harga rumah dan struktur pasar perumahan mempengaruhi betapa mudahnya bagi sebuah rumah tangga untuk mengubah lokasinya.

Penjelasan yang diberikan tentang adanya perbedaan pengangguran di level regional ini bisa saja menimbulkan kesimpulan yang berbeda bagi para pembuat kebijakan. Menurut Marston (1985), upaya yang telah pemerintah lakukan untuk mengurangi perbedaan pengangguran regional menjadi "tidak berguna" karena mereka tidak akan dapat mengurangi pengangguran di mana pun untuk jangka panjang ketika tingkat pengangguran regional dapat dianggap berada dalam kondisi keseimbangan (*state equilibrium*). Sebaliknya, pandangan disequilibrium memberikan "justifikasi/pembenaran" secara implisit terhadap program-program yang telah dan akan menggunakan dana pemerintah ke daerah-daerah yang berada dalam kondisi rawan. Mengingat konsekuensi yang berbeda untuk kebijakan ini, penting untuk menilai apakah pengangguran regional dapat dianggap sebagai fenomena equilibrium atau tidak.

Kedua pendekatan di atas dalam kaitannya dengan tingkat pengangguran regional belum tentu saling berlawanan. Marston (1985) menyatakan bahwa mungkin saja terdapat hubungan ekuilibrium, tetapi kekuatan ekuilibrisasi sangat lemah sehingga individu menghabiskan waktu yang lama menuju keseimbangannya. Untuk kasus Indonesia, ada argumen untuk kedua pendekatan teoretis untuk menjelaskan situasi pasar tenaga kerja regional yaitu adanya perbedaan karakteristik wilayah.

Guclu (2017) melakukan penelitian tentang pengangguran regional dengan menggunakan pendekatan equilibrium dan disequilibrium karena ia mengasumsikan bahwa tingkat pengangguran di level wilayah akan sama dalam jangka panjang meski dengan kecepatan yang lambat dan berbeda antar wilayah. Variabel yang digunakan merupakan gabungan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dari sisi penawaran tenaga kerja, digunakan variabel angkatan kerja, human capital,

kelompok usia muda. Sedangkan dari sisi permintaan tenaga kerja digunakan industrial mix.

8. Pembangunan Ekonomi Wilayah

Mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat jika terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat terutama di negara sedang berkembang. Oleh karena itu diperlukan campur tangan pemerintah mencapai proses pembangunan yang lebih cepat (Todaro dan Smith 2004). Pentingnya campur tangan pemerintah terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada (Arsyad, 2010).

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan landasan teori yang mampu menjelaskan korelasi antara faktafakta yang diamati, sehingga dapat menjadi kerangka orientasi untuk analisis dan membuat ramalan terhadap gejala-gejala baru yang diperkirakan akan terjadi. Dengan makin majunya studi-studi pembangunan ekonomi, banyak teoritelahdiintroduksikan. Dalam pembangunan wilayah, banyak teori dapat digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan pentingnya pembangunan wilayah.

Sirojuzilam (2008) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Menurut Adisasmita (2008) pembangunan wilayah (*regional*) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola

kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi- institusi baru, pembangunan industri- industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan (Arsyad, 2010).

Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya baru. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bagi corak pembangunan yang akan diterapkan. Peniruan terhadap pola kebijakan yang telah berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Dengan demikian pola kebijakan pembangunan yang diambil oleh suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu penelitian yang mendalam tentang keadaan dan potensi setiap daerah harus dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan arah perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif- inisiatif yang berasal dari daerah tersebut untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 2010).

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya- sumberdaya yang ada. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu dengan yang lain. Beberapa teori pembangunan daerah antara lain (Aryad, 2010) :

1. Teori Ekonomi Neo Klasik, teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor- faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modalnya bisa mengalir tanpa restriksi atau pembatasan. Biasanya modal akan mengalir dari daerah yang mempunyai upah yang tinggi ke daerah dengan upah yang rendah.
2. Teori Basis Ekonomi, teori ini menyatakan bahwa faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri- industri yang menggunakan sumberdaya lokal dengan orientasi *ekspor* akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perekonomian daerah dibagi menjadi dua yaitu (a) Sektor basis : sektor perekonomian yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan kebutuhan daerah lain maupun *ekspor* (b) Sektor non basis : sektor perekonomian yang hanya dapat digunakan untuk memenuhi daerah sendiri. Kelemahan teori ini adalah perekonomian didasarkan pada permintaan eksternal, yang dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global.
3. Teori Lokal, lokasi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini sesuai jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung meminimumkan biaya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar dan bahan baku.
4. Teori Tempat Sentral, teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya. Tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.
5. Teori Kausasi Kumulatif, kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk merupakan konsep dasar dari teori kausatif kumulatif. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju akan mengalami akumulasi kenggulan kompetitif

dibanding daerah-daerah yang terbelakang. Hal ini oleh Myrdal disebut sebagai *backwash effects*.

6. Teori Daya Tarik Industri, dalam teori ini dinyatakan bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi dan insentif.

9. Model *Job Search Theory*

Search Theory adalah metode yang menjelaskan masalah pengangguran dari sudut penawaran yaitu keputusan individu dalam berpartisipasi di pasar kerja berdasarkan karakteristik individu pencari kerja. Menurut Deluna dan Berdos (2015) kemungkinan menerima tawaran pekerjaan akan ditentukan oleh faktor-faktor yang menarik bagi majikan seperti pendidikan, tingkat keahlian, pengalaman, dan kondisi permintaan lokal. Sedangkan menurut Faggian (2014) usia, pendidikan, dan pengalaman sangat mempengaruhi kemungkinan menerima penawaran, sementara biaya pencarian dan distribusi upah secara keseluruhan mempengaruhi upah reservasi individu dan kesediaan menerima tawaran pekerjaan.

Model *job search* terkait dengan biaya pencarian dan manfaat marginal dari tiap individu. Model Stigler menjelaskan bahwa biaya pencarian ada dua jenis yaitu biaya langsung dan biaya peluang. Biaya langsung meliputi pemberitahuan, biaya melanjutkan, ongkas kirim, dan biaya transportasi. Sedangkan biaya peluang merupakan waktu seseorang untuk mencari penawaran yang lebih baik.

Search Theory adalah suatu metode model yang menjelaskan masalah pengangguran dari sudut penawaran yaitu keputusan seorang individu untuk berpartisipasi di pasar kerja berdasarkan karakteristik individu pencari kerja. *Search Theory* merupakan bagian dari *economic uncertainty* yang timbul karena informasi di pasar kerja tidak sempurna, artinya para penganggur tidak mengetahui secara pasti kualifikasi yang dibutuhkan maupun tingkat upah yang ditawarkan pada lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di pasar. Informasi yang diketahui pekerja hanyalah distribusi frekuensi dari seluruh tawaran pekerjaan yang didistribusikan secara acak dan struktur upah menurut tingkatan keahlian.

Search Theory mengasumsikan bahwa pencari kerja adalah individu yang *risk-neutral*, artinya mereka akan memaksimalkan *expected income*-nya. Dengan tujuan memaksimalkan *expected net income* dan *reservation wage* sebagai kriteria menerima atau menolak suatu pekerjaan. Pencari kerja akan mengakhiri proses mencari kerja pada saat tambahan biaya (*marginal cost*) dari tambahan satu tawaran kerja tepat sama dengan tambahan imbalan (*marginal return*) dari tawaran kerja tersebut. Pencari kerja menghadapi ketidakpastian tentang tingkat upah serta berbagai sistem balasan yang ditawarkan oleh beberapa lowongan pekerjaan. Walaupun informasi tentang hal ini ada, tetapi biaya untuk memperolehnya mahal (Sutomo, dkk. 1999).

Dengan informasi yang sempurna, seseorang akan mengetahui perusahaan mana yang menawarkan upah yang lebih baik, dan proses mencari kerja menjadi tidak perlu dilakukan. Karena hal tersebut tidak akan terjadi, seseorang akan menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan yang terbaik (diasumsikan berarti upah yang paling tinggi) (Kaufman dan Hotchkiss, 2006).

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab pengangguran terdidik dari sisi penawaran tenaga kerja yang dikembangkan dari model *Job Search Theory*. Model *Job search* pada dasarnya menggunakan pendekatan mikro (individu) yaitu keputusan angkatan kerja untuk masuk ke pasar kerja (menawarkan tenaga kerja). Model *Job Search Theory* atau teori pencarian kerja yang dipelopori oleh Stigler (1961; 1962) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Diamond (1982), Mortensen (1977; 1984; 1985; 1986), dan Pissarides (1982; 2010). Teori ini telah mengalami banyak perkembangan dan menjadi salah satu teori yang mapan dalam disiplin *labor economics*.

Job search theory menjelaskan adanya pilihan bagi pencari kerja apakah berpartisipasi atau bekerja pada sektor tradisional (*on Job search*) atau ia bisa sepenuhnya menganggur dan mencari kerja secara intensif. Jika pencari kerja memilih strategi kedua, ia dapat menciptakan q_U (probabilitas datangnya tawaran pekerjaan per periode), sembari menetapkan upah yang diminta ξ_U . Sebaliknya jika pencari kerja memilih strategi pertama probabilitas datangnya tawaran pekerjaan akan lebih rendah, yakni q_T , karena mencari kerjanya sambil dan kurang intensif sedangkan upah yang diminta (*reservation wage*) nya ξ_T . Diasumsikan pula

bahwa biaya mencari pekerjaan (c) adalah tetap, tingkat diskonto r dan kedua parameter c dan r ini tidak tergantung pada strategi mana yang dipilih. Lalu dalam model ini diasumsikan bahwa jangka panjang pengambilan keputusan adalah tidak terhingga.

Dengan sejumlah kondisi ini setiap pencari kerja pada tahap awal menentukan *reservation wage* nya baik ξ_U maupun ξ_r , hingga *marginal cost* dari penciptaan satu tambahan tawaran pekerjaan tepat sama dengan *marginal return* dari satu tambahan kegiatan mencari pekerjaan tersebut. Tahapan ini untuk strategi kedua (mencari kerja dengan menganggur) dapat diformulasikan dalam persamaan berikut:

$$\xi_U = E \left[\frac{1}{1+r} \right]^N E [\max(\xi_U, x)] - T_i - c \cdot E \left[\sum \left(\frac{1}{1+r} \right)^t \right] \quad (2.1)$$

Penjelasan :

ξ_U = Upah yang diminta

E = Harapan (*expected*)

r = Tingkat pendiskontoan

N = Jumlah tawaran pekerjaan

$\max \xi_U$ = Upah maksimum yang diminta

x = Variabel acak yang membenarkan nilai pekerjaan yang ditawarkan

T_i = Pendapatan pada sektor tradisional pada periode i

c = Biaya untuk mencari pekerjaan

t = Waktu yang digunakan untuk mencari kerja (menganggur)

Dengan demikian, persamaan (2.1) dapat diubah menjadi:

$$\xi_U = E \left[\frac{1}{qu+r} \right] [qu \cdot E(\max(\xi_U, x)) - T_i + c] \quad (2.2)$$

Lalu karena diketahui bahwa,

$$E \left[\frac{1}{qu+r} \right]^n \left[\frac{qu}{qu+r} \right]$$

$$E \left[\sum \left(\frac{1}{1+r} \right)^t \right] = \frac{1}{qu+r}$$

$$E [\max(\xi_U, x)] = \xi_U \int_{-\infty}^{\xi_U} \Phi_i(x) dx + \int_{\xi_U}^{\infty} \Phi_i(x) dx$$

Maka dengan mengubah persamaan (2.2) dan menyamakannya dengan *marginal return* (MR) dari mencari kerja, diperoleh kondisi keseimbangan bagi strategi kedua.

$$(T + c) = q_u \cdot \int_{\xi_u}^{\infty} (x - \xi_u) \cdot \phi_i(x) dx - r \xi_u \equiv H(x) \quad (2.3)$$

dimana

$\phi_i(x)$ = fungsi distribusi probabilitas tawaran pekerjaan pada periode i

Dengan cara yang sama dapat pula kita peroleh kondisi keseimbangan bagi strategi pertama (*on-job-search*):

$$c = q_T \int_{\xi_T}^{\infty} (x - \xi_T) \cdot \phi_i(x) dx - r \xi_T \equiv H(x) \quad (2.4)$$

Jadi, seorang pencari kerja atau penganggur dapat menetapkan *reservation wage* nya berdasarkan pada kedua kondisi di atas; persamaan (2.3) dan (2.4). Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi mana yang terbaik dengan membandingkan yang mana dari kedua *reservation wage* pada kedua persamaan di atas lebih tinggi.

$$\xi = \max(\xi_u, \xi_T) \quad (2.5)$$

Bila pencari kerja memilih strategi pertama, maka $\xi = \xi_T$ dan $c = q_T$. Sebaliknya bila ia memilih strategi ke dua, maka $\xi = \xi_u$ dan $c = q_u$. Kemudian, pencari kerja akan melakukan proses mencari kerja hingga ditemukannya suatu pekerjaan yang menawarkan x paling kurang sama dengan ξ . Jika diasumsikan bahwa ξ tetap sepanjang waktu maka (*expected duration*) dari mencari kerja adalah.

$$E(D) = \frac{1}{q [p(x \geq \xi)]} \equiv \frac{1}{q \int_{\xi}^{\infty} \phi(x) dx} \quad (2.6)$$

Dalam kenyataannya memang ξ bervariasi dengan parameter yang lainnya. Jika misalnya biaya mencari kerja meningkat, *reservation wage* pencari kerja akan menurun. Lalu *reservation wage* meningkat dengan penurunan tingkat diskonto atau dengan peningkatan probabilitas tawaran pekerjaan, dan sebagainya. Karena semua parameter ini dipengaruhi oleh karakteristik individu pencari kerja, maka fungsi *reservation wage* adalah.

$$\xi_u = \xi_u(Z_k, t) \quad (2.7)$$

dimana :

Z_k = Vektor dari sejumlah karakteristik individu pencari kerja

t = Waktu yang digunakan untuk menganggur.

Ada dua fungsi bagi ξ dimana fungsi ini tergantung pada strategi mana yang dipilih.

$$\xi_T = \xi_T = (Z_k, t) ; \text{jika } \xi_U > \xi_T \quad (2.7a)$$

$$\xi_T = \xi'_T = (Z_k, t - t_u) ; \text{jika } \xi_U > \xi_T \quad (2.7b)$$

Akhirnya, dengan menyamakan $\xi_T (Z_k, t - t_u)$ dengan (T_i/r) dan lalu dicari nilai t_u , akan diperoleh *expected duration* yang merupakan fungsi dari vektor karakteristik individu pencari kerja

$$E(DUR) = D(Z_k) \quad (2.8)$$

Dimana :

$E(DUR)$ = *expected duration* mencari kerja

Z_k = Karakteristik pencari kerja

Jika persamaan ini diaplikasikan pada data aktual, maka perlu ditambahkan gangguan acak (*error term*),

$$DUR = Z_k, \epsilon \quad (2.9)$$

dimana

DUR = *Duration of unemployment* (lamanya menganggur)

ϵ = *disturbance* atau *error term*.

Z_k = Karakteristik pencari kerja

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan ialah yang dilakukan oleh Baah-Boateng (2015) yang meneliti tentang *unemployment in Ghana: a cross sectional analysis from demand and supply perspectives*. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab pengangguran di Ghana dari perspektif permintaan dan penawaran tenaga kerja menggunakan data *cross-sectional* dari *Ghana Living Standard Survey (GLSS)*. Pengangguran yang dimaksud pada penelitian merupakan individu yang tidak berkerja dan telah berusaha mencari pekerjaan dalam 30 hari (termasuk tujuh hari terakhir) sebelum survei. Penelitian ini mengkaji penyebab pengangguran dari sisi permintaan dan penawaran serta faktordemografis rumah tangga. Variabel sisi permintaan adalah pertumbuhan ekonomi

yang diukur dari tipe pekerjaan yang dicari oleh pencari kerja (1 = *full time* atau 0 = *part-time*) dalam kerangka data *cross sectional*. Hal ini didasarkan pada premis/anggapan bahwa pada saat terjadi kenaikan aktivitas ekonomi, jenis pekerjaan *full time* akan diciptakan oleh perusahaan. Dengan implikasi, pencari kerja yang mencari pekerjaan *full time* lebih mungkin berhasil dan dengan demikian mengurangi kejadian pengangguran dan sebaliknya. Di sisi lain, selama kemerosotan ekonomi, perusahaan dipaksa untuk mengurangi lapangan kerja atau jumlah jam kerja pekerja untuk menawarkan pekerjaan paruh waktu (*part-time*) untuk pencari kerja. Akibatnya, pencari kerja *full time* cenderung tidak dipekerjakan dengan menunjukkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Variabel sisi penawaran adalah usia dan tingkat pendidikan individu. Sedangkan faktor demografi adalah jenis kelamin, status pernikahan, lokasi tempat tinggal, status kemiskinan. Teknik analisis data menggunakan regresi logistik. Penelitian menemukan bahwa penyebab pengangguran dari sisi permintaan adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pada sisi penawaran diketahui angkatan kerja muda lebih berpeluang menganggur dari pada yang tua dan juga ditemukan bahwa meningkatnya pengangguran disebabkan karena ketidaksesuaian keahlian yang dibentuk oleh institusi pendidikan dan pelatihan dan keahlian yang diminta oleh pasar tenaga kerja. Selanjutnya penelitian ini menemukan bahwa pengangguran juga disebabkan oleh faktor demografi diantaranya jenis kelamin, status pernikahan, lokasi tempat tinggal, dan status kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Baah-Boateng (2013) tentang *Determinants of Unemployment in Ghana*. Penelitian ini menggunakan data *cross-sectional* dari *Ghana Living Standards Survey (GLSS)* selama 3 periode yaitu 1991/1992, 1998/1999, 2005/2006. Estimasi difokuskan pada anggota angkatan kerja (yaitu mereka yang bekerja dan menganggur) yang berusia 15 tahun ke atas. Variabel penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu faktor sisi penawaran, faktor sisi permintaan, dan faktor lainnya. Variabel pada sisi penawaran terdiri dari usia dan pendidikan. Variabel pada sisi permintaan terdiri dari tipe pekerjaan dan pekerjaan yang dicari (waktu bekerja). Dimana tipe pekerjaan itu berupa mencari pekerjaan di sektor pemerintah, perusahaan swasta, bekerja sendiri, pekerjaan

berupah dan pekerjaan apa pun yang tersedia (sebagai dummy referensi) digunakan untuk menunjukkan kemampuan ekonomi Ghana untuk memenuhi tuntutan pekerjaan spesifik pencari kerja. Selanjutnya waktu bekerja merupakan pekerjaan *full time* dan *part time*. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jika pertumbuhan ekonomi tinggi maka orang banyak yang pencari kerja penuh waktu dibandingkan paruh waktu. Sedangkan variabel faktor lainnya adalah jenis kelamin, status perkawinan, lokasi ekologis, status kemiskinan dan reservasi upah. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh terbatasnya penciptaan lapangan kerja, dimana tenaga kerja lebih banyak diserap oleh sektor pertanian dibandingkan sektor manufaktur dan pencari kerja lebih banyak yang mencaai kerja part-time dibandingkan dengan *full time*. Pada sisi penawaran diketahui bahwa pengangguran banyak yang berusia dan berpendidikan sekolah menengah. Selanjutnya ditemukan bahwa adanya pengaruh kuat dari upah reservasi terhadap pengangguran juga merupakan indikasi tingginya upah atau ekspektasi penghasilan para pencari kerja relatif terhadap apa yang ditawarkan pasar tenaga kerja.

Ahmed, dkk (1978) pernah melakukan penelitian di Bangladesh tentang *estimation of educated unemployment*. Penelitian ini menggunakan data tentang pencari kerja terdidik dan penyerapan tenaga kerja di Bangladesh periode 1976-1980. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa telah terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja terdidik dibandingkan dengan permintaanya sehingga hal ini menimbulkan tingginya jumlah pengangguran terdidik selama periode pengamatan.

Pada tahun 1979 Ashenfelter dan Ham dari *Princeton University* dan *University of Toronto* juga melakukan penelitian tentang *education, unemployment, and earnings*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dampak marginal dari pendidikan dan pengalaman terhadap pendapatan dan pengangguran. Faktor tingkat pendidikan dan pengalaman menentukan besarnya tingkat upah yang diterima pekerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin memperkecil kemungkinan seseorang jadi pengangguran dan begitu juga dengan pengalaman kerja, dimana dengan adanya pengalaman kerja akan mempermudah angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan.

Moen (1999) melakukan penelitian tentang *Education, Ranking, and Competition for Jobs*. Penelitian ini mempelajari insentif bagi pencari pekerja yang melakukan investasi pada modal manusia umum (pendidikan) untuk memenangi kompetisi dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan jumlah pencari kerja yang banyak maka perusahaan lebih leluasa memilih untuk menerima pencari kerja yang paling produktif dengan pilihan berbagai upah. Perusahaan akan menilai pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikannya, dimana pekerja yang berpendidikan lebih tinggi akan mendapat peluang lebih tinggi untuk diterima bekerja pada perusahaan dengan bentuk pekerjaan yang lebih baik.

Penelitian Stark dan Fan (2007) tentang *international migration and "educated unemployment"*. Penelitian ini menjelaskan tentang pengangguran terdidik yang merupakan ciri menonjol dari pasar tenaga kerja di sejumlah negara berkembang. Temuan penelitian menyebutkan bahwa bahwa "pengangguran terdidik" disebabkan oleh prospek migrasi internasional, yaitu, dengan kemungkinan "brain drain". Selain itu, hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa negara berkembang mungkin akan berakhir dengan semakin banyaknya jumlah pekerja yang lebih terdidik.

Selanjutnya pada tahun 2011 Stark dan Fan juga melakukan penelitian tentang *the prospect of migration, sticky wages, and "educated unemployment"*. Penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan kemungkinan bekerja di luar negeri, dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada tenaga kerja yang berpendidikan daripada yang tidak berpendidikan, mendorong lebih banyak individu di negara berkembang untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, yang mengarah pada peningkatan kemampuan pekerja terdidik di pasar tenaga kerja. Pada pasar domestik tingkat upah bersifat kaku, permintaan akan tenaga kerja akan konstan. Dengan meningkatnya pasokan dan permintaan konstan, tingkat pengangguran pekerja terdidik di pasar tenaga kerja domestik akan meningkat. Dengan demikian, prospek pekerjaan di luar negeri menyebabkan "pengangguran terdidik" di negara berkembang. Pemerintah yang khawatir tentang "pengangguran terdidik" dan karena itu pemerintah mendorong orang yang berpendidikan tapi

mengganggu untuk bermigrasi. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, pemerintah memilih untuk membatasi sejauh mana migrasi individu terdidik.

Riddell dan Song (2011) meneliti tentang *the impact of education on unemployment incidence and re-employment success: Evidence from the U.S. labour market*. Penelitian ini menyelidiki efek kausal dari pendidikan pada transisi individu terhadap pekerjaan dan pengangguran, dengan fokus khusus pada sejauh mana pendidikan meningkatkan hasil kerja kembali di antara pekerja yang menganggur. Mengingat bahwa korelasi positif antara pendidikan dan transisi angkatan kerja cenderung dikacaukan oleh endogenitas pendidikan, kami menggunakan data tentang undang-undang sekolah wajib dan undang-undang pekerja anak serta risiko wajib militer dalam periode Perang Vietnam untuk menciptakan variabel-variabel penting untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan secara signifikan menurunkan tingkat pengangguran.

Penelitian Ordine dan Rose (2015) tentang *educational mismatch and unemployment scarring*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki ketidakcocokan pendidikan dan keterkaitannya dengan durasi pengangguran di Italia. Metodologi penelitian ini dengan cara mempelajari sejarah angkatan kerja yang menganggur di Italia dengan menggunakan model risiko bersaing dependent. Penelitian ini juga mengevaluasi dampak dari angkatan kerja terdidik terhadap upah menggunakan skor kecenderungan dan model perlakuan. Penelitian ini menemukan bahwa angkatan kerja yang terdidik memiliki peluang yang besar untuk dapat menemukan pekerjaan yang lebih cocok dengan kemampuannya. Bukti ini menyiratkan bahwa dengan pendidikan yang cukup akan memberikan dampak positif terhadap besaran upah yang diterima sebesar 7% dan dapat memperkirakan lamanya menjadi pengangguran. Riset ini juga menyatakan bahwa ketidakcocokan pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja merupakan sebuah fenomena penghukuman dalam kehidupan angkatan kerja dan dapat menyebabkan mereka menjadi pengangguran jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Foley (1997) tentang *determinants of unemployment duration in Russia*. Penelitian menganalisis faktor-faktor penentu

durasi pengangguran diawal transisi ekonomi. Karakteristik demografi (jenis kelamin, usia, status perkawinan), tingkat pendidikan, kondisi permintaan tenaga kerja lokal dan wilayah tempat tinggal merupakan faktor penyebab durasi pengangguran. Temuan penelitian ini adalah : 1) Wanita cenderung lebih lama menganggur dibandingkan dengan laki-laki dan wanita yang sudah menikah ditemukan mengalami masa pengangguran yang jauh lebih lama dibandingkan dengan pria yang sudah menikah; 2) angkatan kerja yang sudah akan menganggur lebih lama dari yang tua; 3) pekerja yang sudah menikah ditemukan mengalami masa pengangguran yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan yang belum menikah; 4) pekerja dengan pendidikan tinggi tidak akan menganggur lebih lama daripada mereka yang memiliki pendidikan menengah atau bahkan sekolah dasar; 5) rendahnya permintaan pasar tenaga kerja lokal akan memperpanjang durasi pengangguran. 6) individu yang tinggal di daerah akan mengalami durasi menganggur yang lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di kota.

Kettunen (1997) melakukan riset tentang *education and unemployment duration*. Penelitian ini mempelajari hubungan antara tingkat pendidikan dan probabilitas untuk kembali bekerja atau menganggur. *Search theoretical models* meramalkan bahwa angkatan kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi memiliki durasi menganggur yang pendek serta memiliki kemungkinan yang tinggi untuk dapat bekerja, tetapi yang memiliki pendidikan rendah akan memiliki durasi menganggur yang lebih lama dan menjadi pengangguran. Dengan menggunakan data ekonomi mikro Finlandia tentang pekerja yang menganggur, terlihat bahwa orang-orang yang menganggur dan memiliki tingkat pendidikan sekitar 13-14 tahun memiliki kemungkinan yang besar untuk dapat kembali bekerja dan durasi menganggurnya pendek. Artinya mereka yang memiliki pendidikan menengah dan keatasnya cenderung memiliki peluang yang tinggi untuk diterima bekerja sehingga memiliki durasi menganggur lebih pendek dibandingkan dengan yang memiliki pendidikan dasar.

Grogan, *et.al* (2001) melakukan penelitian tentang *the duration of unemployment in Russia*. Penelitian ini menggunakan data survei longitudinal untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi durasi pengangguran di Rusia.

Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik pribadi (jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan wilayah tempat tinggal) memiliki pengaruh yang berarti terhadap durasi menganggur. Durasi menganggur yang panjang terjadi pada pria yang belum menikah, individu dengan pendidikan rendah, dan individu yang tinggal di luar dari kota besar (perdesasan).

Ada beberapa studi tentang durasi pengangguran di negara-negara berkembang. Penelitian tentang durasi menganggur di negara berkembang pertama kali dilakukan oleh Tansel dan Tasci (2004) dengan judul penelitian *determinant of unemployment duration for men and woman in Turkey*. Penelitian ini menggunakan hasil Survei Angkatan Kerja Rumah Tangga tahun 2000 dan 2001 untuk mengkaji durasi atau masa pengangguran. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penentu durasi menganggur. Variabel yang akan diuji adalah karakteristik pribadi dan rumah tangga serta kondisi pasar tenaga kerja lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) wanita mengalami durasi pengangguran yang lebih tinggi dari pada pria; 2) umur yang muda cenderung lebih lama menganggur dibandingkan yang tidak muda. 3) pendidikan memiliki hubungan negatif terhadap durasi menganggur, mereka yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memiliki durasi menganggur lebih pendek dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. 4) Efek dari tingkat pengangguran lokal adalah positif terhadap durasi menganggur, semakin tinggi tingkat pengangguran lokal tentunya akan memperpanjang durasi menganggur angkatan kerja di daerah tersebut.

Penelitian Zarotiadis dan Theodossiou (2010) tentang *employment and unemployment duration in less developed regions*. Tujuan penelitian ini melihat distribusi pengalaman tenaga kerja dan para penganggur di daerah yang kurang berkembang di Yunani (wilayah barat laut Epirus), di mana pengangguran memiliki dampak yang merugikan terhadap tenaga kerja lokal. Penelitian ini menggunakan dataset yang diperoleh melalui kuesioner yang dibuat khusus untuk membantu otoritas lokal dalam melaksanakan proyek kebijakan pasar tenaga kerja regional. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa durasi menganggur sebelumnya berpengaruh negatif terhadap durasi kerja pada saat ini dan sebaliknya, yang dikenal dengan fenomena "perangkap pengangguran". Selain itu, karakteristik pribadi dan

kondisi sosial ekonomi adalah penyebab orang-orang yang menganggur "terperangkap" di negara pengangguran yang dapat diidentifikasi. Pekerja berusia di atas 45 tahun, wanita, karyawan penjualan dan pekerjaan layanan lainnya, menghadapi masa kerja yang jauh lebih singkat sehingga memiliki durasi pengangguran yang lebih lama.

Pasay dan Indrayanti (2012) meneliti di Indonesia tentang pengangguran, lama mencari kerja, dan reservation wage tenaga kerja terdidik. Penelitian ini menemukan bahwa angka pengangguran tenaga kerja terdidik terus meningkat setiap tahunnya, dari 8,59 juta penganggur di tahun 2010 diketahui 4,8 juta diantaranya adalah penganggur terdidik. Sementara itu, rata-rata lama mencari kerja mencapai 11 bulan. Metode Heckman Dua Tahap digunakan untuk menduga upah minimum yang diinginkan dan Metode OLS untuk menduga lama mencari kerja serta berdasarkan karakteristik sosial, demografi, dan regional. Lama mencari kerja bagi yang berpendidikan tinggi lebih lama daripada yang berpendidikan rendah. Upah minimum yang diinginkan dengan karakteristik sosial, demografi dan regional angkatan kerja berpendidikan tinggi lebih besar daripada yang lainnya.

Penelitian Khan dan Yousef (2013) tentang *unemployment duration of first tim job seekers: A case study of Bahawalpur*. Pengangguran terdidik yang berusia muda merupakan masalah serius bagi negara-negara berkembang. Biaya sosial dan ekonomi dari pengangguran ditingkat individu, rumah tangga dan nasional adalah bersifat universal. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penentu pengangguran sebagai pencari kerja pertama kali, dengan mengambil data primer dari semua individu yang bekerja atau wiraswasta yang berumur 20-35 tahun. Variabel dependen adalah durasi pengangguran, yang merupakan masa tunggu seseorang mendapatkan pekerjaan setelah memperoleh pendidikan terakhir. Variabel independent adalah tingkat pendidikan (profesional dan umum), pelatihan, usia, gaji, gender, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga. Temuan penelitian bahwa pemegang gelar profesional memiliki durasi menganggur yang lebih pendek, tetapi dalam hal pendidikan umum, pemegang gelar pendidikan yang lebih tinggi mengalami lebih pendek durasi pengangguran daripada rekan mereka

pemegang gelar rendah. Pelatihan kerja, status perkawinan, gaji tinggi, kepala rumah tangga dan ukuran rumah tangga mengurangi durasi pengangguran.

Skenderi dan Uka (2015) meneliti tentang *types and duration of unemployment in Kosovo*. Penelitian ini membahas berbagai jenis pengangguran dan durasi menganggur yang terjadi di Kosovo dalam jangka panjang. Penelitian ini menjelaskan bahwa jenis pengangguran yang terjadi di Kosovo adalah pengangguran friksional yang disebabkan bukan oleh perubahan struktural meskipun ekonomi Kosovo melewati transisi yang parah. Fakta yang ditemukan bahwa para pekerja pada umumnya bekerja di sektor-sektor yang tidak memiliki "hambatan masuk". Penelitian ini juga menjelaskan bahwa angkatan kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi memiliki peluang kerja yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang berpendidikan rendah. Selanjutnya ditemukan bahwa pekerja musiman mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi, pengangguran musiman hadir karena banyaknya karyawan di pertanian, perdagangan, dan konstruksi.

Penelitian Perazzi, dkk (2017) tentang *analysis of the duration of unemployment and outcomes for unemployed persons in the Bolivarian Republic of Venezuela*. Penelitian ini menganalisis urasi menganggur terhadap orang-orang yang tidak bekerja di Republik Bolivarian Venezuela. Penelitian ini menggunakan estimasi *maximum likelihood* untuk *Matrices Markov Homogen* menggunakan data survei pada sampel rumah tangga untuk periode 2012-2013. Penelitian ini menganalisis rata-rata durasi menganggur untuk pengangguran. Hasilnya menunjukkan bahwa pengangguran jangka panjang mendorong beberapa orang untuk tidak melakukan pencarian kerja lagi (berhenti menjadi bagian dari pasar tenaga kerja) dan yang lainnya untuk pindah ke pekerjaan pada sektor informal.

Penelitian yang dilakukan oleh Cheron dan Terria (2018) tentang *life cycle training and equilibrium unemployment*. Penelitian ini mengkaji dampak atau eksternalitas pelatihan terhadap keterampilan angkatan kerja baik yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja dengan mempertimbangkan faktor usia. Penelitian ini menemukan bahwa dampak eksternalitas pelatihan bagi angkatan kerja adalah: 1) Meningkatkan keterampilan kerja, 2) Mempermudah mendapatkan pekerjaan, 3) Menciptakan lapangan pekerjaan. Semua dampak ini

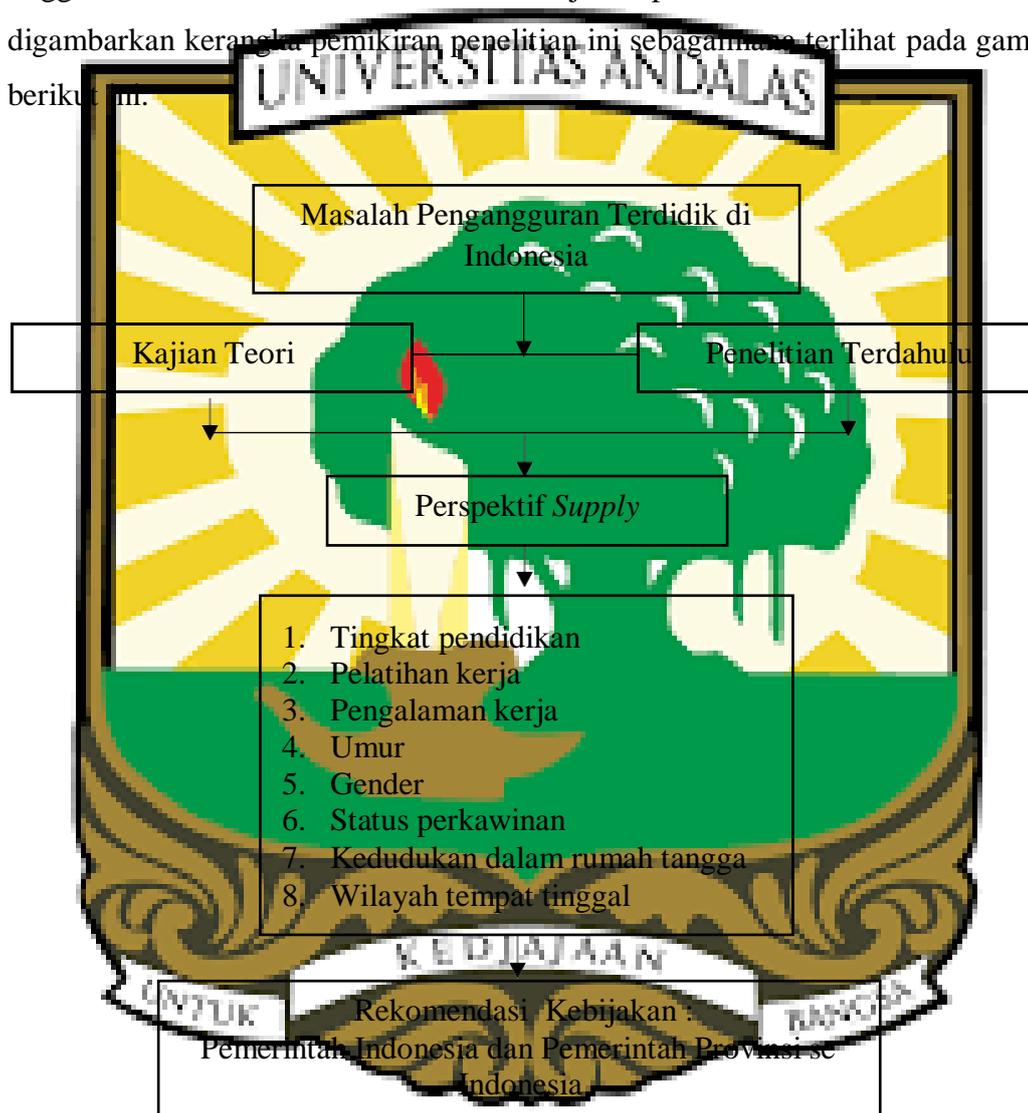
berlaku untuk semua kalangan umur baik itu tua maupun muda, hanya saja pelatihan lebih efektif diberikan kepada angkatan kerja muda dibandingkan yang lebih tua.

Penelitian yang dilakukan oleh Blanco dan Preugschat (2018) yang meneliti tentang *on the effects of ranking by unemployment duration*. Penelitian ini mengkaji tentang dampak peringkat berdasarkan durasi pengangguran. Penelitian ini membangun teori berdasarkan perilaku perekrutan pada perusahaan yang melakukan panggilan terhadap pelamar untuk diwawancarai dan menawarkan penurunan upah kerja. Kami membangun model pencarian terarah dengan informasi simetris yang tidak lengkap tentang jenis pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan pemilihan terhadap semua pelamar yang masuk dengan mempertimbangkan masa tunggu masing-masing pelamar demi mendapatkan produktivitas kerja yang tinggi. Penelitian ini juga membagi dua jenis pelamar yaitu pelamar yang belum pernah bekerja dan pelamar yang keluar dari pekerjaan lama. Penelitian ini menggunakan data A.S. dan menemukan bahwa pada umumnya perusahaan lebih suka menerima pelamar yang belum pernah bekerja dan memiliki durasi menganggur yang pendek.

Penelitian Sansale, dkk (2019) tentang *unemployment duration and the personalities of young adults workers*. Penelitian ini menguji peran kepribadian dalam menentukan durasi pengangguran angkatan kerja muda di Amerika Serikat pada tahun 2008 dan 2015. Menggunakan model resiko bersaing maka penelitian ini menemukan bahwa ketika individu dihadapkan pada pengangguran maka yang berusia muda secara signifikan lebih mungkin untuk mencari pekerjaan daripada melanjutkan pendidikan. Orang-orang yang memiliki *neuroticism* tinggi pada usia muda lebih cenderung memilih bekerja dari pada melanjutkan pendidikan. Implikasi penelitian ini adalah perlunya program pendidikan dan pelatihan kerja bagi angkatan kerja muda agar memiliki keterampilan memasuki dunia kerja. Penelitian ini memberikan dua kontribusi penting untuk literatur tentang pentingnya peran kepribadian dalam menentukan durasi pengangguran.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menguji dan menganalisis pengangguran terdidik dan durasi menganggur tenaga kerja terdidik dari sisi penawaran tenaga kerja yang terdiri dari tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga dan wilayah tempat tinggal. Berdasarkan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian ini sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 8 : Kerangka Konseptual Penelitian

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu serta kerangka konseptual penelitian maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian bahwa:

1. Probabilitas pengangguran terdidik bagi tamatan SMA/ sederajat lebih besar dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi
2. Probabilitas pengangguran terdidik bagi yang tidak pernah mengikuti pelatihan kerja lebih besar daripada yang pernah mengikuti pelatihan kerja
3. Probabilitas pengangguran terdidik bagi yang tidak memiliki pengalaman kerja lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja
4. Probabilitas pengangguran terdidik bagi yang berusia muda lebih besar dibandingkan dengan yang berusia tua
5. Probabilitas pengangguran terdidik bagi perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki
6. Probabilitas pengangguran terdidik bagi yang belum kawin lebih besar dibandingkan dengan yang sudah kawin
7. Probabilitas pengangguran terdidik bagi yang berkedudukan non kepala rumah tangga lebih besar dibandingkan dengan kepala rumah tangga
8. Probabilitas pengangguran terdidik bagi yang tinggal di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan yang tinggal di kota
9. Pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi
10. Pengangguran terdidik yang tidak pernah mengikuti pelatihan kerja berpeluang menganggur lebih lama daripada yang pernah mengikuti pelatihan kerja
11. Pengangguran terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja
12. Pengangguran terdidik yang berusia muda berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang berusia tua
13. Pengangguran terdidik perempuan berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan laki-laki
14. Pengangguran terdidik yang belum kawin berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah kawin

15. Pengangguran terdidik yang berkedudukan non kepala rumah tangga
berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan kepala rumah tangga
16. Pengangguran terdidik yang tinggal di perdesaan berpeluang menganggur lebih
lama dibandingkan dengan yang tinggal di kota



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pembentukan Model

Penelitian ini menganalisis faktor penentu pengangguran terdidik dan durasi menganggur dari sisi penawaran tenaga kerja yang dikembangkan dari model *Job Search Theory*. *Job search theory* menjelaskan adanya pilihan bagi pencari kerja apakah membuka usaha atau bekerja pada sektor tradisional (*on job search*) atau ia bisa sepenuhnya menganggur dan mencari kerja secara intensif, dapat diformulasikan dalam persamaan berikut:

$$U = E \left[\frac{1}{1+r} \right]^N E [\max(\xi_U, x)] - T_i - c \cdot E \left[\sum \left(\frac{1}{1+r} \right)^t t \right] \quad (3.1)$$

Kejelasan :

U = Unemployment

E = Harapan (*expected*)

r = Tingkat pendiskontoan

N = Jumlah tawaran pekerjaan

$\max \xi_U$ = Upah maksimum yang diminta

x = Variabel acak yang membenarkan nilai pekerjaan yang ditawarkan

T_i = Pendapatan pada sektor tradisional pada periode i

c = Biaya untuk mencari pekerjaan

t = Waktu yang digunakan untuk mencari kerja (menganggur)

Dengan demikian, persamaan (3.1) dapat diubah menjadi:

$$U = E \left[\frac{1}{qu+r} \right] [qu \cdot E(\max(\xi_U, x)) - T_i + c] \quad (3.2)$$

Lalu karena diketahui bahwa,

$$E \left[\frac{1}{qu+r} \right]^n \left[\frac{qu}{qu+r} \right]$$

$$E \left[\sum \left(\frac{1}{1+r} \right)^t t \right] = \frac{1}{qu+r}$$

$$E [\max(\xi_U, x)] = \xi_U \int_{\infty}^{\xi_U} \Phi_i(x) dx + \int_{\xi_U}^{\infty} \Phi_i(x) dx$$

Maka dengan mengubah persamaan (3.2) dan menyamakannya dengan *marginal return* (MR) dari mencari kerja, diperoleh kondisi keseimbangan bagi strategi kedua.

$$(T + c) = q_u \cdot \int_{\xi_u}^{\infty} (x - \xi_u) \cdot \phi_i(x) dx - r \xi_u \equiv H(x) \quad (3.3)$$

dimana

$\phi_i(x)$ = fungsi distribusi probabilitas tawaran pekerjaan pada periode i

Dengan cara yang sama dapat pula kita peroleh kondisi keseimbangan bagi strategi pertama (*on-job-search*):

$$c = q_T \int_{\xi_T}^{\infty} (x - \xi_T) \cdot \phi_i(x) dx - r \xi_T \equiv H(x) \quad (3.4)$$

Jadi, seorang pencari kerja atau penganggur dapat menetapkan *reservation wage* nya berdasarkan pada kedua kondisi di atas; persamaan (3.3) dan (3.4). Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi mana yang terbaik dengan membandingkan yang mana dari kedua *reservation wage* pada kedua persamaan di atas lebih tinggi.

$$\xi = \max(\xi_u, \xi_T) \quad (3.5)$$

Bila pencari kerja memilih strategi pertama, maka $\xi = \xi_T$ dan $c = q_T$. Sebaliknya bila ia memilih strategi ke dua, maka $\xi = \xi_u$ dan $q = q_u$. Kemudian, pencari kerja akan melakukan proses mencari kerja hingga ditemukannya suatu pekerjaan yang menawarkan x paling kurang sama dengan ξ . Jika diasumsikan bahwa ξ tetap sepanjang waktu maka (*expected duration*) dari mencari kerja adalah.

$$E(D) = \frac{1}{q [p(x \geq \xi)]} \equiv \frac{1}{q \int_{\xi}^{\infty} \phi(x) dx} \quad (3.6)$$

Dalam kenyataannya memang ξ bervariasi dengan parameter yang lainnya. Jika misalnya biaya mencari kerja meningkat, *reservation wage* pencari kerja akan menurun. Lalu *reservation wage* meningkat dengan penurunan tingkat diskonto atau dengan peningkatan probabilitas tawaran pekerjaan, dan sebagainya. Karena semua parameter ini dipengaruhi oleh karakteristik individu pencari kerja, maka fungsi *reservation wage* adalah.

$$\xi_u = \xi_u(Z_k, t) \quad (3.7)$$

dimana :

Z_k = Vektor dari sejumlah karakteristik individu pencari kerja

t = Waktu yang digunakan untuk menganggur.

Ada dua fungsi bagi ξ dimana fungsi ini tergantung pada strategi mana yang dipilih.

$$\xi_T = \xi_T = (Z_k, t) ; \text{jika } \xi_U > \xi_T \quad (3.7a)$$

$$\xi_T = \xi'_T = (Z_k, t - t_u) ; \text{jika } \xi_U > \xi_T \quad (3.7b)$$

Akhirnya, dengan menyamakan $\xi_T (Z_k, t - t_u)$ dengan (T_i/r) dan lalu dicari nilai t_u , akan diperoleh *expected duration* yang merupakan fungsi dari vektor karakteristik individu pencari kerja

$$E(DUR) = D(Z_k) \quad (3.8)$$

Dimana :

$E(DUR)$ = *expected duration* mencari kerja

Z_k = Karakteristik pencari kerja

Jika persamaan ini diaplikasikan pada data aktual, maka perlu ditambahkan gangguan acak (*error term*),

$$DUR = Z_k, \epsilon \quad (3.9)$$

dimana

DUR = *Duration of unemployment* (lamanya menganggur)

ϵ = *disturbance* atau *error term*.

Z_k = Karakteristik pencari kerja

Model inilah yang akan dimodifikasikan dan dipergunakan secara empiris pada penelitian ini.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor penentu pengangguran terdidik dan durasi menganggur tenaga kerja terdidik. Faktor penentu ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu kemampuan tenaga kerja, karakteristik rumah tangga dan wilayah tempat tinggal. Kemampuan tenaga kerja diproksi dari tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan umur. Model empiris pengujian kemampuan tenaga kerja terdidik terhadap probabilitas pengangguran terdidik adalah sebagai berikut;

$$Eu = \alpha + \beta_1 Edu + \beta_2 Wt + \beta_3 Exp + \beta_4 Age + \epsilon \quad (3.10)$$

$$Du = \alpha + \beta_1 Edu + \beta_2 Wt + \beta_3 Exp + \beta_4 Age + \epsilon \quad (3.11)$$

Selanjutnya dilakukan penambahan variabel karakteristik rumah tangga ke dalam model penelitian sehingga model empiris pengujian kemampuan tenaga kerja terdidik dan karakteristik rumah tangga terhadap probabilitas pengangguran terdidik adalah sebagai berikut;

$$Eu = \alpha + \beta_1 Edu + \beta_2 Wt + \beta_3 Exp + \beta_4 Age + \beta_5 Gend + \beta_6 Ms + \beta_7 Ph + \varepsilon \quad (3.12)$$

$$Du = \alpha + \beta_1 Edu + \beta_2 Wt + \beta_3 Exp + \beta_4 Age + \beta_5 Gend + \beta_6 Ms + \beta_7 Ph + \varepsilon \quad (3.13)$$

Kemudian dilakukan penambahan variabel wilayah lokasi tempat tinggal angkatan kerja (wilayah pedesaan dan perkotaan) sebagai variabel kontrol, sehingga terbentuk persamaan baru sebagai berikut;

$$Eu = \alpha + \beta_1 Edu + \beta_2 Wt + \beta_3 Exp + \beta_4 Age + \beta_5 Gend + \beta_6 Ms + \beta_7 Ph + \beta_8 Ra + \varepsilon \quad (3.14)$$

$$Du = \alpha + \beta_1 Edu + \beta_2 Wt + \beta_3 Exp + \beta_4 Age + \beta_5 Gend + \beta_6 Ms + \beta_7 Ph + \beta_8 Ra + \varepsilon \quad (3.15)$$

Selanjutnya dilakukan interaksi dari kemampuan tenaga kerja dan karakteristik tenaga kerja (variabel bebas) dengan wilayah tempat tinggal (variabel kontrol) sehingga dihasilkan persamaan sebagai berikut :

$$Eu = \alpha + \beta_1 Edu + \beta_2 Wt + \beta_3 Exp + \beta_4 Age + \beta_5 Gend + \beta_6 Ms + \beta_7 Ph + \beta_8 Ra + \beta_9 Edu * Ra + \beta_{10} Wt * Ra + \beta_{11} Exp * Ra + \beta_{12} Age * Ra + \beta_{13} Gend * Ra + \beta_{14} Ms * Ra + \beta_{15} Ph * Ra + \varepsilon \quad (3.16)$$

$$Du = \alpha + \beta_1 Edu + \beta_2 Wt + \beta_3 Exp + \beta_4 Age + \beta_5 Gend + \beta_6 Ms + \beta_7 Ph + \beta_8 Ra + \beta_9 Edu * Ra + \beta_{10} Wt * Ra + \beta_{11} Exp * Ra + \beta_{12} Age * Ra + \beta_{13} Gend * Ra + \beta_{14} Ms * Ra + \beta_{15} Ph * Ra + \varepsilon \quad (3.17)$$

Kemudian, dilakukan ditambah lagi variabel dummy wilayah pulau di Indonesia yang terdiri dari pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Pulau papua adalah branchmark, sehingga dihasilkan persamaan sebagai berikut :

$$Eu = \alpha + \beta_1 Edu + \beta_2 Wt + \beta_3 Exp + \beta_4 Age + \beta_5 Gend + \beta_6 Ms + \beta_7 Ph + \beta_8 Ra + \beta_9 Edu * Ra + \beta_{10} Wt * Ra + \beta_{11} Exp * Ra + \beta_{12} Age * Ra + \beta_{13} Gend * Ra + \beta_{14} Ms * Ra + \beta_{15} Ph * Ra + \beta_{16} Psum + \beta_{17} Pjw + \beta_{18} Pbnt + \beta_{19} Pkal + \beta_{20} Psul + \beta_{21} Pmal + \varepsilon \quad (3.18)$$

$$Du = \alpha + \beta_1 Edu + \beta_2 Wt + \beta_3 Exp + \beta_4 Age + \beta_5 Gend + \beta_6 Ms + \beta_7 Ph + \beta_8 Ra + \beta_9 Edu * Ra + \beta_{10} Wt * Ra + \beta_{11} Exp * Ra + \beta_{12} Age * Ra + \beta_{13} Gend * Ra + \beta_{14} Ms * Ra + \beta_{15} Ph * Ra + \beta_{16} Psum + \beta_{17} Pjw + \beta_{18} Pbnt + \beta_{19} Pkal + \beta_{20} Psul + \beta_{21} Pmal + \varepsilon \quad (3.19)$$

Keterangan :

Eu = Pengangguran terdidik (*educated unemployment*)

Du = Durasi menganggur (*duration of unemployment*)

Edu = Tingkat pendidikan (*education*)

Wt = Pelatihan kerja (*work training*)

Exp = Pengalaman kerja (*experience*)

Age = Umur (*age*)

Gender = Jenis kelamin (*gender*)

MS = Status perkawinan (*marriage status*)

Ph = Kedudukan dalam rumah tangga (*position in the household*)

Ra = Wilayah tempat tinggal (*residence area*)

Edu*Ra = Interaksi tingkat pendidikan dengan wilayah tempat tinggal

Wt*Ra = Interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal

Exp*Ra = Interaksi pengalaman kerja dengan wilayah tempat tinggal

Age*Ra = Interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal

Gender*Ra = Interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal

MS*Ra = Interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal

Ph*Ra = Interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal

Psum = Pulau Sumatera

Pjw = Pulau Jawa

Pbnt = Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Pkal = Pulau Kalimantan

Psul = Pulau Sulawesi

Pmal = Maluku



B. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini maka jenis penelitian ini adalah *ex post facto*. Menurut Sugiyono (2018) bahwa penelitian *ex post facto* merupakan penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh

suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel yang secara keseluruhan sudah terjadi. Pada penelitian ini akan dilihat pengaruh variabel pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga, dan wilayah tempat tinggal terhadap pengangguran terdidik dan durasi menganggur.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi, obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi penelitian ini adalah seluruh angkatan kerja yang terdata oleh Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus 2017 = 536.970 orang, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1 : Data Angkatan Kerja Pada Sakernas Agustus 2017 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	< SMA/ sederajat	343.989
2	≥ SMA/ sederajat	192.981
	Jumlah	536.970

Sumber : BPS, 2018 (diolah)

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2018). Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling* yang bertujuan menghindari bias sampel. *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Kriteria atau pertimbangan sampel penelitian ini adalah : 1) angkatan kerja yang berpendidikan \geq SMA/ sederajat, 2) angkatan kerja yang berumur 15-64 tahun. Jumlah sampel yang berpendidikan \geq SMA/ sederajat adalah sebanyak 192.981 orang, kemudian dilakukan seleksi berikutnya yaitu berdasarkan umur yaitu berumur 15-64 tahun sehingga jumlah sampel yang terpilih adalah sebanyak 188.292 orang.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh jumlah sampel adalah 188.292 orang, datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Data Sampel Penelitian Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Jumlah (orang)		Angkatan Kerja
		Bekerja	Menganggur	
1	Aceh	9.185	111	9.296
2	Sumatera Utara	13.219	171	13.390
3	Sumatera Barat	7.256	127	7.383
4	Riau	5.312	52	5.365
5	Jambi	3.790	38	3.828
6	Sumatera Selatan	5.773	66	5.839
7	Bengkulu	3.144	54	3.198
8	Lampung	5.053	52	5.105
9	Bangka-Belitung	2.106	26	2.132
10	Kepulauan Riau	2.289	28	2.317
11	DKI Jakarta	5.280	27	5.307
12	Jawa Barat	13.506	100	13.606
13	Jawa Tengah	14.121	193	14.314
14	DI Yogyakarta	2.947	29	2.976
15	Jawa Timur	16.744	187	16.931
16	Banten	4.912	30	4.942
17	Bali	4.568	41	4.609
18	Nusa Tenggara Barat	3.225	55	3.280
19	Nusa Tenggara Timur	5.569	66	5.635
20	Kalimantan Barat	4.287	51	4.338
21	Kalimantan Tengah	3.750	47	3.797
22	Kalimantan Selatan	3.904	60	3.964
23	Kalimantan Timur	4.388	70	4.458
24	Kalimantan Utara	1.348	16	1.364
25	Sulawesi Utara	5.214	60	5.274
26	Sulawesi Tengah	3.589	84	3.673
27	Sulawesi Selatan	9.144	141	9.285
28	Sulawesi Tenggara	4.408	68	4.476
29	Gorontalo	1.537	22	1.559
30	Sulawesi Barat	1.392	43	1.435
31	Maluku	3.912	70	3.982
32	Maluku Utara	2.817	38	2.855
33	Papua Barat	2.804	73	2.877
34	Papua	5.414	88	5.502
Jumlah		185.908	2384	188.292

Sumber : BPS, 2018 (diolah)

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data hasil tabulasi hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus 2017. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, data dikumpulkan dari dokumen BPS Indonesia berupa data pengangguran terdidik serta data hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus 2017.

F. Gambaran Umum Sakernas

Sumber utama data ketenagakerjaan di Indonesia adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar-sensus (SUPAS).

Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1986–1993, Sakernas diselenggarakan secara triwulanan, sejak tahun 1994–2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan, yaitu setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002–2004, di samping Sakernas Tahunan dilakukan pula Sakernas Triwulanan.

Pada tahun 2005–2010, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan secara semesteran pada Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II). Tahun 2011–2014 Sakernas dilaksanakan Triwulanan, yaitu Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV). Sakernas Triwulanan ini dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia yang mengacu pada The Key Indicators of the Labour Market (KILM) yang direkomendasikan oleh The International Labour Organization (ILO).

Mulai tahun 2015 sampai sekarang, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan kembali secara semesteran pada Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II). (BPS, 2019).

Sakernas diselenggarakan khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan. Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran, dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Pengumpulan data ketenagakerjaan melalui Sakernas mempunyai tiga tujuan utama. Ketiga tujuan tersebut adalah untuk mengetahui karakteristik:

1. Penduduk yang bekerja
2. Pengangguran dan setengah pengangguran
3. Penduduk yang tercakup dalam kategori bukan angkatan kerja yaitu mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya, selain kegiatan pribadi

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Metoda analisis deskriptif dilakukan untuk mendiskripsikan variabel penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Menurut Sugiyono (2018), metode statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya juga dilakukan analisis tabulasi silang (*crosstabs*) yaitu untuk menerangkan keterkaitan pengangguran terdidik dengan struktur perekonomian.

2. Analisis Regresi Logistik

Regresi logistik merupakan model regresi yang digunakan bila variabel responnya bersifat kualitatif (Hosmer dan Lemeshow, 1989). Menurut Ghozali (2011) regresi logistik bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Analisis regresi logistik pada penelitian digunakan untuk mengetahui probabilitas pengangguran terdidik dan durasi menganggur tenaga kerja terdidik sisi penawaran tenaga kerja. Pemilihan metode analisis tersebut karena semua variabel penelitian menggunakan variabel dummy berupa angka biner yaitu nilai 1 atau 0.

Bentuk persamaan umum untuk regresi logistik dapat dirumuskan sebagai berikut (Hosmer dan Lemeshow, 1989):

$$Y_i = \frac{e^{u_i}}{1 + e^{u_i}}$$

Y_i = Probabilitas yang diestimasi i ($i=1, \dots, n$)

e = Error

1 = Konstanta

u_i = Persamaan regresi, $u_i = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_n X_n$

b_i = Koefisien regresi

Fungsi distribusi kumulatif (CDF = *cumulative distributions function*) akan memenuhi kriteria di atas.

$$P = P(Y) \quad P = (Y=1/X=x), \quad P(h) = P(a+bX)$$

Dengan menggunakan fungsi logistik, diperoleh linear regression atau linear logit model, dengan rumus sebagai berikut:

$$P_i = EY = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5)}}$$

disederhanakan menjadi

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-z_i}}$$

Agar persamaan diatas dapat diestimasi maka persamaan tersebut dimanipulasi dengan cara mengalikan dengan $1 + e^{-z_i}$ pada kedua sisinya, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$(1 + e^{-z_i})P_i = \frac{1}{1 + e^{-z_i}}$$

$$\text{Atau } (1 + e^{-z_i})P_i = 1$$

$$\frac{(1+e^{-z_i})p_i}{p_i-1} = \frac{1}{p_i-1}$$

sehingga

$$e^{z_i} = \frac{p_i}{1-p_i}$$

Karena range p_i berkisar antara 0-1 dan p_i berhubung secara non linear dengan z_i jika p_i merupakan notasi untuk angkatan kerja terdidik yang menganggur maka $1-p_i$ merupakan notasi angkatan kerja angkatan kerja terdidik yang menganggur dengan pengaruh tertentu. Peluang bagi angkatan kerja terdidik yang menganggur adalah:

$$1-p_i = \frac{1}{1+e^{-z_i}}$$

Dengan model statistik *odds ratio* dengan menggabungkan persamaan diperoleh persamaan baru sehingga persamaan baru dapat ditulis menjadi

$$\frac{p_i}{1-p_i} = \frac{1+e^{z_i}}{1+e^{-z_i}} = e^{\beta_0}$$

Persamaan selanjutnya ditransformasikan menjadi model logaritma natural sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut (Hosmer dan Lemeshow 1989):

$$Li = \ln \left[\frac{p_i}{1-p_i} \right] = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + e$$

a. Uji Kelayakan Model

Sebelum melakukan analisis logistik maka terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan model. Menurut Hosmer dan Lemeshow (1989) salah satu uji persyaratan yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis regresi logistik adalah menilai kelayakan model regresi (*goodness of fit test*). Dengan memperhatikan output dari Hosmer dan Lemeshow dengan hipotesis:

H_0 = tidak ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan diamati

H_a = ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan diamati

Dasar pengambilan keputusan yaitu dengan memperhatikan nilai χ^2 yang diukur dengan nilai *chi-square* pada bagian bawah uji Hosmer dan Lemeshow yaitu:

- Jika probabilitas $\geq 0,05$ H_0 diterima
- Jika probabilitas $< 0,05$ H_0 ditolak

Pengujian kelayakan model regresi logistik dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* yang diukur dengan nilai *Chi-square*. *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness of Fit Test* baik karena model dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol diterima dan berarti model tidak mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model tidak dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

b. Pengujian Hipotesis

1) *Wald Test*

Wald Test digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Nilai *t* dapat diperoleh dengan cara membandingkan nilai *t* hitung dengan *t* tabel. Nilai *t* hitung dicari dengan menggunakan rumus:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

dimana :

t_o = nilai *t* hitung

b_i = koefisien regresi

S_{b_i} = kesalahan standar atas koefisien regresi X_i

Kriteria pengujian:

1. Jika $t_{\text{hitung}} \geq t_{\text{tabel}}$, atau nilai probability $\leq \alpha$ maka H_0 ditolak artinya variabel bebas X_i berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat
2. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, atau nilai probability $> \alpha$ maka H_0 diterima artinya variabel bebas X_i tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2) *Odd Ratio*

Untuk melihat probabilitas atau peluang suatu variabel bebas dengan kategori = 1 dapat mengalami peristiwa tertentu yang terkait dengan variabel terikat dibandingkan dengan variabel bebas dengan kategori = 0, dengan rumus:

$$OR = \text{Exp}(b_i)$$

Dimana:

OR = *Odd Ratio*

$$e^{-\log \text{natural}} = 2,71828$$

b_i = Koefisien logistik variabel ke-i

H. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel terikat adalah pengangguran terdidik dan durasi menganggur sedangkan variabel bebasnya kemampuan tenaga kerja (tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur), karakteritik rumah tangga (jenis kelamin, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga) dan variabel control adalah wilayah tempat tinggal. Definisi operasional masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3 : Defenisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Simbol	Defenisi	Pengukuran	Kuesioner Sakernas
1	Pengangguran terdidik	Eu	Angkatan kerja tamatan SMA/ sederajat yang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan	1 = Menganggur 0 = Bekerja	B5_R10
2	Durasi Menganggur	Du	Lamanya menganggur angkatan kerja memiliki pendidikan SMA/ sederajat dan keatasnya dan aktif mencari pekerjaan	1 = Menganggur > 3 bulan (panjang) 0 = Menganggur 0-3 bulan (pendek)	B5_R10
3	Tingkat pendidikan	Edu	Tingkat pendidikan formal yang ditempuh pengangguran terdidik yang dibuktikan oleh ijazah terakhir	1 = SMA/ sederajat 0 = Perguruan tinggi	B5_R1A
4	Pelatihan kerja	Wt	Pelatihan kerja yang pernah diikuti oleh pengangguran terdidik dan mendapat sertifikat	1 = Tidak pernah ikut pelatihan 0 = Pernah	B5_R1D
5	Pengalaman kerja	Exp	Pengalaman kerja yang pernah dimiliki oleh tenaga kerja terdidik	1 = Tidak berpengalaman 0 = Berpengalaman	B5_R46
6	Umur	Age	Usia pengangguran terdidik	1 = 15-24 tahun (muda) 0 = > 24 tahun (tidak muda)	B4_K6
7	Gender	Gend	Jenis kelamin pengangguran terdidik	1 = Perempuan 0 = Laki-laki	B4_K4
8	Status Perkawinan	Ms	Status perkawinan pengangguran terdidik	1 = Belum kawin 0 = Sudah kawin	B4_K8
9	Kedudukan Dalam Rumah Tangga	Ph	Kedudukan pengangguran terdidik dalam rumah tangga	1 = Bukan kepala RT 0 = Kepala RT	B4_K3
10	Wilayah Tempat Tinggal	Ra	Wilayah tempat tinggal pengangguran terdidik yang terdiri dari wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan	1 = Pedesaan 0 = Perkotaan	I_5
11	Interaksi tingkat pendidikan dengan wilayah tempat tinggal	Edu*Ra	Interaksi tingkat pendidikan dengan wilayah tempat tinggal	1 = SMA/ sederajat dan tinggal di perdesaan 0 = Perguruan tinggi dan tinggal di perkotaan	
12	Interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal	Wt*Ra	Interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal	1 = Tidak pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di perdesaan 0 = Pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di perkotaan	

13	Interaksi pengalaman kerja dengan wilayah tempat tinggal	Wt*R a	Interaksi pengalaman kerja dengan wilayah tempat tinggal	1 = 0 =	Tidak memiliki pengalaman kerja dan tinggal di perdesaan Memiliki pengalaman kerja dan tinggal di perkotaan
14	Interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal	Age* Ra	Interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal	1 = 0 =	Muda dan tinggal di perdesaan Tidak muda dan tinggal di perkotaan
15	Interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal	Gender* Ra	Interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal	1 = 0 =	Perempuan dan tinggal di perdesaan Laki-laki dan tinggal di perkotaan
16	Interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal	Ms*R a	Interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal	1 = 0 =	Belum menikah dan tinggal di perdesaan Sudah menikah dan tinggal di perkotaan
17	Interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal	Ph*R a	Interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal	1 = 0 =	Bukan kepala keluarga dan tinggal di perdesaan Kepala keluarga dan tinggal di perkotaan
18	Pulau Sumatera	Psum	Angkatan kerja terdidik yang tinggal di pulau Sumateara	1 = 0 =	Pulau Sumatera Lainnya
19	Pulau Jawa	Pjw	Angkatan kerja terdidik yang tinggal di pulau Jawa	1 = 0 =	Pulau Jawa Lainnya
20	Pulau Bali dan Nusa Tenggara	Pbnt	Angkatan kerja terdidik yang tinggal di pulau Bali dan Nusa Tenggara	1 = 0 =	Pulau Bali dan Nusa Tenggara Lainnya
21	Pulau Kalimantan	Pkal	Angkatan kerja terdidik yang tinggal di pulau Kalimantan	1 = 0 =	Pulau Kalimantan Lainnya
22	Pulau Sulawesi	Psul	Angkatan kerja terdidik yang tinggal di pulau Sulawesi	1 = 0 =	Pulau Sulawesi Lainnya
23	Pulau Maluku	Pmal	Angkatan kerja terdidik yang tinggal di pulau Maluku	1 = 0 =	Pulau Maluku Lainnya

BAB IV

KONDISI PEREKONOMIAN DAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

A. Keadaan Perekonomian Indonesia

1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar 9.53 triliun rupiah meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 9.10 triliun rupiah dengan PDB perkapita sebesar 51,89 juta rupiah. Ekonomi Indonesia tahun 2017 berhasil tumbuh 4,17 persen, namun pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar 4,57 persen. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar 5,20 persen. Hal ini berarti realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 masih di bawah target pemerintah.

Adapun data Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2010 pada masing-masing sektor atau lapangan usaha adalah sebagai berikut:

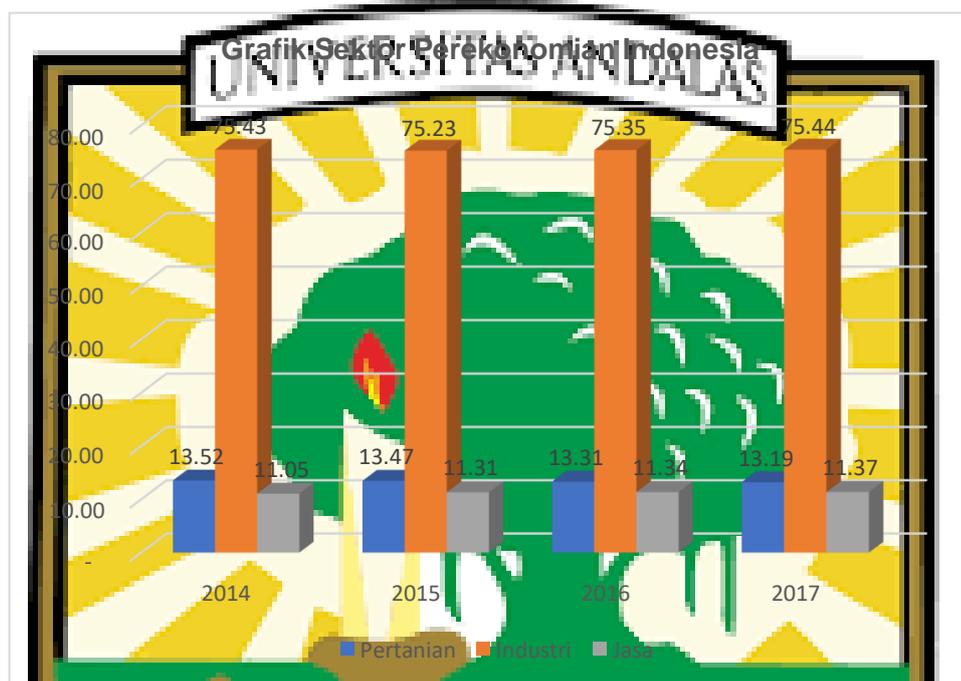
Tabel 4 : PDB ADHK Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

No	Lapangan Usaha	PDB ADHK (miliar rupiah) dan Share PDB (%)			
		2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	1.129.052,70 13,52	1.171.445,80 13,47	1.210.749,80 13,31	1.256.894,30 13,19
2	Industri	6.299.078,80 75,43	6.544.249,30 75,23	6.854.504,70 75,35	7.190.058,30 75,44
3	Jasa	923.237,20 11,05	983.840,20 11,31	1.032.058,70 11,34	1.083.337,30 11,37
PDB		8.351.368,70 100,00	8.699.535,30 100,00	9.097.313,20 100,00	9.530.289,90 100,00

Sumber : BPS, 2019 (diolah)

Kondisi perekonomian Indonesia sudah didominasi oleh sektor industri namun persentase peningkatannya dari tahun ke tahun masih relatif kecil. Selanjutnya terlihat bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia masih

tinggi yaitu berkisar antara 21,37 persen sampai 23,03 persen sedangkan kontribusi sektor jasa relatif rendah yaitu antara 11,05 persen sampai 11,37 persen. Selanjutnya dapat digambarkan kontribusi sektor pertanian, industri dan jasa terhadap perekonomian Indonesia berdasarkan harga konstan 2010 sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 9 : Grafik Persentase Kontribusi Sektor Perekonomian Indonesia Berdasarkan Harga Konstan

Di sisi lapangan usaha, seluruh kategori lapangan usaha di Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan positif di tahun 2017. Sebanyak 11 lapangan usaha berhasil tumbuh lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu kategori 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri Pengolahan; 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 6) Transportasi dan Pergudangan; 7) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 8) Informasi dan Komunikasi; 9) Jasa Perusahaan; 10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan 11) Jasa Lainnya. Sedangkan lapangan usaha yang tumbuh lebih rendah dari tahun sebelumnya adalah 1) Pertambangan dan Penggalian; 2) Pengadaan Listrik dan Gas; 3) Jasa Keuangan

dan Asuransi; 4) Real Estate; 5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 6) Jasa Pendidikan.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berhasil tumbuh 3,81 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,36 persen. Pertanian merupakan lapangan usaha yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hasil Sakernas Agustus 2017 mencatat penduduk yang bekerja pada lapangan usaha ini mencapai hampir 30 persen dari total tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja pada usaha ini merupakan yang tertinggi dibandingkan usaha-usaha lainnya di Indonesia.

Pada sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,27 persen, naik tipis dibandingkan tahun 2016 yakni sebesar 4,26 persen. Lapangan usaha ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Pertama, lapangan usaha ini menyerap tenaga kerja keempat terbesar setelah pertanian, perdagangan, dan jasa kemasyarakatan. Hasil Sakernas Agustus 2017 menunjukkan lapangan usaha ini menyerap tenaga kerja sebanyak 17,01 juta atau sekitar 14 persen dari total tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar pada usaha ini telah mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Kedua, output yang dihasilkan sektor industri memberikan kontribusi bagi peningkatan nilai ekspor. BPS mencatat tahun 2017 pertumbuhan industri besar dan sedang ditopang dari pertumbuhan industri makanan, sementara untuk industri mikro dan kecil ditopang dari naiknya produksi komputer, barang elektronik, dan optik. Peningkatan pertumbuhan industri berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor (BPS, 2018). Konsistensi pertumbuhan kategori ini harus dijaga karena penurunan pertumbuhan kategori ini akan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Hingga tahun 2017, rata-rata pertumbuhan Industri Pengolahan masih di bawah pertumbuhan ekonomi domestik. Inilah salah satu alasan pertumbuhan ekonomi nasional masih belum mampu meningkat secara signifikan dan penyerapan tenaga kerja masih rendah. Risiko yang masih perlu diwaspadai yaitu kinerja industri mengalami tekanan dari impor barang yang melonjak.

Pertumbuhan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang tahun 2017 menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2016. Hal ini sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Begitu pula dengan usaha Konstruksi berhasil tumbuh 6,79 persen atau meningkat 1,57 persen dibandingkan tahun 2016. Akselerasi pembangunan infrastruktur di seluruh daerah telah mendorong usaha ini naik signifikan. Usaha Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor menunjukkan peningkatan pertumbuhan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016, begitu pula dengan lapangan usaha Transportasi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, Jasa Kesehatan, serta Jasa Lainnya. Laju pertumbuhan kategori K menurun cukup signifikan di tahun 2017 sebesar 5,48 persen dari 8,90 persen tahun 2016. Lapangan usaha Real Estat, Administrasi Pemerintahan, dan Jasa Pendidikan tercatat juga menunjukkan pelemahan pertumbuhan di tahun 2017.

Jika ditinjau dari sisi kontribusi terhadap perekonomian, lapangan usaha Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perdagangan memberikan kontribusi tertinggi. Total kontribusi dari ketiga kategori ini bahkan hampir mencapai separuh dari total perekonomian nasional. Usaha Industri Pengolahan memegang peranan penting dalam perekonomian. Kontribusi usaha ini terhadap perekonomian merupakan yang tertinggi dibandingkan kategori lapangan usaha lainnya, dengan kontribusi sekitar 20 persen selama periode 2014-2017.

Berkembangan revolusi industri 4.0 telah masuk ke Indonesia yang ditandai dengan era digitalisasi. Kebutuhan layanan jasa meningkat seiring peningkatan pendapatan dan perubahan pola hidup masyarakat. Penggunaan internet semakin masif dan mencakup di setiap aspek pembangunan. Peningkatan *e-commerce* dan munculnya transportasi *online* menjadi salah satu bukti dan pendorong pertumbuhan ekonomi domestik sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2017 adalah 9,81 persen meningkat dari 8,88 persen pada tahun 2016.

Sementara itu, lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,69 persen. Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,95 persen. Di samping itu, sektor Pengadaan Listrik dan Gas tercatat pertumbuhan terendah kedua sebesar 1,54

persen. Angka ini menurun signifikan dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,39 persen. Selanjutnya sektor perekonomian yang tumbuh lebih rendah yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 2,06 persen.

Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami penurunan pertumbuhan PDB tahun 2017 yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2016. Kondisi ini disebabkan penurunan kebutuhan listrik. Perlambatan penjualan listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang menangani aspek kelistrikan di Indonesia dipicu oleh penghematan penggunaan listrik oleh pengguna, yaitu rumah tangga, industri, dan bisnis. Konsumsi listrik rumah tangga menurun seiring perubahan perilaku penggunaan konsumsi listrik yang lebih hemat energi. Pertumbuhan konsumsi listrik untuk industri dan bisnis juga mengalami perlambatan seiring penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan penurunan daya beli masyarakat dan perkembangan *e-commerce* yang mengubah kebiasaan berbelanja di pusat perbelanjaan menjadi belanja *online*.

Pertanian masih menjadi andalan usaha di Indonesia dengan kontribusi terhadap perekonomian tertinggi kedua setelah Industri Pengolahan. Kontribusi dari lapangan usaha ini sekitar 13 persen dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Output yang dihasilkan cukup tinggi seiring berbagai program pemerintah yang dilaksanakan untuk mencapai swasembada komoditas unggulan pertanian dan perkebunan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas dari lapangan usaha ini mengingat Indonesia memiliki visi menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045. Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras tahun 2016 dan 2017, serta telah menyusun *road map* untuk mencapai swasembada komoditas pangan lainnya.

Lapangan usaha Perdagangan dan Reparasi juga berkontribusi terhadap perekonomian di kisaran angka 13 persen atau sedikit di bawah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Usaha Perdagangan ini mampu membuka kesempatan kerja informal yang cukup luas bagi masyarakat. Disamping itu, perkembangan internet telah mendorong pertumbuhan perdagangan dengan sistem *online* atau

kerap disebut *e-commerce*. *E-commerce* menjadi alternatif usaha yang sedang menjamur di masyarakat sejak 2015 dan didominasi oleh usaha perdagangan.

2. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Berikut ini adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku periode 2014-2017.

Tabel 5: PDB ADHB Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

No	Lapangan Usaha	PDB ADHB (miliar rupiah) dan Share PDB (%)			
		2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	1.409.655,70 13,68	1.555.207,00 13,93	1.671.330,30 13,97	1.745.880,70 13,67
2	Industri	7.711.442,10 74,82	8.266.964,50 74,06	8.838.096,60 73,88	9.707.296,10 74,30
3	Jasa	1.185.134,60 11,50	1.341.034,20 12,01	1.453.764,20 12,15	1.511.329,70 12,03
	PDB	10.306.232,40 100,00	11.163.205,70 100,00	11.963.191,10 100,00	13.064.506,50 100,00

Sumber: : BPS, 2019 (diolah)

Kondisi perekonomian Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku didominasi oleh sektor industri namun persentase peningkatannya dari tahun ke tahun masih relatif kecil. Selanjutnya terlihat bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia masih tinggi yaitu berkisar antara 21,54 persen sampai 23,76 persen sedangkan kontribusi sektor jasa relatif rendah yaitu antara 11,50 persen sampai 12,03 persen.

Sebagai lapangan usaha tercatat memberikan kontribusi yang masih rendah terhadap perekonomian di bawah lima persen seperti tercantum pada lampiran 4.2. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi terhadap perekonomian sebesar 1,19 persen tahun 2017. Pengadaan Air dan Pengelolaan Limbah merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terendah dengan nilai kurang dari 0,1 persen.

Selanjutnya dapat digambarkan kontribusi sektor pertanian, industri dan jasa terhadap perekonomian Indonesia berdasarkan harga konstan 2010 sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 10 : Grafik Persentase Kontribusi Sektor Perekonomian Indonesia Berdasarkan Harga Berlaku

Lapangan usaha konstruksi memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional tahun 2017 sebesar 10,37 persen. Transportasi dan Pergudangan berkontribusi terhadap perekonomian tahun 2017 sebesar 5,41 persen. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memberikan kontribusi yang masih cukup kecil di angka 2,85 persen tahun 2017. Meskipun demikian, lapangan usaha ini memiliki prospek untuk berkembang semakin pesat di masa mendatang. Kenaikan jumlah penduduk selalu diiringi peningkatan kebutuhan pangan. Kondisi ini potensial untuk dimanfaatkan masyarakat membuka usaha di bidang pengolahan dan penyajian makan minum.

Lapangan usaha informasi dan komunikasi memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional sebesar 3,80 persen tahun 2017. Kategori ini dapat menjadi pendukung penggerakkan revolusi industri 4.0. Di era digitalisasi seperti saat ini, kebutuhan dan keberadaan sarana dan prasarana komunikasi teknologi dan informasi menjadi sebuah keharusan. Kontribusi lapangan usaha Jasa Keuangan

dan Asuransi menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun, dengan kontribusi di tahun 2017 sebesar 4,20 persen. Lapangan usaha Jasa Perusahaan, Jasa Kesehatan, dan Jasa Lainnya masing-masing memberikan kontribusi sekitar satu persen terhadap total perekonomian.

3. PDB Perkapita Indonesia

Konsumsi rumah tangga yang memberikan andil besar terhadap perekonomian sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan yang meningkat tercermin pada Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita yang senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. PDB perkapita merupakan salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yang digunakan sebagai dasar kebijakan pemerintah. Disamping itu, PDB perkapita juga merupakan salah satu alasan yang dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, pangsa pasar yang luas, dan PDB perkapita yang cenderung kuat dan selalu meningkat tentu menjadi potensi untuk menarik laju investasi di Indonesia. Namun, PDB perkapita yang tinggi sebaiknya diimbangi dengan pemerataan distribusi pendapatan. Hal ini penting untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 6 : Produk Domestik Bruto per Kapita (ribu rupiah) Tahun 2013–2017

PDB per Kapita	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010
2013	38 366,0	32 781,0
2014	41 915,9	33 965,4
2015	45 119,6	35 161,9
2016	47 957,2	36 468,7
2017	51 887,2	37 850,7

Sumber : BPS, 2019

PDB perkapita dihitung dari PDB nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Tahun 2017, PDB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp 51,89 juta atau naik Rp 3,93 juta dibanding tahun sebelumnya. Bank Dunia mengklasifikasikan negara dengan pendapatan tinggi memiliki PDB perkapita kurang lebih US\$ 12.236 atau Rp 163,96 juta. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia masih tergolong negara

berpendapatan menengah dengan PDB perkapita yang berada diposisi angka Rp 51,89 juta.

Guna mencapai level negara berpenghasilan tinggi, peningkatan produktivitas dan pembangunan sumber daya manusia yang berkompeten serta menguasai teknologi merupakan kunci untuk meraih PDB perkapita yang tinggi dan berkelanjutan. Percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh daerah juga akan menggerakkan ekonomi lokal yang pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi. Indonesia dihadapkan pada peluang adanya bonus demografi pada 2030. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme suplai tenaga kerja yang besar dan produktif.

4. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Provinsi di Indonesia

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 sektor menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Pengalihan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Indonesia memiliki 34 provinsi yang terdiri dari 416 kabupaten dan kota, sebanyak 7.240 kecamatan dan 83.706 desa. Berikut ini adalah PDRB atas dasar

harga konstan tahun 2010 sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia.

Tabel 7 : PDRB ADHK Provinsi Se Indonesia Periode 2010-2018

No	Provinsi	PDRB ADHK (Triliyun Ruqiah)								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2017	2018
1	Aceh	101.55	104.87	108.91	111.99	113.49	112.67	116.37	121.24	126.82
2	Sumatera Utara	331.09	353.15	375.92	398.78	419.57	440.96	463.78	487.53	512.77
3	Sumatera Barat	105.02	111.68	118.72	125.87	133.34	140.72	148.13	155.98	164.00
4	Riau	388.58	410.22	425.63	436.21	447.99	448.99	458.77	471.08	482.09
5	Jambi	90.62	97.74	104.02	110.01	119.99	125.04	130.50	136.56	143.00
6	Sumatera Selatan	194.01	206.36	220.46	232.35	243.30	254.05	266.86	281.57	298.57
7	Bengkulu	28.85	30.30	32.30	34.33	36.21	38.07	40.00	42.07	44.17
8	Lampung	150.56	160.44	170.77	180.64	189.80	199.34	209.79	220.63	232.21
9	Kep. Bangka Belitung	35.56	38.01	40.10	42.20	44.46	46.96	49.59	52.21	54.99
10	Kepulauan Riau	111.22	118.96	128.04	137.13	146.33	155.13	162.85	166.11	173.69
	Pulau Sumatera	153.66	163.17	172.55	181.15	189.42	196.11	202.50	213.28	222.95
11	DKI Jakarta	1,075.18	1,147.56	1,222.53	1,297.20	1,373.39	1,454.56	1,539.92	1,635.37	1,736.20
12	Jawa Barat	906.69	965.62	1,028.41	1,093.59	1,149.22	1,207.23	1,275.62	1,343.86	1,419.69
13	Jawa Tengah	623.22	656.27	691.34	726.90	764.96	806.77	849.10	893.75	941.28
14	DI Yogyakarta	64.68	68.05	71.70	75.64	79.54	83.47	87.69	92.30	98.03
15	Jawa Timur	990.65	1,054.40	1,124.46	1,192.84	1,262.68	1,331.38	1,405.56	1,482.30	1,563.76
16	Banten	271.47	290.55	310.39	332.52	349.35	368.38	387.84	410.05	433.88
	Pulau Jawa	655.32	697.08	741.47	786.45	829.86	875.30	924.29	976.27	1,032.14
17	Bali	93.75	99.99	106.95	114.11	121.79	129.13	137.30	144.95	154.15
18	Nusa Tenggara Barat	70.12	67.38	66.34	69.76	73.37	89.34	94.52	94.64	90.32
19	Nusa Tenggara Timur	43.85	46.33	48.86	51.51	54.11	56.77	59.68	62.73	65.94
	Bali & Nusa Tenggara	69.24	71.23	74.05	78.46	83.09	91.75	97.17	100.77	103.47
20	Kalimantan Barat	86.07	90.80	96.16	101.97	107.12	112.35	118.18	124.29	130.58
21	Kalimantan Tengah	56.53	60.49	64.65	69.42	73.72	78.89	83.90	89.54	94.60
22	Kalimantan Selatan	85.31	91.25	96.70	101.88	106.78	110.86	115.74	121.86	128.11
23	Kalimantan Timur	418.21	445.26	412.89	438.53	446.03	440.68	439.00	452.74	464.82
24	Kalimantan Utara					47.70	49.32	51.17	54.54	57.83
	Pulau Kalimantan	161.53	171.95	167.60	177.95	156.27	158.42	161.60	168.59	175.19
25	Sulawesi Utara	51.72	54.91	58.68	62.42	66.36	70.43	74.75	79.49	84.26
26	Sulawesi Tengah	51.75	56.83	62.25	68.19	71.68	82.79	91.02	97.48	103.62
27	Sulawesi Selatan	171.74	185.71	202.18	217.62	233.99	250.80	269.40	288.81	309.24
28	Sulawesi Tenggara	52.19	56.76	59.79	64.27	68.29	72.99	77.75	83.00	88.33
29	Gorontalo	15.48	16.67	17.99	19.37	20.78	22.07	23.51	25.09	26.72
30	Sulawesi Barat	17.18	19.03	20.79	22.23	24.20	25.96	27.58	29.35	31.18
	Pulau Sulawesi	60.01	64.99	70.28	75.68	80.88	87.51	94.00	100.54	107.23
31	Maluku	18.43	19.60	21.00	22.10	23.57	24.86	26.28	27.81	29.47
32	Maluku Utara	14.98	16.00	17.12	18.21	19.21	20.38	21.56	23.21	25.05
	Kep. Maluku	16.71	17.80	19.06	20.16	21.39	22.62	23.92	25.51	27.26
33	Papua Barat	41.36	42.87	44.42	47.71	50.26	52.35	54.71	56.90	60.45
34	Papua	110.81	106.07	107.89	116.43	121.39	130.31	142.23	148.82	159.73
	Pulau Papua	76.09	74.47	76.16	82.07	85.65	91.33	98.47	102.86	110.09
	Rata-Rata	170.36	180.10	188.74	200.27	206.68	217.58	229.13	241.12	254.05

Sumber : BPS, 2019 (diolah)

Berdasarkan data di atas terlihat pada provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki PDRB ADHK periode 2010-2018 di Indonesia yaitu sebesar 1.075,18 Triliyun pada tahun 2010 menjadi 1.736,20 Triliyun pada tahun 2018. Provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah provinsi Maluku Utara yaitu 14,98

Triliyun pada tahun 2010 dan pada tahun 2018 hanya naik menjadi 25,05 Triliyun. Data ini memperlihatkan bahwa ada ketimpangan besar PDRB masing-masing pemerintah provinsi di Indonesia dimana terlihat bahwa pada umumnya provinsi di Pulau Jawa memiliki PDRB yang lebih tinggi dari rata-rata nasional sedangkan daerah yang berada di Maluku memiliki PDRB yang jauh lebih rendah dari rata-rata nasional.

Rata-rata PDRB pulau Sumatera tahun 2018 adalah 222,95 Triliyun dengan provinsi yang memiliki PDRB tertinggi adalah provinsi Riau sebesar 388,58 Triliyun pada tahun 2010 dan 2018 sebesar 482,09 Triliyun. Provinsi yang memiliki PDRB terendah di Pulau Sumatera adalah provinsi Bengkulu dengan besaran PDRB pada tahun 2018 adalah 44,17 Triliyun. Data ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di pulau Sumatera tidak terlalu timpang antara satu provinsi dengan provinsi lainya karena perbedaan PDRB masing-masing tidak terlalu jauh kecuali provinsi Bengkulu dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada pulau Jawa terlihat daerah yang memiliki PDRB tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 1,736.20 Triliyun pada tahun 2018 sedangkan provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah provinsi DI Yogyakarta. Data ini memperlihatkan adanya ketimpangan yang kondisi perekonomian di Pulau Jawa karena PDRB tertinggi dan terendah berada jauh dari nilai rata-rata pulau Jawa.

PDRB pemerintah provinsi di pulau Bali dan Nusa Tenggara tidak terlalu berbeda satu sama lainnya, hal ini terlihat bahwa pada tahun 2018 nilai rata-rata PDRB pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah sebesar 103,47 Triliyun dengan PDRB tertinggi adalah Bali sebesar 154,15 Triliyun dan terendah adalah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PDRB sebesar 65,94 Triliyun.

Berdasarkan data PDRB pulau Kalimantan terlihat bahwa provinsi yang memiliki PDRB tertinggi pada tahun 2018 adalah Kalimantan Timur sebesar 464,92 Triliyun. Nilai ini jauh di atas nilai rata-rata PDRB pulau Kalimantan yang bernilai sebesar 175.19 Triliyun dan provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah Kalimantan Utara sebesar 57.83 Trilitun. Data ini menunjukkan adanya perbedaan

yang mencolok kondisi perekonomian di Pulau Kalimantan karena adanya perbedaan yang jauh dari besaran nilai PDRB masing-masing daerah.

Pada pulau Sulawesi terdapat enam provinsi dengan nilai rata-rata PDRB pada tahun 2018 adalah sebesar 107,23 Triliyun dengan PDRB tertinggi terdapat pada provinsi Sulawesi Selatan dan terendah terletak pada provinsi Gorontalo yakni sebesar 26,72%. Data ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Pulau Sulawesi masih jauh tertinggal dari provinsi lain di Indonesia karena terlihat pada umumnya pemerintah provinsi di Sulawesi memiliki PDRB lebih rendah dari rata-rata PDRB nasional.

Pemerintah provinsi yang memiliki PDRB terendah di Indonesia terletak pada Pulau Maluku dengan rata-rata PDRB pada tahun 2018 adalah sebesar 27,26 Triliyun dan provinsi yang memiliki PDRB terendah adalah 25,05 Triliyun sedangkan yang tertinggi hanya bernilai sebesar 29,47 Triliyun. Data ini menunjukkan bahwa keadaan perekonomian pulau Maluku masih jauh tertinggal dari daerah lain diluar pulau Maluku.

Selanjutnya diketahui bahwa nilai rata-rata PDRB pulau Papua tahun 2018 adalah 10,09 Triliyun dan PDRB tertinggi terletak pada provinsi Papua sebesar 159,73 Triliyun dan PDRB terendah adalah provinsi Papua Barat sebesar 60,45 Triliyun. Data ini memperlihatkan bahwa PDRB Papua dengan Papua Barat tidak terlalu berbeda besarnya.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi periode 2011-2018 pada masing-masing provinsi di pulau Sumatera diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi pulau Sumatera adalah 4,55%. Pertumbuhan ekonomi terendah adalah 0,73% pada provinsi Aceh yang terjadi pada tahun 2015 sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi terletak pada provinsi Jambi pada tahun 2011 yakni sebesar 7,86%.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi pulau Jawa adalah 5,75%. Pertumbuhan ekonomi terendah terletak di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 adalah 4,95% sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi terletak pada provinsi Banten pada tahun 2013 yakni sebesar 7,13%.

Berikut ini adalah data pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi yang ada di Indonesia adalah.

Tabel 8 : Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se Indonesia Periode 2010-2018

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	3.28	3.85	2.83	1.34	(0.73)	3.29	4.18	4.60
2	Sumatera Utara	6.66	6.45	6.08	5.21	5.10	5.17	5.12	5.18
3	Sumatera Barat	6.34	6.31	6.02	5.93	5.53	5.27	5.29	5.14
4	Riau	5.57	3.76	2.49	2.70	0.22	2.18	2.68	2.34
5	Jambi	7.86	7.03	7.07	7.13	4.20	4.37	4.64	4.71
6	Sumatera Selatan	6.36	6.83	5.40	4.71	4.42	5.04	5.51	6.04
7	Bengkulu	6.85	6.83	6.08	5.47	5.13	5.28	4.98	4.98
8	Lampung	6.56	6.44	5.78	5.07	5.13	5.14	5.16	5.25
9	Kep. Bangka Belitung	6.90	6.50	5.22	4.65	4.68	4.10	4.47	4.45
10	Kepulauan Riau	6.96	7.63	7.11	6.70	6.02	4.98	4.00	4.56
	Pulau Sumatera	6.55	6.06	5.41	4.80	3.91	4.48	4.40	4.73
11	D.K. Jakarta	6.73	6.53	6.11	5.87	5.91	5.87	6.20	6.17
12	Jawa Barat	6.50	6.50	6.34	5.09	5.05	5.66	5.35	5.64
13	Jawa Tengah	5.30	5.34	5.14	5.24	5.47	5.25	5.26	5.32
14	D.I. Yogyakarta	5.21	5.37	5.49	5.16	4.95	5.05	5.26	6.20
15	Jawa Timur	6.44	6.64	6.08	5.86	5.44	5.57	5.46	5.50
16	Banten	7.03	6.83	7.13	5.06	5.45	5.28	5.73	5.81
	Pulau Jawa	6.20	6.20	6.05	5.38	5.38	5.45	5.54	5.77
17	Bali	6.66	6.96	6.69	6.73	6.03	6.33	5.57	6.35
18	Nusa Tenggara Barat	(3.91)	(1.54)	5.15	5.19	21.76	5.80	0.12	(4.56)
19	Nusa Tenggara Timur	5.67	5.46	5.42	5.04	4.92	5.12	5.11	5.13
	Bali & Nusa Tenggara	2.81	3.63	5.75	5.65	10.90	5.75	3.60	2.31
20	Kalimantan Barat	5.50	5.91	6.04	5.05	4.88	5.19	5.17	5.06
21	Kalimantan Tengah	7.01	6.87	7.38	6.20	7.01	6.35	6.72	5.65
22	Kalimantan Selatan	6.97	5.97	5.36	4.81	3.82	4.40	5.28	5.13
23	Kalimantan Timur	6.47	(7.27)	6.21	1.71	(1.20)	(0.38)	3.13	2.67
24	Kalimantan Utara					3.40	3.75	6.59	6.03
	Pulau Kalimantan	6.49	2.87	6.25	4.44	3.58	3.86	5.38	4.91
25	Sulawesi Utara	6.17	6.86	6.38	6.31	6.12	6.16	6.31	6.01
26	Sulawesi Tengah	9.82	9.53	9.55	5.11	15.50	9.94	7.10	6.30
27	Sulawesi Selatan	8.13	8.87	7.63	7.52	7.19	7.42	7.21	7.07
28	Sulawesi Tenggara	8.76	5.32	7.51	6.25	6.88	6.51	6.76	6.42
29	Corontalo	7.71	7.91	7.68	7.26	6.22	6.52	6.73	6.51
30	Sulawesi Barat	10.73	9.25	6.94	8.85	7.31	6.01	6.62	6.24
	Pulau Sulawesi	8.55	7.96	7.62	6.88	8.20	7.09	6.79	6.43
31	Maluku	6.34	7.16	5.26	6.62	5.48	5.73	5.82	5.94
32	Maluku Utara	6.80	6.98	6.37	5.48	6.10	5.78	7.67	7.92
	Kep. Maluku	6.57	7.07	5.82	6.05	5.79	5.76	6.75	6.93
33	Papua Barat	3.64	3.63	7.39	5.35	4.15	4.52	4.01	6.24
34	Papua	(4.28)	1.72	7.91	4.26	7.35	9.11	4.64	7.33
	Pulau Papua	(0.32)	2.68	7.65	4.81	5.75	6.83	4.33	6.79
	Rata-Rata	5.23	5.21	6.36	5.44	6.22	5.60	5.25	5.41

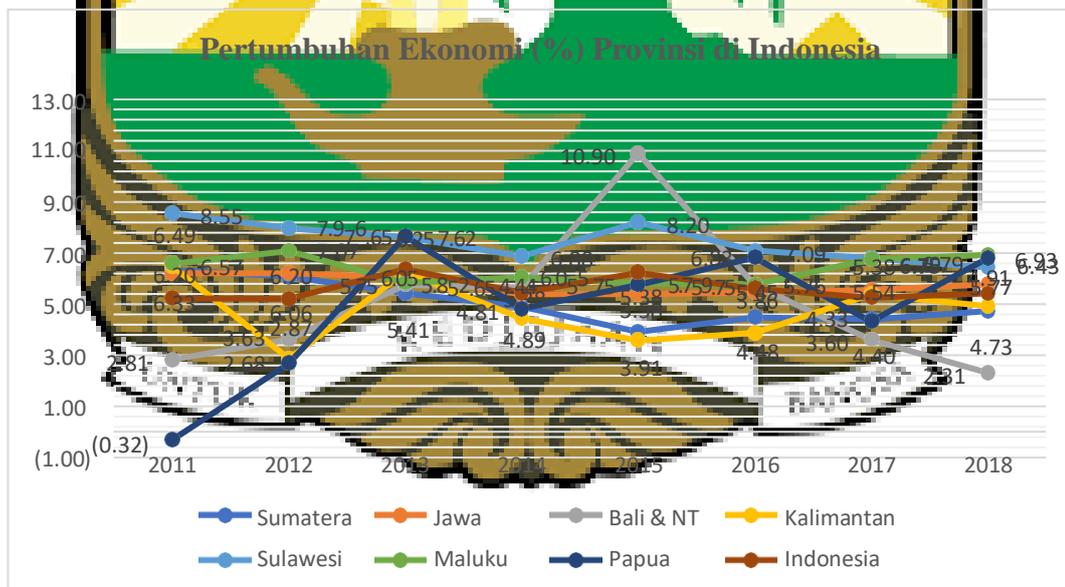
Sumber : BPS, 2019 (diolah)

Pada pulau Bali dan Nusa Tenggara diketahui rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 5,05%. Pertumbuhan ekonomi terendah terletak di provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 adalah -4,56% sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi

juga terletak pada provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 yakni sebesar 21,76%.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi pulau Kalimantan periode 2011-2018 diketahui rata-rata pertumbuhan ekonomi pulau Kalimantan adalah 4,78%. Pertumbuhan ekonomi terendah terletak di provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 adalah -7,27% sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi juga terletak pada provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 yakni sebesar 8,14%.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi pulau Sulawesi periode 2011-2018 adalah 7,44%. Pertumbuhan ekonomi terendah terletak di provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2014 adalah 5,11% sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi juga terletak pada provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 yakni sebesar 15,50%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua periode 2011-2018 adalah 5,58%. Pertumbuhan ekonomi terendah terletak di provinsi Papua pada tahun 2011 adalah -4,28% sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi juga terletak pada provinsi Papua tahun 2016 yakni sebesar 9,14%. Secara visual pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa pulau di Indonesia adalah sebagai berikut.



Gambar 11 : Grafik Pertumbuhan Ekonomi Masing-Masing Pulau di Indonesia

5. Investasi di Indonesia

Data statistik penanaman modal yang disetujui pemerintah terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Data mengenai realisasi investasi penanaman modal tidak termasuk sektor minyak, asuransi, dan perbankan. Berikut ini adalah data realisasi investasi PMDN menurut provinsi di Indonesia periode 2016-2018.

Tabel 9: Data Investasi PMDN Menurut Provinsi di Indonesia Periode 2016-2018

No	Provinsi	Proyek-Proyek (Unit)			Investasi (Milyar Rupiah)		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Aceh	135	154	242	2,456.10	782.80	970.00
2	Sumatera Utara	228	307	356	4,864.20	11,683.50	8,371.80
3	Sumatera Barat	197	192	210	3,795.60	1,517.00	2,309.50
4	Riau	289	285	393	6,613.70	10,829.80	9,056.40
5	Jambi	108	152	190	3,884.40	3,006.50	2,876.50
6	Sumatera Selatan	165	233	270	8,534.10	8,200.20	9,519.80
7	Bengkulu	31	45	99	949.10	296.50	4,902.80
8	Lampung	72	69	91	6,031.80	7,014.80	12,314.70
9	Kep. Bangka Belitung	60	58	123	2,202.00	1,734.70	3,112.90
10	Kepulauan Riau	130	198	319	492.50	1,398.00	4,386.00
11	DKI Jakarta	463	659	666	12,216.90	47,262.80	49,097.40
12	Jawa Barat	1,169	1,211	1,661	30,360.20	38,390.50	42,278.20
13	Jawa Tengah	984	1,403	1,478	24,070.40	19,866.00	27,474.90
14	DI Yogyakarta	105	92	148	948.60	294.50	6,131.70
15	Jawa Timur	1,119	1,491	1,679	46,331.60	45,044.50	33,333.10
16	Banten	496	699	718	12,426.30	15,141.90	18,637.60
17	Bali	94	101	183	482.30	592.50	1,548.90
18	Nusa Tenggara Barat	33	61	92	1,342.80	5,413.50	4,135.10
19	Nusa Tenggara Timur	29	61	82	822.20	1,081.90	4,246.10
20	Kalimantan Barat	289	248	330	9,015.50	12,380.90	6,591.40
21	Kalimantan Tengah	121	177	195	8,179.10	3,037.80	13,091.60
22	Kalimantan Selatan	127	142	170	6,163.00	2,981.90	9,975.20
23	Kalimantan Timur	239	197	309	6,885.10	10,980.70	25,942.00
24	Kalimantan Utara	56	86	83	3,345.70	857.30	1,356.80
25	Sulawesi Utara	74	57	82	5,069.60	1,482.20	4,320.10
26	Sulawesi Tengah	105	60	130	1,081.20	1,929.70	8,488.90
27	Sulawesi Selatan	365	242	318	3,334.60	1,969.40	3,275.90
28	Sulawesi Tenggara	109	62	54	1,794.20	3,148.70	1,603.40
29	Gorontalo	20	16	30	2,202.50	888.40	2,666.80
30	Sulawesi Barat	14	22	20	84.10	660.20	3,144.20
31	Maluku	8	8	36	11.40	52.30	1,013.50
32	Maluku Utara	6	7	23	8.80	1,150.60	2,276.30
33	Papua Barat	6	10	12	10.60	59.20	50.90
34	Papua	65	33	23	220.50	1,217.90	104.60
	Indonesia	7,511	8,838	10,815	216,230.80	262,350.50	328,604.90

Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan data realisasi investasi PMDN diketahui jumlah investasi di Indonesia selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 investasi PMDN adalah sebesar 216.230,80 milyar mengalami peningkatan menjadi 262.350,50 milyar pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 kembali peningkatan menjadi 328,604.90 milyar. Pada tingkat wilayah provinsi diketahui bahwa provinsi yang memiliki realisasi investasi tertinggi pada tahun 2016 adalah provinsi Jawa Timur dengan realisasi investasi PMDN sebesar 46,331.00 milyar sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 jumlah investasi tertinggi terdapat pada provinsi DKI Jakarta dengan jumlah investasi sebesar 47.262.30 milyar dan 49,097.40 milyar. Selanjutnya jumlah investasi terendah pada tahun 2016 adalah pada provinsi Maluku Utara sebesar 8,80 milyar dan pada tahun 2017 adalah provinsi Maluku sebesar 52.30 milyar dan pada tahun 2018 adalah provinsi Papua Barat sebesar 50,90 milyar.

Berdasarkan data diketahui bahwa realisasi investasi PMDN masih didominasi oleh pulau Jawa, yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa pulau Jawa merupakan daerah yang paling banyak diminati oleh investor dalam melakukan investasi dibandingkan daerah lain diluar pulau Jawa.

Berdasarkan data realisasi investasi PMA diketahui jumlah investasi di Indonesia selalu mengalami perubahan yang berfluktuasi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 investasi PMA adalah sebesar 28.964,10 US\$ mengalami peningkatan menjadi 32.239,80 US\$ pada tahun 2017 namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 29,307.90 US\$.

Pada tingkat wilayah provinsi diketahui bahwa provinsi yang memiliki realisasi investasi PMA tertinggi pada tahun 2016-2018 adalah provinsi Jawa Barat dengan realisasi investasi sebesar 5.470,90 US\$ pada tahun 2016 dan tahun 2017 dan 2018 jumlah investasi adalah sebesar 5.142,90 US\$ dan 5.573,50 US\$. Sedangkan jumlah investasi terendah pada tahun 2016 adalah pada provinsi Gorontalo sebesar 12.70 US\$ dan pada tahun 2017 adalah provinsi Sulawesi Barat adalah 11.40 US\$ dan pada tahun 2018 adalah provinsi Maluku sebesar 8 US\$.

Adapun data realisasi investasi PMA menurut provinsi di Indonesia periode 2016-2018 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10 : Data Realisasi PMA Menurut Provinsi di Indonesia Periode 2016-2018

No	Provinsi	Proyek-Proyek (Unit)			Investasi (Juta US \$)		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Aceh	111	89	91	134.50	23.20	71.20
2	Sumatera Utara	688	564	491	1,014.70	1,514.90	1,227.60
3	Sumatera Barat	198	146	137	79.30	194.40	180.80
4	Riau	394	285	252	869.10	1,061.10	1,032.90
5	Jambi	161	103	103	61.00	6.80	101.90
6	Sumatera Selatan	251	261	239	2,792.50	1,112.90	1,078.60
7	Bengkulu	59	50	39	55.70	118.70	136.60
8	Lampung	129	133	121	85.70	110.60	132.30
9	Kep. Bangka Belitung	93	86	79	52.70	113.10	46.30
10	Kepulauan Riau	880	812	804	519.10	1,011.50	831.30
11	DKI Jakarta	6,751	8,803	6,499	3,398.20	4,515.00	4,857.70
12	Jawa Barat	5,369	5,309	4,713	5,470.90	5,112.90	5,573.50
13	Jawa Tengah	1,054	955	801	1,030.80	2,312.50	2,372.70
14	DI Yogyakarta	252	179	184	19.60	16.50	81.30
15	Jawa Timur	1,473	1,750	1,441	1,941.00	1,516.70	1,333.40
16	Banten	2,161	2,479	1,895	2,912.10	3,017.50	2,827.30
17	Bali	1,371	1,429	1,490	450.60	816.90	1,002.50
18	Nusa Tenggara Barat	636	604	651	439.00	112.10	251.60
19	Nusa Tenggara Timur	164	166	175	58.20	119.00	100.40
20	Kalimantan Barat	569	323	305	630.70	568.40	491.90
21	Kalimantan Tengah	341	246	179	408.20	61.00	678.50
22	Kalimantan Selatan	189	117	99	249.40	213.80	129.20
23	Kalimantan Timur	466	340	275	1,139.60	1,215.20	587.50
24	Kalimantan Utara	65	75	56	160.80	149.00	67.30
25	Sulawesi Utara	209	167	139	382.80	482.90	295.90
26	Sulawesi Tengah	252	161	154	1,600.30	1,515.60	672.40
27	Sulawesi Selatan	309	196	191	372.50	712.80	617.20
28	Sulawesi Tenggara	210	92	77	376.10	693.00	672.90
29	Gorontalo	76	37	30	12.70	41.30	40.80
30	Sulawesi Barat	28	16	17	20.60	11.40	24.70
31	Maluku	50	34	26	102.60	212.00	8.00
32	Maluku Utara	67	28	47	438.90	228.10	362.80
33	Papua Barat	126	87	70	514.50	84.70	286.90
34	Papua	169	135	102	1,168.40	1,924.10	1,132.30
	Indonesia	25,321	26,257	21,972	28,964.10	32,239.80	29,307.90

Sumber : BPS, 2020

B. Keadaan Kependudukan Indonesia

1. Jumlah Penduduk Indonesia

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (BPS, 2019). Data kependudukan di Indonesia dikumpulkan melalui sensus penduduk yang dilaksanakan 10 tahun sekali.

Sensus penduduk di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. (Statistik Indonesia, 2019). Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui e-census. Pencatatan penduduk menggunakan konsep *usual residence*, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam 'Hari Sensus'. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tujuannya.

Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP2010.

Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971-2017 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11 : Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 1971-2017

No	Provinsi	Penduduk (Jiwa)						
		1971	1980	1990	1995	2000	2010	2017
1	Aceh	2,008,595	2,611,271	3,416,156	3,847,583	3,930,905	4,494,410	5.189.500
2	Sumatera Utara	6,621,831	8,360,894	10,256,027	11,114,667	11,649,655	12,982,204	14.262.100
3	Sumatera Barat	2,793,196	3,406,816	4,000,207	4,323,170	4,248,931	4,846,909	5.321.500
4	Riau	1,641,545	2,168,535	3,303,976	3,900,534	4,957,627	5,538,367	6.657.900
5	Jambi	1,006,084	1,445,994	2,020,568	2,369,959	2,413,846	3,092,265	3.515.000
6	Sumatera Selatan	3,440,573	4,629,801	6,313,074	7,207,545	6,899,675	7,450,394	8.267.000
7	Bengkulu	519,316	768,064	1,179,122	1,409,117	1,567,432	1,715,518	1.934.300
8	Lampung	2,777,008	4,624,785	6,017,573	6,657,759	6,741,439	7,608,405	8.289.600
9	Kepulauan Babel	-	-	-	-	900,197	1,223,296	1.430.900
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	1,679,163	2.082.700
11	DKI Jakarta	4,579,303	6,503,449	8,239,266	9,112,652	8,007,110	10,607,787	10.374.200
12	Jawa Barat	21,623,529	27,453,525	35,384,352	39,206,787	39,729,537	44,053,732	48.037.600
13	Jawa Tengah	21,277,136	25,372,889	28,520,643	29,653,266	31,228,940	32,382,657	34.257.900
14	DI Yogyakarta	2,489,360	2,750,813	2,913,054	2,916,779	3,122,268	3,457,491	3.762.200
15	Jawa Timur	25,516,999	29,188,852	32,503,991	33,844,002	34,783,640	37,476,757	39.293.000
16	Banten	-	-	-	-	8,098,780	10,632,166	12.448.200
17	Bali	2,120,322	2,469,930	2,777,811	2,895,649	3,151,162	3,890,757	4.246.500
18	NTB	2,203,465	2,724,664	3,369,649	3,645,713	4,009,261	4,500,212	4.955.600
19	NTT	2,295,287	2,737,166	3,268,644	3,577,472	3,952,279	4,683,827	5.287.300
20	Kalimantan Barat	2,019,936	2,486,068	3,229,153	3,635,730	4,034,198	4,395,983	4.932.500
21	Kalimantan Tengah	701,936	954,353	1,396,486	1,627,453	1,857,000	2,212,089	2.605.300
22	Kalimantan Selatan	1,699,105	2,064,649	2,597,572	2,893,477	2,985,240	3,626,616	4.119.800
23	Kalimantan Timur	733,797	1,218,016	1,876,663	2,314,183	2,455,120	3,553,143	3.575.400
24	Sulawesi Utara	1,718,543	2,115,384	2,478,119	2,649,093	2,012,098	2,270,596	2.461.000
25	Sulawesi Tengah	913,662	1,289,635	1,711,327	1,938,071	2,218,435	2,635,009	2.966.300
26	Sulawesi Selatan	5,180,576	6,062,212	6,981,646	7,558,368	8,059,627	8,034,776	8.690.300
27	Sulawesi Tenggara	714,120	942,302	1,349,619	1,586,917	1,821,284	2,232,586	2.602.400
28	Gorontalo	-	-	-	-	835,044	1,040,164	1.168.200
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	1,158,651	1.331.000
30	Maluku	1,089,565	1,411,006	1,857,790	2,086,516	1,205,539	1,533,506	1.744.700
31	Maluku Utara	-	-	-	-	785,059	1,038,087	1.209.300
32	Papua Barat	-	-	-	-	-	760,422	915.400
33	Papua	923,440	1,173,875	1,648,708	1,942,627	2,220,934	2,833,381	3.265.200
34	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	691.100
INDONESIA		119,208,229	147,490,298	179,378,946	194,754,808	206,264,595	237,641,326	261.890.900

Sumber : BPS, 2019

Berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia dari 1971-2018 tumbuh sebesar 119,69%. Data ini menunjukkan terjadinya pertumbuhan yang cepat dari penduduk Indonesia selama 46 tahun terakhir. Selanjutnya terlihat bahwa provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 48.037.600 jiwa (18,34%) dan provinsi yang memiliki penduduk yang paling sedikit adalah provinsi Kalimantan Utara sebanyak 691.100 jiwa (0,26%).

2. Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi (BPS, 2019). Berdasarkan data persentase dan kepadatan penduduk Indonesia pada periode 2010-2017, terlihat bahwa persentase penduduk paling tinggi tahun 2010 adalah terletak pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan persentase masing-masing yaitu 18,12%, 15,75% dan 13,60%. Pada tahun 2017 kondisinya tetap sama yaitu masing dikuasai oleh tiga Provinsi tersebut yaitu masing-masing 18,34%, 15,00% dan 13,08%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penduduk Indonesia berdomisili di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Provinsi yang memiliki persentase jumlah penduduk paling kecil di Indonesia pada tahun 2010 adalah Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 0,32% dari total penduduk Indonesia tapi pada tahun 2017 Provinsi yang memiliki persentase terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 0,26%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Kalimantan Utara memiliki jumlah penduduk yang sangat kecil jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah pada tahun 2010 dan tahun 2017.

Berdasarkan data kepadatan penduduk per Km² (jiwa) diketahui Provinsi yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi pada periode 2010-2017 adalah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai kepadatan pada tahun 2010 adalah 14.518 jiwa dan tahun 2017 adalah 15.624 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 1 Km² daerah DKI Jakarta ditempati oleh penduduk sebanyak 14.518 jiwa pada tahun 2010 dan sebanyak 15.624 jiwa pada tahun 2017.

Selanjutnya diketahui bahwa provinsi yang memiliki kepadatan penduduk terendah pada periode 2010 adalah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai kepadatan 8 jiwa dan 9 jiwa. Pada tahun 2017 adalah Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Papua Barat masing-masing sebesar 9 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 1 Km² daerah provinsi di atas ditempati oleh penduduk sebanyak 8-9 orang.

Adapun persentase penduduk dan kepadatan penduduk Indonesia menurut Provinsi tahun 2010-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 12 : Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk

No	Provinsi	Persentase Penduduk (%)		Kepadatan Penduduk per Km ² (jiwa)	
		2010	2017	2010	2017
1	Aceh	1,90	1,98	78	90
2	Sumatera Utara	5,46	5,45	179	195
3	Sumatera Barat	2,04	2,03	116	127
4	Riau	2,34	2,54	64	77
5	Jambi	1,30	1,34	62	70
6	Sumatera Selatan	3,14	3,16	82	90
7	Bengkulu	0,72	0,74	86	97
8	Lampung	3,20	3,17	220	239
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,52	0,55	75	87
10	Kepulauan Riau	0,71	0,80	206	254
11	DKI Jakarta	4,04	3,96	14 518	15 624
12	Jawa Barat	18,12	18,34	1 222	1 358
12	Jawa Tengah	13,60	13,08	989	1 044
14	DI Yogyakarta	1,45	1,44	1 107	1 201
15	Jawa Timur	15,75	15,00	786	822
16	Banten	4,48	4,75	1 106	1 288
17	Bali	1,64	1,62	676	735
18	Nusa Tenggara Barat	1,89	1,89	243	267
19	Nusa Tenggara Timur	1,97	2,02	97	109
20	Kalimantan Barat	1,85	1,88	30	33
21	Kalimantan Tengah	0,93	0,99	14	17
22	Kalimantan Selatan	1,53	1,57	94	106
23	Kalimantan Timur	1,50	1,37	17	28
24	Kalimantan Utara	-	0,26	-	9
25	Sulawesi Utara	0,95	0,94	164	178
26	Sulawesi Tengah	1,11	1,13	43	48
27	Sulawesi Selatan	3,38	3,32	173	186
28	Sulawesi Tenggara	0,94	0,99	59	68
29	Gorontalo	0,44	0,45	93	104
30	Sulawesi Barat	0,49	0,51	69	79
31	Maluku	0,65	0,67	35	37
32	Maluku Utara	0,44	0,46	33	38
33	Papua Barat	0,32	0,35	8	9
34	Papua	1,20	1,25	9	10
Indonesia		100	100	124	137

Sumber : BPS, 2019

3. Proyeksi Penduduk Indonesia

Proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP2010. Adapun proyeksi penduduk Indonesia menurut Provinsi tahun 2020–2035 adalah sebagai berikut :

Tabel 13 : Proyeksi Penduduk Menurut Provinsi, 2020-2035 (Ribuan Jiwa)

No	Provinsi	Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa)			
		2020	2025	2030	2035
1	Aceh	5,459.90	5,870.00	6,227.60	6,541.40
2	Sumatera Utara	14,703.50	15,311.20	15,763.70	16,073.40
3	Sumatera Barat	5,498.80	5,757.80	5,968.30	6,130.40
4	Riau	7,128.30	7,828.50	8,643.30	9,363.00
5	Jambi	3,677.90	3,926.60	4,142.30	4,322.90
6	Sumatera Selatan	8,567.90	9,000.40	9,345.20	9,610.70
7	Bengkulu	2,019.80	2,150.50	2,264.30	2,360.60
8	Lampung	8,521.20	8,824.60	9,026.20	9,136.10
9	Kepulauan Bangka Belitung	1,517.60	1,657.50	1,788.90	1,911.00
10	Kepulauan Riau	2,242.20	2,501.50	2,768.50	3,050.50
	Pulau Sumatera	59,337.10	62,898.60	65,938.30	68,500.00
11	DKI Jakarta	10,645.00	11,034.00	11,310.00	11,459.60
12	Jawa Barat	49,935.70	52,785.70	55,193.80	57,137.30
13	Banten	13,160.50	14,249.00	15,201.80	16,033.10
14	Jawa Tengah	34,940.10	35,958.60	36,751.70	37,219.40
15	DI Yogyakarta	3,882.30	4,064.60	4,220.20	4,348.50
16	Jawa Timur	39,886.30	40,646.10	41,077.30	41,127.70
	Pulau Jawa	152,449.90	158,738.00	163,754.80	167,325.60
17	Bali	4,380.80	4,586.00	4,765.40	4,912.40
18	Nusa Tenggara Barat	5,125.60	5,375.60	5,583.80	5,754.20
19	Nusa Tenggara Timur	5,541.40	5,970.80	6,402.20	6,829.10
	Bali dan Kep. Nusa Tenggara	15,047.80	15,932.40	16,751.40	17,495.70
20	Kalimantan Barat	5,134.80	5,432.60	5,679.20	5,878.10
21	Kalimantan Tengah	2,769.20	3,031.00	3,273.60	3,494.50
22	Kalimantan Selatan	4,304.00	4,578.30	4,814.20	5,016.30
23	Kalimantan Timur	4,561.70	5,040.70	5,497.00	5,929.20
	Pulau Kalimantan	16,769.70	18,082.60	19,264.00	20,318.10
24	Sulawesi Utara	2,528.80	2,624.30	2,696.10	2,743.70
25	Sulawesi Tengah	3,097.00	3,299.50	3,480.60	3,640.80
26	Sulawesi Selatan	8,928.00	9,265.50	9,521.70	9,696.00
27	Sulawesi Tenggara	2,755.60	3,003.00	3,237.70	3,458.10
28	Gorontalo	1,219.60	1,299.70	1,370.20	1,430.10
29	Sulawesi Barat	1,405.00	1,527.80	1,647.20	1,763.30
	Pulau Sulawesi	19,934.00	21,019.80	21,953.50	22,732.00
30	Maluku	1,831.90	1,972.70	2,104.20	2,227.80
31	Maluku Utara	1,278.80	1,391.00	1,499.40	1,603.60
	Kep. Maluku	3,110.70	3,363.70	3,603.60	3,831.40
32	Papua Barat	981.80	1,092.20	1,200.10	1,305.00
33	Papua	3,435.40	3,701.70	3,939.40	4,144.60
	Pulau Papua	4,417.20	4,793.90	5,139.50	5,449.60
	INDONESIA	271,066.40	284,829.00	296,405.10	305,652.40

Sumber : BPS, 2019

Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia maka diperkirakan pada tahun 2035 penduduk Indonesia mencapai 305, 65 juta jiwa. Hal tentunya perlu diwasapai dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi tentunya akan memperketat persaingan antar angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan yang jumlah pertumbuhanya terbatas.

C. Kondisi Pendidikan di Indonesia

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Kondisi pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari angka partisipasi, salah satunya adalah angka partisipasi kasar. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut (BPS, 2019). Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia diketahui bahwa angka partisipasi kasar 1 tertinggi pada tahun 2018 berada pada Provinsi Kalimantan Barat dengan APK 1 sebesar 115,05%. Data ini menunjukkan bahwa 115,05 persen proporsi anak sekolah pada SD/MI/Paket A dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Artinya jumlah anak yang sedang menempuh pendidikan pada tingkat SD/MI/Paket A melebihi dari jumlah penduduk usia SD/MI/Paket A di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan angka partisipasi kasar 1 terendah pada tahun 2018 berada pada Provinsi Papua dengan APK 1 sebesar 92,94%. Data ini menunjukkan bahwa 92,94% proporsi anak sekolah pada SD/MI/Paket A dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Artinya jumlah anak yang sedang menempuh pendidikan pada tingkat SD/MI/Paket A kurang dari jumlah penduduk usia SD/MI/Paket A di Provinsi Papua.

Angka Partisipasi Kasar 2 tertinggi pada tahun 2018 berada pada Provinsi Aceh dengan APK 2 sebesar 92,94%, data ini menunjukkan bahwa 93,94% proporsi anak sekolah pada SMP/Mts/Paket B dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Artinya jumlah anak yang sedang menempuh pendidikan pada tingkat SMP/Mts/Paket B kurang dari jumlah penduduk usia SMP/Mts/Paket B di Provinsi Aceh. Sedangkan angka partisipasi kasar 2 terendah pada tahun 2018 berada pada Provinsi Kalimantan Barat dengan APK 2 sebesar 81,20%. Data ini

menunjukkan bahwa 81,20% proporsi anak sekolah pada SMP/Mts/Paket B dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Artinya jumlah anak yang sedang menempuh pendidikan pada tingkat SMP/Mts/Paket B kurang dari jumlah penduduk usia SMP/Mts/Paket B di Provinsi Papua.

Tabel 14 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi 2014-2017

No	Provinsi APK	APK 2014			APK 2015			APK 2016			APK 2017		
		APK1	APK2	APK3									
1	Aceh	111.66	95.87	81.58	115.36	97.88	85.23	111.26	99.15	87.47	110.31	98.74	87.52
2	Sumatera Utara	109.54	90.29	82.96	112.02	95.41	84.14	110.89	90.74	83.25	109.50	90.74	93.64
3	Sumatera Barat	108.89	88.05	80.46	113.25	90.94	81.42	110.59	91.05	83.78	110.70	90.40	88.39
4	Riau	109.42	90.79	76.22	110.40	94.17	76.16	110.04	93.84	78.30	108.10	92.40	85.05
5	Jambi	109.73	87.83	73.63	111.99	91.78	76.12	112.97	96.75	80.36	112.40	86.37	83.54
6	Sumatera Selatan	112.01	88.43	72.51	114.47	93.56	73.18	114.33	88.54	82.51	112.14	89.09	83.44
7	Bengkulu	113.95	88.23	79.49	116.16	88.79	82.79	113.13	90.38	83.56	112.71	90.52	87.10
8	Lampung	112.74	86.76	68.49	113.38	100.83	73.90	111.44	93.58	82.98	109.77	91.04	85.16
9	Kep. Bangka Belitung	113.22	82.52	75.51	111.07	87.60	76.41	111.75	84.38	79.10	110.38	84.53	82.88
10	Kepulauan Riau	108.99	91.06	81.36	108.27	92.38	93.20	108.86	90.40	89.47	106.82	90.45	95.79
11	DKI Jakarta	104.18	90.86	74.71	105.26	88.35	76.35	104.32	90.89	73.09	103.27	93.88	79.51
12	Jawa Barat	106.98	87.50	68.55	109.42	90.07	70.23	108.09	89.58	70.56	107.44	88.80	76.48
13	Jawa Tengah	110.18	89.40	73.55	110.36	91.40	82.15	109.46	89.96	86.27	108.44	91.09	84.35
14	DI Yogyakarta	109.11	90.66	94.62	106.69	97.88	82.64	106.75	93.15	91.87	106.29	94.77	93.38
15	Jawa Timur	106.88	91.98	72.24	108.64	91.13	80.02	108.17	92.54	81.23	106.79	92.22	81.43
16	Banten	109.89	89.55	72.94	112.07	92.27	69.76	109.05	92.17	71.65	109.46	91.14	75.89
17	Bali	105.59	95.99	85.27	105.00	96.82	86.61	104.97	96.19	86.41	104.25	96.29	90.04
18	Nusa T. Barat	109.08	92.44	76.68	111.54	91.94	89.51	110.78	93.40	91.25	109.63	94.97	93.89
19	Nusa T. Timur	114.68	88.66	71.86	116.46	88.96	75.54	114.12	89.56	79.34	114.05	91.35	78.83
20	Kalimantan Barat	113.75	80.15	65.72	114.82	82.30	81.88	113.75	79.79	87.00	115.05	81.20	82.48
21	Kalimantan Tengah	112.01	84.89	67.74	114.76	95.94	70.70	114.01	86.30	78.44	112.48	87.30	80.38
22	Kalimantan Selatan	110.52	82.45	71.36	111.14	82.81	73.88	111.63	85.78	76.88	110.10	85.70	77.44
23	Kalimantan Timur	110.32	92.04	85.97	112.61	97.90	90.31	110.04	95.28	95.38	108.07	91.46	99.51
24	Kalimantan Utara	-	-	-	101.66	100.48	83.77	103.96	96.60	89.85	103.86	98.12	87.68
25	Sulawesi Utara	108.86	87.70	83.48	111.23	91.06	86.30	110.26	89.50	86.32	108.74	88.52	91.73
26	Sulawesi Tengah	104.71	88.53	83.35	107.28	90.73	82.87	105.78	89.48	83.45	104.19	91.86	84.85
27	Sulawesi Selatan	109.06	82.77	78.51	111.33	85.56	78.03	109.71	83.38	83.66	109.63	83.97	83.14
28	Sulawesi Tenggara	112.40	85.97	82.22	111.56	87.39	81.39	109.96	86.70	81.81	112.10	88.06	80.01
29	Gorontalo	111.88	78.64	76.95	110.58	81.87	86.74	108.34	83.71	88.67	111.30	81.70	80.89
30	Sulawesi Barat	108.42	80.41	76.30	105.92	80.25	84.98	106.23	81.00	83.49	110.19	83.02	80.34
31	Maluku	111.35	90.50	86.04	112.99	88.92	95.13	110.30	90.61	92.12	112.07	94.99	89.71
32	Maluku Utara	110.75	86.06	84.23	115.41	93.90	84.61	113.70	89.13	83.67	113.14	87.05	91.56
33	Papua Barat	109.36	87.86	83.42	113.46	90.33	89.00	111.49	92.44	89.59	110.24	90.96	89.69
34	Papua	90.67	71.02	61.53	95.15	73.59	66.97	94.74	72.07	66.85	92.94	82.20	67.94
	Indonesia	108.87	88.63	74.26	110.50	91.17	78.02	109.31	90.12	80.82	108.50	90.23	82.84

Sumber : BPS Indonesia, 2019

Ctt : APK 1 = SD/MI/Paket A, APK 2 = SMP/Mts/Paket B, APK 3 = SMA/SMK/MA/Paket C

Angka Partisipasi Kasar 3 tertinggi pada tahun 2018 berada pada Provinsi Kalimantan Timur dengan APK 3 sebesar 99,51%. Data ini menunjukkan bahwa 99,51% jumlah anak sekolah pada SMA/SMK/MA/Paket C dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Artinya jumlah anak yang sedang

menempuh pendidikan pada tingkat SMA/SMK/MA/Paket C kurang dari jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA/Paket C di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan APK 3 terendah pada tahun 2018 berada pada Provinsi Papua dengan APK 3 sebesar 67,94%. Data ini menunjukkan bahwa hanya sebesar 67,94% anak yang sedang menempuh pendidikan pada tingkat SMA/SMK/MA/Paket C di Provinsi Papua.

2. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

Berdasarkan data angka partisipasi kasar perguruan tinggi diketahui bahwa pada tahun 2018 APK PT tertinggi berada pada Provinsi Yogyakarta dengan nilai sebesar 70,60%. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk provinsi DI Yogyakarta yang sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi adalah sebanyak 70,60% dari total penduduk sesuai usia pendidikan di perguruan tinggi. APK PT terendah adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 13,20%. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi adalah sebanyak 13,20% dari total penduduk sesuai usia pendidikan di perguruan tinggi.

Adapun data angka partisipasi kasar perguruan tinggi disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 15 : Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Berdasarkan Provinsi Tahun 2015-2018

No	Provinsi	APK PT Menurut Provinsi			
		2015	2016	2017	2018
1	Aceh	41.67	42.06	45.73	43.86
2	Sumatera Utara	25.89	28.93	30.71	31.11
3	Sumatera Barat	38.51	40.54	43.53	44.19
4	Riau	30.00	29.81	33.37	34.15
5	Jambi	26.33	26.98	32.27	33.78
6	Sumatera Selatan	18.60	21.64	23.77	26.23
7	Bengkulu	36.53	41.00	41.52	38.31
8	Lampung	12.46	16.05	18.84	21.32
9	Kep. Babel	11.13	14.48	15.01	13.20
10	Kep. Riau	21.14	22.11	23.08	27.64
11	DKI Jakarta	32.72	33.58	34.94	36.71
12	Jawa Barat	21.31	24.59	25.50	25.14
13	Jawa Tengah	19.28	19.69	21.88	21.96
14	DI Yogyakarta	64.83	65.51	70.10	70.60
15	Jawa Timur	22.14	28.13	30.23	29.99
16	Banten	23.60	29.02	31.40	33.40
17	Bali	32.06	31.61	35.81	36.40
18	Nusa Tenggara Barat	26.30	25.89	28.09	29.75
19	Nusa Tenggara Timur	24.51	26.92	29.21	30.14
20	Kalimantan Barat	19.24	20.98	23.04	22.68
21	Kalimantan Tengah	21.10	23.90	24.89	25.24
22	Kalimantan Selatan	24.56	23.24	26.08	26.41
23	Kalimantan Timur	28.44	31.60	35.58	35.64
24	Kalimantan Utara	18.25	24.35	26.76	21.58
25	Sulawesi Utara	27.68	31.32	31.74	35.00
26	Sulawesi Tengah	31.56	35.30	39.22	40.61
27	Sulawesi Selatan	40.44	40.75	43.00	41.23
28	Sulawesi Tenggara	42.31	45.35	46.98	46.42
29	Gorontalo	30.35	32.23	37.88	35.23
30	Sulawesi Barat	25.51	27.54	29.72	28.90
31	Maluku	44.46	46.38	47.39	48.42
32	Maluku Utara	33.72	40.87	45.01	42.68
33	Papua Barat	32.83	32.37	36.32	35.97
34	Papua	16.01	20.44	20.37	19.03
	Indonesia	25.26	27.98	29.93	30.19

Sumber : BPS, 2019

D. Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia

1. Pasar Tenaga Kerja Indonesia

Ketersediaan penduduk Indonesia yang produktif secara ekonomi terus menerus meningkat. Jumlah angkatan kerja Indonesia pada tahun 2017 adalah 128,06 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 2,09 persen. Tentu saja kondisi ini sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia karena adanya jumlah angkatan kerja yang cukup banyak. Akan tetapi, besarnya jumlah angkatan kerja ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah. Pemerintah harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan dengan seluas-luasnya. Dengan begitu, tenaga kerja dapat terserap secara optimal sehingga produktivitas perekonomian negara juga diharapkan akan semakin membaik. Berikut ini adalah data angkatan kerja menurut jenis kelamin periode 2016-2017 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 16 : Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2017

Tahun	Jenis Kelamin	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Total
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah		
2016 (Agustus)	L	72,943,627	4,411,543	77,355,170	17,016,982	94,372,152
	P	45,468,346	2,620,232	48,088,578	46,635,992	94,724,570
	L + P	118,411,973	7,031,775	125,443,748	63,652,974	189,096,722
2017 (Agustus)	L	74,736,546	4,375,251	79,111,797	16,770,866	95,882,663
	P	46,285,877	2,665,072	48,950,949	47,245,804	95,196,753
	L + P	121,022,423	7,040,323	128,062,746	64,016,670	192,079,416

Sumber : BPS, 2018 (diolah)

Angkatan kerja di Indonesia lebih didominasi oleh kaum laki-laki, yaitu sebanyak 77,355,170 orang (61,67 persen) pada tahun 2016 dan sebanyak 79,111,797 orang (61,78 persen) pada tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan semakin menurunnya partisipasi perempuan untuk terjun dalam kegiatan perekonomian. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan gender dalam pasar kerja di Indonesia karena Angkatan kerja masih didominasi oleh laki-laki.

Jumlah tenaga kerja yang terserap mengalami peningkatan namun jumlah peningkatannya tidak tajam. Pada tahun 2016, jumlah penduduk yang bekerja ada sebanyak 118,411,973 (62,62 persen dari penduduk 15 tahun keatas) orang dan meningkat menjadi 121,022,423 orang (63,01 persen) pada tahun 2017 (meningkat sebesar 2,09 persen). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perluasan

lapangan kerja yang tersedia. Meski demikian, jumlah pengangguran di Indonesia hanya sedikit mengalami penurunan dari 5,94 persen menjadi 7,04 juta 5,82 persen pada tahun 2017.

Kemudian, tenaga kerja Indonesia juga didominasi oleh kaum laki-laki. Pada tahun 2017, jumlah penduduk bekerja ada sebanyak 74.736.546 orang untuk laki-laki dan 46 285.877 orang untuk perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan yang bekerja cenderung stabil setiap tahunnya. Selama tahun 2016-2017 ada sekitar enam laki-laki dari sepuluh penduduk yang bekerja. Namun jumlah tenaga kerja baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun yang berjenis kelamin perempuan cenderung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Di sisi lain, untuk pengangguran yang berjenis kelamin laki-laki mengalami penurunan selama tahun 2016-2017. Pada tahun 2016, jumlah pengangguran berjenis kelamin laki-laki ada sebanyak 4.411.543 orang, menurun menjadi 4.375.251 orang pada tahun 2017. Berbeda halnya dengan pengangguran yang berjenis kelamin perempuan, selama tahun 2016-2017 jumlahnya meningkat. Pada tahun 2016 jumlah pengangguran berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 2.620.232 orang dan meningkat menjadi 2.665.072 orang pada tahun 2017.

Penduduk yang menganggur kerja tersebut menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan diketahui bahwa pada periode tahun 2016-2017, terlihat bahwa jumlah pengangguran tertinggi adalah tamatan SLTA umum/SMU dan paling sedikit adalah tidak/belum pernah sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak yang tamat SLTA umum/SMU menganggur setiap tahunnya. Dengan demikian diketahui bahwa jumlah pengangguran terdidik juga terbanyak adalah tamat SLTA umum/SMU dan paling sedikit adalah tamat Akademi/Diploma.

Adapun data pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan periode 2016-2017 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 17 : Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016-2017

No	Pendidikan Ditamatkan	2016				2017			
		Februari		Agustus		Februari		Agustus	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/belum pernah sekolah	94,293	1.34	59,346	0.84	92,331	1.32	62,984	0.89
2	Tidak/belum tamat SD	557,418	7.94	384,069	5.46	546,897	7.81	404,435	5.74
3	SD	1,218,954	17.35	1,035,731	14.73	1,292,234	18.45	904,561	12.85
4	SLTP	1,313,815	18.70	1,294,483	18.41	1,281,240	18.29	1,274,417	18.10
	Non PT	3,184,480	45.34	2,773,629	39.44	3,212,702	45.86	2,646,397	37.59
5	SLTA Umum/SMU	1,546,699	22.02	1,950,626	27.74	1,552,894	22.17	1,910,839	27.14
6	SLTA Kejuruan/SMK	1,348,327	19.20	1,520,549	21.62	1,383,022	19.74	1,621,402	23.03
7	Akademi/Diploma	249,362	3.55	219,736	3.12	249,705	3.56	242,937	3.45
8	Universitas	695,304	9.90	567,235	8.07	606,939	8.66	618,758	8.79
	PT	3,839,692	54.66	4,258,146	60.56	3,792,560	54.14	4,393,926	62.41
	Total	7,024,172	100	7,031,775	100	7,005,262	100	7,040,323	100

Sumber: BPS Indonesia, 2019 (diolah)

Data-data di atas adalah data ketenagakerjaan tingkat nasional dan kondisi ketenagakerjaan pada tingkat regional tentunya berbeda, seperti tingkat provinsi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) nasional pada tahun 2016 adalah 66,34 persen dengan TPAK tertinggi berada pada provinsi Bali sebesar 77,24 persen dan terendah berada pada provinsi Jawa Barat sebesar 60,65 persen.

2. Indikator Ketenagakerjaan Indonesia

Selama tahun 2014-2017, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Indonesia cenderung stabil, yaitu berada pada kisaran 66 persen. Pada Februari 2018, TPAK sedikit meningkat menjadi 69,20 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 10 penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas, 6 sampai 7 diantaranya termasuk ke dalam angkatan kerja. TPAK ini menunjukkan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang berpotensi aktif secara ekonomi untuk memproduksi barang atau jasa.

Tabel 18 : Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014–2018

Jenis Kelamin	2014 (Agustus)	2015 (Agustus)	2016 (Agustus)	2017 (Agustus)	2018 (Februari)
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)					
Laki-Laki	83,05	82,71	81,97	82,51	83,01
Perempuan	50,22	48,87	50,77	50,89	55,44
Total	66,60	65,76	66,34	66,67	69,20
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)					
Laki-Laki	5,75	6,07	5,70	5,53	5,29
Perempuan	6,26	6,37	5,43	5,47	4,89
Total	5,94	6,18	5,61	5,50	5,13
TKK (Tingkat Kesempatan Kerja)					
Laki-Laki	94,25	93,93	94,30	94,47	94,71
Perempuan	93,74	93,63	94,55	94,56	95,11
Total	94,06	93,82	94,39	94,50	94,87

Sumber : BPS, 2019

Hal yang cukup menarik dari TPAK ini adalah jika dilihat berdasarkan jenis kelamin TPAK laki-laki berbeda cukup jauh dengan TPAK perempuan. Pada tahun 2017, TPAK laki-laki mencapai 82,51 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya 50,89 persen. Tingginya partisipasi angkatan kerja bagi kaum laki-laki ini menandakan kaum laki-laki lebih cenderung untuk terjun dalam kegiatan perekonomian. Hal ini terdorong dengan tanggung jawab yang sebagian besar dipikul oleh kaum laki-laki sebagai sumber penghasilan keluarganya.

Sementara itu, rendahnya TPAK perempuan ini disebabkan perempuan lebih cenderung masuk ke bukan angkatan kerja. Banyaknya jumlah perempuan yang termasuk ke dalam bukan angkatan kerja ini erat kaitannya dengan urusan domestik. Persepsi peran domestik bagi kaum perempuan menjadi faktor perempuan terjebak sepenuhnya dalam kegiatan mengurus rumah tangga. Berdasarkan data Sakernas 2017, dari 10 perempuan berumur 15 tahun ke atas, 3 sampai 4 diantaranya menghabiskan waktu terbanyak untuk mengurus rumah tangga. Stigma tersebut harus mulai dihilangkan. Hal ini dikarenakan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian.

Meski partisipasi angkatan kerja perempuan cukup rendah, peluang kerja bagi perempuan cukup baik. Bahkan, kesempatan kerja bagi perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka TPT (Tingkat

Pengangguran Terbuka) perempuan yang lebih rendah dibandingkan TPT laki-laki. Pola tersebut mulai berubah sejak tahun 2016, dimana TPT perempuan sebesar 5,45 persen dan TPT laki-laki sebesar 5,70 persen. Pada tahun 2017, TPT perempuan sebesar 5,44 persen, sedangkan TPT laki-laki sebesar 5,53 persen. Bahkan, perbedaan TPT antar jenis kelamin semakin terlihat pada Februari 2018, yaitu 4,89 persen untuk perempuan dan 5,29 persen untuk laki-laki.

Fakta ini menandakan bahwa perjuangan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan tidak sia-sia. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong kaum perempuan untuk berperan aktif dalam perekonomian. Salah satu upaya pemerintah adalah mendorong pertumbuhan wirausaha di Indonesia, terutama wirausahawan perempuan (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2017). Hal ini dikarenakan sesungguhnya wirausaha dapat dilakukan oleh segala usia dan jenis kelamin. Terlebih lagi untuk kaum perempuan yang berwirausaha, perempuan dapat melakukan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pengusaha.

Berkurangnya diskriminasi perempuan di pasar tenaga kerja juga tidak terlepas dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dilakukan semua pihak. Segala pihak memiliki peran strategis dalam penegakan norma ketenagakerjaan terutama norma kerja perempuan. Banyak kebijakan yang ditujukan untuk perlindungan pekerja perempuan, seperti kebijakan-kebijakan yang diarahkan pada perlindungan fungsi reproduksi, kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kedudukan pekerja perempuan, dan perlindungan yang bersifat nondiskriminatif yang berarti kebijakan-kebijakan yang diarahkan pada kesetaraan hak dan kewajiban pekerja.

Secara keseluruhan, kesempatan kerja di Indonesia mengalami peningkatan, meski kesempatan tersebut sempat menurun pada tahun 2015. Pada tahun 2014, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Indonesia sebesar 94,06 persen, menurun menjadi 93,82 persen (2015), lalu meningkat menjadi 94,39 persen (2016), kemudian meningkat lagi menjadi 94,50 persen (2017), dan terus meningkat menjadi 94,87 persen (Februari 2018). Angka TKK tersebut menunjukkan bahwa dari 100 angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2017, 94 atau 95 diantaranya telah mampu terserap dalam pasar tenaga kerja.

Perkembangan kesempatan kerja bagi laki-laki dan perempuan tidak berbeda jauh dengan perkembangan secara agregat. Selama tahun 2014-2015, TKK cenderung meningkat bagi laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017, TKK laki-laki tercatat sebesar 94,47 persen, sementara TKK perempuan tercatat mencapai 94,56 persen.

Pertumbuhan lapangan kerja didorong oleh pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang tumbuh mencerminkan adanya aktivitas produksi yang meningkat. Sejatinya, kegiatan produksi dalam menghasilkan barang dan jasa akan membutuhkan faktor produksi utama yaitu tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti melalui pembangunan infrastruktur, percepatan izin investasi, pembenahan pendidikan vokasi, dan pengalokasian dana desa (presidenri.go.id).

Selain dianalisis berdasarkan jenis kelamin, ketenagakerjaan juga dapat dilihat berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, yang terdiri dari perkotaan dan perdesaan. Perbedaan karakteristik wilayah dan lingkungan dapat berdampak pada kondisi ketenagakerjaan. Pengklasifikasian perkotaan perdesaan dilakukan berdasarkan kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas.

Dalam lima tahun terakhir, partisipasi angkatan kerja di perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan partisipasi angkatan kerja di perkotaan. Pada tahun 2017, TPAK di perdesaan mencapai 68,92 persen, sedangkan TPAK di perkotaan sebesar 64,83 persen. Meski demikian, perkembangan partisipasi angkatan kerja selama tahun 2014-2017 di kedua daerah tersebut cenderung stabil. Dari 10 penduduk berumur 15 tahun ke atas, baik di perkotaan maupun perdesaan, 6-7 diantaranya merupakan angkatan kerja. Meski demikian, peningkatan TPAK cukup signifikan terjadi pada Februari 2018, yaitu 66,84 persen pada perkotaan dan 72,17 persen pada perdesaan.

Tingginya partisipasi angkatan kerja di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan menandakan bahwa potensi perekonomian di perdesaan cukup besar. Potensi perekonomian tersebut didukung dengan adanya pasokan tenaga kerja yang tinggi. Meski demikian, potensi angkatan kerja tersebut harus dioptimalkan dengan

baik. Angkatan kerja di perdesaan harus terampil dan berpendidikan agar mampu memiliki produktivitas yang tinggi. Hal ini jugalah yang membuat pemerintah fokus dalam pembangunan desa. Kebijakan tersebut tercantum dalam program Jokowi- JK, yaitu Nawacita yang berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Tabel 19 : Indikator Ketenagakerjaan Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2014–2018

Daerah Tempat Tinggal	2014 (Agustus)	2015 (Agustus)	2016 (Agustus)	2017 (Agustus)	2018 (Februari)
TPAK					
Perkotaan	64,47	63,88	63,94	64,83	66,84
Perdesaan	68,80	67,95	69,21	68,92	72,17
Jumlah	66,60	65,76	66,34	66,67	69,20
TPT					
Perkotaan	7,12	7,31	6,60	6,79	6,34
Perdesaan	4,81	4,93	4,51	4,01	3,72
Jumlah	5,94	6,18	5,61	5,50	5,13
TKK					
Perkotaan	92,88	92,69	93,40	93,21	93,66
Perdesaan	95,19	95,07	95,49	95,99	96,28
Jumlah	94,06	93,82	94,39	94,50	94,87

Sumber: BPS, 2019

Menariknya, tingginya partisipasi angkatan kerja di perdesaan ini dapat diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini terlihat dari TPT perdesaan yang lebih rendah dibandingkan dengan TPT perkotaan. Bahkan TPT di perdesaan cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari 4,93 persen (2015) menjadi 4,51 persen (2016), lalu menurun kembali menjadi 4,01 persen (2017), dan terus menurun menjadi 3,72 persen (Februari 2018).

Tumbuhnya kesempatan kerja di perdesaan tidak terlepas dari peran pemerintah dalam membangun perdesaan. Pemerintah RI terus berupaya untuk membangun infrastruktur perdesaan dan lebih berfokus dalam penyerapan tenaga kerja di desa. Kebijakan alokasi dana desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan lapangan kerja. Dana desa tersebut akan digunakan untuk proyek-proyek padat karya di desa. Dengan demikian, lapangan kerja baru akan tercipta dan angka pengangguran di perdesaan dapat terus ditekan.

Di sisi lain, TPT di daerah perkotaan mengalami peningkatan selama tahun 2016-2017. Pada tahun 2016, TPT perkotaan sebesar 6,60 persen dan meningkat menjadi 6,79 persen pada tahun 2017. Tingginya tingkat pengangguran di perkotaan disebabkan adanya perpindahan penduduk ke perkotaan. Sementara itu, pemerintah belum sanggup menghadapi dan memenuhi kebutuhan para migran, seperti kebutuhan lapangan pekerjaan. Akan tetapi, angka pengangguran di perkotaan mampu sedikit ditekan pada Februari 2018, dimana TPT perkotaan tercatat sebesar 6,34 persen.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap fenomena perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan. Terlebih lagi, penduduk perkotaan diprediksi akan terus meningkat. Berdasarkan Data Proyeksi Penduduk BPS, persentase perkotaan meningkat dari 49,8 persen (2010) menjadi 56,7 persen (2020). Fenomena tersebut bukanlah terjadi tanpa alasan. Kondisi perdesaan yang cenderung tertinggal dan memiliki fasilitas yang kurang, mendorong masyarakatnya mencari tempat untuk kehidupan yang lebih baik. Pembangunan perdesaan adalah jalan keluar utama untuk menyelesaikan masalah ini. Pembangunan tersebut akan memberi keuntungan baik bagi perdesaan itu sendiri maupun perkotaan.

Kemampuan penyerapan tenaga kerja ini juga dapat ditunjukkan melalui indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Pada tahun 2017, TKK di Indonesia sudah berada di atas 90 persen, atau lebih detailnya sebesar 93,21 persen untuk perkotaan dan 95,99 persen untuk perdesaan. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 100 angkatan kerja yang ada, terdapat 93 orang perkotaan atau 95-96 orang perdesaan yang telah bekerja.

3. Variasi Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia

Kondisi ketenagakerjaan juga berbeda di setiap regional, seperti provinsi. Pada tahun 2017, terdapat 21 provinsi dengan nilai TPAK di atas TPAK nasional. TPAK di 34 provinsi berada pada kisaran 60-77 persen. Provinsi dengan TPAK tertinggi selalu berada di Papua kecuali pada tahun 2016. TPAK Papua sempat mengalami penurunan menjadi 76,70 persen sehingga TPAK tertinggi berada di Provinsi Bali.

Tabel 20 : Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi, Tahun 2014–2018

Provinsi	TPAK					TKK					TPT				
	2014 (Agt)	2015 (Agt)	2016 (Agt)	2017 (Agt)	2018 (Feb)	2014 (Agt)	2015 (Agt)	2016 (Agt)	2017 (Agt)	2018 (Feb)	2014 (Agt)	2015 (Agt)	2016 (Agt)	2017 (Agt)	2018 (Feb)
Aceh	63,06	63,44	64,26	63,74	64,98	90,98	90,07	92,43	93,43	93,45	9,02	9,93	7,57	6,57	6,55
Sumatera Utara	67,07	67,28	65,99	68,88	73,36	93,77	93,29	94,16	94,40	94,41	6,23	6,71	5,84	5,60	5,59
Sumatera Barat	65,19	64,56	67,08	66,29	72,80	93,50	93,11	94,91	94,42	94,45	6,50	6,89	5,09	5,58	5,55
Riau	63,31	63,22	66,25	64,00	70,07	93,44	92,17	92,57	93,78	94,28	6,56	7,83	7,43	6,22	5,72
Jambi	65,58	66,14	67,54	67,52	71,26	94,92	95,66	96,00	96,13	96,35	5,08	4,34	4,00	3,87	3,65
Sumatera Selatan	68,85	68,53	71,59	69,50	73,04	95,04	93,93	95,69	95,61	95,98	4,96	6,07	4,31	4,39	4,02
Bengkulu	68,28	70,67	72,69	69,30	73,12	96,53	95,09	96,70	96,26	97,30	3,47	4,91	3,30	3,74	2,70
Lampung	66,98	65,60	69,61	67,83	72,84	95,21	94,86	95,38	95,67	95,67	4,79	5,14	4,62	4,33	4,33
Kep.Bangka Belitung	65,45	66,71	68,95	66,72	71,34	94,86	93,71	97,40	96,22	96,80	5,14	6,29	2,60	3,78	3,61
Kepulauan Riau	65,24	65,07	68,93	66,41	71,85	91,31	96,80	92,31	92,84	98,57	6,68	6,88	7,69	7,16	6,43
DKI Jakarta	66,51	66,39	66,91	61,97	69,27	81,53	92,55	92,88	92,86	94,66	8,47	7,23	6,12	7,14	5,34
Jawa Barat	62,76	60,34	68,05	63,34	63,82	91,55	91,28	91,11	91,78	91,84	8,45	8,72	8,89	8,22	8,16
Jawa Tengah	69,68	67,86	67,15	69,11	69,58	94,32	95,01	95,37	95,43	95,77	5,68	4,99	4,63	4,57	4,23
D.I. Yogyakarta	71,05	68,38	71,96	71,52	72,21	96,67	95,93	97,28	96,98	96,94	3,33	4,07	2,72	3,02	3,06
Jawa Timur	68,12	67,84	66,14	68,78	68,71	95,81	95,53	95,79	96,00	96,15	4,19	4,47	4,21	4,00	3,85
Banten	63,83	62,24	63,66	62,32	67,06	90,93	90,45	91,08	90,72	92,23	9,07	9,55	8,92	9,28	7,77
Bali	74,90	75,51	77,24	75,24	79,83	98,10	98,01	98,11	98,52	99,14	1,90	1,99	1,89	1,48	0,86
Nusa Tenggara Barat	66,52	66,54	71,57	68,49	69,83	94,25	94,31	96,06	96,68	96,62	5,75	5,69	3,94	3,32	3,38
Nusa Tenggara Timur	68,91	69,25	69,18	69,09	73,00	96,74	96,17	96,75	96,73	97,02	3,26	3,88	3,25	3,27	2,98
Kalimantan Barat	69,92	69,68	69,32	68,63	72,35	95,96	94,85	95,77	95,64	95,85	4,04	5,15	4,23	4,36	4,15
Kalimantan Tengah	68,55	71,11	71,30	67,74	72,97	96,76	95,46	95,18	95,77	96,82	3,24	4,54	4,82	4,23	3,18
Kalimantan Selatan	69,46	69,73	71,57	70,06	73,41	96,20	95,08	94,55	95,23	96,14	3,80	4,92	5,45	4,77	3,86
Kalimantan Timur	64,10	62,39	67,79	63,75	68,87	92,62	92,50	92,05	93,09	93,10	7,38	7,50	7,95	6,91	6,90
Kalimantan Utara	-	63,45	62,40	68,24	70,06	-	94,32	94,77	94,46	95,32	-	5,68	5,23	5,54	4,68
Sulawesi Utara	69,99	61,28	65,11	60,85	67,63	92,46	90,97	93,82	92,82	93,91	7,54	9,08	6,18	7,18	6,09
Sulawesi Tengah	66,76	67,51	72,28	67,14	73,28	96,32	95,90	96,71	96,19	96,81	3,68	4,10	3,29	3,81	3,19
Sulawesi Selatan	62,03	60,94	62,92	60,98	66,36	94,92	94,05	95,20	94,39	94,61	5,08	5,95	4,80	5,61	5,39
Sulawesi Tenggara	66,87	68,35	73,47	68,70	72,73	95,57	94,45	97,28	96,70	97,21	4,43	5,55	2,72	3,30	2,79
Gorontalo	61,83	63,65	67,89	64,78	72,90	95,82	95,35	97,24	95,72	96,38	4,18	4,66	2,76	4,28	3,62
Sulawesi Barat	71,05	70,27	71,90	66,96	71,53	97,92	96,65	96,67	96,79	97,55	2,08	3,36	3,33	3,21	2,45
Maluku	60,91	64,47	64,51	60,18	65,02	89,49	90,07	92,95	90,71	92,62	10,51	9,93	7,05	9,29	7,38
Maluku Utara	63,87	66,43	66,19	63,65	71,49	94,71	93,95	95,99	94,67	95,35	5,29	6,05	4,01	5,33	4,65
Papua Barat	68,29	68,68	70,05	67,47	70,99	94,98	91,92	92,54	93,51	94,33	5,02	8,08	7,46	6,49	5,67
Papua	78,66	79,57	76,70	76,94	79,38	96,56	96,01	96,65	96,38	97,09	3,44	3,99	3,35	3,62	2,91
Indonesia	66,60	65,76	66,34	66,67	69,20	94,06	93,82	94,39	94,50	94,87	5,94	6,18	5,61	5,50	5,13

Sumber : BPS, 2019

Keterangan

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TKK

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2017, provinsi dengan TPAK tertinggi kembali diduduki oleh Provinsi Papua, yaitu 76,94 persen. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Papua memiliki sumber daya manusia yang cukup. Langkah yang tepat dalam merespon kondisi tersebut akan meningkatkan perekonomian Papua. Sayangnya, tingginya pertumbuhan angkatan kerja di Papua belum diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai. Meski tingkat pengangguran Papua lebih rendah

dibandingkan angka nasional, angka tersebut mengalami peningkatan dari 3,35 persen (2016) menjadi 3,62 persen (2017). Kondisi ini disebabkan karena kurangnya daya saing para lulusan atau angkatan kerja di Papua. Tenaga kerja lokal kurang memiliki daya saing dibandingkan dengan tenaga kerja lokal dan kurangnya daya tahan tenaga lokal untuk bekerja.

Daya serap pasar tenaga kerja harus mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada. Selain itu keterampilan angkatan kerja juga harus berkompeten dan memiliki daya saing. Dengan begitu, angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar. Oleh karena itu, semua pemangku kebijakan, seperti pemerintah, perusahaan, masyarakat, dsb bertanggung jawab terhadap peningkatan keterampilan tenaga kerja. Untuk menghadapi masalah ketenagakerjaan, para pemangku kebijakan perlu melakukan pelatihan dan menciptakan lapangan kerja baru.

Sama halnya dengan TPAK tertinggi, TPAK terendah juga mengalami pergeseran. Selama tahun 2015-2016, TPAK terendah berada di Jawa Barat, tetapi pada tahun 2017 TPAK terendah bergeser ke Provinsi Maluku. Bahkan, TPAK di Maluku juga mengalami penurunan, yaitu dari 64,51 persen (2016) menjadi 60,18 persen (2017). Hal ini menggambarkan turunnya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia di Provinsi Maluku.

Tidak hanya itu, TPT di Maluku hampir mencapai 2 digit di tahun 2017, yaitu 9,29 persen. Provinsi dengan TKK terendah juga diduduki oleh Maluku selama tahun 2014-2017. Bahkan, TKK di Maluku mengalami penurunan dari 92,95 persen (2016) menjadi 90,71 persen (2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Maluku belum mampu menyerap tenaga kerja yang ada.

Tingginya pengangguran di Maluku ini diindikasikan karena terganggunya sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat Maluku. Kebijakan pengelolaan sumber daya laut di Maluku melalui moratorium penggunaan cantrang berdampak pada perekonomian di Maluku. Tenaga kerja banyak yang dirumahkan dari perusahaan perikanan dikarenakan kapal-kapal tidak diizinkan untuk beroperasi di perairan Maluku menyebabkan terjadinya pengangguran. Padahal,

keberadaan kapal-kapal tersebut dapat memberi keuntungan bagi masyarakat di Maluku (regional.kompas.com).

Di sisi lain, kesempatan kerja terbesar terus diduduki oleh Provinsi Bali selama tahun 2014-2017. Bahkan TKK di Bali cenderung meningkat dari 98,10 persen (2014) menjadi 98,52 persen (2017). Dengan kata lain, TPT di Provinsi Bali hanya sebesar 1,48 persen pada tahun 2017. Tingginya kesempatan kerja di Bali karena Bali merupakan provinsi dengan destinasi wisata yang cukup tinggi di Indonesia. Sektor pariwisata yang berkembang di Bali mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak dan luas sehingga angkatan kerja mampu terserap.

4. Karakteristik Penduduk Bekerja di Indonesia

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi (BPS, 2019).

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu:

- a. Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. Buruh/Karyawan/Pegawai, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa

uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

- e. Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
- f. Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.
- g. Pekerja bebas di nonpertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa masyarakat sosial dan perorangan. Huruf e dan f yang dikembangkan mulai pada publikasi 2001, pada tahun 2000 dan sebelumnya dikategorikan pada huruf d dan a (huruf e termasuk dalam d dan huruf f termasuk dalam a).
- h. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

Berdasarkan data terlihat bahwa pada umumnya penduduk yang berusaha 15 tahun ke atas di Indonesia memiliki pekerjaan berupa buruh/karyawan/pegawai dan yang paling sedikit adalah berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Artinya angkatan kerja di Indonesia banyak yang bekerja pada orang lain atau instansi kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

Data di atas juga menunjukkan bahwa penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar jumlahnya paling kecil diantara 7 status pekerjaan utama penduduk Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa jiwa wirausaha penduduk Indonesia masih relative kecil karena lebih banyak yang berprofesi sebagai pekerja dibandingkan dengan pengusaha.

Berikut ini adalah data penduduk yang berumur 15 tahun keatas menurut status pekerjaan utama pada tahun 2016-2017.

Tabel 21 : Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama Periode Februari dan Agustus 2016 dan 2017

No	Status Pekerjaan Utama	2016		2017	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	Berusaha Sendiri	20,392,400	20,015,291	21,849,573	23,147,482
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	20,997,852	19,450,879	21,275,899	18,924,632
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	4,023,653	4,380,002	4,446,024	4,954,629
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	46,301,470	45,827,785	47,420,653	48,047,068
5	Pekerja Bebas di Pertanian	5,240,458	5,499,898	5,360,306	5,848,256
6	Pekerja Bebas di Non Pertanian	7,002,288	6,965,506	6,021,760	7,158,103
7	Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	6,689,576	16,272,612	18,164,654	14,842,253
Total		120,647,697	118,411,973	124,538,849	121,022,423

Sumber : BPS, 2019

Berikut ini adalah data penduduk yang berumur 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan utama pada tahun 2016 - 2017.

Tabel 22 : Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2016 - 2017

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2016		2017	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	38,296,298	37,773,525	39,683,855	35,924,541
B	Pertambangan dan Penggalian	1,305,627	1,469,846	1,357,863	1,386,900
C	Industri Pengolahan	16,467,505	15,874,689	17,084,305	17,558,632
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	282,542	259,638	300,324	302,385
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	345,471	241,758	362,241	414,627
F	Konstruksi	7,707,297	7,078,567	7,162,968	8,136,636
G	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	24,148,820	21,554,455	23,249,255	22,477,345
H	Transportasi dan Pergudangan	4,714,717	4,970,722	4,936,175	5,064,247
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5,633,520	6,251,527	7,082,086	6,904,745
J	Informasi dan Komunikasi	640,914	683,504	848,882	819,210
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,726,355	1,730,759	1,792,228	1,724,544
L	Real Estat	314,449	355,746	333,252	305,066
M	Jasa Perusahaan	1,354,488	1,437,413	1,446,841	1,663,893
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,392,825	4,986,503	5,024,461	4,581,690
P	Jasa Pendidikan	5,737,573	6,085,285	6,390,920	5,978,228
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,643,879	1,753,332	1,843,871	1,781,975
R	Jasa Lainnya	5,935,417	5,005,101	5,639,871	5,997,759
Total		120,647,697	118,411,973	124,538,849	121,022,423

Sumber : BPS Indonesia, 2019

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa lapangan pekerjaan utama penduduk Indonesia adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sektor perekonomian yang paling banyak menyerap tenaga kerja setiap tahun dan tentunya memberikan kontribusi yang cukup dalam mendukung ekonomi penduduk Indonesia. Selanjutnya urutan kedua lapangan pekerjaan utama yang paling banyak adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ini cukup banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia.

Lapangan pekerjaan utama paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin. Hal ini menunjukkan bahwa pada sektor ini jumlah tenaga kerja yang diserap setiap tahunnya relative masih kecil. Selanjutnya lapangan pekerjaan utama yang sedikit menyerap tenaga kerja adalah real estat. Hal ini menunjukkan bahwa real estat di Indonesia tidak banyak menyerap tenaga kerja karena ruang lingkup usaha ini sifatnya masih terbatas di

Indonesia karena ruang garapannya yang juga terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sektor jasa bukanlah lapangan pekerjaan utama bagi penduduk Indonesia.

E. Kondisi Pengangguran di Indonesia

Salah satu masalah dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja menyerap angkatan kerja yang tersedia, antara lain seperti jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja dan kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi pencari kerja. Selain itu pengangguran juga dapat disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena perusahaan menutup/mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dan lain-lain.

Selain masalah pengangguran, Indonesia juga dihadapkan oleh masalah setengah penganggur yaitu penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu. Sebagian dari mereka adalah yang terpaksa bekerja walaupun jabatannya lebih rendah dari tingkat pendidikannya, upah rendah yang mengakibatkan produktifitas mereka pun menjadi rendah.

1. Kondisi Pengangguran Terbuka di Indonesia

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Penganggur terbuka, terdiri dari: 1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; 2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; 3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; 4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Berikut ini adalah data TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) menurut provinsi periode 2013-2018.

Tabel 23 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 2013-2018

No	Provinsi	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Febr	Agust										
1	Aceh	8.34	10.12	6.75	9.02	7.73	9.93	8.13	7.57	7.39	6.57	6.55	6.36
2	Sumatera Utara	6.09	6.45	5.95	6.23	6.39	6.71	6.49	5.84	6.41	5.60	5.59	5.56
3	Sumatera Barat	6.39	7.02	6.32	6.50	5.99	6.89	5.81	5.09	5.80	5.58	5.55	5.55
4	Riau	4.19	5.48	4.99	6.56	6.72	7.83	5.94	7.43	5.76	6.22	5.72	6.20
5	Jambi	2.89	4.76	2.50	5.08	2.73	4.34	4.66	4.00	3.67	3.87	3.65	3.86
6	Sumatera Selatan	5.41	4.84	3.84	4.96	5.03	6.07	3.94	4.31	3.80	4.39	4.02	4.23
7	Bengkulu	2.10	1.62	1.62	3.47	3.21	4.92	3.84	3.30	2.81	3.74	2.70	3.51
8	Lampung	5.07	5.69	5.08	4.79	5.44	5.14	4.54	4.42	4.43	4.33	4.33	4.06
9	Kepulauan Bangka Belitung	3.22	3.65	2.67	5.14	3.35	6.29	4.17	2.80	4.46	2.78	3.61	3.65
10	Kepulauan Riau	6.05	5.85	5.26	6.69	9.05	6.26	9.03	7.89	6.44	7.16	6.43	7.12
11	DKI Jakarta	9.64	8.63	9.84	8.47	8.36	7.23	5.77	6.12	5.36	7.14	5.34	6.24
12	Jawa Barat	8.88	9.16	8.66	8.45	8.40	8.72	8.57	8.89	8.49	8.22	8.16	8.17
13	Jawa Tengah	5.53	6.01	5.45	5.68	5.31	4.99	4.20	4.63	4.15	4.57	4.23	4.51
14	DI Yogyakarta	3.75	3.24	2.16	3.33	4.07	4.07	2.81	2.72	2.84	3.02	3.06	3.35
15	Jawa Timur	3.97	4.30	4.02	4.19	4.31	4.47	4.14	4.21	4.10	4.00	3.85	3.99
16	Banten	9.77	9.54	9.87	9.07	8.58	9.55	7.95	8.92	7.75	9.28	7.77	8.52
17	Bali	1.93	1.83	1.37	1.90	1.37	1.99	2.12	1.89	1.28	1.48	0.86	1.37
18	Nusa Tenggara Barat	5.28	5.30	5.30	5.75	4.98	5.69	3.66	3.94	3.86	3.32	3.38	3.72
19	Nusa Tenggara Timur	2.12	3.25	1.97	3.26	3.12	3.83	3.59	3.25	3.21	3.27	2.98	3.01
20	Kalimantan Barat	3.13	3.99	2.53	4.04	4.78	5.15	4.38	4.23	4.22	4.36	4.15	4.26
21	Kalimantan Tengah	1.81	3.00	2.71	3.24	3.14	4.54	3.67	4.82	3.13	4.23	3.18	4.01
22	Kalimantan Selatan	3.88	3.66	4.03	3.80	4.83	4.92	3.63	5.45	3.53	4.77	3.86	4.50
23	Kalimantan Timur	8.94	7.95	8.89	7.38	7.17	7.50	8.86	7.95	8.55	6.91	6.90	6.60
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	5.79	5.68	3.92	5.23	5.17	5.54	4.68	5.22
25	Sulawesi Utara	7.50	6.79	7.27	7.54	8.69	9.03	7.82	6.18	6.12	7.18	6.09	6.86
26	Sulawesi Tengah	2.67	4.19	2.92	3.68	2.99	4.10	3.46	3.29	2.97	3.81	3.19	3.43
27	Sulawesi Selatan	5.88	5.10	5.79	5.08	5.81	5.95	5.11	4.80	4.77	5.61	5.39	5.34
28	Sulawesi Tenggara	3.43	4.38	2.13	4.43	3.62	5.55	3.78	2.72	3.14	3.30	2.79	3.26
29	Gorontalo	4.51	4.15	2.44	4.18	3.06	4.65	3.88	2.76	3.65	4.28	3.62	4.03
30	Sulawesi Barat	2.02	2.35	1.60	2.08	1.81	3.35	2.72	3.33	2.98	3.21	2.45	3.16
31	Maluku	6.97	9.91	6.59	10.51	6.72	9.93	6.98	7.05	7.77	9.29	7.38	7.27
32	Maluku Utara	5.50	3.80	5.65	5.29	5.56	6.05	3.43	4.01	4.82	5.33	4.65	4.77
33	Papua Barat	4.36	4.40	3.70	5.02	4.61	8.08	5.73	7.46	7.52	6.49	5.67	6.30
34	Papua	2.91	3.15	3.48	3.44	3.72	3.99	2.97	3.35	3.96	3.62	2.91	3.20
Indonesia		5.88	6.17	5.70	5.94	5.81	6.18	5.50	5.61	5.33	5.50	5.13	5.34

Sumber : BPS Indonesia, 2019

Berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut provinsi periode 2013-2018 diketahui bahwa tingkat pengangguran terdidik tertinggi terjadi pada Agustus 2015 sebesar 6,18% dan terendah pada Februari 2018. Data ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang berfluktuasi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dimana pada tahun tertentu naik namun pada tahun lainnya mengalami peningkatan.

Pada periode Agustus 2018 terlihat bahwa tingkat pengangguran terdidik tertinggi berada di Provinsi Banten sebesar 8,52% dan yang terendah pada Provinsi

Bali sebesar 1,37%. Data ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka paling banyak terdapat di Provinsi Banten dan paling sedikit adalah Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan terjadi ketimpangan dari jumlah pengangguran di antar provinsi di Indonesia dimana terlihat ada provinsi yang memiliki tingkat pengangguran sangat tinggi tetapi ada juga yang tingkat penganggurannya sangat rendah.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur

Alapun data tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan kelompok umur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 24 : Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur Periode 2015 – 2018

No	Kelompok Umur	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur			
		2015	2016	2017	2018
1	15-19	17.71	28.09	27.54	26.67
2	20-24	12.86	15.8	16.62	16.73
3	25-29	10.65	7.08	6.76	6.99
4	30-34	8.86	3.63	3.4	3.47
5	35-39	7.86	2.21	2.45	2.49
6	40-44	7.59	2.05	1.86	1.81
7	45-49	6.97	1.35	1.51	1.58
8	50-54	5.93	1.66	1.54	1.4
9	55-59	6.05	1.55	1.73	1.25
10	60 keatas	4.74	1.51	1.52	0.61

Sumber: BPS, 2019

Berdasarkan Tabel 24 tingkat pengangguran terbuka yang dirinci menurut kelompok umur sejak periode 2015-2018 menunjukkan bahwa kelompok umur (15-19) tahun mempunyai TPT yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok umur yang lainnya yaitu berkisar antara 17,71% sampai dengan 28,09%. Posisi TPT tertinggi kedua ditempati oleh kelompok umur (20-24) tahun yaitu berkisar antara 12,86% hingga 16,73%. Kelompok umur yang mempunyai TPT tertinggi ketiga adalah kelompok umur (25-29) tahun yaitu berkisar antara 6,76% sampai dengan 10,65%. Sedangkan kelompok umur yang mempunyai TPT terendah periode tahun 2015-2018 berada pada kelompok umur 60 tahun ke atas yang berkisar antara

0,61% sampai dengan 4,74%. Data di atas menunjukkan bahwa angkatan kerja di Indonesia banyak yang menganggur di usia.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal

Adapun data tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan daerah tempat tinggal disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 25 : Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2015-2018

Daerah Tempat Tinggal	TPT Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal			
	2015	2016	2017	2018
Perkotaan	7.31	6.60	6.79	6.45
Perdesaan	4.93	4.51	4.01	4.04

Sumber: BPS, 2019

Berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan daerah tempat tinggal diketahui bahwa pada umumnya pengangguran lebih banyak tinggal di daerah perkotaan dibandingkan dengan yang tinggal dipedesaan. Kondisi ini tetap setiap tahunnya.

4. Keterkaitan Struktur Perekonomian dengan Pengangguran

Tinggi rendahnya tingkat pengangguran terbuka pada wilayah provinsi tidak terlepas dari struktur perekonomian. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami penurunan dari 6,54 persen pada tahun 2011 menjadi 5,13 persen pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya angkatan kerja yang dapat diserap oleh dunia kerja.

Berikut ini adalah data struktur perekonomian dan tingkat pengangguran terbuka pada wilayah provinsi di Indonesia.

Tabel 26 : Struktur Perekonomian dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2017

No	Provinsi	S. Perekonomian (%)			PE (%)	PK (Jt Rp)	IPM (%)	GR	TPT (%)
		P	I	J					
1	Aceh	28.09	21.74	50.17	4.18	23.36	70.60	0,329	6.57
2	Sumatera Utara	24.88	33.14	41.98	5.12	34.18	70.57	0,335	5.60
3	Sumatera Barat	22.69	23.90	53.41	5.29	29.31	71.24	0,312	5.58
4	Riau	25.32	58.55	16.13	2.68	70.76	71.79	0,325	6.22
5	Jambi	26.97	41.71	31.32	4.64	38.85	69.99	0,334	3.87
6	Sumatera Selatan	17.59	52.52	29.89	5.51	34.06	68.86	0,365	4.39
7	Bengkulu	28.35	14.57	57.08	4.98	22.75	69.95	0,349	3.74
8	Lampung	30.05	33.85	36.10	5.16	22.61	68.25	0,333	4.33
9	Kep. Bangka Belitung	18.18	44.58	37.24	4.47	22.93	69.99	0,276	3.78
10	Kepulauan Riau	3.58	71.64	24.78	2.00	79.76	74.25	0,359	7.16
	Pulau Sumatera	22.57	39.62	37.81	4.40	39.36	70.57	0,332	5.12
11	DKI Jakarta	0.09	25.97	73.94	6.20	157.64	80.06	0,409	7.14
12	Jawa Barat	7.41	53.80	38.79	5.35	27.98	70.69	0,393	8.22
13	Jawa Tengah	13.23	47.39	39.38	5.26	26.09	70.52	0,365	4.57
14	DI Yogyakarta	8.59	23.23	68.18	5.26	24.53	78.89	0,440	3.02
15	Jawa Timur	11.29	44.32	44.39	5.46	37.72	70.27	0,415	4.00
16	Banten	5.62	46.55	47.83	5.73	32.94	71.42	0,379	9.28
	Pulau Jawa	7.71	40.21	52.09	5.54	51.15	73.44	0,400	6.04
17	Bali	13.67	17.39	68.94	5.57	34.13	74.20	0,379	1.48
18	Nusa Tenggara Barat	22.02	34.91	43.07	0.12	19.10	66.58	0,378	3.32
19	Nusa Tenggara Timur	27.65	13.71	58.64	5.11	11.86	63.73	0,359	3.27
	Bali & Nusa Tenggara	21.11	22.00	56.88	3.60	21.70	68.20	0,372	2.69
20	Kalimantan Barat	22.81	32.25	44.94	5.17	25.20	66.26	0,329	4.36
21	Kalimantan Tengah	20.65	41.14	38.21	6.72	34.37	69.79	0,327	4.23
22	Kalimantan Selatan	14.19	47.00	38.81	5.28	29.58	69.65	0,347	4.77
23	Kalimantan Timur	6.69	76.00	17.31	3.13	108.63	75.12	0,333	6.91
24	Kalimantan Utara	17.27	50.23	32.50	6.59	22.16	69.84	0,313	5.54
	Pulau Kalimantan	16.32	49.32	34.35	5.38	43.99	70.13	0,330	5.16
25	Sulawesi Utara	19.89	28.68	51.43	6.31	26.79	71.66	0,394	7.18
26	Sulawesi Tengah	28.86	38.34	32.80	7.10	37.46	68.11	0,345	3.81
27	Sulawesi Selatan	21.28	32.02	46.71	7.21	33.24	70.54	0,429	5.61
28	Sulawesi Tenggara	23.28	40.18	36.54	6.76	71.05	69.85	0,404	3.30
29	Gorontalo	37.12	16.88	45.99	6.73	18.85	67.01	0,405	4.28
30	Sulawesi Barat	39.10	21.29	39.61	6.62	16.82	64.39	0,339	3.21
	Pulau Sulawesi	28.26	29.57	42.18	6.79	34.04	68.55	0,386	4.57
31	Maluku	22.69	15.23	62.08	5.81	23.90	68.19	0,321	9.29
32	Maluku Utara	21.97	23.77	54.26	7.67	25.36	67.20	0,330	5.33
	Kep. Maluku	22.33	19.50	58.17	6.75	24.63	67.70	0,326	7.31
33	Papua Barat	10.54	63.39	26.27	4.01	82.34	62.99	0,387	6.49
34	Papua	10.80	54.70	34.50	4.64	45.58	59.09	0,398	3.62
	Pulau Papua	10.57	59.05	30.39	4.33	63.96	61.04	0,393	5.06
	Indonesia	18.41	37.04	44.55	5.25	39.83	68.55	0,363	5.13

Sumber : BPS, 2019 (diolah)

Pada tingkat provinsi pada tahun 2011 terlihat bahwa provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah provinsi Banten yaitu sebesar 13,74

persen dan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka terendah adalah provinsi Bali yaitu sebesar 2,95 persen sedangkan pada tahun 2017 provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah provinsi Maluku yaitu sebesar 9,29 persen dan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka terendah adalah provinsi Bali sebesar 1,48 persen. Data ini memperlihatkan bahwa provinsi Bali merupakan wilayah yang memiliki tingkat pengangguran terendah periode 2011-2017. Rendahnya tingkat pengangguran terbuka di provinsi Bali disebabkan karena struktur perekonomian provinsi Bali sudah didominasi oleh sektor jasa yaitu 66,87 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi 68,94 persen pada tahun 2017. Alasan lainnya yang menjadi penyebab rendahnya tingkat pengangguran terbuka di Bali adalah terjadinya peningkatan yang cukup tajam dari pendapatan perkapita penduduk dan indeks pembangunan manusia, dimana pendapatan perkapita pada tahun 2011 adalah 25,27 juta meningkat menjadi 34,13 juta pada tahun 2017 dan IPM pada tahun 2011 sebesar 70,87 persen meningkat menjadi 74,30 persen pada tahun 2017.

Pada tingkat wilayah provinsi pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka di provinsi Aceh adalah sebesar 9 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 6,57 persen. Turunnya tingkat pengangguran ini mengindikasikan bahwa masih banyak tenaga kerja di provinsi Aceh yang bekerja pada sektor pertanian karena PDRB sektor pertanian mengalami peningkatan dari 25,28 persen tahun 2011 menjadi 28,09 persen pada tahun 2017. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian masih dominan pada struktur perekonomian pada provinsi Aceh sehingga pendapatan perkapita masyarakat di Aceh hanya meningkat sedikit dari 22,70 juta pada tahun 2011 menjadi 23,36 juta pada tahun 2017. Selanjutnya terlihat bahwa gini ratio provinsi Aceh pada tahun 2017 adalah 0,329. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Aceh dengan kategori ketimpangan sedang.

Pada provinsi Sumatera Utara terlihat bahwa PDRB sektor pertanian mengalami penurunan dari periode 2011 ke 2017 yaitu dari 26,65% menjadi 24,88% dan sektor industri dan jasa mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian provinsi Sumatera Utara mengalami

kemajuan yang cukup menjanjikan karena perekonomian sudah bergeser dari sektor pertanian menuju sektor industri dan sektor jasa yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 8,18 persen menjadi 5,60 persen. Penyebab lainnya turunnya tingkat pengangguran terbuka di provinsi Sumatera Utara berkemungkinan disebabkan oleh meningkatnya realisasi investasi di provinsi Sumatera Utara baik investasi PMA maupun PMDN.

Struktur perekonomian provinsi Sumatera Barat sudah bergerak ke sektor jasa yang di dukukan dengan terjadinya peningkatan sektor jasa dari tahun 2011 ke 2017 yaitu dari 50,24 persen menjadi 53,41 persen sedangkan untuk sektor pertanian dan sektor industri mengalami penurunan. Selanjutnya juga diketahui bahwa realisasi investasi di provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu sebesar 1.036,30 milyar pada tahun 2011 meningkat menjadi 1.517,00 milyar pada tahun 2017 yang menyebabkan turunnya tingkat pengangguran terbuka dari 8,02 persen menjadi 5,58 persen.

Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan investasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 1.370,50 milyar pada tahun 2011 menjadi 3.006,60 milyar pada tahun 2017 namun kontribusi sektor industri dan sektor jasa terhadap perekonomian menurun dan hanya sektor pertanian yang mengalami peningkatan dari 25,40 persen menjadi 26,97 persen pada tahun 2017 tetapi diantara ketiga sektor perekonomian maka perekonomian provinsi Jambi didominasi oleh sektor industri yaitu 45,22 persen pada tahun 2011 dan 41,71 persen pada tahun 2017 sehingga tingkat pengangguran terbukanya menurun dari 4,63 persen menjadi 3,87 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu dari 5,51 persen dari 6,36 persen pada tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari penurunan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian. Disisi lain ada beberapa industri yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Industri tersebut antara lain, pertanian, pertambangan, pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, transportasi, komunikasi, administrasi pemerintah, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2017 atas dasar harga konstan 2010 mengalami penurunan dari 6,85 pada tahun 2011 menjadi 4,98 persen pada tahun

2017. Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2017 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai *leading sector* dalam perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Struktur perekonomian provinsi Lampung hampir seimbang antara pertanian, industry maupun sektor jasa. Hal ini mengindikasikan lambatnya kemajuan perekonomian provinsi Lampung periode 2011-2017, dimana terlihat masing-masing sektor memberikan kontribusi diangka 30%. Selanjutnya apabila dilihat pertumbuhan ekonominya cenderung turun dimana pada tahun 2017 sebesar 5,16 persen turun dari 6,56 persen pada tahun 2011 namun pendapatan perkapitanya mengalami peningkatan yang berarti dari 20,74 juta tahun 2011 menjadi 26,61 juta pada tahun 2017. Kondisi perekonomian yang cenderung stagnan tersebut menyebabkan tingkat pengangguran terbukanya juga tidak mengalami penurunan yang cukup berarti yaitu dari 6,38 persen pada tahun 2011 menjadi 4,33 persen pada tahun 2017.

Tingkat pengangguran terbuka di provinsi Bangka Belitung pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 2,60 persen pada tahun 2016 menjadi 3,78 persen pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh pesunya perkembangan sektor industry pada tahun tersebut, dimana sektor industry mengalami peningkatan dari 44,40 persen menjadi 44,58 persen.

Tingkat pengangguran terbuka provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 2011 sebesar 5,38 persen menjadi 7,16 persen pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan kontribusi sektor industri pada tahun tersebut yaitu 72,80 persen menjadi 72,57 persen yang diiringi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Sektor perekonomian yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap perekonomian di provinsi DKI Jakarta adalah sektor jasa yaitu 71,69 persen menjadi 83,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian provinsi DKI Jakarta sudah berada pada tahap perekonomian maju yang dibuktikan oleh sektor jasa yang paling dominan sehingga kontribusi sektor pertanian sangat kecil. Namun

pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mengalami penurunan dari 6,73% menjadi 5,87 persen sehingga menyebabkan tingkat pengangguran terbukanya mengalami peningkatan dari 6,12 persen pada tahun 2016 menjadi 7,14 persen pada tahun 2017.

Pada provinsi Jawa Barat diketahui bahwa sektor perekonomian yang memberikan kontribusi paling besar adalah sektor industri, namun kontribusi sektor ini sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 55,58 persen pada tahun 2011 menurun menjadi 53,80 persen pada tahun 2017. Penurunan ini juga diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut yaitu dari 6,50 persen turun pada 2017 menjadi 5,35 persen. Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran terbukanya dari pada rata-rata nasional yaitu sebesar 8,22 persen pada tahun 2017.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi di pulau Jawa yang memiliki kontribusi sektor pertanian paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 5,30 persen pada tahun 2016 menurun menjadi 5,25 persen pada tahun 2017. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka masih relative tinggi dan hanya sedikit berkurang yaitu dari 4,63 persen pada tahun 2016 menjadi 4,57 persen.

Tingkat pengangguran terbuka di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dari 2011 ke 2017 yaitu 4,39 persen menjadi 3,02 persen. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut IPM Daerah Istimewa Yogyakarta hanya sedikit mengalami peningkatan yaitu dari 78,38 persen menjadi 78,89 persen, penyebab lainnya yaitu lambatnya perkembangan sektor jasa yaitu dari 68,10 persen hanya naik menjadi 68,18 persen.

Pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pada tahun 2011 ke 2017 yaitu 6,44 persen ke 5,46 persen dan juga kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian hanya meningkat sedikit dari 44,24 persen menjadi 44,39 persen sehingga menyebabkan tingkat pengangguran terbukanya hanya turun sedikit dari 4,21 persen menjadi 4,00 persen.

Kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Provinsi Banten mengalami penurunan periode 2011-2017, yaitu pada tahun 2011 sebesar 48,93 persen menurun tahun 2017 menjadi 46,55 persen. Terjadinya kelesuan perkembangan sektor ini industri tersebut mengakibatkan naiknya tingkat pengangguran terbuka di provinsi Banten dari 8,92 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 9,28 persen pada tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi provinsi Bali, mengalami penurunan dari 6,66 persen pada tahun 2011 menurun menjadi 6,33 persen dan 5,57 persen pada tahun 2016 dan 2017. Namun pada provinsi Bali perekonomian sudah didominasi oleh sektor jasa yaitu sebesar 66,87 persen pada tahun 2011 mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing menjadi 68,39 dan 68,94 persen sehingga tingkat pengangguran terbukanya sudah rendah yaitu 1,89 persen pada tahun 2016 mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 1,48 persen.

Kondisi perekonomian provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2011-2017 terlihat kurang stabil yang dibuktikan oleh angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 3,91 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 5,80 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 0,12 persen. Kondisi menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan perkapita penduduk dari 19,31 juta menjadi 19,20 juta.

Pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2011-2017 selalu mengalami penurunan yaitu sebesar 5,67 persen pada tahun 2011 menjadi 5,12 persen dan dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 5,11 persen. Kontribusi sektor jasa juga mengalami penurunan dari 58,67 persen menjadi 58,64 persen.

Provinsi Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan ekonomi periode 2011-2017 yaitu sebesar 5,50 persen pada tahun 2011 menjadi 5,19 persen pada tahun 2016 dan turun lagi pada tahun 2017 menjadi 5,17 persen. Kondisi menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka 4,36 pada tahun 2017 meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebesar 4,60 persen.

Kontribusi sektor industri terhadap perekonomian provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan dari 2016 sebesar 47,21 persen menjadi 47,00 persen pada

tahun 2017. Data ini mengindikasikan kurang stabilnya kondisi perekonomian provinsi Kalimantan Selatan yang dibuktikan oleh tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 6,97 persen tahun 2011 turun menjadi 4,40 persen pada tahun 2016 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,28 persen.

Pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan drastic pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,47 persen pada tahun 2011 turun menjadi -0,38 persen sehingga pendapatan perkapita penduduk juga mengalami penurunan drastic yaitu dari 121,20 juta pada tahun 2011 turun menjadi 105,34 juta pada tahun 2016. Dengan kondisi perekonomian tersebut menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 11,43 persen pada tahun 2011 dan sebesar 7,95 persen pada tahun 2016.

Tingkat pengangguran terbuka di provinsi Kalimantan Utara masih tinggi yaitu sebesar 5,23 persen pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 5,54 persen. Kondisi ini disebabkan oleh terjadi penurunan pendapatan perkapita masyarakat dari 76,64 juta pada tahun 2016 dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2017 menjadi 22,16 juta.

Sektor perekonomian pada provinsi Sulawesi Utara sudah didominasi oleh sektor jasa yaitu sebesar 48,95 persen pada tahun 2011 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 51,48 persen namun mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 51,43 persen. Namun peningkatan kontribusi sektor jasa ini tidak mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan dari 6,17 persen pada tahun 2011 menurun menjadi 5,16 persen pada tahun 2016. Kemudian juga terlihat tingkat pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan dari angka 6,18 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 7,18 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari 9,94 persen pada tahun 2016 turun menjadi 7,10 persen pada tahun 2017. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini berakibat terjadinya peningkatan jumlah pengangguran terbuka yaitu dari 3,29 persen pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 3,81 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan

selama period 2011-2017 yaitu sebesar 8,13 persen pada tahun 2011 turun menjadi 7,42 persen pada tahun 2016 dan turun lagi menjadi 7,21 persen pada tahun 2017. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini berakibat terjadinya peningkatan jumlah pengangguran terbuka di provinsi Sulawesi Selatan yaitu dari 4,80 persen pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 5,61 persen pada tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi pada provinsi Sulawesi Tenggara mengalami perubahan yang berfluktuasi selama periode 2011-2017 yaitu sebesar 8,76 persen pada tahun 2011 turun menjadi 6,51 persen pada tahun 2016 namun meningkat pada tahun 2017 menjadi 6,76 persen. Penurunan perubahan yang berfluktuasi dari pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran terbuka di provinsi Sulawesi Tenggara yaitu dari 2,72 persen pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 3,30 persen pada tahun 2017.

Kontribusi sektor industri terhadap perekonomian provinsi Gorontalo masih relative kecil yaitu sebesar 17,58 persen pada tahun 2011 dan turun menjadi 17,51 persen pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 16,88 persen. Masih belum berkembangnya sektor industri di provinsi Gorontalo menyebabkan terjadinya peningkatan tingkat pengangguran terbuka dari 2,76 persen pada tahun 2016 menjadi 4,28 persen pada tahun 2017. Struktur perekonomian pada provinsi Sulawesi Barat masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 40,86 persen pada tahun 2011 dan sebesar 39,00 persen pada tahun 2016 dan namun pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian meningkat menjadi 39,10 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pada umumnya tenaga kerja masih banyak yang bekerja pada sektor pertanian dibandingkan dengan sektor industri maupun sektor jasa.

Provinsi Maluku memiliki tingkat pengangguran terbuka yang tinggi yaitu 10,81 persen pada tahun 2011 dan turun menjadi 7,05 persen pada tahun 2016 dan pada 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 9,29 persen. Terjadinya peningkatan tingkat pengangguran terbuka ini disebabkan belum berkembangnya sektor industri di Provinsi Maluku periode 2011-2017. Provinsi Maluku Utara memiliki jumlah pengangguran yang lebih kecil dibandingkan dengan provinsi Maluku dengan tingkat pengangguran terbuka pada 2016 sebesar 4,01 persen dan

meningkat pada tahun 2017 menjadi 5,33 persen. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka ini disebabkan oleh belum berkembangnya sektor industri di provinsi Maluku Utara.

Pertumbuhan ekonomi provinsi Papua Barat mengalami penurunan pada tahun 2017 dari tahun 2016 yaitu sebesar 4,52 persen menjadi 4,01 persen. Terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan masih tingginya tingkat pengangguran terdidik di provinsi Papua Barat yaitu 6,73 persen pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan menjadi 7,46 persen pada tahun 2017. Provinsi Papua memiliki tingkat pengangguran terbuka yang meningkat dari 3,35 persen pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 3,62 persen pada tahun 2017. Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran di provinsi Papua diduga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang menurun pada tahun 2017 yaitu turun dari 9,14 persen pada tahun 2016 menjadi 4,64 persen pada tahun 2017.

5. Kondisi Pengangguran Terdidik di Indonesia

Pengangguran terdidik adalah seseorang yang memiliki tingkat pendidikan SMA sederajat dan keatasnya yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan data pengangguran terdidik di Indonesia diketahui bahwa terjadi perubahan yang berfluktuasi jumlah pengangguran terdidik setiap tahunnya, dimana terlihat pada tahun 2012 dan 2016 terjadi penurunan jumlah pengangguran terdidik masing-masing sebesar 12,05 persen dan 5,99 persen namun untuk tahun yang lainnya terjadi peningkatan, persentase peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 22,62 persen atau dari 3.757.803 orang pada tahun 2014 menjadi 4.607.784 orang pada tahun 2015. Jika dilihat tingkat pengangguran terdidik di Indonesia diketahui angkanya antara 2,71-3,86 persen adalah pengangguran terdidik dari seluruh angkatan kerja. Data ini memperlihatkan bahwa masih tingginya jumlah pengangguran terdidik di Indonesia dan pada umumnya pengangguran di Indonesia adalah mereka yang tergolong tenaga kerja terdidik karena data menunjukkan bahwa pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 5,13 persen, yang mana 3,54 persen adalah merupakan

pengangguran terdidik dan hanya 1,59 persen merupakan pengangguran yang tidak terdidik.

Data pengangguran terdidik di Indonesia periode 2013-2017 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 27 : Data Pengangguran Terdidik Pada Provinsi Se Indonesia Periode 2013-2017

No	Pulau dan Provinsi	Pengangguran Terdidik									
		Jumlah (Orang)					Persentase				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Aceh	99.522	121.149	165.335	137.578	113.643	7,58	6,09	4,97		
2	Sumatera Utara	210.005	248.128	248.756	226.590	251.659	3,53	3,91	3,89	3,56	3,73
3	Sumatera Barat	52.835	104.331	118.661	82.764	89.692	4,31	4,4	5,06	3,35	3,61
4	Riau	102.128	144.236	111.080	114.150	107.948	3,89	5,3	4,01	3,82	3,64
5	Jambi	27.889	29.464	68.796	63.889	45.333	1,92	1,8	4,24	3,78	2,63
6	Sumatera Selatan	92.416	134.620	150.417	102.462	132.228	2,53	3,4	3,82	2,45	3,21
7	Bengkulu	15.672	25.758	22.919	17.399	16.327	1,86	2,8	2,41	1,74	1,68
8	Lampung	100.379	79.956	94.358	92.825	104.358	2,79	2,0	2,46	2,25	2,56
9	Kep. Bangka Belitung	10.944	13.184	25.591	11.228	16.966	1,77	2,0	3,84	1,59	2,43
10	Kepulauan Riau	29.656	62.294	38.647	53.647	50.031	3,28	7,0	4,33	5,76	5,18
	Pulau Sumatera	781.464	963.120	1.044.760	902.532	928.085	3,06	3,8	4,17	3,44	3,36
11	DKI Jakarta	317.134	256.784	241.539	263.050	259.738	6,12	5,0	4,74	5,08	5,35
12	Jawa Barat	701.027	805.924	915.475	874.459	1.018.357	3,46	3,8	4,45	4,15	4,55
13	Jawa Tengah	343.217	247.875	486.920	458.891	453.697	2,02	1,4	2,81	2,65	2,52
14	DI Yogyakarta	35.837	63.084	39.425	38.825	50.503	1,88	3,1	2,00	1,85	2,39
15	Jawa Timur	387.878	455.747	607.493	534.982	514.199	1,93	2,2	3,00	2,68	2,46
16	Banten	167.049	233.787	398.259	480.054	379.681	3,25	4,3	7,47	8,59	6,78
	Pulau Jawa	1.952.142	2.063.201	2.689.111	2.650.261	2.676.175	3,11	3,3	4,08	4,17	4,01
17	Bali	30.185	19.961	27.967	41.497	26.855	1,30	0,8	1,18	1,68	1,10
18	Nusa Tenggara Barat	42.725	57.176	70.939	63.292	46.153	2,04	2,5	3,14	2,57	1,93
19	Nusa Tenggara Timur	26.447	52.339	62.052	47.207	58.581	1,23	2,3	2,69	2,01	2,44
	Bali & N. Tenggara	99.357	129.476	160.958	151.996	131.589	1,53	1,9	2,34	2,09	1,82
20	Kalimantan Barat	35.895	46.189	70.161	61.973	67.895	1,68	1,9	2,98	2,59	2,82
21	Kalimantan Tengah	16.687	23.518	32.458	40.840	31.968	1,52	1,9	2,55	3,11	2,50
22	Kalimantan Selatan	34.999	47.225	39.897	36.987	45.568	1,86	2,43	2,01	1,78	2,20
23	Kalimantan Timur	93.802	67.709	84.156	80.495	78.580	5,31	3,74	5,47	4,69	4,75
24	Kalimantan Utara	-	9.398	13.756	32.357	11.437	-	-	4,86	4,28	3,46
	Pulau Kalimantan	181.383	194.039	240.428	252.652	235.448	2,07	2,03	3,57	3,29	3,15
25	Sulawesi Utara	48.725	71.206	70.733	50.150	62.813	4,80	6,71	6,43	4,24	5,60
26	Sulawesi Tengah	29.018	23.945	36.080	30.262	29.967	2,36	1,78	2,61	2,00	2,10
27	Sulawesi Selatan	121.691	137.922	168.534	116.000	145.860	3,51	3,71	4,55	2,99	3,83
28	Sulawesi Tenggara	19.681	31.349	46.816	26.729	28.351	1,94	2,89	4,11	2,13	2,36
29	Gorontalo	8.089	11.480	17.858	9.919	19.141	1,73	2,30	3,45	1,76	3,49
30	Sulawesi Barat	8.598	7.724	12.303	7.938	11.372	1,60	1,27	2,00	1,23	1,85
	Pulau Sulawesi	235.802	283.626	352.324	240.995	297.504	2,66	3,1	3,86	2,39	3,21
31	Maluku	63.566	41.364	34.966	44.900	48.189	5,06	6,15	4,81	6,04	6,81
32	Maluku Utara	21.424	19.233	22.457	17.219	19.677	4,62	3,9	4,37	3,28	3,81
	Kep. Maluku	84.987	60.597	57.423	62.119	67.866	4,84	5,07	4,59	4,66	5,31
33	Papua Barat	10.701	13.849	28.641	23.440	21.241	2,89	3,48	6,92	5,39	4,93
34	Papua	36.782	49.895	34.139	47.691	51.593	2,18	2,98	1,96	2,77	2,93
	Pulau Papua	47.483	63.744	62.780	71.131	72.834	2,53	3,23	4,44	4,08	3,93
	Indonesia	3.352.618	3.757.803	4.607.784	4.331.686	4.409.501	2,83	3,23	3,86	3,45	3,54
	% Perubahan	0,98	12,09	22,62	- 5,99	1,80					

Sumber : BPS, 2019 (diolah)

Pada wilayah kepulauan di Indonesia terlihat bahwa jumlah pengangguran terdidik terbanyak berada di pulau Jawa yaitu sebanyak 1,9 juta orang pada tahun 2011 menjadi 2,7 juta orang pada tahun 2017. Sedangkan jumlah pengangguran terdidik terendah berada di pulau Maluku yaitu sebanyak 57,24 ribu orang pada tahun 2011 menjadi 67,87 ribu orang pada tahun 2017. Data ini memperlihatkan bahwa pengangguran terdidik di Indonesia masih banyak menumpuk di pulau Jawa. Selanjutnya jika dilihat dari tingkat pengangguran terdidik tersebut diketahui bahwa tingkat pengangguran terdidik tertinggi pada tahun 2017 terletak di Pulau Maluku dengan tingkat pengangguran sebesar 5,31 persen yang melebihi dari tingkat pengangguran terdidik nasional dan terendah berada di pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 1,82 persen.

Jumlah pengangguran terdidik di pulau Sumatera terbanyak terletak pada provinsi Sumatera Utara sedangkan terendah terletak di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah pengangguran terdidik pada tahun 2012, 2013 dan 2016 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2014, 2015 dan 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Urutan tiga besar penyebaran pengangguran terdidik pada tahun 2017 terdapat pada provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Aceh. Selanjutnya tingkat pengangguran terdidik tertinggi di pulau Sumatera periode 2011-2017 terletak di provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,09 persen pada tahun 2014 dan terendah berada pada provinsi Bengkulu pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,25 persen.

Pulau Jawa merupakan tempat pengangguran terdidik paling besar di Indonesia yaitu sebanyak 2.298.953 pada tahun 2011 meningkat menjadi 2.676.175 orang pada tahun 2017. Terlihat bahwa jumlah pengangguran terdidik di pulau Jawa mengalami perubahan yang berfluktuasi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2012 dan 2013 terjadi penurunan jumlah pengangguran terdidik sementara pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2016, sementara pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 2.676.175 orang dari 2.650.261 pada tahun 2016. Provinsi yang memiliki jumlah pengangguran terdidik terbanyak di pulau Jawa adalah provinsi Jawa Barat dan terendah adalah provinsi DI Yogyakarta. Sedangkan tingkat pengangguran terdidik tertinggi terletak di

provinsi Banten sebesar 8,59 persen pada tahun 2016 sedangkan rendah terletak di provinsi Banten yaitu sebesar 1,87 persen pada tahun 2011.

Pada tahun 2011 jumlah pengangguran terdidik terendah di pulau Bali dan Nusa Tenggara terdapat pada provinsi Nusa Tenggara Timur dan tertinggi terdapat pada provinsi Nusa Tenggara Timur, namun pada tahun 2017 mengalami perubahan dimana jumlah pengangguran terdidik terendah adalah provinsi Bali dan jumlah terbanyak terdapat pada provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa provinsi Jambi mampu menekan jumlah pengangguran terdidiknya sehingga menjadi yang terendah jumlahnya pada tahun 2017, dan mengindikasikan kegagalan provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menekan jumlah pengangguran terdidiknya. Selanjutnya tingkat pengangguran terdidik tertinggi pada tahun 2017 terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 2,44 persen dan terendah adalah provinsi Bali sebesar 1,10 persen, yang juga merupakan angka terendah dari seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2017.

Pulau Kalimantan memiliki jumlah pengangguran terdidik yang cukup banyak setiap tahunnya, dimana jumlah pengangguran terdidik terbanyak pada tahun 2011 terdapat di provinsi Kalimantan Timur dan terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2017 jumlah pengangguran terdidik terbanyak masih terletak di provinsi Kalimantan Timur dan jumlah terendah pada di Kalimantan Utara dikarenakan adanya pemekaran wilayah yaitu dibentuknya provinsi baru yaitu Kalimantan Utara. Tingkat pengangguran terdidik tertinggi pada tahun 2017 terletak di provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 4,75 persen dan terendah adalah provinsi Kalimantan Selatan sebesar 2,20 persen.

Pada pulau Sulawesi terdapat enam pemerintah provinsi, urutan daerah daerah yang memiliki jumlah pengangguran terdidik terbanyak sampai terendah tidak mengalami perubahan semenjak 2011-2017, dimana jumlah pengangguran terdidik terbanyak pada tahun 2011 terletak di provinsi Sulawesi Selatan dan terendah di provinsi Gorontalo namun pada tahun 2017 daerah provinsi yang memiliki jumlah pengangguran terendah adalah provinsi Sulawesi Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi Sulawesi Barat cukup berhasil menekan angka pengangguran terdidiknya dibandingkan dengan provinsi Gorontalo.

Pada pulau Maluku terdapat dua pemerintah provinsi yaitu provinsi Maluku dan Maluku Utara, daerah daerah yang memiliki jumlah pengangguran terdidik terbanyak adalah provinsi Maluku dan terendah adalah provinsi Maluku Utara. Pengangguran terdidik di Pulau Maluku selalu mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2013 sampai 2017. Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran terdidik di pulau ini dikarenakan oleh struktur perekonominya yang masih didominasi oleh sektor pertanian.

Pengangguran terdidik di Papua selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2013 sampai 2017. Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran terdidik di pulau Papua dikarenakan oleh struktur perekonominya yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Selanjutnya terlihat jumlah pengangguran terdidik terbanyak terdapat di provinsi Papua dikarenakan provinsi ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi Papua Barat. Selanjutnya tingkat pengangguran terdidik tertinggi pada tahun 2011-2017 terletak di provinsi Papua Barat yaitu sebesar 6,92 persen pada 2015 dan terendah terletak di provinsi Papua sebesar 1,87 persen.

F. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Pengangguran

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) (2009-2014)

Dalam perkembangan pelaksanaan RPJMN 2004-2009, pada tahun 2008 banyak diperdebatkan jumlah dan jenis program yang termasuk di dalam program penanggulangan kemiskinan, mengingat kemiskinan memiliki dimensi pendapatan dan dimensi non-pendapatan yang lebih luas. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kluster yaitu: (1) Program bantuan dan jaminan sosial, yaitu program yang ditujukan untuk membantu masyarakat dan keluarga miskin dalam menjangkau akses pelayanan dasar guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban hidup keluarga miskin; (2) Program pemberdayaan masyarakat atau dikenal dengan PNPM Mandiri, yaitu program yang memberi pendampingan dan pembekalan untuk memampukan masyarakat miskin menentukan arah,

langkah, dan upaya untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dalam rangka mengentaskan dirinya dari kemiskinan; (3) Program yang membantu usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan dan memperluas usahanya agar masyarakat miskin semakin stabil dan meningkat pendapatannya. Ketiga kelompok program ini atau ketiga kluster inilah yang diarahkan sebagai program penanggulangan kemiskinan.

Rincian dari program-program yang termasuk di dalam 3 (tiga) kluster ini selanjutnya dijabarkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah : 1) PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. 2) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khususnya adalah : 1) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. 3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin

melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*). 4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. 5) Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. 6) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. 7) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut :

a. Pengembangan Masyarakat

Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

b. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan : 1) Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program. 2) Memosisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal. 3) Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. 4) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis. 5) Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.

Ruang lingkup kegiatan PNPM-MANDIRI pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi :

- a. Penyediaan dan perbaikan sarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
- b. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini.

- c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh PNPM Mandiri periode 2009-2013 adalah sbb (Bappenas, 2013);

- (1) Adanya penurunan kemiskinan yang cukup signifikan
- (2) Partisipasi warga desa dalam setiap tahap kegiatan PNPM secara umum tinggi
- (3) Terdapat peningkatan konsumsi per kapita 5persen lebih tinggi pada rumah tangga di daerah *treatment* dibandingkan dengan daerah kontrol
- (4) Konsumsi RTM penerima PNPM Perdesaan meningkat 3 persen lebih besar dan memiliki kemungkinan keluar dari kemiskinan 2,3persen lebih besar dibandingkan RTM di daerah kontrol
- (5) Rumah tangga kelompok *treatment* memiliki kesempatan lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan dan akses pelayanan kesehatan
- (6) Dampak program 19 persen lebih tinggi di 20 persen kecamatan termiskin
- (7) Daerah *treatment* juga memiliki kesempatan 1-2 persen lebih besar untuk menghapuskan pengangguran
- (8) Di DIY sejak tahun 1998 hingga sekarang terdapat peningkatan aset usaha ekonomi produktif dari 14 milyar menjadi 41 milyar dan aset simpan pinjam kelompok perempuan dari 70 milyar menjadi 101 milyar
- (9) Di Bali telah melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh pemda berupa: (1) Jaminan Kesehatan Bali Mandara, (2) Program Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi), (3) Bedah Rumah, (4) Gerbang Sadu (Gerakan Pembangunan Desa Terpadu)
- (10) Di Bali masyarakat semakin dilibatkan dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan
- (11) Di Bali 46 kecamatan lokasi PNPM (100 persen) memiliki BKAD dan Lembaga pendukungnya

- (12) Di Bali 3 Kabupaten memiliki Perda Pembangunan Partisipatif dan 5 kabupaten memiliki Perbup perlindungan aset)
- (13) Di Bali 558 desa memiliki RPJM, 555 desa telah memiliki Perdes (dari 559 desa)
- (14) Pamong Desa memiliki informasi yang baik mengenai program dan aktif dalam berbagai program pembangunan di desa
- (15) Tokoh Adat memiliki informasi (diberitahukan) mengenai program-program pembangunan di desa, dan secara aktif (di Papua dan Sumatera Barat) terlibat dalam rapat di desa
- (16) Aktivis cepat tanggap dalam mencari informasi dan mengetahui program-program yang ada di desa. Terlibat dalam program-program desa terutama untuk melaksanakan program-program pembangunan di desa
- (17) Adanya peningkatan kepedulian dalam pengawasan terhadap jalannya PNPM Mandiri Perdesaan, baik pengawasan secara partisipatif oleh masyarakat melalui saluran-saluran pengaduan yang terbuka luas, maupun dari supervisi, monitoring dan audit secara berjenjang yang dilakukan oleh aparaturpemerintah, fasilitator/konsultan
- (18) Peningkatan yang signifikan dari kapabilitas komunitas dalam pengelolaan program PNPM Mandiri Perdesaan
- (19) Penguatan demokratisasi, interaksi, dan komunikasi antara kelompok masyarakat
- (20) PNPM Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan yang juga diminati untuk diadopsi oleh negara lain, seperti Afganistan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Timor Leste
- Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada dalam PNPM MANDIRI adalah sebagai berikut;

- (1) Dominannya proyek infrastruktur dalam kegiatan PNPM yang disebabkan antara lain oleh kurangnya infrastruktur di desa
- (2) Fasilitator tidak bisa sepenuhnya melaksanakan kegiatan pemberdayaan

- (3) Di Jawa Barat pencairan dana BLM baru 70persen terkendala oleh DDUB (pencairan APBN belum bisa dilaksanakan apabila APBD belum tersedia. Di Kabupaten Bandung baru terlaksana 3 kecamatan dari 11 kecamatan
- (4) Di Jawa Barat terdapat penyimpangan prosedur administrasi, proses, dan dana PNPM di tingkat masyarakat (UPK)
- (5) Di Jawa Barat perbedaan data di beberapa daerah dengan data di Pusat, sehingga berpengaruh pada penetapan lokasi dan alokasi
- (6) Di Jawa Barat tumpang tindih program-program penanggulangan kemiskinan (PPP, Pamsimas, PNPM)
- (7) Di Jawa Barat alokasi dan penetapan lokasi yang ditentukan oleh Pusat kadangkala kurang tepat
- (8) Di DIY paying hukum masih lemah untuk cantolan UPK mengingat aset sudah sangat banyak sehingga perlu dipikirkan kelembagaan yang pas dengan basis kecamatan
- (9) Di Bali masalah yang mendominasi terkait dengan pengelolaan dana bergulir, tunggakan, dana mengendap, dan penyimpangan dana
- (10) Di DIY kendala administrasi di desa, (rumitnya format yang harus diselesaikan dan kurangnya kapasitas SDM)
- (11) Di DIY Keterlibatan masyarakat belum optimal, salah satunya karena berbenturan waktu dengan pekerjaan profesi
- (12) Di Bali Kecenderungan ketergantungan masyarakat kepada PNPM Mandiri sebagai BLM masih tinggi (perlu dukungan pemda dalam membangun kemandirian masyarakat)
- (13) Di DIY modal sosial masyarakat sudah terbangun baik, tetapi pertanyaannya apakah cukup untuk mengembangkan pembangunan
- (14) Di Bali kecenderungan ketergantungan masyarakat kepada PNPM Mandiri sebagai BLM masih tinggi (perlu dukungan pemda dalam membangun kemandirian masyarakat)
- (15) Di Bali keberlanjutan PNPM Mandiri cenderung lebih menekankan pada keberlanjutan bantuan

- (16) Di Bali peran TKPKD belum optimal dalam melakukan koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan
- (17) Di DIY perlu ada pembeda di tiap daerah untuk model pemberdayaan, yaitu untuk masyarakat yang sudah siap dan yang belum siap
- (18) Di Bali peran TKPKD belum optimal dalam melakukan koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan
- (19) Kelompok mayoritas kurang memiliki peran aktif dan tidak berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, tetapi relatif lebih memiliki pengetahuan mengenai program di desa. Hanya akan berperan aktif apabila memiliki jaringan dekat dengan elit tradisional atau adat
- (20) Kelompok marjinal kurang atau tidak memiliki akses informasi dan pengetahuan mengenai program di desa sehingga tidak aktif dalam pertemuan desa. Kelompok ini mengetahui program apabila mereka menjadi target penerima pembangunan di desa seperti BLT atau raskin. Hanya akan mengetahui apabila mereka memiliki jaringan dekat dengan elit tradisional atau adat

Dari deskripsi di atas dapat diperoleh gambaran bahwa PNPM Mandiri selain keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai selama pelaksanaannya sejak tahun 2007-2013 juga masih memiliki kelemahan atau kekurangan yang masih harus diperbaiki. Namun kelemahan atau kekurangan ini justru harus dijadikan sebagai motivasi untuk memperbaiki program ini agar menjadi lebih baik lagi seandainya pemerintahan berikutnya yang terpilih masih akan melanjutkan program PNPM ini sebagai program untuk memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan menekan angka pengangguran.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) (2007-sekarang)

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, menekan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup:

- a. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
- b. Pengembangan kewirausahaan
- c. Peningkatan pasar produk UMKMK
- d. Reformasi regulasi UMKMK

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/pesorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada tahun 2015, "*Tercapainya Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sebesar Rp.20 triliun*" menjadi salah satu target IKU Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. Target tersebut terpenuhi dengan jumlah penyaluran sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.22,75 triliun (113,75%). Jumlah tersebut dicapai dalam empat bulan penyaluran KUR oleh 3 Bank BUMN. Bank dengan kinerja penyaluran KUR tertinggi adalah Bank BRI dengan penyaluran sebesar Rp.16,2 triliun.

Capaian *output*/kinerja yang melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2015 dapat dikategorikan sebagai capaian yang sangat baik. Capaian kinerja ini merupakan hasil koordinasi dan sinergitas yang baik dengan para pemangku kepentingan KUR yang tergabung dalam Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta dengan bank pelaksana, perusahaan penjamin, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dibawah koordinasi dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Output* yang dihasilkan membawa *outcome* yang positif khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Sesuai dengan laporan penyaluran KUR, jumlah debitur yang menerima KUR pada Tahun 2015 mencapai 1.003.533 juta UMKM.

Manfaat Program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirawacana seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM. Total penyaluran KUR tahun 2007-2014 sebesar Rp.178,85 triliun dengan NPL sebesar 3,3%. Tenaga kerja yang berhasil diserap dari program KUR adalah sebanyak 20.344.639. Berdasarkan *workshop* evaluasi KUR dan Rakor Komite Kebijakan KUR pada tanggal 15 Desember 2014, KUR tetap dilanjutkan dengan penguatan regulasi dan perbaikan skemanya.

Hasil evaluasi melalui kajian oleh pihak terkait KUR seperti Bank Dunia dan TNP2K tersebut menjadi salah satu dasar dalam upaya perbaikan program KUR antara lain dengan meningkatkan penyalurannya kepada sektor prioritas seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan industri pengolahan serta kepada usaha mikro dan kecil agar mempunyai *multiplier effect* yang lebih besar kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan relaksasi kebijakan terkait KUR khususnya pada sektor penyaluran, kriteria penerima KUR, dan jenis penyaluran KUR, beberapa Regulasi terkait Relaksasi KUR antara lain:

- a) Permenko 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang memuat beberapa relaksasi kebijakan yaitu : penambahan sektor yang dibiayai ; perluasan penerima KUR; pembiayaan investasi untuk tanaman keras; penambahan jangka waktu, suplesi, dan restrukturisasi KUR Mikro dan KUR Ritel.
- b) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, No.188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR.
- c) Penguatan basis data SIKP dengan dukungan Kementerian teknis, Perda dan TNI 2K.

Dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No.188 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kepmenko 170 Tahun 2015, telah ditetapkan penambahan Bank Pelaksana KUR : KUR Penempatan TKI (Bank Sinarmas, BII Maybank ; KUR Mikro dan KUR Ritel (BPD Kalimantan Barat, BPD Nusa Tenggara Timur) dengan evaluasi dan pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung. Dalam rangka implementasi hal tersebut, Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007 yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam perkembangannya, program KUR telah mengalami beberapa perubahan baik skema maupun regulasi. Salah satu perubahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah demi terus mendukung perkembangan UMKM adalah penurunan suku bunga. Suku bunga KUR pada tahun 2015 - 2016 adalah sebesar 12% yang kemudian pada tahun 2017 diturunkan menjadi 9%. Tahun 2018 ini pemerintah juga menurunkan suku bunga menjadi 7%. Penurunan suku bunga ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan suku bunga kredit menjadi *single digit*.

Perubahan skema, regulasi dan sistem informasi tersebut membawa dampak yang positif bagi kinerja program KUR. Tercatat dari tahun 2015 – 2018, KUR sudah tersalurkan kepada 13.258.016 UMKM dengan total plafon sebesar Rp 317 Triliun. Kinerja penyaluran KUR yang baik tersebut juga diikuti dengan terjaganya kualitas KUR yang tercermin dari tingkat NPL KUR sampai tahun 2018 ini sebesar 1.24%.

Memperhatikan banyaknya *stakeholder* yang terlibat di dalam program KUR serta saling terkait satu dengan yang lain, perlu dilakukan penilaian untuk setiap kategori *stakeholder* dan diberikan penghargaan bagi yang mencapai kinerja terbaik. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan motivasi bagi semua pihak agar dapat meningkatkan kinerja masing-masing. Dalam rangka mengapresiasi kinerja *stakeholder* KUR dalam melaksanakan program KUR tahun 2018, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah terbaik, Penyalur KUR terbaik, dan Penjamin KUR terbaik.

Adapun kinerja penyaluran KUR sampai dengan 31 Oktober 2018 sebesar Rp 317 T dengan *outstanding* Rp 132 T, dan NPL 1,24%. Sedangkan penyaluran KUR tahun 2018, sampai dengan 31 Oktober 2018 sudah mencapai Rp 114 T dgn NPL 0,17% (92% dari target tahun 2018 sebesar Rp 123,801 T). Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR Mikro (65,9%) diikuti dengan skema KUR Kecil (33,8%) dan KUR TKI (0,3%). Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil.

Penyaluran KUR masih didominasi di Pulau Jawa, dengan porsi penyaluran sebesar 55%, diikuti dengan Sumatera 19,3% dan Sulawesi 11,2%. Kinerja penyaluran KUR per provinsi tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia. Penyaluran KUR untuk sektor produksi terus berjalan (*target porsi penyaluran KUR sektor produksi tahun 2018 sebesar 50%*). Sampai dengan 31 Oktober 2018 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa - jasa) sebesar 43,9%

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan strategis UMKM tersebut dalam perekonomian nasional tercermin dari total unit usaha UMKM mencapai

99,9% dari total unit usaha dan kontribusi penyerapan tenaga kerja di UMKM sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja serta kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,34% (BPS, 2017). Strategisnya peranan UMKM dalam perekonomian nasional mendorong Pemerintah untuk terus menerus mengembangkan UMKM. Salah satu program pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diturunkan pada November 2007. Selanjutnya dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM sejalan dengan akan diterbitkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk merubah kebijakan KUR yang lebih pro kerakyatan sebagai berikut: 1) Suku Bunga diturunkan dari 7% menjadi 6%; 2) Total plafon KUR ditingkatkan dari 140 Triliun menjadi 190 Triliun pada tahun 2020, dan akan ditingkatkan bertahap sampai dengan Rp325 Triliun pada tahun 2024; 3) Peningkatan plafon KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur.

Keputusan tersebut disepakati dalam forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yang dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam rangka memperluas UMKM yang mendapatkan pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga yang rendah, maka suku bunga KUR diturunkan dari semula 7% efektif per tahun menjadi sebesar 6% efektif per tahun berlaku mulai 1 Januari 2020. Selain itu, untuk meningkatkan dan memperluas akses KUR, maka pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan total plafon KUR. Pada tahun 2020, total plafon KUR ditingkatkan menjadi Rp190 Triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran di APBN. Plafon tahunan KUR ini akan terus ditingkatkan secara bertahap sampai dengan Rp 325 Triliun pada tahun 2024. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan kebutuhan modal bagi UMKM yang semakin meningkat akibat laju inflasi dan peningkatan produktivitas maka Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR Mikro dari semula paling besar sebesar Rp25 juta per debitur menjadi Rp50 juta per debitur.

Perubahan juga terjadi pada total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan yang semula sebesar Rp100 juta berubah menjadi Rp200 juta.

Sedangkan untuk KUR Mikro sektor produksi, tidak dibatasi. Sejak era pemerintahan presiden Jokowi khususnya lagi sejak tahun 2015 terjadi perubahan signifikan kebijakan KUR dengan perkembangan total realisasi akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2019 sebesar Rp 449,6 Triliun dengan Outstanding Rp 158,1 Triliun dan NPL yang masih terjaga di tingkat 1,23%. Total debitur penerima KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2019 sebanyak 18 juta Debitur, dengan 12 juta NPK yang tidak berulang. Penyaluran KUR Tahun 2019 sampai dengan 30 September 2019 sudah mencapai Rp 115,9 Triliun (82,79%) dari target tahun 2019 sebesar Rp 140 Triliun dengan total debitur KUR sebanyak 4,1 juta debitur KUR. Penyaluran KUR sektor produksi sampai dengan 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60%.

Manfaat KUR juga sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan skala ekonomi usahanya, terlihat dari komposisi penyaluran KUR Mikro sebesar 64,6%, KUR Kecil sebesar 35% dan KUR TKI sebesar 0,4%. Diharapkan perubahan kebijakan KUR sebagaimana diputuskan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada hari ini dapat mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia

3. Balai Latihan Kerja

Pelatihan vokasi yang dinaungi Kementerian Ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Program ini diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah maupun Lembaga Pelatihan Swasta (LPS) milik swasta atau perusahaan. Keduanya memiliki materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.

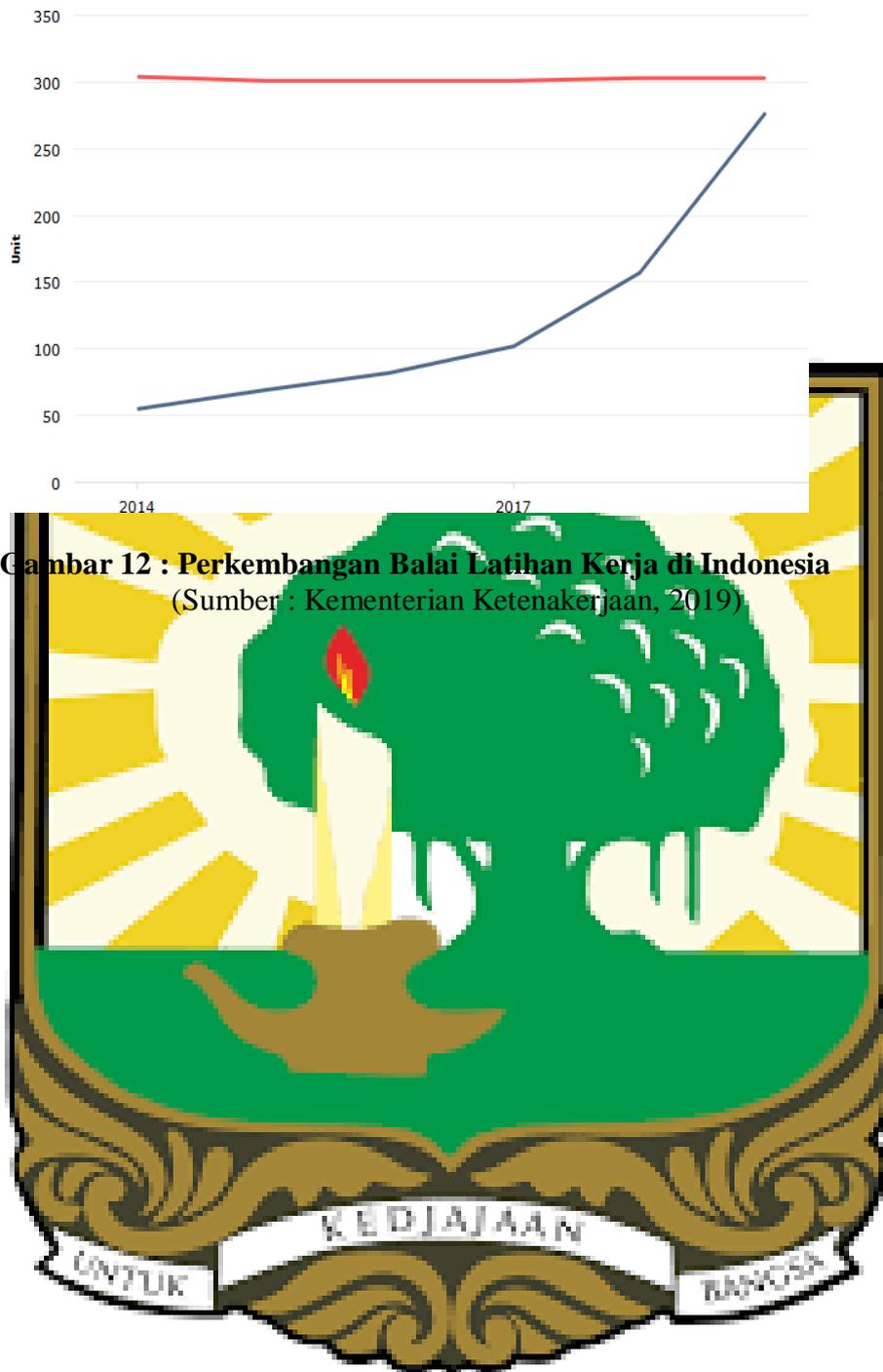
Pelatihan yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja berguna untuk membekali keterampilan kepada peserta dalam berbagai bidang kejuruan dan memberikan motivasi untuk berusaha mandiri. Adapun sasaran kegiatan ini adalah terciptanya tenaga kerja yang terampil, disiplin, dan memiliki etos kerja produktif sehingga mampu mengisi kesempatan kerja yang ada dan mampu menciptakan lapangan kerja melalui usaha mandiri. Balai Latihan Kerja dirancang untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat akan lembaga pelatihan kerja yang berdedikasi mencetak tenaga kerja yang siap terjun ke dalam dunia kerja.

Dengan tersedianya Balai Latihan Kerja dapat menjadi langkah efektif dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja di daerah. Dengan demikian, alumni BLK akan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kerja untuk mengembangkan diri dalam dunia industri maupun usaha wiraswasta secara mandiri karena BLK adalah pilihan, harapan dan karir masa depan yang menjadi tiket pekerja profesional dan pengusaha yang Tangguh.

Fungsi dari Balai Latihan Kerja adalah sebagai wadah kegiatan pelatihan tenaga kerja yang memiliki unit-unit pelatihan di dalamnya dan mendukung calon tenaga kerja yang siap pakai serta berkualitas dan berkompoten sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja yang lain, dapat membuka usaha sendiri dan mengurangi pengangguran, dan memperluas lapangan pekerjaan. Dengan fungsi Balai Latihan Kerja yang dapat mewadahi kegiatan pelatihan tenaga kerja, maka Balai Latihan Kerja dipandang sebagai lembaga yang tepat untuk menjawab persoalan pengangguran dan mengurangi lebarnya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat.

Hingga 2019, BLK yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 303 unit. Sebanyak 19 BLK merupakan Unit Pelaksanaan Teknik Pusat (UPTP) sedangkan 284 BLK merupakan Unit Pelaksanaan Teknik Daerah (UPTD) milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Seluruh unit BLK ini dapat menampung hingga 275 ribu peserta. Berdasarkan kondisi peralatan penunjang, jumlah BLK yang berkategori baik meningkat setiap tahun. Jumlahnya bertambah 55 unit selama periode 2017-2018. Jumlah BLK yang berkategori baik ditargetkan mencapai 277 unit sepanjang tahun 2019.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Pengangguran Terdidik di Indonesia

Objek penelitian adalah seluruh angkatan kerja yang berpendidikan \geq SMA/ sederajat (tenaga kerja terdidik) yang tercatat pada Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus 2017. Pengangguran terdidik yang dimaksud pada penelitian ini adalah angkatan kerja tamatan SMA/ sederajat yang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Adapun karakteristik pengangguran terdidik di Indonesia disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 28 : Karakteristik Pengangguran Terdidik di Indonesia

No	Karakteristik	Keterangan	Jumlah (%)	
			Bekerja	Menganggur
1	Tingkat Pendidikan	Perguruan tinggi	26.63	29.45
		SMA/ sederajat	73.37	70.55
2	Pelatihan kerja	Pernah ikut pelatihan	29.96	35.91
		Belum pernah	70.04	64.09
3	Pengalaman kerja	Berpengalaman	32.76	42.53
		Tidak berpengalaman	67.24	57.47
4	Umur	Tua	75.29	87.96
		Muda	24.71	12.04
5	Gender	Pria	51.91	59.77
		Wanita	48.09	40.23
6	Status perkawinan	Sudah menikah	69.57	83.81
		Belum menikah	30.43	16.19
7	Kedudukan dalam rumah tangga	Kepala rumah tangga	32.47	46.69
		Bukan kepala RT	67.53	53.31
8	Wilayah tempat tinggal	Perkotaan	64.02	63.38
		Pedesaan	35.98	36.62

Sumber : Hasil pengolahan data, 2020 (Lampiran.1)

Tingkat pendidikan yang dimaksud pada penelitian ini adalah tingkat pendidikan formal yang ditempuh pengangguran terdidik yang dibuktikan oleh ijazah terakhir. Tingkat pendidikan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu tamat SMA/ sederajat dan tamat perguruan tinggi. Berdasarkan hasil analisis data diketahui pada umumnya pengangguran terdidik di Indonesia tamat SMA/ sederajat sebanyak 70,55% dan tamat perguruan tinggi sebanyak 29,45%.

Data ini memperlihatkan bahwa pada umumnya pengangguran terdidik adalah hanyalah tamat SMA/ sederajat.

Pelatihan kerja yang dimaksud pada penelitian ini adalah pelatihan kerja yang pernah diikuti oleh pengangguran terdidik dan mendapat sertifikat. Berdasarkan karakteristik pelatihan kerja, diketahui bahwa pada umumnya pengangguran terdidik di Indonesia belum pernah mengikuti pelatihan kerja yaitu sebanyak 64,09% tidak pernah mengikuti pelatihan dan hanya sebanyak 35,91% yang pernah mengikuti pelatihan kerja sedangkan Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya pengangguran terdidik di Indonesia belum memiliki akses yang cukup untuk mengikuti pelatihan kerja sehingga belum banyak yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kerja.

Pengalaman kerja yang dimaksud pada penelitian ini adalah pengalaman kerja yang dimiliki oleh pengangguran terdidik baik yang pengalaman bekerja maupun pengalaman menjadi wirausaha. Mayoritas pengangguran terdidik belum memiliki pengalaman kerja yaitu 57,47 % dan 42,53% yang memiliki pengalaman kerja. Data ini mengindikasikan bahwa pada umumnya pengangguran terdidik di Indonesia adalah mereka yang baru menyelesaikan pendidikannya sehingga belum memiliki pengalaman kerja.

Umur yang dimaksud pada penelitian ini adalah usia pengangguran terdidik. Berdasarkan kelompok umur diketahui bahwa pada umumnya pengangguran terdidik di Indonesia didominasi oleh kelompok umur tua sebanyak sebanyak 87,96% dan kelompok umur muda sebanyak 12,04%. Data ini juga memperlihatkan pengangguran terdidik di Indonesia masih didominasi oleh kelompok umur yang tidak muda lagi yaitu diatas 24 tahun.

Gender yang dimaksud pada penelitian ini adalah jenis kelamin pengangguran terdidik. Berdasarkan data gender diketahui bahwa pada umumnya pengangguran terdidik di Indonesia didominasi oleh pria yaitu sebanyak 59,77% dan wanita sebanyak 40,23%. Data ini juga memperlihatkan bahwa pria lebih banyak menganggur dibandingkan wanita.

Status perkawinan yang dimaksud pada penelitian ini adalah status perkawinan pengangguran terdidik yang terdidik dari sudah menikah dan belum menikah.

Berdasarkan status perkawinan diketahui bahwa pada umumnya pengangguran terdidik di Indonesia yang sudah menikah sebanyak 83,81% dan yang belum menikah sebanyak 15,87%.

Kedudukan dalam rumah tangga yang dimaksud pada penelitian ini adalah kedudukan pengangguran terdidik dalam rumah tangga. Kedudukan dalam rumah tangga dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu sebagai kepala rumah tangga dan bukan kepala rumah tangga. Berdasarkan data kedudukan dalam rumah tangga diketahui bahwa pada umumnya pengangguran terdidik adalah bukan kepala rumah tangga yaitu sebanyak 53,31% dan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga adalah sebanyak 46,69%. Data ini memperlihatkan bahwa masih banyak kepala rumah tangga yang tergolong kepada pengangguran terdidik.

Wilayah tempat tinggal yang dimaksud pada penelitian ini adalah wilayah tempat pengangguran terdidik menetap yang terdiri dari wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan. Berdasarkan wilayah tempat tinggal pada umumnya pengangguran terdidik di Indonesia pada umumnya tinggal di wilayah perkotaan yaitu sebanyak 63,38% dan yang tinggal di pedesaan sebanyak 36,62%. Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya pengangguran terdidik di Indonesia tinggal di wilayah perkotaan.

Durasi menganggur yang dimaksud pada penelitian ini adalah lamanya menganggur dari angkatan kerja memiliki pendidikan SMA/ sederajat dan keatasnya yang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Berikut ini adalah data durasi menganggur dari pengangguran terdidik di Indonesia, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini



Tabel 29 : Karakteristik Durasi Menganggur dari Pengangguran Terdidik

No	Tingkat Pendidikan	Karakteristik	Jumlah (%)	
			0-3 Bulan	> 3 Bulan
1	Tingkat Pendidikan	Perguruan tinggi	29.00	32.75
		SMA/ sederajat	71.00	67.25
2	Pelatihan kerja	Pernah ikut pelatihan	35.48	39.08
		Belum pernah	64.52	60.92
3	Pengalaman kerja	Berpengalaman	42.19	45.07
		Tidak berpengalaman	57.81	54.93
4	Umur	Tua	87.52	91.20
		Muda	12.48	8.80
5	Gender	Pria	59.90	58.80
		Wanita	40.10	41.20
6	Status perkawinan	Sudah menikah	83.38	86.97
		Belum menikah	16.62	13.03
7	Kedudukan dalam rumah tangga	Kepala rumah tangga	46.00	51.76
		Bukan kepala RT	54.00	48.24
8	Wilayah tempat tinggal	Perkotaan	62.86	67.25
		Pedesaan	37.14	32.75

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020 (Lampiran 2)

Berdasarkan hasil analisis data diketahui pada umumnya pengangguran terdidik di Indonesia yang menganggur lebih dari tiga bulan adalah tamat SMA/ sederajat sebanyak 67,25% dan tamat perguruan tinggi hanya 32,75%. Data ini mengindikasikan bahwa tamat SMA/ sederajat akan menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi. Berdasarkan karakteristik pelatihan kerja, diketahui yang menganggur diatas 3 bulan belum pernah mengikuti pelatihan kerja yaitu sebanyak 60,92% dan hanya sebanyak 39,08% yang pernah mengikuti pelatihan kerja. Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya pengangguran terdidik di Indonesia belum memiliki akses yang cukup untuk mengikuti pelatihan kerja.

Pada umumnya pengangguran terdidik yang menganggur di atas 3 bulan belum memiliki pengalaman kerja yaitu sebanyak 54,93% dan hanya sebanyak 45,07% yang sudah memiliki pengalaman kerja. Data ini mengindikasikan bahwa pada umumnya angkatan kerja yang menjadi pengangguran terdidik di Indonesia adalah mereka yang baru menyelesaikan pendidikannya sehingga belum memiliki pengalaman kerja. Berdasarkan data pengalaman kerja diketahui bahwa pada umumnya pengangguran terdidik di Indonesia tidak memiliki pengalaman kerja

dengan durasi menganggur antara 0-3 bulan. Data ini memperlihatkan peluang tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja menjadi pengangguran lebih besar peluangnya dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja.

Berdasarkan kelompok umur diketahui bahwa pada umumnya pengangguran terdidik yang menganggur lebih 3 bulan didominasi oleh kelompok umur tua yaitu sebanyak 91,20% dan kelompok umur muda sebanyak 8,80%. Data ini juga memperlihatkan pengangguran terdidik yang memiliki durasi menganggur 0-3 bulan adalah kelompok umur tua sedangkan yang memiliki durasi menganggur lebih dari 3 bulan adalah pengangguran terdidik yang berada pada kategori muda.

Berdasarkan data gender diketahui bahwa pada umumnya pengangguran terdidik laki-laki yang menganggur diatas 3 bulan sebanyak 58,80% dan wanita sebanyak 41,20%. Data ini juga memperlihatkan bahwa baik pria memiliki durasi menganggur lebih lama dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan status perkawinan diketahui bahwa pada umumnya pengangguran terdidik di Indonesia dengan durasi menganggur lebih 3 bulan adalah yang sudah menikah yakni sebanyak 86,97% dan yang belum menikah sebanyak 13,03%. Juga terlihat bahwa durasi menganggur 0-3 bulan didominasi oleh yang belum menikah tetapi durasi menganggur 3 bulan keatas didominasi oleh pengangguran terdidik yang sudah menikah.

Berdasarkan data kedudukan dalam rumah tangga diketahui bahwa pada umumnya pengangguran terdidik yang menganggur lebih lama adalah kepala rumah tangga yaitu sebanyak 51,76% dan yang berkedudukan sebagai bukan kepala rumah tangga adalah sebanyak 48,24%. Data ini memperlihatkan bahwa pada umumnya kepala rumah tang akan menganggur lebih lama dibandingkan dengan kepala keluarga.

Berdasarkan wilayah tempat tinggal pengangguran terdidik diketahui bahwa pada umumnya pengangguran terdidik yang menganggur lebih lama adalah yang tinggal di wilayah perkotaan yaitu sebanyak 67,25% dan yang bertempat tinggal di wilayah perdesaan adalah sebanyak 32,75%. Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya pengangguran terdidik yang tinggal di wilayah perkotaan akan menganggur lebih lama dibandingkan yang tinggal di desa.

B. Faktor Penentu Pengangguran Terdidik

Pengujian faktor penentu pengangguran terdidik di Indonesia digunakan analisis regresi logistik. Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu dilakukan uji kecocokan model (*goodness of fit*). Uji kecocokan model (*goodness of fit*) dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian mampu memprediksi nilai observasinya (Hosmer dan Lemeshow, 1989). Hasil uji kelayakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 30 : Uji Kelayakan Model

No	Chi-square	Probability	Keterangan
1	6.949,88	0,000	Model layak

Sumber : Output olahan data, 2020 (Lampiran 3)

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa nilai chi-square model pengangguran terdidik 6.949,88 dengan nilai *probability* adalah 0,000. Nilai *probability* lebih kecil dari tingkat kesalahan yang digunakan ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model regresi logistik yang digunakan telah mampu menjelaskan data/cocok, dengan kata lain model regresi logistik layak dipakai untuk analisis selanjutnya karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Penelitian ini melakukan analisis faktor penentu pengangguran terdidik dan durasi menganggur pada tiga tingkatan yaitu tingkat nasional (Indonesia), tingkat pulau (7 pulau) dan tingkat provinsi (34 provinsi). Berikut ini dijelaskan hasil estimasi model pengangguran terdidik dan model durasi menganggur pada masing-masing tingkatan tersebut.

1. Tingkat Nasional

Faktor penentu pengangguran terdidik di Indonesia dianalisis dengan regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis data untuk estimasi model pengangguran terdidik dapat direkap pada tabel berikut ini.

Tabel 31 : Estimasi Model Pengangguran Terdidik di Indonesia

No	Variabel Bebas	Model Penelitian										Odds Ratio
		Model 1		Model 2		Model 3		Model 4		Model 5		
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	
1	Constant	-6.673	***	-7.340	***	-7.336	***	-7.280	***	-6.816	***	0.001
2	Edu	1.273	***	1.313	***	1.313	***	1.041	***	1.052	***	2.865
3	Wt	0.623	***	0.635	***	0.635	***	0.474	***	0.484	***	1.623
4	Exp	0.796	***	0.901	***	0.902	***	0.959	***	1.050	***	2.857
5	Age	1.726	***	0.785	***	0.785	***	0.594	***	0.618	***	1.856
6	Gend			-0.043	***	-0.043	***	0.241	***	0.247	***	1.280
7	Ms			1.173	***	1.173	***	2.096	***	2.094	***	8.119
8	Ph			0.535	***	0.535	***	0.009	***	0.016	***	1.037
9	Ra					-0.007	***	-0.074	***	0.051	***	1.053
10	Edu*Ra							0.390	***	0.396	***	1.486
11	Wt*Ra							0.255	***	0.232	**	1.261
12	Exp*Ra							-0.086	***	-0.043	***	0.912
13	Age*Ra							0.352	***	0.330	***	1.391
14	Gend*Ra							-0.468	***	-0.443	***	0.623
15	Ms*Ra							-1.430	***	-1.442	***	0.241
16	Ph*Ra							0.765	***	0.755	***	2.128
17	Psum									-0.641	***	0.543
18	Pjw									-0.942	***	0.375
19	Pbnt									-0.740	***	0.477
20	Pkal									-0.542	***	0.587
21	Psul									-0.245	***	0.759
22	Pmal									-0.240	***	0.810
Pseudo r-squared		0.092		0.114		0.114		0.119		0.126		

Sumber : Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 3)

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik dapat dituliskan persamaan regresi logistik model pengangguran terdidik sebagai berikut.

Model 1

$$Eu = -6,673 + 1,273 \text{ Edu} + 0,623 \text{ Wt} + 0,796 \text{ Exp} + 1,726 \text{ Age}$$

Model 2

$$Eu = -7,340 + 1,313 \text{ Edu} + 0,635 \text{ Wt} + 0,901 \text{ Exp} + 0,785 \text{ Age} - 0,043 \text{ Gend} + 1,173 \text{ Ms} + 0,535 \text{ Ph}$$

Model 3

$$Eu = -7,366 + 1,313 \text{ Edu} + 0,635 \text{ Wt} + 0,902 \text{ Exp} + 0,785 \text{ Age} - 0,043 \text{ Gend} + 1,173 \text{ Ms} + 0,535 \text{ Ph} - 0,007 \text{ Ra}$$

Model 4

$$Eu = 7,280 + 1,041 Edu + 0,474 Wt + 0,959 Exp + 0,594 Age + 0,241 Gend + 2,096 Ms + 0,009 Ph - 0,074 Ra + 0,390 Edu*Ra + 0,255 Wt*Ra - 0,086 Exp*Ra + 0,352 Age*Ra - 0,468 Gend*Ra - 1,430 Ms*Ra + 0,765 Ph*Ra$$

Model 5

$$Eu = 6,816 + 1,052 Edu + 0,484 Wt + 1,050 Exp + 0,618 Age + 0,247 Gend + 2,094 Ms + 0,036 Ph - 0,051 Ra + 0,396 Edu*Ra + 0,232 Wt*Ra - 0,093 Exp*Ra + 0,330 Age*Ra - 0,473 Gend*Ra - 1,422 Ms*Ra + 0,755 Ph*Ra - 0,611 Psum - 0,982 Pjw - 0,740 Punt - 0,531 Pka - 0,275 Psul - 0,210 Pmal$$

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik pada model 1 untuk menguji pengaruh kemampuan tenaga kerja terdidik terhadap probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik di Indonesia diketahui bahwa kemampuan tenaga kerja terdidik yang diproksi dari tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan umur berpengaruh signifikan terhadap probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik. Artinya, semakin rendah tingkat pendidikan angkatan kerja, tidak pernah ikut pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja dan memiliki umur yang muda memiliki probabilitas menganggur lebih besar dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi, pernah ikut pelatihan kerja, memiliki pengalaman kerja dan berusia tidak muda lagi.

Pada model 2 diuji pengaruh kemampuan tenaga kerja terdidik (tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan umur) dan karakteristik rumah tangga (jenis kelamin, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga) terhadap probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik. Berdasarkan hasil analisis data diketahui kemampuan tenaga kerja terdidik (tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan umur) dan karakteristik rumah tangga (status perkawinan dan kedudukan dalam rumah tangga) berpengaruh signifikan terhadap probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik. Sedangkan jenis kelamin tidak mempengaruhi probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik. Artinya, semakin rendah tingkat pendidikan angkatan kerja, tidak pernah ikut pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, berumur yang muda, belum menikah dan bukan kepala rumah tangga memiliki probabilitas menganggur lebih besar dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi, pernah ikut pelatihan kerja, memiliki pengalaman kerja,

berusia tidak muda lagi, sudah menikah dan berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga.

Pada model 3 diuji pengaruh kemampuan tenaga kerja terdidik (tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan umur) dan karakteristik rumah tangga (jenis kelamin, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga) serta wilayah tempat tinggal terhadap probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik. Berdasarkan hasil analisis data diketahui kemampuan tenaga kerja terdidik (tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan umur) dan karakteristik rumah tangga (status perkawinan dan kedudukan dalam rumah tangga) berpengaruh signifikan terhadap probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik. Sedangkan jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal tidak mempengaruhi probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik. Artinya, semakin rendah tingkat pendidikan angkatan kerja, tidak pernah ikut pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, berumur yang muda, belum menikah dan bukan kepala rumah tangga memiliki probabilitas menganggur lebih besar dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi, pernah ikut pelatihan kerja, memiliki pengalaman kerja, berusia tidak muda lagi, sudah menikah dan berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga.

Pada model 4 diuji pengaruh kemampuan tenaga kerja terdidik (tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan umur), karakteristik rumah tangga (jenis kelamin, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga) dan wilayah tempat tinggal serta interaksi kemampuan tenaga kerja terdidik dan karakteristik rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal terhadap probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik. Berdasarkan hasil analisis data diketahui tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, status perkawinan, interaksi tingkat pendidikan dengan wilayah tempat tinggal, interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal, interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal, interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal, interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal, interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik. Sedangkan kedudukan dalam rumah

tangga, wilayah tempat tinggal dan interaksi pengalaman kerja dengan wilayah tempat tinggal tidak mempengaruhi probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik.

Pada model 5 diuji pengaruh kemampuan tenaga kerja terdidik, karakteristik rumah tangga, wilayah tempat tinggal, interaksi kemampuan tenaga kerja terdidik

dan karakteristik rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal serta wilayah kepulauan terhadap probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik. Berdasarkan

hasil analisis data diketahui tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, status perkawinan, interaksi tingkat pendidikan dengan

wilayah tempat tinggal, interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal,

interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal, interaksi jenis kelamin dengan

wilayah tempat tinggal, interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal,

interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal serta

wilayah pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi

berpengaruh signifikan terhadap probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik.

Sedangkan kedudukan dalam rumah tangga, wilayah tempat tinggal dan interaksi

pengalaman kerja dengan wilayah tempat tinggal dan wilayah pulau maluku tidak

mempengaruhi probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik. Terlihat juga bahwa

peluang bekerja paling besar terletak di pulau Maluku yaitu sebesar 8,1% dan

terendah pada pulau Jawa sebesar 37,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan

kerja yang berada di pulau Jawa memiliki peluang menganggur lebih tinggi

dibandingkan dengan angkatan kerja yang berada di pulau Maluku.

Berikut ini penjelasan hasil analisis model pengangguran terdidik (model 5)

sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik, angkatan kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi. Nilai *odds ratio* 2,865 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki probabilitas menganggur 2,865 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi.
2. Pelatihan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik, angkatan kerja terdidik yang belum pernah mengikuti pelatihan memiliki

peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja. Nilai *odds ratio* 1,623 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik yang belum mengikuti pelatihan kerja memiliki probabilitas menganggur 1,623 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja.

3. Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik, angkatan kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja. Nilai *odds ratio* 2,857 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki probabilitas menganggur 2,857 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja.
4. Umur berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik, angkatan kerja terdidik yang berumur muda memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berumur tua. Nilai *odds ratio* 1,856 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik yang muda memiliki probabilitas menganggur 1,856 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah tua.
5. Jenis kelamin berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik, angkatan kerja terdidik perempuan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan laki-laki. Nilai *odds ratio* 1,280 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik perempuan memiliki probabilitas menganggur 1,280 kali lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.
6. Status perkawinan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik, angkatan kerja terdidik yang belum menikah memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah menikah. Nilai *odds ratio* 8,119 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik yang belum menikah memiliki probabilitas menganggur 8,119 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sudah menikah.
7. Kedudukan dalam rumah tangga tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik, hal ini menunjukkan probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik tidak dipengaruhi oleh kedudukan dalam rumah tangga angkatan.

8. Wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik, angkatan kerja terdidik yang tinggal di pedesaan belum tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang tinggal di kota.
9. Interaksi tingkat pendidikan dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik, angkatan kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat dan tinggal di pedesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 1,486 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat dan tinggal di pedesaan memiliki probabilitas menganggur 1,486 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi dan tinggal di perkotaan.
10. Interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik, angkatan kerja terdidik yang tidak pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di pedesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 1,261 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik yang tidak pernah mengikuti pelatihan kerja dan tinggal di pedesaan memiliki probabilitas menganggur 1,261 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di perkotaan.
11. Interaksi pengalaman kerja dengan wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik, angkatan kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja dan tinggal di pedesaan belum tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja dan tinggal di perkotaan.
12. Interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik, angkatan kerja terdidik yang berusia muda dan tinggal di pedesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang tidak muda dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 1,391 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik yang berumur muda dan tinggal di pedesaan memiliki probabilitas menganggur 1,391 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak muda dan tinggal di perkotaan.

13. Interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik, angkatan kerja terdidik laki-laki dan tinggal perkotaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan perempuan dan tinggal di perdesaan. Nilai *odds ratio* 0,623 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik laki-laki dan tinggal di perkotaan memiliki probabilitas menganggur 0,623 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dan tinggal di perdesaan.
14. Interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terdidik, angkatan kerja terdidik yang sudah kawin dan tinggal perkotaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang belum kawin dan tinggal di perdesaan. Nilai *odds ratio* 0,241 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik yang sudah kawin dan tinggal di perkotaan memiliki probabilitas menganggur 0,241 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum kawin dan tinggal di perdesaan.
15. Interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik, angkatan kerja terdidik yang berkedudukan bukan kepala rumah tangga dan tinggal di perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan kepala keluarga dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 2,128 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik yang bukan kepala rumah tangga dan tinggal di perdesaan memiliki probabilitas menganggur 2,128 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dan tinggal di perkotaan.
16. Koefisien variabel pulau Sumatera adalah -0,611 dengan *odds ratio* sebesar 0,543 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik di pulau Sumatera memiliki probabilitas menganggur 0,543 kali lebih rendah dibandingkan wilayah pulau lainnya di Indonesia. Artinya seorang angkatan kerja yang berada di pulau Sumatera memiliki peluang bekerja sebesar 54,3 persen dibandingkan dengan peluang bekerja di pulau lainnya.
17. Koefisien variabel pulau Jawa adalah -0,982 dengan *odds ratio* sebesar 0,375 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik di pulau Jawa memiliki

probabilitas menganggur 0,375 kali lebih rendah dibandingkan wilayah pulau lainnya di Indonesia. Artinya seorang angkatan kerja yang berada di pulau Jawa memiliki peluang bekerja sebesar 37,5 persen dibandingkan dengan peluang bekerja di pulau lainnya.

18. Koefisien variabel pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah -0.740 dengan *odds ratio* sebesar $0,477$ menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik di Bali dan Nusa Tenggara memiliki probabilitas menganggur $0,477$ kali lebih rendah dibandingkan wilayah pulau lainnya di Indonesia. Artinya seorang angkatan kerja yang berada di pulau Bali dan Nusa Tenggara memiliki peluang bekerja sebesar $47,7$ persen dibandingkan dengan peluang bekerja di pulau lainnya.
19. Koefisien variabel pulau Kalimantan adalah -0.532 dengan *odds ratio* sebesar $0,587$ menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik di pulau Kalimantan memiliki probabilitas menganggur $0,587$ kali lebih rendah dibandingkan wilayah pulau lainnya di Indonesia. Artinya seorang angkatan kerja yang berada di pulau Kalimantan memiliki peluang bekerja sebesar $58,7$ persen dibandingkan dengan peluang bekerja di pulau lainnya.
20. Koefisien variabel pulau Sulawesi adalah $-0,275$ dengan *odds ratio* sebesar $0,759$ menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik di pulau Sulawesi memiliki probabilitas menganggur $0,759$ kali lebih rendah dibandingkan wilayah pulau lainnya di Indonesia. Artinya seorang angkatan kerja yang berada di pulau Kalimantan memiliki peluang bekerja sebesar $75,9$ persen dibandingkan dengan peluang bekerja di pulau lainnya.
21. Koefisien variabel pulau Maluku adalah $-0,210$ dengan *odds ratio* sebesar $0,810$ menunjukkan bahwa angkatan kerja terdidik di pulau Maluku memiliki probabilitas menganggur $0,810$ kali lebih rendah dibandingkan wilayah pulau lainnya di Indonesia. Artinya seorang angkatan kerja yang berada di pulau Papua memiliki peluang bekerja sebesar $81,0$ persen dibandingkan dengan peluang bekerja di pulau lainnya.

2. Tingkat Pulau

Indonesia terbagi menjadi 7 wilayah kepulauan yaitu pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Rekapitulasi hasil analisis data model pengangguran terdidik pada masing-masing pulau di Indonesia dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 32 : Rekapitulasi Faktor Penentu Pengangguran Terdidik Pada Masing-Masing Pulau

No	Pulau	Variabel Bebas													Gnd *Ra	Ms* Ra	Ph* Ra
		Con	Wt	Exp	Age	Gend	Ms	Ph	Ra	Edu *Ra	Wt* Ra	Exp *Ra	Age *Ra				
1	Sumatera	2.372 ***	0.353 **	1.08 ***	1.652 ***	0.166	0.826 ***	0.751 ***	0.134	0.504	0.512 *	0.254 ***	-0.671 ***	-0.457 ***	-0.27	0.423	
2	Jawa	2.375 ***	0.603 ***	0.881 ***	0.288	0.004	1.47 ***	0.426	0.179	-0.158	0.048	0.029	0.746 **	-0.161	-1.072 ***	0.478	
3	Bali & N. T	3.003 ***	0.458	1.022 ***	0.202	0.287	2.72 ***	-1.268 ***	0.451	0.03	0.065	-0.37	0.005	-0.284	-1.984 ***	1.678 ***	
4	Kalimantan	2.681 ***	0.24	0.718 ***	-0.574 **	0.667 ***	3.146 ***	-0.869 **	1.005 *	-0.723	0.834 ***	0.134	1.169 ***	-0.86 ***	-2.334 ***	1.028 **	
5	Sulawesi	1.458 ***	0.689 ***	0.819 ***	0.179	0.257 *	3.427 ***	-0.809 ***	0.428	-0.28	0.159	0.179	0.49 *	-0.246	-2.813 ***	1.285 ***	
6	Maluku	2.687 ***	1.151 ***	1.588 ***	0.074	0.319	4.652 ***	0.425	1.142	-1.191	-0.124	0.159	1.173 **	-0.629	-2.1 *	1.696	
7	Papua	-1.455 ***	0.887 ***	1.631 ***	2.206 ***	-0.002	5.144 ***	2.463 ***	0.125	0.02	-0.523	0.18	1.248 **	-0.908 **	-1.493	-0.027	

Sumber : Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 4)

Berdasarkan hasil analisis data model pengangguran terdidik pada wilayah kepulauan di Indonesia diketahui bahwa tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan status perkawinan adalah variabel yang mempengaruhi probabilitas menganggur angkatan kerja terdidik di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pada masing-masing wilayah kepulauan di Indonesia seorang angkatan kerja terdidik menjadi pengangguran dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, status perkawinan. Artinya, angkatan kerja yang hanya tamat SMA/ sederajat, belum memiliki pengalaman kerja dan belum menikah memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi, memiliki pengalaman kerja dan sudah menikah/berkeluarga. Namun di pulau Papua ditemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negative terhadap pengangguran terdidik, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja di pulau Papua maka semakin besar peluangnya untuk menganggur.

Artinya, di pulau Papua angkatan kerjanya yang tamat perguruan tinggi memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan SMA/ sederajat.

Berdasarkan hasil analisis data model pengangguran terdidik pada masing-masing wilayah kepulauan di Indonesia diketahui bahwa terjadi adanya perbedaan faktor penentu pengangguran terdidik setiap wilayah kepulauan di Indonesia. Pada wilayah pulau Sumatera probabilitas pengangguran terdidik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga, interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal, interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal, dan interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal. Tenaga kerja terdidik yang hanya tamatan SMA/ sederajat, tidak pernah ikut pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, berumur muda, belum menikah dan berkedudukan bukan sebagai kepala keluarga memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi pernah ikut pelatihan kerja, memiliki pengalaman kerja, berumur tidak muda lagi, sudah menikah dan berkedudukan bukan kepala keluarga. Selanjutnya juga ditemukan bahwa tenaga kerja yang tidak pernah ikut pelatihan dan tinggal di wilayah perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang pernah ikut pelatihan dan tinggal di wilayah perkotaan.

Pada wilayah pulau Jawa probabilitas pengangguran terdidik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, status perkawinan, interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal, interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal. Tenaga kerja terdidik yang hanya tamatan SMA/ sederajat, tidak pernah ikut pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, dan belum menikah memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi, pernah ikut pelatihan kerja, memiliki pengalaman kerja, dan sudah menikah. Selanjutnya juga ditemukan bahwa tenaga kerja yang berumur muda dan tinggal di wilayah perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berumur tidak muda lagi dan tinggal di wilayah perkotaan.

Pada wilayah pulau Bali dan Nusa Tenggara probabilitas pengangguran terdidik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, status perkawinan, dan kedudukan dalam rumah tangga, interaksi status perkawinan dengan wilayah

tempat tinggal, interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal. Tenaga kerja terdidik yang hanya tamatan SMA/ sederajat, tidak memiliki pengalaman kerja, belum menikah dan non kepala keluarga memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi, memiliki pengalaman kerja, sudah menikah dan berkedudukan sebagai kepala keluarga. Selanjutnya juga ditemukan bahwa tenaga kerja yang berkedudukan sebagai non kepala keluarga dan tinggal di wilayah perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dan tinggal di wilayah perkotaan.

Pada wilayah pulau Kalimantan probabilitas pengangguran terdidik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan kedudukan dalam rumah tangga, interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal, interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal, interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal, interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal, interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal. Tenaga kerja terdidik yang hanya tamatan SMA/ sederajat, tidak memiliki pengalaman kerja, berumur muda, perempuan, belum menikah dan non kepala keluarga memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi, memiliki pengalaman kerja, berumur tidak muda lagi, laki-laki, sudah menikah dan berkedudukan sebagai kepala keluarga. Selanjutnya juga ditemukan bahwa tenaga kerja yang belum pernah ikut pelatihan kerja, berumur muda, perempuan, belum menikah dan berkedudukan sebagai non kepala keluarga dan tinggal di wilayah perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang pernah ikut pelatihan kerja, berumur tidak muda, laki-laki, sudah menikah dan berkedudukan sebagai kepala keluarga dan tinggal di wilayah perdesaan.

Pada wilayah pulau Sulawesi probabilitas pengangguran terdidik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, jenis kelamin, status perkawinan, dan kedudukan dalam rumah tangga, interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal, interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal, interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal. Tenaga kerja

terdidik yang hanya tamatan SMA/ sederajat, tidak pernah ikut pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, perempuan, belum menikah dan non kepala keluarga memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi, pernah ikut pelatihan kerja, memiliki pengalaman kerja, laki-laki, sudah menikah dan berkedudukan sebagai kepala keluarga. Selanjutnya juga ditemukan bahwa tenaga kerja yang berumur muda dan berkedudukan sebagai non kepala keluarga yang tinggal di wilayah perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berumur tidak muda dan berkedudukan sebagai kepala keluarga dan tinggal di wilayah perdesaan.

Pada wilayah pulau Maluku probabilitas pengangguran terdidik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, status perkawinan, dan kedudukan dalam rumah tangga, interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal, interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal. Tenaga kerja terdidik yang hanya tamatan SMA/ sederajat, tidak pernah ikut pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, dan belum menikah memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi, pernah ikut pelatihan kerja, memiliki pengalaman kerja, dan sudah menikah. Selanjutnya juga ditemukan bahwa tenaga kerja yang berumur muda dan tinggal di wilayah perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berumur tidak muda dan tinggal di wilayah perkotaan.

Pada wilayah pulau Papua probabilitas pengangguran terdidik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, status perkawinan, dan kedudukan dalam rumah tangga, interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal, interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal. Tenaga kerja terdidik yang tidak pernah ikut pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, berumur muda dan belum menikah serta non kepala keluarga memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang pernah ikut pelatihan kerja, memiliki pengalaman kerja, berumur tidak muda, sudah menikah dan kepala keluarga. Selanjutnya juga ditemukan bahwa tenaga kerja tamatan perguruan tinggi memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan SMA/ sederajat. Selanjutnya, juga ditemukan bahwa tenaga kerja yang berumur muda dan tinggal di

wilayah perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berumur tidak muda dan tinggal di wilayah perkotaan.

Berikut ini adalah hasil analisis faktor penentu pengangguran terdidik di pulau Sumatera, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 33 : Faktor Penentu Pengangguran Terdidik di Pulau Sumatera

No	Variabel Bebas	Model Penelitian							
		Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig
1	Constant	-8.134	***	-8.969	***	-9.043	***	-9.054	***
2	Edu	2.635	***	2.681	***	2.688	***	2.72	***
3	Wt	0.531	***	0.558	***	0.549	***	0.53	**
4	Exp	0.854	***	0.938	***	0.930	***	0.80	***
5	Age	1.985	***	1.233	***	1.240	***	1.52	***
6	Cend			-0.088		-0.092		0.66	
7	Ms			0.664	***	0.657	***	0.26	***
8	Ph			1.005	***	1.010	***	0.51	***
9	Ra					0.125		0.34	
10	Edu*Ra							0.04	
11	Wt*Ra							0.13	*
12	Exp*Ra							-0.254	
13	Age*Ra							-0.571	***
14	Cend*Ra							-0.57	***
15	Ms*Ra							-0.270	
16	Ph*Ra							0.23	
Pseudo r-squared		0.128		0.143		0.144		0.147	

Sumber : Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 4)

Berdasarkan hasil analisis data model pengangguran terdidik di pulau Sumatera diketahui bahwa probabilitas tenaga kerja terdidik menjadi pengangguran dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga, interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal, interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal dan interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal. Adapun bentuk pengaruh masing-masing variabel di pulau Sumatera dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sumatera, tenaga kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi. Nilai *odds ratio* 10,723 menunjukkan bahwa tenaga kerja

terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki probabilitas menganggur 10,723 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi.

2. Pelatihan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sumatera, tenaga kerja terdidik yang belum pernah mengikuti pelatihan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja. Nilai *odds ratio* 1,423 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang belum mengikuti pelatihan kerja memiliki probabilitas menganggur 1,423 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja.
3. Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sumatera, tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja. Nilai *odds ratio* 2,946 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki probabilitas menganggur 2,946 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja.
4. Umur berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sumatera, tenaga kerja terdidik yang berumur muda memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berumur tua. Nilai *odds ratio* 5,215 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang muda memiliki probabilitas menganggur 5,215 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah tua.
5. Jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sumatera. Probabilitas tenaga kerja terdidik menjadi pengangguran di pulau Sumatera tidak lagi dipengaruhi atau ditentukan oleh jenis kelamin. Artinya tidak adanya diskriminasi gender di pulau Sumatera dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan.
6. Status perkawinan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sumatera, tenaga kerja terdidik yang belum kawin memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah kawin. Nilai *odds ratio* 2,283 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang belum

menikah memiliki probabilitas menganggur 2,283 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sudah menikah.

7. Kedudukan dalam rumah tangga berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik, tenaga kerja terdidik yang berkedudukan bukan kepala rumah tangga memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan kepala rumah tangga. Nilai *odds ratio* 2,120 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang bukan kepala keluarga memiliki probabilitas menganggur 2,120 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepala rumah tangga.
8. Wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sumatera, tenaga kerja terdidik yang tinggal di pedesaan belum tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang tinggal di kota.
9. Interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sumatera, tenaga kerja terdidik yang tidak pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di pedesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di kota. Nilai *odds ratio* 1,367 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang tidak pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di desa memiliki probabilitas menganggur 1,367 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di kota.
10. Interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sumatera, tenaga kerja terdidik yang berumur tidak muda dan tinggal di perkotaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berumur muda dan tinggal di pedesaan. Nilai *odds ratio* 0,511 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang berumur tidak muda dan tinggal di kota memiliki probabilitas menganggur 0,511 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berumur muda dan tinggal di desa.
11. Interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sumatera, tenaga kerja terdidik laki-laki dan tinggal di kota memiliki peluang lebih besar menganggur

dibandingkan dengan yang perempuan dan tinggal di desa. Nilai *odds ratio* 0,633 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik laki-laki dan tinggal di kota memiliki probabilitas menganggur 0,633 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dan tinggal di desa.

Berikut ini adalah hasil analisis faktor penentu pengangguran terdidik di pulau Jawa, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 34 : Faktor Penentu Pengangguran Terdidik di Pulau Jawa

No	Variabel Bebas	Model 1		Model 2		Model 3		Model 3	
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig
1	Constant	-7.773	***	-8.400	***	-8.547	***	-8.561	***
2	Edu	2.182	***	2.183	***	2.194	***	2.125	***
3	Vt	0.635	***	0.639	***	0.637	***	0.603	***
4	Exp	0.842	***	0.902	***	0.902	***	0.881	***
5	Age	1.533	***	0.843	***	0.857	***	0.288	
6	Gend			-0.117		-0.125		0.004	
7	Ms			0.652	***	0.638	***	1.470	***
8	Ph			0.801	***	0.812	***	0.426	
9	Ra					0.168		0.279	
10	Edu*Ra							-0.158	
11	Vt*Ra							0.048	
12	Exp*Ra							0.029	
13	Age*Ra							0.146	**
14	Gend*Ra							-0.161	
15	Ms*Ra							-1.072	***
16	Ph*Ra							0.478	
Pseudo_r-squared		0.091		0.103		0.104		0.106	

Sumber : Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 4)

Berdasarkan hasil analisis data model pengangguran terdidik di pulau Jawa diketahui bahwa probabilitas tenaga kerja terdidik menjadi pengangguran di pulau Jawa dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, status perkawinan, interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal. Adapun bentuk pengaruh masing-masing variabel di pulau Jawa dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Jawa, tenaga kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan perguruan

tinggi. Nilai *odds ratio* 10,227 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki probabilitas menganggur 10,227 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi.

2. Pelatihan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Jawa, tenaga kerja terdidik yang belum pernah mengikuti pelatihan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja. Nilai *odds ratio* 1,827 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang belum mengikuti pelatihan kerja memiliki probabilitas menganggur 1,827 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja
3. Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Jawa, tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja. Nilai *odds ratio* 2,414 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki probabilitas menganggur 2,414 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja.
4. Umur tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Jawa, tenaga kerja terdidik yang berumur muda belum tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berumur tua.
5. Jenis kelamin tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Jawa, artinya tenaga kerja probabilitas pengangguran terdidik tidak ditentukan oleh jenis kelamin.
6. Status perkawinan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Jawa, tenaga kerja terdidik yang belum kawin memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah kawin. Nilai *odds ratio* 4,350 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang belum menikah memiliki probabilitas menganggur 4,350 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sudah menikah.
7. Kedudukan dalam rumah tangga tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Jawa, tenaga kerja terdidik yang berkedudukan

bukan kepala rumah tangga belum tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan kepala rumah tangga.

8. Wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Jawa, tenaga kerja terdidik yang tinggal di pedesaan belum tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang tinggal di kota.
9. Interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Jawa, tenaga kerja terdidik yang berumur muda dan tinggal di pedesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berumur tidak muda dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 2,109 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang berumur muda dan tinggal di desa memiliki probabilitas menganggur 2,109 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berumur tidak muda dan tinggal di kota.
10. Interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Jawa, tenaga kerja sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di kota memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang bukan kepala rumah tangga dan tinggal di desa. Nilai *odds ratio* 0,342 menunjukkan bahwa tenaga kerja berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di kota memiliki probabilitas menganggur 0,342 kali lebih tinggi dibandingkan dengan bukan kepala rumah tangga dan tinggal di desa.

Berikut ini adalah hasil analisis faktor penentu pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusatenggara, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.



Tabel 35 : Faktor Penentu Pengangguran Terdidik di Bali dan Nusatenggara

No	Variabel Bebas	Model Penelitian							
		Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig
1	Constant	-7.912	***	-8.441	***	-8.575	***	-8.735	***
2	Edu	2.995	***	3.097	***	3.102	***	3.093	***
3	Wt	0.509	***	0.498	***	0.482	***	0.458	
4	Exp	0.656	***	0.813	***	0.808	***	1.022	***
5	Age	0.972	***	0.153		0.164		0.202	
6	Cend	0.441	***	0.441	***	0.132		0.287	
7	Ms			1.329	***	1.315	***	1.20	***
8	Ph			-0.032		-0.015		-0.268	***
9	Ra					0.209		0.451	
10	Edu*Ra							0.030	
11	Wt*Ra							0.065	
12	Exp*Ra							-0.070	
13	Age*Ra							0.005	
14	Cend*Ra							-0.284	
15	Ms*Ra							-0.284	***
16	Ph*Ra							0.078	***
Pseudo r-squared		0.076		0.097		0.098		0.110	

Sumber: Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 4)

Berdasarkan hasil analisis data model pengangguran pulau Bali dan Nusa Tenggara diketahui bahwa probabilitas pengangguran terdidik dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, pengalaman kerja, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga, interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal dan interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal. Adapun bentuk pengaruh masing-masing variabel di pulau Bali dan Nusa Tenggara dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara, tenaga kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi. Nilai *odds ratio* 22,035 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki probabilitas menganggur 22,035 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi.
2. Pelatihan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara, tenaga kerja terdidik yang belum pernah

mengikuti pelatihan belum tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja.

3. Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara, tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja. Nilai *odds ratio* 2,778 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki probabilitas menganggur 2,778 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja.
4. Umur tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara, tenaga kerja terdidik yang berumur muda belum tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berumur tua.
5. Jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara, tenaga kerja terdidik laki-laki memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan perempuan.
6. Status perkawinan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara, tenaga kerja terdidik yang belum kawin memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah kawin. Nilai *odds ratio* 15,175 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang belum menikah memiliki probabilitas menganggur 15,171 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sudah menikah.
7. Kedudukan dalam rumah tangga berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara, tenaga kerja terdidik yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang bukan kepala rumah tangga. Nilai *odds ratio* 0,281 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang sudah berkedudukan sebagai kepala rumah tangga memiliki probabilitas menganggur 0,281 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sudah yang bukan kepala rumah tangga.

8. Wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara, tenaga kerja terdidik yang tinggal di perdesaan belum tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang tinggal di kota.
9. Interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara, tenaga kerja terdidik yang sudah menikah dan tinggal di perkotaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang belum menikah dan tinggal di perdesaan. Nilai *odds ratio* 0,137 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang sudah menikah dan tinggal di kota memiliki probabilitas menganggur 0,137 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum menikah dan tinggal di kota.
10. Interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di Bali dan Nusa Tenggara, tenaga kerja terdidik yang berkedudukan bukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 5,355 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang berkedudukan bukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di perdesaan memiliki probabilitas menganggur 5,355 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di perkotaan.

Berikut ini adalah hasil analisis faktor penentu pengangguran terdidik di pulau Kalimantan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.



Tabel 36 : Faktor Penentu Pengangguran Terdidik di Kalimantan

No	Variabel Bebas	Model Penelitian							
		Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig
1	Constant	-7.029	***	-7.421	***	-7.537	***	-8.255	***
2	Edu	1.991	***	2.028	***	2.043	***	2.631	***
3	Wt	0.817	***	0.831	***	0.824	***	0.240	
4	Exp	0.742	***	0.839	***	0.835	***	0.718	***
5	Age	1.127	***	0.114		0.123		-0.574	**
6	Cend	0.132		0.124		0.124		0.667	***
7	Ms	1.645	***	1.636	***	1.636	***	1.46	***
8	Ph			-0.175		-0.169		-0.869	**
9	Ra					0.166		1.005	*
10	Edu*Ra							-0.723	
11	Wt*Ra							0.334	***
12	Exp*Ra							0.334	
13	Age*Ra							1.169	***
14	Cend*Ra							-0.860	***
15	Ms*Ra							-2.334	***
16	Ph*Ra							1.028	**
Pseudo r-squared		0.077		0.108		0.109		0.126	

Sumber: Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 4)

Berdasarkan hasil analisis data model pengangguran terdidik diketahui bahwa probabilitas tenaga kerja terdidik menjadi pengangguran di pulau Kalimantan dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga, wilayah tempat tinggal, interaksi pelatihan dengan wilayah tempat tinggal, interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal, interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal, interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal dan interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal. Adapun bentuk pengaruh masing-masing variabel di Kalimantan dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Kalimantan, tenaga kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi. Nilai *odds ratio* 13,894 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki probabilitas menganggur 13,894 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi.

2. Pelatihan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Kalimantan. Artinya probabilitas pengangguran terdidik di pulau Kalimantan tidak dipengaruhi oleh pelatihan kerja.
3. Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Kalimantan, tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja. Nilai *odds ratio* 2,049 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki probabilitas menganggur 2,049 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja.
4. Umur berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Kalimantan, tenaga kerja terdidik yang berumur tidak muda memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang masih muda. Nilai *odds ratio* 0,563 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang tidak muda lagi memiliki probabilitas menganggur 0,563 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang masih muda.
5. Jenis kelamin berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Kalimantan, tenaga kerja terdidik perempuan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan laki-laki. Nilai *odds ratio* 1,948 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik perempuan memiliki probabilitas menganggur 1,948 kali lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.
6. Status perkawinan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Kalimantan, tenaga kerja terdidik yang belum kawin memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah kawin. Nilai *odds ratio* 23,253 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang belum menikah memiliki probabilitas menganggur 23,253 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sudah menikah.
7. Kedudukan dalam rumah tangga berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Kalimantan, tenaga kerja terdidik yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang bukan kepala rumah tangga. Nilai *odds*

ratio 0,419 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga menikah memiliki probabilitas menganggur 0,419 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berkedudukan bukan sebagai kepala rumah tangga.

8. Wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Kalimantan, tenaga kerja terdidik yang tinggal di perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang tinggal di kota. Nilai *odds ratio* 2,732 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang tinggal di perdesaan memiliki probabilitas menganggur 2,732 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan.
9. Interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di Kalimantan, tenaga kerja terdidik yang tidak pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang pernah mengikuti pelatihan kerja dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 2,301 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang tidak pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di perdesaan memiliki probabilitas menganggur 2,301 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di perkotaan.
10. Interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di Kalimantan, tenaga kerja terdidik yang muda dan tinggal di perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang tidak muda dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 3,218 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang muda dan tinggal di perdesaan memiliki probabilitas menganggur 3,218 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak muda dan tinggal di perkotaan.
11. Interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik di Kalimantan, tenaga kerja terdidik laki-laki dan tinggal di kota memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan perempuan dan tinggal di desa. Nilai *odds ratio* 0,423 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik laki-laki dan tinggal di kota memiliki

probabilitas menganggur 0,423 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang perempuan dan tinggal di desa.

12. Interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Kalimantan, tenaga kerja terdidik yang sudah menikah dan tinggal di perkotaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang belum menikah dan tinggal di pedesaan. Nilai *odds ratio* 0,097 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang sudah menikah dan tinggal di kota memiliki probabilitas menganggur 0,097 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum menikah dan tinggal di desa.

13. Interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di Kalimantan, tenaga kerja terdidik yang berkedudukan bukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di pedesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 2,795 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang berkedudukan bukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di pedesaan memiliki probabilitas menganggur 2,795 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di perkotaan.

Berikut ini adalah hasil analisis faktor penentu pengangguran terdidik di pulau Sulawesi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.



Tabel 37 : Faktor Penentu Pengangguran Terdidik di Pulau Sulawesi

No	Variabel Bebas	Model Penelitian							
		Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig
1	Constant	-6.481	***	-7.220	***	-7.212	***	-7.509	***
2	Edu	1.540	***	1.666	***	1.664	***	1.468	***
3	Wt	0.757	***	0.773	***	0.773	***	0.689	***
4	Exp	0.777	***	0.914	***	0.915	***	0.819	***
5	Age	1.451	***	0.364	***	0.364	***	0.179	
6	Cend			0.137	***	0.138	***	0.257	*
7	Ms			1.671	***	1.672	***	1.27	***
8	Ph			0.121		0.120		-0.809	***
9	Ra					-0.013		0.228	
10	Edu*Ra							0.280	
11	Wt*Ra							0.259	
12	Exp*Ra							0.279	
13	Age*Ra							0.290	*
14	Cend*Ra							-0.246	
15	Ms*Ra							-2.313	***
16	Ph*Ra							1.185	***
Pseudo r-squared		0.089		0.124		0.124		0.144	

Sumber: Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 4)

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa probabilitas tenaga kerja terdidik menjadi pengangguran di pulau Sulawesi dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, jenis kelamin, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga, interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal, interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal, interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal. Adapun bentuk pengaruh masing-masing variabel di pulau Sulawesi dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sulawesi, tenaga kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi. Nilai *odds ratio* 4,341 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki probabilitas menganggur 4,341 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi
2. Pelatihan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sulawesi, tenaga kerja terdidik yang belum pernah mengikuti pelatihan

memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja. Nilai *odds ratio* 1,991 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang belum mengikuti pelatihan kerja memiliki probabilitas menganggur 1,991 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja.

3. Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sulawesi, tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja. Nilai *odds ratio* 2,269 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki probabilitas menganggur 2,269 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja.
4. Umur tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sulawesi, tenaga kerja terdidik yang berumur muda belum tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berumur tua.
5. Jenis kelamin berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sulawesi, tenaga kerja terdidik perempuan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan laki-laki. Nilai *odds ratio* 1,293 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang tidak perempuan memiliki probabilitas menganggur 1,293 kali lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.
6. Status perkawinan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sulawesi, tenaga kerja terdidik yang belum kawin memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah kawin. Nilai *odds ratio* 30,770 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang belum menikah memiliki probabilitas menganggur 30,770 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sudah menikah.
7. Kedudukan dalam rumah tangga berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sulawesi, tenaga kerja terdidik yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga belum tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang bukan kepala rumah tangga. Nilai *odds ratio* 0,445 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang yang

- berkedudukan sebagai kepala rumah tangga memiliki probabilitas menganggur 0,445 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang bukan kepala rumah tangga.
8. Wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sulawesi, tenaga kerja terdidik yang tinggal di perdesaan belum tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang tinggal di kota.
 9. Interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di Sulawesi, tenaga kerja terdidik yang muda dan tinggal di perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang tidak muda dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 1,663 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang muda dan tinggal di perdesaan memiliki probabilitas menganggur 1,663 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak muda dan tinggal di perkotaan.
 10. Interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sulawesi, tenaga kerja terdidik yang sudah menikah dan tinggal di perkotaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang belum menikah dan tinggal di perdesaan. Nilai *odds ratio* 0,060 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang sudah menikah dan tinggal di kota memiliki probabilitas menganggur 0,060 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum menikah dan tinggal di desa.
 11. Interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di Sulawesi, tenaga kerja terdidik yang berkedudukan bukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 3,613 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang berkedudukan bukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di perdesaan memiliki probabilitas menganggur 3,613 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di perkotaan.

Berikut ini adalah hasil analisis faktor penentu pengangguran terdidik di pulau Maluku, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 38 : Faktor Penentu Pengangguran Terdidik di Maluku

No	Variabel Bebas	Model Penelitian							
		Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig
1	Constant	-7.267	***	-10.331	***	-10.548	***	-11.360	***
2	Edu	1.428	***	1.662	***	1.693	***	2.687	***
3	Wt	0.952	***	1.070	***	1.025	***	1.151	***
4	Exp	1.322	***	1.651	***	1.642	***	1.598	***
5	Age	2.551	***	0.751	***	0.761	**	0.074	
6	Cend			-0.028		-0.060		0.319	
7	Ms			3.225	***	3.200	***	4.652	***
8	Ph			1.586	**	1.630	**	0.425	
9	Ra					0.333		1.142	
10	Edu*Ra							-1.181	
11	Wt*Ra							-0.114	
12	Exp*Ra							0.159	
13	Age*Ra							1.173	**
14	Cend*Ra							-0.619	
15	Ms*Ra							-2.160	*
16	Ph*Ra							1.696	
Pseudo r-squared		0.170		0.262		0.264		0.273	

Sumber : Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 4)

Berdasarkan hasil analisis data model pengangguran terdidik diketahui bahwa probabilitas tenaga kerja terdidik menjadi pengangguran di pulau Maluku dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, status perkawinan, interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal dan interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal. Adapun bentuk pengaruh masing-masing variabel di pulau Maluku dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Maluku, tenaga kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi. Nilai *odds ratio* 14,694 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki probabilitas menganggur 14,694 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi.
2. Pelatihan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Maluku, tenaga kerja terdidik yang belum pernah mengikuti pelatihan

memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja. Nilai *odds ratio* 3,162 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang belum mengikuti pelatihan kerja memiliki probabilitas menganggur 3,162 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja.

3. Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Maluku, tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja. Nilai *odds ratio* 4,896 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki probabilitas menganggur 4,896 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja.
4. Umur tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Maluku, tenaga kerja terdidik yang berumur muda belum tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berumur tua.
5. Jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Maluku, tenaga kerja terdidik perempuan belum tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan laki-laki.
6. Status perkawinan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Maluku, tenaga kerja terdidik yang belum kawin memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah kawin. Nilai *odds ratio* 104,782 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang belum menikah memiliki probabilitas menganggur 104,782 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sudah menikah.
7. Kedudukan dalam rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di Pulau Maluku, tenaga kerja terdidik yang berkedudukan bukan kepala rumah tangga belum tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan kepala rumah tangga.
8. Wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Maluku, tenaga kerja terdidik yang tinggal di perdesaan belum

tentu memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang tinggal di kota.

9. Interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di Maluku, tenaga kerja terdidik yang muda dan tinggal di perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang tidak muda dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 3,232 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang muda dan tinggal di perdesaan memiliki probabilitas menganggur 3,232 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak muda dan tinggal di perkotaan.
10. Interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Maluku, tenaga kerja terdidik yang sudah menikah dan tinggal di perkotaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang belum menikah dan tinggal di perdesaan. Nilai *odds ratio* 0,122 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang sudah menikah dan tinggal di kota memiliki probabilitas menganggur 0,122 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum menikah dan tinggal di desa.

Berikut ini adalah hasil analisis faktor penentu pengangguran terdidik di pulau Papua, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.



Tabel 39 : Faktor Penentu Pengangguran Terdidik di Papua

No	Variabel Bebas	Model Penelitian							
		Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig
1	Constant	-5.194	***	-9.204	***	-9.026	***	-9.651	***
2	Edu	-2.989	***	-3.201	***	-3.411	***	-3.455	***
3	Wt	0.447	**	0.560	***	0.665	***	0.887	***
4	Exp	1.458	***	1.619	***	1.702	***	1.631	***
5	Age	4.546	***	2.682	***	2.753	***	2.206	***
6	Cend			-0.466	**	-0.412	**	-0.002	
7	Ms			4.227	***	4.345	***	1.44	***
8	Ph			2.202	***	2.354	***	2.463	***
9	Ra					-0.833	***	0.25	
10	Edu*Ra							0.020	
11	Wt*Ra							-0.523	
12	Exp*Ra							0.80	
13	Age*Ra							1.48	**
14	Cend*Ra							-0.908	**
15	Ms*Ra							-1.493	
16	Ph*Ra							-0.027	
Pseudo r-squared		0.355		0.463		0.474		0.483	

Sumber: Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 4)

Berdasarkan hasil analisis data model pengangguran di pulau Papua diketahui bahwa probabilitas menganggur angkatan kerja terdidik dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga, interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal dan interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal. Adapun bentuk pengaruh masing-masing variabel di Papua dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Papua, tenaga kerja terdidik perguruan tinggi memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan tamatan SMA/ sederajat. Nilai *odds ratio* 0,032 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik tamatan perguruan tinggi memiliki probabilitas menganggur 0,032 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tamatan SMA/ sederajat.
2. Pelatihan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Papua, tenaga kerja terdidik yang belum pernah mengikuti pelatihan

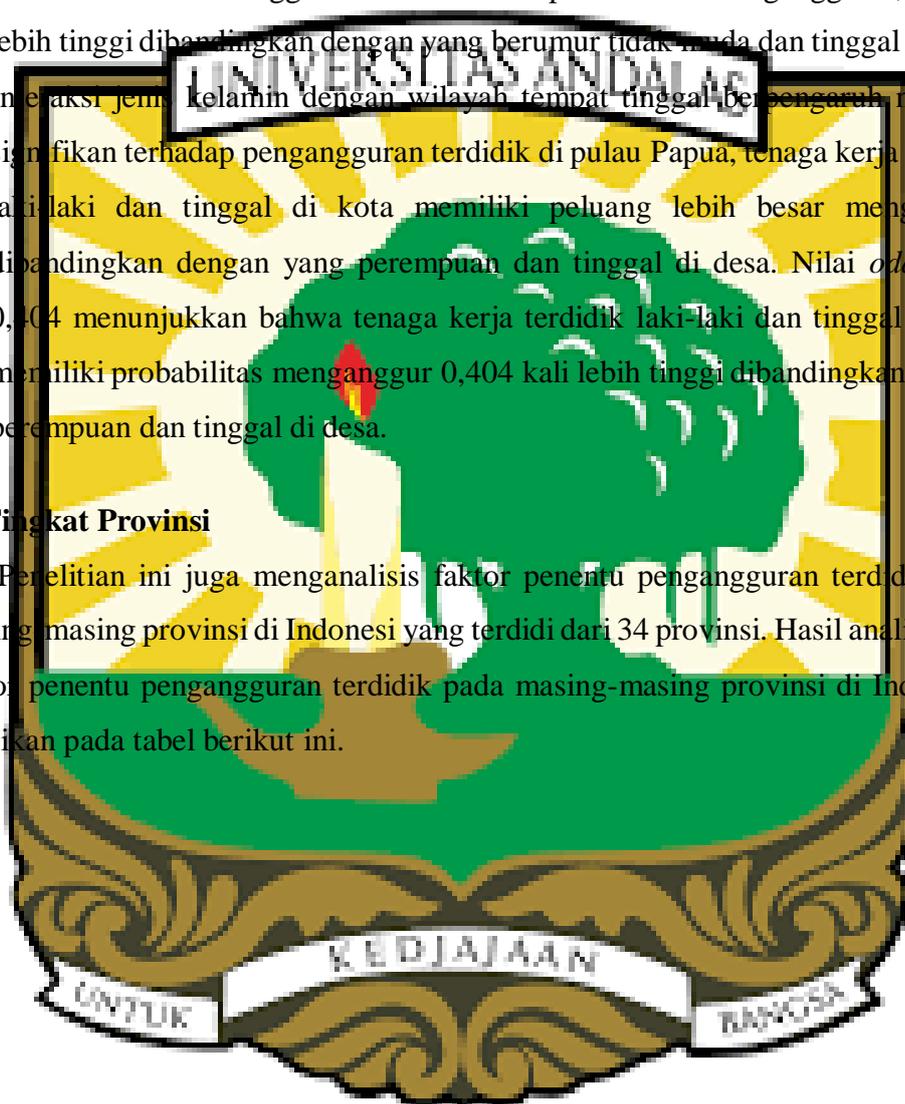
memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja. Nilai *odds ratio* 2,428 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang belum mengikuti pelatihan kerja memiliki probabilitas menganggur 2,428 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja.

3. Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Papua, tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja. Nilai *odds ratio* 5,108 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki probabilitas menganggur 5,108 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja.
4. Umur berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Papua, tenaga kerja terdidik yang berumur muda memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berumur tua. Nilai *odds ratio* 9,079 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang muda memiliki probabilitas menganggur 9,079 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah tua.
5. Status perkawinan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Papua, tenaga kerja terdidik yang belum kawin memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang sudah kawin. Nilai *odds ratio* 171,419 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang belum menikah memiliki probabilitas menganggur 171,419 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sudah menikah.
6. Kedudukan dalam rumah tangga berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Papua, tenaga kerja terdidik yang berkedudukan bukan kepala rumah tangga memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan kepala rumah tangga. Nilai *odds ratio* 11,738 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang bukan kepala keluarga memiliki probabilitas menganggur 11,738 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepala rumah tangga.

7. Interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Papua, tenaga kerja terdidik yang berumur muda dan tinggal di perdesaan memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang berumur tidak muda dan tinggal di kota. Nilai *odds ratio* 3,484 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang berumur muda dan tinggal di desa memiliki probabilitas menganggur 3,484 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berumur tidak muda dan tinggal di kota.
8. Interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Papua, tenaga kerja terdidik laki-laki dan tinggal di kota memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan yang perempuan dan tinggal di desa. Nilai *odds ratio* 0,404 menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik laki-laki dan tinggal di kota memiliki probabilitas menganggur 0,404 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dan tinggal di desa.

3. Tingkat Provinsi

Penelitian ini juga menganalisis faktor penentu pengangguran terdidik pada masing-masing provinsi di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi. Hasil analisis data faktor penentu pengangguran terdidik pada masing-masing provinsi di Indonesia, disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 40 : Faktor Penentu Pengangguran Terdidik Pada Masing-Masing Provinsi

No	Provinsi	Variabel Bebas															
		Edu	Wt	Exp	Age	Gnd	Ms	Ph	Ra	Edu*Ra	Wt*Ra	Exp*Ra	Age*Ra	Gnd*Ra	Ms*Ra	Ph*Ra	
1	Aceh	**	-	**	***	-	-	-	-	-	**						
2	Sumatera Utara	**	*	***	***	***	**	*		**				(***)	(**)		
3	Sumatera Barat	**		***	***		*	**									
4	Riau			***	***									**			
5	Jambi			**	*												
6	Sumatera Selatan	**			**			*					*				
7	Bengkulu				***												
8	Lampung	*		***	***												
9	Bangka-Belitung																
10	Kepulauan Riau		*														
11	DKI Jakarta	**	***	**	**												
12	Jawa Barat	**	**	***		*		**									
13	Jawa Tengah	***		***	**												
14	D I Yogyakarta								***			*					
15	Jawa Timur	**	*	***		*	***						*	**	***	**	
16	Banten	***	**			*		**									**
17	Bali					*	***	**							*	*	
18	NTB	***			**		***	**					*		***	**	
19	NTT	**	*	**			***								**		
20	Kalimantan Barat			***	*	***								*	***		
21	Kalimantan Tengah	***	**				***										**
22	Kalimantan Selatan	**		**			***						*		***		
23	Kalimantan Timur	***					***	*		***	**	*	*	*	***	*	
24	Kalimantan Utara						*										
25	Sulawesi Utara	*	**	***			***	**							***	**	
26	Sulawesi Tengah	***	***				***					*		*	***	***	
27	Sulawesi Selatan	***				**	***		*			**			***	*	
28	Sulawesi Tenggara		*	***	***		***		*	**		**			***		
29	Gorontalo			***	*	*											
30	Sulawesi Barat		***				***				*				**		
31	Maluku	**	***				***								*		
32	Maluku Utara			***			***		*								
33	Papua Barat	(*)	***	***	**		***	*									
34	Papua			**	***		***	**					**	(**)			

Sumber : Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 5)

Berdasarkan hasil analisis data model pengangguran terdidik pada masing-masing provinsi diketahui bahwa variabel tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur dan status perkawinan secara umum mempengaruhi pengangguran terdidik. Namun untuk provinsi Papua Barat ditemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik, hal ini membuktikan bahwa angkatan kerja tamatan perguruan tinggi memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan SMA/ sederajat. Begitu juga dengan provinsi Papua juga ditemukan bahwa tingkat

pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik, artinya probabilitas pengangguran terdidik di provinsi Papua tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan angkatan kerja.

C. Faktor Penentu Durasi Menganggur

1. Tingkat Nasional

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi durasi menganggur tenaga kerja terdidik digunakan analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis data untuk estimasi model durasi menganggur dari pengangguran terdidik pada tahun 2016 dan 2017 dapat direkap pada tabel berikut ini.

Tabel 41 : Estimasi Model Durasi Menganggur di Indonesia

No	Variabel	Model Penelitian										Odds Ratio
		Model 1		Model 2		Model 3		Model 4		Model 5		
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	
1	Constant	-4.012	***	-4.293	***	-3.872	***	-4.752	***	-4.440	***	0.012
2	Edu	1.446	***	1.461	***	1.420	***	1.881	***	1.970	***	7.171
3	Wt	0.785	***	0.768	***	0.740	***	1.008	***	1.010	***	2.745
4	Exp	0.178		0.224	*	0.254	*	0.450	**	0.491	**	1.634
5	Age	0.927	***	0.608	***	0.535	***	0.648	**	0.585	***	1.984
6	Gend			0.103		0.150		0.361		0.352		1.422
7	Ms			0.426	**	0.452	**	0.586	**	0.605	**	1.831
8	Ph			0.314	*	0.308	*	0.294		0.354		1.424
9	Ra					-0.693	***	0.790		0.853	*	2.346
10	Edu*Ra							-0.716		-0.754	*	0.470
11	Wt*Ra							-0.460		-0.468		0.633
12	Exp*Ra							-0.404		-0.403		0.668
13	Age*Ra							-0.295		-0.316		0.729
14	Gend*Ra							-0.451		-0.430		0.651
15	Ms*Ra							-0.319		-0.307		0.736
16	Ph*Ra							0.060		0.043		1.044
17	Psum									-0.334		0.716
18	Pjw									-0.688	**	0.503
19	Pbnt									-0.443		0.642
20	Pkal									-0.558	*	0.573
21	Psul									-0.666	**	0.514
22	Pmal									-0.274		0.760
Pseudo r-squared		0.086		0.095		0.110		0.118		0.123		

Sumber : Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 6)

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik dapat dituliskan persamaan regresi logistik model durasi menganggur sebagai berikut.

Model 1

$$Du = -4,012 + 1,446 \text{ Edu} + 0,785 \text{ Wt} + 0,178 \text{ Exp} + 0,927 \text{ Age}$$

Model 2

$$Du = -4,293 + 1,461 \text{ Edu} + 0,768 \text{ Wt} + 0,224 \text{ Exp} + 0,608 \text{ Age} + 0,103 \text{ Gend} + 0,426 \text{ Ms} + 0,314 \text{ Ph}$$

Model 3

$$Du = -3,872 + 1,420 \text{ Edu} + 0,740 \text{ Wt} + 0,254 \text{ Exp} + 0,535 \text{ Age} + 0,150 \text{ Gend} + 0,452 \text{ Ms} + 0,308 \text{ Ph} + 0,693 \text{ Ra}$$

Model 4

$$Du = -4,752 + 1,1881 \text{ Edu} + 1,008 \text{ Wt} + 0,450 \text{ Exp} + 0,648 \text{ Age} + 0,361 \text{ Gend} + 0,586 \text{ Ms} + 0,294 \text{ Ph} + 0,790 \text{ Ra} - 0,716 \text{ Edu*Ra} - 0,460 \text{ Wt*Ra} - 0,404 \text{ Exp*Ra} - 0,295 \text{ Age*Ra} - 0,451 \text{ Gend*Ra} - 0,319 \text{ Ms*Ra} + 0,060 \text{ Ph*Ra}$$

Model 5

$$Du = -4,430 + 1,970 \text{ Edu} + 1,010 \text{ Wt} + 0,491 \text{ Exp} + 0,685 \text{ Age} + 0,352 \text{ Gend} + 0,605 \text{ Ms} + 0,354 \text{ Ph} + 0,853 \text{ Ra} + 0,754 \text{ Edu*Ra} - 0,458 \text{ Wt*Ra} - 0,403 \text{ Exp*Ra} - 0,316 \text{ Age*Ra} - 0,430 \text{ Gend*Ra} - 0,307 \text{ Ms*Ra} + 0,043 \text{ Ph*Ra} - 0,334 \text{ Psum} - 0,688 \text{ Pjw} - 0,443 \text{ Pbnt} - 0,558 \text{ Pkal} - 0,666 \text{ Psul} - 0,274 \text{ Pmal}$$

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik pada model 1 untuk menguji pengaruh kemampuan pengangguran terdidik yang diproksi dari tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan umur terhadap probabilitas durasi menganggur diketahui bahwa tingkat pendidikan, pelatihan kerja dan umur berpengaruh signifikan terhadap probabilitas menganggur. Artinya, pengangguran terdidik yang hanya tamat SMA/ sederajat, tidak pernah ikut pelatihan kerja, dan memiliki umur yang muda memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi, pernah ikut pelatihan kerja, dan berusia tidak muda lagi, sedangkan variabel pengalaman kerja tidak menentukan probabilitas durasi menganggur.

Pada model 2 diuji pengaruh kemampuan pengangguran terdidik (tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan umur) dan karakteristik rumah

tangga (jenis kelamin, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga) terhadap probabilitas durasi menganggur. Berdasarkan hasil analisis data diketahui kemampuan tenaga kerja terdidik (tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan umur) dan karakteristik rumah tangga (status perkawinan dan kedudukan dalam rumah tangga) berpengaruh signifikan terhadap probabilitas durasi menganggur. Artinya, pengangguran terdidik yang hanya tamat SMA/ sederajat, tidak pernah ikut pelatihan kerja, belum memiliki pengalaman kerja, berumur muda, belum menikah dan bukan kepala keluarga memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi, pernah ikut pelatihan kerja, memiliki pengalaman kerja, berusia tidak muda lagi, sudah menikah dan kepala keluarga. Variabel jenis kelamin tidak mempengaruhi probabilitas durasi menganggur.

Pada model 3 diuji pengaruh kemampuan tenaga kerja terdidik (tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan umur), karakteristik rumah tangga (jenis kelamin, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga) dan wilayah tempat tinggal terhadap probabilitas durasi menganggur. Berdasarkan hasil analisis data diketahui kemampuan tenaga kerja terdidik (tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, dan umur) dan karakteristik rumah tangga (status perkawinan, dan kedudukan dalam rumah tangga) dan wilayah tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap probabilitas durasi menganggur tenaga kerja terdidik. Artinya, pengangguran terdidik yang hanya tamat SMA/ sederajat, tidak pernah ikut pelatihan kerja, belum memiliki pengalaman kerja, berumur muda, belum menikah dan bukan kepala keluarga serta tinggal di wilayah perdesaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi, pernah ikut pelatihan kerja, memiliki pengalaman kerja, berusia tidak muda lagi, sudah menikah dan kepala keluarga serta tinggal di perkotaan. Variabel jenis kelamin tidak mempengaruhi probabilitas durasi menganggur.

Pada model 4 diuji pengaruh kemampuan pengangguran terdidik, karakteristik rumah tangga dan wilayah tempat tinggal serta interaksi kemampuan tenaga kerja terdidik dan karakteristik rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal terhadap probabilitas durasi menganggur. Berdasarkan hasil analisis data diketahui tingkat

pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, status perkawinan berpengaruh signifikan terhadap probabilitas durasi menganggur. Artinya, pengangguran terdidik yang hanya tamat SMA/ sederajat, tidak pernah ikut pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja dan berumur muda memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi, pernah ikut pelatihan kerja, memiliki pengalaman kerja dan berumur tidak muda.

Pada model 5 diuji pengaruh kemampuan tenaga kerja, terdidik, karakteristik rumah tangga, wilayah tempat tinggal, interaksi kemampuan dan karakteristik rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal serta wilayah kepulauan terhadap probabilitas durasi menganggur. Berdasarkan hasil analisis data diketahui tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, status perkawinan, dan wilayah tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap probabilitas durasi menganggur. Artinya, pengangguran terdidik yang hanya tamat SMA/ sederajat, tidak pernah ikut pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, berumur muda dan tinggal di wilayah perdesaan peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi, pernah ikut pelatihan kerja, berpengalaman kerja, berumur tidak muda lagi dan tinggal di perkotaan. Terlihat bahwa pengangguran terdidik akan menganggur lebih lama apabila mereka berada di pulau Jawa karena hanya 50,3 persen peluangnya untuk menganggur lebih singkat dibandingkan dengan wilayah lainnya dan pengangguran terdidik akan menganggur lebih singkat apabila berada di pulau Maluku dengan peluang menganggur lebih singkat adalah sebesar 76 persen dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Berikut ini penjelasan hasil analisis data model durasi menganggur dari pengangguran terdidik di Indonesia sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi. Nilai *odds ratio* 7,171 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki probabilitas menganggur 3,301 kali lebih lama dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi.

2. Pelatihan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang belum pernah mengikuti pelatihan memiliki peluang lebih lama menganggur dibandingkan dengan yang sudah pernah mengikuti pelatihan kerja. Nilai *odds ratio* 2,745 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang belum mengikuti pelatihan kerja memiliki probabilitas menganggur 2,745 kali lebih lama dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja.
3. Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja. Nilai *odds ratio* 1,634 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang belum mengikuti pelatihan kerja memiliki probabilitas menganggur 1,634 kali lebih lama dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja.
4. Umur berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang berumur muda memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang berumur tua. Nilai *odds ratio* 1,984 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang belum mengikuti pelatihan kerja memiliki probabilitas menganggur 1,984 kali lebih lama dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja.
5. Jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik perempuan belum tentu memiliki peluang lebih lama menganggur dibandingkan dengan laki-laki.
6. Status perkawinan berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang belum menikah memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah menikah. Nilai *odds ratio* 1,831 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang belum menikah memiliki probabilitas menganggur 1,831 kali lebih lama dibandingkan dengan yang sudah menikah.
7. Kedudukan dalam rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang berkedudukan bukan kepala rumah

tangga belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga.

8. Wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang tinggal di perdesaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 2,346 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang tinggal perdesaan memiliki probabilitas menganggur 2,346 kali lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan.
9. Interaksi tingkat pendidikan dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik tamatan perguruan tinggi dan tinggal di perkotaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan SMA/ sederajat dan tinggal di perdesaan. Nilai *odds ratio* 0,470 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang tamatan perguruan tinggi dan tinggal di perkotaan memiliki probabilitas menganggur 0,470 kali lebih lama dibandingkan dengan tamatan SMA/ sederajat dan tinggal di perdesaan.
10. Interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang belum pernah mengikuti pelatihan kerja dan tinggal di perdesaan belum tentu memiliki peluang lebih lama menganggur dibandingkan dengan yang sudah pernah mengikuti pelatihan dan tinggal di perkotaan.
11. Interaksi pengalaman kerja dengan wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja dan tinggal di perdesaan belum tentu memiliki peluang lebih lama menganggur dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja dan tinggal di perkotaan.
12. Interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang berumur muda dan tinggal di perdesaan belum tentu memiliki peluang lebih lama menganggur dibandingkan dengan yang tidak muda dan tinggal di perkotaan.

13. Interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik perempuan dan tinggal di perdesaan belum tentu memiliki peluang lebih lama menganggur dibandingkan dengan laki-laki dan tinggal di perkotaan.
14. Interaksi status perkawinan dengan wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang belum menikah dan tinggal di perdesaan belum tentu memiliki peluang lebih lama menganggur dibandingkan dengan yang sudah menikah dan tinggal di perkotaan.
15. Interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang bukan kepala rumah tangga dan tinggal di perdesaan belum tentu memiliki peluang lebih lama menganggur dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di perkotaan.
16. Koefisien variabel pulau Sumatera adalah -0.334 dengan *odds ratio* sebesar $0,716$ menunjukkan bahwa pengangguran terdidik di pulau Sumatera memiliki probabilitas menganggur $0,716$ kali lebih singkat dibandingkan wilayah pulau lainnya di Indonesia
17. Koefisien variabel pulau Jawa adalah -0.688 dengan *odds ratio* sebesar $0,503$ menunjukkan bahwa pengangguran terdidik di pulau Jawa memiliki probabilitas menganggur $0,503$ kali lebih singkat t dibandingkan wilayah pulau lainnya di Indonesia
18. Koefisien variabel pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah -0.443 dengan *odds ratio* sebesar $0,642$ menunjukkan bahwa pengangguran terdidik di Bali dan Nusa Tenggara jawa memiliki probabilitas menganggur $0,642$ kali lebih singkat dibandingkan wilayah pulau lainnya di Indonesia
19. Koefisien variabel pulau Kalimantan adalah -0.558 dengan *odds ratio* sebesar $0,573$ menunjukkan bahwa pengangguran terdidik di pulau Kalimantan memiliki probabilitas menganggur $0,573$ kali lebih singkat dibandingkan wilayah pulau lainnya di Indonesia

20. Koefisien variabel pulau Sulawesi adalah -0,666 dengan *odds ratio* sebesar 0,514 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik di pulau Sulawesi memiliki probabilitas menganggur 0,514 kali lebih singkat dibandingkan wilayah pulau lainnya di Indonesia
21. Koefisien variabel pulau Maluku adalah -0,274 dengan *odds ratio* sebesar 0,760 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik di pulau Maluku memiliki probabilitas menganggur 0,760 kali lebih singkat dibandingkan wilayah pulau lainnya di Indonesia

2. Tingkat Pulau

Penelitian ini juga menganalisis faktor penentu durasi menganggur pada tingkat wilayah kepulauan di Indonesia, sebagaimana direkap pada tabel di bawah ini.

Tabel 42 : Rekapitulasi Faktor Penentu Durasi Menganggur Pada Masing-Masing Pulau

No	Pulau	Variabel Bebas													Gnd*Ra	Ms*Ra	Ph*Ra
		Edu	Wt	Exp	Age	Gend	Ms	Ph	Ra	Edu*Ra	Wt*Ra	Exp*Ra	Age*Ra				
1	Sumatera	2.01**	0.899**	0.805**	1.11**	0.897**	0.629	-0.381	0.615	-1.061	-0.362	-0.567	-0.151	-0.346	-0.025	0.1	
2	Jawa	1.8*	0.168	0.24	0.363	-0.236	1.143**	0.873	1.725	-1.415	1.759*	0.037	1.012	-0.271	0.398	-0.749	
3	Bali & N. T	0.662*	-0.259	-0.889	-0.589	0.771	0.431	3.991**	3.559*	-0.967	-0.031	2.424**	1.138	-0.531	1.876	-3.923**	
4	Kalimantan	1.794*	1.646*	0.669	2.072*	0.228	-0.487	-0.442	2.428*	1.358	-2.098*	-1.475*	-2.949*	-0.008	0.049	1.343	
5	Sulawesi	0.903**	1.14**	0.667	0.909	0.809*	-0.056	1.407**	0.152	-0.329	1.282	-0.352	-1.279*	-0.915	-0.462	-0.636	
6	Maluku	1.881**	1.008**	0.45**	0.648**	0.361**	0.586**	0.294	0.79	-0.716	-0.46	-0.404	-0.295*	-0.451	-0.319	0.06	
7	Papua	-2.398*	-1.936*	0.32	2.054	-3.162**	3.806**	2.492**	1.384	1.125	-2.602*	0.003	0.652*	4.002*	0.857	-3.982**	

Sumber: Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 7)

Berdasarkan hasil analisis data model durasi menganggur pada masing-masing wilayah kepulauan di Indonesia diketahui bahwa adanya perbedaan faktor penentu durasi menganggur setiap wilayah kepulauan di Indonesia. Pada wilayah pulau Sumatera diketahui bahwa durasi menganggur dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur dan jenis kelamin. Pengangguran terdidik yang hanya tamatan SMA/ sederajat, tidak pernah ikut pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, berumur muda dan perempuan memiliki peluang

menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi, pernah ikut pelatihan kerja, memiliki pengalaman kerja, berumur tidak muda lagi dan laki-laki.

Pada wilayah pulau Jawa diketahui bahwa durasi menganggur dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, status perkawinan dan interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal. Pengangguran terdidik yang hanya tamatan SMA/ sederajat, belum menikah dan tidak pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di perdesaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi, sudah menikah dan yang pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di perkotaan.

Pada wilayah pulau Bali dan Nusa Tenggara diketahui bahwa durasi menganggur dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kedudukan dalam rumah tangga, interaksi pengalaman kerja dengan wilayah tempat tinggal dan interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal. Pengangguran terdidik yang hanya tamatan SMA/ sederajat, bukan kepala keluarga, tidak memiliki pengalaman kerja dan tinggal di perdesaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi, berkedudukan sebagai kepala keluarga dan memiliki pengalaman kerja serta tinggal di perkotaan. Pada wilayah pulau Bali dan Nusa Tenggara ditemukan juga bahwa yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dan tinggal di perkotaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang bukan kepala keluarga dan tinggal di perdesaan.

Pada wilayah pulau Kalimantan diketahui bahwa durasi menganggur dipengaruhi oleh pelatihan kerja, umur, wilayah tempat tinggal, interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal, dan interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal, interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal. Pengangguran terdidik yang tidak pernah ikut pelatihan kerja, berumur muda dan tinggal di wilayah perdesaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan sudah pernah ikut pelatihan kerja, berumur tidak muda dan tinggal di perkotaan.

Pada wilayah pulau Sulawesi diketahui bahwa durasi menganggur dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan kerja, jenis kelamian dan kedudukan dalam rumah tangga. Pengangguran terdidik yang hanya tamat SMA/ sederajat, tidak pernah ikut pelatihan kerja, perempuan dan berkedudukan bukan sebagai kepala

keluarga memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi, sudah pernah ikut pelatihan kerja, laki-laki dan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga.

Pada wilayah pulau Maluku diketahui bahwa durasi menganggur dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur dan status perkawinan. Pengangguran terdidik yang hanya tamatan SMA/ sederajat, tidak pernah ikut pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, berumur muda dan belum menikah memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi, pernah ikut pelatihan kerja, memiliki pengalaman kerja, berumur tidak muda lagi dan sudah menikah.

Pada wilayah pulau Papua diketahui bahwa durasi menganggur dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan dan kedudukan dalam rumah tangga, interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal, interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal, interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal. Pengangguran terdidik yang belum menikah, berkedudukan bukan sebagai kepala keluarga, perempuan yang tinggal di perdesaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah menikah, yang berkedudukan sebagai kepala keluarga, dan laki-laki yang tinggal dipertanian. Pada wilayah pulau Sulawesi ditemukan juga bahwa pengangguran terdidik tamatan perguruan tinggi memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan SMA/ sederajat.

Hasil analisis data faktor penentu durasi menganggur di pulau Sumatera disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 43 : Faktor Penentu Durasi Menganggur di Pulau Sumatera

No	Variabel Bebas	Model Penelitian							
		Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig
1	Constant	-3.185	***	-3.521	***	-2.985	***	-3.923	***
2	Edu	0.580	*	0.692	**	0.567	*	1.201	**
3	Wt	0.622	**	0.640	**	0.659	**	0.899	**
4	Exp	0.392		0.475	*	0.529	**	0.805	**
5	Age	1.269	***	1.079	***	0.991	***	1.110	**
6	Gender	0.583	**	0.583	**	0.708	*	0.897	**
7	Married	0.679	**	0.679	**	0.673	*	0.629	
8	PH			-0.268		-0.342		-0.38	
9	Ra					-0.888	***	0.615	
10	Edu*Ra							-1.06	
11	Wt*Ra							-0.36	
12	Exp*Ra							-0.56	
13	Age*Ra							-0.15	
14	Gender*Ra							-0.34	
15	Married*Ra							-0.02	
16	PH*Ra							0.100	
Pseudo-r-squared		0.061		0.074		0.099		0.111	

Sumber: Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 7)

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa di pulau Sumatera probabilitas durasi menganggur dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur dan jenis kelamin. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran terdidik di Sumatera Barat akan menganggur lebih lama apabila mereka hanya tamat SMA/ sederajat, tidak pernah ikut pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, berusia muda, dan berjenis kelamin perempuan. Adapun bentuk pengaruh masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur di pulau Sumatera, pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi. Nilai *odds ratio* 3,323 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki probabilitas menganggur 3,323 kali lebih lama dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi.
2. Pelatihan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur pulau Sumatera, pengangguran terdidik yang belum pernah mengikuti pelatihan

memiliki peluang lebih lama menganggur dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja. Nilai *odds ratio* 2,458 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang belum mengikuti pelatihan kerja memiliki probabilitas menganggur 2,458 kali lebih lama dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja.

3. Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur pulau Sumatera, pengangguran terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja. Nilai *odds ratio* 2,236 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang belum mengikuti pelatihan kerja memiliki probabilitas menganggur 2,236 kali lebih lama dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja.
4. Umur berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur pulau Sumatera, pengangguran terdidik yang berumur muda memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang berumur tua. Nilai *odds ratio* 3,033 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang berumur muda memiliki probabilitas menganggur 3,033 kali lebih lama dibandingkan dengan yang berumur tidak muda lagi.
5. Jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur pulau Sumatera, pengangguran terdidik perempuan memiliki peluang lebih lama menganggur dibandingkan dengan laki-laki. Nilai *odds ratio* 2,452 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik perempuan memiliki probabilitas menganggur 2,452 kali lebih lama dibandingkan dengan laki-laki.
6. Status perkawinan tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur pulau Sumatera, pengangguran terdidik yang belum menikah belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah menikah.
7. Kedudukan dalam rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur pulau Sumatera, pengangguran terdidik yang berkedudukan bukan kepala rumah tangga belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga.

8. Wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur pulau Sumatera, pengangguran terdidik yang tinggal di perdesaan belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di kota.

Hasil analisis data faktor penentu durasi menganggur di pulau Jawa disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 44 : Faktor Penentu Durasi Menganggur di Pulau Jawa

No	Variabel Bebas	Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig
1	Constant	-4.517	***	-5.157	***	-5.569	***	-5.767	***
2	Edu	1.230	**	1.140	*	0.989		1.800	*
3	Wt	0.986	**	0.941	**	0.976	**	0.668	
4	Exp	0.317		0.352		0.290		0.240	
5	Age	1.665	***	1.036	***	0.816	**	0.263	
6	Gend			-0.260		0.111		0.236	
7	Ms			1.032	***	1.287	***	1.443	**
8	Ph			0.602		0.536		0.873	
9	Ra					1.652	***	1.225	
10	Edu*Ra							-1.415	
11	Wt*Ra							1.259	*
12	Exp*Ra							0.037	
13	Age*Ra							1.012	
14	Gend*Ra							-0.271	
15	Ms*Ra							0.398	
16	Ph*Ra							-0.749	
Pseudo_r-squared		0.129		0.169		0.243		0.259	

Sumber : Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 7)

Berdasarkan hasil analisis data diketahui probabilitas pengangguran terdidik menganggur lebih lama di pulau Jawa dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, kedudukan dalam rumah tangga, dan interaksi tingkat pendidikan dengan wilayah tempat tinggal. Adapun bentuk pengaruh masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Jawa, pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi. Nilai *odds ratio* 6,050 menunjukkan bahwa

pengangguran terdidik yang hanya tamatan SMA/ sederajat memiliki probabilitas menganggur 6,050 kali lebih lama dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi.

2. Pelatihan kerja tidak berpengaruh terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Jawa, pengangguran terdidik yang belum pernah mengikuti pelatihan belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah pernah mengikuti pelatihan kerja.
3. Pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Jawa. Artinya lama atau pendeknya durasi menganggur pengangguran terdidik di pulau Jawa tidak ditentukan oleh pengalaman kerja yang mereka miliki.
4. Umur tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Jawa, pengangguran terdidik yang berumur muda belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang berumur tua.
5. Jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Jawa. Hal ini membuktikan bahwa durasi menganggur pengangguran terdidik di pulau Jawa tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin dari pengangguran terdidik yang bersangkutan.
6. Status perkawinan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Jawa, pengangguran terdidik yang belum menikah memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah menikah. Nilai *odds ratio* 3,137 menunjukkan bahwa pengangguran yang belum menikah memiliki probabilitas menganggur 3,137 kali lebih lama dibandingkan dengan yang sudah menikah.
7. Kedudukan dalam rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Jawa. Artinya durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Jawa tidak dipengaruhi oleh kedudukan dalam rumah tangga.
8. Wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Jawa, pengangguran terdidik

yang tinggal di perdesaan belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan.

9. Interaksi pelatihan dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Jawa, pengangguran terdidik yang belum pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di perdesaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 5,804 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang belum pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di perdesaan memiliki probabilitas menganggur 5,804 kali lebih lama dibandingkan dengan yang pernah ikut pelatihan dan tinggal di perkotaan.

Hasil analisis data faktor penentu durasi menganggur di pulau Bali dan Nusa Tenggara disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 45 : Faktor Penentu Durasi Menganggur di Pulau Bali dan Nusa Tenggara

No	Variabel Bebas	Model Penelitian							
		Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig
1	Constant	-4.248	***	45.102	***	-5.965	***	-3.976	***
2	Edu	2.161	**	2.172	**	2.277	**	1.062	*
3	Wt	0.217		0.001		-0.119		-0.259	
4	Exp	0.377		0.549		0.537		-0.389	
5	Age	1.150	**	0.169		0.034		-0.589	
6	Gend			0.236		0.227		0.771	
7	Ms			1.419	**	1.304	**	0.431	
8	Ph			0.753		1.039		3.991	**
9	Ra					1.426	***	3.559	*
10	Edu*Ra							-0.967	
11	Wt*Ra							-0.031	
12	Exp*Ra							2.424	**
13	Age*Ra							1.138	
14	Gend*Ra							-0.531	
15	Ms*Ra							1.876	
16	Ph*Ra							-3.923	**
Pseudo r-squared		0.104		0.176		0.233		0.323	

Sumber : Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 7)

Berdasarkan hasil analisis data diketahui probabilitas durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, kedudukan dalam rumah tangga, wilayah tempat tinggal, interaksi pengalaman kerja dengan wilayah tempat tinggal dan interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal. Adapun bentuk pengaruh masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara, pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi. Nilai *odds ratio* 38,929 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki probabilitas menganggur 38,929 kali lebih lama dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi.
2. Pelatihan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara. Artinya, lama atau pendeknya durasi menganggur pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara tidak ditentukan oleh pelatihan kerja yang pernah diikuti oleh pengangguran terdidik tersebut.
3. Pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara. Artinya, lama atau pendeknya durasi menganggur pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara tidak ditentukan oleh pengalaman kerja yang dimiliki oleh pengangguran terdidik tersebut.
4. Umur berpengaruh tidak signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara. Artinya, lama atau pendeknya durasi menganggur pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara tidak ditentukan oleh umur pengangguran terdidik tersebut.
5. Jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara. Artinya, lama atau pendeknya durasi menganggur pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara tidak ditentukan oleh jenis kelamin pengangguran terdidik tersebut.

6. Status perkawinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara, pengangguran terdidik yang belum menikah belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah menikah.
7. Kedudukan dalam rumah tangga berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara. Pengangguran terdidik yang berkedudukan bukan kepala rumah tangga memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan kepala keluarga. Nilai *odds ratio* 54,082 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang berkedudukan bukan kepala rumah tangga memiliki probabilitas menganggur 54,082 kali lebih lama dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga.
8. Wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara, pengangguran terdidik yang tinggal di perdesaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di kota. Nilai *odds ratio* 35,145 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang tinggal di desa memiliki probabilitas menganggur 35,145 kali lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di kota.
9. Interaksi pengalaman kerja dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja dan tinggal di perdesaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 11,289 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja dan tinggal di perdesaan memiliki probabilitas menganggur 11,289 kali lebih lama dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja dan tinggal di perkotaan.
10. Interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di

perkotaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan bukan kepala keluarga dan tinggal di perdesaan. Nilai *odds ratio* 0,020 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dan tinggal di perkotaan memiliki probabilitas menganggur 0,020 kali lebih lama dibandingkan dengan bukan kepala keluarga dan tinggal di perdesaan

Hasil analisis data faktor penentu durasi menganggur di pulau Kalimantan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 46 : Faktor Penentu Durasi Menganggur di Pulau Kalimantan

No	Variabel Bebas	Model Penelitian							
		Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig
1	Constant	-4.293	***	-4.657	***	-5.473	***	-6.271	***
2	Edu	2.512	**	2.548	**	2.606	**	1.794	
3	Wt	0.499		0.468		0.218		1.046	*
4	Exp	-0.579		-0.433		-0.419		0.069	
5	Age	0.170		0.096		0.163		2.072	*
6	Cend			0.054		0.220		0.128	
7	Ms			-0.276		-0.219		-0.187	
8	Ph			0.565		0.341		-0.142	
9	Ra					1.758	***	2.428	*
10	Edu*Ra							1.158	
11	Wt*Ra							-2.098	*
12	Exp*Ra							-1.475	
13	Age*Ra							-2.949	*
14	Gend*Ra							-0.008	
15	Ms*Ra							0.049	
16	Ph*Ra							1.543	
Pseudo r-squared		0.104		0.113		0.203		0.262	

Sumber: Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 7)

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa probabilitas durasi menganggur di pulau Kalimantan dipengaruhi oleh variabel pelatihan kerja, pengalaman kerja, wilayah tempat tinggal, interaksi pelatihan dengan wilayah tempat tinggal, interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal. Adapun bentuk pengaruh masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Kalimantan, pengangguran terdidik

tamatan SMA/ sederajat belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi.

2. Pelatihan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Kalimantan. Pengangguran terdidik yang tidak pernah ikut pelatihan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang pernah ikut pelatihan kerja. Nilai *odds ratio* 5,168 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang belum pernah ikut pelatihan kerja memiliki probabilitas menganggur 5,168 kali lebih lama dibandingkan dengan yang pernah ikut pelatihan kerja.
3. Pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Kalimantan. Artinya, lama atau pendeknya durasi menganggur pengangguran terdidik di pulau Bali dan Nusa Tenggara tidak ditentukan oleh pengalaman kerja yang dimiliki oleh pengangguran terdidik tersebut.
4. Umur berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Kalimantan. Pengangguran terdidik yang berumur muda memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang berumur tidak muda lagi. Nilai *odds ratio* 7,939 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang berumur muda memiliki probabilitas menganggur 7,939 kali lebih lama dibandingkan dengan yang berumur tidak muda lagi.
5. Jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Kalimantan. Artinya, lama atau pendeknya durasi menganggur pengangguran terdidik di pulau Kalimantan tidak ditentukan oleh jenis kelamin pengangguran terdidik tersebut.
6. Status perkawinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Kalimantan, pengangguran terdidik yang belum menikah belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah menikah.
7. Kedudukan dalam rumah tangga tidak berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Kalimantan. Pengangguran terdidik yang berkedudukan bukan kepala rumah tangga belum

tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan kepala keluarga.

8. Wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Kalimantan, pengangguran terdidik yang tinggal di wilayah perdesaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 11,333 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang tinggal di desa memiliki probabilitas menganggur 11,333 kali lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di kota.
9. Interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang pernah mengikuti pelatihan kerja dan tinggal di perkotaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tidak pernah mengikuti pelatihan kerja dan tinggal di perdesaan. Nilai *odds ratio* 0,123 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang pernah mengikuti pelatihan kerja dan tinggal di perkotaan memiliki probabilitas menganggur 0,123 kali lebih lama dibandingkan dengan yang tidak pernah ikut pelatihan kerja dan tinggal di perdesaan.
10. Interaksi umur dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang tua dan tinggal di perkotaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang muda dan tinggal di perdesaan. Nilai *odds ratio* 0,052 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang tua dan tinggal di perkotaan memiliki probabilitas menganggur 0,052 kali lebih lama dibandingkan dengan yang muda dan tinggal di perdesaan.

Hasil analisis data faktor penentu durasi menganggur di pulau Sulawesi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 47 : Faktor Penentu Durasi Menganggur di Pulau Sulawesi

No	Variabel Bebas	Model Penelitian							
		Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig
1	Constant	-3.728	***	-4.623	***	-4.492	***	-4.920	***
2	Edu	0.771	**	0.774	**	0.743	**	0.903	**
3	Wt	1.523	***	1.395	***	1.402	***	1.140	**
4	Exp	0.432		0.523		0.491		0.667	
5	Age	0.552		0.325		0.358		0.909	
6	Gender	0.491		0.519		0.519		0.809	*
7	Married	-0.294		-0.293		-0.293		-0.036	
8	Training	1.169	***	1.163	**	1.163	**	1.407	***
9	Home					-0.301		0.152	
10	Edu*Ra							-0.319	
11	Wt*Ra							1.282	
12	Exp*Ra							-0.332	
13	Age*Ra							-1.279	
14	Gender*Ra							-0.915	
15	Married*Ra							-0.452	
16	Training*Ra							-0.636	
Pseudo R-squared		0.063		0.089		0.092		0.118	

Sumber : Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 7)

Probabilitas tenaga kerja terdidik menganggur lebih lama di pulau Sulawesi dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, pelatihan kerja, jenis kelamin dan kedudukan dalam rumah tangga. Adapun bentuk pengaruh masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap durasi-menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Sulawesi, pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi. Nilai *odds ratio* 2,467 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki probabilitas menganggur 2,467 kali lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi.
2. Pelatihan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Sulawesi, Artinya, pengangguran terdidik yang tidak pernah ikut pelatihan kerja memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang pernah ikut pelatihan kerja. Nilai *odds ratio* 3,125

menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang tidak pernah ikut pelatihan kerja memiliki probabilitas menganggur 3,125 kali lebih lama dibandingkan dengan yang pernah ikut pelatihan kerja.

3. Pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Sulawesi. Artinya, lama atau pendeknya durasi menganggur pengangguran terdidik di pulau Sulawesi tidak ditentukan oleh pengalaman kerja yang dimiliki oleh pengangguran terdidik tersebut.
4. Usia tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Sulawesi. Artinya, pengangguran terdidik yang berumur muda belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan pengangguran terdidik yang berumur tidak muda lagi.
5. Jenis kelamin berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Sulawesi. Artinya, pengangguran terdidik perempuan di pulau Sulawesi memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan pengangguran terdidik laki-laki. Nilai *odds ratio* 2,245 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik perempuan memiliki probabilitas menganggur 2,245 kali lebih lama dibandingkan dengan laki-laki.
6. Status perkawinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Sulawesi. Artinya, lama atau pendeknya durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Sulawesi tidak ditentukan oleh pengalaman kerja yang dimiliki oleh pengangguran terdidik tersebut.
7. Kedudukan dalam rumah tangga berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur. Artinya, pengangguran terdidik yang berkedudukan sebagai non kepala rumah tangga memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Nilai *odds ratio* 4,082 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang bukan kepala keluarga memiliki probabilitas menganggur 4,082 kali lebih lama dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga.
8. Wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Sulawesi. Artinya,

pengangguran terdidik yang tinggal di perdesaan belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di kota.

Hasil analisis data faktor penentu durasi menganggur di pulau Maluku disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 48 : Faktor Penentu Durasi Menganggur di Pulau Maluku

No	Variabel Bebas	Model Penelitian							
		Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig
1	Constant	-4.012	***	-4.293	***	-3.872	**	-4.712	***
2	Edu	1.446	***	1.461	***	1.420	**	1.381	***
3	Wk	0.785	***	0.768	***	0.740	***	1.008	***
4	Exp	0.178		0.224	*	0.254	*	0.450	**
5	Age	0.927	***	0.608	***	0.535	***	0.648	**
6	Gen			0.103		0.150		0.361	
7	Mar			0.426	**	0.452	**	0.586	**
8	Ph			0.314	*	0.308	*	0.294	
9	Ra					-0.693	***	0.790	
10	Edu*Ra							-0.716	
11	Wk*Ra							-0.440	
12	Exp*Ra							-0.404	
13	Age*Ra							-0.215	
14	Gen*Ra							-0.411	
15	Mar*Ra							-0.319	
16	Ph*Ra							0.060	
Pseudo r-squared		0.086		0.095		0.110		0.118	

Sumber : Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 7)

Probabilitas tenaga kerja terdidik menganggur lebih lama di pulau Maluku dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur dan status perkawinan. Adapun bentuk pengaruh masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Maluku. pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi. Nilai *odds ratio* 6,563 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat memiliki probabilitas menganggur 6,563 kali lebih lama dibandingkan dengan yang tamatan perguruan tinggi.

2. Pelatihan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur pulau Maluku, pengangguran terdidik yang belum pernah mengikuti pelatihan memiliki peluang lebih lama menganggur dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja. Nilai *odds ratio* 2,740 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang belum mengikuti pelatihan kerja memiliki probabilitas menganggur 2,740 kali lebih lama dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja.
3. Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur pulau Maluku, pengangguran terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja. Nilai *odds ratio* 1,569 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang belum mengikuti pelatihan kerja memiliki probabilitas menganggur 1,569 kali lebih lama dibandingkan dengan yang sudah mengikuti pelatihan kerja.
4. Umur berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur pulau Maluku, pengangguran terdidik yang berumur muda memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang berumur tua. Nilai *odds ratio* 1,911 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang berumur muda memiliki probabilitas menganggur 1,911 kali lebih lama dibandingkan dengan yang berumur tidak muda lagi.
5. Jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur pulau Maluku, pengangguran terdidik perempuan belum tentu memiliki peluang lebih lama menganggur dibandingkan dengan laki-laki.
6. Status perkawinan berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur pulau Maluku, pengangguran terdidik yang belum menikah memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah menikah. Nilai *odds ratio* 1,797 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang belum menikah memiliki probabilitas menganggur 1,797 kali lebih lama dibandingkan dengan yang sudah menikah.
7. Kedudukan dalam rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur pulau Maluku, pengangguran terdidik yang berkedudukan bukan

kepala rumah tangga belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga.

8. Wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur pulau Maluku, pengangguran terdidik yang tinggal di perdesaan belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di kota.

Hasil analisis data faktor penentu durasi menganggur di pulau Papua disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 49 : Faktor Penentu Durasi Menganggur di Pulau Papua

No	Variabel Bebas	Model Penelitian							
		Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
		Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig	Coef	Sig
1	Constant	-1.930	***	-4.529	***	-4.960	***	6.641	***
2	Edu	-1.142	**	-1.379	**	-1.435	***	2.398	**
3	Wt	0.158		0.030		0.031		1.936	
4	Exp	0.598		0.760		0.771		0.320	
5	Age	0.840		1.999	**	2.102	**	2.054	
6	Gend			-1.101		-1.100		3.162	**
7	Ms			2.835	**	2.893	**	3.806	**
8	Ph			0.688		0.670		2.492	**
9	Ra					0.692		1.384	
10	Edu*Ra							1.125	
11	Wt*Ra							2.602	*
12	Exp*Ra							0.003	
13	Age*Ra							0.652	
14	Gend*Ra							4.002	*
15	Ms*Ra							0.857	
16	Ph*Ra							3.982	**
Pseudo r-squared		0.065		0.122		0.137		0.224	

Sumber: Hasil olahan data, 2020 (Lampiran 7)

Probabilitas durasi menganggur lebih lama di pulau Papua dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga, interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal, interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal dan interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal. Adapun bentuk pengaruh masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan berpengaruh negative signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Papua, pengangguran terdidik tamatan perguruan tinggi memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan SMA/ sederajat. Nilai *odds ratio* 0,091 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik tamatan perguruan tinggi memiliki probabilitas menganggur 0,091 kali lebih lama dibandingkan dengan yang tamatan SMA/ sederajat.
2. Pelatihan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Papua. Artinya, lama atau pendeknya durasi menganggur pengangguran terdidik di pulau Papua tidak ditentukan oleh pelatihan kerja yang pernah diikuti oleh pengangguran terdidik tersebut.
3. Pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Papua. Artinya, lama atau pendeknya durasi menganggur pengangguran terdidik di pulau Papua tidak ditentukan oleh pengalaman kerja yang dimiliki oleh pengangguran terdidik tersebut.
4. Umur berpengaruh tidak signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Papua, Artinya, lama atau pendeknya durasi menganggur pengangguran terdidik di pulau Papua tidak ditentukan oleh umur pengangguran terdidik tersebut.
5. Jenis kelamin berpengaruh negative signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Papua. Pengangguran terdidik laki-laki memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan perempuan. Nilai *odds ratio* 0,042 menunjukkan bahwa pengangguran laki-laki memiliki probabilitas menganggur 0,042 kali lebih lama dibandingkan dengan perempuan.
6. Status perkawinan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik di pulau Papua, pengangguran terdidik yang belum menikah memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah menikah. Nilai *odds ratio* 44,950 menunjukkan bahwa pengangguran yang belum menikah memiliki probabilitas menganggur 44,950 kali lebih lama dibandingkan dengan yang sudah menikah.

7. Kedudukan dalam rumah tangga berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur. Pengangguran terdidik yang berkedudukan bukan kepala rumah tangga memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga. Nilai *odds ratio* 12,087 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang berkedudukan bukan kepala rumah tangga memiliki probabilitas menganggur 12,087 kali lebih lama dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga.
8. Wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur dari pengangguran terdidik di pulau Papua, pengangguran terdidik yang tinggal di perdesaan belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di kota.
9. Interaksi pelatihan kerja dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang sudah pernah mengikuti pelatihan kerja dan tinggal di perkotaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang belum pernah mengikuti pelatihan kerja dan tinggal di perdesaan. Nilai *odds ratio* 0,074 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang tidak pernah mengikuti pelatihan kerja dan tinggal di perkotaan memiliki probabilitas menganggur 0,074 kali lebih lama dibandingkan dengan yang belum pernah mengikuti pelatihan kerja dan tinggal di perdesaan.
10. Interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik perempuan dan tinggal di perdesaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan laki-laki dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 54,681 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik perempuan dan tinggal di perdesaan memiliki probabilitas menganggur 54,681 kali lebih lama dibandingkan dengan pengangguran terdidik laki-laki dan tinggal di perkotaan
11. Interaksi jenis kelamin dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh positif signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik perempuan dan tinggal di perdesaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan laki-laki dan tinggal di perkotaan. Nilai *odds ratio* 54,681 menunjukkan

bahwa pengangguran terdidik perempuan dan tinggal di perdesaan memiliki probabilitas menganggur 54,681 kali lebih lama dibandingkan dengan pengangguran terdidik laki-laki dan tinggal di perkotaan

12. Interaksi kedudukan dalam rumah tangga dengan wilayah tempat tinggal berpengaruh negative signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan tinggal di perkotaan memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan bukan kepala keluarga dan tinggal di perdesaan. Nilai *odds ratio* 0,019 menunjukkan bahwa pengangguran terdidik yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dan tinggal di perkotaan memiliki probabilitas menganggur 0,019 kali lebih lama dibandingkan dengan bukan kepala keluarga dan tinggal di perdesaan

D. Pengujian Hipotesis Penelitian

1. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama penelitian ini berbunyi bahwa “Probabilitas pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat lebih besar dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi”. Nilai koefisien variabel tingkat pendidikan sebesar 1,041 dengan nilai *t-value* sebesar 8,15 dan nilai *probability* sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama **diterima** pada tingkat kepercayaan 99%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa probabilitas angkatan pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat lebih besar dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi.

2. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua penelitian ini berbunyi bahwa “Probabilitas pengangguran terdidik yang tidak pernah mengikuti pelatihan kerja lebih besar dari pada yang pernah mengikuti pelatihan kerja”. Nilai koefisien variabel pelatihan kerja sebesar 0,474 dengan nilai *t-value* sebesar 6,27 dan nilai *probability* sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua **diterima** pada tingkat kepercayaan 99%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa probabilitas pengangguran terdidik yang tidak pernah mengikuti pelatihan kerja lebih besar dari pada yang pernah mengikuti pelatihan kerja.

3. Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga penelitian ini berbunyi bahwa “Probabilitas pengangguran terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja”. Nilai koefisien variabel pengalaman kerja sebesar 0,959 dengan nilai *t-value* sebesar 13,32 dan nilai *probability* sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga **diterima** pada tingkat kepercayaan 99%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa probabilitas pengangguran terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja.

4. Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis keempat penelitian ini berbunyi bahwa “Probabilitas pengangguran terdidik yang berusia muda lebih besar dibandingkan dengan yang berusia tua”. Nilai koefisien variabel umur sebesar 0,594 dengan nilai *t-value* sebesar 6,42 dan nilai *probability* sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat **diterima** pada tingkat kepercayaan 99%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa probabilitas pengangguran terdidik yang berusia muda lebih besar dibandingkan dengan yang berusia tua.

5. Pengujian Hipotesis 5

Hipotesis kelima penelitian ini berbunyi bahwa “Probabilitas pengangguran terdidik perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki”. Nilai koefisien gender umur sebesar 0,241 dengan nilai *t-value* sebesar 3,38 dan nilai *probability* sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima **diterima** pada tingkat kepercayaan 99%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa probabilitas pengangguran terdidik perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

6. Pengujian Hipotesis 6

Hipotesis keenam penelitian ini berbunyi bahwa “Probabilitas pengangguran terdidik yang belum kawin lebih besar dibandingkan dengan yang sudah kawin”. Nilai koefisien status perkawinan sebesar 2,096 dengan nilai *t-value* sebesar 18,46

dan nilai *probability* sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam **diterima** pada tingkat kepercayaan 99%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa probabilitas pengangguran terdidik yang belum kawin lebih besar dibandingkan dengan yang sudah kawin.

7. Pengujian Hipotesis 7

Hipotesis ketujuh penelitian ini berbunyi bahwa “Probabilitas pengangguran terdidik yang berkedudukan non-kepala rumah tangga lebih besar dibandingkan dengan kepala rumah tangga”. Nilai koefisien variabel kedudukan dalam rumah tangga sebesar 0,009 dengan nilai *t-value* sebesar 0,07 dan nilai *probability* sebesar 0,947. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh **ditolak**. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa probabilitas pengangguran terdidik yang berkedudukan non kepala rumah tangga belum tentu lebih besar dibandingkan dengan yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga.

8. Pengujian Hipotesis 8

Hipotesis kedelapan penelitian ini berbunyi bahwa “Probabilitas pengangguran terdidik yang tinggal di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan yang tinggal di kota”. Nilai koefisien variabel wilayah tempat tinggal sebesar -0,074 dengan nilai *t-value* sebesar -0,42 dan nilai *probability* sebesar 0,676. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedelapan **ditolak**. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa probabilitas pengangguran terdidik tidak dipengaruhi oleh wilayah tempat tinggal.

9. Pengujian Hipotesis 9

Hipotesis kesembilan penelitian berbunyi bahwa “Pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi”. Nilai koefisien variabel tingkat pendidikan sebesar 1,970 dengan nilai *t-value* sebesar 5,08 dan nilai *probability* sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 9 **diterima** pada tingkat kepercayaan 99%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi.

10. Pengujian Hipotesis 10

Hipotesis kesepuluh penelitian berbunyi bahwa “Pengangguran terdidik yang tidak pernah mengikuti pelatihan kerja berpeluang menganggur lebih lama daripada yang pernah mengikuti pelatihan kerja”. Nilai koefisien variabel pelatihan kerja adalah 1,010 dengan nilai *t-value* sebesar 3,80 dan nilai *probability* sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kesepuluh **diterima** pada tingkat kepercayaan 99%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengangguran terdidik yang tidak pernah mengikuti pelatihan kerja berpeluang menganggur lebih lama daripada yang pernah mengikuti pelatihan kerja.

11. Pengujian Hipotesis 11

Hipotesis kesebelas penelitian berbunyi bahwa “Pengangguran terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja”. Nilai koefisien variabel pengalaman kerja adalah 0,491 dengan nilai *t-value* sebesar 2,49 dan nilai *probability* sebesar 0,013. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 11 **diterima** pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengangguran terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja.

12. Pengujian Hipotesis 12

Hipotesis duabelas penelitian berbunyi bahwa “Pengangguran terdidik yang berusia muda berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang berusia tua”. Nilai koefisien variabel umur adalah 0,685 dengan nilai *t-value* sebesar 2,71 dan nilai *probability* sebesar 0,007. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 12 **diterima** pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengangguran terdidik yang berusia muda berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang berusia tua.

13. Pengujian Hipotesis 13

Hipotesis ketiga belas penelitian berbunyi bahwa “Pengangguran terdidik perempuan berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan laki-laki”.

Nilai koefisien variabel gender sebesar 0,352 dengan nilai *t-value* sebesar 1,51 dan nilai *probability* sebesar 0,130. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 13 **ditolak**. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengangguran terdidik perempuan belum tentu berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan laki-laki.

14. Pengujian Hipotesis 14

Hipotesis keempat belas penelitian berbunyi bahwa “Pengangguran terdidik yang belum kawin berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah menikah”. Nilai koefisien variabel status perkawinan sebesar 0,605 dengan nilai *t-value* sebesar 2,44 dan nilai *probability* sebesar 0,015. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 14 **diterima** pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengangguran terdidik yang belum kawin berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah kawin.

15. Pengujian Hipotesis 15

Hipotesis kelimabelas penelitian berbunyi bahwa “Pengangguran terdidik yang berkedudukan non kepala rumah tangga berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan kepala rumah tangga”. Nilai koefisien variabel kedudukan dalam rumah tangga sebesar 0,354 dengan nilai *t-value* sebesar 1,41 dan nilai *probability* sebesar 0,160. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 15 **ditolak**. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengangguran terdidik yang berkedudukan non kepala rumah tangga belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan kepala rumah tangga.

16. Pengujian Hipotesis 16

Hipotesis keenambelas penelitian berbunyi bahwa “Pengangguran terdidik yang tinggal di perdesaan berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di kota”. Nilai koefisien variabel wilayah tempat tinggal adalah 0,853 dengan nilai *t-value* sebesar 1,72 dan nilai *probability* sebesar 0,085. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 15 **diterima** pada tingkat kepercayaan 90%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengangguran terdidik yang tinggal di perdesaan

memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan.

Adapun rekapitulasi hasil pengujian hipotesis penelitian disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 50 : Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Hasil
1	Probabilitas pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat lebih besar dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi	Ha diterima
2	Probabilitas pengangguran terdidik yang tidak pernah mengikuti pelatihan kerja lebih besar dari pada yang pernah mengikuti pelatihan kerja	Ha diterima
3	Probabilitas pengangguran terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja	Ha diterima
4	Probabilitas pengangguran terdidik yang berusia muda lebih besar dibandingkan dengan yang berusia tua	Ha diterima
5	Probabilitas pengangguran terdidik perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki	Ha diterima
6	Probabilitas pengangguran terdidik yang belum kawin lebih besar dibandingkan dengan yang sudah kawin	Ha diterima
7	Probabilitas pengangguran terdidik yang berkedudukan non kepala rumah tangga lebih besar dibandingkan dengan kepala rumah tangga	Ha ditolak
8	Probabilitas pengangguran terdidik yang tinggal di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan yang tinggal di kota	Ha ditolak
9	Pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi	Ha diterima
10	Pengangguran terdidik yang tidak pernah mengikuti pelatihan kerja berpeluang menganggur lebih lama daripada yang pernah mengikuti pelatihan kerja	Ha diterima
11	Pengangguran terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja	Ha diterima
12	Pengangguran terdidik yang berusia muda berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang berusia tua	Ha diterima
13	Pengangguran terdidik perempuan berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan laki-laki	Ha ditolak
14	Pengangguran terdidik yang belum kawin berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah kawin	Ha diterima
15	Pengangguran terdidik yang berkedudukan non kepala rumah tangga berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan kepala rumah tangga	Ha ditolak
16	Pengangguran terdidik yang tinggal di perdesaan berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di kota	Ha diterima

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terdidik

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik, probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik tamatan SMA/ sederajat lebih besar dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi. Hal ini membuktikan bahwa tenaga kerja tamatan SMA/ sederajat akan berpeluang lebih besar menjadi pengangguran terdidik dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja terdidik maka semakin kecil peluangnya menjadi pengangguran terdidik.

Berdasarkan temuan penelitian ini diketahui bahwa pendidikan formal sangat instrumental dan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu sehingga pendidikan dianggap sebagai investasi modal manusia dalam industri. Pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada dan mencerminkan tingkat kepandaian atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk karena semakin pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Tujuan dasar pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan upaya pemenuhan manusia siap pakai. Kecenderungan makin meningkatnya tingkat pendidikan akan berakibat meningkatnya pula angka pengangguran tenaga kerja terdidik daripada bertambahnya tenaga kerja yang mempunyai produktivitas sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

Temuan penelitian ini didukung oleh pendapat Kamaludin (1999) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan dan kesempatan untuk bekerja. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung memiliki kemampuan ataupun keahlian yang beragam

sehingga akan meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi masalah pengangguran. Temuan penelitian ini juga didukung oleh pendapat Elfindri dan Bachtiar (2004) yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan dimana lapangan pekerjaan merupakan indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam hubungannya dengan kualitas sumber daya manusia, pendidikan dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang modern.

Temuan penelitian ini didukung oleh temuan penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa tingkat pendidikan angkatan menentukan besar kecilnya peluang untuk diterima bekerja oleh perusahaan, dimana angkatan kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi akan memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima bekerja dan sebaliknya angkatan kerja yang berpendidikan rendah akan berpeluang menganggur (Ashenfelter dan Ham, 1979; Foley, 1997; Kettner, 1997; Taki, 1997; Moen, 1999; Grogan, *et al*, 2001; Tansel dan Tasci, 2004; Khan dan Youssef, 2013; Baah-Boateng, 2013; 2015; Ordine dan Rose, 2015; Skenderi dan Uka, 2015)

2. Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik, probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik yang tidak pernah mengikuti pelatihan kerja lebih besar dari pada yang pernah mengikuti pelatihan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tenaga kerja terdidik pernah mengikuti pelatihan kerja akan memperkecil peluangnya untuk menjadi pengangguran karena pada pelatihan tersebut maka mereka dibekali banyak keterampilan yang dapat dipergunakannya dalam mendapatkan maupun membuka lapangan pekerjaan.

Temuan penelitian menemukan bahwa apabila angkatan kerja terdidik pernah mengikuti pelatihan kerja maka peluangnya menjadi pengangguran terdidik akan

semakin kecil dan sebaliknya, hal ini disebabkan karena pelatihan tersebut merupakan serangkaian aktivitas untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan peserta pelatihan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Dengan bahasa lain dapat disebutkan bahwa pelatihan itu merupakan upaya untuk menransfer keterampilan dan pengetahuan kepada para peserta pelatihan sedemikian rupa sehingga para peserta memiliki keterampilan untuk diterapkan pada dunia kerja.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pelatihan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada dan mencerminkan tingkat kepandaian atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk karena semakin sering seseorang mengikuti pelatihan maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja yang tentunya akan memperkecil peluangnya menjadi pengangguran.

Temuan penelitian didukung oleh pendapat Mankiw (2007) yang menyatakan bahwa para ekonom mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi sebab-sebabnya dan untuk membantu memperbaiki kebijakan publik yang mempengaruhi pengangguran. Sebagian kebijakan ini, seperti program pelatihan kerja. Program pelatihan kerja ini akan dapat membantu orang mendapatkan pekerjaan.

Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa angkatan kerja yang sudah pernah mengikuti pelatihan kerja akan memiliki peluang lebih besar dapat diterima bekerja di perusahaan dibandingkan dengan angkatan kerja yang belum pernah mengikuti pelatihan kerja (Powell, 1983; Baah-Boateng, 2013; 2015; Sansale, dkk, 2019).

3. Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik, probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik yang memiliki pengalaman kerja akan memiliki

peluang yang besar untuk diterima bekerja dibandingkan dengan yang tidak memiliki pengalaman kerja.

Temuan penelitian ini menemukan bahwa angkatan kerja yang berpengalaman dalam bekerja memiliki kemampuan kerja yang lebih baik dari orang yang baru saja memasuki dunia kerja, karena orang tersebut telah belajar dari kegiatan-kegiatan dan permasalahan yang timbul dalam kerjanya. Dengan adanya pengalaman kerja maka telah terjadi proses penambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta sikap pada diri seseorang sehingga dapat menunjang dalam mengembangkan diri dengan perubahan yang ada.

Temuan penelitian ini didukung oleh pendapat Sutomo, dkk, (1999) yang menyatakan bahwa dengan adanya pengalaman kerja maka pencari kerja lebih sanggup untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai, selain itu pengalaman kerja menggambarkan pengetahuan pasar kerja. Dengan memiliki pengalaman kerja didukung tingkat pendidikan yang tinggi, maka tenaga kerja akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan (Sutomo, dkk, 1999). Penyedia lapangan pekerjaan lebih mengutamakan tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja. Tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja akan lebih siap dan mampu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang baru bila dibandingkan dengan tenaga kerja yang belum memiliki pengalaman kerja. Dengan memiliki pengalaman kerja akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan (Setiawan, 2010).

Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa adanya pengalaman kerja akan mempermudah seseorang untuk mendapatkan pekerjaan (Ashenfelter dan Ham, 1979; McConnel, 1999; George, 2004).

4. Pengaruh Umur Terhadap Pengangguran Terdidik

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa umur berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik, probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik yang berusia muda lebih besar dibandingkan dengan yang berusia tua. Hal ini menunjukkan bahwa umur merupakan faktor yang menentukan seorang tenaga

kerja terdidik untuk menjadi pengangguran atau tidak. Tenaga kerja yang tergolong usia muda cenderung menganggur daripada yang tergolong usia tua karena tenaga kerja yang berusia muda memiliki beban hidup yang ringan sehingga cenderung menganggur dibandingkan yang tidak muda lagi yang memiliki beban hidup yang berat.

Temuan penelitian ini didukung oleh pendapat Djojohadikusumo (1999) yang menjelaskan penduduk yang tergolong kedalam tingkat usia muda adalah yang berumur 15-24 tahun. Barthos (1993) menjelaskan bahwa golongan umur yang tergolong usia muda dalam pasar tenaga kerja adalah angkatan kerja yang berumur antara 15-24 tahun. Menurut Mulyono (1997) pengangguran terdidik akan lebih terlihat terutama dari kelompok usia muda (15-24 tahun) lebih tinggi daripada kelompok usia di atas 24 tahun. Penelitian Allen (2016) menemukan bahwa sepertiga dari penganggur terutama pada usia muda harus menunggu selama satu tahun untuk masuk ke pasar kerja, terutama untuk masuk pasar kerja sektor formal. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai *choosy educated job seekers*.

Menurut Bellante (1990), tingkat pengangguran dikalangan remaja adalah sangat tinggi, selanjutnya mereka memang semakin tinggi jumlahnya dalam perjalanan waktu. Hampir di Negara-negara sedang berkembang tingkat pengangguran untuk golongan 15-24 tahun dua kali lipat atau lebih dari tingkat pengangguran untuk semua golongan umur baik laki-laki maupun perempuan.

Golongan umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun sangat menonjol tingkat penganggurannya, namun tingkat golongan umur 24 tahun ke atas proporsinya terus menurun dan relatif rendah. Gejala penurunan ini diduga erat berkaitan dengan pola perkawinan. Apabila dihubungkan dengan menonjolnya pola pengangguran pada golongan umur muda ternyata itu berhubungan dengan tingkat pendidikan (Sutomo, 1999).

Lama pengangguran akan berbeda antar kelompok dalam angkatan kerja, dan semakin panjang dengan meningkatnya usia. Pengangguran antar pekerja jauh lebih tinggi daripada antar pekerja yang lebih tua, tetapi sifat penganggurannya berbeda. Para pekerja muda cenderung lebih sering menganggur dan dengan masa yang

singkat, sedangkan pekerja yang lebih tua jarang menganggur tetapi untuk periode yang lebih panjang (Dharmakusuma, 1998).

Kesempatan kerja pada industri-industri atau pekerjaan lainnya akan lebih terbatas bagi individu yang lebih tua dengan masa pengangguran yang panjang lebih dari satu tahun dibandingkan individu yang lebih muda. Hal ini dapat disebabkan oleh; 1) menurunnya kesempatan kerja bersamaan dengan bertambahnya umur; 2) terbatasnya kesempatan kerja yang menambah panjang masa menganggur di usia muda (Dygalos, 2007).

Temuan penelitian ini relevan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa angkatan kerja yang berusia muda berpeluang menganggur dibandingkan dengan yang berusia tidak muda (Johnson and Layard, 1993; Aryeetey, et al., 2014; Baah-Boateng, 2013; 2015; Albanesi dan Sahin, 2018; Sansane dkk, 2019).

5. Pengaruh Gender Terhadap Pengangguran Terdidik

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik, probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik perempuan memiliki peluang menganggur lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, karena perempuan memiliki beberapa keterbatasan dibandingkan dengan laki-laki.

Persoalan mengenai gender bukanlah merupakan suatu kajian yang baru dalam hidup bermasyarakat, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami seutuhnya mengenai gender khususnya di negara Indonesia yang menimbulkan ketimpangan dalam penerapan gender di masyarakat. Sehingga membahas masalah gender selalu menarik untuk dikaji. Menurut Mulyono (1997) menyatakan bahwa pencari kerja laki-laki mempunyai tingkat probabilitas untuk mencari kerja lebih tinggi daripada pencari kerja perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya probabilitas mencari kerja lebih besar pada pencari kerja laki-laki daripada pencari kerja perempuan.

Menurut ILO (2015) di Indonesia tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih tergolong sangat rendah yaitu berkisar antara 50% sampai 55% selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak perempuan yang berada diluar dunia kerja. Banyaknya perempuan yang tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja diakibatkan tanggung jawab keluarga, dimana ada banyak perempuan yang menyatakan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Situasi ini menegaskan adanya perbedaan gender dalam hal pembagian tanggung jawab keluarga dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja kemungkinan besar dapat merubah sifat ketidaksetaraan gender di Indonesia.

Jadi, jenis kelamin merupakan perbedaan yang tampak antara wanita dan pria dalam hal nilai dan perilaku. Wanita dianggap makhluk yang lemah untuk jenis pekerjaan tertentu, sehingga posisi wanita dalam dunia kerja masih dirugikan. Bagi masyarakat tertentu yang masih mendiskriminasikan wanita sebagai makhluk yang lemah akan membuat hambatan tersendiri bagi wanita, seperti posisi kerja yang tidak terlalu baik dan dengan upah yang rendah. Kesenjangan gender pada era modern ini yaitu sikap dan perilaku yang sama diberikan kepada wanita ataupun pria khususnya akses untuk bekerja, namun tidak sepenuhnya kesetaraan itu sesuai pada kondisi sebenarnya.

Temuan penelitian ini relevan dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa angkatan kerja perempuan berpeluang menganggur daripada angkatan kerja laki-laki (Theodossiou dan Zangelidis, 2009; Baah-Boateng, 2013; 2015; Albanesi dan Sahin, 2018)

6. Pengaruh Status Perkawinan Terhadap Pengangguran Terdidik

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa status perkawinan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik, probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik yang belum kawin lebih besar dibandingkan dengan yang sudah kawin. Hal ini menunjukkan bahwa status perkawinan merupakan faktor mempengaruhi pengangguran terdidik, dimana tenaga kerja terdidik yang belum kawin cenderung menganggur dibandingkan dengan yang sudah kawin.

Berdasarkan temuan penelitian ini diketahui apabila tenaga kerja terdidik sudah menikah maka ada kecenderungan untuk tidak menganggur karena apabila mereka sudah menikah tentunya mereka memiliki beban hidup yang cukup tinggi dan tidak tepat lagi meminta bantuan hidup kepada orang tuanya sehingga mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Temuan penelitian ini didukung oleh pendapat Kaufman dan Hotchkiss (2006) menyatakan bahwa status perkawinan menyebabkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi angkatan kerja, perempuan yang telah menikah dituntut untuk melakukan aktivitas rumah, dan pasar kerja yang bersedia kebanyakan menerima perempuan yang berstatus tunggal atau single. Berbeda dengan pria yang sudah menikah biasanya tidak memiliki hambatan yang berarti untuk memasuki pasar kerja sehingga akan memiliki durasi menganggur lebih pendek.

Temuan penelitian ini relevan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa angkatan kerja yang belum menikah berpeluang menganggur lebih besar daripada angkatan kerja yang sudah menikah atau berkeluarga (Kaufman dan Hotchkiss, 2006; Theodossiou dan Zangelidis, 2009; Baah-Boateng, 2013; 2015; Albanesi dan Sahin, 2018)

7. Pengaruh Kedudukan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pengangguran Terdidik

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa kedudukan dalam rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik, probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik yang berkedudukan non kepala rumah tangga belum tentu lebih besar dibandingkan dengan kepala rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran terdidik tidak ditentukan oleh kedudukan dalam rumah tangga, dimana tenaga kerja yang berstatus sebagai non kepala rumah maupun sebagai kepala rumah tangga sama-sama memiliki peluang menganggur.

Temuan penelitian ini menemukan bahwa kedudukan dalam rumah tangga bukanlah faktor yang mempengaruhi tenaga kerja terdidik untuk menjadi pengangguran karena kebanyakan perusahaan atau instansi yang menyediakan

lapangan pekerjaan tidak membedakan tenaga kerja berdasarkan status pernikahan maupun kedudukannya dalam rumah tangga sehingga mereka menerima karyawan biasanya yang diperhatikan adalah tingkat pendidikannya.

Menurut BPS (2015) kepala rumah tangga (KRT) adalah seseorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dianggap /ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan anggota rumah tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (kepala rumah tangga, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, family lain, pembantu rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya), baik yang berada di rumah tangga responden maupun sementara tidak ada pada waktu pencacahan. Seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab akan rela bekerja apa saja demi memenuhi nafkah keluarganya, lain halnya pada saat belum menikah karena masih ditopang keluarga.

Temuan penelitian ini tidak konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya yang menemukan angkatan kerja yang berstatus sebagai kepala keluarga cenderung tidak menganggur dibandingkan dengan yang bukan kepala keluarga (Khan dan Yousaf 2013)

8. Pengaruh Wilayah Tempat Tinggal Terhadap Pengangguran Terdidik

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa wilayah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik, probabilitas menganggur tenaga kerja terdidik yang tinggal di wilayah pedesaan belum tentu lebih besar dibandingkan dengan yang tinggal di kota. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tempat tinggal merupakan bukanlah faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadi pengangguran, dimana tenaga kerja yang tinggal di pedesaan belum tentu berpeluang menganggur karena di pedesaan juga tersedia lapangan pekerjaan.

Wilayah tempat tinggal yang dimaksud pada penelitian ini merupakan wilayah dimana suatu tenaga kerja terdidik tinggal dan menetap. Wilayah tempat tinggal ini dibagi menjadi dua bagaian yaitu wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan dan ditemukan bahwa tenaga kerja yang tinggal di pedesaan belum tentu memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di

perkotaan karena pada saat ini akses dari desa ke kota tidaklah begitu sulit dan informasi-informasi yang ada di perkotaan juga dapat diakses di perdesaan melalui internet sehingga orang yang berada di perdesaan akan mengetahui juga informasi lapangan pekerjaan yang tersedia di kota.

Temuan penelitian ini didukung oleh pendapat Todaro dan Smith (2004) yang menyatakan bahwa adanya pembangunan ekonomi di wilayah perkotaan sering dideskripsikan sebagai transfer manusia dan aktivitas ekonomi secara terus menerus dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan. Ini dimungkinkan karena kombinasi dua faktor yaitu : (1) ekspansi industri perkotaan yang menimbulkan penciptaan kesempatan kerja baru; (2) kemajuan teknologi yang bersifat menghemat tenaga kerja (*labor saving*) di sektor pertanian sehingga menurunkan kebutuhan angkatan kerja di daerah perdesaan.

Pengangguran terdidik di negara sedang berkembang umumnya dikelompokkan pada golongan usia muda dan yang berpendidikan dan terpusat di kota dan pada di desa. Kelompok pengangguran ini kebanyakan adalah tenaga kerja yang baru menyelesaikan pendidikan dan sedang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi mereka. Selama menunggu pekerjaan yang diinginkan, biaya mereka ditanggung oleh keluarga yang relatif mampu (Effendi, 1995).

Baah-Boateng (2015) menemukan lokasi tempat tinggal akan menentukan seseorang menjadi pengangguran atau tidak, dimana angkatan kerja yang tinggal di kota lebih rentan menganggur dari pada yang tinggal di desa. Foley (1997) menyatakan bahwa individu yang tinggal di daerah akan mengalami durasi menganggur yang lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di kota. Gogan, *et.al* (2001) menemukan bahwa durasi menganggur yang panjang terjadi pada individu yang tinggal di luar dari kota besar (perdesaan).

9. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Durasi Menganggur

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan

tamatan perguruan tinggi. Hal ini membuktikan bahwa tenaga kerja tamatan SMA/ sederajat akan mengalami durasi menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi karena keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja tamatan SMA/ sederajat lebih terbatas dibandingkan dengan tenaga kerja tamatan perguruan tinggi. Dengan demikian diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang angkatan kerja maka semakin pendek durasi menganggurnya.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada dan mencerminkan tingkat kepandaian atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk karena semakin pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Tujuan dasar pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan upaya pemenuhan manusia siap pakai. Kecenderungan makin meningkatnya tingkat pendidikan akan berakibat meningkatnya pula angka pengangguran tenaga kerja terdidik daripada bertambahnya tenaga kerja yang mempunyai produktivitas sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dari segi sosial dan ekonomi, dengan pendidikan yang baik akan mengarah ke pekerjaan yang menarik. Tetapi tenaga kerja yang berpendidikan tinggi menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dan mengalami masa pencarian kerja yang lebih lama daripada tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka seseorang akan cenderung hanya mau bekerja pada pekerjaan yang memberi upah, status, dan kepuasan yang relatif tinggi. Dengan demikian semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, proses mencari kerjanya akan lebih lama, karena lebih mampu untuk memilih dan menolak suatu pekerjaan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin pendek durasi menganggurnya dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. Moeis (1992) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan akan mengurangi biaya mencari kerja karena tenaga kerja terdidik semakin efisien dalam mencari pekerjaan sebab mereka memiliki pengetahuan tentang pasar kerja

beserta kelembagaannya, serta lingkungan pekerjaan. Foley (1997) menyatakan pekerja dengan pendidikan tinggi tidak akan menganggur lebih lama daripada mereka yang memiliki pendidikan menengah atau bahkan sekolah dasar. Kettunen (1997) menyatakan bahwa orang-orang yang menganggur dan memiliki tingkat pendidikan sekitar 13-14 tahun memiliki kemungkinan yang besar untuk dapat kembali bekerja dan durasi menganggurnya pendek. Takii (1997) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan angkatan menentukan besar kecilnya untuk diterima bekerja oleh perusahaan, dimana angkatan kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi akan memiliki peluang yang tinggi untuk diterima bekerja dan sebaliknya. Grogan *et.al* (2001) menemukan bahwa durasi menganggur yang panjang terjadi individu dengan pendidikan rendah. Tansel dan Tasci (2004) menyatakan angkatan kerja yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memiliki durasi menganggur lebih pendek dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. Khan dan Yousef (2013) menemukan bahwa pemegang gelar pendidikan yang lebih tinggi mengalami lebih pendek durasi pengangguran daripada rekan mereka pemegang gelar rendah.

Penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pengangguran akan mempendek durasi menganggurnya (Moeis, 1992; Foley, 1997; Kettunen, 1997; Takii, 1997; Grogan, *et.al*, 2001; Tansel dan Tasci, 2004; Khan dan Yousef, 2013; Skenderi dan Uka, 2015; Jolianis, dkk, 2019). Hal ini mempertegas bahwa pengangguran terdidik tamatan SMA/ sederajat berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan tamatan perguruan tinggi.

10. Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Durasi Menganggur

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang tidak pernah mengikuti pelatihan kerja berpeluang menganggur lebih lama daripada yang pernah mengikuti pelatihan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan kerja berperan dalam menentukan lama atau pendeknya seseorang menjadi pengangguran, dimana

dengan diikuti pelatihan kerja bagi tenaga kerja terdidik ternyata akan mempersingkat durasi menganggur.

Pelatihan akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian program pelatihan sangat membantu dalam memungkinkan individu untuk memasuki lapangan kerja dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Maka masa mencari kerja bagi orang yang pernah mengikuti pelatihan akan lebih singkat daripada orang yang tidak mengikuti pelatihan.

Pelatihan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia agar bisa melakukan suatu pekerjaan tertentu. Mengikuti pelatihan akan meningkatkan kualitas dan produktivitas seseorang. Dengan begitu seseorang yang pernah mengikuti pelatihan akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada yang tidak/ belum pernah mengikuti pelatihan. Perusahaan tentu akan lebih memilih tenaga kerja yang sudah terlatih karena perusahaan tidak akan mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan pelatihan untuk pekerjanya. Maka bisa dikatakan orang yang pernah mengikuti pelatihan akan lebih singkat masa mencari kerjanya.

Temuan penelitian didukung oleh pendapat Mankiw (2007) yang menyatakan bahwa para ekonom mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi sebab-sebabnya dan untuk membantu memperbaiki kebijakan publik yang mempengaruhi pengangguran. Sebagian kebijakan ini, seperti program pelatihan kerja. Program pelatihan kerja ini akan dapat membantu orang mendapatkan pekerjaan.

Temuan penelitian ini didukung oleh temuan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa pengangguran yang telah pernah mengikuti pelatihan kerja memiliki peluang menganggur lebih pendek dibandingkan dengan yang belum pernah mengikuti pelatihan kerja (Khan dan Yousef, 2013; Cheron dan Terriau (2018; Jolians, dkk. 2019)

11. Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Durasi Menganggur

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa

pengangguran terdidik yang memiliki pengalaman kerja akan memiliki durasi menganggur lebih pendek dibandingkan dengan yang tidak memiliki pengalaman kerja.

Berdasarkan temuan penelitian ini diketahui bahwa pengalaman kerja adalah faktor yang memiliki peranan dalam menentukan panjang atau pendeknya durasi menganggur dari tenaga kerja terdidik. Apabila seorang tenaga kerja terdidik memiliki pengalaman kerja tentunya akan mempermudah dia dalam mendapatkan pekerjaan karena sudah dibekali oleh pengalaman kerja. Begitu juga pada aspek penyedia lapangan kerja yang tentunya dalam melakukan rekrutmen lebih mengutamakan menerima tenaga kerja yang berpengalaman daripada yang tidak memiliki pengalaman kerja. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pengalaman kerja akan memperpendek durasi menganggur dari pengangguran terdidik di Indonesia.

Dengan memiliki pengalaman kerja tenaga kerja akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, terkait dengan keinginan pemberi kerja untuk mendapatkan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih untuk menghemat biaya pelatihan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam melatih karyawan baru. Dengan kata lain tenaga kerja yang berpengalaman lebih siap untuk memasuki dunia kerja dibanding dengan tenaga kerja yang tidak berpengalaman.

Temuan penelitian ini didukung oleh pendapat Sutomo (1999) yang menyatakan bahwa angkatan kerja yang memiliki pengalaman kerja akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Temuan penelitian ini tidak konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja akan memiliki peluang lebih besar untuk dapat diterima bekerja (Ashenfelter dan Ham, 1979; McConnel, 1999; George, 2004; Joliani, dkk, 2019)

12. Pengaruh Umur Terhadap Durasi Menganggur

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa umur berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, tenaga kerja terdidik yang berusia muda berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang berusia tua. Hal ini

menunjukkan bahwa umur merupakan faktor yang menentukan durasi menganggur dari pengangguran terdidik di Indonesia. Tenaga kerja yang tergolong usia muda cenderung lebih lama menganggur daripada yang tergolong usia tua.

Temuan penelitian membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh umur terhadap durasi menganggur, dimana tenaga kerja muda mengalami durasi menganggur lebih lama daripada tenaga kerja tua. Hal ini disebabkan bahwa pada umumnya tenaga kerja terdidik yang berusia muda lebih cenderung mencari pekerjaan yang lebih cocok dengan kemampuan dan keterampilannya sehingga mereka akan memilih-milih pekerjaan yang tentunya akan memperpanjang durasi menganggurnya.

Umur merupakan faktor penting dalam pencarian kerja. Tingginya pengangguran terbuka pada kaum muda disebabkan kurangnya pengetahuan tentang dunia kerja. Peningkatan umur menurunkan probabilitas keluar dari pengangguran. Selain itu, durasi menganggur/lama mencari kerja meningkat seiring meningkatnya umur.

Dengan kondisi persaingan kerja yang semakin besar, pemberi kerja akan berperan aktif dalam menyeleksi tenaga kerja yang akan dipekerjakannya. Salah satu pertimbangan perusahaan adalah mengenai umur pencari kerja. Dalam hal ini perusahaan tentu akan mencari tenaga kerja yang masih cenderung produktif. Pada usia-usia yang relatif tua, meskipun sudah memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak, namun dengan kondisi fisik yang semakin tua maka produktivitasnya juga akan mengalami penurunan. Sehingga dalam persaingan tenaga kerja pada usia-usia yang relatif lebih tua cenderung memiliki waktu yang lebih lama dalam mencari kerja.

Temuan penelitian ini didukung temuan penelitian yang menemukan bahwa angkatan kerja yang muda akan menganggur lebih lama dari yang tidak muda (Foley, 1997; Tansel dan Tasci, 2004; Khan dan Yousef, 2013; Jolianis, dkk, 2019). Artinya, pengangguran yang berumur muda memiliki peluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan pengangguran yang tidak muda lagi.

13. Pengaruh Gender Terhadap Durasi Menganggur

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, tenaga kerja terdidik perempuan belum tentu berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik perempuan belum tentu memiliki durasi menganggur yang lebih lama dibandingkan dengan laki-laki.

Hal ini mengesankan bahwa perempuan turut aktif dalam dunia kerja, ini juga memantapkan anggapan masyarakat bahwa hanya laki-laki yang seharusnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena laki-laki merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, sedangkan perempuan hanya berada di posisi mengurus rumah tangga saja, seolah-olah tidak diperbolehkan untuk bekerja guna membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Masih kuatnya peran jender tradisional membuat ketimpangan tingkat partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan. Peluang laki-laki dalam pasar kerja lebih besar daripada perempuan. Hal itu mempengaruhi durasi pengangguran/lama mencari kerja antar gender. Laki-laki akan lebih cepat dalam mencari dan memperoleh pekerjaan dibandingkan perempuan karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah yang utama bagi keluarga.

Menurut Sziraczki & Reerink (2004), ketaatan kuat pada peran jender tradisional akan menghalangi perempuan muda dalam menyiapkan karir kerja dan membatasi mereka mencari pekerjaan. Banyak perempuan muda yang dengan kukuh mendukung peran gender tradisional, sering juga karena mereka merasa nyaman dan juga karena penilaian dalam menjalankan peran tersebut.

Peningkatan status dan peran perempuan dalam pembangunan merupakan hal yang terus-menerus diperjuangkan. Peningkatan partisipasi perempuan di bidang pendidikan dan pekerjaan sering kali dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, upaya peningkatan pendidikan perempuan dan upaya mendorong perempuan untuk terjun ke dunia kerja juga terus-menerus diupayakan oleh berbagai pihak (Tukiran dan Darwin, 2001).

Temuan penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Foley (1997) yang menemukan bahwa wanita cenderung lebih lama menganggur dibandingkan dengan laki-laki dan wanita yang sudah menikah ditemukan mengalami masa pengangguran yang jauh lebih lama dibandingkan dengan pria yang sudah menikah. Tansel dan Tasci (2004) menyatakan wanita mengalami durasi pengangguran yang lebih tinggi dari pada pria. Zarotiadis dan Theodossiou (2010) menemukan bahwa pekerja wanita menghadapi masa kerja yang jauh lebih singkat sehingga memiliki durasi pengangguran yang lebih lama.

14. Pengaruh Satus Perkawinan Terhadap Durasi Menganggur

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa status perkawinan berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, tenaga kerja terdidik yang belum kawin berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang sudah kawin. Hal ini menunjukkan bahwa status perkawinan merupakan faktor penentu durasi menganggur dari pengangguran terdidik di Indonesia, dimana tenaga kerja terdidik yang belum kawin cenderung mengalami durasi menganggur lebih panjang dibandingkan dengan yang sudah kawin.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang belum kawin cenderung lebih lama menganggurnya dibandingkan dengan angkatan kerja yang sudah kawin karena angkatan kerja dengan status sudah kawin tentunya memiliki beban hidup ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum kawin. Apalagi angkatan kerja tersebut seorang kepala keluarga tentunya tentu tidak ada pilihan lain selain bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga sehingga dia akan berusaha semaksimal mungkin mengakhiri status menganggurnya.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pria dan wanita yang telah menikah cenderung memiliki durasi menganggur yang singkat dibandingkan dengan yang belum menikah. Selanjutnya apabila dibandingkan antara pria dan wanita yang telah menikah tentunya wanita yang telah menikah akan memiliki masa pengangguran yang lebih panjang dibandingkan pria yang telah menikah karena pria adalah kepala keluarga.

Status perkawinan dapat menyebabkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi angkatan kerja. Angkatan kerja yang berstatus kawin akan cenderung lebih lama dalam mencari kerja dibandingkan dengan angkatan kerja yang belum kawin. Mereka yang belum kawin tidak mempunyai tanggung jawab atas rumah tangga sehingga mereka dapat menerima pekerjaan apa pun.

Temuan penelitian ini didukung oleh pendapat Kaufman dan Hotchkiss (2006) menyatakan bahwa status perkawinan menyebabkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi angkatan kerja. Perempuan yang telah menikah dituntut untuk melakukan aktivitas rumah, dan pasar kerja yang bersedia kebanyakan menerima perempuan yang berstatus tunggal atau single. Berbeda dengan pria yang sudah menikah biasanya tidak memiliki hambatan yang berarti untuk memasuki pasar kerja sehingga akan memiliki durasi menganggur lebih pendek.

Temuan penelitian ini didukung oleh temuan penelitian yang menemukan bahwa pengangguran yang belum menikah memiliki peluang menganggur lebih lama dari pengangguran yang sudah menikah (Foley (1997; Grogan, *et al.*, 2001; Khandan Yousef, 2013, Jolianis, dkk, 2019)

15. Pengaruh Kedudukan Dalam Rumah Tangga Terhadap Durasi Menganggur

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa kedudukan dalam rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, tenaga kerja terdidik yang berkedudukan non kepala rumah tangga belum tentu berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan kepala rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa durasi menganggur dari pengangguran terdidik tidak ditentukan oleh kedudukan dalam rumah tangga.

Tingkat partisipasi kerja laki-laki selalu lebih tinggi dari tingkat partisipasi kerja perempuan karena laki-laki dianggap pencari nafkah yang utama bagi keluarga, sehingga pekerja laki-laki biasanya lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan aspirasinya baik dari segi pendapatan maupun kedudukan dibanding pekerja perempuan Hampir semua laki-laki yang telah

mencapai usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi karena laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga (Simanjuntak, 2001).

Temuan penelitian didukung oleh temuan Khan dan Yousef (2013) yang menyatakan bahwa angkatan kerja yang berstatus kepala keluarga cenderung tidak menganggur dibandingkan dengan yang bukan kepala keluarga.

16. Pengaruh Wilayah Tempat Tinggal Terhadap Durasi Menganggur

Hasil analisis data diketahui bahwa kedudukan dalam rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap durasi menganggur, pengangguran terdidik yang tinggal di perdesaan berpeluang menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang tinggal di kota. Hal ini menunjukkan bahwa durasi menganggur dari pengangguran terdidik di Indonesia ditentukan oleh wilayah tempat tinggal. Hal ini disebabkan karena pada saat ini belum semua daerah pedesaan memiliki sarana komunikasi yang lengkap antara tenaga kerja yang tinggal di desa maupun kota sehingga informasi terkait dengan lapangan pekerjaan.

Adanya migrasi dari desa ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan disebabkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah pedesaan. Peluang kerja yang berbeda antara desa dan kota akan mempengaruhi lama menganggur atau masa pencarian kerja. Lama menganggur di daerah perkotaan lebih rendah daripada di pedesaan karena peluang kerja di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan.

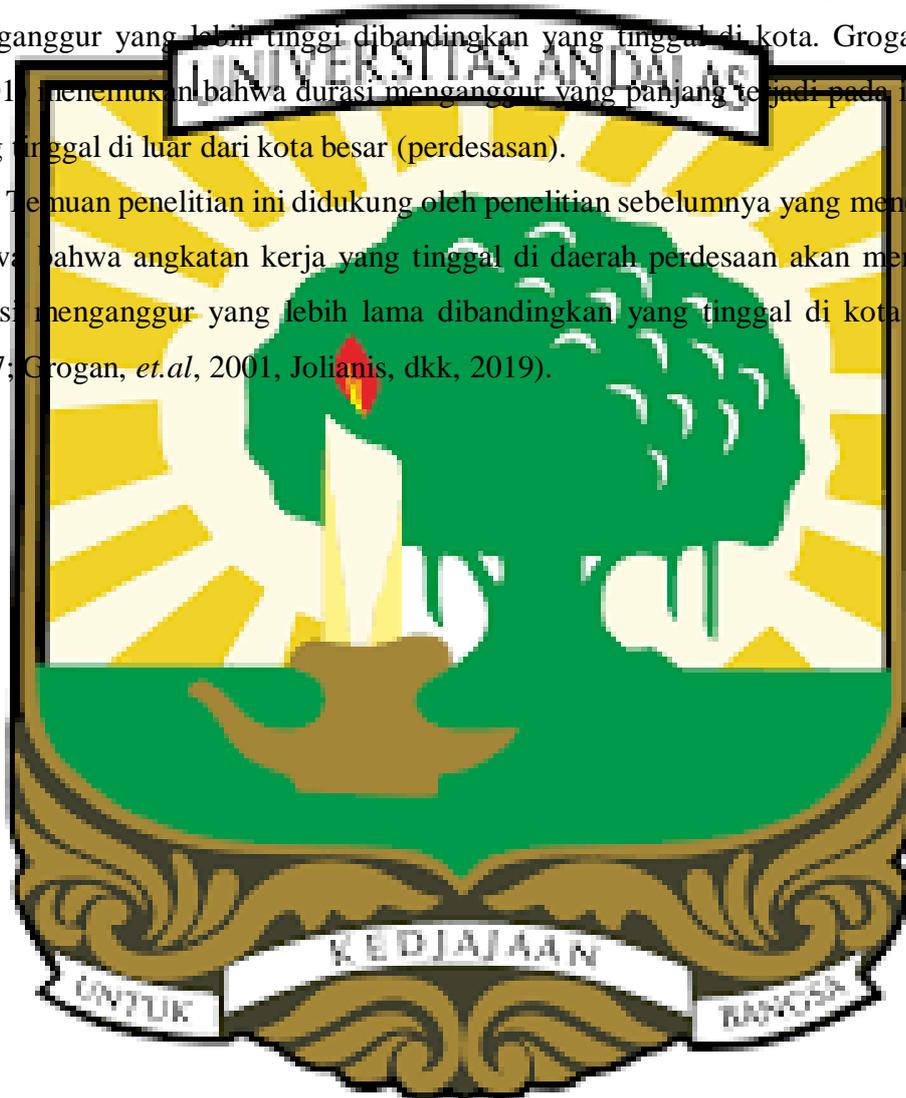
Todaro (2002) yang menyatakan bahwa salah satu konsekuensi-pokok atas melonjaknya arus urbanisasi adalah meledaknya jumlah pencari kerja, baik di sektor modern atau formal, maupun di sektor informal dalam perekonomian perkotaan.

Adanya pembangunan ekonomi di wilayah perkotaan sering dideskripsikan sebagai transfer manusia dan aktivitas ekonomi secara terus menerus dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Ini dimungkinkan karena kombinasi dua faktor yaitu: (1) ekspansi industri perkotaan yang menimbulkan penciptaan kesempatan kerja baru; (2) kemajuan teknologi yang bersifat menghemat tenaga kerja (*labor*

saving) di sektor pertanian sehingga menurunkan kebutuhan angkatan kerja di daerah perdesaan (Todaro dan Smith, 2004).

Baah-Boateng (2015) menemukan lokasi tempat tinggal akan menentukan seseorang menjadi pengangguran atau tidak, dimana angkatan kerja yang tinggal di kota lebih rentan menganggur dari pada yang tinggal di desa. Foley (1997) menyatakan bahwa individu yang tinggal di daerah akan mengalami durasi menganggur yang lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di kota. Grogan, *et.al* (2001) menemukan bahwa durasi menganggur yang panjang terjadi pada individu yang tinggal di luar dari kota besar (perdesaan).

Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa bahwa angkatan kerja yang tinggal di daerah perdesaan akan mengalami durasi menganggur yang lebih lama dibandingkan yang tinggal di kota (Foley, 1997; Grogan, *et.al*, 2001, Jolianis, dkk, 2019).



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangguran terdidik di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, gender, status perkawinan, sedangkan kedudukan dalam rumah tangga, dan wilayah tempat tinggal tidak mempengaruhi pengangguran terdidik. Tenaga kerja terdidik memiliki peluang besar menjadi pengangguran apabila hanya tamat SMA/ sederajat, tidak pernah mengikuti pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, berumur muda, dan berjenis kelamin perempuan serta belum menikah. Selanjutnya juga ditemukan bahwa interaksi variabel wilayah tempat tinggal dengan variabel tingkat pendidikan, pelatihan kerja, umur, gender, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga mempengaruhi probabilitas pengangguran terdidik. Artinya tenaga kerja terdidik yang tinggal di perdesaan dan hanya tamat SMA/ sederajat, tidak pernah mengikuti pelatihan kerja, berumur muda, dan berjenis kelamin perempuan, belum menikah dan berkedudukan sebagai kepala rumah tangga memiliki peluang lebih menjadi pengangguran. Kemudian juga diketahui bahwa angkatan kerja terdidik yang berada di pulau Jawa memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia angkatan kerja terdidik yang berada di pulau Maluku memiliki peluang lebih besar bekerja dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Durasi menganggur dari pengangguran terdidik di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, status perkawinan, wilayah tempat tinggal sedangkan gender dan kedudukan dalam rumah tangga tidak mempengaruhi durasi menganggur. Pengangguran terdidik akan menganggur lebih lama apabila hanya tamat SMA/ sederajat, tidak pernah mengikuti pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, berumur muda, belum menikah, dan tinggal di perdesaan. Kemudian juga diketahui bahwa tenaga kerja terdidik yang berada di pulau Jawa memiliki peluang lebih besar menganggur lebih lama dibandingkan

dengan wilayah lainnya di Indonesia dan yang berada di pulau Maluku memiliki peluang lebih besar menganggur lebih singkat dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Pada tingkat pulau, diketahui bahwa tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan status perkawinan merupakan variabel yang menentukan seorang angkatan kerja terdidik menjadi pengangguran namun di wilayah Papua terjadi pengaruh yang berlawanan tingkat pendidikan terhadap pengangguran, dimana tamatan perguruan tinggi memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan SMA/ sederajat. Selanjutnya, diketahui bahwa variabel wilayah tempat tinggal bukanlah variabel yang mempengaruhi pengangguran terdidik pada wilayah pulau di Indonesia kecuali pada wilayah Papua.

Pada tingkat provinsi diketahui bahwa bahwa variabel tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur dan status perkawinan secara umum mempengaruhi pengangguran terdidik. Namun untuk provinsi Papua Barat ditemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik, hal ini membuktikan bahwa angkatan kerja tamatan perguruan tinggi memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan SMA/ sederajat. Begitu juga dengan provinsi Papua juga ditemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik, artinya probabilitas pengangguran terdidik di provinsi Papua tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan angkatan kerja.

B. Implikasi Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang sampai saat ini masih belum bisa dipisahkan dari pengangguran maka dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran terdidik serta memperpendek durasi menganggurnya maka perlu disampaikan berbagai kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait tentang tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga, dan wilayah tempat tinggal.

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan formal merupakan penopang dasar bagi seseorang dalam meningkatkan taraf hidupnya, semakin tinggi tingkat pendidikan. Angkatan kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan mempermudah dia mendapatkan pekerjaan sehingga akan memperpendek durasi menganggurnya. Untuk itu, pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan kualitas lulusan mulai dari tingkat SMA/ sederajat sampai tamat perguruan tinggi. Pada tingkat SMA/ sederajat perlu diperbanyak sekolah kejuruan diberbagai daerah dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja terampil yang dapat diterima oleh dunia kerja. Pada tingkat perguruan tinggi maka perlu dilakukan *link and math* kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja agar semua tamatan perguruan tinggi siap bersaing dalam memasuki pasar kerja. Selanjutnya program wajib belajar 12 tahun harus menjadi hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, khususnya dalam pengembangan pendidikan vocational di wilayah Barat atau Timur Indonesia.

Pihak pemerintah dan perguruan tinggi mengundang pihak swasta untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai untuk perguruan tinggi, sehingga saling keterkaitan dan proporsionalitas (*Link and Match*) antara pendidikan dan tempat kerja bisa terjadi. Adanya Link and Match membuat perguruan tinggi juga bisa menentukan kompetensi apa yang paling dibutuhkan tenaga kerja untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, Perguruan tinggi juga mampu memprediksi dan mengantisipasi keterampilan apa yang dibutuhkan tenaga kerja dan teknologi di masa yang akan datang, dan yang lebih penting perguruan tinggi harus menjalin hubungan dan menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan yang bersedia menjadi ajang belajar kerja (magang) bagi mahasiswa yang akan lulus. Dengan magang langsung ke tempat kerja, lulusannya tidak hanya siap dalam teori tetapi juga dalam praktek kerja.

Perguruan tinggi perlu memperbanyak dan menyebarkan program studi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian, perlu juga dikembangkan pusat studi ketenagakerjaan di masing masing perguruan tinggi yang fungsinya menjadi penghubung antara dunia usaha dan dunia pendidikan dalam menyalurkan

lulusannya. Dengan adanya pusat studi ketenagakerjaan ini maka perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi kegiatan rekrutan karyawan, bursa kerja dan lain sebagainya.

Selanjutnya, sangat perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berbasis peran serta masyarakat karena terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mendanai pembangunan kualitas sumber daya manusia, juga karena hakikat pendidikan adalah emansipatoris, yang bermakna partisipatoris dalam gerakan memberdayakan manusia. Hal ini pun sejalan dengan paradigma pembangunan pendidikan yang diletakkan pemerintah, yakni pembangunan pendidikan yang bersoko pada keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Meningkatkan hubungan antara lembaga pendidikan dan industri sehingga relevansi pendidikan dapat ditingkatkan. Komitmen pemerintah daerah untuk menjadi pusat perkembangan sekolah kejuruan terus didorong dengan peningkatan penguasaan kecakapan hidup (*life skills*) di kalangan siswa, sehingga mereka bisa dan siap untuk menjadi *entrepreneur*.

Kontribusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sudah menjadi keniscayaan dalam rangka menekan tingkat pengangguran. Selain itu, peran serta masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan perlu terus ditingkatkan, karena secara fundamental pendidikan dilakukan bersama-sama oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat pengangguran.

2. Pelatihan Kerja

Masalah pengangguran penting didekati dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia karena terkait fakta bahwa pengangguran terjadi bukan semata-mata terbatasnya lapangan pekerjaan tetapi juga akibat tidak relevannya pendidikan yang ditamatkan dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan tuntutan lapangan kerja sehingga sangat diperlukan program pelatihan kerja. Implikasi kebijakan terkait dengan pelatihan kerja yaitu perlu diperbanyak balai latihan kerja di setiap daerah di Indonesia untuk memberikan memberikan *training*, *upgrading*, maupun *conselling* sehingga angkatan kerja terdidik akan lebih siap memasuki pasar kerja.

Selanjutnya perlu diperbanyak pasar kerja yang lebih informatif yang dapat mempertemukan pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. selanjutnya pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten dan Kota sangat perlu melakukan berbagai pelatihan/kurus berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, didahului oleh *training needs assessment* dengan mensinergikan program yang dirancang dinas pendidikan, organisasi profesi, kalangan industri, dan stakeholders lainnya.

Memberdayakan sanggar-sanggar kegiatan belajar yang dikelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan memperluas cakupan program bukan hanya baca, tulis, dan hitung (*calistung*) dengan berbagai keterampilan ekonomi produktif demi menekan tingkat pengangguran. Serta meningkatkan kualitas pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millennial (*pendidikan vokasi*) dan *soft skills*.

Pemerintah harus mampu menyediakan tenaga kerja terdidik untuk dimiliki keterampilan, dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK), Melakukan pelatihan dengan melaksanakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Nasional Kompetensi Indonesia (SKKN) sebagai instrumen dasar berbasis kompetensi pelatihan, pengakuan akselerasi sertifikat kompetensi kerja dan memastikan peningkatan akses dan kualitas sertifikasi profesi di setiap sektor, termasuk memperbanyak dan meningkatkan kualitas Sertifikasi Profesi Agency (LSP) dan mengundang investasi dalam dan luar negeri di bidang pelatihan kejuruan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah prioritas dan pasar tenaga kerja

3. Pengalaman Kerja

Temuan penelitian ini menemukan bahwa pengalaman kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap pengangguran terdidik dan durasi menganggur. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan yang belum memiliki pengalaman kerja. Implikasi kebijakan terkait dengan pengalaman kerja yaitu, lembaga pendidikan (SMA, SMK,

Perguruan Tinggi) harus memperbanyak kegiatan magang bagi peserta didiknya pada berbagai instansi maupun perusahaan dalam rangka memberikan pengalaman kerja terhadap peserta didik.

Pemerintah perlu memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.

4. Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan seorang angkatan kerja untuk sukses di pasar kerja, dimana seseorang yang sudah berumur tua cenderung kurang produktif sehingga banyak perusahaan lebih memilih tenaga kerja muda dibandingkan dengan yang sudah tua. Implikasi kebijakan terkait dengan umur ini yaitu perlu adanya regulasi dari pemerintah untuk mengatur tentang umur angkatan kerja yang diterima oleh perusahaan. Khususnya dalam melakukan rekrutmen karyawan, perusahaan sebaiknya tidak lagi membatasi umur maksimal yang diterima tapi sebaiknya diberi kesempatan kepada semua umur sehingga semua angkatan kerja baik muda maupun tua memiliki peluang yang sama untuk diterima.

5. Gender

Jenis kelamin atau gender juga merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab seorang angkatan kerja untuk dapat diterima di pasar kerja. Tenaga kerja perempuan memiliki kecenderungan untuk menjadi pengangguran terdidik dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki. Implikasi kebijakan terkait dengan gender ini yaitu perusahaan tidak boleh melakukan dekriminasi gender dalam

melakukan rekrutmen karyawan sehingga baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama mendapatkan suatu pekerjaan.

6. Status Perkawinan

Status perkawinan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab seorang angkatan kerja menganggur atau tidak. Angkatan kerja yang belum menikah cenderung menganggur dibandingkan dengan yang sudah menikah. Implikasi kebijakan terkait dengan status perkawinan ini yakni pemerintah perlu melakukan pengaturan terhadap perusahaan-perusahaan dalam mengelola karyawannya berkaitan dengan status perkawinan, dimana perusahaan tidak boleh hanya memberikan kesempatan kepada angkatan kerja yang belum menikah saja untuk dapat diterima bekerja.

7. Kedudukan Dalam Rumah Tangga

Kedudukan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu seseorang menganggur atau tidak, dimana ketika seorang angkatan kerja memiliki kedudukan sebagai kepala rumah tangga maka peluangnya untuk menganggur akan semakin kecil. Implikasi kebijakan terkait dengan kedudukan dalam rumah tangga adalah menyarankan kepada tenaga kerja laki-laki yang sudah bekerja untuk segera menikah dan berumah tangga.

8. Wilayah Tempat Tinggal

Implikasi kebijakan terkait dengan wilayah tempat tinggal yaitu pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah harus melakukan penyebaran pembangunan sampai tingkat perdesaan agar dapat mendorong kemajuan perekonomian pada wilayah perdesaan yang pada gilirannya dapat menyerap tenaga kerja. selanjutnya, pemerintah provinsi perlu mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah (perdesaan) serta potensi “demand” tenaga kerja.

Pemerintah pusat maupun provinsi perlu sesegera mungkin melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas

transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur diberbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, namun dengan adanya keterbatasan ini diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengkaji penyebab pengangguran dan durasi menganggur tenaga kerja terdidik dari sisi penawaran tenaga kerja. Kepada peneliti berikutnya diharapkan melakukan kajian tentang penyebab pengangguran dan durasi menganggur tenaga kerja terdidik dari sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja.
2. Data penelitian berupa raw data hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus 2017, diharapkan peneliti berikutnya menggunakan data yang periode waktunya lebih panjang.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk dianalisis, kepada peneliti berikutnya diharapkan untuk menggunakan data primer dan sekunder supaya mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif
4. Sampel penelitian ini adalah seluruh angkatan kerja terdidik pada nasional, wilayah pulau dan tingkat provinsi yang disurvei oleh Sakernas, kepada peneliti berikutnya diharapkan menganalisis data sampai pada tingkat Kabupaten/Kota



DAFTAR REFERENSI

- Abraham, Katharine G. and Robert Shimer 2001, Changes in Unemployment Duration and Labor Force Attachment, in Alan B. Krueger and Robert M. Solow eds., *The Roaring Nineties: Can Full Employment Be Sustained?*, New York: Russell Sage
- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*. Jakarta: Graha Ilmu
- Adriana, 2012. *Perencanaan Pembangunan: Teori, Pelaksanaan dan Permasalahannya*. Padang: Andalas University Press
- Agifi, Elsana dan Malaj, Visar. 2015. Impact of Economic Growth on Unemployment in Republic Macedonia. *International Journal of Economics, Commerce and Management*. Vol. IV, Issue 1, January 2015
- Ahmed, A. Rashid, Md. Ashraf Ali, and Kazi Saleh Ahmed. 1978. Estimation Of Educated Unemployment. *The Bangladesh Journal Agricultural Economics (BJAE)*, Vol 1,1 (1978) 93-100
- Alan, K. M. A., Altman, Y., & Roussel, J. 2008. Employee Training Needs and Perceived Value of Training in the Pearl River Delta of China: A Human Capital Development Approach. *Journal of European Industrial Training*, 32(1), 19-31.
- Albaresi, Stefania dan Sahin, Aysegul. 2018. The Gender Unemployment Gap. *Review of Economic Dynamics*. 30. 47–67
- Allen, E. R. 2016. Analysis of Trends and Challenges in The Indonesian Labor Market, *ADB Working Paper*, Manila.
- Aragon YD, Haughton J, Haughton E. 2003. Explaining the Pattern of Regional Unemployment: The Case of the Midi-Pyrenees Region. *Paper in Regional Science*. 82(2): 155-174
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Aruan, Norman Luther dan Sriyono. D. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 1985-2011. *Jurnal Modus*. Vol.26 (2): 173-187. ISSN 0852-1875
- Aryeetey, E., Baah-Boateng, W., Ackah, C., Mbiti, I. and Lehrer, K. 2014. "Ghana", in Hino, H. and Ranis, G. (Eds). *Youth and Employment in Sub-Saharan Africa: Working but Poor*. Routledge Publication, London, pp. 232-302.

- As'ad, Mohamad. 2013. *Seri Ilmu Sumber Daya Manusia Psikologi Industri*, Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberti.
- Ashenfelter, Orle dan Ham, John. 1979. Education, Unemployment, and Earnings. *Journal of Political Economy*. S 104
- Baah-Boateng, W., Adjei, P. and Oduro, A.D. 2013. Determinants of moonlighting in Ghana: an empirical investigation. *African Review of Economics and Finance (ARF)*, vol. 4 No. 2, pp. 151-175
- Baah-Boateng, William. 2013. Determinants of Unemployment in Ghana. *African Development Review*, Vol. 25, No. 4, 2013, 385–399
- _____. 2015. Unemployment in Ghana: A Cross Sectional Analysis From Demand and Supply Perspectives. *African Journal of Economic and Management Studies*. Vol. 6 No. 4, 2015. pp. 402-415
- Bahauddin, M. 1980. *Pengangguran Indonesia : Masalah Penanggulangan*. Jakarta : Yayasan kesejahteraan Keluarga Pemuda 66
- Bappenas. 2013. *Evaluasi PNPM Mandiri*. Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- BPS. 2019. *Ringkasan Eksekutif Informasi Ketenagakerjaan 2018*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
- Barthos, Basir. 1993 *Manajemen Sumber Daya Manusia. Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta : Bumi Aksara
- Becker, Gary. S. 1964. *Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. New York: Colombia University Press.
- Bellante, Don. 1990. Labor Markets and Welfare State. *Economic Policy and the Market Process: Austrian and Mainstream Economic*. North-Holland. Pp. 151-164
- Blanco, Javier Fernández dan Preugschat, Edgar. 2018. On the Effects of Ranking by Unemployment Duration. *European Economic Review*. 104 (2018) 92–110
- Bloom, C dan Sevilla. 2003. *The Demographic Devidend, A New Perspective on The Economic Consequences of Population Change*. California: RAND.
- Boediono. 1999. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2: Ekonomi Makro*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE

- Brown, Sarah. 2010. The Gender Reservation Wage Gap: Evidence form British Panel Data. Institute for the Study of Labor (IZA). *IZA Journal Discussion Papers*. Number 5457
- Carolina, Mirelia. 2008. The Reservation Wage of Unemployed Job Seekers in Curaçao. Central Bank of the Netherlands Antilles. *BNA Journal Working Papers*
- Cheron, A. and Teitoku, A. 2018. Life cycle training and equilibrium unemployment. *Labour Economics*, 50:32-44
- Congress of the United States Congressional Budget Office (CUSCBO) 2007, Long-term unemployment, paper.
- Deluna, R. & Berdos, K. 2015. Factors Affecting Length of Job Search and Job Switching in Davao City, Philippines. *MPRA Paper No. 68802*.
- Delianov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo
- DePrince, A. E. & Morris, P. D. 2008. The Effects of Education on the Natural Rate of Unemployment. *Business Economics*, 43 (2), 45{54.
- Denberg, Thomas F. 1985. *Macroeconomics*. McGraw-Hill, Inc., New York.
- Dewey John. 2002. *Pengalaman dan Pendidikan*, Yogyakarta : Kepel Press,
- Dhanani, S. 2004. Unemployment and Underemployment in Indonesia, 1976-2000: *Paradoxes and Issues*. Geneva: International Labour Office.
- Dharmakusuma, Sandy. 1998. Trade Off Antara Inflasi Dan Tingkat Pengangguran. *Gema Stikubank*. November 1998 Hal 43-68
- Diamond, Peter. 1982. Wage Determination and Efficiency in Search Equilibrium. *The Review of Economic Studies* Vol.49 No.2, 217-227.
- Dickens, W.F. and Lang, K. 1995. An analysis of the nature of unemployment in Sri Lanka. *The Journal of Development Studies*, Vol. 31 No. 4, pp. 620-636.
- Drucker, P. F. 1993. *Post Capitalist Society*. New York: Roudledge
- Dygalo, Natalya. 2007, On employment Duration and Narrowing Job Opportunities at Older Ages, University of Saskatchewan
- Djojohadikusumo, Sutomo. 1999. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi dasar Teori Pertumbuh dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit LP3ES

Dornbusch, Rudiger, dan Fischer, Stanley. 1992. *Makroekonomi*, Edisi Keempat, Jakarta: Erlangga

Dumairy. 2001. *Perekonomian Indonesia*. Cetakan Kelima. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Effendi, Tadjuddin Noer, 1993, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Yogyakarta, Tiara Wacana

Ehrenberg, Ronald and Smith, R.S. 2003. *Modern Labor Economics Theory and Public Policy*, eighth edition, Cornell University

Elfendri dan Bachtiar, Nasri. 2004. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Padang: Andalas University Press

Elhorst JP. 2003. The Mystery of Regional Unemployment Differentials: Theoretical and Empirical Explanation. *Journal of Economics Survey* 17(5): 709-748

Faggian, A. 2014. *Job Search Theory*. Ohio: Ohio State University

Fathoni Abdurrahmat. 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : Rineka. Cipta.

Filiztkin A. 2008. Regional Unemployment in Turkey. *Papers in Regional Science*. 88(4): 863-873.

Foley, Mark. 1997. *Determinants of Unemployment Duration in Russia*. Economic Growth Center Yale University.

Frank, R. H., & Bernanke, B. S. 2007. *Principles of Microeconomics* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin

Fuente, Angel. 2002. *Human Capital in Global and Knowledge Based Economy*. European Commission, Employment and Social Affairs Manuscript

George, J. Borjas. 2004. *Labor Economics*, Third Edition, McGraw Hill.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Universitas Diponegoro

Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius.

Guclu M. 2017. Regional Unemployment Disparities in Turkey. *Romanian Journal for Economic Forecasting*. 20(2): 94-108.

- Grogan, Louise. Gerard J. van den Berg. 2001. The duration of unemployment in Russia. *Journal of Population Economics*. 14: 549-568
- Harbison, Frederick and Myers, Charles A. 1964. *Education, Manpower and Economic Growth: Strategies of Human Resource Development*, New York, McGraw-Hill Book
- Heath, Alexandra. 1999. Reservation Wages and The Duration of Unemployment. *Journal Research discussion paper Reserve Bank of Australia*. 1999-02.
- Hernæs, Erik. 2001. Fewer in Number but Harder to Employ: Incidence and Duration of Unemployment in Economic Upswing, *The Scandinavian Journal of Economics*. <http://www.jstor.org/pss/3441006>
- Hinnosaar, Marit. 2004. Reservation Wage, Job Search Intensity and Unemployment Benefits. *Journal of Economics*, Northwestern University.
- Hosmer D.W. dan S. Lemeshow. 1989. *Applied Logistic Regression* Second Edition, John Willey & Sons, New York.
- Hurlock, E.B. 2002. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (terjemahan : Istiwidayati Tjandrasa). Jakarta : Erlangga
- Ioannides, Y. M. & Loury, L. D. 2004. Job Information Networks, Neighborhood Effect and Inequality. *Journal of Economic Literature*, 42 (4),1056-1093.
- Ianneli, C. 2002. Parental Education and Young People's Educational and Labour Market Outcomes: A comparison Across Europe, *Arbeitspapiere-Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung*: 45
- ILO. 2012. *Global Employment Trend 2012*. ILO Annual Report.
- Johnson, G.E. and Layard, P.R.G. 1993. The natural rate of unemployment: explanation and policy. in Ashenfelter, O. and Layard, R. (Eds). *Handbook of Labour Economics*, Vol. 2, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, pp. 921-999.
- Kamaluddin, Rustian. 1999. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Kaufman, Bruce E and Hotchkiss, Julie L. 2006. *The Economics of Labor Markets*. 7th edition (ISBN-10: 0324288794). On sale at PSU Bookstore.
- Kettunen, Juha. 1997. Education and Unemployment Duration. *Economics of Education Review*, Vol. 16, No. 2, pp. 163-170

- Khan, Tasnim dan Yousef, Fatima. 2013. Unemployment duration of first tim job seekers: A case study of Bahawalpur. *Asian Journal of Economic Modelling*, 2013, 1(1):8-19
- Killen, Roy. 2000. *Outcomes Based Education : Principles and Possibilities*. Unpublished manuscript: Faculty of Education, University of Newcastle.
- Kuncoro, Mudrajat. 2006. *Ekonomi Pembangunan. Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Kupes, Olga. 2006. Determinants of Unemployment Duration in Ukraine. Labor Group, *Journal of Economics Research and Outreach Center*, National University "Kyiv-Mohyla Academy", Kiev.
- Kusumawidho, Sisdjatmo. 1981. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Laliva, Rafael. 2002. Benefit Entitlement and Unemployment Duration: The Role of Policy Endogeneity. *IZA Journal Discussion Papers 492*, Institute for the Study of Labor (IZA).
- Leonard, M. D. 1985. *Unemployment, Schooling and Training in Developing Countries: an ILO-WEP Study*. USA: International Labour Organisation.
- Lewis, W.A. 1956. *Theory of Economic Growth*, George Allen & Unwin Ltd. Great Britain, edition used Unwin University Books, Ninth Impression
- Lippman, S. A. and McCall, J. J. 1976. The Economics of Job Search: A Survey. (parts I and II), *Economic Inquiry*, Vol.14, No.2, June, pp.155-189 and pp.347-368
- Lipsev, G. Richard, 1997. Pengantar Makro Ekonomi. Jilid Dua. Jakarta: Bina Rupa Aksara
- Manacorda, M. & Petrongolo, B. 1999. Skill Mismatch and Unemployment in OECD Countries. *Economica: New Series*, 66 (262) 181-207.
- Mankiw, N. Gregory. 2010. *Macroeconomics*. New York : Worth Publisher
- Mankiw, N. Gregory. 2013. *Teori Makroekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Manulang. 1984. *Manajemen Personalia*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Marston, S.T. (1985) Two views of the geographical distribution of unemployment. *Quarterly Journal of Economics*, 100, pp. 57-79.

- Mathew, E. T. 1995. Educated Unemployment in Kerala: Some Socio-Economic Aspects. *Economic and Political Weekly*, 30 (6), 325{335.
- McCall, J. J. 1965. The Economics of Information and Optimal Stopping Rules. *The Journal of Business*, 38 (3), 300{317.
- McCall, J. J. 1970. Economics of Information and Job Search. *Quarterly Journal of Economics*, February, pp. 113-126
- McConnell, Campbell R. 1999. *Contemporary Labor Economics*, Mc GrawHill International, Fift edition, San Francisco.
- McMahon, W. W. 2002. Education and Development Measuring the Social Benefits, New York: Oxford University
- Moens Espen R. 1999. Education, Ranking, and Competition for Jobs. *Journal of Labor Economics*, Vol. 17, No. 4, Part 1. (Oct., 1999), pp. 694-723
- Moeis, Jossy P. 1992. Pengangguran Tenaga Kerja terdidik di Indonesia; Penerapan Search Theory. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Vol. XL. No. 22, 15 April 1992. Jakarta.
- Moens Espen R. 1999. Education, Ranking, and Competition for Jobs. *Journal of Labor Economics*, Vol. 17, No. 4, Part 1. (Oct., 1999), pp. 694-723
- Mortensen, Dale T. 1970. Job Search the Duration of Unemployment, and the Phillips Curve. *The American Economic Review*, Vol.60, No.5, December, pp.847-862.
- _____. 1977. Unemployment Insurance and Job Search Decisions. *Industrial and Labor Relations Review* 30(4): 505-517.
- _____. 1984. Job Search and Labor Market Analysis. *Journal Discussion Paper*. No.594. Columbia University.
- _____. 1985. Functional Form Specification for Models of Unemployment and Job Duration. *Working papers* 85-07. Center for Applied Economics, New York University.
- _____. 1986. Job search and labor market analysis. *Ch. 15 of Handbook of Labor Economics*, vol. 2, O. Ashenfelter and R. Layard, eds., North-Holland.

Mukoyama, Toshihiko & Ayegül ahim 2004, Why Did the Average Duration of Unemployment Become So Much Longer?, Department of Economics Concordia University, CIREQ and Federal Reserve Bank of New York,

Mulyono, Mauled. 1997. *Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik*. Bumi Aksara. Jakarta.

Naudé, W. and Serumaga-Zake, P. 2001. An Analysis of the Determinants of Labour Force Participation and Unemployment in South Africa's North-West Province. *Journal of Sociology*, Vol. 18 No. 3, pp. 261-278.

Nang, Muana. 2005. *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Perdana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nicholson, Walter. 1999. *Teori Ekonomi Mikro Prinsip Dasar dan Pengembangannya*. Edisi Kedua. Jakarta : Raja Grafindo Persada

O'Nwachukwu, Chinedu dan Increase. 2017. Determinants of the Rate of Unemployment in Nigeria. *International Journal of Information Research and Review*. Vol. 04, Issue, 01, pp.3593-3595, January, 2017

Okun A. M. 1962. Potential GNP: Its Measurement and Significance. *Proceedings of the Business and Economic Statistics*, 98-103.

Ordine, Patrizia and Rose, Giuseppe. 2015. Educational Mismatch and Unemployment Scarring. *International Journal of Manpower*. Vol. 36 No. 5, 2015, pp. 733-753

Okwakol M.J.N. 2009. The Need for Transformative Strategic Planning in Universities in Uganda. *NCHE Journal Kampala*. National Council for Higher Education.

Pasay N. Haidy dan Indrayanti, Ratna. 2012. Pengangguran, Lama Mencari Kerja, dan Reservation Wage Tenaga Kerja Terdidik. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 12 No. 2, Januari 2012: 116-135. ISSN 1411-5212

Pissarides, Christopher. 1982. Job Search and the Duration of Layoff Unemployment. *Quarterly Journal of Economic*.

_____. 2010. *Economics of Search*. London School of Economics Publication.

Perazzi, Ramoni Perazzi. Giampaolo Orlandoni Merli. Surendra Prasad Sinha.

Elizabeth Torres Rivas and Angel Zambrano. 2017. Analysis of The Duration

of Unemployment and Outcomes for Unemployed Persons in the Bolivarian Republic of Venezuela. *CEPAL Review*. No 122 August 2017

Powell, D.H. 1983. *Understanding Human Adjustment*. Canada : Little, Brown & Company

Rastogi, P. N. 2002. Knowledge Management and Intellectual Capital as a Paradigm of Value Creation. *Human Systems Management*, 21(4). 229-240.

Ray, Debraj., 1998. *Development Economics*, New Jersey: Princeton University

Ridder, L. W. Craig dan Song, Xueda. 2011. The Impact of Education on Unemployment Incidence and Re-employment Success: Evidence from the U.S. Labour Market. *Journal Labour Economics* 18 (2011) 453–463

Robbins, P.Stephen dan Timothy A. Judge. 2012. *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat. Jakarta

Romer, David. 1999. Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), 71–102.

Romer, David. 2001. *Advanced Macroeconomics*, 2nd Ed. New York: McGraw-Hill.

Samuelson, Paul dan Nordhaus, William D. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Alih Bahasa : Gretta, Theresa Tanoto, Basco Carvalho, Anna Elly. Jakarta: Media Global Edukasi

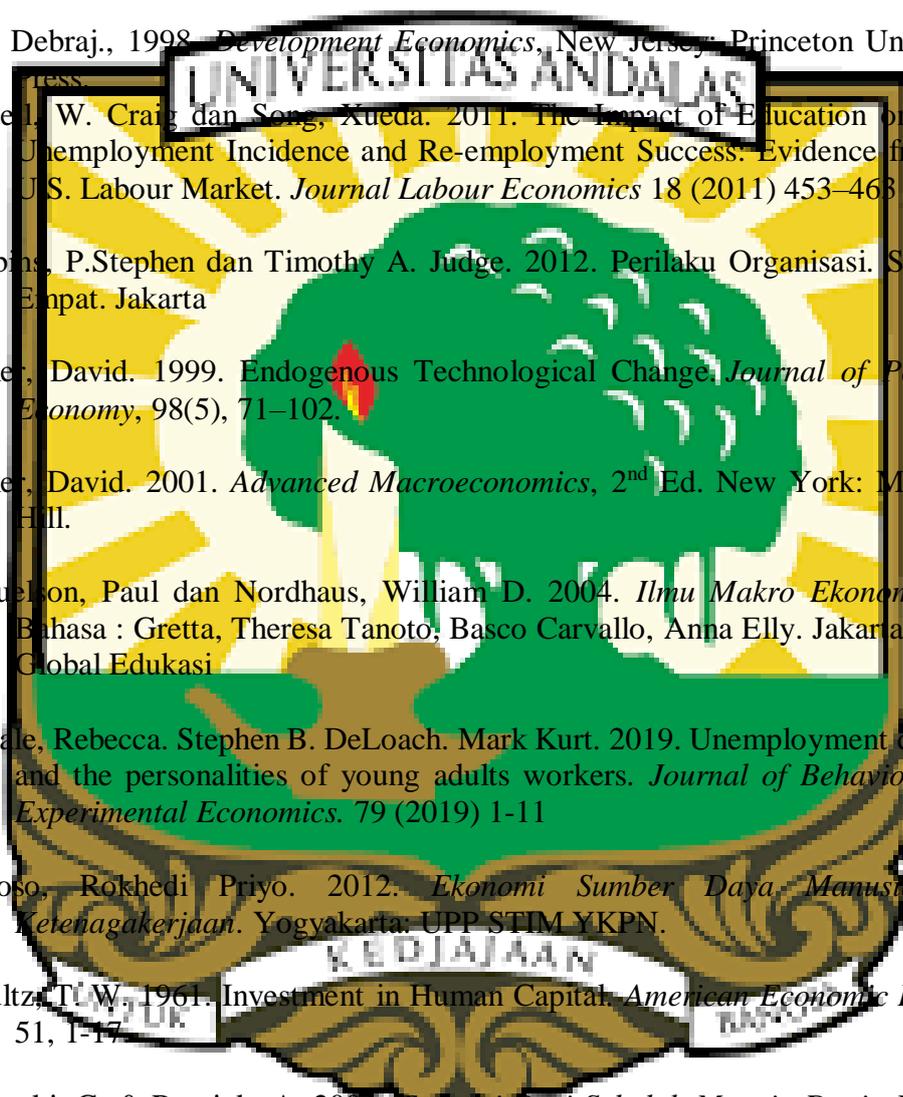
Sansale, Rebecca. Stephen B. DeLoach. Mark Kurt. 2019. Unemployment duration and the personalities of young adults workers. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*. 79 (2019) 1-11

Santoso, Rokhedi Priyo. 2012. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Schultz, T.W. 1961. Investment in Human Capital. *American Economic Review*, 51, 1-17.

Sziraczki, G. & Reerink, A. 2004. *Transisi Dari Sekolah Menuju Dunia Kerja di Indonesia*. Jakarta: ILO.

Sholeh, Maimun. 2007. *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Sektor Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia*. Universitas Negeri Yogyakarta



Sirojuzilam. 2008. *Disparitas Ekonomi Dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. Pustaka Bangsa Press.

Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Cetakan Pertama. Padang: Baduose Media

Setiawan, Achma Hendra. 2010. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Semarang. *Jurnal JEJAK*. Vol. 3 No. 1.

Simanjuntak, Payaman. 2004. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Sinungan, Muchdarsyah. 2003. *Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara

Skenderi, Nagip dan Uka, Adhurim. 2015. Types and Duration of Unemployment in Kosovo. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Vol 6 No 3

Spence, Michaels. 1974. *Signaling, Screening, and Information*. NBER Working Paper.

Soesasto, Hadi. 2005. *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir: Proses Pemulihan Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Soeroto. 1986. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Gadjah Mada University Press, Jakarta.

Solow, R. M., 1956. A Contribution to the Theory of Economic Growth, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.70, No.1 (Feb. 1956), pp.65-99.

Stark, O., & Fan, C. S. 2007. International migration and “Educated Unemployment”. *Journal of Development Economics*. 83 (2007) 76-87.

_____. 2011. The Prospect of Migration, Sticky Wages, and “Educated Unemployment”. *Review of International Economics*, 19 (2), 277-287.

Stigler, George. 1961. The Economics of Information. *Journal of Political Economy* 69: 213–225

_____. 1962. Information in the Labor Market. *Journal of Political Economy* 70: 95-105

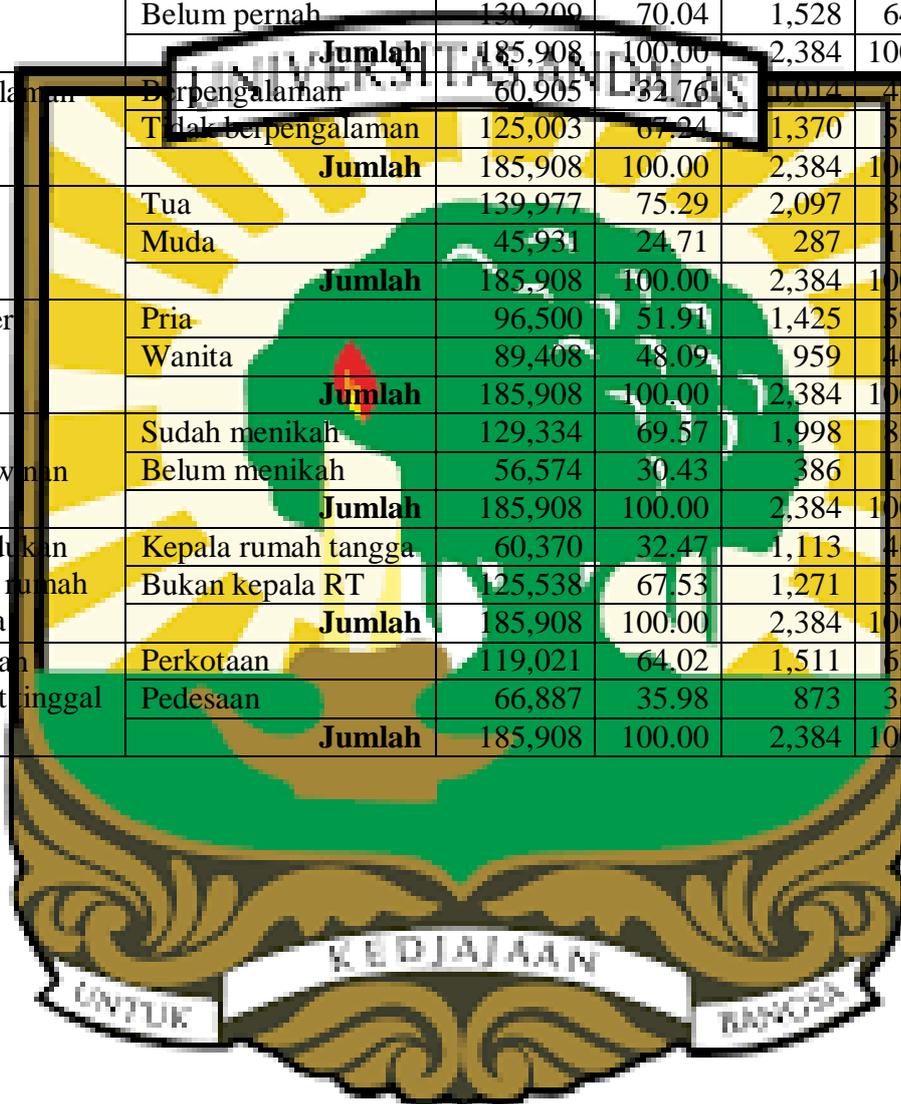
Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta

- Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, S. 2013. *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Suparmanoko, Irawan. V. 2003. *Ekonomika Pembangunan*. Edisi keenam. Yogyakarta: BPEF-UGM
- Suryali Ace. 1994. Hubungan Antara Pendidikan, Ekonomi dan Pengangguran Tenaga Terdidik. *PRISMA*. Volume 8, No.5, Hal. 71-87.
- Suryali Ace, 1995. *Kesenjangan Struktur Persediaan dan Pemerataan Tenaga Kerja Terdidik*, Balai Pustaka, Jakarta
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: Rajawali Pers
- _____. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sumarsono, Sony. 2009. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Jakarta: FE UI.
- Suroto. 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Edisi 2. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sutomo, AM Susilo, Lies Susanti. 1999. Analisis Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik di Kotamadya Surakarta (Pendekatan Search Theory). Edisi Januari-Maret 1999. *Jurnal Perspektif*. FE UNS.
- Su'ud. 2014. Pengangguran Terdidik: Sebab dan Solusinya. *Jurnal Didaktika*. Vol. 20 Nomor 1, September
- Takii, Katsuya. 1997. Jobs, Education and Underdevelopment Trap. *Journal International Trade and Economic Development*. Vol 6. <http://www.osipp.osuka-u.ac.jp>.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Tansel, Aysit and Tasci, H. Mehmet. 2004. Determinant of Uemployment Duration for Men and Woman in Turkey. *IZA Discussion Paper*. No. 1258

- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta. Utami,
- Taylor J, and Bradley S. 1997. Unemployment in Europe: A Comparative Analysis of Regional Disparities in Germany, Italy and UK. *Kyklos* 50(2): 221-245.
- Tjiptoherijanto, Priyono. 1989. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Theodosiou, A and Zangelidis, A. 2009. Should I stay or should I go? The effect of gender, education and unemployment on labour market transitions. *Journal of Labour Economics*. 16 (2009) 566-577
- Thoha, Miftah. 2005. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Tobing, Elwin. 2005. *Pengangguran Tenaga Terdidik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga
- Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C, 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Terjemahan Haris Munandar, Puji A. L. Edisi Kedelapan, Jakarta : Erlangga.
- Tukiran dan Darwin, Manadjir. 2001. *Prolog Maskulinitas: Posisi Laki-Laki Dalam Masyarakat Patriarkhi Dalam Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM
- Woodhall, M and Psacharopoulos. 1997. *Education for Development: An Analysis of Investment Choice*. New York: Oxford University Press
- Zarotiadis, Ioannis dan Theodossiou, Grigoris. 2010. *Employment and Unemployment Duration in Less Developed Regions*. *Journal of Economic Studies*, Vol. 37 No. 5, 2010 pp. 505-524

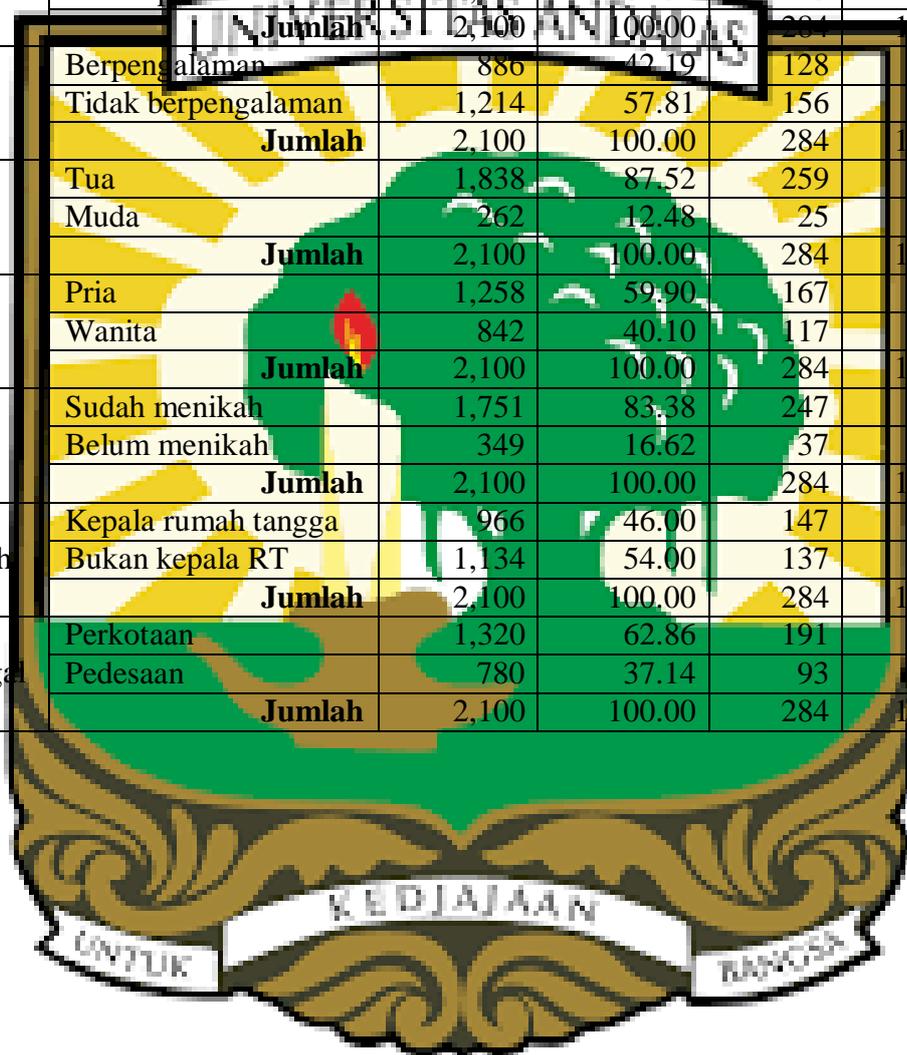
Lampiran 1. Karakteristik Pengangguran Terdidik

No	Karakteristik	Keterangan	Bekerja		Menganggur		Total
			Jml	%	Jml	%	
1	Tingkat Pendidikan	Perguruan tinggi	49,504	26.63	702	29.45	50206
		SMA/ sederajat	136,404	73.37	1,682	70.55	138086
		Jumlah	185,908	100.00	2,384	100.00	188292
2	Pelatihan kerja	Pernah ikut pelatihan	55,699	29.96	856	35.91	56555
		Belum pernah	130,209	70.04	1,528	64.09	131737
		Jumlah	185,908	100.00	2,384	100.00	188292
3	Pengalaman kerja	Berpengalaman	60,905	32.76	1,014	42.53	61919
		Tidak berpengalaman	125,003	67.24	1,370	57.47	126373
		Jumlah	185,908	100.00	2,384	100.00	188292
4	Umur	Tua	139,977	75.29	2,097	87.96	142074
		Muda	45,931	24.71	287	12.04	46218
		Jumlah	185,908	100.00	2,384	100.00	188292
5	Gender	Pria	96,500	51.91	1,425	59.77	97925
		Wanita	89,408	48.09	959	40.23	90367
		Jumlah	185,908	100.00	2,384	100.00	188292
6	Status perkawinan	Sudah menikah	129,334	69.57	1,998	83.81	131332
		Belum menikah	56,574	30.43	386	16.19	56960
		Jumlah	185,908	100.00	2,384	100.00	188292
7	Kedudukan dalam rumah tangga	Kepala rumah tangga	60,370	32.47	1,113	46.69	61483
		Bukan kepala RT	125,538	67.53	1,271	53.31	126809
		Jumlah	185,908	100.00	2,384	100.00	188292
8	Wilayah tempat tinggal	Perkotaan	119,021	64.02	1,511	63.38	120532
		Pedesaan	66,887	35.98	873	36.62	67760
		Jumlah	185,908	100.00	2,384	100.00	188292



Lampiran 2. Karakteristik Durasi Menganggur Pengangguran Terdidik

No	Profil	Keterangan	Sakernas 2017				
			0 – 3 Bulan		> 3 Bulan		
			Jml	%	Jml	%	
1	Tingkat Pendidikan	Perguruan tinggi	609	29.00	93	32.75	702
		SMA/ sederajat	1,491	71.00	191	67.25	1682
		Jumlah	2,100	100.00	284	100.00	2384
2	Pelatihan kerja	Pernah ikut pelatihan	745	35.48	111	39.08	856
		Belum pernah	1,355	64.52	173	60.92	1528
		Jumlah	2,100	100.00	284	100.00	2384
3	Pengalaman kerja	Berpengalaman	886	42.19	128	45.07	1014
		Tidak berpengalaman	1,214	57.81	156	54.93	1370
		Jumlah	2,100	100.00	284	100.00	2384
4	Umur	Tua	1,838	87.52	259	91.20	2097
		Muda	262	12.48	25	8.80	287
		Jumlah	2,100	100.00	284	100.00	2384
5	Gender	Pria	1,258	59.90	167	58.80	1425
		Wanita	842	40.10	117	41.20	959
		Jumlah	2,100	100.00	284	100.00	2384
6	Status perkawinan	Sudah menikah	1,751	83.38	247	86.97	1998
		Belum menikah	349	16.62	37	13.03	386
		Jumlah	2,100	100.00	284	100.00	2384
7	Kedudukan dalam rumah tangga	Kepala rumah tangga	966	46.00	147	51.76	1113
		Bukan kepala RT	1,134	54.00	137	48.24	1271
		Jumlah	2,100	100.00	284	100.00	2384
8	Wilayah tempat tinggal	Perkotaan	1,320	62.86	191	67.25	1511
		Pedesaan	780	37.14	93	32.75	873
		Jumlah	2,100	100.00	284	100.00	2384



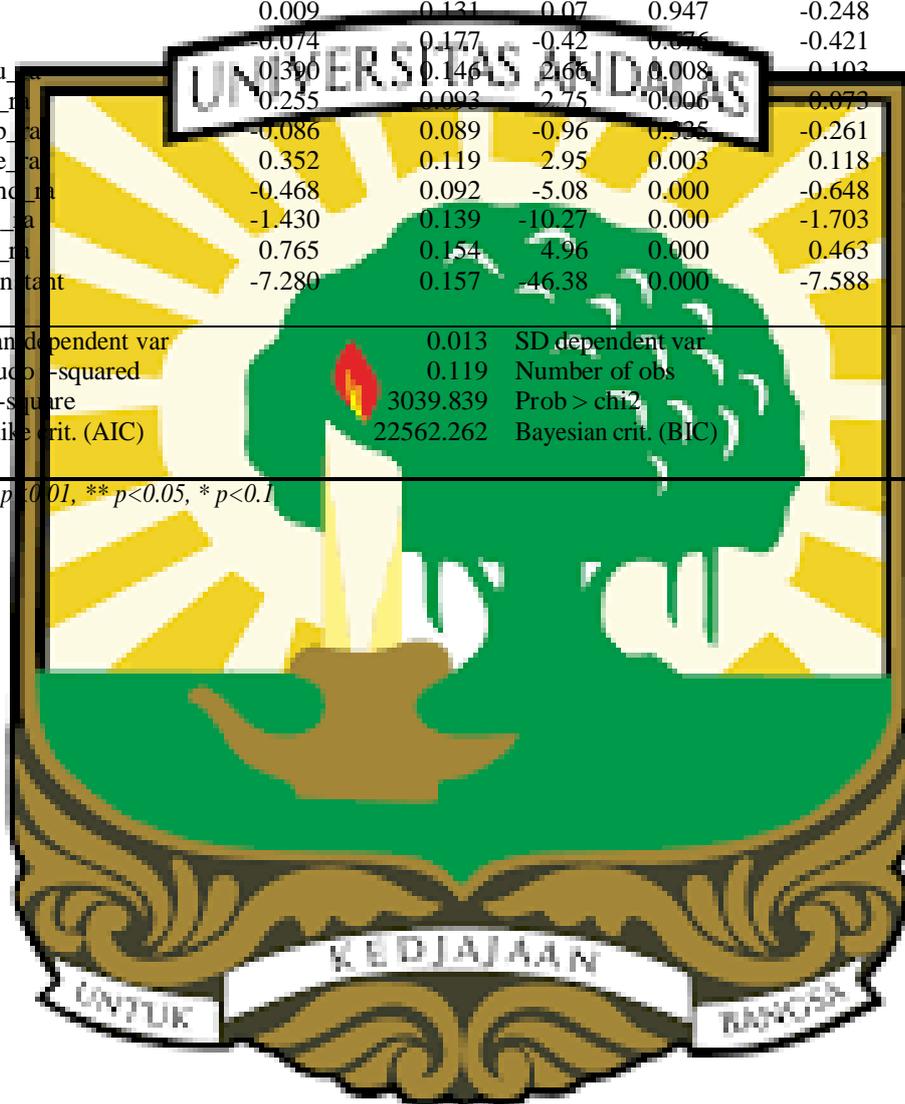
Lampiran 3. Hasil Analisis Regresi Logistik Model Pengangguran Terdidik

Logistic regression								
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig	
edu	1.273	0.081	15.65	0.000	1.114	1.433	***	
wt	0.623	0.044	14.02	0.000	0.536	0.710	***	
exp	0.796	0.044	18.07	0.000	0.710	0.883	***	
age	1.726	0.045	38.06	0.000	1.637	1.815	***	
Constant	-6.673	0.086	-77.98	0.000	-6.841	-6.505	***	
Mean dependent var		0.013					SD dependent var	0.112
Pseudo r-squared		0.092					Number of obs	88292.000
Chi-square		2361.272					Prob > chi2	0.000
Akaike crit. (AIC)		23218.829					Bayesian crit. (BIC)	23269.558
*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$								
Logistic regression								
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig	
edu	1.313	0.082	16.05	0.000	1.153	1.474	***	
wt	0.635	0.045	14.24	0.000	0.548	0.722	***	
exp	0.901	0.045	20.24	0.000	0.814	0.988	***	
age	0.785	0.058	13.47	0.000	0.671	0.899	***	
gend	-0.043	0.045	-0.94	0.346	-0.132	0.046		
ms	1.173	0.065	18.18	0.000	1.046	1.299	***	
ph	0.535	0.077	6.97	0.000	0.385	0.685	***	
Constant	-7.340	0.103	-71.52	0.000	-7.541	-7.139	***	
Mean dependent var		0.013					SD dependent var	0.112
Pseudo r-squared		0.114					Number of obs	88292.000
Chi-square		2902.340					Prob > chi2	0.000
Akaike crit. (AIC)		22683.761					Bayesian crit. (BIC)	22764.927
*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$								
Logistic regression								
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig	
edu	1.313	0.082	16.03	0.000	1.152	1.474	***	
wt	0.635	0.045	14.23	0.000	0.548	0.723	***	
exp	0.902	0.045	20.21	0.000	0.814	0.989	***	
age	0.785	0.058	13.46	0.000	0.670	0.899	***	
gend	-0.043	0.045	-0.94	0.346	-0.132	0.047		
ms	1.173	0.065	18.17	0.000	1.047	1.300	***	
ph	0.535	0.077	6.96	0.000	0.384	0.685	***	
ra	-0.007	0.044	-0.15	0.881	-0.092	0.079		
Constant	-7.336	0.107	-68.81	0.000	-7.545	-7.127	***	
Mean dependent var		0.013					SD dependent var	0.112
Pseudo r-squared		0.114					Number of obs	188292.000
Chi-square		2902.362					Prob > chi2	0.000
Akaike crit. (AIC)		22685.738					Bayesian crit. (BIC)	22777.050
*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$								

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	1.041	0.128	8.15	0.000	0.790	1.291	***
wt	0.474	0.076	6.27	0.000	0.326	0.622	***
exp	0.959	0.072	13.32	0.000	0.818	1.100	***
age	0.594	0.092	6.42	0.000	0.413	0.775	***
gend	0.241	0.071	3.38	0.001	0.102	0.381	***
ms	2.096	0.114	18.46	0.000	1.874	2.319	***
ph	0.009	0.131	0.07	0.947	-0.248	0.266	
ra	-0.074	0.177	-0.42	0.675	-0.421	0.273	
edu_ra	0.390	0.146	2.66	0.008	0.103	0.676	***
wt_ra	-0.255	0.093	-2.75	0.006	-0.473	0.437	***
exp_ra	-0.086	0.089	-0.96	0.335	-0.261	0.089	
age_ra	0.352	0.119	2.95	0.003	0.118	0.585	***
gend_ra	-0.468	0.092	-5.08	0.000	-0.648	-0.287	***
ms_ra	-1.430	0.139	-10.27	0.000	-1.703	-1.157	***
ph_ra	0.765	0.154	4.96	0.000	0.463	1.068	***
Constant	-7.280	0.157	-46.38	0.000	-7.588	-6.973	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.112	
Pseudo-squared		0.119	Number of obs			88292.000	
Chi-square		3039.839	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		22562.262	Bayesian crit. (BIC)			22724.594	

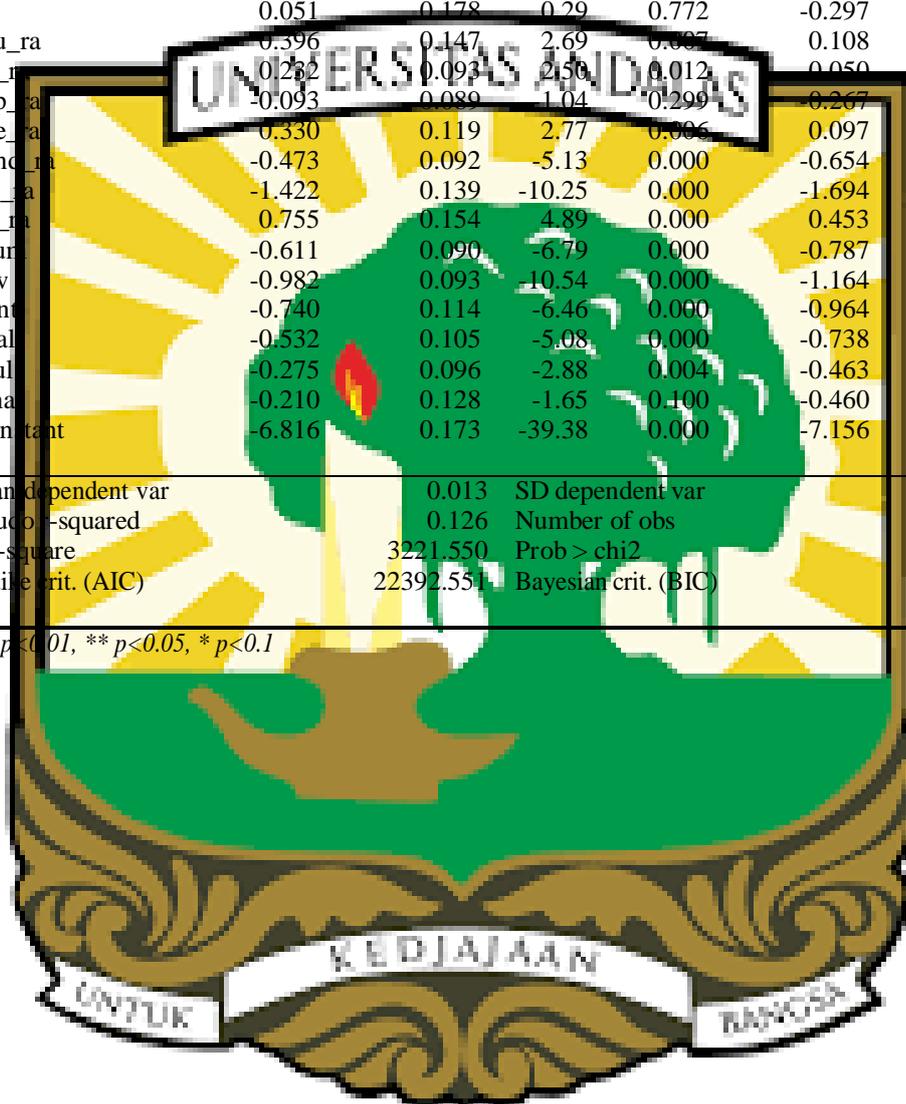
*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	1.052	0.129	8.19	0.000	0.800	1.304	***
wt	0.484	0.076	6.39	0.000	0.336	0.633	***
exp	1.050	0.072	14.48	0.000	0.908	1.192	***
age	0.618	0.092	6.69	0.000	0.437	0.800	***
gend	0.247	0.072	3.45	0.001	0.106	0.387	***
ms	2.094	0.113	18.48	0.000	1.872	2.316	***
ph	0.036	0.131	0.27	0.784	-0.221	0.293	
ra	0.051	0.178	0.29	0.772	-0.297	0.400	
edu_ra	0.396	0.147	2.69	0.007	0.108	0.684	***
wt_ra	0.232	0.093	2.50	0.012	0.050	0.414	**
exp_ra	-0.093	0.089	-1.04	0.299	-0.267	0.082	
age_ra	0.330	0.119	2.77	0.006	0.097	0.563	***
gend_ra	-0.473	0.092	-5.13	0.000	-0.654	-0.292	***
ms_ra	-1.422	0.139	-10.25	0.000	-1.694	-1.150	***
ph_ra	0.755	0.154	4.89	0.000	0.453	1.057	***
psur	-0.611	0.090	-6.79	0.000	-0.787	-0.434	***
pjw	-0.982	0.093	-10.54	0.000	-1.164	-0.799	***
pbnt	-0.740	0.114	-6.46	0.000	-0.964	-0.516	***
pkal	-0.532	0.105	-5.08	0.000	-0.738	-0.327	***
psul	-0.275	0.096	-2.88	0.004	-0.463	-0.088	***
pma	-0.210	0.128	-1.65	0.100	-0.460	0.040	
Constant	-6.816	0.173	-39.38	0.000	-7.156	-6.477	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.112	
Pseudo R-squared		0.126	Number of obs			88292.000	
Chi-square		3221.550	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		22392.551	Bayesian crit. (BIC)			22615.757	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



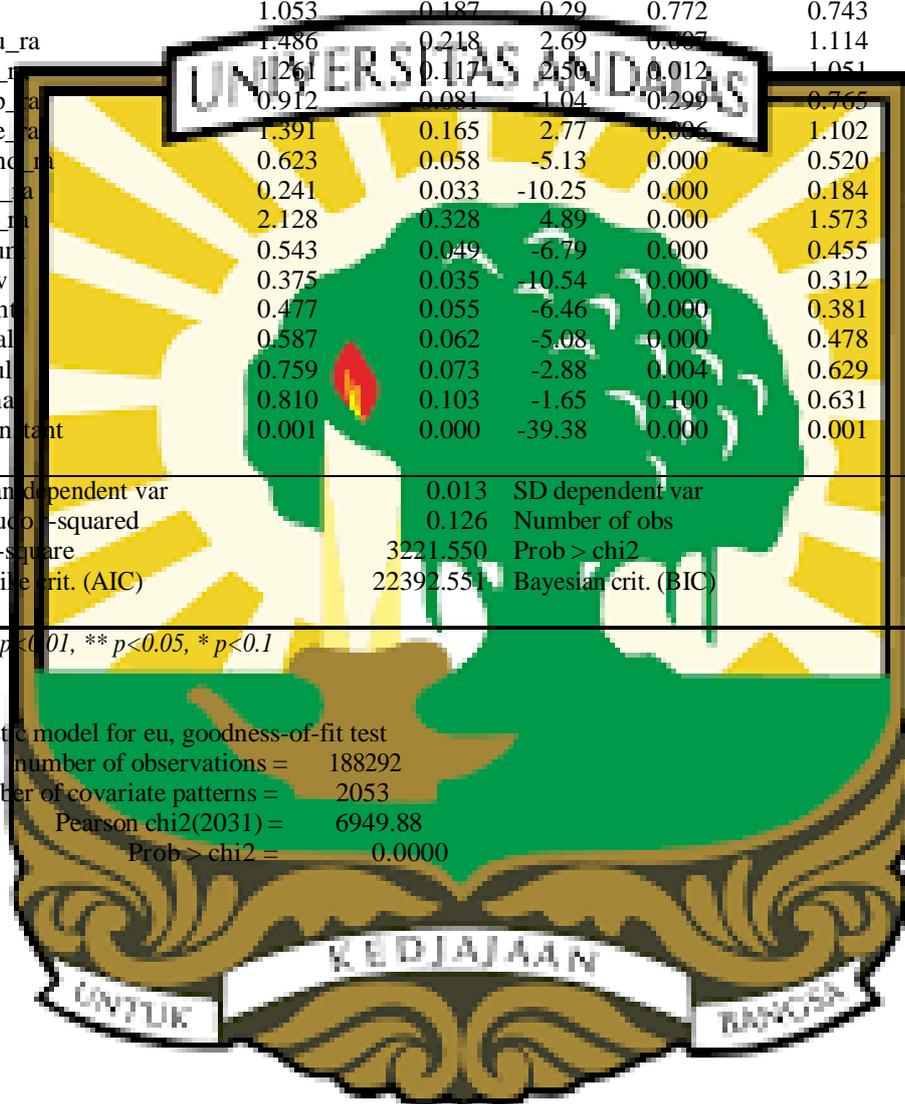
Logistic regression

eu	Odds Ratio	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	2.865	0.368	8.19	0.000	2.227	3.685	***
wt	1.623	0.123	6.39	0.000	1.399	1.883	***
exp	2.857	0.207	14.48	0.000	2.478	3.293	***
age	1.856	0.172	6.69	0.000	1.548	2.225	***
gend	1.280	0.092	3.45	0.001	1.112	1.472	***
ms	8.119	0.920	18.48	0.000	6.502	10.137	***
ph	1.037	0.136	0.27	0.784	0.802	1.340	
ra	1.053	0.187	0.29	0.772	0.743	1.491	
edu_ra	1.486	0.218	2.69	0.007	1.114	1.982	***
wt_ra	1.261	0.117	2.50	0.012	1.051	1.513	**
exp_ra	0.912	0.081	-1.04	0.299	0.765	1.086	
age_ra	1.391	0.165	2.77	0.006	1.102	1.756	***
gend_ra	0.623	0.058	-5.13	0.000	0.520	0.747	***
ms_ra	0.241	0.033	-10.25	0.000	0.184	0.317	***
ph_ra	2.128	0.328	4.89	0.000	1.573	2.879	***
psur	0.543	0.049	-6.79	0.000	0.455	0.648	***
pjw	0.375	0.035	-10.54	0.000	0.312	0.450	***
pbnt	0.477	0.055	-6.46	0.000	0.381	0.597	***
pkal	0.587	0.062	-5.08	0.000	0.478	0.721	***
psul	0.759	0.073	-2.88	0.004	0.629	0.916	***
pma	0.810	0.103	-1.65	0.100	0.631	1.041	
Constant	0.001	0.000	-39.38	0.000	0.001	0.002	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.112	
Pseudo-squared		0.126	Number of obs			88292.000	
Chi-square		3221.550	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		22392.551	Bayesian crit. (BIC)			22615.757	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic model for eu, goodness-of-fit test

number of observations = 188292
number of covariate patterns = 2053
Pearson chi2(2031) = 6949.88
Prob > chi2 = 0.0000



Lampiran 4. Hasil Analisis Regresi Logistik Model Pengangguran Terdidik Pada Masing-Masing Pulau

1. Pulau Sumatera

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.635	0.283	9.32	0.000	2.081 3.190	***
wt	0.531	0.083	6.38	0.000	0.368 0.695	***
exp	0.854	0.081	10.56	0.000	0.695 1.012	***
age	1.985	0.085	23.37	0.000	1.819 2.152	***
Constant	-8.134	0.288	-28.27	0.000	-8.698 -7.570	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.111
Pseudo r-squared		0.128	Number of obs			57853.000
Chi-square		1000.271	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		6800.864	Bayesian crit. (BIC)			6845.693

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.681	0.283	9.46	0.000	2.125 3.236	***
wt	0.558	0.084	6.68	0.000	0.394 0.722	***
exp	0.938	0.081	11.53	0.000	0.778 1.097	***
age	1.233	0.112	11.02	0.000	1.013 1.452	***
gend	-0.088	0.083	-1.06	0.289	-0.250 0.075	
ms	0.664	0.121	5.50	0.000	0.427 0.900	***
ph	1.005	0.160	6.30	0.000	0.692 1.318	***
Constant	-8.969	0.313	-28.61	0.000	-9.583 -8.355	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.111
Pseudo r-squared		0.143	Number of obs			57853.000
Chi-square		1116.135	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		6691.000	Bayesian crit. (BIC)			6762.725

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.688	0.283	9.49	0.000	2.132 3.243	***
wt	0.549	0.084	6.56	0.000	0.385 0.713	***
exp	0.930	0.081	11.41	0.000	0.770 1.089	***
age	1.240	0.112	11.06	0.000	1.020 1.459	***
gend	-0.092	0.083	-1.11	0.266	-0.255 0.070	
ms	0.657	0.121	5.43	0.000	0.420 0.893	***
ph	1.010	0.159	6.33	0.000	0.697 1.322	***
ra	0.125	0.077	1.62	0.105	-0.026 0.277	
Constant	-9.043	0.317	-28.53	0.000	-9.664 -8.422	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.111
Pseudo r-squared		0.144	Number of obs			57853.000
Chi-square		1118.775	Prob > chi2			0.000

Akaike crit. (AIC)

6690.361 Bayesian crit. (BIC)

6771.051

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.372	0.367	6.47	0.000	1.654 3.091	***
wt	0.353	0.138	2.55	0.011	0.082 0.624	**
exp	1.080	0.127	8.52	0.000	0.830 1.329	***
age	1.652	0.185	8.93	0.000	1.289 2.014	***
gend	0.166	0.125	1.33	0.184	-0.079 0.411	
ms	0.826	0.188	4.39	0.000	0.457 1.194	***
ph	0.751	0.268	2.81	0.005	0.227 1.276	***
ra	0.134	0.337	0.40	0.692	-0.527 0.794	
edu_ra	0.504	0.380	1.33	0.185	-0.241 1.249	
wt_ra	0.313	0.173	1.81	0.070	-0.026 0.651	*
exp_ra	-0.254	0.164	-1.55	0.122	-0.576 0.068	
age_ra	-0.671	0.234	-2.86	0.004	-1.130 -0.212	***
gend_ra	-0.457	0.167	-2.74	0.006	-0.784 -0.131	***
ms_ra	-0.270	0.245	-1.10	0.271	-0.751 0.211	
ph_ra	0.423	0.324	1.30	0.192	-0.212 1.058	
Constant	-9.054	0.379	-23.90	0.000	-9.796 -8.312	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.111
Pseudo r-squared		0.147	Number of obs			57853.000
Chi-square		1146.042	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		6677.093	Bayesian crit. (BIC)			6820.543

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	10.723	3.932	6.47	0.000	5.226 22.002	***
wt	1.423	0.197	2.55	0.011	1.085 1.866	**
exp	2.946	0.374	8.52	0.000	2.297 3.777	***
age	5.215	0.964	8.93	0.000	3.630 7.493	***
gend	1.180	0.147	1.33	0.184	0.924 1.508	
ms	2.283	0.429	4.39	0.000	1.580 3.300	***
ph	2.120	0.567	2.81	0.005	1.250 3.581	***
ra	1.143	0.385	0.40	0.692	0.590 2.212	
edu_ra	1.655	0.629	1.33	0.185	0.786 3.488	
wt_ra	1.367	0.230	1.81	0.070	0.974 1.918	*
exp_ra	0.776	0.127	-1.55	0.122	0.562 1.070	
age_ra	0.511	0.120	-2.86	0.004	0.323 0.809	***
gend_ra	0.633	0.105	-2.74	0.006	0.457 0.878	***
ms_ra	0.763	0.187	-1.10	0.271	0.472 1.234	
ph_ra	1.526	0.494	1.30	0.192	0.809 2.879	
Constant	0.000	0.000	-23.90	0.000	0.000 0.000	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.111
Pseudo r-squared		0.147	Number of obs			57853.000
Chi-square		1146.042	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		6677.093	Bayesian crit. (BIC)			6820.543

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

2. Pulau Jawa

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.182	0.243	8.97	0.000	1.705 2.659	***
wt	0.635	0.090	7.03	0.000	0.458 0.813	***
exp	0.842	0.090	9.41	0.000	0.667 1.018	***
age	1.533	0.091	16.84	0.000	1.355 1.711	***
Constant	-7.773	0.251	-31.03	0.000	-8.264 -7.282	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.098
Pseudo r-squared		0.091	Number of obs			58076.000
Chi-square		579.651	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		5799.009	Bayesian crit. (BIC)			5843.857

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.183	0.244	8.96	0.000	1.706 2.661	***
wt	0.639	0.091	7.05	0.000	0.461 0.816	***
exp	0.902	0.090	10.00	0.000	0.725 1.078	***
age	0.843	0.122	6.92	0.000	0.604 1.081	***
gend	-0.117	0.094	-1.24	0.215	-0.302 0.068	
ms	0.652	0.130	5.03	0.000	0.398 0.906	***
ph	0.801	0.155	5.16	0.000	0.497 1.105	***
Constant	-8.400	0.275	-30.53	0.000	-8.939 -7.861	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.098
Pseudo r-squared		0.103	Number of obs			58076.000
Chi-square		657.783	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		5726.878	Bayesian crit. (BIC)			5798.634

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.194	0.244	9.01	0.000	1.716 2.671	***
wt	0.637	0.091	7.03	0.000	0.460 0.815	***
exp	0.902	0.090	10.01	0.000	0.726 1.079	***
age	0.857	0.122	7.01	0.000	0.617 1.096	***
gend	-0.125	0.094	-1.32	0.187	-0.310 0.060	
ms	0.638	0.130	4.90	0.000	0.383 0.893	***
ph	0.812	0.155	5.23	0.000	0.507 1.116	***
ra	0.168	0.106	1.58	0.114	-0.040 0.376	
Constant	-8.547	0.291	-29.39	0.000	-9.117 -7.977	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.098
Pseudo r-squared		0.104	Number of obs			58076.000
Chi-square		660.363	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		5726.297	Bayesian crit. (BIC)			5807.023

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.325	0.444	5.23	0.000	1.454 3.196	***
wt	0.603	0.195	3.09	0.002	0.221 0.985	***
exp	0.881	0.194	4.55	0.000	0.502 1.261	***
age	0.288	0.252	1.14	0.253	-0.206 0.781	
gend	0.004	0.201	0.02	0.984	-0.390 0.398	
ms	1.470	0.282	5.21	0.000	0.918 2.023	***
ph	0.426	0.340	1.25	0.210	-0.240 1.092	
ra	0.179	0.355	0.50	0.614	-0.516 0.873	
edu_ra	-0.158	0.428	-0.37	0.712	-0.997 0.681	
wt_ra	0.048	0.219	0.22	0.827	-0.381 0.476	
exp_ra	-0.029	0.218	-0.14	0.893	-0.397 0.456	
age_ra	0.746	0.288	2.59	0.010	0.182 1.311	**
gend_ra	-0.161	0.227	-0.71	0.478	-0.606 0.284	
ms_ra	-1.072	0.318	-3.37	0.001	-1.695 -0.448	***
ph_ra	0.478	0.377	1.27	0.205	-0.261 1.217	
Constant	-8.561	0.414	-20.66	0.000	-9.373 -7.749	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.098
Pseudo r-squared		0.106	Number of obs			58076.000
Chi-square		672.953	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		5727.707	Bayesian crit. (BIC)			5871.219

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ **Logistic regression**

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	10.227	4.544	5.23	0.000	4.281 24.432	***
wt	1.827	0.356	3.09	0.002	1.247 2.677	***
exp	2.414	0.468	4.55	0.000	1.651 3.528	***
age	1.333	0.336	1.14	0.253	0.814 2.184	
gend	1.004	0.202	0.02	0.984	0.677 1.489	
ms	4.350	1.226	5.21	0.000	2.503 7.558	***
ph	1.531	0.520	1.25	0.210	0.787 2.980	
ra	1.196	0.424	0.50	0.614	0.597 2.395	
edu_ra	0.854	0.365	-0.37	0.712	0.369 1.975	
wt_ra	1.049	0.229	0.22	0.827	0.683 1.610	
exp_ra	1.030	0.224	0.14	0.893	0.672 1.578	
age_ra	2.109	0.608	2.59	0.010	1.199 3.710	**
gend_ra	0.851	0.193	0.71	0.478	0.544 1.329	
ms_ra	0.342	0.109	-3.37	0.001	0.184 0.639	***
ph_ra	1.613	0.608	1.27	0.205	0.770 3.379	
Constant	0.000	0.000	-20.66	0.000	0.000 0.000	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.098
Pseudo r-squared		0.106	Number of obs			58076.000
Chi-square		672.953	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		5727.707	Bayesian crit. (BIC)			5871.219

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

3. Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.995	0.587	5.10	0.000	1.844 4.146	***
wt	0.509	0.165	3.08	0.002	0.185 0.833	***
exp	0.656	0.169	3.89	0.000	0.325 0.987	***
age	0.973	0.169	5.74	0.000	0.641 1.305	***
Constant	-7.912	0.596	-13.27	0.000	-9.080 -6.744	***
Mean dependent var		0.012				0.109
Pseudo r-squared		0.076				13524.000
Chi-square		133.298				0.000
Akaike crit. (AIC)		1632.332				1669.893

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	3.097	0.588	5.27	0.000	1.944 4.249	***
wt	0.498	0.166	3.00	0.003	0.172 0.824	***
exp	0.813	0.172	4.72	0.000	0.475 1.151	***
age	0.153	0.210	0.73	0.465	-0.258 0.564	
gend	0.141	0.179	0.79	0.431	-0.210 0.492	
ms	1.329	0.226	5.88	0.000	0.887 1.772	***
ph	-0.032	0.242	-0.13	0.894	-0.507 0.443	
Constant	-8.441	0.621	-13.60	0.000	-9.658 -7.224	***
Mean dependent var		0.012				0.109
Pseudo r-squared		0.097				13524.000
Chi-square		170.829				0.000
Akaike crit. (AIC)		1600.801				1660.899

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	3.102	0.588	5.28	0.000	1.950 4.255	***
wt	0.482	0.167	2.89	0.004	0.156 0.809	***
exp	0.808	0.173	4.67	0.000	0.469 1.146	***
age	0.164	0.210	0.78	0.434	-0.247 0.576	
gend	0.132	0.179	0.74	0.461	-0.219 0.483	
ms	1.315	0.226	5.82	0.000	0.872 1.758	***
ph	-0.015	0.242	-0.06	0.951	-0.489 0.459	
ra	0.209	0.168	1.25	0.212	-0.119 0.538	
Constant	-8.575	0.631	-13.59	0.000	-9.811 -7.338	***
Mean dependent var		0.012				0.109
Pseudo r-squared		0.098				13524.000
Chi-square		172.417				0.000
Akaike crit. (AIC)		1601.213				1668.823

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	3.093	0.776	3.99	0.000	1.572	4.613	***
wt	0.458	0.284	1.61	0.107	-0.099	1.016	
exp	1.022	0.281	3.64	0.000	0.471	1.572	***
age	0.202	0.348	0.58	0.562	-0.480	0.884	
gend	0.287	0.287	1.00	0.317	-0.275	0.848	
ms	2.720	0.435	6.25	0.000	1.867	3.572	***
ph	-1.268	0.456	-2.78	0.005	-2.162	-0.375	***
ra	0.451	0.668	0.68	0.499	-0.857	1.759	
edu_ra	0.030	0.727	0.04	0.967	-1.395	1.456	
wt_ra	0.065	0.348	0.19	0.851	-0.616	0.747	
exp_ra	-0.370	0.353	-1.05	0.295	-1.063	0.322	
age_ra	0.005	0.441	0.01	0.990	-0.859	0.870	
gend_ra	-0.284	0.367	-0.77	0.440	-1.004	0.436	
ms_ra	-1.984	0.518	-3.83	0.000	-2.999	-0.970	***
ph_ra	1.678	0.545	3.08	0.002	0.610	2.746	***
Constant	-8.735	0.779	-11.21	0.000	-10.261	-7.208	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.109	
Pseudo r-squared		0.110	Number of obs			13524.000	
Chi-square		192.369	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		1595.261	Bayesian crit. (BIC)			1715.457	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ **Logistic regression**

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	22.035	17.096	3.99	0.000	4.816	100.817	***
wt	1.581	0.450	1.61	0.107	0.906	2.761	
exp	2.778	0.780	3.64	0.000	1.602	4.816	***
age	1.224	0.426	0.58	0.562	0.619	2.420	
gend	1.332	0.382	1.00	0.317	0.760	2.336	
ms	15.175	6.598	6.25	0.000	6.472	35.581	***
ph	0.281	0.128	-2.78	0.005	0.115	0.687	***
ra	1.570	1.048	0.68	0.499	0.424	5.809	
edu_ra	1.031	0.750	0.04	0.967	0.248	4.287	
wt_ra	1.068	0.371	0.19	0.851	0.540	2.111	
exp_ra	0.691	0.244	-1.05	0.295	0.345	1.380	
age_ra	1.006	0.444	0.01	0.990	0.423	2.388	
gend_ra	0.753	0.277	-0.77	0.440	0.361	1.547	
ms_ra	0.137	0.071	-3.83	0.000	0.050	0.379	***
ph_ra	5.355	2.918	3.08	0.002	1.840	15.583	***
Constant	0.000	0.000	-11.21	0.000	0.000	0.001	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.109	
Pseudo r-squared		0.110	Number of obs			13524.000	
Chi-square		192.369	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		1595.261	Bayesian crit. (BIC)			1715.457	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

4. Pulau Kalimantan

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.991	0.303	6.58	0.000	1.398 2.584	***
wt	0.817	0.133	6.15	0.000	0.557 1.078	***
exp	0.742	0.136	5.45	0.000	0.475 1.009	***
age	1.137	0.137	8.31	0.000	0.868 1.405	***
Constant	-7.029	0.315	-22.34	0.000	-7.646 -6.411	***
Mean dependent var		0.014				0.116
Pseudo r-squared		0.077				17921.000
Chi-square		199.894				0.000
Akaike crit. (AIC)		2391.490				2430.459

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.028	0.304	6.67	0.000	1.432 2.624	***
wt	0.831	0.134	6.22	0.000	0.569 1.093	***
exp	0.839	0.139	6.03	0.000	0.567 1.112	***
age	0.114	0.176	0.65	0.519	-0.232 0.459	
gend	0.132	0.149	0.89	0.372	-0.159 0.424	
ms	1.645	0.192	8.58	0.000	1.269 2.021	***
ph	-0.175	0.203	-0.86	0.390	-0.573 0.224	
Constant	-7.421	0.342	-21.69	0.000	-8.092 -6.751	***
Mean dependent var		0.014				0.116
Pseudo r-squared		0.108				17921.000
Chi-square		278.779				0.000
Akaike crit. (AIC)		2318.606				2380.955

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.043	0.304	6.71	0.000	1.441 2.640	***
wt	0.824	0.134	6.16	0.000	0.561 1.086	***
exp	0.835	0.139	6.00	0.000	0.563 1.108	***
age	0.123	0.176	0.69	0.487	-0.223 0.469	
gend	0.124	0.149	0.83	0.405	-0.168 0.415	
ms	1.636	0.192	8.52	0.000	1.260 2.012	***
ph	-0.169	0.203	-0.83	0.405	-0.567 0.229	
ra	0.166	0.139	1.20	0.230	-0.105 0.438	
Constant	-7.537	0.356	-21.16	0.000	-8.235 -6.839	***
Mean dependent var		0.014				0.116
Pseudo r-squared		0.109				17921.000
Chi-square		280.240				0.000
Akaike crit. (AIC)		2319.144				2389.287

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	2.631	0.514	5.12	0.000	1.624	3.639	***
wt	0.240	0.245	0.98	0.327	-0.240	0.721	
exp	0.718	0.240	2.99	0.003	0.247	1.188	***
age	-0.574	0.272	-2.11	0.035	-1.107	-0.041	**
gend	0.667	0.237	2.81	0.005	0.203	1.131	***
ms	3.146	0.336	9.36	0.000	2.487	3.805	***
ph	-0.869	0.354	-2.45	0.014	-1.563	-0.175	**
ra	1.005	0.535	1.88	0.060	-0.044	2.054	*
edu_ra	-0.723	0.484	-1.49	0.136	-1.671	0.226	
wt_ra	0.834	0.293	2.85	0.004	0.260	1.407	***
exp_ra	-0.134	0.291	0.46	0.646	-0.437	0.705	
age_ra	1.169	0.358	3.26	0.001	0.466	1.871	***
gend_ra	-0.860	0.304	-2.82	0.005	-1.456	-0.263	***
ms_ra	-2.334	0.416	-5.61	0.000	-3.150	-1.518	***
ph_ra	1.028	0.427	2.41	0.016	0.192	1.864	**
Constant	-8.255	0.565	-14.62	0.000	-9.362	-7.148	***
Mean dependent var		0.014	SD dependent var			0.116	
Pseudo r-squared		0.126	Number of obs			17921.000	
Chi-square		325.788	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		2287.596	Bayesian crit. (BIC)			2412.296	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ **Logistic regression**

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	13.894	7.142	5.12	0.000	5.073	38.049	***
wt	1.272	0.312	0.98	0.327	0.787	2.056	
exp	2.049	0.492	2.99	0.003	1.280	3.281	***
age	0.563	0.153	-2.11	0.035	0.331	0.960	**
gend	1.948	0.461	2.81	0.005	1.224	3.099	***
ms	23.253	7.819	9.36	0.000	12.030	44.946	***
ph	0.419	0.149	-2.45	0.014	0.209	0.840	**
ra	2.732	1.462	1.88	0.060	0.957	7.800	*
edu_ra	0.486	0.235	-1.49	0.136	0.188	1.254	
wt_ra	2.301	0.674	2.85	0.004	1.297	4.085	***
exp_ra	1.143	0.333	0.46	0.646	0.646	2.024	
age_ra	3.218	1.153	3.26	0.001	1.594	6.495	***
gend_ra	0.423	0.129	2.82	0.005	0.231	0.769	***
ms_ra	0.097	0.040	-5.61	0.000	0.043	0.219	***
ph_ra	2.795	1.192	2.41	0.016	1.211	6.449	**
Constant	0.000	0.000	-14.62	0.000	0.000	0.001	***
Mean dependent var		0.014	SD dependent var			0.116	
Pseudo r-squared		0.126	Number of obs			17921.000	
Chi-square		325.788	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		2287.596	Bayesian crit. (BIC)			2412.296	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

5. Pulau Sulawesi

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.540	0.198	7.78	0.000	1.152 1.929	***
wt	0.757	0.106	7.12	0.000	0.548 0.965	***
exp	0.777	0.108	7.17	0.000	0.564 0.989	***
age	1.451	0.107	13.56	0.000	1.241 1.661	***
Constant	-6.484	0.206	-31.52	0.000	-6.884 -6.078	***
Mean dependent var		0.016				0.126
Pseudo r-squared		0.089				25702.000
Chi-square		378.384				0.000
Akaike crit. (AIC)		3904.134				3944.905

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.666	0.200	8.33	0.000	1.274 2.058	***
wt	0.773	0.107	7.23	0.000	0.563 0.982	***
exp	0.914	0.111	8.27	0.000	0.698 1.131	***
age	0.364	0.132	2.75	0.006	0.105 0.624	***
gend	0.137	0.107	1.28	0.201	-0.073 0.348	
ms	1.671	0.150	11.14	0.000	1.377 1.965	***
ph	0.121	0.177	0.69	0.492	-0.225 0.468	
Constant	-7.220	0.247	-29.25	0.000	-7.704 -6.736	***
Mean dependent var		0.016				0.126
Pseudo r-squared		0.124				25702.000
Chi-square		530.550				0.000
Akaike crit. (AIC)		3757.967				3823.202

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.664	0.200	8.30	0.000	1.271 2.057	***
wt	0.773	0.107	7.23	0.000	0.564 0.983	***
exp	0.915	0.111	8.27	0.000	0.698 1.131	***
age	0.364	0.132	2.75	0.006	0.104 0.624	***
gend	0.138	0.108	1.28	0.200	-0.073 0.349	
ms	1.672	0.150	11.13	0.000	1.377 1.966	***
ph	0.120	0.177	0.68	0.496	-0.226 0.467	
ra	-0.013	0.101	-0.13	0.900	-0.211 0.185	
Constant	-7.212	0.255	-28.31	0.000	-7.712 -6.713	***
Mean dependent var		0.016				0.126
Pseudo r-squared		0.124				25702.000
Chi-square		530.566				0.000
Akaike crit. (AIC)		3759.951				3833.340

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	1.468	0.301	4.88	0.000	0.879	2.057	***
wt	0.689	0.157	4.39	0.000	0.381	0.996	***
exp	0.819	0.166	4.94	0.000	0.494	1.144	***
age	0.179	0.187	0.96	0.339	-0.187	0.545	
gend	0.257	0.149	1.72	0.085	-0.036	0.549	*
ms	3.427	0.290	11.82	0.000	2.858	3.995	***
ph	-0.809	0.300	-2.70	0.007	-1.397	-0.222	***
ra	0.428	0.347	1.23	0.218	-0.253	1.109	
edu_ra	0.280	0.348	0.81	0.420	-0.401	0.962	
wt_ra	0.159	0.209	0.76	0.447	-0.251	0.569	
exp_ra	-0.179	0.221	-0.81	0.418	-0.254	0.612	
age_ra	0.490	0.268	1.83	0.068	-0.036	1.016	*
gend_ra	-0.246	0.214	-1.15	0.251	-0.665	0.174	
ms_ra	-2.813	0.350	-8.04	0.000	-3.498	-2.127	***
ph_ra	1.285	0.368	3.49	0.000	0.563	2.006	***
Constant	-7.509	0.334	-22.45	0.000	-8.165	-6.854	***
Mean dependent var		0.016	SD dependent var			0.126	
Pseudo r-squared		0.144	Number of obs			25702.000	
Chi-square		614.220	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		3690.297	Bayesian crit. (BIC)			3820.766	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ **Logistic regression**

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	4.341	1.305	4.88	0.000	2.409	7.824	***
wt	1.991	0.312	4.39	0.000	1.464	2.708	***
exp	2.269	0.376	4.94	0.000	1.640	3.139	***
age	1.196	0.223	0.96	0.339	0.829	1.724	
gend	1.293	0.193	1.72	0.085	0.965	1.732	*
ms	30.770	8.923	11.82	0.000	17.430	54.320	***
ph	0.445	0.133	-2.70	0.007	0.247	0.801	***
ra	1.534	0.533	1.23	0.218	0.776	3.031	
edu_ra	1.323	0.460	0.81	0.420	0.670	2.616	
wt_ra	1.173	0.245	0.76	0.447	0.778	1.766	
exp_ra	1.196	0.264	0.81	0.418	0.776	1.844	
age_ra	1.633	0.438	1.83	0.068	0.965	2.763	*
gend_ra	0.782	0.167	-1.15	0.251	0.511	1.190	
ms_ra	0.060	0.021	-8.04	0.000	0.030	0.119	***
ph_ra	3.613	1.331	3.49	0.000	1.755	7.436	***
Constant	0.001	0.000	-22.45	0.000	0.000	0.001	***
Mean dependent var		0.016	SD dependent var			0.126	
Pseudo r-squared		0.144	Number of obs			25702.000	
Chi-square		614.220	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		3690.297	Bayesian crit. (BIC)			3820.766	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

6. Pulau Maluku

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.428	0.442	3.23	0.001	0.561 2.294	***
wt	0.952	0.219	4.35	0.000	0.523 1.380	***
exp	1.322	0.242	5.47	0.000	0.848 1.796	***
age	2.551	0.257	9.93	0.000	2.047 3.054	***
Constant	-7.267	0.469	-15.48	0.000	-8.187 -6.347	***
Mean dependent var		0.016				0.125
Pseudo r-squared		0.170				6837.000
Chi-square		189.269				0.000
Akaike crit. (AIC)		930.978				965.128

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.662	0.453	3.67	0.000	0.774 2.549	***
wt	1.070	0.224	4.78	0.000	0.631 1.509	***
exp	1.651	0.253	6.54	0.000	1.156 2.146	***
age	0.751	0.278	2.70	0.007	0.205 1.297	***
gend	-0.028	0.209	-0.14	0.893	-0.437 0.381	
ms	3.225	0.502	6.42	0.000	2.240 4.210	***
ph	1.586	0.752	2.11	0.035	0.112 3.059	**
Constant	-10.331	0.901	-11.47	0.000	-12.096 -8.565	***
Mean dependent var		0.016				0.125
Pseudo r-squared		0.262				6837.000
Chi-square		290.706				0.000
Akaike crit. (AIC)		835.541				890.182

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.693	0.451	3.75	0.000	0.809 2.578	***
wt	1.025	0.225	4.55	0.000	0.584 1.467	***
exp	1.642	0.253	6.48	0.000	1.145 2.138	***
age	0.761	0.278	2.73	0.006	0.215 1.307	***
gend	-0.060	0.210	-0.29	0.773	-0.472 0.351	
ms	3.200	0.502	6.37	0.000	2.216 4.185	***
ph	1.630	0.751	2.17	0.030	0.158 3.101	**
ra	0.333	0.210	1.58	0.113	-0.079 0.745	
Constant	-10.548	0.915	-11.53	0.000	-12.341 -8.755	***
Mean dependent var		0.016				0.125
Pseudo r-squared		0.264				6837.000
Chi-square		293.253				0.000
Akaike crit. (AIC)		834.994				896.465

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.687	0.945	2.84	0.004	0.835 4.540	***
wt	1.151	0.368	3.13	0.002	0.430 1.873	***
exp	1.588	0.391	4.06	0.000	0.821 2.356	***
age	0.074	0.395	0.19	0.852	-0.700 0.847	
gend	0.319	0.326	0.98	0.329	-0.321 0.958	
ms	4.652	1.037	4.49	0.000	2.620 6.684	***
ph	0.425	1.077	0.39	0.693	-1.686 2.535	
ra	1.142	0.774	1.48	0.140	-0.374 2.658	
edu_ra	-1.191	1.011	-1.18	0.239	-3.172 0.791	
wt_ra	-0.124	0.460	-0.27	0.787	-1.025 0.777	
exp_ra	-0.159	0.510	0.31	0.755	-0.841 1.159	
age_ra	1.173	0.553	2.12	0.034	0.089 2.257	**
gend_ra	-0.629	0.424	-1.48	0.138	-1.461 0.203	
ms_ra	-2.100	1.158	-1.81	0.070	-4.370 0.169	*
ph_ra	1.696	1.327	1.28	0.201	-0.905 4.297	
Constant	-11.360	1.092	-10.40	0.000	-13.501 -9.220	***
Mean dependent var		0.016	SD dependent var			0.125
Pseudo r-squared		0.273	Number of obs			6837.000
Chi-square		302.829	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		839.418	Bayesian crit. (BIC)			948.699

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ **Logistic regression**

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	14.694	13.886	2.84	0.004	2.305 93.656	***
wt	3.162	1.164	3.13	0.002	1.537 6.506	***
exp	4.896	1.917	4.06	0.000	2.273 10.546	***
age	1.076	0.425	0.19	0.852	0.497 2.334	
gend	1.375	0.448	0.98	0.329	0.726 2.606	
ms	104.782	108.643	4.49	0.000	13.732 799.567	***
ph	1.529	1.646	0.39	0.693	0.185 12.616	
ra	3.132	2.423	1.48	0.140	0.688 14.265	
edu_ra	0.304	0.307	-1.18	0.239	0.042 2.205	
wt_ra	0.883	0.406	-0.27	0.787	0.359 2.174	
exp_ra	1.172	0.598	0.31	0.755	0.431 3.187	
age_ra	3.232	1.787	2.12	0.034	1.093 9.555	**
gend_ra	0.533	0.226	1.48	0.138	0.231 1.225	
ms_ra	0.122	0.142	-1.81	0.070	0.013 1.184	*
ph_ra	5.452	7.237	1.28	0.201	0.404 73.509	
Constant	0.000	0.000	-10.40	0.000	0.000 0.000	***
Mean dependent var		0.016	SD dependent var			0.125
Pseudo r-squared		0.273	Number of obs			6837.000
Chi-square		302.829	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		839.418	Bayesian crit. (BIC)			948.699

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

7. Pulau Papua

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig	
edu	-2.989	0.205	-14.55	0.000	-3.392 -2.587	***	
wt	0.447	0.191	2.34	0.019	0.072 0.821	**	
exp	1.458	0.211	6.91	0.000	1.044 1.872	***	
age	4.546	0.258	17.64	0.000	4.041 5.051	***	
Constant	-5.194	0.249	-20.89	0.000	-5.682 -4.707	***	
Mean dependent var		0.019				SD dependent var	0.137
Pseudo r-squared		0.355				Number of obs	8379.000
Chi-square		565.656				Prob > chi2	0.000
Akaike crit. (AIC)		1035.800				Bayesian crit. (BIC)	1070.967

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig	
edu	-3.201	0.224	-14.26	0.000	-3.640 -2.761	***	
wt	0.560	0.199	2.81	0.005	0.170 0.950	***	
exp	1.619	0.226	7.15	0.000	1.175 2.062	***	
age	2.682	0.276	9.73	0.000	2.142 3.223	***	
gend	-0.466	0.202	-2.30	0.021	-0.863 -0.069	**	
ms	4.227	0.736	5.74	0.000	2.784 5.670	***	
ph	2.202	0.626	3.52	0.000	0.975 3.429	***	
Constant	-9.204	0.916	-10.05	0.000	-10.999 -7.409	***	
Mean dependent var		0.019				SD dependent var	0.137
Pseudo r-squared		0.463				Number of obs	8379.000
Chi-square		737.142				Prob > chi2	0.000
Akaike crit. (AIC)		870.314				Bayesian crit. (BIC)	926.582

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig	
edu	-3.411	0.239	-14.24	0.000	-3.880 -2.942	***	
wt	0.665	0.203	3.27	0.001	0.267 1.064	***	
exp	1.702	0.233	7.31	0.000	1.246 2.158	***	
age	2.753	0.284	9.69	0.000	2.196 3.310	***	
gend	-0.412	0.204	-2.02	0.044	-0.813 -0.012	**	
ms	4.345	0.738	5.89	0.000	2.899 5.791	***	
ph	2.354	0.626	3.76	0.000	1.127 3.581	***	
ra	-0.833	0.206	-4.04	0.000	-1.238 -0.429	***	
Constant	-9.026	0.916	-9.85	0.000	-10.822 -7.230	***	
Mean dependent var		0.019				SD dependent var	0.137
Pseudo r-squared		0.474				Number of obs	8379.000
Chi-square		754.071				Prob > chi2	0.000
Akaike crit. (AIC)		855.385				Bayesian crit. (BIC)	918.686

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	-3.455	0.369	-9.36	0.000	-4.178	-2.732	***
wt	0.887	0.290	3.06	0.002	0.318	1.456	***
exp	1.631	0.353	4.62	0.000	0.939	2.323	***
age	2.206	0.419	5.27	0.000	1.385	3.027	***
gend	-0.002	0.282	-0.01	0.995	-0.554	0.550	
ms	5.144	0.969	5.31	0.000	3.245	7.043	***
ph	2.463	0.748	3.29	0.001	0.996	3.929	***
ra	0.125	0.961	0.13	0.896	-1.758	2.008	
edu_ra	0.020	0.489	0.04	0.967	-0.938	0.978	
wt_ra	-0.523	0.404	-1.29	0.196	1.315	0.269	
exp_ra	-0.180	0.477	0.38	0.706	0.754	1.114	
age_ra	1.248	0.598	2.09	0.037	0.077	2.419	**
gend_ra	-0.908	0.411	-2.21	0.027	-1.714	-0.101	**
ms_ra	-1.493	1.173	-1.27	0.203	-3.793	0.806	
ph_ra	-0.027	1.100	-0.03	0.980	-2.184	2.129	
Constant	-9.651	1.050	-9.19	0.000	-11.710	-7.593	***
Mean dependent var		0.019	SD dependent var			0.137	
Pseudo r-squared		0.483	Number of obs			8379.000	
Chi-square		769.011	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		854.445	Bayesian crit. (BIC)			966.981	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ **Logistic regression**

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	0.032	0.012	-9.36	0.000	0.015	0.065	***
wt	2.428	0.705	3.06	0.002	1.375	4.288	***
exp	5.108	1.803	4.62	0.000	2.557	10.204	***
age	9.079	3.801	5.27	0.000	3.997	20.626	***
gend	0.998	0.281	-0.01	0.995	0.575	1.734	
ms	171.419	166.089	5.31	0.000	25.664	1144.970	***
ph	11.738	8.782	3.29	0.001	2.709	50.864	***
ra	1.133	1.089	0.13	0.896	0.172	7.451	
edu_ra	1.020	0.499	0.04	0.967	0.391	2.659	
wt_ra	0.593	0.240	-1.29	0.196	0.268	1.309	
exp_ra	1.197	0.571	0.38	0.706	0.470	3.047	
age_ra	3.484	2.082	2.09	0.037	1.080	11.239	**
gend_ra	0.404	0.166	-2.21	0.027	0.180	0.904	**
ms_ra	0.225	0.263	-1.27	0.203	0.023	2.239	
ph_ra	0.973	1.071	-0.03	0.980	0.113	8.409	
Constant	0.000	0.000	-9.19	0.000	0.000	0.001	***
Mean dependent var		0.019	SD dependent var			0.137	
Pseudo r-squared		0.483	Number of obs			8379.000	
Chi-square		769.011	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		854.445	Bayesian crit. (BIC)			966.981	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Lampiran 5. Hasil Analisis Regresi Logistik Model Pengangguran Terdidik Pada Masing-Masing Provinsi

1. Aceh

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	4.144	1.010	4.10	0.000	2.164 6.124	***
wt	1.066	0.204	5.22	0.000	0.666 1.466	***
exp	0.195	0.287	-0.68	0.497	-0.757 0.367	
age	0.683	0.196	3.49	0.000	0.300 1.066	***
Constant	-8.694	1.012	-8.59	0.000	-10.677 -6.710	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.109
Pseudo r-squared		0.092	Number of obs			9296.000
Chi-square		110.359	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1103.284	Bayesian crit. (BIC)			1138.971

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	4.265	1.012	4.21	0.000	2.281 6.249	***
wt	1.178	0.207	5.70	0.000	0.773 1.583	***
exp	0.045	0.290	0.15	0.877	-0.524 0.613	
age	-0.358	0.240	-1.49	0.135	-0.828 0.112	
gend	0.159	0.213	0.75	0.455	-0.258 0.575	
ms	1.265	0.287	4.41	0.000	0.703 1.827	***
ph	0.970	0.381	2.54	0.011	0.223 1.717	**
Constant	-10.050	1.066	-9.43	0.000	-12.139 -7.960	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.109
Pseudo r-squared		0.128	Number of obs			9296.000
Chi-square		154.094	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1065.549	Bayesian crit. (BIC)			1122.648

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

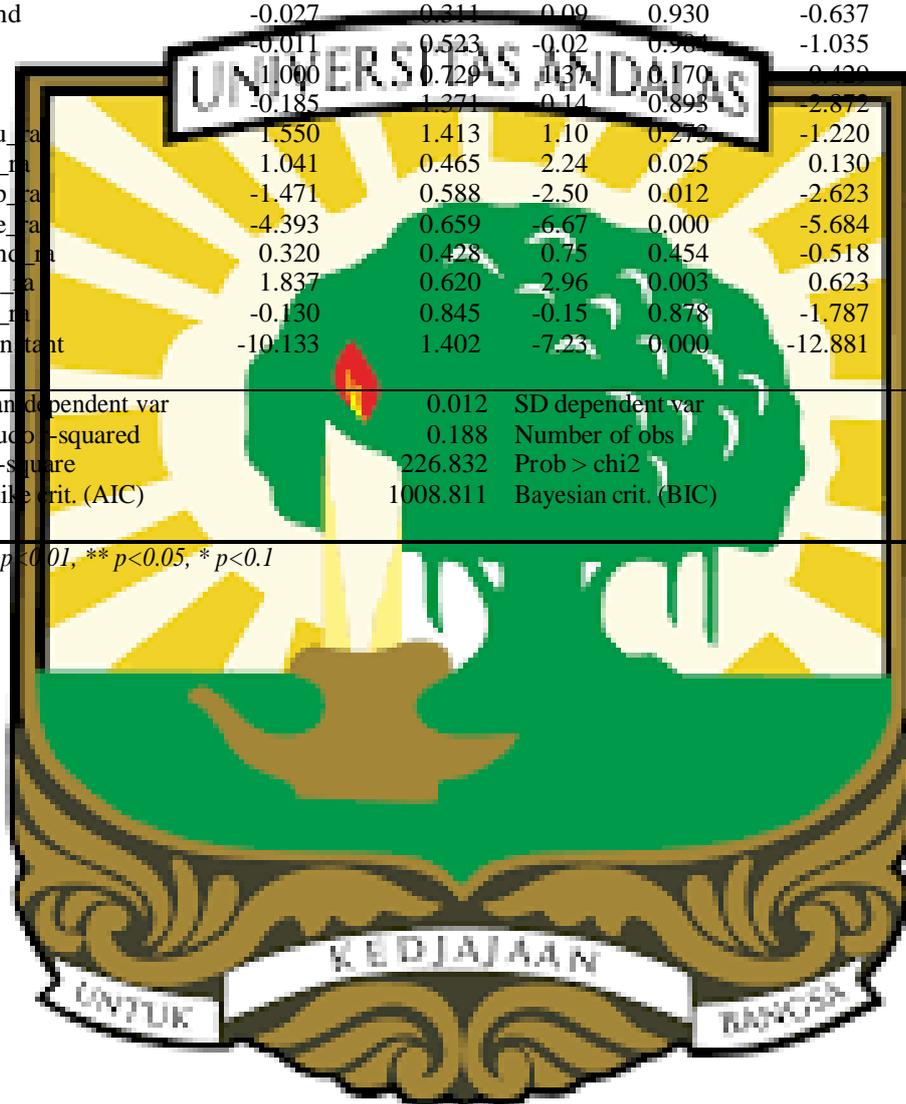
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	4.262	1.012	4.21	0.000	2.278 6.245	***
wt	1.179	0.209	5.37	0.000	0.711 1.528	***
exp	0.024	0.290	0.08	0.934	-0.545 0.593	
age	-0.346	0.240	-1.45	0.148	-0.816 0.123	
gend	0.141	0.213	0.67	0.506	-0.276 0.558	
ms	1.274	0.286	4.45	0.000	0.713 1.836	***
ph	0.976	0.381	2.56	0.010	0.230 1.722	**
ra	0.415	0.198	2.10	0.036	0.027 0.804	*
Constant	-10.254	1.071	-9.58	0.000	-12.353 -8.156	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.109
Pseudo r-squared		0.132	Number of obs			9296.000
Chi-square		158.550	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1063.093	Bayesian crit. (BIC)			1127.329

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	3.299	1.368	2.41	0.016	0.618	5.981 **
wt	0.526	0.383	1.37	0.169	-0.224	1.276
exp	0.825	0.414	1.99	0.046	0.014	1.636 **
age	2.392	0.553	4.32	0.000	1.308	3.476 ***
gend	-0.027	0.311	0.09	0.930	-0.637	0.582
ms	-0.011	0.523	-0.02	0.981	-1.035	1.014
ph	1.000	0.729	1.37	0.170	0.420	2.428
ra	-0.185	1.271	-0.14	0.893	-2.872	2.503
edu_ra	1.550	1.413	1.10	0.272	-1.220	4.321
wt_ra	1.041	0.465	2.24	0.025	0.130	1.952 **
exp_ra	-1.471	0.588	-2.50	0.012	-2.623	-0.318 **
age_ra	-4.393	0.659	-6.67	0.000	-5.684	-3.103 ***
gend_ra	0.320	0.428	0.75	0.454	-0.518	1.158
ms_ra	1.837	0.620	2.96	0.003	0.623	3.052 ***
ph_ra	-0.130	0.845	-0.15	0.878	-1.787	1.527
Constant	-10.133	1.402	-7.23	0.000	-12.881	-7.385 ***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.109
Pseudo R-squared		0.188	Number of obs			9296.000
Chi-square		226.832	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1008.811	Bayesian crit. (BIC)			1123.009

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



2. Sumatera Utara

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	3.599	1.006	3.58	0.000	1.627 5.572	***
wt	0.469	0.179	2.62	0.009	0.119 0.819	***
exp	0.890	0.165	5.38	0.000	0.566 1.214	***
age	2.054	0.173	11.84	0.000	1.714 2.394	***
Constant	-9.083	1.011	-8.98	0.000	-11.064 -7.101	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.112
Pseudo r-squared		0.139	Number of obs			13390.000
Chi-square		254.348	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1586.784	Bayesian crit. (BIC)			1624.296

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	3.658	1.007	3.63	0.000	1.684 5.632	***
wt	0.488	0.179	2.72	0.006	0.137 0.839	***
exp	0.931	0.166	5.59	0.000	0.605 1.257	***
age	1.495	0.231	6.48	0.000	1.043 1.948	***
gend	-0.043	0.173	-0.25	0.802	-0.383 0.296	
ms	0.348	0.247	1.41	0.160	-0.137 0.832	
ph	1.021	0.331	3.09	0.002	0.373 1.670	***
Constant	-9.871	1.042	-9.48	0.000	-11.912 -7.829	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.112
Pseudo r-squared		0.149	Number of obs			13390.000
Chi-square		273.404	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1573.728	Bayesian crit. (BIC)			1633.747

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

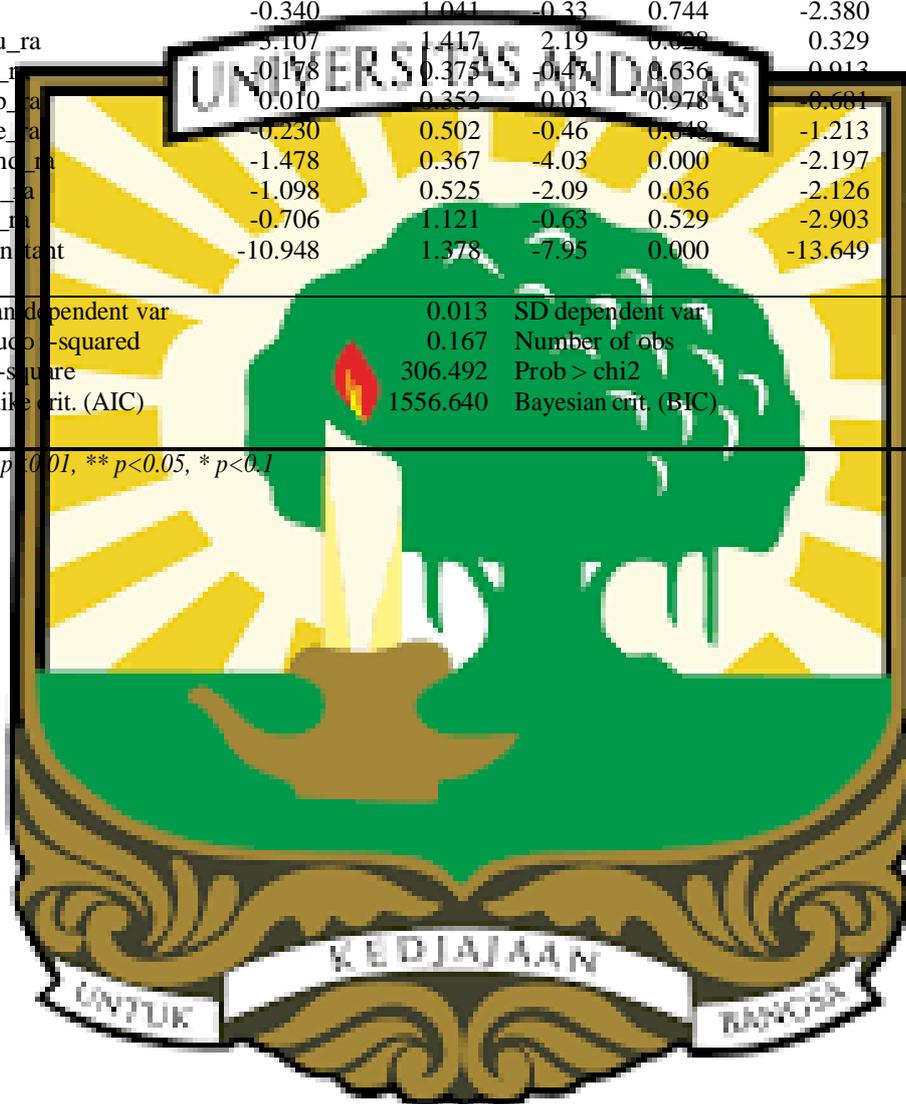
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	3.670	1.007	3.64	0.000	1.696 5.644	***
wt	0.464	0.180	2.58	0.010	0.111 0.816	**
exp	0.917	0.167	5.50	0.000	0.591 1.244	***
age	1.507	0.232	6.51	0.000	1.053 1.961	***
gend	-0.052	0.173	-0.30	0.762	-0.392 0.287	
ms	0.335	0.248	1.35	0.176	-0.150 0.820	
ph	1.030	0.331	3.12	0.002	0.382 1.678	***
ra	0.293	0.162	1.80	0.072	-0.026 0.611	*
Constant	-10.048	1.047	-9.60	0.000	-12.100 -7.997	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.112
Pseudo r-squared		0.151	Number of obs			13390.000
Chi-square		276.717	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1572.415	Bayesian crit. (BIC)			1639.936

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.598	1.027	2.53	0.011	0.585 4.610	**
wt	0.587	0.301	1.95	0.051	-0.003 1.178	*
exp	0.906	0.284	3.19	0.001	0.349 1.462	***
age	1.657	0.410	4.04	0.000	0.854 2.460	***
gend	0.845	0.286	2.95	0.003	0.284 1.407	***
ms	1.005	0.419	2.40	0.016	0.184 1.826	**
ph	1.867	1.065	1.75	0.079	-0.220 3.954	*
ra	-0.340	1.041	-0.33	0.744	-2.380 1.701	
edu_ra	5.107	1.417	2.19	0.028	0.329 5.885	**
wt_ra	-0.178	0.375	-0.47	0.636	-0.913 0.558	
exp_ra	0.010	0.352	0.03	0.978	-0.681 0.700	
age_ra	-0.230	0.502	-0.46	0.648	-1.213 0.754	
gend_ra	-1.478	0.367	-4.03	0.000	-2.197 -0.760	***
ms_ra	-1.098	0.525	-2.09	0.036	-2.126 -0.069	**
ph_ra	-0.706	1.121	-0.63	0.529	-2.903 1.491	
Constant	-10.948	1.378	-7.95	0.000	-13.649 -8.247	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.112
Pseudo-squared		0.167	Number of obs			13390.000
Chi-square		306.492	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1556.640	Bayesian crit. (BIC)			1676.676

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



3. Sumatera Barat

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	2.276	0.517	4.40	0.000	1.263	3.289	***
wt	0.378	0.204	1.85	0.064	-0.022	0.778	*
exp	1.021	0.196	5.22	0.000	0.637	1.404	***
age	2.147	0.205	10.48	0.000	1.745	2.549	***
Constant	-7.485	0.541	-13.82	0.000	-8.546	-6.424	***
Mean dependent var		0.017	SD dependent var			0.130	
Pseudo r-squared		0.145	Number of obs			7383.000	
Chi-square		186.567	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		1107.174	Bayesian crit. (BIC)			1141.709	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	2.331	0.519	4.49	0.000	1.314	3.348	***
wt	0.417	0.205	2.04	0.042	0.016	0.819	**
exp	1.071	0.196	5.45	0.000	0.686	1.456	***
age	1.613	0.287	5.62	0.000	1.050	2.176	***
gend	-0.123	0.202	-0.61	0.543	-0.519	0.273	
ms	0.258	0.297	0.87	0.384	-0.323	0.840	
ph	1.293	0.394	3.28	0.001	0.520	2.065	***
Constant	-8.450	0.633	-13.35	0.000	-9.691	-7.210	***
Mean dependent var		0.017	SD dependent var			0.130	
Pseudo r-squared		0.159	Number of obs			7383.000	
Chi-square		204.117	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		1095.624	Bayesian crit. (BIC)			1150.879	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

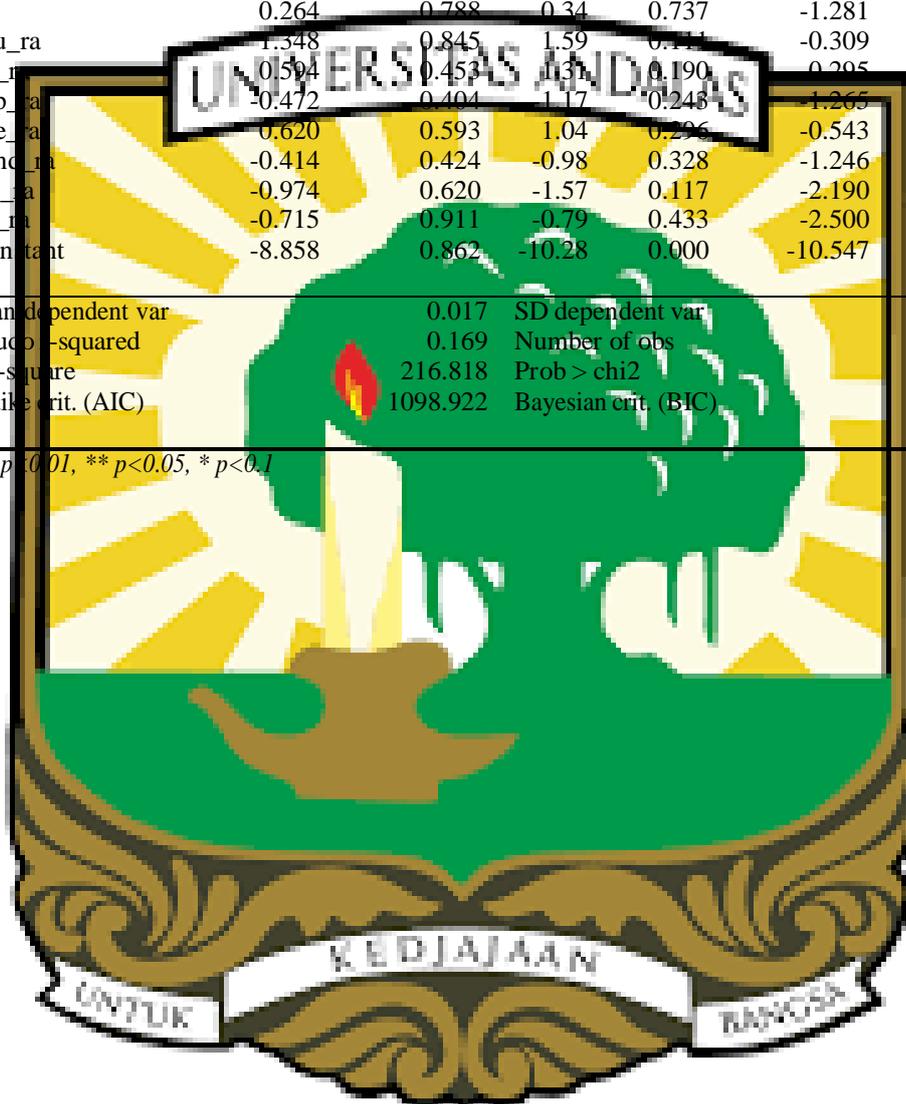
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	2.348	0.519	4.52	0.000	1.331	3.365	***
wt	0.399	0.205	1.94	0.052	-0.004	0.801	*
exp	1.067	0.196	5.43	0.000	0.682	1.452	***
age	1.633	0.289	5.65	0.000	1.067	2.200	***
gend	-0.118	0.202	-0.59	0.558	-0.514	0.277	
ms	0.235	0.298	0.79	0.431	-0.349	0.818	
ph	1.305	0.394	3.31	0.001	0.533	2.076	***
ra	0.393	0.193	2.03	0.042	0.014	0.771	**
Constant	-8.713	0.648	-13.45	0.000	-9.983	-7.443	***
Mean dependent var		0.017	SD dependent var			0.130	
Pseudo r-squared		0.162	Number of obs			7383.000	
Chi-square		208.388	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		1093.353	Bayesian crit. (BIC)			1155.515	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.555	0.649	2.40	0.017	0.283 2.827	**
wt	-0.016	0.387	-0.04	0.966	-0.774 0.741	
exp	1.372	0.326	4.20	0.000	0.733 2.012	***
age	1.256	0.466	2.69	0.007	0.342 2.170	***
gend	0.167	0.343	0.49	0.626	-0.506 0.840	
ms	0.855	0.496	1.72	0.085	-0.117 1.827	*
ph	1.886	0.842	2.24	0.025	0.235 3.536	**
ra	0.264	0.788	0.34	0.737	-1.281 1.810	
edu_ra	1.348	0.845	1.59	0.111	-0.309 3.004	
wt_ra	0.594	0.453	1.31	0.190	0.295 1.482	
exp_ra	-0.472	0.404	-1.17	0.243	-1.265 0.320	
age_ra	0.620	0.593	1.04	0.296	-0.543 1.783	
gend_ra	-0.414	0.424	-0.98	0.328	-1.246 0.417	
ms_ra	-0.974	0.620	-1.57	0.117	-2.190 0.242	
ph_ra	-0.715	0.911	-0.79	0.433	-2.500 1.070	
Constant	-8.858	0.862	-10.28	0.000	-10.547 -7.169	***
Mean dependent var		0.017	SD dependent var			0.130
Pseudo-squared		0.169	Number of obs			7383.000
Chi-square		216.818	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1098.922	Bayesian crit. (BIC)			1209.433

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



4. Riau

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.440	0.733	1.96	0.050	0.003 2.878	*
wt	0.394	0.307	1.28	0.199	-0.208 0.995	
exp	1.302	0.296	4.40	0.000	0.722 1.881	***
age	2.929	0.382	7.66	0.000	2.166 3.679	***
Constant	-8.162	0.799	-10.21	0.000	-9.730 -6.597	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.098
Pseudo r-squared		0.175	Number of obs			5365.000
Chi-square		102.243	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		493.438	Bayesian crit. (BIC)			526.376

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.372	0.739	1.86	0.063	-0.076 2.820	*
wt	0.431	0.308	1.40	0.161	-0.172 1.035	
exp	1.318	0.298	4.43	0.000	0.734 1.902	***
age	2.426	0.477	5.09	0.000	1.491 3.361	***
gend	-0.440	0.313	-1.41	0.160	-1.052 0.173	
ms	0.239	0.432	0.55	0.580	-0.608 1.087	
ph	0.956	0.627	1.52	0.127	-0.273 2.184	
Constant	-8.540	0.906	-9.43	0.000	-10.315 -6.764	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.098
Pseudo r-squared		0.184	Number of obs			5365.000
Chi-square		107.666	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		494.015	Bayesian crit. (BIC)			546.716

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.353	0.739	1.83	0.067	-0.095 2.802	*
wt	0.431	0.308	1.40	0.162	-0.173 1.035	
exp	1.326	0.298	4.45	0.000	0.742 1.911	***
age	2.403	0.476	5.04	0.000	1.469 3.337	***
gend	-0.443	0.313	-1.42	0.156	-1.057 0.170	
ms	0.264	0.433	0.61	0.543	-0.585 1.113	
ph	0.950	0.628	1.51	0.130	-0.281 2.182	
ra	-0.218	0.286	-0.76	0.445	-0.778 0.342	
Constant	-8.399	0.922	-9.11	0.000	-10.206 -6.592	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.098
Pseudo r-squared		0.185	Number of obs			5365.000
Chi-square		108.247	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		495.434	Bayesian crit. (BIC)			554.723

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	14.028	691.276	0.02	0.984	-1340.848	1368.904	
wt	0.159	0.469	0.34	0.735	-0.761	1.078	
exp	1.253	0.451	2.78	0.005	0.370	2.136	***
age	3.143	0.767	4.10	0.000	1.639	4.647	***
gend	0.351	0.440	0.80	0.425	-0.512	1.213	
ms	0.797	0.661	1.21	0.228	-0.499	2.093	
ph	-1.141	0.829	-1.38	0.169	-2.765	0.484	
ra	-12.730	645.803	-0.02	0.984	-1278.481	1253.020	
edu_ra	-13.299	691.276	-0.02	0.985	-1368.175	1341.578	
wt_ra	0.487	0.628	0.78	0.438	-0.745	1.719	
exp_ra	0.176	0.609	0.29	0.778	-1.018	1.369	
age_ra	-1.298	0.961	-1.35	0.177	-3.182	0.586	
gend_ra	-1.649	0.654	-2.52	0.012	-2.932	-0.367	**
ms_ra	-0.755	0.890	-0.85	0.396	-2.499	0.989	
ph_ra	28.162	946.005	0.03	0.976	-1825.975	1882.298	
Constant	-20.466	691.276	-0.03	0.976	-1375.343	1334.410	
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.098	
Pseudo-squared		0.221	Number of obs			5365.000	
Chi-square		129.356	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		488.324	Bayesian crit. (BIC)			593.727	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



5. Jambi

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.676	1.027	1.63	0.103	-0.337 3.689	
wt	-0.315	0.494	-0.64	0.524	-1.283 0.653	
exp	1.085	0.361	3.01	0.003	0.378 1.792	***
age	2.950	0.495	5.96	0.000	1.960 3.921	***
Constant	-8.144	1.083	-7.52	0.000	-10.266 -6.021	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.099
Pseudo r-squared		0.173	Number of obs			3828.000
Chi-square		73.584	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		362.589	Bayesian crit. (BIC)			393.839

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.707	1.033	1.65	0.098	-0.317 3.731	*
wt	-0.296	0.496	-0.60	0.550	-1.269 0.676	
exp	1.217	0.364	3.34	0.001	0.503 1.931	***
age	1.887	0.586	3.22	0.001	0.738 3.037	***
gend	-0.051	0.350	-0.14	0.884	-0.737 0.635	
ms	1.135	0.563	2.02	0.044	0.031 2.239	**
ph	1.352	1.107	1.22	0.222	-0.819 3.522	
Constant	-9.415	1.424	-6.61	0.000	-12.206 -6.625	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.099
Pseudo r-squared		0.195	Number of obs			3828.000
Chi-square		83.242	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		358.930	Bayesian crit. (BIC)			408.931

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

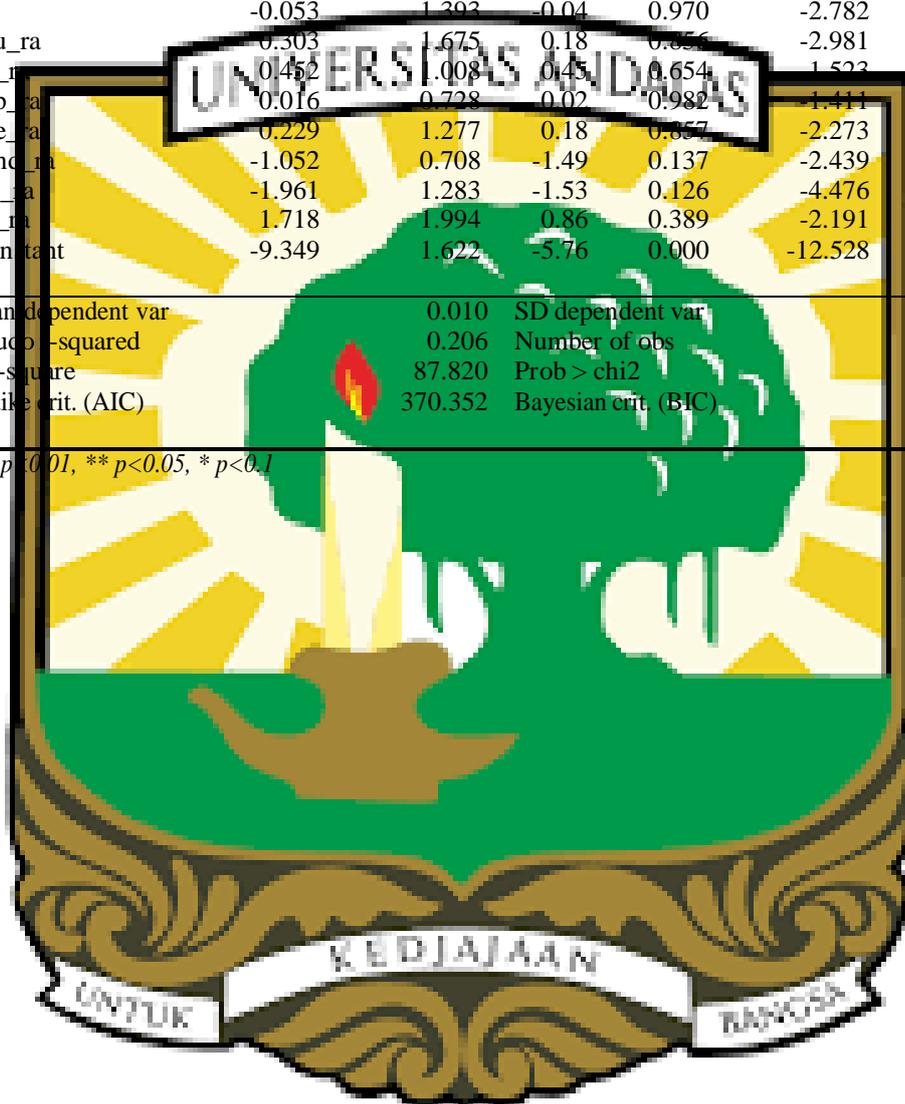
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.709	1.034	1.65	0.098	-0.316 3.735	*
wt	-0.297	0.496	-0.60	0.550	-1.269 0.676	
exp	1.216	0.365	3.34	0.001	0.502 1.931	***
age	1.890	0.589	3.21	0.001	0.736 3.043	***
gend	-0.051	0.350	-0.15	0.883	-0.738 0.635	
ms	1.134	0.563	2.01	0.044	0.030 2.238	**
ph	1.352	1.107	1.22	0.222	-0.818 3.522	
ra	0.015	0.335	0.04	0.964	-0.642 0.672	
Constant	-9.426	1.443	-6.53	0.000	-12.255 -6.597	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.099
Pseudo r-squared		0.195	Number of obs			3828.000
Chi-square		83.244	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		360.928	Bayesian crit. (BIC)			417.179

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.508	1.410	1.07	0.285	-1.256 4.272	
wt	-0.605	0.762	-0.79	0.427	-2.099 0.889	
exp	1.221	0.512	2.38	0.017	0.216 2.225	**
age	1.781	1.058	1.68	0.092	-0.292 3.854	*
gend	0.438	0.469	0.93	0.351	-0.482 1.358	
ms	2.305	1.086	2.12	0.034	0.177 4.432	**
ph	0.291	1.675	0.17	0.862	-2.993 3.575	
ra	-0.053	1.393	-0.04	0.970	-2.782 2.677	
edu_ra	0.303	1.675	0.18	0.856	-2.981 3.587	
wt_ra	0.452	1.008	0.45	0.654	-1.523 2.427	
exp_ra	0.016	0.728	0.02	0.982	-1.411 1.444	
age_ra	0.229	1.277	0.18	0.857	-2.273 2.732	
gend_ra	-1.052	0.708	-1.49	0.137	-2.439 0.336	
ms_ra	-1.961	1.283	-1.53	0.126	-4.476 0.554	
ph_ra	1.718	1.994	0.86	0.389	-2.191 5.626	
Constant	-9.349	1.622	-5.76	0.000	-12.528 -6.171	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.099
Pseudo-squared		0.206	Number of obs			3828.000
Chi-square		87.820	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		370.352	Bayesian crit. (BIC)			470.354

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



6. Sumatera Selatan

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.624	0.609	2.66	0.008	0.429 2.818	***
wt	0.541	0.271	2.00	0.046	0.010 1.073	**
exp	1.188	0.261	4.56	0.000	0.677 1.699	***
age	2.275	0.301	7.55	0.000	1.633 2.865	***
Constant	-7.766	0.653	-11.90	0.000	-9.045 -6.487	***
Mean dependent var		0.011	SD dependent var			0.106
Pseudo r-squared		0.140	Number of obs			5839.000
Chi-square		100.928	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		632.035	Bayesian crit. (BIC)			665.396

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.747	0.611	2.86	0.004	0.548 2.945	***
wt	0.541	0.273	1.98	0.048	0.006 1.075	**
exp	1.274	0.262	4.87	0.000	0.762 1.787	***
age	1.572	0.370	4.24	0.000	0.846 2.298	***
gend	0.288	0.274	1.05	0.294	-0.250 0.825	
ms	0.642	0.368	1.75	0.081	-0.079 1.362	*
ph	0.987	0.593	1.66	0.096	-0.176 2.149	*
Constant	-8.848	0.809	-10.94	0.000	-10.434 -7.263	***
Mean dependent var		0.011	SD dependent var			0.106
Pseudo r-squared		0.155	Number of obs			5839.000
Chi-square		112.216	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		626.747	Bayesian crit. (BIC)			680.125

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

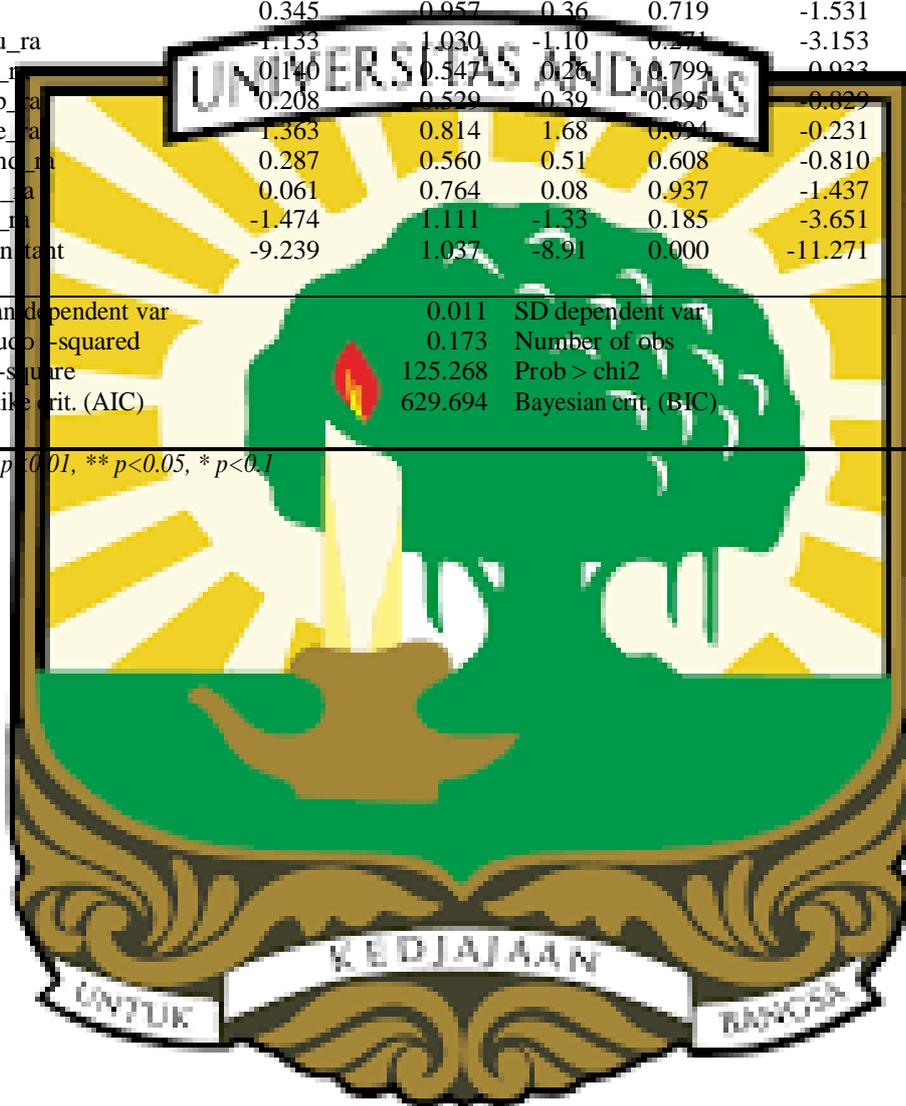
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.735	0.612	2.83	0.005	0.535 2.935	***
wt	0.650	0.277	2.34	0.019	0.107 1.193	**
exp	1.298	0.263	4.93	0.000	0.782 1.815	***
age	1.536	0.372	4.13	0.000	0.807 2.264	***
gend	0.330	0.276	1.19	0.232	-0.212 0.872	
ms	0.704	0.371	1.90	0.057	-0.022 1.431	*
ph	0.961	0.596	1.61	0.107	-0.206 2.129	
ra	-0.689	0.259	-2.66	0.008	-1.197 -0.181	***
Constant	-8.555	0.815	-10.50	0.000	-10.152 -6.958	***
Mean dependent var		0.011	SD dependent var			0.106
Pseudo r-squared		0.165	Number of obs			5839.000
Chi-square		119.396	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		621.566	Bayesian crit. (BIC)			681.617

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.367	0.939	2.52	0.012	0.526 4.208	**
wt	0.578	0.383	1.51	0.132	-0.173 1.329	
exp	1.208	0.349	3.46	0.001	0.523 1.892	***
age	1.039	0.457	2.28	0.023	0.144 1.934	**
gend	0.191	0.369	0.52	0.605	-0.533 0.914	
ms	0.667	0.480	1.39	0.164	-0.273 1.607	
ph	1.585	0.808	1.96	0.050	0.002 3.168	*
ra	0.345	0.957	0.36	0.719	-1.531 2.221	
edu_ra	-1.133	1.030	-1.10	0.271	-3.153 0.886	
wt_ra	0.140	0.547	0.26	0.799	-0.933 1.212	
exp_ra	-0.208	0.529	-0.39	0.695	-0.829 1.244	
age_ra	1.363	0.814	1.68	0.094	-0.231 2.958	*
gend_ra	0.287	0.560	0.51	0.608	-0.810 1.384	
ms_ra	0.061	0.764	0.08	0.937	-1.437 1.558	
ph_ra	-1.474	1.111	-1.33	0.185	-3.651 0.704	
Constant	-9.239	1.037	-8.91	0.000	-11.271 -7.207	***
Mean dependent var		0.011	SD dependent var			0.106
Pseudo-squared		0.173	Number of obs			5839.000
Chi-square		125.268	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		629.694	Bayesian crit. (BIC)			736.451

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



7. Bengkulu

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.587	1.020	2.54	0.011	0.587 4.587	**
wt	0.547	0.303	1.80	0.072	-0.048 1.141	*
exp	1.131	0.298	3.79	0.000	0.546 1.716	***
age	2.579	0.354	7.29	0.000	1.836 3.273	***
Constant	-8.325	1.061	-7.86	0.000	-10.415 -6.256	***
Mean dependent var		0.017	SD dependent var			0.129
Pseudo r-squared		0.185	Number of obs			3198.000
Chi-square		101.335	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		456.528	Bayesian crit. (BIC)			486.880

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.542	1.024	2.48	0.013	0.535 4.549	**
wt	0.569	0.306	1.86	0.062	-0.030 1.168	*
exp	1.167	0.301	3.88	0.000	0.578 1.756	***
age	1.872	0.468	4.00	0.000	0.954 2.789	***
gend	-0.612	0.320	-1.91	0.056	-1.240 0.016	*
ms	0.530	0.452	1.17	0.240	-0.355 1.415	
ph	0.891	0.575	1.55	0.121	-0.236 2.017	
Constant	-8.649	1.127	-7.67	0.000	-10.858 -6.441	***
Mean dependent var		0.017	SD dependent var			0.129
Pseudo r-squared		0.203	Number of obs			3198.000
Chi-square		111.177	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		452.686	Bayesian crit. (BIC)			501.249

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

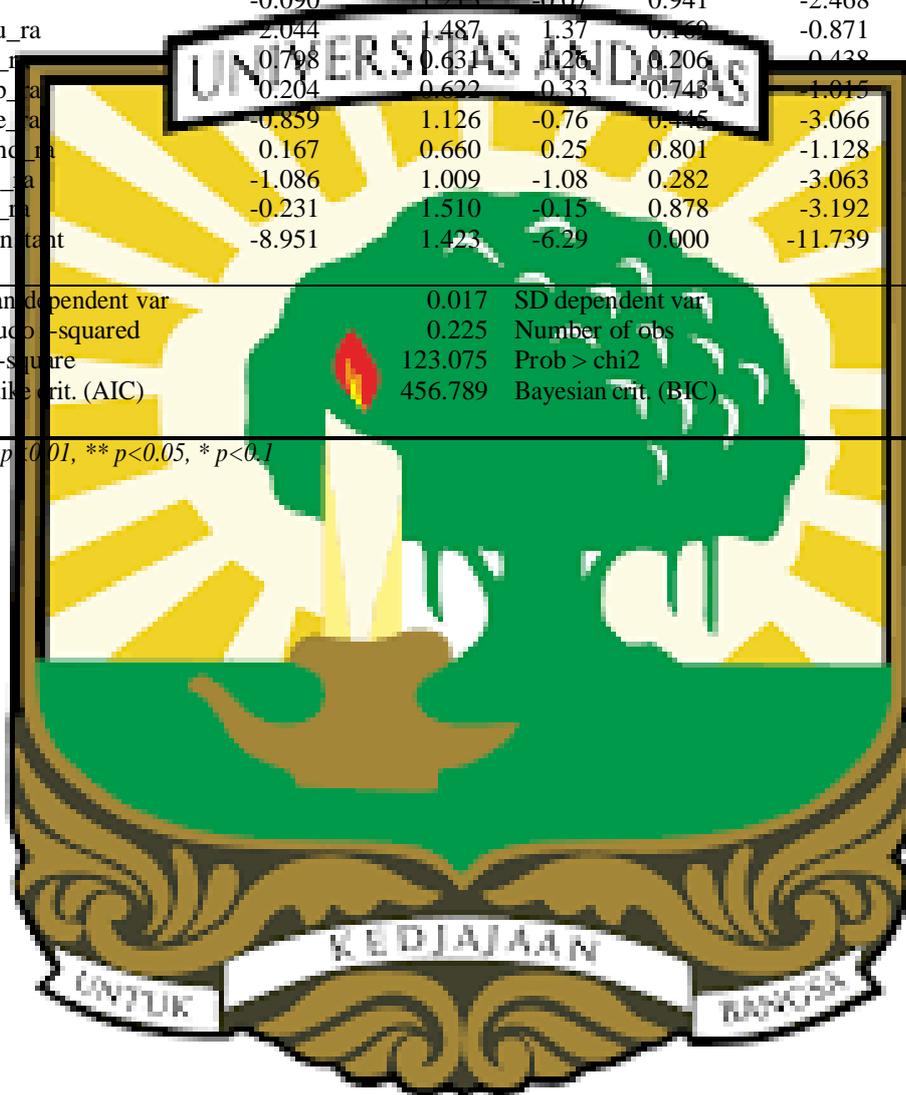
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.623	1.025	2.56	0.011	0.613 4.632	**
wt	0.586	0.306	1.91	0.056	-0.014 1.186	*
exp	1.133	0.302	3.75	0.000	0.540 1.725	***
age	1.890	0.475	3.98	0.000	0.959 2.821	***
gend	-0.653	0.322	-2.03	0.042	-1.284 -0.022	**
ms	0.467	0.459	1.02	0.309	-0.433 1.366	
ph	0.953	0.574	1.66	0.097	-0.173 2.078	*
ra	0.505	0.290	1.74	0.081	-0.063 1.073	*
Constant	-9.000	1.149	-7.84	0.000	-11.251 -6.749	***
Mean dependent var		0.017	SD dependent var			0.129
Pseudo r-squared		0.209	Number of obs			3198.000
Chi-square		114.270	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		451.593	Bayesian crit. (BIC)			506.226

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.401	1.213	1.16	0.248	-0.977 3.778	
wt	0.066	0.501	0.13	0.895	-0.915 1.048	
exp	0.976	0.484	2.02	0.044	0.027 1.925	**
age	2.586	0.944	2.74	0.006	0.736 4.436	***
gend	-0.772	0.507	-1.52	0.128	-1.766 0.222	
ms	1.182	0.799	1.48	0.139	-0.383 2.747	
ph	1.174	1.394	0.84	0.399	-1.557 3.906	
ra	-0.090	1.213	-0.07	0.941	-2.468 2.287	
edu_ra	2.044	1.487	1.37	0.172	-0.871 4.959	
wt_ra	0.798	0.631	1.26	0.206	-0.438 2.034	
exp_ra	0.204	0.622	0.33	0.743	-1.015 1.422	
age_ra	-0.859	1.126	-0.76	0.445	-3.066 1.347	
gend_ra	0.167	0.660	0.25	0.801	-1.128 1.461	
ms_ra	-1.086	1.009	-1.08	0.282	-3.063 0.891	
ph_ra	-0.231	1.510	-0.15	0.878	-3.192 2.729	
Constant	-8.951	1.423	-6.29	0.000	-11.739 -6.162	***
Mean dependent var		0.017	SD dependent var			0.129
Pseudo-squared		0.225	Number of obs			3198.000
Chi-square		123.075	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		456.789	Bayesian crit. (BIC)			553.913

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



8. Lampung

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.093	1.022	2.05	0.041	0.089 4.096	**
wt	0.167	0.350	0.51	0.614	-0.480 0.813	
exp	1.062	0.292	3.64	0.000	0.491 1.634	***
age	2.421	0.342	7.07	0.000	1.736 3.092	***
Constant	-8.261	1.051	-7.86	0.000	-10.321 -6.202	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.100
Pseudo r-squared		0.145	Number of obs			5105.000
Chi-square		84.298	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		506.190	Bayesian crit. (BIC)			538.880

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.008	1.026	1.96	0.050	-0.004 4.019	*
wt	0.199	0.332	0.60	0.549	-0.452 0.849	
exp	1.113	0.296	3.76	0.000	0.532 1.693	***
age	1.501	0.450	3.34	0.001	0.619 2.382	***
gend	-0.601	0.332	-1.81	0.070	-1.252 0.049	*
ms	0.893	0.480	1.86	0.063	-0.049 1.834	*
ph	0.884	0.633	1.40	0.162	-0.356 2.124	
Constant	-8.686	1.142	-7.61	0.000	-10.923 -6.448	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.100
Pseudo r-squared		0.169	Number of obs			5105.000
Chi-square		98.075	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		498.414	Bayesian crit. (BIC)			550.718

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

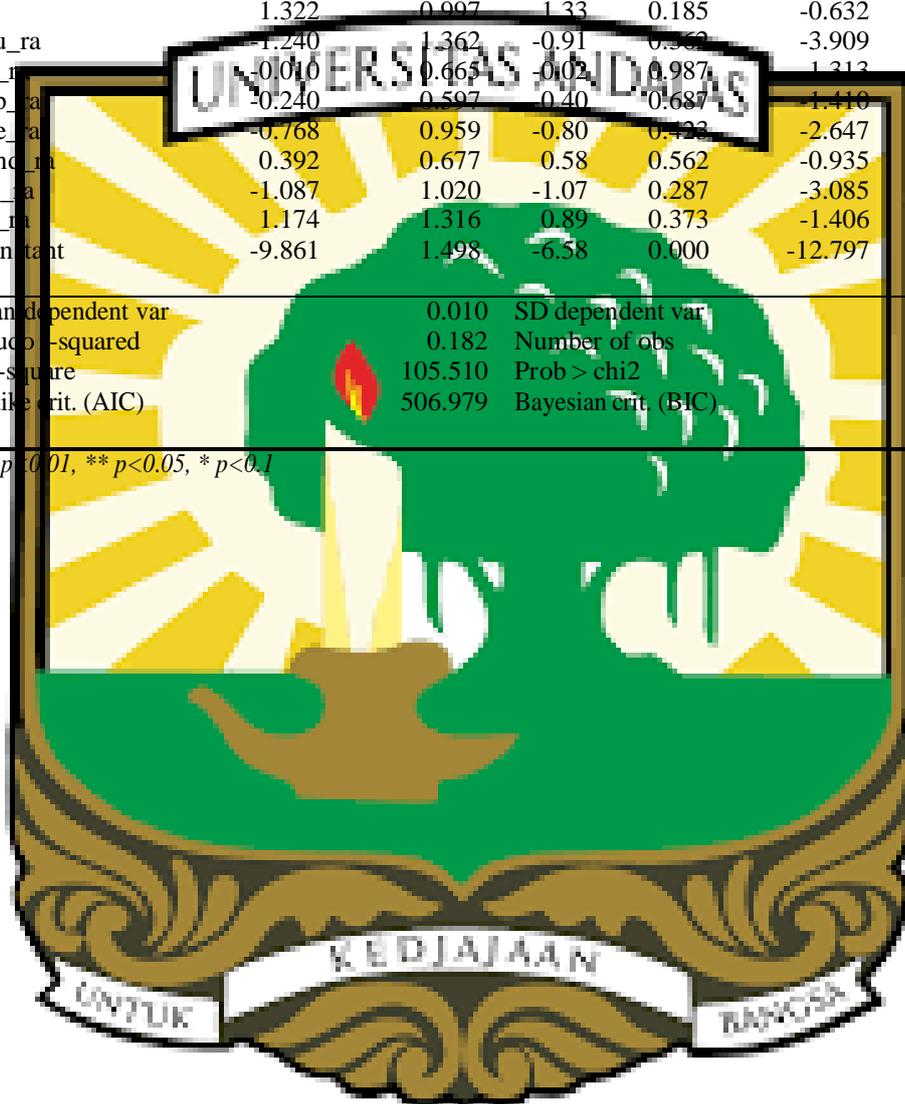
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.977	1.027	1.93	0.054	-0.036 3.991	*
wt	0.213	0.333	0.64	0.521	-0.439 0.865	
exp	1.131	0.297	3.81	0.000	0.549 1.714	***
age	1.499	0.448	3.35	0.001	0.622 2.376	***
gend	-0.585	0.333	-1.76	0.079	-1.237 0.067	*
ms	0.917	0.479	1.91	0.056	-0.022 1.856	*
ph	0.871	0.634	1.37	0.169	-0.371 2.114	
ra	-0.228	0.286	-0.80	0.425	-0.789 0.332	
Constant	-8.559	1.151	-7.43	0.000	-10.816 -6.303	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.100
Pseudo r-squared		0.170	Number of obs			5105.000
Chi-square		98.712	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		499.777	Bayesian crit. (BIC)			558.619

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	3.069	1.575	1.95	0.051	-0.018	6.157	*
wt	0.235	0.486	0.48	0.628	-0.717	1.187	
exp	1.280	0.419	3.06	0.002	0.459	2.100	***
age	2.003	0.722	2.77	0.006	0.587	3.418	***
gend	-0.798	0.499	-1.60	0.110	-1.777	0.180	
ms	1.566	0.765	2.05	0.041	0.066	3.066	**
ph	0.082	1.006	0.08	0.935	-1.889	2.054	
ra	1.322	0.997	1.33	0.185	-0.632	3.276	
edu_ra	-1.240	1.362	-0.91	0.362	-3.909	1.429	
wt_ra	-0.010	0.665	-0.02	0.987	-1.313	1.293	
exp_ra	-0.240	0.597	-0.40	0.687	-1.410	0.929	
age_ra	-0.768	0.959	-0.80	0.423	-2.647	1.112	
gend_ra	0.392	0.677	0.58	0.562	-0.935	1.720	
ms_ra	-1.087	1.020	-1.07	0.287	-3.085	0.912	
ph_ra	1.174	1.316	0.89	0.373	-1.406	3.754	
Constant	-9.861	1.498	-6.58	0.000	-12.797	-6.926	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.100	
Pseudo-squared		0.182	Number of obs			5105.000	
Chi-square		105.510	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		506.979	Bayesian crit. (BIC)			611.587	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



9. Bangka-Belitung

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.655	1.037	1.60	0.110	-0.377 3.688	
wt	0.072	0.459	0.16	0.873	-0.826 0.973	
exp	1.623	0.453	3.58	0.000	0.735 2.512	***
age	2.430	0.455	5.34	0.000	1.538 3.321	***
Constant	-7.970	1.138	-7.01	0.000	-10.210 -5.749	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.110
Pseudo r-squared		0.151	Number of obs			2132.000
Chi-square		42.316	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		248.515	Bayesian crit. (BIC)			276.840

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.639	1.040	1.58	0.115	-0.400 3.677	
wt	0.099	0.461	0.22	0.830	-0.804 1.002	
exp	1.666	0.454	3.67	0.000	0.775 2.557	***
age	1.710	0.626	2.73	0.006	0.483 2.937	***
gend	-0.191	0.447	-0.43	0.670	-1.067 0.686	
ms	0.648	0.639	1.01	0.311	-0.606 1.901	
ph	0.674	0.780	0.86	0.387	-0.854 2.202	
Constant	-8.410	1.242	-6.77	0.000	-10.844 -5.977	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.110
Pseudo r-squared		0.160	Number of obs			2132.000
Chi-square		45.064	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		251.767	Bayesian crit. (BIC)			297.085

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

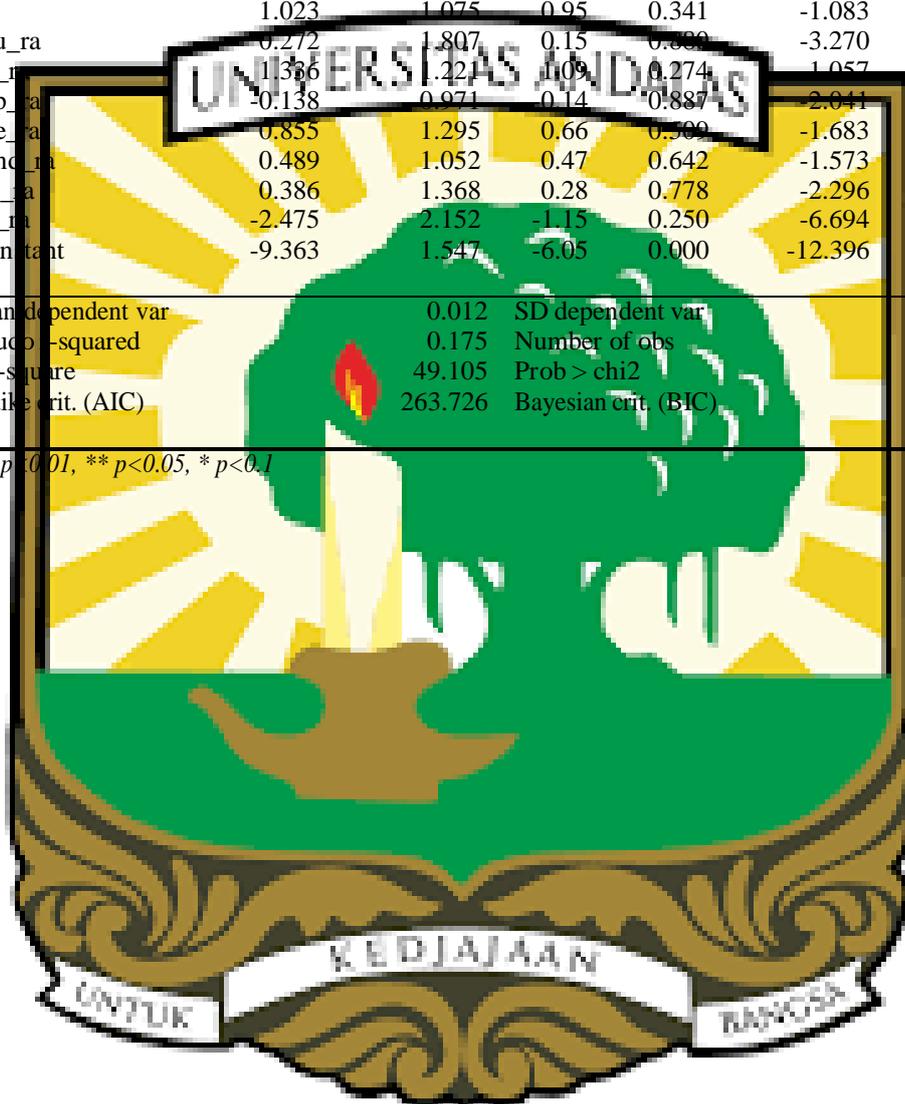
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.642	1.041	1.58	0.115	-0.397 3.682	
wt	0.128	0.463	0.28	0.782	-0.780 1.036	
exp	1.646	0.455	3.62	0.000	0.753 2.538	***
age	1.750	0.633	2.76	0.006	0.509 2.991	***
gend	-0.215	0.448	-0.48	0.630	-1.093 0.662	
ms	0.612	0.643	0.95	0.342	-0.649 1.873	
ph	0.688	0.778	0.88	0.377	-0.837 2.213	
ra	0.327	0.482	0.68	0.498	-0.618 1.271	
Constant	-8.654	1.296	-6.67	0.000	-11.195 -6.113	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.110
Pseudo r-squared		0.162	Number of obs			2132.000
Chi-square		45.547	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		253.284	Bayesian crit. (BIC)			304.267

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.420	1.723	0.82	0.410	-1.957 4.797	
wt	-0.868	1.108	-0.78	0.433	-3.038 1.303	
exp	1.743	0.828	2.10	0.035	0.119 3.366	**
age	1.180	1.026	1.15	0.250	-0.831 3.191	
gend	-0.656	0.917	-0.71	0.475	-2.454 1.142	
ms	0.245	1.124	0.22	0.827	-1.957 2.448	
ph	2.743	2.030	1.35	0.177	-1.236 6.722	
ra	1.023	1.075	0.95	0.341	-1.083 3.129	
edu_ra	0.272	1.807	0.15	0.880	-3.270 3.814	
wt_ra	1.386	1.221	1.09	0.274	-1.057 3.729	
exp_ra	-0.138	0.971	-0.14	0.887	-2.041 1.764	
age_ra	0.855	1.295	0.66	0.509	-1.683 3.393	
gend_ra	0.489	1.052	0.47	0.642	-1.573 2.551	
ms_ra	0.386	1.368	0.28	0.778	-2.296 3.068	
ph_ra	-2.475	2.152	-1.15	0.250	-6.694 1.743	
Constant	-9.363	1.547	-6.05	0.000	-12.396 -6.330	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.110
Pseudo-squared		0.175	Number of obs			2132.000
Chi-square		49.105	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		263.726	Bayesian crit. (BIC)			354.363

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



10. Kepulauan Riau

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.375	0.756	1.82	0.069	-0.108 2.857	*
wt	1.514	0.404	3.75	0.000	0.722 2.305	***
exp	0.593	0.408	1.46	0.146	-0.206 1.393	
age	2.258	0.438	5.16	0.000	1.377 3.116	***
Constant	-7.574	0.853	-8.88	0.000	-9.247 -5.902	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.109
Pseudo r-squared		0.150	Number of obs			2317.000
Chi-square		45.513	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		267.433	Bayesian crit. (BIC)			296.173

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.439	0.759	1.90	0.058	-0.048 2.926	*
wt	1.519	0.406	3.74	0.000	0.724 2.314	***
exp	0.638	0.414	1.54	0.123	-0.173 1.449	
age	1.639	0.590	2.78	0.005	0.482 2.795	***
gend	0.555	0.424	1.31	0.191	-0.277 1.386	
ms	0.852	0.583	1.46	0.144	-0.291 1.996	
ph	-0.071	0.597	-0.12	0.905	-1.241 1.099	
Constant	-8.026	0.967	-8.30	0.000	-9.921 -6.131	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.109
Pseudo r-squared		0.162	Number of obs			2317.000
Chi-square		49.186	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		269.760	Bayesian crit. (BIC)			315.744

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

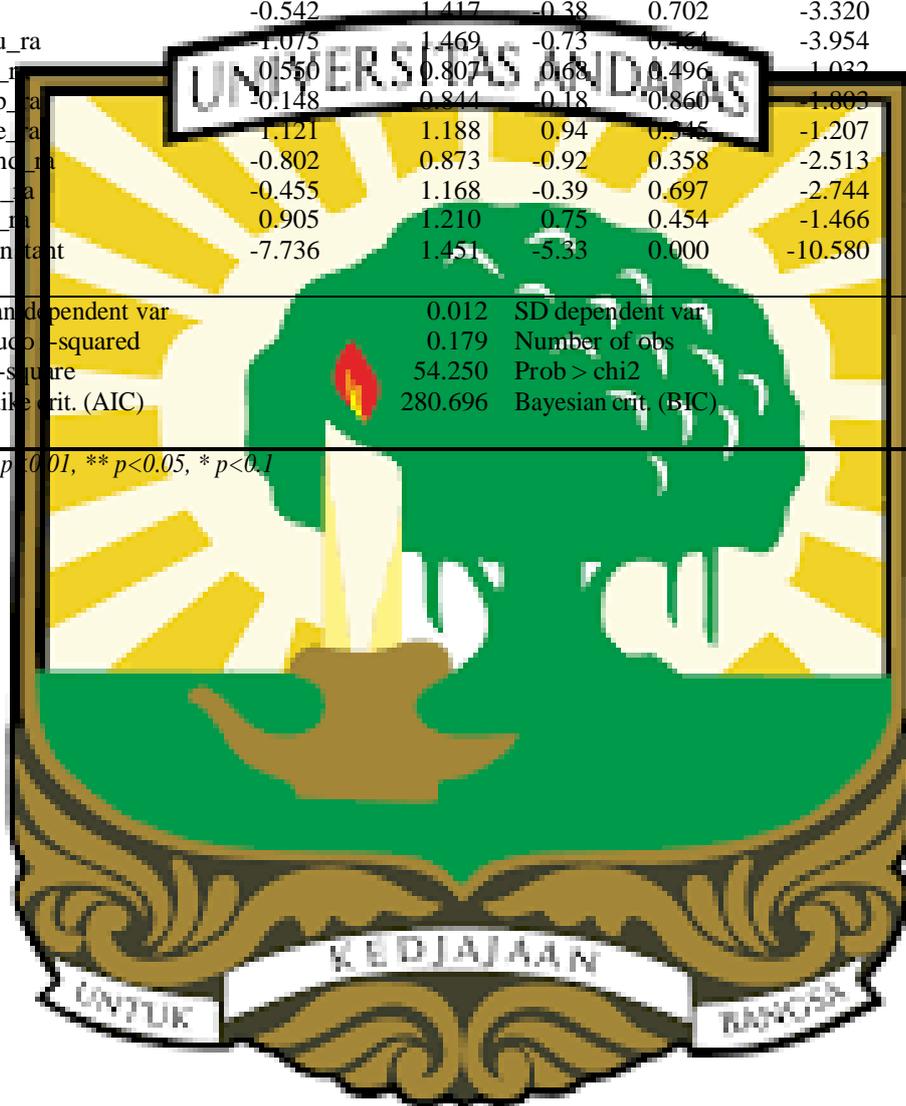
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.422	0.759	1.87	0.061	-0.065 2.909	*
wt	1.529	0.408	3.75	0.000	0.730 2.328	***
exp	0.700	0.418	1.67	0.095	-0.121 1.520	*
age	1.566	0.584	2.68	0.007	0.422 2.710	***
gend	0.626	0.426	1.47	0.142	-0.210 1.461	
ms	0.951	0.576	1.65	0.099	-0.178 2.079	*
ph	-0.152	0.598	-0.25	0.800	-1.323 1.020	
ra	-0.589	0.409	-1.44	0.150	-1.391 0.214	
Constant	-7.645	0.997	-7.67	0.000	-9.599 -5.691	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.109
Pseudo r-squared		0.169	Number of obs			2317.000
Chi-square		51.169	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		269.777	Bayesian crit. (BIC)			321.510

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.162	1.397	1.55	0.122	-0.576 4.899	
wt	1.185	0.634	1.87	0.062	-0.057 2.427	*
exp	0.802	0.671	1.20	0.232	-0.513 2.116	
age	0.925	0.855	1.08	0.279	-0.750 2.600	
gend	1.095	0.685	1.60	0.110	-0.248 2.439	
ms	1.173	0.832	1.41	0.159	-0.458 2.804	
ph	-0.708	0.921	-0.77	0.442	-2.514 1.098	
ra	-0.542	1.417	-0.38	0.702	-3.320 2.235	
edu_ra	-1.075	1.469	-0.73	0.461	-3.954 1.803	
wt_ra	0.550	0.807	0.68	0.496	-1.022 2.131	
exp_ra	-0.148	0.844	-0.18	0.860	-1.803 1.506	
age_ra	1.121	1.188	0.94	0.345	-1.207 3.449	
gend_ra	-0.802	0.873	-0.92	0.358	-2.513 0.908	
ms_ra	-0.455	1.168	-0.39	0.697	-2.744 1.833	
ph_ra	0.905	1.210	0.75	0.454	-1.466 3.276	
Constant	-7.736	1.451	-5.33	0.000	-10.580 -4.893	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.109
Pseudo-squared		0.179	Number of obs			2317.000
Chi-square		54.250	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		280.696	Bayesian crit. (BIC)			372.665

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



11. DKI Jakarta

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.462	1.029	2.39	0.017	0.446	4.479 **
wt	1.201	0.393	3.06	0.002	0.431	1.970 ***
exp	0.653	0.417	1.57	0.117	-0.164	1.471
age	1.077	0.404	2.66	0.008	0.284	1.870 ***
Constant	-8.392	1.053	-7.97	0.000	-10.456	-6.328 ***
Mean dependent var	0.005	SD dependent var				0.071
Pseudo r-squared	0.087	Number of obs				5307.000
Chi-square	29.442	Prob > chi2				0.000
Akaike crit. (AIC)	319.591	Bayesian crit. (BIC)				352.475

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.417	1.030	2.35	0.019	0.399	4.436 **
wt	1.241	0.394	3.15	0.002	0.470	2.013 ***
exp	0.573	0.423	1.36	0.175	-0.256	1.402
age	1.319	0.587	2.25	0.025	0.169	2.469 **
gend	-1.163	0.493	-2.36	0.018	-2.129	-0.197 **
ms	-0.638	0.622	-1.03	0.305	-1.856	0.581
ph	0.523	0.581	0.90	0.368	-0.616	1.662
Constant	-8.113	1.095	-7.41	0.000	-10.260	-5.966 ***
Mean dependent var	0.005	SD dependent var				0.071
Pseudo r-squared	0.106	Number of obs				5307.000
Chi-square	35.810	Prob > chi2				0.000
Akaike crit. (AIC)	319.223	Bayesian crit. (BIC)				371.838

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.417	1.030	2.35	0.019	0.399	4.436 **
wt	1.241	0.394	3.15	0.002	0.470	2.013 ***
exp	0.573	0.423	1.36	0.175	-0.256	1.402
age	1.319	0.587	2.25	0.025	0.169	2.469 **
gend	-1.163	0.493	-2.36	0.018	-2.129	-0.197 **
ms	-0.638	0.622	-1.03	0.305	-1.856	0.581
ph	0.523	0.581	0.90	0.368	-0.616	1.662
o.ra	0.000
Constant	-8.113	1.095	-7.41	0.000	-10.260	-5.966 ***
Mean dependent var	0.005	SD dependent var				0.071
Pseudo r-squared	0.106	Number of obs				5307.000
Chi-square	35.810	Prob > chi2				0.000
Akaike crit. (AIC)	319.223	Bayesian crit. (BIC)				371.838

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

12. Jawa Barat

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.142	0.596	3.60	0.000	0.974 3.309	***
wt	0.678	0.213	3.18	0.001	0.261 1.096	***
exp	1.287	0.215	6.00	0.000	0.866 1.707	***
age	1.908	0.226	8.44	0.000	1.463 2.352	***
Constant	-8.550	0.620	-13.78	0.000	-9.767 -7.334	***
Mean dependent var		0.007	SD dependent var			0.085
Pseudo r-squared		0.117	Number of obs			13606.000
Chi-square		138.681	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1053.202	Bayesian crit. (BIC)			1090.793

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.117	0.597	3.55	0.000	0.947 3.286	***
wt	0.660	0.214	3.09	0.002	0.241 1.078	***
exp	1.316	0.216	6.09	0.000	0.892 1.740	***
age	1.250	0.308	4.06	0.000	0.647 1.853	***
gend	-0.329	0.229	-1.44	0.151	-0.779 0.120	
ms	0.449	0.325	1.38	0.167	-0.188 1.087	
ph	0.952	0.390	2.44	0.014	0.189 1.716	**
Constant	-9.044	0.672	-13.46	0.000	-10.361 -7.727	***
Mean dependent var		0.007	SD dependent var			0.085
Pseudo r-squared		0.129	Number of obs			13606.000
Chi-square		152.147	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1045.736	Bayesian crit. (BIC)			1105.882

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

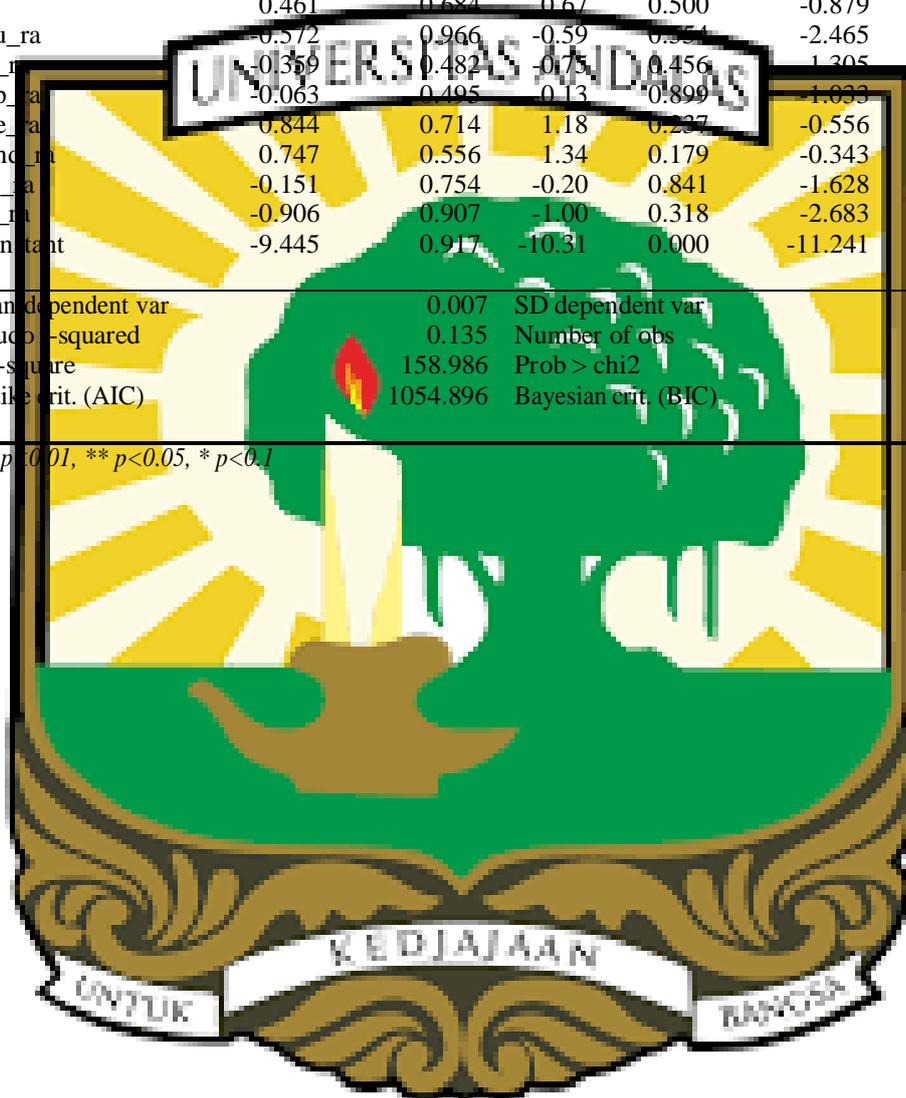
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.095	0.597	3.51	0.000	0.925 3.265	***
wt	0.664	0.214	3.11	0.002	0.245 1.083	***
exp	1.329	0.217	6.13	0.000	0.904 1.753	***
age	1.211	0.309	3.92	0.000	0.605 1.817	***
gend	-0.315	0.230	-1.37	0.171	-0.764 0.135	
ms	0.485	0.326	1.49	0.137	-0.154 1.124	
ph	0.947	0.390	2.43	0.015	0.183 1.712	**
ra	-0.317	0.244	-1.30	0.194	-0.795 0.161	
Constant	-8.778	0.701	-12.53	0.000	-10.151 -7.405	***
Mean dependent var		0.007	SD dependent var			0.085
Pseudo r-squared		0.130	Number of obs			13606.000
Chi-square		153.746	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1046.136	Bayesian crit. (BIC)			1113.801

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	2.567	1.044	2.46	0.014	0.520	4.614	**
wt	0.933	0.416	2.24	0.025	0.118	1.747	**
exp	1.393	0.431	3.23	0.001	0.548	2.237	***
age	0.563	0.617	0.91	0.361	-0.646	1.771	
gend	-0.891	0.492	-1.81	0.070	-1.854	0.073	*
ms	0.600	0.651	0.92	0.357	-0.676	1.877	
ph	1.653	0.805	2.05	0.040	0.074	3.232	**
ra	0.461	0.684	0.67	0.500	-0.879	1.801	
edu_ra	-0.572	0.966	-0.59	0.554	-2.465	1.321	
wt_ra	-0.359	0.482	-0.75	0.456	-1.205	0.586	
exp_ra	-0.063	0.495	-0.13	0.899	-1.033	0.908	
age_ra	0.844	0.714	1.18	0.237	-0.556	2.243	
gend_ra	0.747	0.556	1.34	0.179	-0.343	1.838	
ms_ra	-0.151	0.754	-0.20	0.841	-1.628	1.326	
ph_ra	-0.906	0.907	-1.00	0.318	-2.683	0.871	
Constant	-9.445	0.917	-10.31	0.000	-11.241	-7.648	***
Mean dependent var		0.007	SD dependent var			0.085	
Pseudo-squared		0.135	Number of obs			13606.000	
Chi-square		158.986	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		1054.896	Bayesian crit. (BIC)			1175.189	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



13. Jawa Tengah

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.065	0.422	4.90	0.000	1.238 2.891	***
wt	0.484	0.160	3.02	0.002	0.171 0.797	***
exp	0.695	0.153	4.55	0.000	0.396 0.994	***
age	1.602	0.156	10.25	0.000	1.290 1.908	***
Constant	-7.272	0.433	-16.81	0.000	-8.119 -6.424	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.115
Pseudo r-squared		0.093	Number of obs			14314.000
Chi-square		190.563	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1865.056	Bayesian crit. (BIC)			1902.901

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.041	0.423	4.83	0.000	1.213 2.869	***
wt	0.506	0.160	3.17	0.002	0.193 0.819	***
exp	0.722	0.154	4.70	0.000	0.421 1.023	***
age	1.111	0.214	5.20	0.000	0.692 1.530	***
gend	-0.262	0.161	-1.63	0.104	-0.578 0.054	
ms	0.297	0.222	1.34	0.182	-0.139 0.733	
ph	0.956	0.280	3.41	0.001	0.407 1.506	***
Constant	-7.846	0.481	-16.30	0.000	-8.789 -6.903	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.115
Pseudo r-squared		0.103	Number of obs			14314.000
Chi-square		210.100	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1851.519	Bayesian crit. (BIC)			1912.071

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

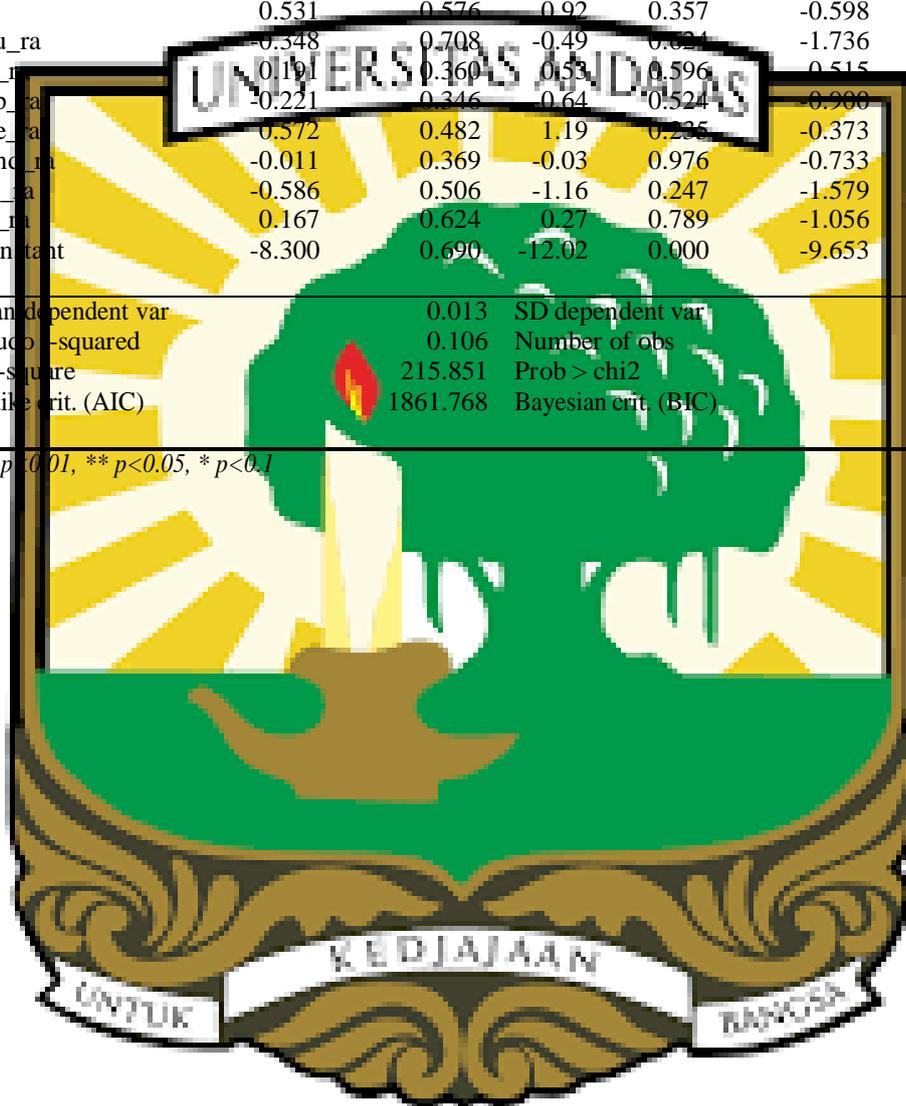
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.062	0.423	4.88	0.000	1.233 2.890	***
wt	0.509	0.160	3.19	0.001	0.196 0.822	***
exp	0.717	0.154	4.67	0.000	0.416 1.018	***
age	1.140	0.215	5.31	0.000	0.719 1.561	***
gend	-0.275	0.161	-1.71	0.088	-0.592 0.041	*
ms	0.268	0.223	1.20	0.230	-0.170 0.706	
ph	0.974	0.280	3.48	0.001	0.425 1.523	***
ra	0.282	0.170	1.66	0.096	-0.051 0.615	*
Constant	-8.079	0.502	-16.08	0.000	-9.063 -7.094	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.115
Pseudo r-squared		0.104	Number of obs			14314.000
Chi-square		212.980	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1850.638	Bayesian crit. (BIC)			1918.759

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.356	0.739	3.19	0.001	0.908 3.803	***
wt	0.371	0.312	1.19	0.234	-0.240 0.982	
exp	0.879	0.298	2.95	0.003	0.294 1.463	***
age	0.728	0.411	1.77	0.077	-0.078 1.533	*
gend	-0.265	0.318	-0.83	0.404	-0.889 0.358	
ms	0.688	0.433	1.59	0.112	-0.161 1.537	
ph	0.852	0.546	1.56	0.119	-0.218 1.922	
ra	0.531	0.576	0.92	0.357	-0.598 1.660	
edu_ra	-0.348	0.708	-0.49	0.624	-1.736 1.041	
wt_ra	0.191	0.360	0.53	0.596	-0.515 0.897	
exp_ra	-0.221	0.346	-0.64	0.524	-0.900 0.458	
age_ra	0.572	0.482	1.19	0.235	-0.373 1.518	
gend_ra	-0.011	0.369	-0.03	0.976	-0.733 0.711	
ms_ra	-0.586	0.506	-1.16	0.247	-1.579 0.406	
ph_ra	0.167	0.624	0.27	0.789	-1.056 1.389	
Constant	-8.300	0.690	-12.02	0.000	-9.653 -6.947	***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.115
Pseudo-squared		0.106	Number of obs			14314.000
Chi-square		215.851	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1861.768	Bayesian crit. (BIC)			1982.871

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



14. DI Yogyakarta

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.344	0.752	1.79	0.074	-0.130 2.817	*
wt	0.646	0.387	1.67	0.095	-0.113 1.405	*
exp	0.155	0.403	0.39	0.700	-0.635 0.945	
age	1.805	0.425	4.24	0.000	0.971 2.639	***
Constant	-6.866	0.821	-8.37	0.000	-8.475 -5.258	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.098
Pseudo r-squared		0.093	Number of obs			2976.000
Chi-square		30.355	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		305.962	Bayesian crit. (BIC)			335.953

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.492	0.757	1.97	0.049	-0.009 2.975	**
wt	0.752	0.391	1.92	0.054	-0.014 1.518	*
exp	0.277	0.412	0.67	0.501	-0.531 1.086	
age	0.796	0.561	1.42	0.156	-0.304 1.896	
gend	1.025	0.446	2.30	0.022	0.150 1.900	**
ms	1.337	0.601	2.22	0.026	0.158 2.515	**
ph	1.869	1.035	1.81	0.071	-0.159 3.897	*
Constant	-9.627	1.349	-7.13	0.000	-12.272 -6.983	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.098
Pseudo r-squared		0.151	Number of obs			2976.000
Chi-square		49.355	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		292.962	Bayesian crit. (BIC)			340.949

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

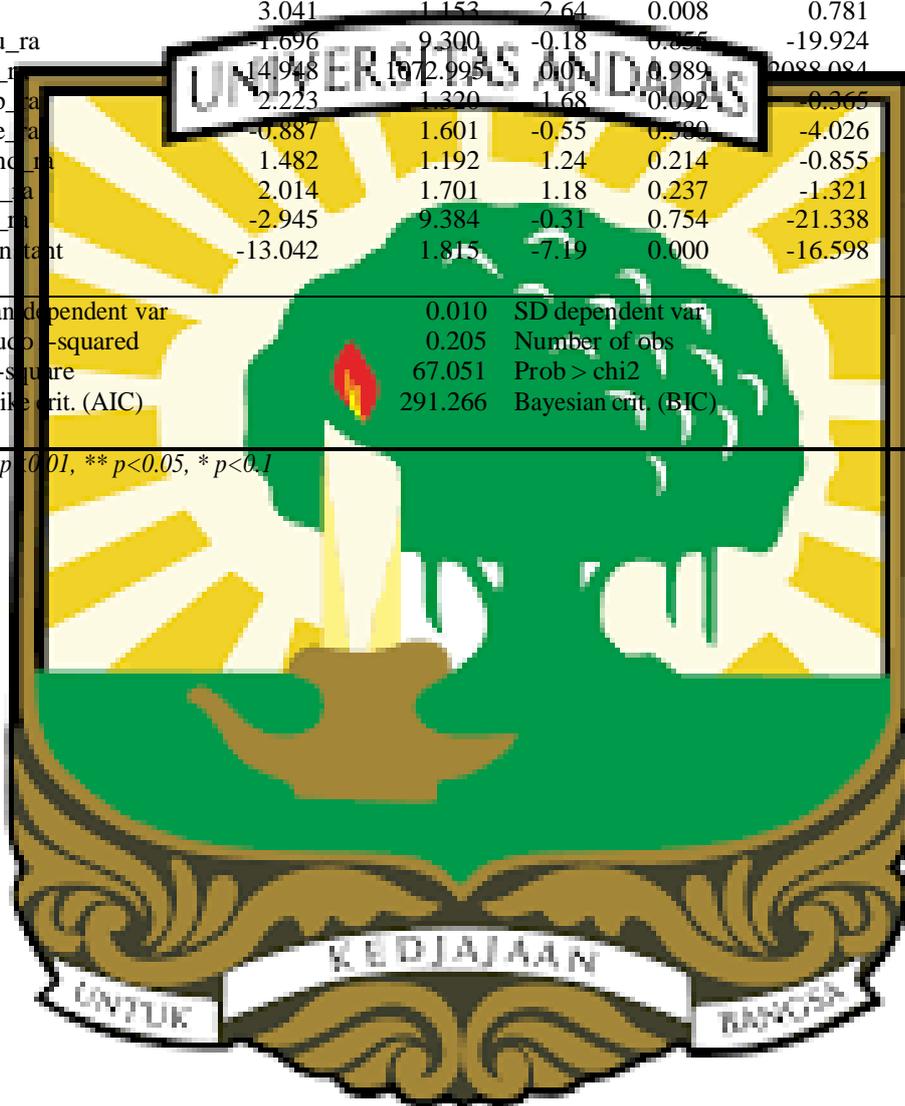
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.886	0.755	2.10	0.036	0.105 3.067	**
wt	0.737	0.392	1.88	0.060	-0.032 1.505	*
exp	0.390	0.416	0.94	0.348	-0.425 1.206	
age	0.900	0.573	1.57	0.116	-0.222 2.022	
gend	0.969	0.446	2.17	0.030	0.095 1.844	**
ms	1.227	0.611	2.01	0.045	0.029 2.426	**
ph	2.044	1.035	1.98	0.048	0.015 4.073	**
ra	1.652	0.741	2.23	0.026	0.200 3.104	**
Constant	-11.280	1.550	-7.28	0.000	-14.318 -8.242	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.098
Pseudo r-squared		0.175	Number of obs			2976.000
Chi-square		57.152	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		287.164	Bayesian crit. (BIC)			341.149

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	3.264	9.299	0.35	0.726	-14.962	21.489	
wt	-13.975	1072.995	-0.01	0.990	-2117.006	2089.056	
exp	-1.617	1.241	-1.30	0.193	-4.050	0.816	
age	1.730	1.477	1.17	0.242	-1.165	4.625	
gend	-0.320	1.082	-0.30	0.767	-2.441	1.800	
ms	-0.642	1.569	-0.41	0.682	-3.716	2.433	
ph	4.897	9.380	0.52	0.602	-13.487	23.281	
ra	3.041	1.153	2.64	0.008	0.781	5.301	***
edu_ra	-1.696	9.300	-0.18	0.855	-19.924	16.533	
wt_ra	-14.948	1072.995	-0.01	0.989	-2088.084	2117.979	
exp_ra	2.223	1.320	1.68	0.092	-0.365	4.810	*
age_ra	-0.887	1.601	-0.55	0.580	-4.026	2.252	
gend_ra	1.482	1.192	1.24	0.214	-0.855	3.819	
ms_ra	2.014	1.701	1.18	0.237	-1.321	5.349	
ph_ra	-2.945	9.384	-0.31	0.754	-21.338	15.448	
Constant	-13.042	1.815	-7.19	0.000	-16.598	-9.485	***
Mean dependent var		0.010	SD dependent var			0.098	
Pseudo-squared		0.205	Number of obs			2976.000	
Chi-square		67.051	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		291.266	Bayesian crit. (BIC)			387.240	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



15. Jawa Timur

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.170	0.422	5.15	0.000	1.343 2.996	***
wt	0.588	0.161	3.64	0.000	0.271 0.904	***
exp	0.889	0.157	5.68	0.000	0.582 1.196	***
age	1.456	0.157	9.25	0.000	1.147 1.765	***
Constant	-7.576	0.434	-17.47	0.000	-8.426 -6.726	***
Mean dependent var		0.011	SD dependent var			0.105
Pseudo r-squared		0.087	Number of obs			16931.000
Chi-square		179.593	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1887.501	Bayesian crit. (BIC)			1926.185

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.184	0.422	5.17	0.000	1.357 3.012	***
wt	0.573	0.162	3.53	0.000	0.255 0.891	***
exp	0.983	0.158	6.22	0.000	0.673 1.293	***
age	0.445	0.200	2.22	0.026	0.053 0.838	**
gend	-0.029	0.163	-0.18	0.860	-0.348 0.290	
ms	1.233	0.217	5.68	0.000	0.807 1.659	***
ph	0.706	0.269	2.63	0.009	0.179 1.233	***
Constant	-8.363	0.480	-17.42	0.000	-9.305 -7.422	***
Mean dependent var		0.011	SD dependent var			0.105
Pseudo r-squared		0.113	Number of obs			16931.000
Chi-square		233.413	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1839.681	Bayesian crit. (BIC)			1901.576

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

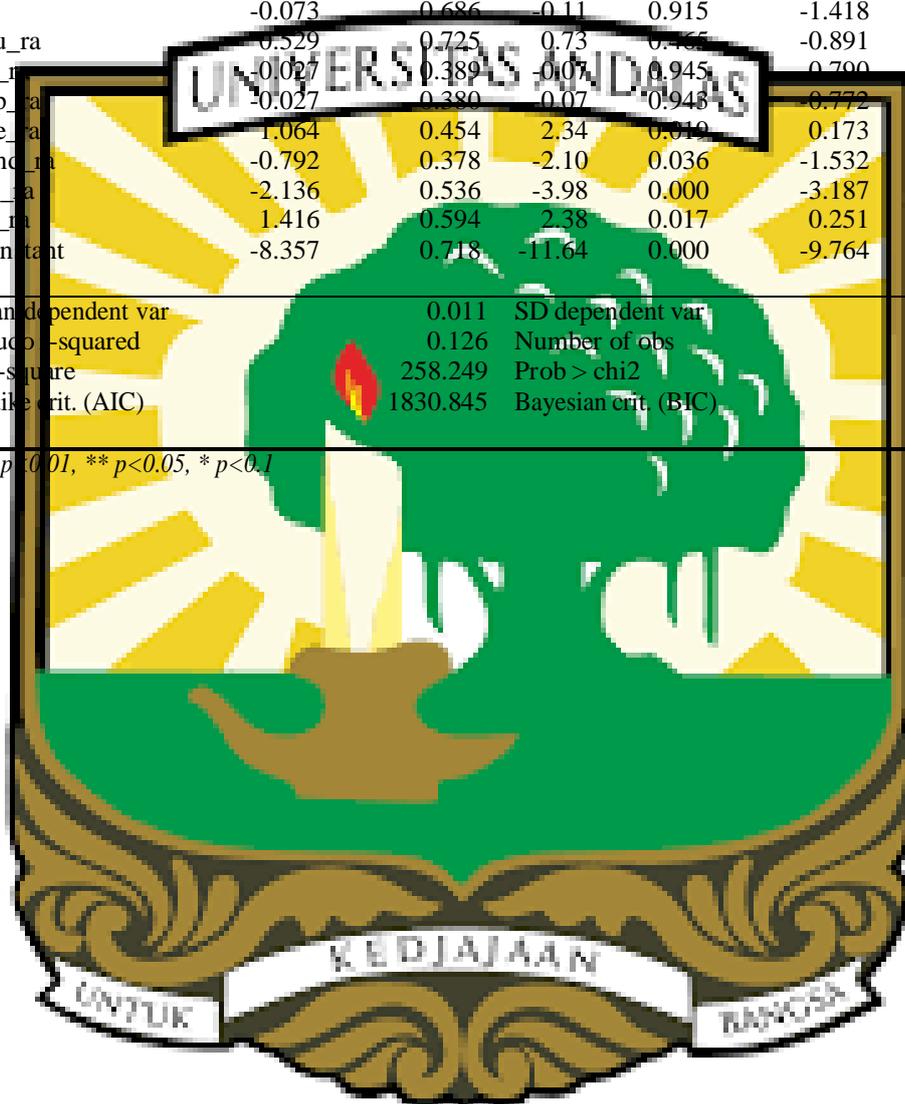
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.208	0.422	5.23	0.000	1.381 3.036	***
wt	0.571	0.162	3.52	0.000	0.253 0.889	***
exp	0.970	0.158	6.14	0.000	0.661 1.280	***
age	0.463	0.201	2.30	0.021	0.069 0.858	**
gend	-0.046	0.163	-0.28	0.776	-0.366 0.273	
ms	1.212	0.218	5.54	0.000	0.783 1.640	***
ph	0.733	0.269	2.72	0.006	0.205 1.261	***
ra	0.392	0.183	2.14	0.032	0.034 0.751	**
Constant	-8.688	0.505	-17.20	0.000	-9.678 -7.698	***
Mean dependent var		0.011	SD dependent var			0.105
Pseudo r-squared		0.116	Number of obs			16931.000
Chi-square		238.332	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1836.762	Bayesian crit. (BIC)			1906.394

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.770	0.691	2.56	0.010	0.417 3.124	**
wt	0.599	0.346	1.73	0.083	-0.079 1.277	*
exp	1.005	0.339	2.96	0.003	0.340 1.669	***
age	-0.306	0.389	-0.79	0.431	-1.068 0.456	
gend	0.545	0.329	1.66	0.098	-0.100 1.189	*
ms	2.848	0.475	5.99	0.000	1.917 3.780	***
ph	-0.352	0.516	-0.68	0.495	-1.364 0.660	
ra	-0.073	0.686	-0.11	0.915	-1.418 1.272	
edu_ra	0.529	0.725	0.73	0.465	-0.891 1.950	
wt_ra	-0.027	0.389	-0.07	0.945	-0.790 0.736	
exp_ra	-0.027	0.380	-0.07	0.948	-0.772 0.718	
age_ra	1.064	0.454	2.34	0.019	0.173 1.954	**
gend_ra	-0.792	0.378	-2.10	0.036	-1.532 -0.051	**
ms_ra	-2.136	0.536	-3.98	0.000	-3.187 -1.084	***
ph_ra	1.416	0.594	2.38	0.017	0.251 2.581	**
Constant	-8.357	0.718	-11.64	0.000	-9.764 -6.950	***
Mean dependent var		0.011	SD dependent var			0.105
Pseudo-squared		0.126	Number of obs			16931.000
Chi-square		258.249	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1830.845	Bayesian crit. (BIC)			1954.635

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



16. Banten

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.702	1.032	2.62	0.009	0.679 4.725	***
wt	1.321	0.372	3.55	0.000	0.591 2.051	***
exp	0.231	0.392	0.59	0.556	-0.537 0.999	
age	0.619	0.398	1.57	0.116	0.132 1.389	
Constant	-8.322	1.065	-7.83	0.000	-10.419 -6.245	***
Mean dependent var		0.006	SD dependent var			0.078
Pseudo r-squared		0.073	Number of obs			4942.000
Chi-square		26.815	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		349.262	Bayesian crit. (BIC)			381.790

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.784	1.033	2.69	0.007	0.759 4.808	***
wt	1.327	0.373	3.56	0.000	0.596 2.057	***
exp	0.378	0.399	0.94	0.345	-0.405 1.161	
age	0.251	0.556	0.45	0.652	-0.839 1.340	
gend	0.975	0.458	2.13	0.033	0.078 1.872	**
ms	0.696	0.564	1.23	0.217	-0.409 1.802	
ph	-0.495	0.594	-0.83	0.405	-1.660 0.670	
Constant	-8.781	1.133	-7.75	0.000	-11.001 -6.560	***
Mean dependent var		0.006	SD dependent var			0.078
Pseudo r-squared		0.088	Number of obs			4942.000
Chi-square		32.248	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		349.829	Bayesian crit. (BIC)			401.874

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

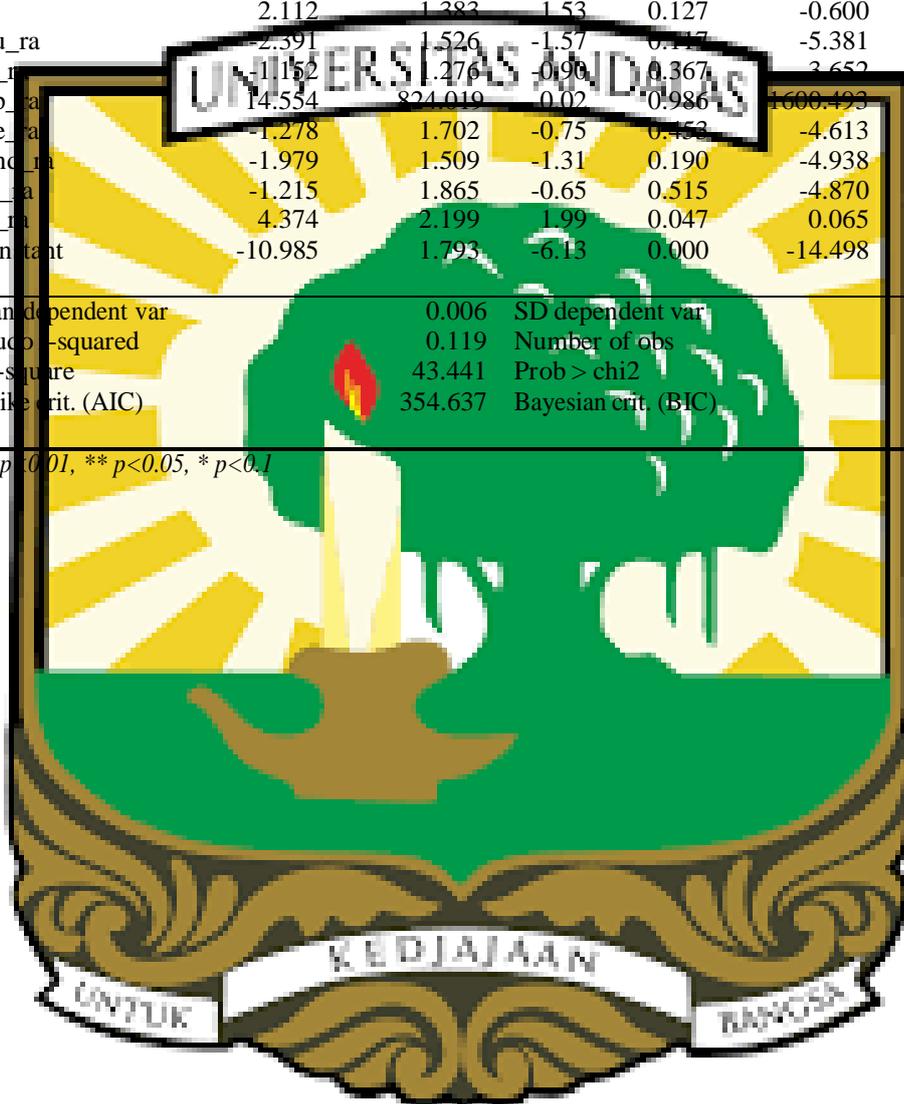
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.785	1.033	2.70	0.007	0.760 4.809	***
wt	1.310	0.374	3.50	0.000	0.576 2.043	***
exp	0.385	0.400	0.96	0.336	-0.399 1.168	
age	0.272	0.560	0.49	0.627	-0.825 1.369	
gend	0.956	0.460	2.08	0.038	0.055 1.857	**
ms	0.692	0.566	1.22	0.222	-0.418 1.802	
ph	-0.478	0.596	-0.80	0.423	-1.646 0.690	
ra	0.338	0.617	0.55	0.584	-0.872 1.548	
Constant	-9.083	1.265	-7.18	0.000	-11.561 -6.604	***
Mean dependent var		0.006	SD dependent var			0.078
Pseudo r-squared		0.089	Number of obs			4942.000
Chi-square		32.574	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		351.504	Bayesian crit. (BIC)			410.053

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	5.120	1.783	2.87	0.004	1.626	8.614	***
wt	2.409	1.216	1.98	0.048	0.025	4.793	**
exp	-13.917	824.019	-0.02	0.987	-1628.964	1601.130	
age	1.450	1.591	0.91	0.362	-1.668	4.568	
gend	2.698	1.428	1.89	0.059	-0.101	5.497	*
ms	1.813	1.763	1.03	0.304	-1.643	5.269	
ph	-4.474	2.101	-2.13	0.033	-8.592	-0.356	**
ra	2.112	1.383	1.53	0.127	-0.600	4.824	
edu_ra	-2.391	1.526	-1.57	0.117	-5.381	0.600	
wt_ra	-1.152	1.276	-0.90	0.367	-3.652	1.349	
exp_ra	14.554	824.019	0.02	0.986	1600.493	1629.601	
age_ra	-1.278	1.702	-0.75	0.453	-4.613	2.057	
gend_ra	-1.979	1.509	-1.31	0.190	-4.938	0.979	
ms_ra	-1.215	1.865	-0.65	0.515	-4.870	2.440	
ph_ra	4.374	2.199	1.99	0.047	0.065	8.683	**
Constant	-10.985	1.793	-6.13	0.000	-14.498	-7.471	***
Mean dependent var		0.006	SD dependent var			0.078	
Pseudo-squared		0.119	Number of obs			4942.000	
Chi-square		43.441	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		354.637	Bayesian crit. (BIC)			458.725	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



17. Bali

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.637	1.019	2.59	0.010	0.639 4.635	**
wt	0.562	0.317	1.77	0.076	-0.059 1.185	*
exp	0.513	0.344	1.49	0.136	-0.162 1.187	
age	1.203	0.344	3.49	0.000	0.528 1.878	***
Constant	-7.982	1.049	-7.61	0.000	-10.040 -5.926	***
Mean dependent var		0.009	SD dependent var			0.094
Pseudo r-squared		0.074	Number of obs			4609.000
Chi-square		34.603	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		444.251	Bayesian crit. (BIC)			476.430

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.783	1.020	2.73	0.006	0.784 4.782	***
wt	0.562	0.319	1.76	0.078	-0.063 1.188	*
exp	0.603	0.352	1.71	0.087	-0.087 1.293	*
age	0.490	0.453	1.08	0.280	-0.398 1.378	
gend	0.890	0.365	2.44	0.015	0.174 1.606	**
ms	1.234	0.444	2.78	0.005	0.364 2.105	***
ph	-0.549	0.448	-1.23	0.220	-1.428 0.329	
Constant	-8.487	1.101	-7.71	0.000	-10.646 -6.329	***
Mean dependent var		0.009	SD dependent var			0.094
Pseudo r-squared		0.097	Number of obs			4609.000
Chi-square		45.513	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		439.341	Bayesian crit. (BIC)			490.828

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

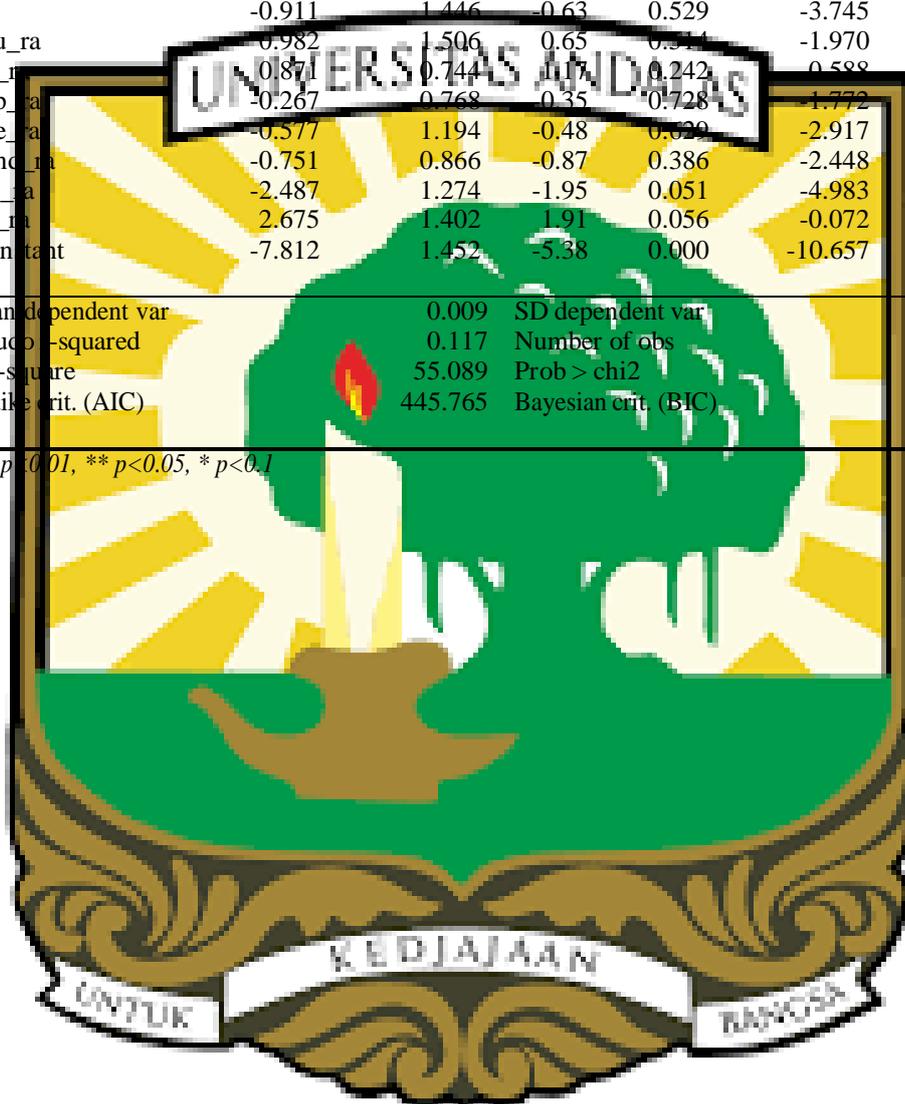
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.785	1.020	2.73	0.006	0.785 4.784	***
wt	0.563	0.319	1.76	0.078	-0.063 1.189	*
exp	0.601	0.353	1.70	0.088	-0.090 1.293	*
age	0.492	0.454	1.08	0.278	-0.397 1.381	
gend	0.887	0.366	2.42	0.015	0.170 1.605	**
ms	1.230	0.446	2.76	0.006	0.356 2.105	***
ph	-0.544	0.451	-1.21	0.228	-1.429 0.340	
ra	0.033	0.361	0.09	0.926	-0.674 0.741	
Constant	-8.514	1.138	-7.48	0.000	-10.745 -6.283	***
Mean dependent var		0.009	SD dependent var			0.094
Pseudo r-squared		0.097	Number of obs			4609.000
Chi-square		45.521	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		441.333	Bayesian crit. (BIC)			499.255

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.136	1.419	1.51	0.132	-0.645 4.916	
wt	-0.076	0.647	-0.12	0.906	-1.344 1.192	
exp	0.766	0.654	1.17	0.241	-0.515 2.047	
age	0.958	1.065	0.90	0.368	-1.130 3.045	
gend	1.441	0.750	1.92	0.055	-0.030 2.912	*
ms	3.261	1.166	2.80	0.005	0.976 5.545	***
ph	-2.858	1.297	-2.20	0.028	-5.400 -0.316	**
ra	-0.911	1.446	-0.63	0.529	-3.745 1.923	
edu_ra	0.982	1.506	0.65	0.514	-1.970 3.933	
wt_ra	0.871	0.744	1.17	0.242	-0.588 2.329	
exp_ra	-0.267	0.768	-0.35	0.728	-1.772 1.238	
age_ra	-0.577	1.194	-0.48	0.629	-2.917 1.763	
gend_ra	-0.751	0.866	-0.87	0.386	-2.448 0.947	
ms_ra	-2.487	1.274	-1.95	0.051	-4.983 0.009	*
ph_ra	2.675	1.402	1.91	0.056	-0.072 5.422	*
Constant	-7.812	1.452	-5.38	0.000	-10.657 -4.967	***
Mean dependent var		0.009	SD dependent var			0.094
Pseudo-squared		0.117	Number of obs			4609.000
Chi-square		55.089	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		445.765	Bayesian crit. (BIC)			548.737

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



18. Nusa Tenggara Barat

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.968	1.019	2.91	0.004	0.971 4.966	***
wt	0.219	0.304	0.72	0.471	-0.376 0.814	
exp	0.939	0.327	2.87	0.004	0.299 1.580	***
age	0.525	0.300	1.75	0.080	0.002 1.112	*
Constant	-7.601	1.052	-7.23	0.000	-9.662 -5.539	***
Mean dependent var		0.017	SD dependent var			0.128
Pseudo r-squared		0.066	Number of obs			3280.000
Chi-square		37.050	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		531.732	Bayesian crit. (BIC)			562.210

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	3.115	1.021	3.05	0.002	1.113 5.116	***
wt	0.191	0.306	0.63	0.532	-0.408 0.790	
exp	1.145	0.334	3.43	0.001	0.490 1.800	***
age	-0.295	0.372	-0.79	0.428	-1.024 0.434	
gend	0.296	0.326	0.91	0.364	-0.344 0.936	
ms	1.620	0.409	3.96	0.000	0.819 2.421	***
ph	-0.473	0.426	-1.11	0.268	-1.308 0.363	
Constant	-8.090	1.089	-7.43	0.000	-10.226 -5.955	***
Mean dependent var		0.017	SD dependent var			0.128
Pseudo r-squared		0.095	Number of obs			3280.000
Chi-square		52.840	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		521.942	Bayesian crit. (BIC)			570.706

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

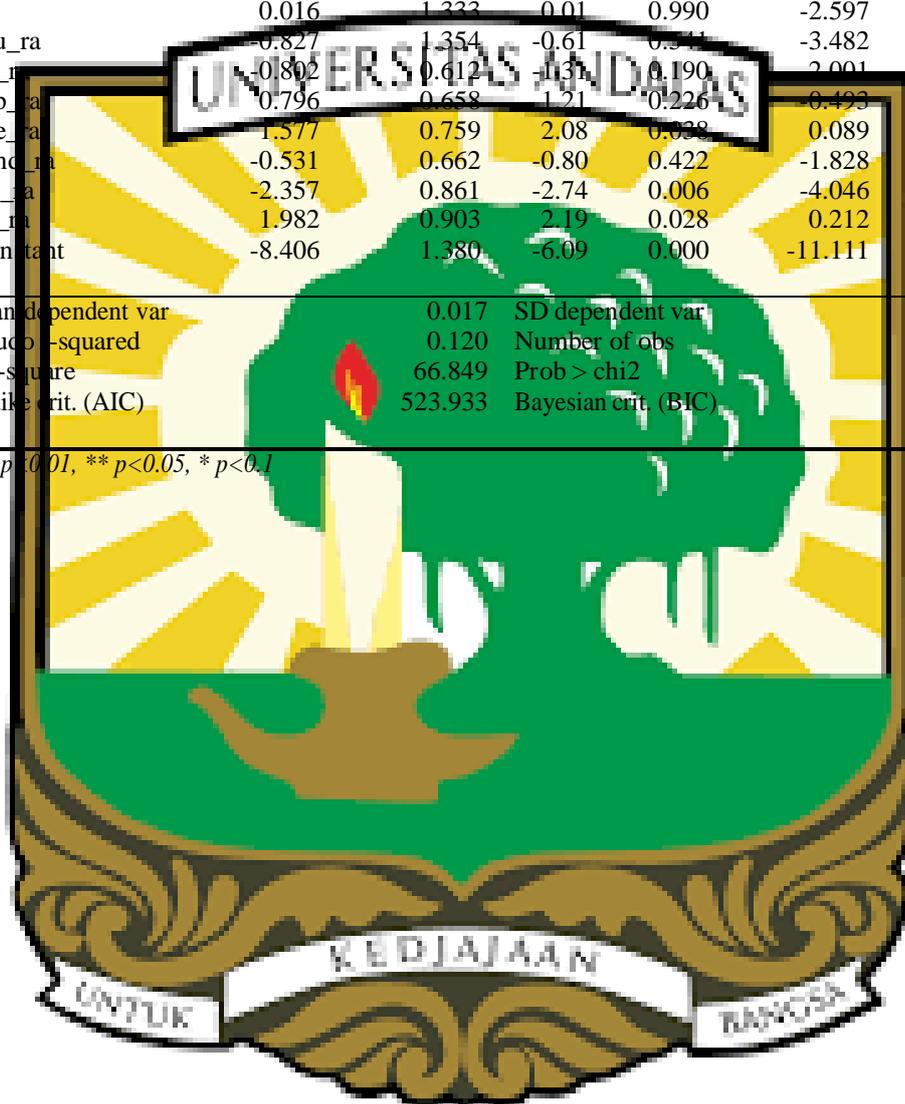
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	3.114	1.021	3.05	0.002	1.112 5.115	***
wt	0.187	0.309	0.60	0.546	-0.420 0.793	
exp	1.147	0.335	3.42	0.001	0.490 1.803	***
age	-0.292	0.374	-0.78	0.435	-1.024 0.441	
gend	0.295	0.327	0.90	0.366	-0.345 0.935	
ms	1.618	0.409	3.95	0.000	0.815 2.420	***
ph	-0.472	0.427	-1.11	0.269	-1.308 0.364	
ra	0.027	0.283	0.10	0.923	-0.528 0.583	
Constant	-8.106	1.101	-7.36	0.000	-10.264 -5.947	***
Mean dependent var		0.017	SD dependent var			0.128
Pseudo r-squared		0.095	Number of obs			3280.000
Chi-square		52.849	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		523.932	Bayesian crit. (BIC)			578.793

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	3.766	1.309	2.88	0.004	1.201	6.331	***
wt	0.727	0.468	1.55	0.120	-0.190	1.643	
exp	0.739	0.483	1.53	0.126	-0.208	1.687	
age	-1.135	0.575	-1.97	0.048	-2.262	-0.008	**
gend	0.577	0.482	1.20	0.231	-0.366	1.521	
ms	3.078	0.670	4.59	0.000	1.764	4.392	***
ph	-1.675	0.687	-2.44	0.015	-3.022	-0.328	**
ra	0.016	1.333	0.01	0.990	-2.597	2.630	
edu_ra	-0.827	1.354	-0.61	0.541	-3.482	1.827	
wt_ra	-0.802	0.612	-1.31	0.190	-2.001	0.397	
exp_ra	-0.796	0.658	-1.21	0.226	-0.493	2.085	
age_ra	1.577	0.759	2.08	0.038	0.089	3.064	**
gend_ra	-0.531	0.662	-0.80	0.422	-1.828	0.765	
ms_ra	-2.357	0.861	-2.74	0.006	-4.046	-0.669	***
ph_ra	1.982	0.903	2.19	0.028	0.212	3.751	**
Constant	-8.406	1.380	-6.09	0.000	-11.111	-5.701	***
Mean dependent var		0.017	SD dependent var			0.128	
Pseudo-squared		0.120	Number of obs			3280.000	
Chi-square		66.849	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		523.933	Bayesian crit. (BIC)			621.462	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



19. Nusa Tenggara Timur

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	3.361	1.015	3.31	0.001	1.372 5.350	***
wt	0.849	0.262	3.21	0.001	0.326 1.353	***
exp	0.641	0.290	2.21	0.027	0.073 1.209	**
age	1.183	0.264	4.48	0.000	0.655 1.701	***
Constant	-8.322	1.024	-8.14	0.000	-10.341 -6.326	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.108
Pseudo r-squared		0.097	Number of obs			5635.000
Chi-square		69.933	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		658.308	Bayesian crit. (BIC)			691.492

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	3.418	1.017	3.36	0.001	1.426 5.411	***
wt	0.912	0.264	3.45	0.001	0.394 1.430	***
exp	0.732	0.294	2.49	0.013	0.156 1.309	**
age	0.265	0.313	0.85	0.397	-0.348 0.878	
gend	-0.418	0.279	-1.50	0.133	-0.964 0.128	
ms	1.123	0.367	3.06	0.002	0.403 1.842	***
ph	0.788	0.439	1.79	0.073	-0.073 1.648	*
Constant	-9.119	1.079	-8.46	0.000	-11.233 -7.005	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.108
Pseudo r-squared		0.128	Number of obs			5635.000
Chi-square		92.263	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		641.978	Bayesian crit. (BIC)			695.072

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

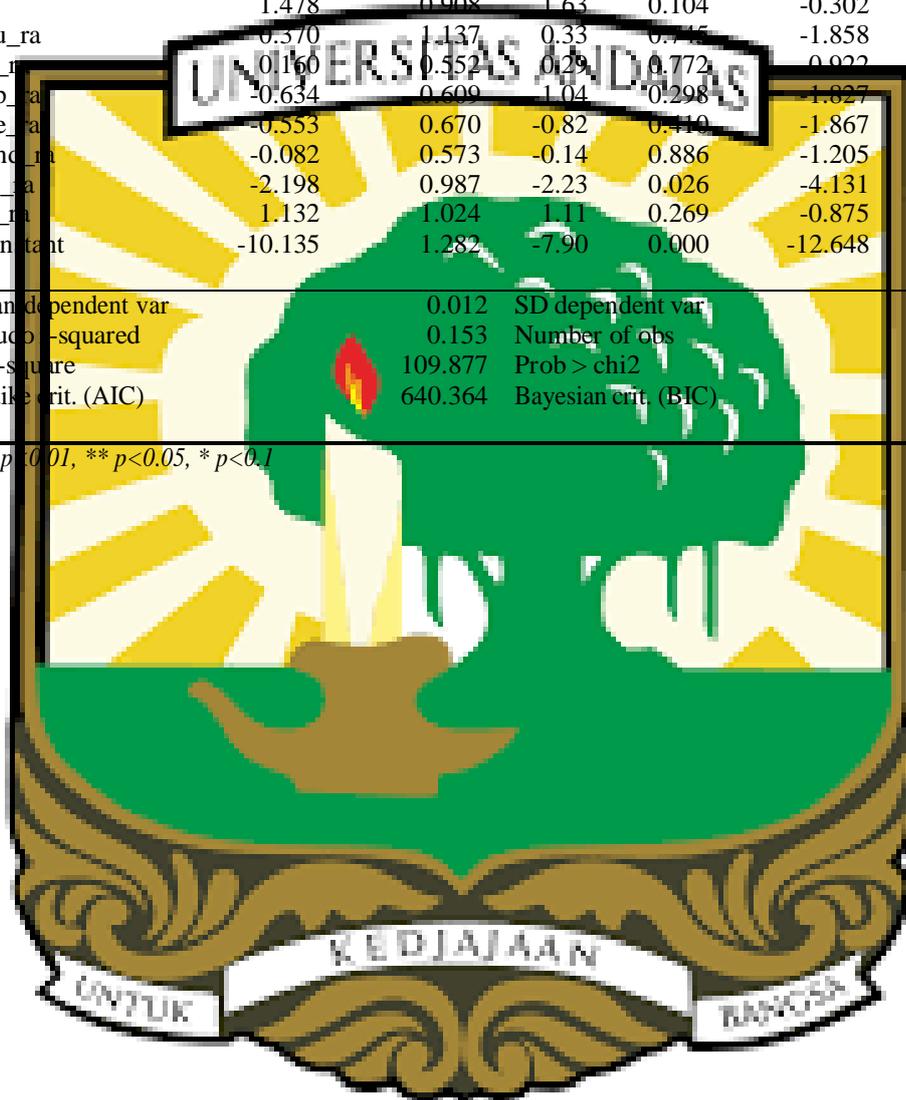
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	3.446	1.016	3.39	0.001	1.454 5.438	***
wt	0.876	0.265	3.30	0.001	0.356 1.396	***
exp	0.777	0.296	2.62	0.009	0.196 1.358	***
age	0.314	0.314	1.00	0.318	-0.302 0.930	
gend	-0.426	0.278	-1.53	0.126	-0.971 0.120	
ms	1.091	0.366	2.98	0.003	0.373 1.809	***
ph	0.814	0.433	1.88	0.060	-0.036 1.663	*
ra	0.661	0.264	2.51	0.012	0.145 1.178	**
Constant	-9.547	1.097	-8.70	0.000	-11.698 -7.397	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.108
Pseudo r-squared		0.138	Number of obs			5635.000
Chi-square		98.859	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		637.381	Bayesian crit. (BIC)			697.112

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	3.170	1.312	2.42	0.016	0.598	5.741 **
wt	0.767	0.449	1.71	0.088	-0.113	1.646 *
exp	1.164	0.476	2.45	0.014	0.231	2.097 **
age	0.669	0.533	1.25	0.210	-0.376	1.714
gend	-0.365	0.450	-0.81	0.417	-1.247	0.517
ms	2.795	0.889	3.15	0.002	1.053	4.537 ***
ph	-0.168	0.901	-0.19	0.852	-1.934	1.598
ra	1.478	0.908	1.63	0.104	-0.302	3.257
edu_ra	0.370	1.137	0.33	0.745	-1.858	2.599
wt_ra	0.160	0.552	0.29	0.772	0.922	1.241
exp_ra	-0.634	0.609	-1.04	0.298	-1.827	0.559
age_ra	-0.553	0.670	-0.82	0.410	-1.867	0.761
gend_ra	-0.082	0.573	-0.14	0.886	-1.205	1.041
ms_ra	-2.198	0.987	-2.23	0.026	-4.131	-0.264 **
ph_ra	1.132	1.024	1.11	0.269	-0.875	3.139
Constant	-10.135	1.282	-7.90	0.000	-12.648	-7.622 ***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.108
Pseudo-squared		0.153	Number of obs			5635.000
Chi-square		109.877	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		640.364	Bayesian crit. (BIC)			746.552

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



20. Kalimantan Barat

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.910	0.736	2.59	0.010	0.466 3.353	**
wt	0.501	0.351	1.43	0.130	-0.147 1.150	
exp	0.712	0.300	2.37	0.018	0.124 1.299	**
age	1.468	0.301	4.88	0.000	0.878 2.059	***
Constant	-7.092	0.752	-9.44	0.000	-8.566 -5.619	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.108
Pseudo r-squared		0.080	Number of obs			4338.000
Chi-square		44.543	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		520.076	Bayesian crit. (BIC)			551.952

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.013	0.743	2.71	0.007	0.556 3.469	***
wt	0.521	0.334	1.56	0.119	-0.134 1.176	
exp	0.857	0.308	2.78	0.005	0.252 1.461	***
age	-0.093	0.349	-0.27	0.789	-0.777 0.590	
gend	0.729	0.308	2.37	0.018	0.125 1.333	**
ms	2.532	0.446	5.67	0.000	1.657 3.407	***
ph	0.289	0.601	0.48	0.631	-0.889 1.467	
Constant	-8.681	0.902	-9.62	0.000	-10.450 -6.912	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.108
Pseudo r-squared		0.165	Number of obs			4338.000
Chi-square		91.491	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		479.128	Bayesian crit. (BIC)			530.129

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

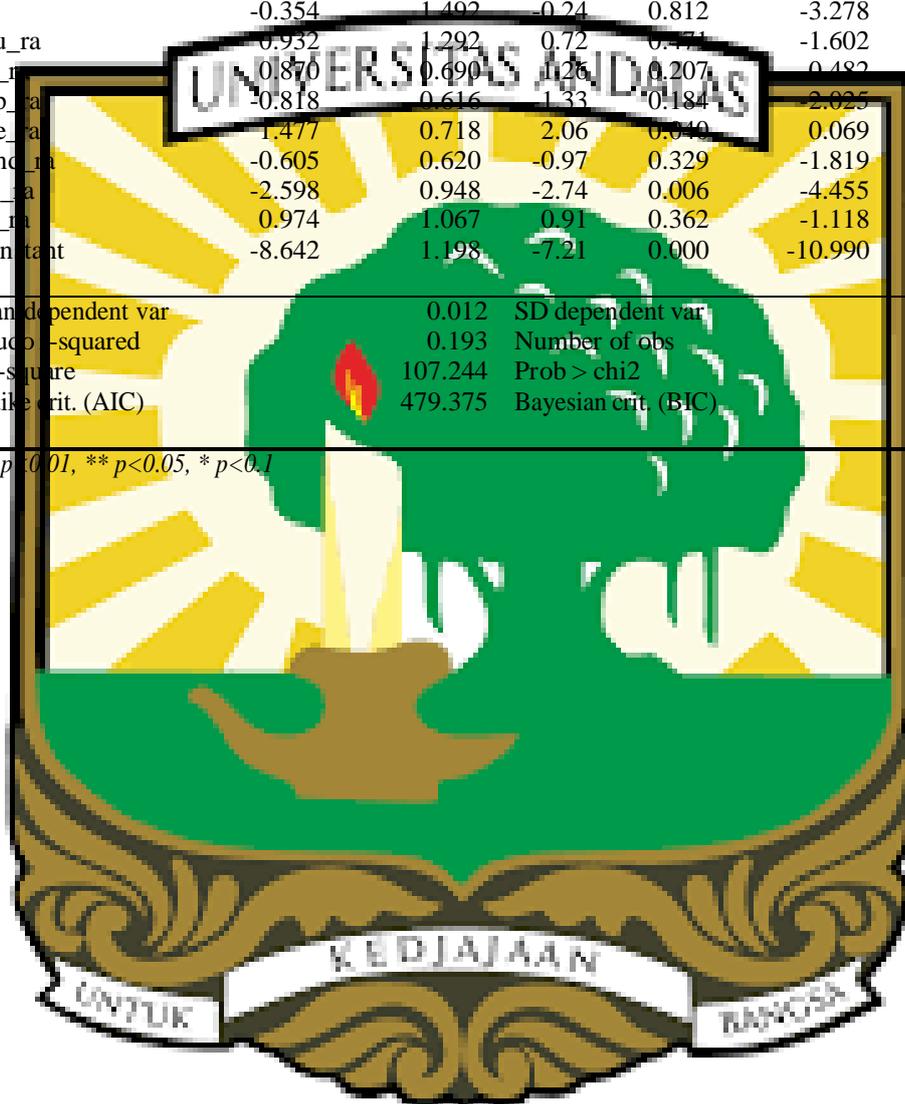
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.973	0.745	2.65	0.008	0.513 3.434	***
wt	0.501	0.335	1.49	0.135	-0.156 1.158	
exp	0.878	0.309	2.84	0.005	0.272 1.484	***
age	-0.128	0.351	-0.36	0.715	-0.817 0.560	
gend	0.738	0.308	2.39	0.017	0.133 1.342	**
ms	2.552	0.447	5.70	0.000	1.675 3.429	***
ph	0.292	0.602	0.48	0.628	-0.888 1.472	
ra	-0.313	0.291	-1.08	0.282	-0.882 0.257	
Constant	-8.474	0.921	-9.20	0.000	-10.280 -6.668	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.108
Pseudo r-squared		0.167	Number of obs			4338.000
Chi-square		92.638	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		479.981	Bayesian crit. (BIC)			537.357

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.533	0.951	1.61	0.107	-0.331 3.397	
wt	-0.013	0.536	-0.02	0.981	-1.064 1.038	
exp	1.269	0.449	2.82	0.005	0.388 2.150	***
age	-0.830	0.491	-1.69	0.091	-1.792 0.132	*
gend	1.036	0.441	2.35	0.019	0.172 1.899	**
ms	3.977	0.753	5.28	0.000	2.502 5.453	***
ph	-0.194	0.796	-0.24	0.807	-1.754 1.365	
ra	-0.354	1.492	-0.24	0.812	-3.278 2.570	
edu_ra	0.932	1.292	0.72	0.471	-1.602 3.465	
wt_ra	0.870	0.690	1.26	0.207	0.482 2.222	
exp_ra	-0.818	0.616	-1.33	0.184	-2.025 0.389	
age_ra	1.477	0.718	2.06	0.040	0.069 2.884	**
gend_ra	-0.605	0.620	-0.97	0.329	-1.819 0.610	
ms_ra	-2.598	0.948	-2.74	0.006	-4.455 -0.740	***
ph_ra	0.974	1.067	0.91	0.362	-1.118 3.066	
Constant	-8.642	1.198	-7.21	0.000	-10.990 -6.295	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.108
Pseudo-squared		0.193	Number of obs			4338.000
Chi-square		107.244	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		479.375	Bayesian crit. (BIC)			581.377

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



21. Kalimantan Tengah

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.941	0.615	3.16	0.002	0.736 3.146	***
wt	1.218	0.302	4.02	0.000	0.625 1.811	***
exp	0.630	0.311	2.02	0.043	0.020 1.240	**
age	1.028	0.311	3.30	0.001	0.418 1.638	***
Constant	-7.147	0.648	-11.03	0.000	-8.417 -5.877	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.111
Pseudo r-squared		0.086	Number of obs			3797.000
Chi-square		43.634	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		472.613	Bayesian crit. (BIC)			503.823

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.873	0.617	3.03	0.002	0.662 3.083	***
wt	1.229	0.304	4.04	0.000	0.633 1.825	***
exp	0.703	0.320	2.20	0.028	0.076 1.330	**
age	0.128	0.400	0.32	0.750	-0.657 0.913	
gend	-0.679	0.376	-1.81	0.071	-1.416 0.057	*
ms	1.219	0.454	2.69	0.007	0.330 2.108	***
ph	0.352	0.471	0.75	0.455	-0.572 1.276	
Constant	-7.314	0.708	-10.33	0.000	-8.702 -5.926	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.111
Pseudo r-squared		0.120	Number of obs			3797.000
Chi-square		60.614	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		461.633	Bayesian crit. (BIC)			511.569

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

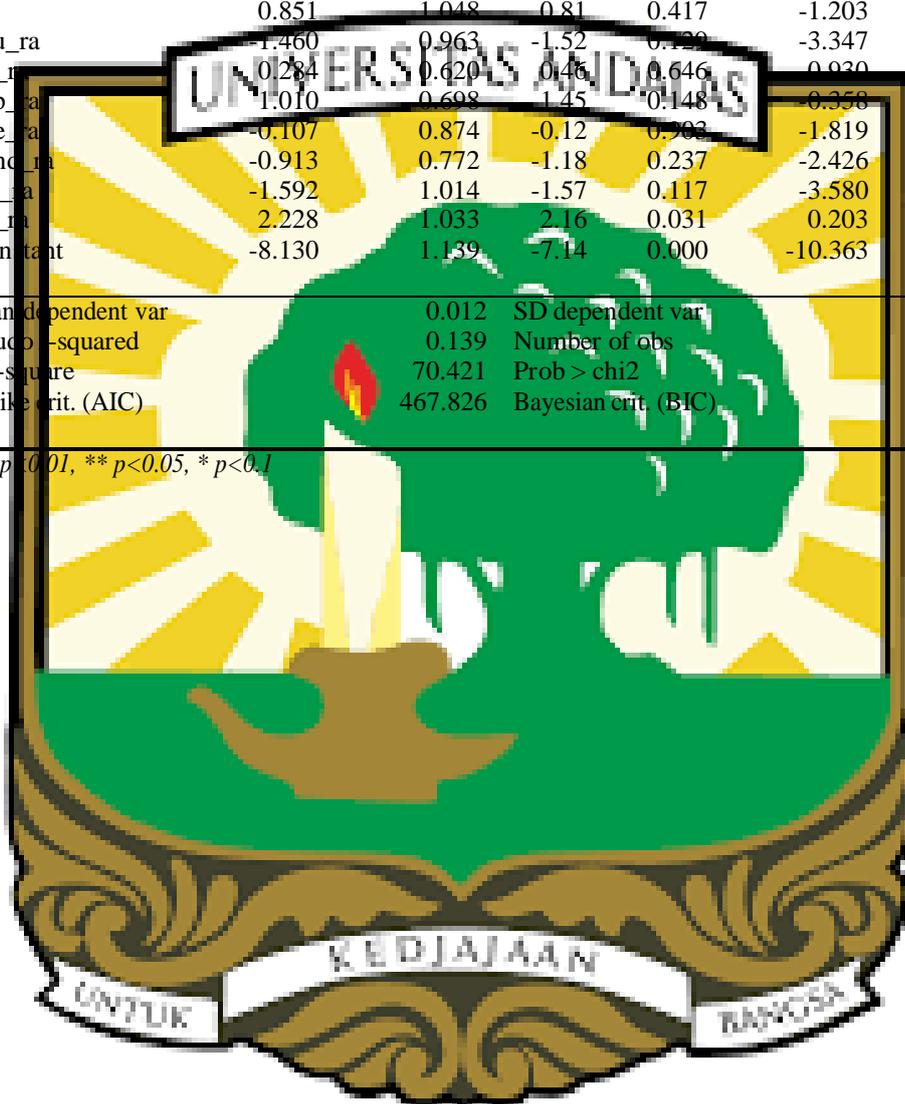
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.900	0.618	3.08	0.002	0.690 3.111	***
wt	1.198	0.306	3.92	0.000	0.599 1.797	***
exp	0.697	0.320	2.18	0.029	0.070 1.324	**
age	0.154	0.402	0.38	0.701	-0.634 0.942	
gend	-0.695	0.376	-1.85	0.064	-1.432 0.042	*
ms	1.200	0.454	2.64	0.008	0.311 2.090	***
ph	0.346	0.470	0.73	0.462	-0.576 1.267	
ra	0.306	0.312	0.98	0.327	-0.306 0.918	
Constant	-7.496	0.734	-10.21	0.000	-8.935 -6.058	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.111
Pseudo r-squared		0.122	Number of obs			3797.000
Chi-square		61.595	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		462.651	Bayesian crit. (BIC)			518.829

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	3.115	1.074	2.90	0.004	1.010	5.221	***
wt	0.972	0.482	2.02	0.044	0.028	1.917	**
exp	0.004	0.575	0.01	0.995	-1.124	1.131	
age	0.234	0.716	0.33	0.744	-1.170	1.638	
gend	-0.124	0.601	-0.21	0.837	-1.302	1.054	
ms	2.305	0.852	2.71	0.007	0.635	3.974	***
ph	-1.234	0.864	-1.43	0.153	-2.928	0.460	
ra	0.851	1.048	0.81	0.417	-1.203	2.904	
edu_ra	-1.460	0.963	-1.52	0.129	-3.347	0.427	
wt_ra	0.284	0.620	0.46	0.646	0.920	1.499	
exp_ra	-1.010	0.698	-1.45	0.148	-0.358	2.377	
age_ra	-0.107	0.874	-0.12	0.903	-1.819	1.606	
gend_ra	-0.913	0.772	-1.18	0.237	-2.426	0.599	
ms_ra	-1.592	1.014	-1.57	0.117	-3.580	0.397	
ph_ra	2.228	1.033	2.16	0.031	0.203	4.253	**
Constant	-8.130	1.139	-7.14	0.000	-10.363	-5.898	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.111	
Pseudo-squared		0.139	Number of obs			3797.000	
Chi-square		70.421	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		467.826	Bayesian crit. (BIC)			567.697	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



22. Kalimantan Selatan

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.000	0.606	3.30	0.001	0.813 3.188	***
wt	0.374	0.273	1.37	0.171	-0.161 0.909	
exp	0.783	0.280	2.80	0.005	0.235 1.332	***
age	0.602	0.284	2.12	0.034	0.043 1.159	**
Constant	-6.635	0.634	-10.47	0.000	-7.878 -5.393	***
Mean dependent var		0.015	SD dependent var			0.122
Pseudo r-squared		0.054	Number of obs			3964.000
Chi-square		33.658	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		598.309	Bayesian crit. (BIC)			629.734

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.043	0.608	3.36	0.001	0.852 3.234	***
wt	0.385	0.274	1.41	0.159	-0.151 0.922	
exp	0.869	0.286	3.04	0.002	0.308 1.429	***
age	-0.352	0.365	-0.96	0.335	-1.068 0.364	
gend	-0.100	0.316	-0.32	0.751	-0.719 0.519	
ms	1.412	0.373	3.78	0.000	0.680 2.144	***
ph	0.039	0.391	0.10	0.920	-0.728 0.806	
Constant	-6.965	0.680	-10.24	0.000	-8.298 -5.632	***
Mean dependent var		0.015	SD dependent var			0.122
Pseudo r-squared		0.081	Number of obs			3964.000
Chi-square		50.310	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		587.657	Bayesian crit. (BIC)			637.937

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

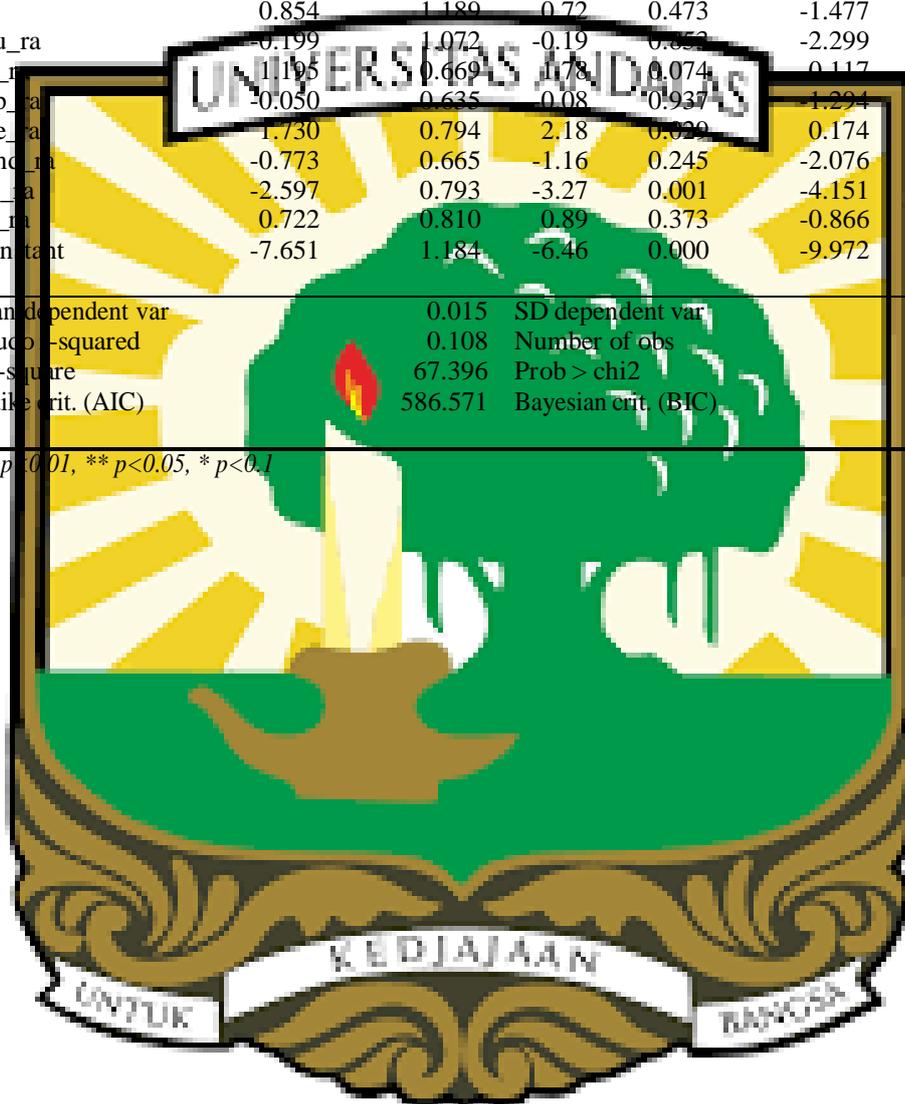
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.085	0.608	3.43	0.001	0.894 3.277	***
wt	0.389	0.274	1.42	0.156	-0.148 0.926	
exp	0.884	0.286	3.10	0.002	0.325 1.444	***
age	-0.338	0.367	-0.92	0.357	-1.058 0.381	
gend	-0.130	0.318	-0.41	0.682	-0.753 0.493	
ms	1.387	0.377	3.68	0.000	0.648 2.126	***
ph	0.062	0.393	0.16	0.874	-0.707 0.832	
ra	0.437	0.292	1.50	0.134	-0.134 1.009	
Constant	-7.306	0.721	-10.14	0.000	-8.718 -5.893	***
Mean dependent var		0.015	SD dependent var			0.122
Pseudo r-squared		0.085	Number of obs			3964.000
Chi-square		52.680	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		587.287	Bayesian crit. (BIC)			643.852

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.252	1.059	2.13	0.033	0.177 4.327	**
wt	-0.569	0.593	-0.96	0.337	-1.732 0.593	
exp	0.875	0.546	1.60	0.109	-0.195 1.945	
age	-1.426	0.628	-2.27	0.023	-2.657 -0.196	**
gend	0.366	0.531	0.69	0.491	-0.675 1.407	
ms	3.031	0.612	4.95	0.000	1.831 4.231	***
ph	-0.359	0.656	-0.55	0.585	-1.645 0.927	
ra	0.854	1.189	0.72	0.473	-1.477 3.185	
edu_ra	-0.199	1.072	-0.19	0.852	-2.299 1.902	
wt_ra	1.195	0.669	1.78	0.074	0.117 2.506	*
exp_ra	-0.050	0.635	-0.08	0.937	-1.294 1.194	
age_ra	1.730	0.794	2.18	0.029	0.174 3.286	**
gend_ra	-0.773	0.665	-1.16	0.245	-2.076 0.529	
ms_ra	-2.597	0.793	-3.27	0.001	-4.151 -1.043	***
ph_ra	0.722	0.810	0.89	0.373	-0.866 2.311	
Constant	-7.651	1.184	-6.46	0.000	-9.972 -5.331	***
Mean dependent var		0.015	SD dependent var			0.122
Pseudo-squared		0.108	Number of obs			3964.000
Chi-square		67.396	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		586.571	Bayesian crit. (BIC)			687.131

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



23. Kalimantan Timur

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.168	0.600	3.61	0.000	0.992 3.345	***
wt	1.197	0.256	4.68	0.000	0.696 1.698	***
exp	0.868	0.261	3.33	0.001	0.356 1.380	***
age	1.564	0.259	6.03	0.000	1.056 2.073	***
Constant	-7.504	0.635	-11.81	0.000	-8.749 -6.259	***
Mean dependent var		0.016	SD dependent var			0.124
Pseudo r-squared		0.121	Number of obs			4458.000
Chi-square		86.892	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		643.557	Bayesian crit. (BIC)			675.569

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.176	0.604	3.60	0.000	0.992 3.359	***
wt	1.180	0.258	4.58	0.000	0.675 1.685	***
exp	0.934	0.265	3.52	0.000	0.415 1.453	***
age	0.771	0.366	2.11	0.035	0.054 1.488	**
gend	0.161	0.283	0.57	0.569	-0.393 0.714	
ms	1.235	0.390	3.17	0.002	0.471 1.999	***
ph	-0.252	0.376	-0.67	0.502	-0.989 0.484	
Constant	-7.671	0.683	-11.23	0.000	-9.010 -6.332	***
Mean dependent var		0.016	SD dependent var			0.124
Pseudo r-squared		0.135	Number of obs			4458.000
Chi-square		97.026	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		639.424	Bayesian crit. (BIC)			690.644

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

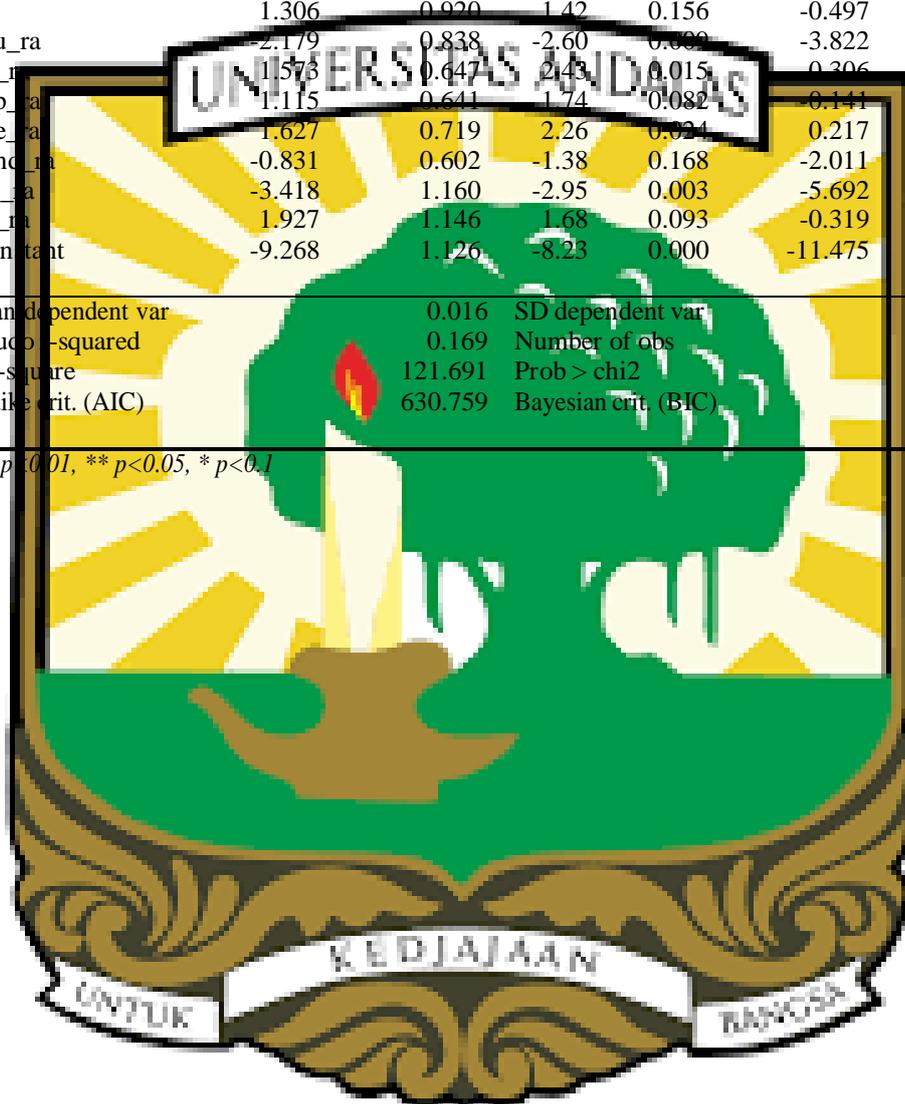
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.172	0.604	3.60	0.000	0.988 3.356	***
wt	1.184	0.259	4.57	0.000	0.676 1.692	***
exp	0.936	0.266	3.52	0.000	0.416 1.457	***
age	0.770	0.366	2.11	0.035	0.054 1.487	**
gend	0.164	0.284	0.58	0.563	-0.392 0.720	
ms	1.236	0.390	3.17	0.002	0.471 2.000	***
ph	-0.255	0.376	-0.68	0.498	-0.993 0.483	
ra	-0.039	0.280	-0.14	0.889	-0.588 0.510	
Constant	-7.643	0.712	-10.74	0.000	-9.038 -6.248	***
Mean dependent var		0.016	SD dependent var			0.124
Pseudo r-squared		0.135	Number of obs			4458.000
Chi-square		97.045	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		641.405	Bayesian crit. (BIC)			699.027

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	4.256	1.018	4.18	0.000	2.261	6.251	***
wt	0.069	0.553	0.13	0.901	-1.015	1.154	
exp	0.057	0.562	0.10	0.920	-1.044	1.157	
age	-0.344	0.555	-0.62	0.536	-1.431	0.744	
gend	0.782	0.492	1.59	0.112	-0.182	1.746	
ms	3.907	1.062	3.68	0.000	1.826	5.989	***
ph	-1.970	1.074	-1.84	0.066	-4.075	0.134	*
ra	1.306	0.920	1.42	0.156	-0.497	3.110	
edu_ra	-2.179	0.838	-2.60	0.009	-3.822	-0.535	***
wt_ra	1.573	0.647	2.43	0.015	0.306	2.840	**
exp_ra	1.115	0.641	1.74	0.082	-0.141	2.372	*
age_ra	1.627	0.719	2.26	0.024	0.217	3.037	**
gend_ra	-0.831	0.602	-1.38	0.168	-2.011	0.350	
ms_ra	-3.418	1.160	-2.95	0.003	-5.692	-1.144	***
ph_ra	1.927	1.146	1.68	0.093	-0.319	4.174	*
Constant	-9.268	1.126	-8.23	0.000	-11.475	-7.061	***
Mean dependent var		0.016	SD dependent var			0.124	
Pseudo-squared		0.169	Number of obs			4458.000	
Chi-square		121.691	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		630.759	Bayesian crit. (BIC)			733.198	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



24. Kalimantan Utara

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.786	1.056	1.69	0.091	-0.284 3.855	*
wt	0.492	0.520	0.95	0.343	-0.526 1.513	
exp	0.186	0.570	0.33	0.744	-0.930 1.302	
age	0.782	0.534	1.46	0.143	0.205 1.829	
Constant	-6.480	1.100	-5.89	0.000	-8.635 -4.325	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.108
Pseudo r-squared		0.044	Number of obs			1364.000
Chi-square		7.708	Prob > chi2			0.103
Akaike crit. (AIC)		176.362	Bayesian crit. (BIC)			202.453

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.927	1.061	1.82	0.069	-0.152 4.006	*
wt	0.368	0.526	0.70	0.484	-0.663 1.399	
exp	0.098	0.593	0.17	0.869	-1.064 1.260	
age	-0.101	0.729	-0.14	0.890	-1.530 1.328	
gend	0.709	0.579	1.22	0.221	-0.426 1.844	
ms	2.157	0.715	3.02	0.003	0.757 3.558	***
ph	-1.640	0.729	-2.25	0.024	-3.068 -0.211	**
Constant	-6.491	1.149	-5.65	0.000	-8.742 -4.239	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.108
Pseudo r-squared		0.104	Number of obs			1364.000
Chi-square		18.018	Prob > chi2			0.012
Akaike crit. (AIC)		172.052	Bayesian crit. (BIC)			213.797

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

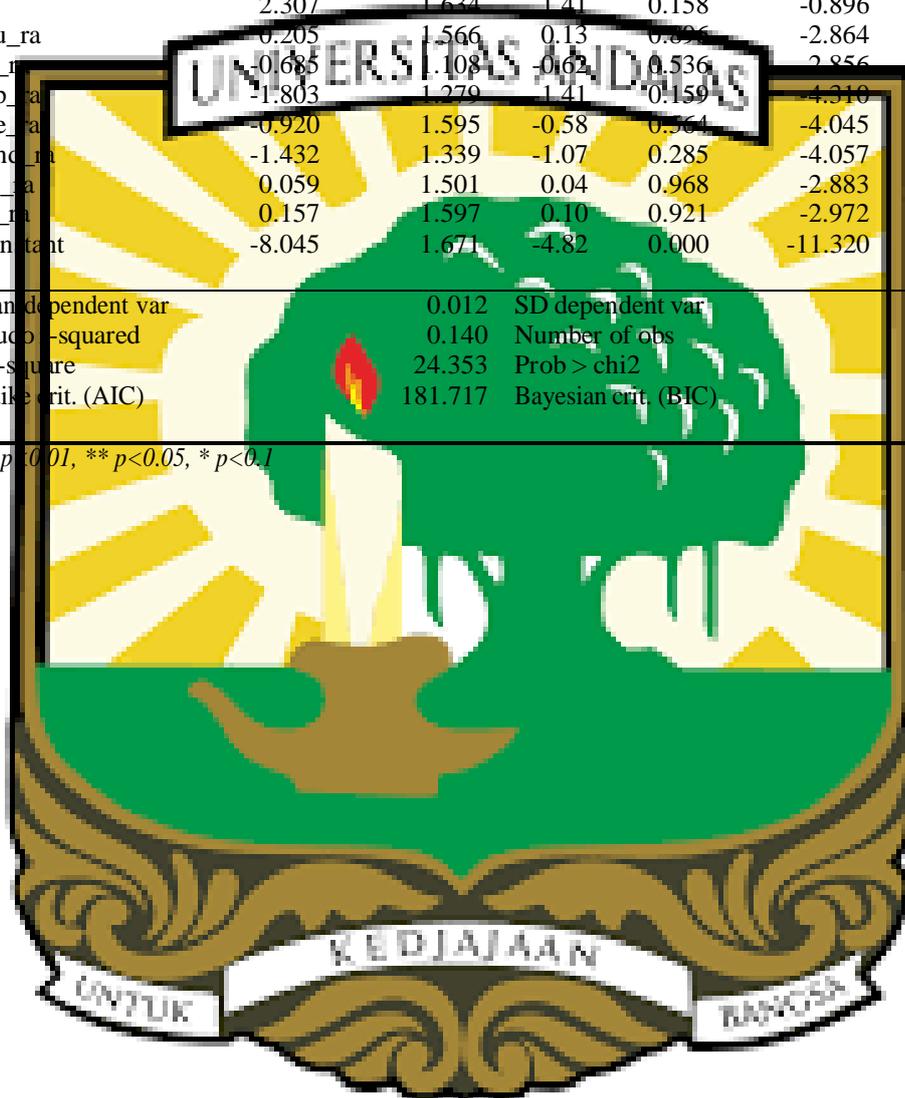
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.929	1.061	1.82	0.069	-0.150 4.008	*
wt	0.342	0.527	0.65	0.516	-0.691 1.376	
exp	0.147	0.593	0.25	0.804	-1.016 1.310	
age	-0.119	0.730	-0.16	0.871	-1.549 1.312	
gend	0.693	0.577	1.20	0.230	-0.437 1.823	
ms	2.181	0.724	3.01	0.003	0.763 3.599	***
ph	-1.616	0.728	-2.22	0.026	-3.043 -0.190	**
ra	0.532	0.551	0.97	0.334	-0.548 1.612	
Constant	-6.844	1.227	-5.58	0.000	-9.250 -4.439	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.108
Pseudo r-squared		0.109	Number of obs			1364.000
Chi-square		19.001	Prob > chi2			0.015
Akaike crit. (AIC)		173.069	Bayesian crit. (BIC)			220.033

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.665	1.518	1.10	0.273	-1.310 4.639	
wt	0.756	0.902	0.84	0.402	-1.013 2.524	
exp	1.236	0.981	1.26	0.208	-0.686 3.159	
age	0.474	1.323	0.36	0.720	-2.118 3.067	
gend	1.712	1.122	1.52	0.127	-0.488 3.912	
ms	2.132	1.186	1.80	0.072	-0.193 4.457	*
ph	-1.747	1.332	-1.31	0.190	-4.358 0.865	
ra	2.307	1.634	1.41	0.158	-0.896 5.510	
edu_ra	0.205	1.566	0.13	0.896	-2.864 3.275	
wt_ra	-0.685	1.108	-0.62	0.536	-2.856 1.485	
exp_ra	-1.803	1.279	-1.41	0.159	-4.310 0.703	
age_ra	-0.920	1.595	-0.58	0.564	-4.045 2.206	
gend_ra	-1.432	1.339	-1.07	0.285	-4.057 1.193	
ms_ra	0.059	1.501	0.04	0.968	-2.883 3.002	
ph_ra	0.157	1.597	0.10	0.921	-2.972 3.287	
Constant	-8.045	1.671	-4.82	0.000	-11.320 -4.770	***
Mean dependent var		0.012	SD dependent var			0.108
Pseudo-squared		0.140	Number of obs			1364.000
Chi-square		24.353	Prob > chi2			0.059
Akaike crit. (AIC)		181.717	Bayesian crit. (BIC)			265.208

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



25. Sulawesi Utara

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.153	0.485	2.38	0.017	0.202 2.103	**
wt	0.452	0.287	1.58	0.115	-0.110 1.015	
exp	0.906	0.282	3.21	0.001	0.353 1.459	***
age	0.973	0.276	3.52	0.000	0.432 1.514	***
Constant	-6.125	0.498	-12.29	0.000	-7.101 -5.148	***
Mean dependent var		0.011	SD dependent var			0.106
Pseudo r-squared		0.046	Number of obs			5274.000
Chi-square		30.040	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		636.419	Bayesian crit. (BIC)			669.272

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.202	0.490	2.45	0.014	0.241 2.164	**
wt	0.505	0.291	1.74	0.082	-0.064 1.075	*
exp	0.996	0.289	3.44	0.001	0.429 1.563	***
age	-0.301	0.319	-0.94	0.345	-0.926 0.324	
gend	-0.301	0.295	-1.02	0.309	-0.879 0.278	
ms	2.238	0.368	6.08	0.000	1.517 2.958	***
ph	-0.131	0.414	-0.32	0.753	-0.943 0.681	
Constant	-6.657	0.586	-11.35	0.000	-7.806 -5.507	***
Mean dependent var		0.011	SD dependent var			0.106
Pseudo r-squared		0.119	Number of obs			5274.000
Chi-square		78.140	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		594.319	Bayesian crit. (BIC)			646.883

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

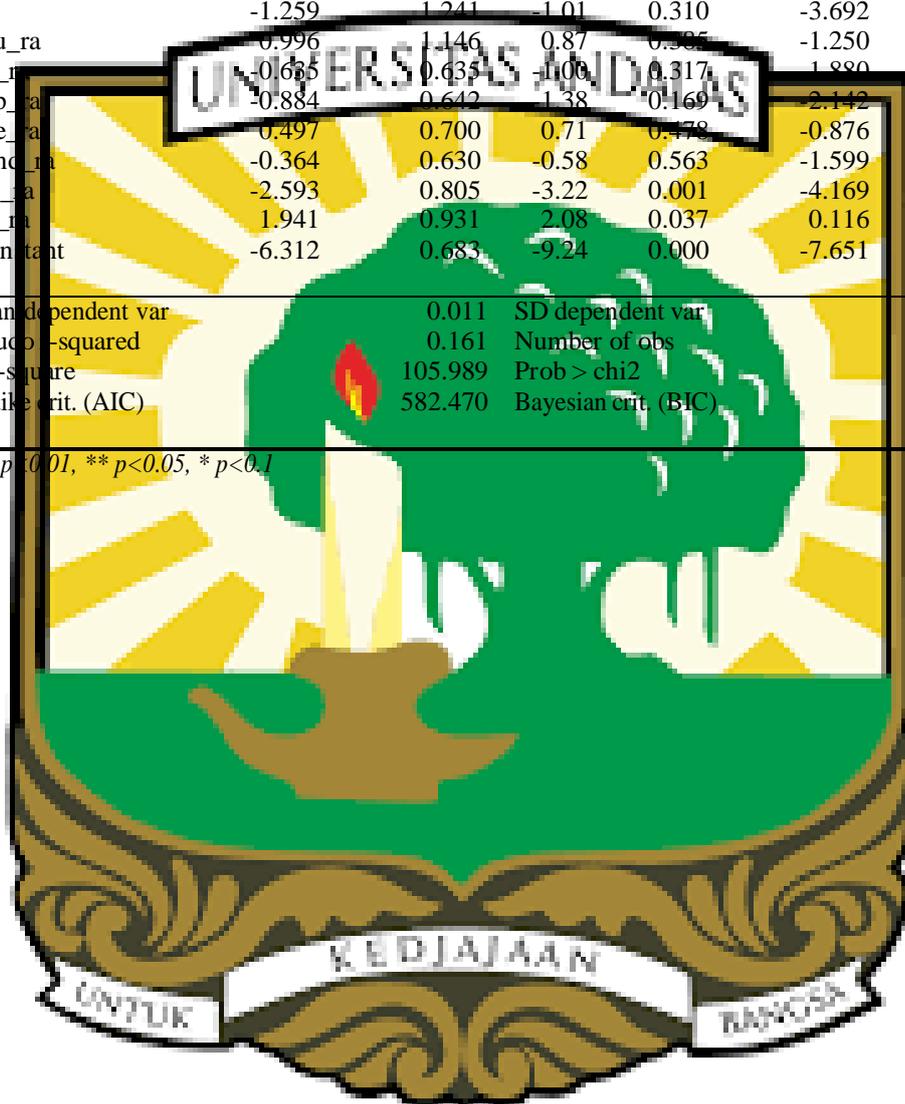
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.177	0.495	2.38	0.017	0.207 2.147	**
wt	0.530	0.293	1.81	0.070	-0.044 1.105	*
exp	1.015	0.292	3.48	0.001	0.442 1.587	***
age	-0.302	0.322	-0.94	0.348	-0.933 0.329	
gend	-0.206	0.298	-0.69	0.488	-0.790 0.377	
ms	2.366	0.372	6.36	0.000	1.637 3.096	***
ph	-0.237	0.418	-0.57	0.571	-1.057 0.583	
ra	-0.928	0.278	-3.34	0.001	-1.472 -0.383	***
Constant	-6.259	0.597	-10.48	0.000	-7.430 -5.088	***
Mean dependent var		0.011	SD dependent var			0.106
Pseudo r-squared		0.137	Number of obs			5274.000
Chi-square		89.944	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		584.515	Bayesian crit. (BIC)			643.650

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	0.934	0.563	1.66	0.097	-0.170 2.038	*
wt	0.737	0.365	2.02	0.044	0.021 1.452	**
exp	1.320	0.365	3.62	0.000	0.604 2.037	***
age	-0.375	0.410	-0.92	0.360	-1.179 0.428	
gend	-0.064	0.378	-0.17	0.865	-0.806 0.677	
ms	3.392	0.518	6.55	0.000	2.377 4.408	***
ph	-1.069	0.536	-2.00	0.046	-2.119 -0.019	**
ra	-1.259	1.241	-1.01	0.310	-3.692 1.173	
edu_ra	0.996	1.146	0.87	0.385	-1.250 3.242	
wt_ra	-0.635	0.635	-1.00	0.317	-1.880 0.609	
exp_ra	-0.884	0.642	-1.38	0.169	-2.142 0.375	
age_ra	0.497	0.700	0.71	0.478	-0.876 1.869	
gend_ra	-0.364	0.630	-0.58	0.563	-1.599 0.871	
ms_ra	-2.593	0.805	-3.22	0.001	-4.169 -1.016	***
ph_ra	1.941	0.931	2.08	0.037	0.116 3.765	**
Constant	-6.312	0.683	-9.24	0.000	-7.651 -4.973	***
Mean dependent var		0.011	SD dependent var			0.106
Pseudo-squared		0.161	Number of obs			5274.000
Chi-square		105.989	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		582.470	Bayesian crit. (BIC)			687.599

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



26. Sulawesi Tengah

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.464	0.599	4.11	0.000	1.289 3.638	***
wt	0.902	0.228	3.95	0.000	0.455 1.351	***
exp	0.439	0.243	1.80	0.071	-0.038 0.915	*
age	1.010	0.235	4.33	0.000	0.539 1.467	***
Constant	-6.777	0.612	-11.07	0.000	-7.976 -5.577	***
Mean dependent var		0.023	SD dependent var			0.150
Pseudo r-squared		0.089	Number of obs			3673.000
Chi-square		71.155	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		739.604	Bayesian crit. (BIC)			770.648

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.611	0.606	4.31	0.000	1.424 3.797	***
wt	0.991	0.233	4.26	0.000	0.536 1.447	***
exp	0.603	0.249	2.42	0.016	0.114 1.092	**
age	-0.202	0.293	-0.69	0.490	-0.776 0.372	
gend	0.075	0.245	0.31	0.760	-0.405 0.555	
ms	1.621	0.318	5.11	0.000	0.999 2.244	***
ph	0.583	0.362	1.61	0.108	-0.128 1.293	
Constant	-7.789	0.689	-11.31	0.000	-9.139 -6.439	***
Mean dependent var		0.023	SD dependent var			0.150
Pseudo r-squared		0.135	Number of obs			3673.000
Chi-square		108.357	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		708.402	Bayesian crit. (BIC)			758.072

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

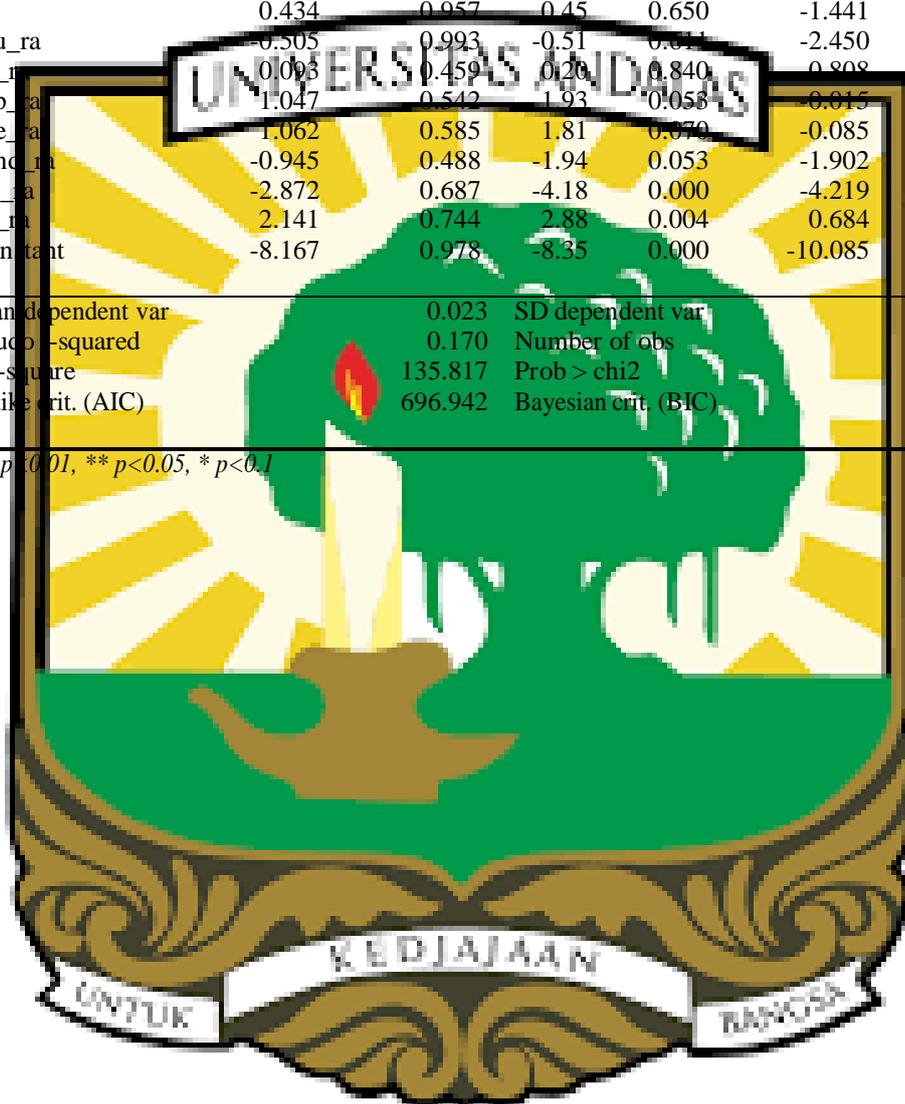
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.649	0.606	4.37	0.000	1.461 3.837	***
wt	0.987	0.233	4.25	0.000	0.531 1.443	***
exp	0.589	0.250	2.36	0.018	0.100 1.079	**
age	-0.198	0.293	-0.67	0.501	-0.772 0.377	
gend	0.065	0.245	0.27	0.790	-0.415 0.545	
ms	1.597	0.318	5.03	0.000	0.974 2.220	***
ph	0.597	0.361	1.66	0.098	-0.110 1.304	*
ra	0.268	0.228	1.18	0.239	-0.178 0.715	
Constant	-7.954	0.705	-11.28	0.000	-9.336 -6.573	***
Mean dependent var		0.023	SD dependent var			0.150
Pseudo r-squared		0.137	Number of obs			3673.000
Chi-square		109.754	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		709.005	Bayesian crit. (BIC)			764.884

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.942	0.943	3.12	0.002	1.094 4.791	***
wt	0.960	0.350	2.74	0.006	0.274 1.645	***
exp	-0.016	0.437	-0.04	0.970	-0.872 0.839	
age	-0.663	0.418	-1.59	0.113	-1.483 0.157	
gend	0.554	0.355	1.56	0.118	-0.141 1.249	
ms	3.313	0.545	6.08	0.000	2.245 4.382	***
ph	-0.771	0.576	-1.34	0.181	-1.899 0.358	
ra	0.434	0.957	0.45	0.650	-1.441 2.309	
edu_ra	-0.505	0.993	-0.51	0.611	-2.450 1.441	
wt_ra	0.093	0.459	0.20	0.840	-0.808 0.993	
exp_ra	1.047	0.542	1.93	0.058	-0.015 2.109	*
age_ra	1.062	0.585	1.81	0.070	-0.085 2.209	*
gend_ra	-0.945	0.488	-1.94	0.053	-1.902 0.012	*
ms_ra	-2.872	0.687	-4.18	0.000	-4.219 -1.526	***
ph_ra	2.141	0.744	2.88	0.004	0.684 3.599	***
Constant	-8.167	0.978	-8.35	0.000	-10.085 -6.250	***
Mean dependent var		0.023	SD dependent var			0.150
Pseudo-squared		0.170	Number of obs			3673.000
Chi-square		135.817	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		696.942	Bayesian crit. (BIC)			796.282

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



27. Sulawesi Selatan

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.480	0.345	4.29	0.000	0.805 2.156	***
wt	0.502	0.187	2.68	0.007	0.136 0.871	***
exp	0.831	0.194	4.29	0.000	0.452 1.210	***
age	1.501	0.188	7.99	0.000	1.135 1.870	***
Constant	-6.436	0.352	-18.28	0.000	-7.126 -5.746	***
Mean dependent var		0.015	SD dependent var		0.122	
Pseudo r-squared		0.090	Number of obs		9285.000	
Chi-square		131.512	Prob > chi2		0.000	
Akaike crit. (AIC)		1339.182	Bayesian crit. (BIC)		1374.863	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.599	0.347	4.62	0.000	0.920 2.279	***
wt	0.484	0.188	2.57	0.010	0.115 0.852	**
exp	0.977	0.197	4.96	0.000	0.591 1.364	***
age	0.568	0.234	2.43	0.015	0.110 1.026	**
gend	0.443	0.184	2.41	0.016	0.082 0.804	**
ms	1.486	0.262	5.67	0.000	0.973 1.999	***
ph	-0.035	0.322	-0.11	0.913	-0.666 0.595	
Constant	-7.175	0.428	-16.78	0.000	-8.013 -6.337	***
Mean dependent var		0.015	SD dependent var		0.122	
Pseudo r-squared		0.118	Number of obs		9285.000	
Chi-square		172.493	Prob > chi2		0.000	
Akaike crit. (AIC)		1304.200	Bayesian crit. (BIC)		1361.289	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

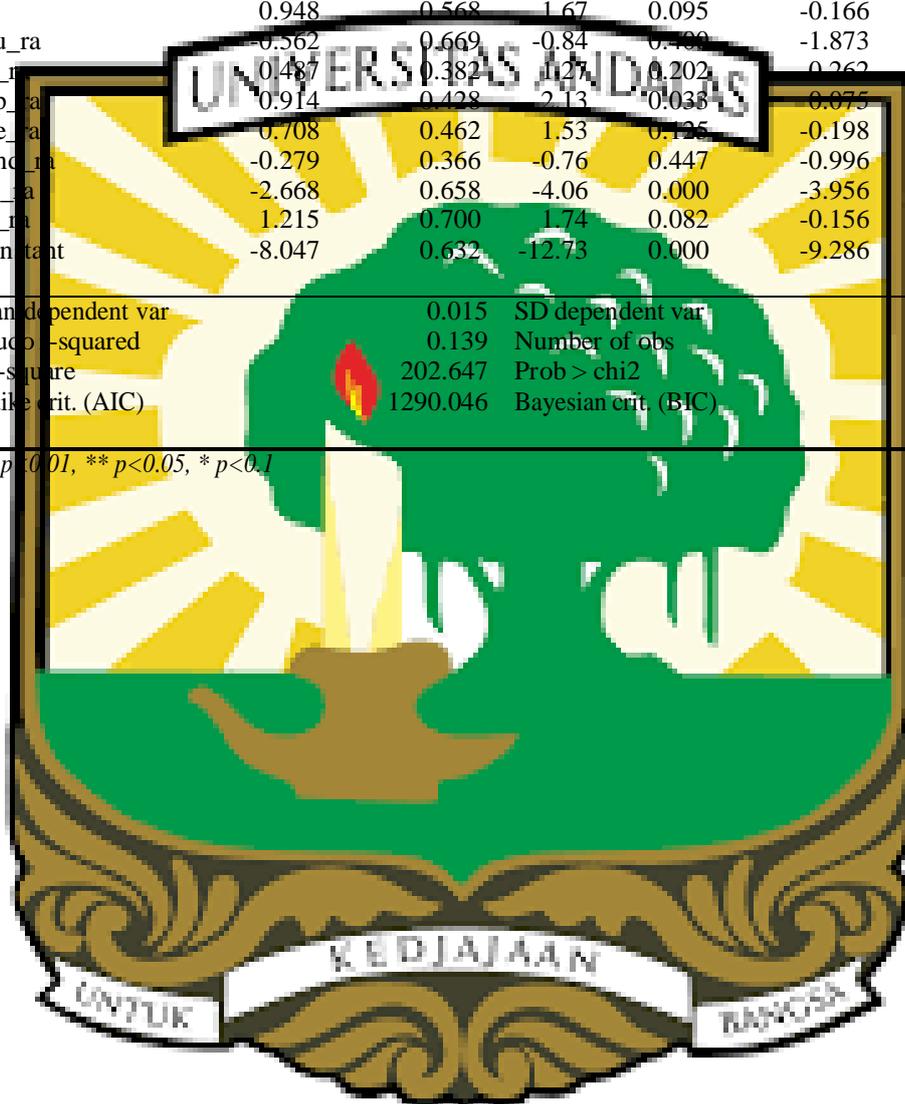
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.614	0.347	4.65	0.000	0.934 2.295	***
wt	0.480	0.188	2.55	0.011	0.112 0.849	**
exp	0.974	0.197	4.94	0.000	0.588 1.361	***
age	0.568	0.234	2.43	0.015	0.110 1.027	**
gend	0.438	0.184	2.38	0.017	0.077 0.799	**
ms	1.485	0.262	5.67	0.000	0.972 1.999	***
ph	-0.029	0.322	-0.09	0.928	-0.659 0.601	
ra	0.099	0.175	0.57	0.571	-0.244 0.443	
Constant	-7.246	0.446	-16.24	0.000	-8.120 -6.371	***
Mean dependent var		0.015	SD dependent var		0.122	
Pseudo r-squared		0.118	Number of obs		9285.000	
Chi-square		172.816	Prob > chi2		0.000	
Akaike crit. (AIC)		1305.877	Bayesian crit. (BIC)		1370.103	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.078	0.647	3.21	0.001	0.810 3.346	***
wt	0.188	0.305	0.62	0.538	-0.409 0.785	
exp	0.383	0.352	1.09	0.277	-0.307 1.074	
age	0.185	0.333	0.56	0.578	-0.467 0.837	
gend	0.581	0.266	2.19	0.029	0.060 1.101	**
ms	3.338	0.574	5.81	0.000	2.212 4.464	***
ph	-0.936	0.594	-1.58	0.115	-2.100 0.229	
ra	0.948	0.568	1.67	0.095	-0.166 2.061	*
edu_ra	-0.562	0.669	-0.84	0.400	-1.873 0.749	
wt_ra	0.487	0.382	1.27	0.202	-0.262 1.236	
exp_ra	-0.914	0.428	-2.13	0.033	-0.075 1.754	**
age_ra	0.708	0.462	1.53	0.125	-0.198 1.614	
gend_ra	-0.279	0.366	-0.76	0.447	-0.996 0.439	
ms_ra	-2.668	0.658	-4.06	0.000	-3.956 -1.379	***
ph_ra	1.215	0.700	1.74	0.082	-0.156 2.587	*
Constant	-8.047	0.632	-12.73	0.000	-9.286 -6.808	***
Mean dependent var		0.015	SD dependent var			0.122
Pseudo-squared		0.139	Number of obs			9285.000
Chi-square		202.647	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1290.046	Bayesian crit. (BIC)			1404.225

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



28. Sulawesi Tenggara

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.124	0.408	2.75	0.006	0.324 1.924	***
wt	1.242	0.272	4.56	0.000	0.709 1.777	***
exp	0.979	0.264	3.71	0.000	0.462 1.496	***
age	2.243	0.294	7.63	0.000	1.656 2.819	***
Constant	-6.911	0.461	-14.98	0.000	-7.816 -6.007	***
Mean dependent var		0.015	SD dependent var			0.122
Pseudo r-squared		0.139	Number of obs			4476.000
Chi-square		98.112	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		616.278	Bayesian crit. (BIC)			648.311

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.303	0.416	3.13	0.002	0.487 2.119	***
wt	1.255	0.274	4.57	0.000	0.717 1.793	***
exp	1.120	0.271	4.14	0.000	0.590 1.651	***
age	1.294	0.384	3.37	0.001	0.542 2.046	***
gend	0.353	0.271	1.30	0.192	-0.177 0.883	
ms	1.537	0.409	3.76	0.000	0.736 2.339	***
ph	-0.233	0.454	-0.51	0.607	-1.123 0.657	
Constant	-7.479	0.566	-13.20	0.000	-8.589 -6.368	***
Mean dependent var		0.015	SD dependent var			0.122
Pseudo r-squared		0.163	Number of obs			4476.000
Chi-square		114.934	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		605.457	Bayesian crit. (BIC)			656.709

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

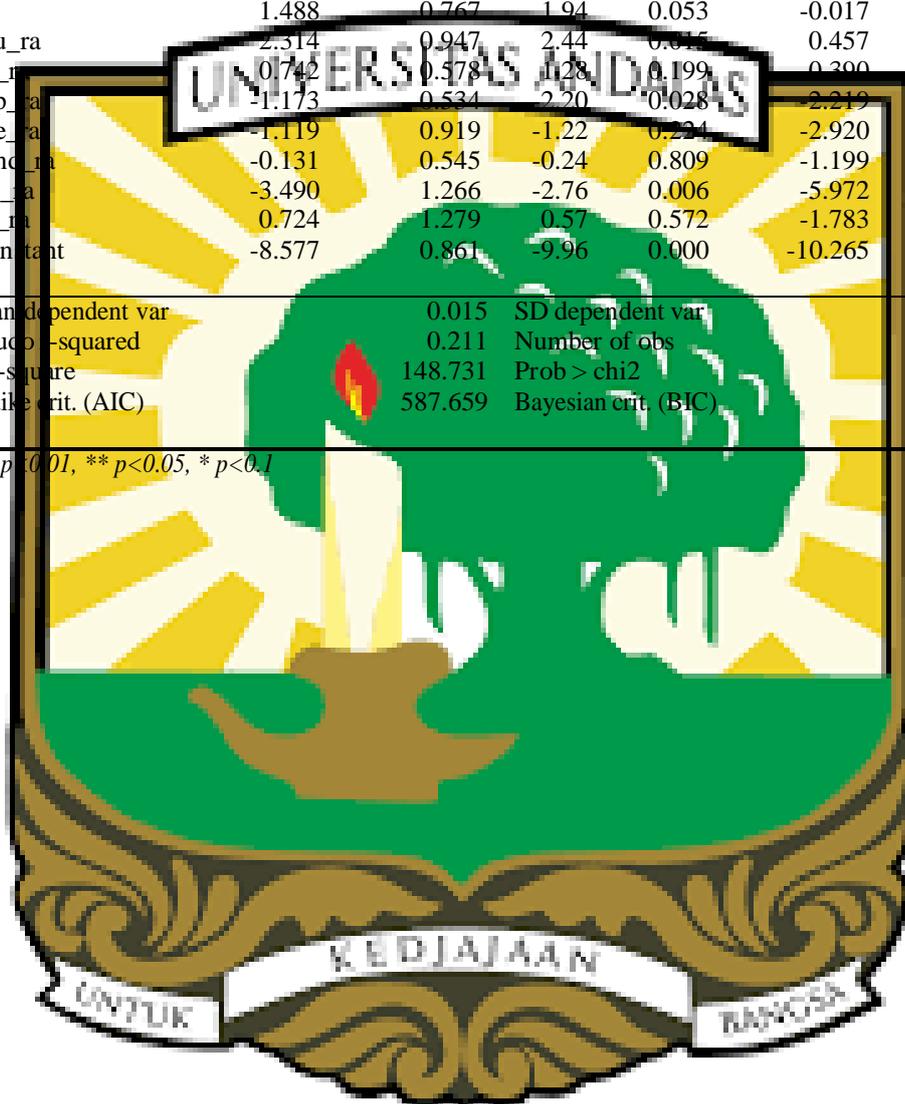
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.367	0.419	3.26	0.001	0.546 2.188	***
wt	1.235	0.275	4.49	0.000	0.696 1.774	***
exp	1.113	0.271	4.10	0.000	0.582 1.645	***
age	1.294	0.384	3.37	0.001	0.542 2.045	***
gend	0.338	0.271	1.25	0.212	-0.193 0.869	
ms	1.501	0.411	3.65	0.000	0.696 2.306	***
ph	-0.207	0.452	-0.46	0.648	-1.094 0.680	
ra	0.283	0.259	1.09	0.275	-0.225 0.790	
Constant	-7.669	0.596	-12.86	0.000	-8.838 -6.500	***
Mean dependent var		0.015	SD dependent var			0.122
Pseudo r-squared		0.165	Number of obs			4476.000
Chi-square		116.135	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		606.256	Bayesian crit. (BIC)			663.914

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	-0.439	0.836	-0.53	0.599	-2.077 1.198	
wt	0.880	0.473	1.86	0.063	-0.047 1.807	*
exp	1.722	0.397	4.34	0.000	0.945 2.500	***
age	2.241	0.754	2.97	0.003	0.763 3.719	***
gend	0.430	0.397	1.08	0.278	-0.347 1.208	
ms	4.022	1.162	3.46	0.001	1.744 6.299	***
ph	-0.847	1.193	-0.71	0.478	-3.185 1.491	
ra	1.488	0.767	1.94	0.053	-0.017 2.992	*
edu_ra	2.314	0.947	2.44	0.015	0.457 4.170	**
wt_ra	0.742	0.578	1.28	0.199	0.300 1.874	
exp_ra	-1.173	0.534	-2.20	0.028	-2.219 -0.127	**
age_ra	-1.119	0.919	-1.22	0.224	-2.920 0.683	
gend_ra	-0.131	0.545	-0.24	0.809	-1.199 0.936	
ms_ra	-3.490	1.266	-2.76	0.006	-5.972 -1.009	***
ph_ra	0.724	1.279	0.57	0.572	-1.783 3.230	
Constant	-8.577	0.861	-9.96	0.000	-10.265 -6.889	***
Mean dependent var		0.015	SD dependent var			0.122
Pseudo-squared		0.211	Number of obs			4476.000
Chi-square		148.731	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		587.659	Bayesian crit. (BIC)			690.163

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



29. Gorontalo

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.982	1.059	1.87	0.061	-0.093 4.057	*
wt	0.869	0.468	1.86	0.064	-0.049 1.786	*
exp	1.123	0.454	2.47	0.013	0.233 2.014	**
age	1.464	0.482	3.04	0.002	0.518 2.409	***
Constant	-7.452	1.117	-6.67	0.000	-9.643 -5.262	***
Mean dependent var		0.014	SD dependent var			0.118
Pseudo r-squared		0.102	Number of obs			1559.000
Chi-square		23.560	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		217.601	Bayesian crit. (BIC)			244.360

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.952	1.067	1.83	0.067	-0.140 4.044	*
wt	0.964	0.476	2.02	0.043	0.030 1.897	**
exp	1.214	0.471	2.58	0.010	0.291 2.137	**
age	0.479	0.626	0.77	0.444	-0.747 1.706	
gend	-1.115	0.549	-2.03	0.042	-2.192 -0.039	**
ms	1.525	0.709	2.15	0.032	0.134 2.915	**
ph	0.163	0.763	0.21	0.831	-1.332 1.658	
Constant	-7.568	1.241	-6.10	0.000	-10.000 -5.136	***
Mean dependent var		0.014	SD dependent var			0.118
Pseudo r-squared		0.158	Number of obs			1559.000
Chi-square		36.422	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		210.739	Bayesian crit. (BIC)			253.554

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

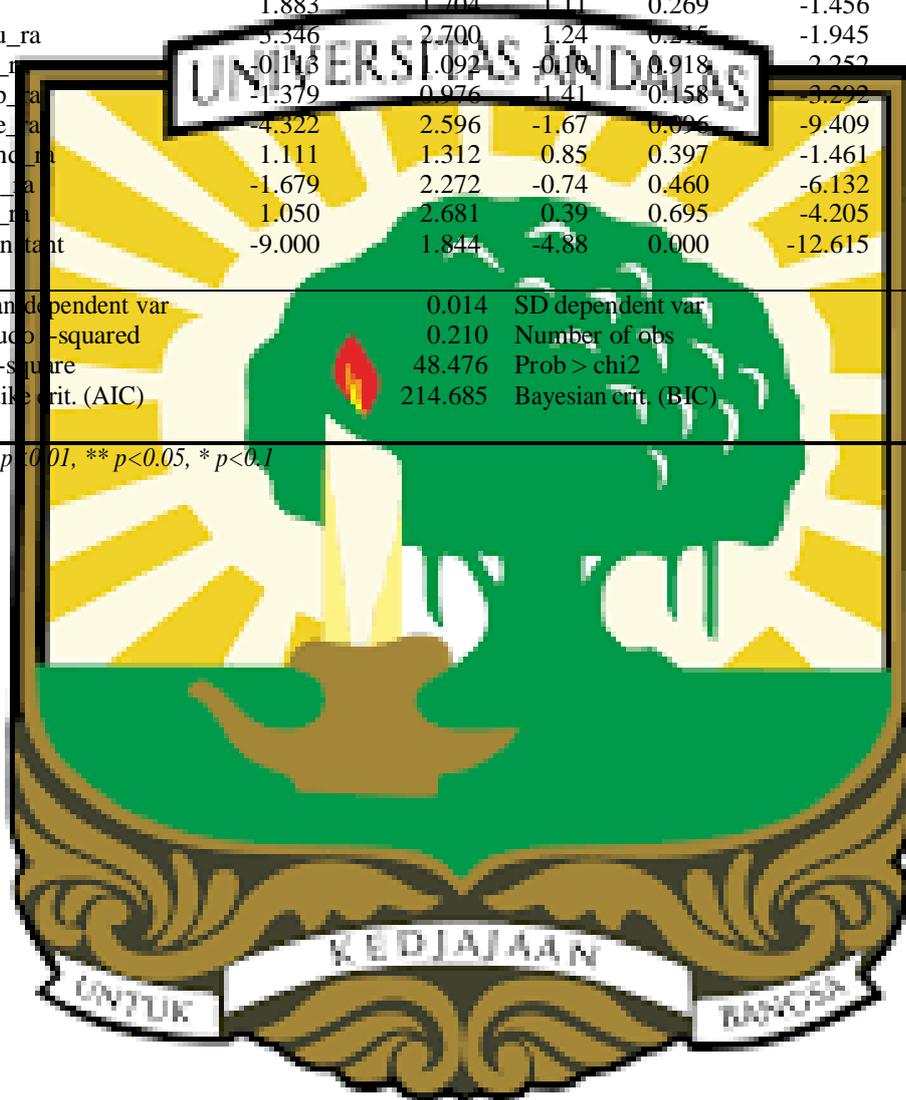
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.926	1.065	1.87	0.061	-0.091 4.083	*
wt	0.935	0.478	1.96	0.051	-0.003 1.873	*
exp	1.221	0.473	2.58	0.010	0.294 2.148	**
age	0.541	0.626	0.86	0.387	-0.685 1.768	
gend	-1.156	0.549	-2.11	0.035	-2.232 -0.080	**
ms	1.475	0.710	2.08	0.038	0.082 2.867	**
ph	0.241	0.756	0.32	0.750	-1.242 1.723	
ra	0.601	0.460	1.31	0.191	-0.300 1.503	
Constant	-8.000	1.294	-6.18	0.000	-10.537 -5.464	***
Mean dependent var		0.014	SD dependent var			0.118
Pseudo r-squared		0.165	Number of obs			1559.000
Chi-square		38.195	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		210.966	Bayesian crit. (BIC)			259.132

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	-0.971	2.534	-0.38	0.702	-5.937 3.996	
wt	1.215	0.943	1.29	0.198	-0.634 3.065	
exp	2.108	0.786	2.68	0.007	0.568 3.648	***
age	4.149	2.479	1.67	0.094	-0.709 9.008	*
gend	-1.950	1.133	-1.72	0.085	-4.170 0.270	*
ms	2.968	2.126	1.40	0.163	-1.199 7.134	
ph	-0.892	2.551	-0.35	0.726	-5.892 4.107	
ra	1.883	1.704	1.11	0.269	-1.456 5.223	
edu_ra	5.346	2.700	1.24	0.215	-1.945 8.638	
wt_ra	-0.113	0.992	-0.10	0.918	2.252 2.027	
exp_ra	-1.379	0.976	-1.41	0.158	-3.292 0.535	
age_ra	-4.322	2.596	-1.67	0.096	-9.409 0.765	*
gend_ra	1.111	1.312	0.85	0.397	-1.461 3.683	
ms_ra	-1.679	2.272	-0.74	0.460	-6.132 2.774	
ph_ra	1.050	2.681	0.39	0.695	-4.205 6.305	
Constant	-9.000	1.844	-4.88	0.000	-12.615 -5.385	***
Mean dependent var		0.014	SD dependent var			0.118
Pseudo-squared		0.210	Number of obs			1559.000
Chi-square		48.476	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		214.685	Bayesian crit. (BIC)			300.314

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



30. Sulawesi Barat

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.400	0.638	2.19	0.028	0.149 2.650	**
wt	0.755	0.356	2.25	0.024	0.098 1.413	**
exp	0.663	0.365	1.82	0.069	-0.052 1.378	*
age	1.703	0.358	4.75	0.000	1.001 2.405	***
Constant	-5.882	0.658	-8.95	0.000	-7.172 -4.594	***
Mean dependent var		0.030	SD dependent var			0.171
Pseudo r-squared		0.113	Number of obs			1435.000
Chi-square		43.658	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		352.704	Bayesian crit. (BIC)			379.049

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.610	0.651	2.48	0.013	0.335 2.885	**
wt	0.774	0.341	2.27	0.023	0.105 1.442	**
exp	0.743	0.373	1.99	0.046	0.012 1.473	**
age	0.537	0.426	1.26	0.208	-0.298 1.372	
gend	0.119	0.342	0.35	0.727	-0.551 0.790	
ms	1.476	0.499	2.96	0.003	0.498 2.454	***
ph	1.278	0.797	1.60	0.109	-0.284 2.840	
Constant	-7.578	0.962	-7.88	0.000	-9.464 -5.693	***
Mean dependent var		0.030	SD dependent var			0.171
Pseudo r-squared		0.161	Number of obs			1435.000
Chi-square		62.086	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		340.277	Bayesian crit. (BIC)			382.428

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

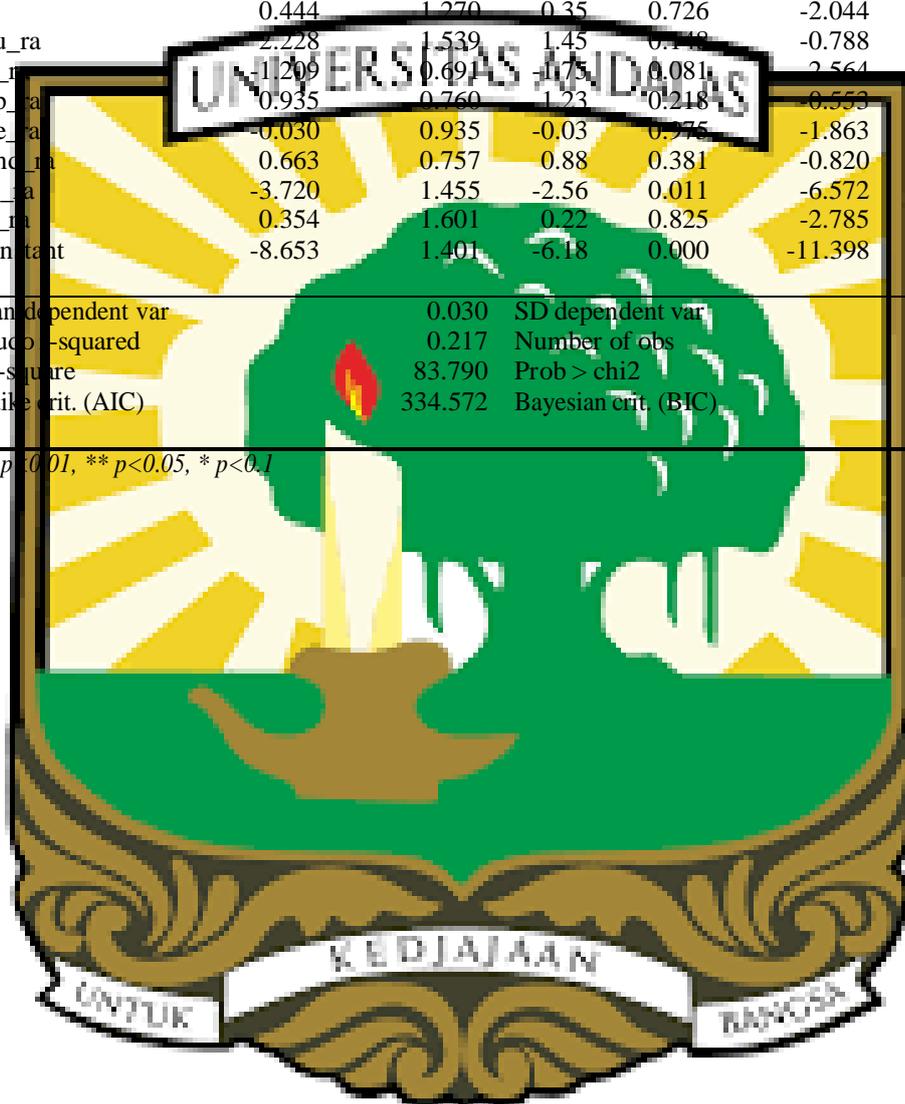
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.610	0.651	2.47	0.013	0.334 2.886	**
wt	0.785	0.346	2.27	0.023	0.107 1.464	**
exp	0.737	0.374	1.97	0.049	0.003 1.470	**
age	0.528	0.429	1.23	0.218	-0.312 1.368	
gend	0.123	0.343	0.36	0.720	-0.549 0.794	
ms	1.485	0.501	2.96	0.003	0.503 2.467	***
ph	1.271	0.798	1.59	0.111	-0.293 2.836	
ra	-0.069	0.334	-0.21	0.836	-0.725 0.586	
Constant	-7.550	0.971	-7.78	0.000	-9.453 -5.647	***
Mean dependent var		0.030	SD dependent var			0.171
Pseudo r-squared		0.161	Number of obs			1435.000
Chi-square		62.129	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		342.234	Bayesian crit. (BIC)			389.654

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	0.824	0.855	0.96	0.335	-0.852 2.500	
wt	1.336	0.446	3.00	0.003	0.463 2.209	***
exp	0.325	0.522	0.62	0.533	-0.697 1.348	
age	0.658	0.642	1.03	0.305	-0.599 1.915	
gend	-0.103	0.428	-0.24	0.810	-0.942 0.736	
ms	3.858	1.288	2.99	0.003	1.333 6.383	***
ph	0.841	1.322	0.64	0.525	-1.751 3.433	
ra	0.444	1.270	0.35	0.726	-2.044 2.933	
edu_ra	2.228	1.539	1.45	0.148	-0.788 5.245	
wt_ra	-1.209	0.691	-1.75	0.081	-2.564 0.147	*
exp_ra	-0.935	0.760	-1.23	0.218	-2.553 0.683	
age_ra	-0.030	0.935	-0.03	0.975	-1.863 1.804	
gend_ra	0.663	0.757	0.88	0.381	-0.820 2.146	
ms_ra	-3.720	1.455	-2.56	0.011	-6.572 -0.868	**
ph_ra	0.354	1.601	0.22	0.825	-2.785 3.492	
Constant	-8.653	1.401	-6.18	0.000	-11.398 -5.907	***
Mean dependent var		0.030	SD dependent var			0.171
Pseudo-squared		0.217	Number of obs			1435.000
Chi-square		83.790	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		334.572	Bayesian crit. (BIC)			418.875

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



31. Maluku

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.216	0.496	2.45	0.014	0.243	2.188 **
wt	1.004	0.277	3.62	0.000	0.461	1.547 ***
exp	1.431	0.337	4.24	0.000	0.770	2.092 ***
age	2.351	0.310	7.59	0.000	1.743	2.958 ***
Constant	-6.771	0.534	-12.69	0.000	-7.817	-5.725 ***
Mean dependent var		0.018	SD dependent var			0.131
Pseudo r-squared		0.150	Number of obs			3982.000
Chi-square		105.615	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		608.894	Bayesian crit. (BIC)			640.341

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.504	0.509	2.96	0.003	0.507	2.501 ***
wt	1.155	0.282	4.09	0.000	0.601	1.708 ***
exp	1.773	0.352	5.04	0.000	1.083	2.463 ***
age	0.592	0.341	1.74	0.083	-0.077	1.261 *
gend	-0.036	0.257	-0.14	0.887	-0.541	0.468
ms	2.885	0.542	5.32	0.000	1.822	3.948 ***
ph	1.165	0.787	1.48	0.139	-0.377	2.707
Constant	-9.209	0.920	-10.01	0.000	-11.012	-7.406 ***
Mean dependent var		0.018	SD dependent var			0.131
Pseudo r-squared		0.228	Number of obs			3982.000
Chi-square		160.813	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		559.695	Bayesian crit. (BIC)			610.011

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

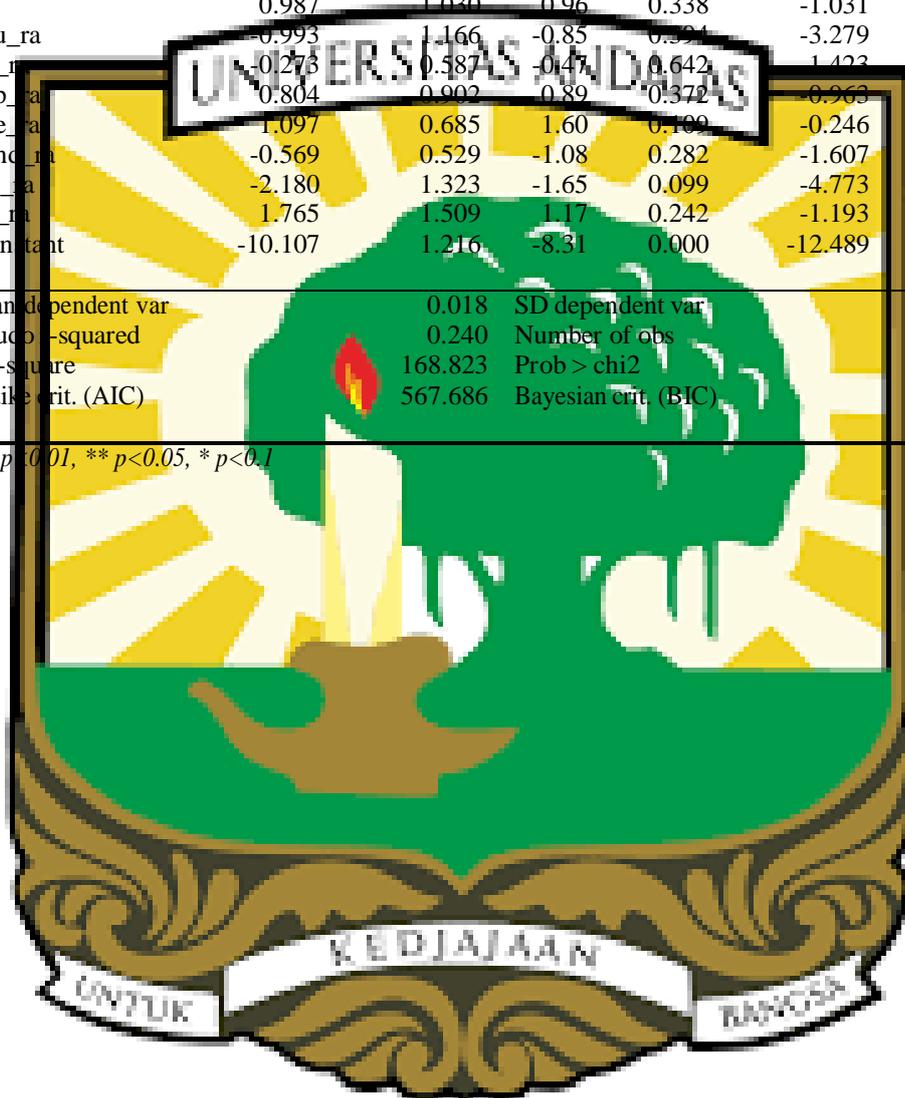
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.850	0.508	3.65	0.000	0.554	2.546 ***
wt	1.126	0.283	3.98	0.000	0.572	1.681 ***
exp	1.702	0.356	4.78	0.000	1.004	2.399 ***
age	0.588	0.342	1.72	0.086	-0.082	1.258 *
gend	-0.077	0.259	-0.30	0.765	-0.586	0.431
ms	2.854	0.544	5.25	0.000	1.788	3.919 ***
ph	1.185	0.786	1.51	0.132	-0.356	2.726
ra	0.337	0.266	1.26	0.206	-0.185	0.859
Constant	-9.402	0.936	-10.04	0.000	-11.237	-7.567 ***
Mean dependent var		0.018	SD dependent var			0.131
Pseudo r-squared		0.231	Number of obs			3982.000
Chi-square		162.444	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		560.064	Bayesian crit. (BIC)			616.670

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	2.429	1.093	2.22	0.026	0.287	4.571	**
wt	1.372	0.480	2.86	0.004	0.430	2.313	***
exp	1.126	0.811	1.39	0.165	-0.463	2.715	
age	-0.068	0.508	-0.13	0.894	-1.063	0.928	
gend	0.278	0.416	0.67	0.504	-0.538	1.093	
ms	4.413	1.196	3.69	0.000	2.070	6.757	***
ph	-0.129	1.251	-0.10	0.918	-2.582	2.324	
ra	0.987	1.030	0.96	0.338	-1.031	3.005	
edu_ra	-0.993	1.166	-0.85	0.394	-3.279	1.293	
wt_ra	-0.273	0.587	-0.47	0.642	-1.423	0.878	
exp_ra	-0.804	0.902	-0.89	0.372	-0.963	2.572	
age_ra	1.097	0.685	1.60	0.109	-0.246	2.439	
gend_ra	-0.569	0.529	-1.08	0.282	-1.607	0.469	
ms_ra	-2.180	1.323	-1.65	0.099	-4.773	0.414	*
ph_ra	1.765	1.509	1.17	0.242	-1.193	4.722	
Constant	-10.107	1.216	-8.31	0.000	-12.489	-7.724	***
Mean dependent var		0.018	SD dependent var			0.131	
Pseudo-squared		0.240	Number of obs			3982.000	
Chi-square		168.823	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		567.686	Bayesian crit. (BIC)			668.318	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



32. Maluku Utara

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.092	1.040	2.01	0.044	0.054	4.129 **
wt	0.922	0.359	2.57	0.010	0.218	1.627 **
exp	1.474	0.364	4.04	0.000	0.760	2.188 ***
age	3.008	0.474	6.34	0.000	2.072	3.937 ***
Constant	-8.582	1.086	-7.90	0.000	-10.711	-6.454 ***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.115
Pseudo r-squared		0.222	Number of obs			2855.000
Chi-square		89.660	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		324.094	Bayesian crit. (BIC)			353.879

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.246	1.056	2.13	0.034	0.175	4.316 **
wt	0.992	0.370	2.68	0.007	0.267	1.718 ***
exp	1.781	0.382	4.66	0.000	1.032	2.530 ***
age	1.250	0.510	2.45	0.014	0.250	2.249 **
gend	0.013	0.361	0.04	0.971	-0.694	0.720
ms	3.750	1.073	3.50	0.000	1.648	5.853 ***
ph	1.107	1.070	1.03	0.301	-0.989	3.203
Constant	-11.611	1.687	-6.88	0.000	-14.917	-8.305 ***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.115
Pseudo r-squared		0.316	Number of obs			2855.000
Chi-square		127.407	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		292.347	Bayesian crit. (BIC)			340.002

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

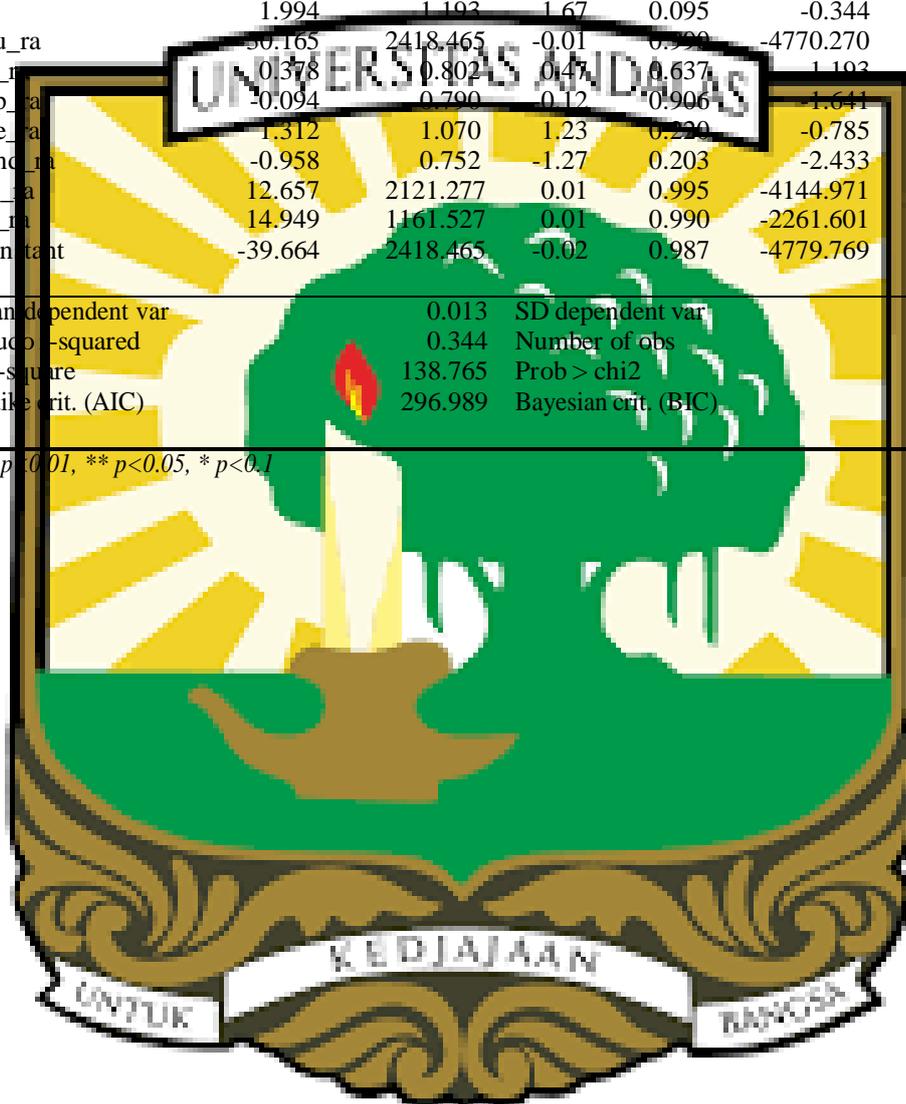
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.263	1.055	2.15	0.032	0.196	4.330 **
wt	0.935	0.378	2.47	0.013	0.194	1.676 **
exp	1.807	0.385	4.69	0.000	1.052	2.563 ***
age	1.278	0.511	2.50	0.012	0.275	2.280 **
gend	-0.002	0.362	-0.01	0.996	-0.711	0.707
ms	3.735	1.070	3.49	0.000	1.637	5.833 ***
ph	1.153	1.069	1.08	0.281	-0.942	3.248
ra	0.264	0.358	0.74	0.461	-0.438	0.966
Constant	-11.803	1.715	-6.88	0.000	-15.165	-8.441 ***
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.115
Pseudo r-squared		0.317	Number of obs			2855.000
Chi-square		127.953	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		293.802	Bayesian crit. (BIC)			347.413

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	31.853	2418.466	0.01	0.989	-4708.253	4771.959	
wt	0.777	0.627	1.24	0.215	-0.451	2.005	
exp	1.939	0.539	3.60	0.000	0.882	2.996	***
age	0.666	0.675	0.99	0.324	-0.658	1.990	
gend	0.483	0.535	0.90	0.367	-0.566	1.531	
ms	3.848	1.293	2.98	0.003	1.314	6.381	***
ph	-0.406	1.355	-0.30	0.765	-3.061	2.250	
ra	1.994	1.193	1.67	0.095	-0.344	4.331	*
edu_ra	-30.165	2418.465	-0.01	0.990	-4770.270	4709.940	
wt_ra	0.378	0.802	0.47	0.637	-1.193	1.950	
exp_ra	-0.094	0.790	-0.12	0.906	-1.641	1.454	
age_ra	1.312	1.070	1.23	0.220	-0.785	3.408	
gend_ra	-0.958	0.752	-1.27	0.203	-2.433	0.517	
ms_ra	12.657	2121.277	0.01	0.995	-4144.971	4170.284	
ph_ra	14.949	1161.527	0.01	0.990	-2261.601	2291.500	
Constant	-39.664	2418.465	-0.02	0.987	-4779.769	4700.441	
Mean dependent var		0.013	SD dependent var			0.115	
Pseudo-squared		0.344	Number of obs			2855.000	
Chi-square		138.765	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		296.989	Bayesian crit. (BIC)			392.299	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



33. Papua Barat

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	-1.569	0.606	-2.59	0.010	-2.757 -0.380	**
wt	0.630	0.256	2.46	0.014	0.129 1.132	**
exp	1.238	0.275	4.49	0.000	0.698 1.778	***
age	3.228	0.375	8.62	0.000	2.477 3.982	***
Constant	-5.900	0.393	-15.01	0.000	-6.670 -5.130	***
Mean dependent var		0.025	SD dependent var			0.157
Pseudo r-squared		0.252	Number of obs			2877.000
Chi-square		171.474	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		519.068	Bayesian crit. (BIC)			548.890

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	-1.648	0.614	-2.68	0.007	-2.851 -0.445	***
wt	0.644	0.262	2.46	0.014	0.131 1.157	**
exp	1.332	0.286	4.66	0.000	0.771 1.892	***
age	1.279	0.398	3.22	0.001	0.500 2.059	***
gend	-0.154	0.269	-0.57	0.567	-0.681 0.373	
ms	4.013	1.052	3.81	0.000	1.951 6.075	***
ph	1.237	0.759	1.63	0.103	-0.252 2.725	
Constant	-8.928	1.193	-7.48	0.000	-11.266 -6.590	***
Mean dependent var		0.025	SD dependent var			0.157
Pseudo r-squared		0.334	Number of obs			2877.000
Chi-square		227.286	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		469.256	Bayesian crit. (BIC)			516.972

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

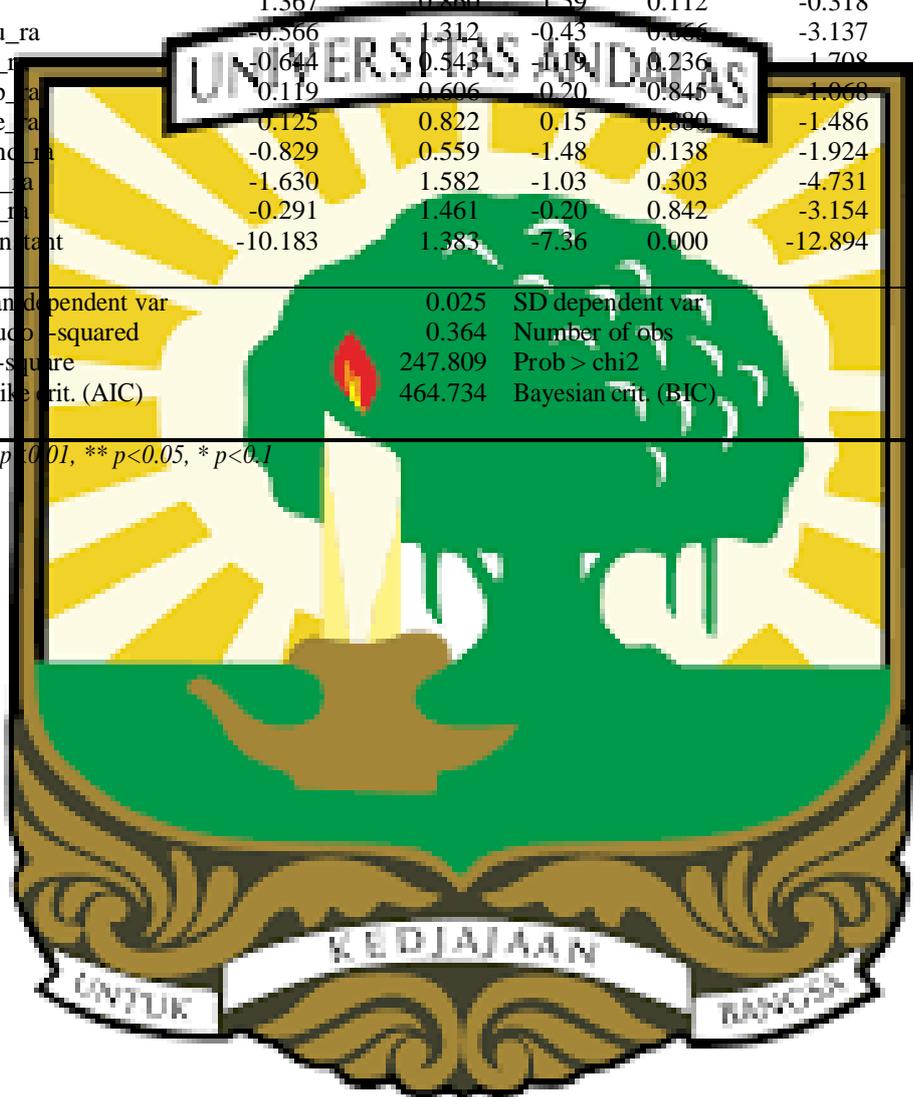
eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	-1.830	0.621	-2.95	0.004	-2.746 -0.914	**
wt	0.764	0.266	2.87	0.004	0.242 1.285	***
exp	1.510	0.296	5.11	0.000	0.930 2.090	***
age	1.309	0.404	3.24	0.001	0.517 2.101	***
gend	-0.079	0.272	-0.29	0.773	-0.612 0.455	
ms	4.134	1.051	3.93	0.000	2.075 6.194	***
ph	1.414	0.770	1.84	0.067	-0.096 2.924	*
ra	-0.882	0.270	-3.27	0.001	-1.411 -0.353	***
Constant	-8.923	1.217	-7.33	0.000	-11.307 -6.538	***
Mean dependent var		0.025	SD dependent var			0.157
Pseudo r-squared		0.350	Number of obs			2877.000
Chi-square		238.294	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		460.248	Bayesian crit. (BIC)			513.929

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	-1.315	0.797	-1.65	0.099	-2.877 0.247	*
wt	1.053	0.358	2.94	0.003	0.351 1.754	***
exp	1.542	0.448	3.44	0.001	0.664 2.421	***
age	1.314	0.533	2.47	0.014	0.270 2.359	**
gend	0.307	0.356	0.86	0.388	-0.390 1.005	
ms	4.863	1.325	3.67	0.000	2.266 7.459	***
ph	1.699	0.912	1.86	0.063	-0.089 3.487	*
ra	1.367	0.860	1.59	0.112	-0.318 3.053	
edu_ra	-0.566	1.312	-0.43	0.666	-3.137 2.006	
wt_ra	-0.644	0.543	-1.19	0.236	-1.708 0.421	
exp_ra	-0.119	0.606	0.20	0.845	-1.068 1.306	
age_ra	0.125	0.822	0.15	0.880	-1.486 1.735	
gend_ra	-0.829	0.559	-1.48	0.138	-1.924 0.266	
ms_ra	-1.630	1.582	-1.03	0.303	-4.731 1.471	
ph_ra	-0.291	1.461	-0.20	0.842	-3.154 2.572	
Constant	-10.183	1.383	-7.36	0.000	-12.894 -7.473	***
Mean dependent var		0.025	SD dependent var			0.157
Pseudo-squared		0.364	Number of obs			2877.000
Chi-square		247.809	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		464.734	Bayesian crit. (BIC)			560.166

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



34. Papua

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	-9.239	1.129	-8.18	0.000	-11.453	-7.026 ***
wt	0.776	0.423	1.83	0.067	-0.053	1.605 *
exp	1.139	0.527	2.16	0.031	0.106	2.171 **
age	3.844	0.464	8.29	0.000	2.933	4.754 ***
gend	-1.226	0.446	-2.75	0.006	-2.099	-0.352 ***
ms	4.672	1.067	4.38	0.000	2.581	6.763 ***
ph	3.679	1.083	3.40	0.001	1.557	5.801 ***
ra	-1.550	0.476	-3.26	0.001	-2.483	-0.617 ***
Constant	-9.266	1.478	-6.27	0.000	-12.163	-6.370 ***
Mean dependent var		0.016	SD dependent var			0.125
Pseudo r-squared		0.799	Number of obs			5502.000
Chi-square		721.017	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		199.421	Bayesian crit. (BIC)			258.937

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	-7.717	1.024	-7.54	0.000	-9.724	-5.709 ***
wt	0.651	0.350	1.86	0.063	-0.036	1.338 *
exp	1.057	0.386	2.74	0.006	0.301	1.813 ***
age	5.330	0.361	14.76	0.000	4.622	6.037 ***
Constant	-4.938	0.360	-13.70	0.000	-5.644	-4.231 ***
Mean dependent var		0.016	SD dependent var			0.125
Pseudo r-squared		0.647	Number of obs			5502.000
Chi-square		583.923	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		328.515	Bayesian crit. (BIC)			361.580

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	-8.127	1.045	-7.78	0.000	-10.174	-6.080 ***
wt	0.897	0.393	2.28	0.023	0.126	1.667 **
exp	1.329	0.482	2.76	0.006	0.385	2.273 ***
age	3.486	0.405	8.62	0.000	2.693	4.279 ***
gend	-0.810	0.393	-2.06	0.039	-1.579	-0.040 **
ms	4.487	1.071	4.19	0.000	2.389	6.585 ***
ph	3.386	1.101	3.07	0.002	1.227	5.544 ***
Constant	-10.174	1.535	-6.63	0.000	-13.182	-7.167 ***
Mean dependent var		0.016	SD dependent var			0.125
Pseudo r-squared		0.772	Number of obs			5502.000
Chi-square		696.287	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		222.151	Bayesian crit. (BIC)			275.054

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	-8.574	1.077	-7.96	0.000	-10.686	-6.463	***
wt	0.915	0.405	2.26	0.024	0.123	1.708	**
exp	1.255	0.496	2.53	0.011	0.282	2.228	**
age	3.422	0.414	8.27	0.000	2.611	4.234	***
gend	-0.829	0.400	-2.07	0.038	-1.612	-0.045	**
ms	4.607	1.056	4.36	0.000	2.537	6.677	***
ph	3.678	1.084	3.39	0.001	1.553	5.804	***
ra	-1.240	0.435	-2.85	0.004	-2.093	-0.387	***
Constant	-9.631	1.486	-6.48	0.000	-12.544	-6.717	***
Mean dependent var		0.016	SD dependent var			0.125	
Pseudo R-squared		0.781	Number of obs			5502.000	
Chi-square		704.799	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		215.639	Bayesian crit. (BIC)			275.155	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ **Logistic regression**

eu	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	-21.791	3831.663	-0.01	0.995	-7531.711	7488.130	
wt	0.633	0.659	0.96	0.337	-0.659	1.924	
exp	2.385	0.986	2.42	0.016	0.452	4.317	**
age	1.947	0.648	3.00	0.003	0.677	3.217	***
gend	0.053	0.615	0.09	0.932	-1.153	1.259	
ms	5.406	1.219	4.44	0.000	3.018	7.795	***
ph	6.163	2.743	2.25	0.025	0.787	11.538	**
ra	-3.877	2.955	-1.31	0.190	-9.669	1.915	
edu_ra	13.134	3831.663	0.00	0.997	-7496.787	7523.055	
wt_ra	0.308	0.864	0.36	0.722	-1.386	2.002	
exp_ra	-1.973	1.254	-1.57	0.116	-4.431	0.485	
age_ra	3.661	1.110	3.30	0.001	1.485	5.837	***
gend_ra	-2.779	1.124	-2.47	0.013	-4.982	-0.575	**
ms_ra	-0.226	1.365	-0.17	0.869	-2.902	2.450	
ph_ra	-2.379	2.749	-0.86	0.387	-7.767	3.009	
Constant	-10.278	1.767	-5.82	0.000	-13.742	-6.815	***
Mean dependent var		0.016	SD dependent var			0.125	
Pseudo R-squared		0.809	Number of obs			5502.000	
Chi-square		730.234	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		204.204	Bayesian crit. (BIC)			310.010	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Lampiran 6. Hasil Analisis Regresi Logistik Model Durasi Menganggur

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.446	0.238	6.08	0.000	0.980 1.913	***
wt	0.785	0.174	4.53	0.000	0.445 1.125	***
exp	0.178	0.133	1.34	0.181	-0.083 0.439	
age	0.927	0.160	5.79	0.000	0.613 1.241	***
Constant	-4.012	0.252	-15.91	0.000	-4.506 -3.518	***
Mean dependent var		0.119				0.324
Pseudo r-squared		0.086				2384.000
Chi-square		150.274				0.000
Akaike crit. (AIC)		1600.919				1629.801

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.461	0.239	6.11	0.000	0.993 1.930	***
wt	0.768	0.175	4.40	0.000	0.426 1.111	***
exp	0.224	0.135	1.66	0.096	-0.040 0.489	*
age	0.608	0.183	3.32	0.001	0.249 0.967	***
gend	0.403	0.161	0.64	0.523	-0.213 0.419	
ms	0.426	0.178	2.40	0.016	0.079 0.774	**
ph	0.314	0.173	1.82	0.069	-0.025 0.654	*
Constant	-4.293	0.272	-15.78	0.000	-4.827 -3.760	***
Mean dependent var		0.119				0.324
Pseudo r-squared		0.095				2384.000
Chi-square		165.049				0.000
Akaike crit. (AIC)		1592.144				1638.356

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

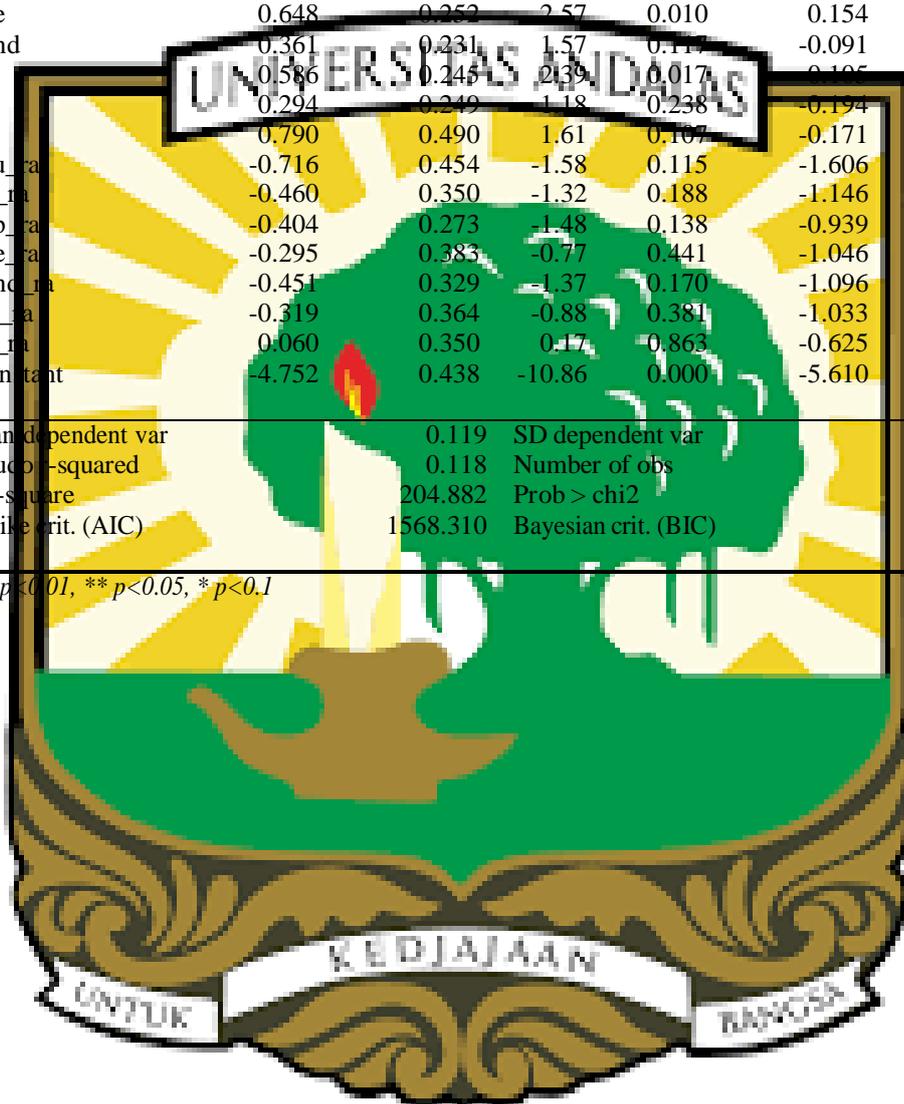
du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.420	0.240	5.92	0.000	0.950 1.889	***
wt	0.740	0.175	4.22	0.000	0.396 1.084	***
exp	0.254	0.136	1.86	0.062	-0.013 0.521	*
age	0.535	0.185	2.89	0.004	0.173 0.898	***
gend	0.150	0.163	0.92	0.358	-0.170 0.469	
ms	0.452	0.178	2.53	0.011	0.102 0.802	**
ph	0.308	0.174	1.76	0.078	-0.034 0.650	*
ra	-0.693	0.133	-5.21	0.000	-0.953 -0.432	***
Constant	-3.872	0.282	-13.74	0.000	-4.425 -3.320	***
Mean dependent var		0.119				0.324
Pseudo r-squared		0.110				2384.000
Chi-square		192.204				0.000
Akaike crit. (AIC)		1566.989				1618.977

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.881	0.386	4.87	0.000	1.124 2.639	***
wt	1.008	0.265	3.80	0.000	0.489 1.527	***
exp	0.450	0.194	2.32	0.020	0.070 0.830	**
age	0.648	0.252	2.57	0.010	0.154 1.141	**
gend	0.361	0.231	1.57	0.117	-0.091 0.813	
ms	0.586	0.245	2.39	0.017	0.105 1.067	**
ph	0.294	0.249	1.18	0.238	-0.194 0.782	
ra	0.790	0.490	1.61	0.107	-0.171 1.750	
edu_ra	-0.716	0.454	-1.58	0.115	-1.606 0.174	
wt_ra	-0.460	0.350	-1.32	0.188	-1.146 0.225	
exp_ra	-0.404	0.273	-1.48	0.138	-0.939 0.130	
age_ra	-0.295	0.383	-0.77	0.441	-1.046 0.456	
gend_ra	-0.451	0.329	-1.37	0.170	-1.096 0.194	
ms_ra	-0.319	0.364	-0.88	0.381	-1.033 0.395	
ph_ra	0.060	0.350	0.17	0.863	-0.625 0.745	
Constant	-4.752	0.438	-10.86	0.000	-5.610 -3.895	***
Mean dependent var		0.119	SD dependent var			0.324
Pseudo R-squared		0.118	Number of obs			2384.000
Chi-square		204.882	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1568.310	Bayesian crit. (BIC)			1660.735

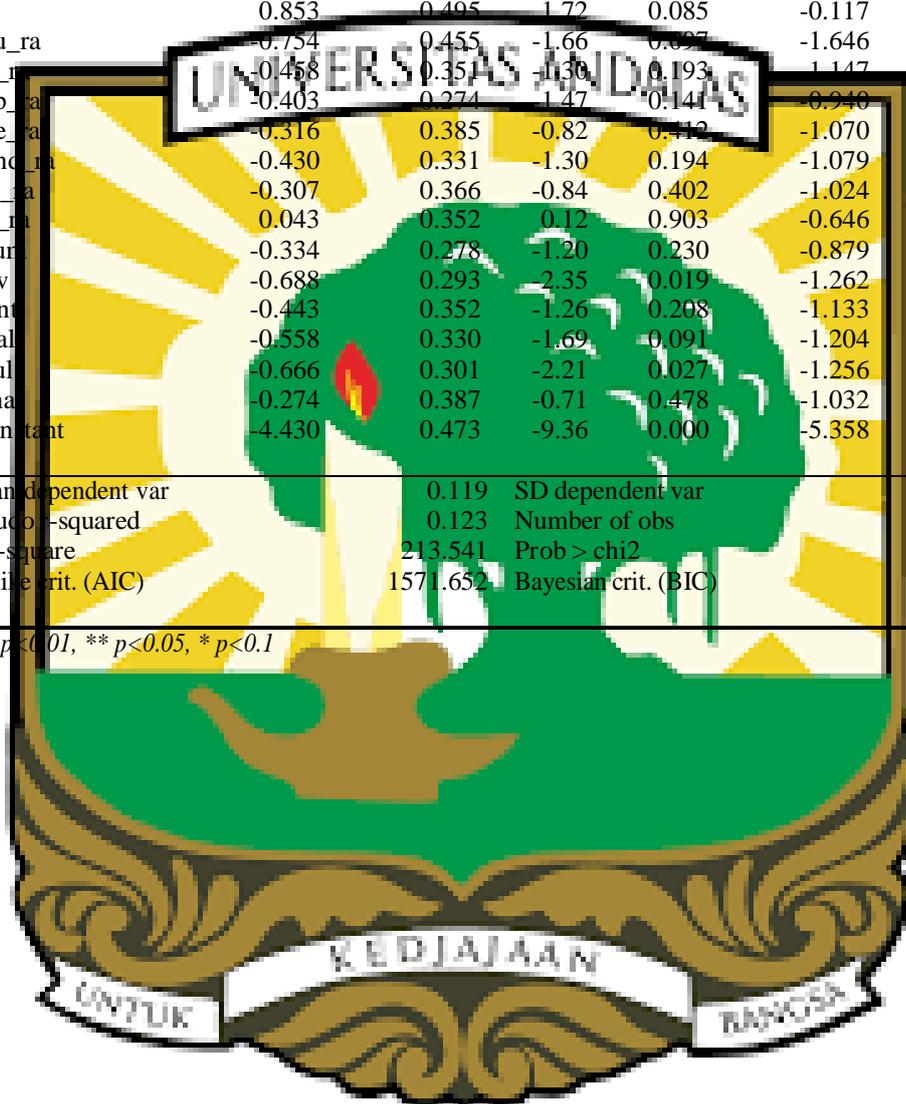
*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	1.970	0.388	5.08	0.000	1.210	2.730	***
wt	1.010	0.266	3.80	0.000	0.489	1.531	***
exp	0.491	0.197	2.49	0.013	0.105	0.878	**
age	0.685	0.253	2.71	0.007	0.190	1.180	***
gend	0.352	0.233	1.51	0.130	-0.104	0.808	
ms	0.605	0.248	2.44	0.015	0.119	1.090	**
ph	0.354	0.252	1.41	0.160	-0.140	0.847	
ra	0.853	0.495	1.72	0.085	-0.117	1.822	*
edu_ra	-0.754	0.455	-1.66	0.097	-1.646	0.137	*
wt_ra	-0.458	0.351	-1.30	0.193	-1.147	0.231	
exp_ra	-0.403	0.274	-1.47	0.141	-0.940	0.133	
age_ra	-0.316	0.385	-0.82	0.412	-1.070	0.438	
gend_ra	-0.430	0.331	-1.30	0.194	-1.079	0.219	
ms_ra	-0.307	0.366	-0.84	0.402	-1.024	0.410	
ph_ra	0.043	0.352	0.12	0.903	-0.646	0.732	
psur	-0.334	0.278	-1.20	0.230	-0.879	0.211	
pjw	-0.688	0.293	-2.35	0.019	-1.262	-0.113	**
pbnt	-0.443	0.352	-1.26	0.208	-1.133	0.246	
pkal	-0.558	0.330	-1.69	0.091	-1.204	0.088	*
psul	-0.666	0.301	-2.21	0.027	-1.256	-0.076	**
pma	-0.274	0.387	-0.71	0.478	-1.032	0.483	
Constant	-4.430	0.473	-9.36	0.000	-5.358	-3.502	***
Mean dependent var		0.119	SD dependent var			0.324	
Pseudo-squared		0.123	Number of obs			2384.000	
Chi-square		213.541	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		1571.652	Bayesian crit. (BIC)			1698.736	

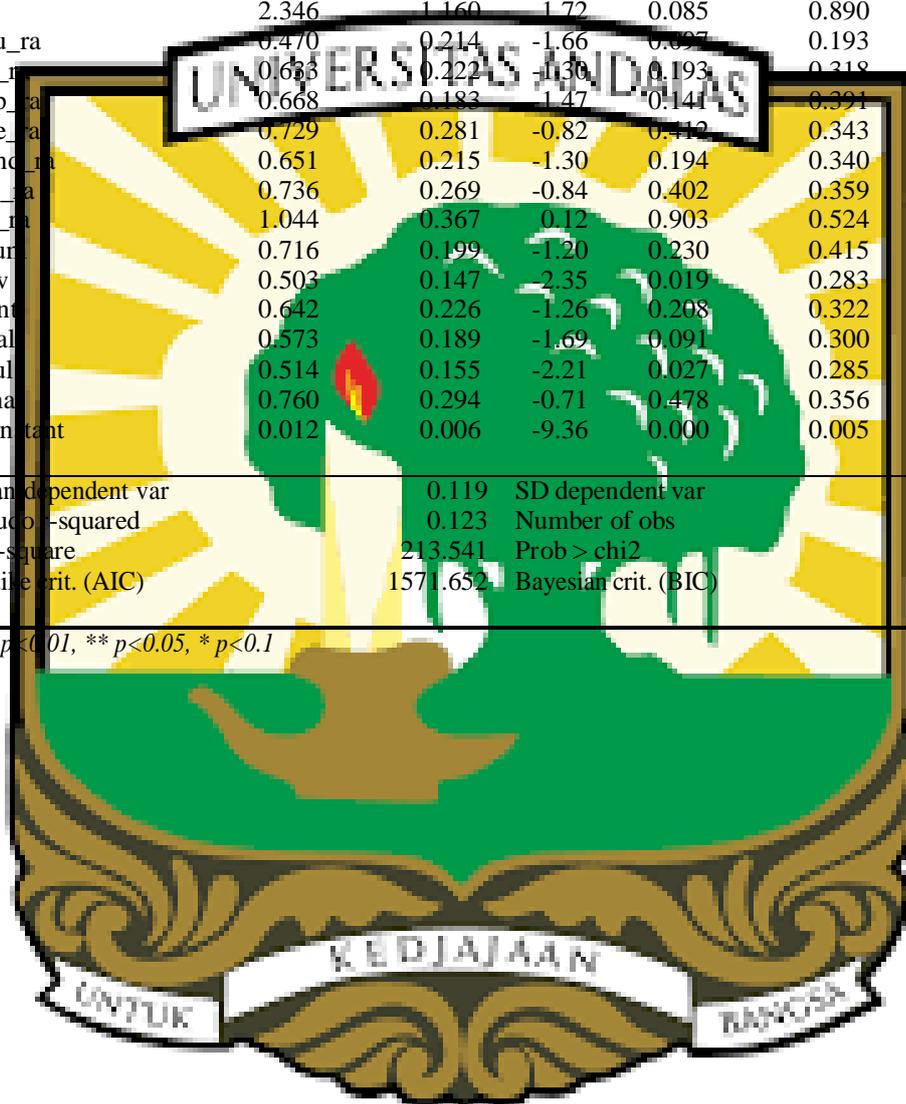
*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



Logistic regression

du	Odds Ratio	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	7.171	2.780	5.08	0.000	3.354	15.333	***
wt	2.745	0.730	3.80	0.000	1.630	4.621	***
exp	1.634	0.322	2.49	0.013	1.110	2.406	**
age	1.984	0.501	2.71	0.007	1.209	3.256	***
gend	1.422	0.331	1.51	0.130	0.901	2.242	
ms	1.831	0.453	2.44	0.015	1.127	2.974	**
ph	1.424	0.358	1.41	0.160	0.870	2.333	
ra	2.346	1.160	1.72	0.085	0.890	6.185	*
edu_ra	0.470	0.214	-1.66	0.097	0.193	1.147	*
wt_ra	0.633	0.222	-1.30	0.193	0.218	1.260	
exp_ra	0.668	0.183	-1.47	0.141	0.391	1.143	
age_ra	0.729	0.281	-0.82	0.412	0.343	1.550	
gend_ra	0.651	0.215	-1.30	0.194	0.340	1.245	
ms_ra	0.736	0.269	-0.84	0.402	0.359	1.507	
ph_ra	1.044	0.367	0.12	0.903	0.524	2.080	
psur	0.716	0.199	-1.20	0.230	0.415	1.235	
pjw	0.503	0.147	-2.35	0.019	0.283	0.893	**
pbnt	0.642	0.226	-1.26	0.208	0.322	1.279	
pkal	0.573	0.189	-1.69	0.091	0.300	1.092	*
psul	0.514	0.155	-2.21	0.027	0.285	0.927	**
pma	0.760	0.294	-0.71	0.478	0.356	1.621	
Constant	0.012	0.006	-9.36	0.000	0.005	0.030	***
Mean dependent var		0.119	SD dependent var			0.324	
Pseudo-squared		0.123	Number of obs			2384.000	
Chi-square		213.541	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)		1571.652	Bayesian crit. (BIC)			1698.736	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$



Lampiran 7. Hasil Analisis Regresi Logistik Model Durasi Mengganggu Pada Masing-Masing Pulau

1. Pulau Sumatera

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	0.580	0.302	1.92	0.054	-0.011 1.172	*
wt	0.622	0.294	2.12	0.034	0.047 1.197	**
exp	0.392	0.239	1.64	0.101	-0.077 0.860	
age	1.269	0.311	4.08	0.000	0.659 1.879	***
Constant	-3.185	0.318	-10.02	0.000	-3.808 -2.562	***
Mean dependent var		0.121	SD dependent var			0.327
Pseudo r-squared		0.061	Number of obs			725.000
Chi-square		32.738	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		513.275	Bayesian crit. (BIC)			536.206

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	0.692	0.308	2.25	0.025	0.089 1.296	**
wt	0.640	0.296	2.16	0.031	0.060 1.220	**
exp	0.475	0.246	1.93	0.053	-0.006 0.957	*
age	1.079	0.343	3.15	0.002	0.407 1.751	***
gend	0.583	0.289	2.02	0.044	0.017 1.149	**
ms	0.679	0.330	2.06	0.040	0.032 1.327	**
ph	-0.268	0.284	-0.94	0.345	-0.824 0.289	
Constant	-3.521	0.373	-9.45	0.000	-4.252 -2.791	***
Mean dependent var		0.121	SD dependent var			0.327
Pseudo r-squared		0.074	Number of obs			725.000
Chi-square		39.448	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		512.565	Bayesian crit. (BIC)			549.254

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	0.567	0.312	1.82	0.069	-0.044 1.179	*
wt	0.659	0.298	2.21	0.027	0.074 1.243	**
exp	0.529	0.251	2.10	0.035	0.036 1.022	**
age	0.991	0.310	2.88	0.004	0.315 1.667	***
gend	0.708	0.296	2.39	0.017	0.128 1.288	**
ms	0.673	0.332	2.03	0.043	0.023 1.324	**
ph	-0.342	0.287	-1.19	0.234	-0.904 0.221	
ra	-0.888	0.243	-3.66	0.000	-1.364 -0.412	***
Constant	-2.985	0.399	-7.49	0.000	-3.766 -2.203	***
Mean dependent var		0.121	SD dependent var			0.327
Pseudo r-squared		0.099	Number of obs			725.000
Chi-square		52.924	Prob > chi2			0.000

Akaike crit. (AIC)

501.089 Bayesian crit. (BIC)

542.364

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.201	0.524	2.29	0.022	0.174 2.228	**
wt	0.899	0.437	2.06	0.039	0.043 1.755	**
exp	0.805	0.360	2.24	0.025	0.100 1.510	**
age	1.110	0.456	2.44	0.015	0.216 2.003	**
gend	0.897	0.426	2.10	0.035	0.062 1.732	**
ms	0.629	0.440	1.43	0.153	0.222 1.491	
ph	-0.381	0.412	-0.92	0.355	-1.188 0.427	
ra	0.615	0.703	0.88	0.382	-0.763 1.994	
edu_ra	-1.061	0.645	-1.65	0.100	-2.325 0.203	
wt_ra	-0.362	0.603	-0.60	0.548	-1.544 0.819	
exp_ra	-0.567	0.504	-1.13	0.260	-1.554 0.420	
age_ra	-0.151	0.731	-0.21	0.836	-1.585 1.283	
gend_ra	-0.346	0.586	-0.59	0.555	-1.495 0.803	
ms_ra	-0.025	0.683	-0.04	0.970	-1.364 1.313	
ph_ra	0.100	0.583	0.17	0.864	-1.043 1.243	
Constant	-3.923	0.613	-6.40	0.000	-5.124 -2.722	***
Mean dependent var		0.121	SD dependent var			0.327
Pseudo r-squared		0.111	Number of obs			725.000
Chi-square		59.505	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		508.508	Bayesian crit. (BIC)			581.887

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	3.323	1.742	2.29	0.022	1.190 9.285	**
wt	2.458	1.074	2.06	0.039	1.044 5.786	**
exp	2.236	0.805	2.24	0.025	1.105 4.527	**
age	3.033	1.382	2.44	0.015	1.242 7.408	**
gend	2.452	1.045	2.10	0.035	1.064 5.653	**
ms	1.876	0.825	1.43	0.153	0.792 4.443	
ph	0.683	0.282	-0.92	0.355	0.305 1.532	
ra	1.850	1.302	0.88	0.382	0.466 7.345	
edu_ra	0.346	0.223	-1.65	0.100	0.091 1.226	
wt_ra	0.696	0.420	-0.60	0.548	0.214 2.269	
exp_ra	-0.567	0.286	-1.13	0.260	0.211 1.522	
age_ra	0.860	0.629	-0.21	0.836	0.205 3.606	
gend_ra	0.708	0.415	-0.59	0.555	0.224 2.232	
ms_ra	0.975	0.666	-0.04	0.970	0.256 3.718	
ph_ra	1.105	0.644	0.17	0.864	0.352 3.464	
Constant	0.020	0.012	-6.40	0.000	0.006 0.066	***
Mean dependent var		0.121	SD dependent var			0.327
Pseudo r-squared		0.111	Number of obs			725.000
Chi-square		59.505	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		508.508	Bayesian crit. (BIC)			581.887

2. Pulau Jawa

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.230	0.619	1.99	0.047	0.016 2.443	**
wt	0.986	0.409	2.41	0.016	0.184 1.787	**
exp	0.317	0.290	1.10	0.273	-0.251 0.885	
age	1.665	0.308	5.40	0.000	1.060 2.269	***
Constant	-4.517	0.665	-6.79	0.000	-5.819 -3.214	***
Mean dependent var	0.110	SD dependent var	0.313			
Pseudo r-squared	0.129	Number of obs	566.000			
Chi-square	58.650	Prob > chi2	0.000			
Akaike crit. (AIC)	350.516	Bayesian crit. (BIC)	372.209			

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.140	0.624	1.83	0.068	-0.083 2.363	*
wt	0.941	0.421	2.23	0.026	0.115 1.767	**
exp	0.352	0.298	1.18	0.238	-0.233 0.936	
age	1.036	0.350	2.96	0.003	0.349 1.723	***
gend	0.260	0.340	0.77	0.444	-0.406 0.926	
ms	1.032	0.341	3.03	0.002	0.363 1.700	***
ph	0.602	0.389	1.55	0.122	-0.160 1.365	
Constant	-5.157	0.747	-6.90	0.000	-6.621 -3.692	***
Mean dependent var	0.110	SD dependent var	0.313			
Pseudo r-squared	0.169	Number of obs	566.000			
Chi-square	65.957	Prob > chi2	0.000			
Akaike crit. (AIC)	341.210	Bayesian crit. (BIC)	375.919			

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	0.989	0.640	1.55	0.122	-0.265 2.242	
wt	0.976	0.436	2.24	0.025	0.122 1.829	**
exp	0.290	0.310	0.93	0.350	-0.318 0.898	
age	0.816	0.366	2.23	0.026	0.099 1.533	**
gend	0.111	0.355	0.31	0.754	-0.584 0.806	
ms	1.287	0.354	3.64	0.000	0.594 1.981	***
ph	0.536	0.406	1.32	0.186	-0.259 1.331	
ra	1.652	0.311	5.31	0.000	1.042 2.262	***
Constant	-5.569	0.795	-7.00	0.000	-7.128 -4.010	***
Mean dependent var	0.110	SD dependent var	0.313			
Pseudo r-squared	0.243	Number of obs	566.000			
Chi-square	95.086	Prob > chi2	0.000			
Akaike crit. (AIC)	314.081	Bayesian crit. (BIC)	353.129			

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.800	1.058	1.70	0.089	-0.274 3.874	*
wt	0.168	0.549	0.31	0.759	-0.907 1.244	
exp	0.240	0.439	0.55	0.585	-0.621 1.102	
age	0.363	0.531	0.68	0.494	-0.678 1.404	
gend	0.236	0.484	0.49	0.626	-0.713 1.184	
ms	1.143	0.534	2.14	0.032	0.097 2.190	**
ph	0.873	0.559	1.56	0.119	-0.223 1.969	
ra	1.725	1.570	1.10	0.272	-1.353 4.803	
edu_ra	-1.445	0.382	-1.02	0.306	-1.123 1.293	
wt_ra	1.759	0.918	1.92	0.055	0.040 3.557	*
exp_ra	0.037	0.630	0.06	0.953	-1.197 1.272	
age_ra	1.012	0.779	1.30	0.194	-0.514 2.539	
gend_ra	-0.271	0.666	-0.41	0.684	-1.576 1.034	
ms_ra	0.398	0.750	0.53	0.596	-1.072 1.868	
ph_ra	-0.749	0.735	-1.02	0.308	-2.189 0.691	
Constant	-5.767	1.158	-4.98	0.000	-8.036 -3.498	***
Mean dependent var		0.110	SD dependent var		0.313	
Pseudo r-squared		0.259	Number of obs		566.000	
Chi-square		101.240	Prob > chi2		0.000	
Akaike crit. (AIC)		321.927	Bayesian crit. (BIC)		391.344	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ **Logistic regression**

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	6.050	6.402	1.70	0.089	0.760 48.143	*
wt	1.183	0.650	0.31	0.759	0.404 3.470	
exp	1.272	0.559	0.55	0.585	0.537 3.009	
age	1.438	0.764	0.68	0.494	0.508 4.073	
gend	1.266	0.612	0.49	0.626	0.490 3.268	
ms	3.137	1.675	2.14	0.032	1.102 8.931	**
ph	2.393	1.338	1.56	0.119	0.800 7.161	
ra	5.613	8.815	1.10	0.272	0.259 121.873	
edu_ra	0.243	0.336	-1.02	0.306	-0.016 3.643	
wt_ra	5.804	5.326	1.92	0.055	0.961 35.060	*
exp_ra	1.038	0.654	0.06	0.953	0.302 3.568	
age_ra	2.752	2.143	1.30	0.194	0.591 12.663	
gend_ra	0.762	0.508	0.41	0.684	0.207 2.812	
ms_ra	1.488	1.116	0.53	0.596	0.342 6.472	
ph_ra	0.473	0.347	-1.02	0.308	0.112 1.995	
Constant	0.003	0.004	-4.98	0.000	0.000 0.030	***
Mean dependent var		0.110	SD dependent var		0.313	
Pseudo r-squared		0.259	Number of obs		566.000	
Chi-square		101.240	Prob > chi2		0.000	
Akaike crit. (AIC)		321.927	Bayesian crit. (BIC)		391.344	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

3. Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.161	1.052	2.05	0.040	0.099 4.223	**
wt	0.217	0.567	0.38	0.702	-0.894 1.328	
exp	0.377	0.480	0.79	0.433	-0.564 1.317	
age	1.150	0.547	2.10	0.036	0.077 2.222	**
Constant	-4.248	1.094	-3.88	0.000	-6.392 -2.104	***
Mean dependent var	0.142					SD dependent var 0.350
Pseudo r-squared	0.104					Number of obs 162.000
Chi-square	13.736					Prob > chi2 0.008
Akaike crit. (AIC)	128.629					Bayesian crit. (BIC) 144.067

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.172	1.068	2.03	0.042	0.078 4.265	**
wt	0.001	0.598	0.00	0.998	-1.171 1.174	
exp	0.549	0.516	1.06	0.287	-0.462 1.561	
age	0.169	0.649	0.26	0.795	-1.104 1.441	
gend	0.236	0.564	0.42	0.676	-0.870 1.342	
ms	1.419	0.577	2.46	0.014	0.289 2.549	**
ph	0.753	0.651	1.16	0.247	-0.523 2.029	
Constant	-5.102	1.256	-4.06	0.000	-7.564 -2.640	***
Mean dependent var	0.142					SD dependent var 0.350
Pseudo r-squared	0.176					Number of obs 162.000
Chi-square	23.275					Prob > chi2 0.002
Akaike crit. (AIC)	125.090					Bayesian crit. (BIC) 149.791

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.277	1.093	2.08	0.037	0.136 4.419	**
wt	-0.119	0.612	-0.19	0.846	-1.319 1.081	
exp	0.537	0.532	1.01	0.313	-0.506 1.580	
age	0.034	0.683	0.05	0.961	-1.305 1.372	
gend	0.227	0.574	0.40	0.693	-0.899 1.352	
ms	1.304	0.593	2.20	0.028	0.142 2.466	**
ph	1.039	0.670	1.55	0.121	-0.275 2.353	
ra	1.426	0.538	2.65	0.008	0.371 2.481	***
Constant	-5.965	1.382	-4.32	0.000	-8.674 -3.256	***
Mean dependent var	0.142					SD dependent var 0.350
Pseudo r-squared	0.233					Number of obs 162.000
Chi-square	30.882					Prob > chi2 0.000
Akaike crit. (AIC)	119.483					Bayesian crit. (BIC) 147.271

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

Du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
Edu	3.662	2.004	1.83	0.068	-0.265 7.589	*
Wt	-0.259	1.001	-0.26	0.796	-2.220 1.702	
Exp	-0.889	0.926	-0.96	0.337	-2.703 0.926	
Age	-0.589	1.198	-0.49	0.623	-2.937 1.758	
Gend	0.771	1.094	0.70	0.481	-1.373 2.914	
Ms	0.431	1.097	0.39	0.695	-1.720 2.582	
Ph	3.991	1.899	2.10	0.036	0.269 7.712	**
Ra	3.559	1.933	1.84	0.066	0.229 7.348	*
edu_ra	-0.967	1.951	-0.50	0.620	-4.791 2.858	
wt_ra	-0.031	1.312	-0.02	0.981	-2.603 2.541	
exp_ra	2.424	1.208	2.01	0.045	0.056 4.792	**
age_ra	1.138	1.564	0.73	0.467	-1.927 4.203	
gend_ra	-0.531	1.371	-0.39	0.698	-3.218 2.155	
ms_ra	1.876	1.432	1.31	0.190	-0.930 4.682	
ph_ra	-3.923	1.991	-1.97	0.049	-7.826 -0.020	**
Constant	-8.976	2.585	-3.47	0.001	-14.042 -3.910	***
Mean dependent var		0.142	SD dependent var			0.350
Pseudo r-squared		0.323	Number of obs			162.000
Chi-square		42.750	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		121.614	Bayesian crit. (BIC)			171.016

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

Du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
Edu	38.929	78.002	1.83	0.068	0.767 1976.190	*
Wt	0.772	0.772	-0.26	0.796	0.109 5.485	
Exp	0.411	0.381	-0.96	0.337	0.067 2.524	
Age	0.555	0.664	-0.49	0.623	0.053 5.801	
Gend	2.161	2.364	0.70	0.481	0.253 18.437	
Ms	1.539	1.689	0.39	0.695	0.179 13.220	
Ph	54.082	102.684	2.10	0.036	1.309 2234.629	**
Ra	35.145	67.925	1.84	0.066	0.796 1552.341	*
edu_ra	0.380	0.742	-0.50	0.620	0.008 17.422	
wt_ra	0.970	1.273	-0.02	0.981	0.074 12.697	
exp_ra	11.289	13.640	2.01	0.045	1.051 120.542	**
age_ra	3.121	4.880	0.73	0.467	0.146 66.889	
gend_ra	0.588	0.806	-0.39	0.698	0.040 8.631	
ms_ra	6.325	9.341	1.31	0.190	0.395 107.933	
ph_ra	0.020	0.639	-1.97	0.049	0.000 0.980	**
Constant	0.000	0.000	-3.47	0.001	0.000 0.020	***
Mean dependent var		0.142	SD dependent var			0.350
Pseudo r-squared		0.323	Number of obs			162.000
Chi-square		42.750	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		121.614	Bayesian crit. (BIC)			171.016

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

4. Pulau Kalimantan

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.512	1.039	2.42	0.016	0.476 4.548	**
wt	0.499	0.454	1.10	0.272	-0.391 1.388	
exp	-0.579	0.436	-1.33	0.184	-1.434 0.275	
age	0.170	0.526	0.32	0.746	-0.860 1.201	
Constant	-4.292	1.046	-4.11	0.000	-6.342 -2.243	***
Mean dependent var		0.115		SD dependent var		0.319
Pseudo r-squared		0.104		Number of obs		244.000
Chi-square		18.088		Prob > chi2		0.001
Akaike crit. (AIC)		165.807		Bayesian crit. (BIC)		183.292

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.548	1.043	2.44	0.015	0.504 4.592	**
wt	0.468	0.463	1.01	0.312	-0.439 1.375	
exp	-0.433	0.453	-0.95	0.339	-1.320 0.455	
age	0.096	0.634	0.15	0.879	-1.147 1.340	
gend	0.054	0.606	0.09	0.929	-1.135 1.243	
ms	-0.276	0.678	-0.41	0.684	-1.605 1.053	
ph	0.565	0.690	0.82	0.413	-0.787 1.917	
Constant	-4.657	1.099	-4.24	0.000	-6.811 -2.503	***
Mean dependent var		0.115		SD dependent var		0.319
Pseudo r-squared		0.113		Number of obs		244.000
Chi-square		19.677		Prob > chi2		0.006
Akaike crit. (AIC)		170.217		Bayesian crit. (BIC)		198.195

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.606	1.051	2.48	0.013	0.546 4.666	**
wt	0.218	0.481	0.45	0.650	-0.725 1.161	
exp	-0.419	0.472	-0.89	0.375	-1.345 0.506	
age	0.163	0.699	0.23	0.816	-1.207 1.532	
gend	0.220	0.672	0.33	0.743	-1.096 1.537	
ms	-0.219	0.764	-0.29	0.774	-1.716 1.278	
ph	0.341	0.765	0.45	0.655	-1.157 1.840	
ra	1.758	0.479	3.67	0.000	0.820 2.697	***
Constant	-5.473	1.156	-4.74	0.000	-7.738 -3.207	***
Mean dependent var		0.115		SD dependent var		0.319
Pseudo r-squared		0.203		Number of obs		244.000
Chi-square		35.255		Prob > chi2		0.000
Akaike crit. (AIC)		156.639		Bayesian crit. (BIC)		188.114

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.794	1.507	1.19	0.234	-1.159 4.747	
wt	1.646	0.968	1.70	0.089	-0.252 3.544	*
exp	0.669	0.928	0.72	0.471	-1.150 2.489	
age	2.072	1.093	1.90	0.058	-0.071 4.215	*
gend	0.228	1.080	0.21	0.833	-1.889 2.346	
ms	-0.487	1.219	-0.40	0.690	-2.876 1.903	
ph	-0.442	1.280	-0.34	0.730	-2.950 2.067	
ra	2.428	1.469	1.65	0.098	-0.432 5.307	*
edu_ra	1.358	1.713	0.79	0.428	-1.998 4.715	
wt_ra	-2.098	1.136	-1.85	0.065	-4.326 0.129	*
exp_ra	-1.475	1.112	-1.33	0.184	-3.654 0.703	
age_ra	-2.949	1.513	-1.95	0.051	-5.914 0.016	*
gend_ra	-0.008	1.424	-0.01	0.996	-2.798 2.783	
ms_ra	0.049	1.615	0.03	0.976	-3.116 3.215	
ph_ra	1.343	1.644	0.82	0.414	-1.879 4.565	
Constant	-6.271	1.535	-4.09	0.000	-9.279 -3.263	***
Mean dependent var		0.115	SD dependent var			0.319
Pseudo r-squared		0.262	Number of obs			244.000
Chi-square		45.631	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		160.264	Bayesian crit. (BIC)			216.218

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	6.013	9.060	1.19	0.234	0.314 115.260	
wt	5.184	5.021	1.70	0.089	0.777 34.597	*
exp	1.953	1.813	0.72	0.471	0.317 12.047	
age	7.939	8.681	1.90	0.058	0.931 67.691	*
gend	1.257	1.358	0.21	0.833	0.151 10.443	
ms	0.615	0.749	-0.40	0.690	0.056 6.706	
ph	0.643	0.823	-0.34	0.730	0.052 7.898	
ra	11.333	16.650	1.65	0.098	0.636 201.814	*
edu_ra	3.890	6.662	0.79	0.428	0.136 111.622	
wt_ra	0.123	0.139	-1.85	0.065	0.011 1.138	*
exp_ra	0.229	0.254	-1.33	0.184	0.026 2.021	
age_ra	0.052	0.079	-1.95	0.051	0.003 1.017	*
gend_ra	0.992	1.413	-0.01	0.996	0.061 16.169	
ms_ra	1.051	1.697	0.03	0.976	0.044 24.896	
ph_ra	3.830	6.296	0.82	0.414	0.153 96.048	
Constant	0.002	0.003	-4.09	0.000	0.000 0.038	***
Mean dependent var		0.115	SD dependent var			0.319
Pseudo r-squared		0.262	Number of obs			244.000
Chi-square		45.631	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		160.264	Bayesian crit. (BIC)			216.218

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

5. Pulau Sulawesi

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	0.771	0.348	2.22	0.027	0.090	1.453 **
wt	1.523	0.452	3.37	0.001	0.636	2.410 ***
exp	0.432	0.331	1.31	0.192	-0.217	1.082
age	0.552	0.408	1.35	0.177	-0.249	1.352
Constant	-3.728	0.498	-7.48	0.000	-4.704	-2.751 ***
Mean dependent var		0.112	SD dependent var			0.316
Pseudo r-squared		0.063	Number of obs			418.000
Chi-square		18.397	Prob > chi2			0.001
Akaike crit. (AIC)		285.530	Bayesian crit. (BIC)			305.708

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	0.774	0.361	2.15	0.032	0.068	1.481 **
wt	1.395	0.456	3.06	0.002	0.501	2.289 ***
exp	0.523	0.339	1.54	0.123	-0.142	1.188
age	0.325	0.442	0.73	0.463	-0.542	1.191
gend	0.491	0.369	1.33	0.184	-0.233	1.215
ms	-0.294	0.430	-0.69	0.493	-1.136	0.548
ph	1.169	0.431	2.71	0.007	0.325	2.013 ***
Constant	-4.623	0.641	-7.21	0.000	-5.880	-3.367 ***
Mean dependent var		0.112	SD dependent var			0.316
Pseudo r-squared		0.089	Number of obs			418.000
Chi-square		26.266	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		283.661	Bayesian crit. (BIC)			315.944

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	0.743	0.362	2.05	0.040	0.034	1.452 **
wt	1.402	0.456	3.08	0.002	0.509	2.295 ***
exp	0.491	0.341	1.44	0.150	-0.177	1.160
age	0.358	0.443	0.81	0.418	-0.509	1.226
gend	0.519	0.370	1.40	0.161	-0.207	1.245
ms	-0.293	0.428	-0.68	0.494	-1.132	0.547
ph	1.163	0.430	2.71	0.007	0.321	2.006 ***
ra	-0.301	0.334	-0.90	0.368	-0.955	0.353
Constant	-4.492	0.656	-6.85	0.000	-5.777	-3.207 ***
Mean dependent var		0.112	SD dependent var			0.316
Pseudo r-squared		0.092	Number of obs			418.000
Chi-square		27.087	Prob > chi2			0.001
Akaike crit. (AIC)		284.840	Bayesian crit. (BIC)			321.159

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	0.903	0.450	2.01	0.045	0.021 1.786	**
wt	1.140	0.510	2.23	0.025	0.140 2.139	**
exp	0.667	0.447	1.49	0.135	-0.209 1.543	
age	0.909	0.556	1.64	0.102	-0.180 1.998	
gend	0.809	0.457	1.77	0.077	-0.088 1.705	*
ms	-0.056	0.527	-0.11	0.915	-1.089 0.977	
ph	1.407	0.540	2.61	0.009	0.349 2.464	***
ra	0.152	0.979	0.16	0.877	-1.768 2.071	
edu_ra	-0.329	0.737	-0.45	0.655	-1.774 1.115	
wt_ra	1.282	0.991	1.29	0.196	-0.661 3.225	
exp_ra	-0.352	0.715	-0.49	0.622	-1.753 1.048	
age_ra	-1.279	0.941	-1.36	0.174	-3.123 0.566	
gend_ra	-0.915	0.715	-1.28	0.201	-2.317 0.486	
ms_ra	-0.462	0.924	-0.50	0.617	-2.272 1.349	
ph_ra	-0.636	0.815	-0.78	0.435	-2.234 0.962	
Constant	-4.920	0.766	-6.42	0.000	-6.422 -3.418	***
Mean dependent var		0.112	SD dependent var			0.316
Pseudo r-squared		0.115	Number of obs			418.000
Chi-square		33.825	Prob > chi2			0.004
Akaike crit. (AIC)		292.102	Bayesian crit. (BIC)			356.670

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	2.467	1.111	2.01	0.045	1.021 5.964	**
wt	3.125	1.593	2.23	0.025	1.151 8.489	**
exp	1.948	0.871	1.49	0.135	0.812 4.678	
age	2.482	1.379	1.64	0.102	0.835 7.376	
gend	2.245	1.027	1.77	0.077	0.916 5.503	*
ms	0.945	0.498	-0.11	0.915	-0.356 2.656	
ph	4.082	2.203	2.61	0.009	1.417 11.755	***
ra	1.164	1.140	0.16	0.877	-0.171 7.935	
edu_ra	0.719	0.530	-0.45	0.655	-0.170 3.050	
wt_ra	3.603	3.572	1.29	0.196	-0.516 25.145	
exp_ra	0.703	0.502	-0.49	0.622	-0.171 2.852	
age_ra	0.278	0.262	-1.36	0.174	-0.044 1.761	
gend_ra	0.400	0.286	-1.28	0.201	-0.099 1.627	
ms_ra	0.620	0.582	-0.50	0.617	-0.103 3.852	
ph_ra	0.530	0.432	-0.78	0.435	-0.107 2.617	
Constant	0.007	0.006	-6.42	0.000	0.002 0.033	***
Mean dependent var		0.112	SD dependent var			0.316
Pseudo r-squared		0.115	Number of obs			418.000
Chi-square		33.825	Prob > chi2			0.004
Akaike crit. (AIC)		292.102	Bayesian crit. (BIC)			356.670

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

6. Pulau Maluku

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.446	0.238	6.08	0.000	0.980 1.913	***
wt	0.785	0.174	4.53	0.000	0.445 1.125	***
exp	0.178	0.133	1.34	0.181	-0.083 0.439	
age	0.927	0.160	5.79	0.000	0.613 1.241	***
Constant	-4.012	0.252	-15.91	0.000	-4.506 -3.518	***
Mean dependent var	0.119	SD dependent var			0.324	
Pseudo r-squared	0.086	Number of obs			2384.000	
Chi-square	150.274	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)	1600.919	Bayesian crit. (BIC)			1629.801	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.461	0.239	6.11	0.000	0.993 1.930	***
wt	0.768	0.175	4.40	0.000	0.426 1.111	***
exp	0.224	0.135	1.66	0.096	-0.040 0.489	*
age	0.608	0.183	3.32	0.001	0.249 0.967	***
gend	0.103	0.161	0.64	0.523	-0.213 0.419	
ms	0.426	0.178	2.40	0.016	0.079 0.774	**
ph	0.314	0.173	1.82	0.069	-0.025 0.654	*
Constant	-4.293	0.272	-15.78	0.000	-4.827 -3.760	***
Mean dependent var	0.119	SD dependent var			0.324	
Pseudo r-squared	0.095	Number of obs			2384.000	
Chi-square	165.049	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)	1592.144	Bayesian crit. (BIC)			1638.356	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.420	0.240	5.92	0.000	0.950 1.889	***
wt	0.740	0.175	4.22	0.000	0.396 1.084	***
exp	0.254	0.136	1.86	0.062	-0.013 0.521	*
age	0.535	0.185	2.89	0.004	0.173 0.898	***
gend	0.150	0.163	0.92	0.358	-0.170 0.469	
ms	0.452	0.178	2.53	0.011	0.102 0.802	**
ph	0.308	0.174	1.76	0.078	-0.034 0.650	*
ra	-0.693	0.133	-5.21	0.000	-0.953 -0.432	***
Constant	-3.872	0.282	-13.74	0.000	-4.425 -3.320	***
Mean dependent var	0.119	SD dependent var			0.324	
Pseudo r-squared	0.110	Number of obs			2384.000	
Chi-square	192.204	Prob > chi2			0.000	
Akaike crit. (AIC)	1566.989	Bayesian crit. (BIC)			1618.977	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	1.881	0.386	4.87	0.000	1.124 2.639	***
wt	1.008	0.265	3.80	0.000	0.489 1.527	***
exp	0.450	0.194	2.32	0.020	0.070 0.830	**
age	0.648	0.252	2.57	0.010	0.154 1.141	**
gend	0.361	0.231	1.57	0.117	-0.091 0.813	
ms	0.586	0.245	2.39	0.017	0.105 1.067	**
ph	0.294	0.249	1.18	0.238	-0.194 0.782	
ra	0.790	0.490	1.61	0.107	0.171 1.750	
edu_ra	-0.716	0.454	-1.58	0.115	-1.606 0.174	
wt_ra	-0.460	0.350	-1.32	0.188	-1.146 0.225	
exp_ra	-0.404	0.273	-1.48	0.138	-0.939 0.130	
age_ra	-0.295	0.383	-0.77	0.441	-1.046 0.456	
gend_ra	-0.451	0.329	-1.37	0.170	-1.096 0.194	
ms_ra	-0.319	0.364	-0.88	0.381	-1.033 0.395	
ph_ra	0.060	0.350	0.17	0.863	-0.625 0.745	
Constant	-4.752	0.438	-10.86	0.000	-5.610 -3.895	***
Mean dependent var		0.119	SD dependent var			0.324
Pseudo r-squared		0.118	Number of obs			2384.000
Chi-square		204.882	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1568.310	Bayesian crit. (BIC)			1660.735

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	6.563	2.535	4.87	0.000	3.079 13.992	***
wt	2.740	0.726	3.80	0.000	1.630 4.605	***
exp	1.569	0.304	2.32	0.020	1.073 2.294	**
age	1.911	0.481	2.57	0.010	1.166 3.131	**
gend	1.435	0.331	1.57	0.117	0.913 2.254	
ms	1.797	0.441	2.39	0.017	1.111 2.906	**
ph	1.342	0.334	1.18	0.238	0.824 2.186	
ra	2.203	1.080	1.61	0.107	0.843 5.757	
edu_ra	0.489	0.222	1.58	0.115	0.201 1.190	
wt_ra	0.651	0.221	1.32	0.188	0.318 1.253	
exp_ra	0.668	0.182	1.48	0.138	0.391 1.139	
age_ra	0.744	0.285	0.77	0.441	0.351 1.578	
gend_ra	0.637	0.209	-1.37	0.170	0.334 1.214	
ms_ra	0.727	0.265	-0.88	0.381	0.356 1.484	
ph_ra	1.062	0.571	0.17	0.863	0.535 2.107	
Constant	0.009	0.004	-10.86	0.000	0.004 0.020	***
Mean dependent var		0.119	SD dependent var			0.324
Pseudo r-squared		0.118	Number of obs			2384.000
Chi-square		204.882	Prob > chi2			0.000
Akaike crit. (AIC)		1568.310	Bayesian crit. (BIC)			1660.735

7. Pulau Papua

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	-1.142	0.506	-2.26	0.024	-2.134 -0.151	**
wt	0.158	0.511	0.31	0.756	-0.842 1.159	
exp	0.598	0.603	0.99	0.321	-0.584 1.781	
age	0.840	0.768	1.09	0.274	-0.665 2.344	
Constant	-1.930	0.603	-3.20	0.001	-3.112 -0.749	***
Mean dependent var	0.130					SD dependent var 0.338
Pseudo r-squared	0.065					Number of obs 161.000
Chi-square	8.114					Prob > chi2 0.087
Akaike crit. (AIC)	126.568					Bayesian crit. (BIC) 141.975

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	-1.379	0.533	-2.59	0.010	-2.423 -0.335	**
wt	0.030	0.532	0.06	0.954	-1.012 1.073	
exp	0.760	0.636	1.19	0.232	-0.487 2.007	
age	1.999	0.997	2.01	0.045	0.045 3.952	**
gend	-1.101	0.815	-1.35	0.177	-2.698 0.497	
ms	2.835	1.389	2.04	0.041	0.112 5.557	**
ph	0.688	0.732	0.94	0.347	-0.746 2.123	
Constant	-4.529	1.503	-3.01	0.003	-7.475 -1.584	***
Mean dependent var	0.130					SD dependent var 0.338
Pseudo r-squared	0.122					Number of obs 161.000
Chi-square	15.265					Prob > chi2 0.033
Akaike crit. (AIC)	125.417					Bayesian crit. (BIC) 150.068

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
edu	-1.435	0.539	-2.66	0.008	-2.492 -0.377	***
wt	0.031	0.534	0.06	0.954	-1.011 1.078	
exp	0.771	0.637	1.21	0.226	-0.478 2.020	
age	2.102	1.007	2.09	0.037	0.128 4.076	**
gend	-1.100	0.812	-1.36	0.175	-2.691 0.491	
ms	2.893	1.396	2.07	0.038	0.158 5.629	**
ph	0.670	0.720	0.93	0.352	-0.741 2.081	
ra	0.692	0.515	1.35	0.179	-0.317 1.701	
Constant	-4.960	1.552	-3.19	0.001	-8.003 -1.917	***
Mean dependent var	0.130					SD dependent var 0.338
Pseudo r-squared	0.137					Number of obs 161.000
Chi-square	17.140					Prob > chi2 0.029
Akaike crit. (AIC)	125.542					Bayesian crit. (BIC) 153.275

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	-2.398	1.087	-2.21	0.027	-4.529	-0.268	**
wt	1.936	1.268	1.53	0.127	-0.549	4.422	
exp	0.320	1.435	0.22	0.824	-2.493	3.133	
age	2.054	1.440	1.43	0.154	-0.768	4.875	
gend	-3.162	1.416	-2.23	0.026	-5.938	-0.386	**
ms	3.806	1.841	2.07	0.039	0.198	7.413	**
ph	2.492	1.254	1.99	0.047	0.035	4.949	**
ra	1.384	1.676	0.83	0.409	1.902	4.670	
edu_ra	1.125	1.314	0.86	0.392	1.450	3.700	
wt_ra	-2.602	1.462	-1.78	0.075	-5.467	0.263	*
exp_ra	0.003	1.624	0.00	0.999	-3.179	3.185	
age_ra	0.652	2.190	0.30	0.766	-3.639	4.944	
gend_ra	4.002	2.089	1.92	0.055	-0.092	8.095	*
ms_ra	0.857	2.157	0.40	0.691	-3.371	5.086	
ph_ra	-3.982	1.987	-2.00	0.045	-7.876	-0.089	**
Constant	-6.641	2.017	-3.29	0.001	-10.593	-2.688	***
Mean dependent var		0.130	SD dependent var			0.338	
Pseudo r-squared		0.224	Number of obs			161.000	
Chi-square		27.922	Prob > chi2			0.022	
Akaike crit. (AIC)		128.760	Bayesian crit. (BIC)			178.063	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Logistic regression

du	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
edu	0.091	0.099	-2.21	0.027	0.011	0.765	**
wt	6.932	8.791	1.53	0.127	0.577	83.237	
exp	1.377	1.976	0.22	0.824	0.083	22.939	
age	7.795	11.222	1.43	0.154	0.464	130.981	
gend	0.042	0.060	-2.23	0.026	0.003	0.680	**
ms	44.950	82.733	2.07	0.039	1.219	1657.353	**
ph	12.087	15.151	1.99	0.047	1.036	141.034	**
ra	3.991	6.690	0.83	0.409	0.149	106.665	
edu_ra	3.081	4.048	0.86	0.392	0.235	40.459	
wt_ra	0.074	0.108	-1.78	0.075	0.004	1.301	*
exp_ra	1.003	1.628	0.00	0.999	0.041	24.168	
age_ra	1.920	4.203	0.30	0.766	0.026	140.297	
gend_ra	54.681	114.206	1.92	0.055	0.912	3278.298	*
ms_ra	2.357	5.085	0.40	0.691	0.034	161.729	
ph_ra	0.019	0.037	-2.00	0.045	0.000	0.915	**
Constant	0.001	0.003	-3.29	0.001	0.000	0.068	***
Mean dependent var		0.130	SD dependent var			0.338	
Pseudo r-squared		0.224	Number of obs			161.000	
Chi-square		27.922	Prob > chi2			0.022	
Akaike crit. (AIC)		128.760	Bayesian crit. (BIC)			178.063	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$